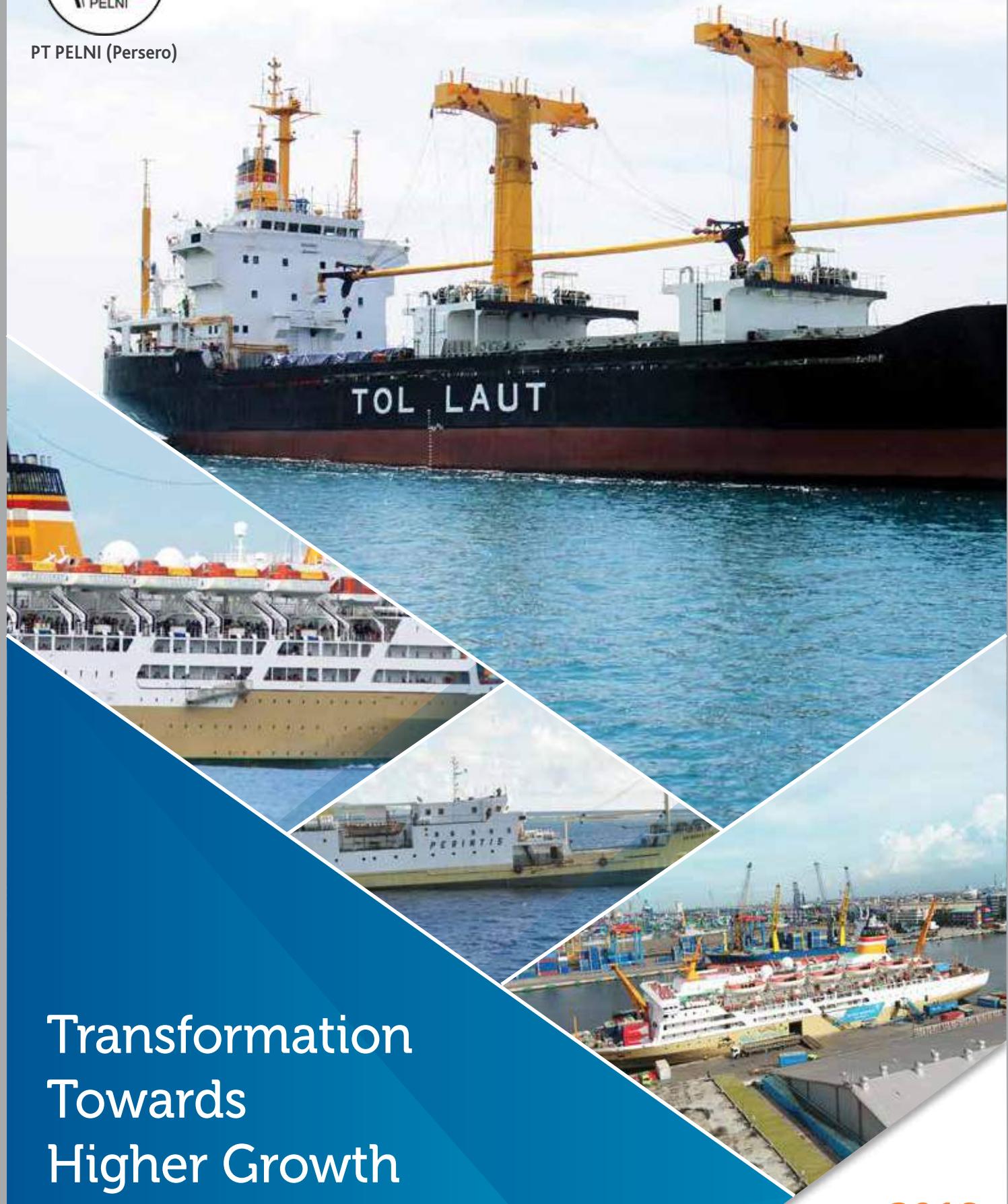




PT PELNI (Persero)



# Transformation Towards Higher Growth

Transformasi Menuju Pertumbuhan Kinerja

**2016**

Laporan Tahunan  
Annual Report



# Penjelasan Tema

## Cover Story



Setelah berhasil melalui fase konsolidasi, PT PELNI (Persero) terus melakukan transformasi sepanjang tahun 2016. Perkembangan bisnis PELNI dan penugasan dari Pemerintah, khususnya armada Kapal Tol Laut dan Kapal Perintis mendorong segenap Insan PELNI untuk beradaptasi dalam menjawab tantangan dan peluang dengan melakukan serangkaian transformasi meliputi transformasi bisnis, transformasi budaya perusahaan dan transformasi Sumber Daya Manusia.

Transformasi bisnis diarahkan untuk mengintegrasikan induk dan anak perusahaan meliputi bisnis kapal penumpang, logistik dan kargo serta pelayanan jasa. Transformasi budaya mengarah pada standar pelayanan pelanggan sesuai *best practice* dan *service excellence*. Transformasi Sumber Daya Manusia mengadaptasi *Individual Development Plan* untuk mengoptimalkan seluruh potensi pertumbuhan PELNI di masa yang akan datang.

Melalui program transformasi tersebut, PELNI menyasar pertumbuhan yang lebih tinggi melalui upaya untuk mendapatkan pasar baru, meningkatkan efisiensi biaya, meningkatkan kapabilitas, menggunakan teknologi dan mengubah struktur organisasi serta senantiasa mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya dalam sektor maritim dan pelayaran nasional.

## Transformation Towards Higher Growth

Transformasi Menuju Pertumbuhan Kinerja

*After successfully completing the consolidation phase, PT PELNI (Persero) continued to transformation phase throughout 2016. PELNI's business growth and assignment from the Government, especially Tol Laut and Pioneer vessels fleet had encouraged all of PELNI People to adapt in answering every challenge and opportunity through transformation program including business transformation, corporate culture transformation and People transformation.*

*Business transformation is directed to integrate holding company and all subsidiaries covering passenger ship, cargo and services. Culture transformation leads to customer service standard based on best practice and service excellence. People transformation adapts Individual Development Plan to optimize entire growth potential of PELNI in the future.*

*Through these transformation programs, PELNI pursues higher growth by penetrating new market, improving cost efficiency, increasing capability, technology application and revising the organization structure as well as targeting a sustainable growth to support the Government's program, especially in maritime and national shipping sectors.*

# Kesinambungan Tema

Theme Continuity



2016

## Transformasi Menuju Pertumbuhan Kinerja

PT PELNI (Persero) terus melakukan transformasi sepanjang tahun 2016 meliputi transformasi bisnis, transformasi budaya perusahaan dan transformasi Sumber Daya Manusia. Transformasi bisnis diarahkan untuk mengintegrasikan induk dan anak perusahaan meliputi bisnis kapal penumpang, logistik dan kargo serta pelayanan jasa. Transformasi budaya mengarah pada standar pelayanan pelanggan sesuai *best practice* dan *service excellence*. Transformasi Sumber Daya Manusia mengadaptasi *Individual Development Plan* untuk mengoptimalkan seluruh potensi pertumbuhan PELNI di masa yang akan datang.

## Transformation Towards Higher Growth

*PT PELNI (Persero) continued to transformation phase throughout 2016 including business transformation, corporate culture transformation and People transformation. The Business transformation is directed to integrate holding company and all subsidiaries covering passenger ship, cargo and services. Culture transformation leads to customer service standard based on best practice and service excellence. People transformation adapts Individual Development Plan to optimize entire growth potential of PELNI in the future.*

**2015****Perjalanan Untuk perubahan Dengan Membangun Budaya Kerja**

Menjadi sebuah entitas perusahaan dengan fungsi vital, keselarasan bergerak menjadi poin penting bagi PT PELNI (Persero) untuk meraih kinerja yang unggul. Ibarat kapal yang berlayar di tengah samudera, perusahaan memiliki kompas yang menunjukkan arah dan awak yang menopang gerak kapal sehingga sampai ke tujuan. Sumber Daya Manusia sebagai awak dan aset perusahaan menjadi salah satu komponen signifikan dalam menjamin keberlangsungan tata kelola perusahaan yang dinamis. Banyaknya yang bekerja dengan tugas dan fungsi masing-masing baik di dalam maupun di luar perusahaan sehingga dibutuhkan pemahaman yang padu mengenai visi dan misi PT PELNI (Persero). Dengan demikian maka satu langkah lebih dekat bagi PT PELNI (Persero) untuk membuktikan diri dengan berkontribusi nyata untuk negeri

**Journey to Change, Building the Work Culture**

*As a corporate entity with vital functions, a harmony moves to be an important point for PT PELNI (Persero) to achieve its superiority performance. Like a ship sailing in the ocean, this company has its own compass to show the direction and has crews that sustain the ship's motion focus to the destination. Human resources are the crews and assets of the company to be one of the significant components to ensure the sustainability of corporate governance dynamic. Many parties work in their own respective duties and functions, both inside and outside the company, so it takes a solid understanding of the vision and mission PT PELNI (Persero). Then, one step will be closer to PT PELNI (Persero) to prove itself in a real contribution to the country.*

**2014****Bahtera Penyatu Nusantara Jelajahi Wisata Bahari**

Semenjak tahun 2014, PT PELNI (Persero) telah berinovasi menyelenggarakan paket wisata bahari dengan menjadikan kapal PELNI sebagai hotel terapung di tiga lokasi wisata, yaitu Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Raja Ampat (Papua Barat) dan Pulau Komodo. Dan ke depannya, masih banyak destinasi wisata bahari nusantara lainnya yang sudah dibidik dan segera dijajaki oleh PT PELNI (Persero) untuk dijadikan paket program perjalanan wisata bahari dari perusahaan pelayaran ini.

Sebagai perusahaan pelayaran nasional terkemuka di Tanah Air, PT PELNI (Persero) memang tak pernah berhenti dalam meng-improve program-program bisnisnya, dan selalu berusaha selangkah lebih maju di depan. Ini adalah bukti komitmen PT PELNI (Persero) untuk selalu menjadi yang terdepan di dalam industri pelayaran di Tanah Air.

**Ship that Unites The Country, Sailing the Marine Tourism**

*Since 2014, PT PELNI (Persero) has made several innovations by making PELNI's ships as floating hotels, located in some places such as; Komodo Islands (East Nusa Tenggara), Wakatobi (South East Sulawesi), and Raja Ampat (West Papua). In the future, there will be a lot of destination which have been targeted and studied by PT PELNI (Persero) for marine tourism program of the national shipping company.*

*As a well-known national shipping company, PT PELNI (Persero) has never stopped in perfecting its business programs and has always tried to be one step ahead. This is the proof of PT PELNI (Persero) commitment to be the leader of shipping industry in this country.*

# Sangkalan dan Batas Tanggung Jawab

## Disclaimer

Laporan Tahunan ini berisikan pernyataan-pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pengertian perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan tersebut bersifat prospektif yang memiliki risiko dan ketidakpastian serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang tertulis dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang dari Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa segala tindakan yang telah diambil untuk memastikan keabsahan dokumen ini akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan ini juga memuat kata "Perusahaan", "Perseroan", PT PELNI atau "PT PELNI (Persero)" yang didefinisikan sebagai PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (Persero).

This annual report contains financial condition, operation results, projections, plans, strategies, policy, as well as the Company's objectives, which is classified as forward-looking statements in the implementation of the prevailing laws, excluding historical matters.

Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this annual report is prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid document presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the words "Company," "The Company," PT PELNI or "PT PELNI (Persero), hereinafter referred to as PT PELAYARAN INDONESIA (Persero).







39 Ikhtisar Kinerja 2016  
Performance Highlights  
2016

45 Laporan Kepada  
Pemangku Kepentingan  
Report To The Stakeholders

77 Profil Perusahaan  
Company Profile

127 Fungsi Penunjang  
Bisnis  
Business Supporting Function

# Daftar Isi

## Table of Contents

**01**

**Ikhtisar Kinerja 2016**  
Performance Highlights 2016



40 Ikhtisar Keuangan  
Financial Highlights

41 Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting  
Chart of Key Financial Highlights

**02**

**Laporan Kepada  
Pemangku  
Kepentingan**  
Report To The Stakeholders



47 Laporan Dewan Komisaris

Report from Board of Commissioners

52 Profil Dewan Komisaris

Profile of Board of Commissioners

59 Laporan Direksi

Report from Board of Directors

68 Profil Direksi

Profile of Board of Directors

74 Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016

Responsibility on Annual Report 2016

**03**

**Profil Perusahaan**  
Company Profile



78 Identitas Perusahaan

Corporate Identity

79 Sejarah Singkat

Brief History

80 Jejak Langkah Perusahaan

Milestones

82 Bidang Usaha

Line of Business

83 Produk dan Jasa

Products And Services

90 Visi dan Misi

Vision and Mission

91 Budaya Perusahaan

Corporate Culture

92 Struktur Organisasi

Organization Structure

96 Pejabat Eksekutif

Executives

97 Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

97 Kronologi Pencatatan Saham

Shares Listing Chronology

97 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

98 Struktur Grup Perusahaan

Corporate Group Structure

99 Entitas Anak & Asosiasi

Subsidiary & Association

102 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Stock Market Supporting Institution And Professions

104 Peta Wilayah Operasi Jaringan Trayek Kapal

Ship Route Network Operational Area

112 Nama dan Alamat Anak Perusahaan, Kantor Cabang dan Kantor  
Perwakilan

Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative  
Office

116 Informasi Pada Website Perusahaan

Information at Company Website

117 Peristiwa Penting

Event Highlights 2016

169 Analisa dan Pembahasan  
Manajemen  
Management Discussion and  
Analysis

219 Tata Kelola Perusahaan  
Good Corporate  
Governance

345 Tanggung Jawab Sosial  
Perusahaan  
Corporate Social Responsibility

363 Laporan Keuangan  
Konsolidasian  
Consolidated Financial Report

04

## Fungsi Penunjang Bisnis

Business Supporting Function



128 Sumber Daya Manusia  
Human Resources

144 Teknologi Informasi  
Information Technology

160 Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa  
Procurement Governance

05

## Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and  
Analysis



170 Tinjauan Makroekonomi  
Macroeconomic Review

172 Tinjauan Industri Pelayaran  
Shipping Industry Outlook

173 Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha  
Performance Review By Business Segment

178 Tinjauan Kinerja Keuangan  
Financial Review

06

## Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



223 Roadmap GCG  
GCG Road Map

224 Asesmen GCG  
GCG Assessment

237 Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali  
Ultimate And Controlling Shareholder Informations

238 Struktur Organ GCG Perusahaan  
Corporate GCG Structure

239 Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meetings of Shareholders

245 Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

253 Komisaris Independen  
Independent Commissioner

255 Direksi  
Board of Directors

263 Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat  
Board of Commissioners Attendance Frequency

274 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi  
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration  
Policy

279 Keberagaman Komposisi Direksi Dan Dewan Komisaris  
Board of Directors and Board of Commissioners Composition  
Diversity

281 Penilaian Kinerja Direksi Dan Dewan Komisaris  
Board of Commissioners and Board of Directors Performance  
Assessment

287 Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris Dan  
Pemegang Saham  
Affiliation of Board of Directors, Board of Commissioners and  
Shareholders

291 Komite Audit  
Audit Committee

299 Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi  
Nomination and/or Remuneration Function

300 Komite Kebijakan Risiko  
Risk Policy Committee

306 Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary

308 Satuan Pengawasan Intern (SPI)  
Internal Audit Unit (SPI)

316 Auditor Eksternal  
External Auditor

317 Manajemen Risiko  
Risk Management

329 Etika Bisnis  
Business Ethics

333 Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Perusahaan  
Litigation Involving the Company

336 Akses Informasi Dan Data Perusahaan  
Corporate Data And Information Access

337 Sistem Pelaporan Pelanggaran  
Whistleblowing System

07

## Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



348 Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup  
Social Responsibility In Environment

350 Tanggung Jawab Sosial Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
(K3)  
Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE)  
Aspect

354 Tanggung Jawab Sosial Bidang Kemasyarakatan  
Social Responsibility in Community Sector

357 Tanggung Jawab Sosial Kepada Pelanggan  
Social Responsibility to Customers

360 Call Flow General Complaint  
Call Flow General Complaint

08

## Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Report





# Kriteria Annual Report Award 2016

## Annual Report Award Criteria 2016

No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
<b>I. Umum/General Provisions</b>				
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris <i>The Annual Report shall be written in the good Indonesian, and also recommended to present this report in English.</i>			✓
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca <i>The Annual Report shall be printed with a good quality and using readable font type and size</i>			✓
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas <i>The Annual Report shall present corporate identity obviously</i>	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	Company's Name and Annual Report period shall be presented at: 1. Front Cover; 2. Spine; 3. Back Cover; and 4. Every Page	✓
4	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan <i>The Annual Report shall be uploaded at the Company's Website</i>	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	Including recent and 4 recent years Annual Report.	✓
<b>II. Ikhtisar Data Keuangan Penting/Key Financial Highlights</b>				
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Information of comparatives statements of incomes within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Distribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan; a. Distribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Distribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	<i>The information includes:</i> 1. Revenue/Sales; 2. Earning (loss); a. Attributable to owner of parent entity; and b. Attributable to non-controlling interest 3. Comprehensive Income for the year; a. Attributable to owner of parent entity; and b. Attributable to non-controlling interest 4. Profit (loss) per share). <i>Notes: if the Company does not have subsidiary, the Company shall present total statements of profit (loss) and comprehensive income for current period.</i>	40



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Information of comparative financial positions within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	<i>The information includes:</i> 1. Total investment with associations; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity.	40
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Comparative financial ratio within recent 3 (three) fiscal years or since the beginning of operation, if the Company commences its business activity less than 3 (three) years</i>	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	<i>The information covers 5 (five) common financial ratio that are relevant with the Company's industry.</i>	41
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik <i>Shares Price Information in Table and Chart</i>	1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.  Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	1. <i>Total Shares Outstanding</i> 2. <i>Information as table includes:</i>  a. <i>Market capitalization based on price at the Stock Exchange where the shares are listed;</i> b. <i>The highest, lowest and closing shares prices based on price at the Stock Exchange where the shares are listed</i> c. <i>Shares trading volume at the Stock Exchange where the shares are listed.</i>  3. <i>Information in chart is at least including:</i> a. <i>Closing price based on price at the Stock Exchange where the shares are listed;</i> b. <i>Shares trading volume at Stock Exchange where shares trading is at the Stock Exchange where the Company's shares are listed.</i>  <i>For every quarter in the last 2 years.</i>	97



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Informasi mengenai obligasi, suukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir <i>Information on issued Bonds, Sukuk or Converted Bonds within recent 2 (two) fiscal years</i>	<p>Informasi memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>);</li> <li>Tingkat bunga/imbalan;</li> <li>Tanggal jatuh tempo; dan</li> <li>Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016.</li> </ol> <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.</p>	<p><i>The information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Total bonds/sukuk/converted bonds outstanding;</i></li> <li><i>Interest/yield rate;</i></li> <li><i>Date of Maturity; and</i></li> <li><i>Bonds/Sukuk Rating in 2015 and 2016</i></li> </ol> <p><i>Notes: if the Company did not have bonds/sukuk/converted bonds, the condition shall be reported.</i></p>	97

### III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi/*Report from Board of Commissioners and Board of Directors*

1	Laporan Dewan Komisaris <i>Report from Board of Commissioners</i>	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaianya;</li> <li>Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;</li> <li>Pandangan atas penerapan/ pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan</li> <li>Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.</li> </ol>	<p><i>Contains the followings:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Assessment on the Board of Directors Performance in the course of Company's management altogether with the assessment basis;</i></li> <li><i>View on the Company's business prospect prepared by the Board of Directors and basis for the consideration;</i></li> <li><i>View on Whistle Blowing System (WBS) implementation and role of the Board of Commissioners in the WBS practice; and</i></li> <li><i>Change to Board of Commissioners composition altogether with the reason (if any).</i></li> </ol>	47-51
2	Laporan Direksi <i>Report from Board of Directors</i>	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain:           <ol style="list-style-type: none"> <li>kebijakan strategis;</li> <li>perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan</li> <li>kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya;</li> </ol> </li> <li>Analisis tentang prospek usaha;</li> <li>Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan</li> <li>Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.</li> </ol>	<p><i>Contains the followings:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Analysis on the Company's performance including :</i> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>strategic policy;</i></li> <li><i>comparison between target and realization; and</i></li> <li><i>issues experienced by the Company and settlement plants;</i></li> </ol> </li> <li><i>Business prospect analysis;</i></li> <li><i>Corporate governance practice; and</i></li> <li><i>Change to Board of Directors composition altogether with the reason (if any).</i></li> </ol>	59-67



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi <i>Signatures of the Board of Directors and Board of Commissioners Members</i>	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	<i>Contains the followings:</i> 1. <i>The signatures are disclosed in separated sheet;</i> 2. <i>Board of Directors and Board of Commissioners Responsibility Statement upon the Authenticity of the Annual Report Contens;</i> 3. <i>Signed by all Board of Directors and Board of Commissioners Members by declaring their name and position; and</i> 4. <i>Written explanation in a separated letter for any Board of Directors or Board of Commissioners member not signing the Annual Report, or: written explanation in a separated letter for other members if the written explanation from respective member is unavailable.</i>	74-75

#### IV. Profil Perusahaan/Company Profile

1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan <i>Name and Full Address of the Company</i>	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	<i>The information includes name and address, zip code, phone number, fax number, email and website.</i>	78
2	Riwayat singkat perusahaan <i>Brief History of the Company</i>	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	<i>Includes, among others: date/year of establishment, name and effective date of the Company's name change.</i>  <i>Notes: if the Company's not doing any name changes, the condition shall be disclosed.</i>	79
3	Bidang usaha <i>Line of Business</i>	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	<i>The description includes:</i> 1. <i>Business activity based on the latest Articles of Association;</i>  2. <i>Business activity that is operated; and</i> 3. <i>Products and services provided.</i>	82
4	Struktur Organisasi <i>Organization Structure</i>	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.	<i>In chart, including name and position at least until one level below the Board of Directors</i>	92-93



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan <i>Vision and Mission</i>	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direview dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan ( <i>corporate culture</i> ) yang dimiliki perusahaan.	<i>Includes:</i> 1. Vision; 2. Mission; and 3. Explanation of the Vision and Mission <i>Approval by the Board of Directors/ Board of Commissioners</i> 4. Statements of Corporate Culture	90-91
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris <i>Identity and Brief Profile of Board of Commissioners Members</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi & Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	<i>The information includes:</i> 1. Name; 2. Position (including position in other companies or organizations); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (Major and Educational Institution) 6. Career History (Position, Institution & Serving Period); and 7. Appointment History (period and position) as member of Board of Commissioners in the Company since initial appointment.	52-57
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi <i>Identity and Brief Profile of Board of Directors Members</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	<i>The information includes:</i> 1. Name; 2. Position (including position in other companies or organizations); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (Major and Educational Institution) 6. Career History (Position, Institution and Serving Period); and 7. Appointment History (period and position) as member of Board of Directors in the Company since initial appointment.	68-73



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
8	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing- masing level organisasi <i>Employee Demography (2 years comparative) and description of their competency development (i.e. employee education and training aspects)</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing- masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing- masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	<i>The information includes:</i> 1. Employee demography by organization level; 2. Employee demography by education level; 3. Employee demography by employment status; 4. Employee competency development program initiated in recent fiscal year consists of training participants (position level), type of training, and purpose of the training; and 5. Realization of employee competency development budget.	133-134
9	Komposisi Pemegang Saham <i>Shareholders Composition</i>	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	<i>Contains the followings:</i> 1. List of Top 20 Shareholders Name and Ownership Percentage;  2. Name of Shareholders and ownership percentage, including: a. Name of Shareholders with 5% or higher Shares Ownership; and b. Public shareholders with less than 5% shares ownership; and the ownership percentage. 3. Name of Director and Commissioner with Shares Ownership;  <i>Notes: If the Board of Directors and Board of Commissioners do not have direct shares ownership, the condition shall be disclosed.</i>	97
10	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi <i>List of subsidiary and/or association</i>	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	<i>The information in tables includes:</i> 1. Subsidiary and Association;  2. Shares ownership percentage; 3. Description of business line of the subsidiary and/or association; and 4. Description of operational status of the subsidiary and/or association (operating or not yet operated)	99



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
11	Struktur Grup Perusahaan <i>Company Group Structure</i>	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	<i>Group Structure as chart illustrating the subsidiary, association, joint venture and special purpose vehicle (SPV).</i>	98
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i> ) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku <i>Shares Listing Chronology (including private placement) and/or shares listing since the initial issuance until end of fiscal year</i>	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi ( <i>corporate action</i> ); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi ( <i>corporate action</i> ); dan 3. Nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	<i>Includes the information, as follows:</i> 1. <i>Years of shares listing, total shares, shares par value and shares offering prices for each corporate action.</i> 2. <i>Total shares listed after each corporate action; and</i>  3. <i>Name of the stock exchange where the shares are listed.</i> <i>Notes: If the Company does not have shares listing chronology, the condition shall be disclosed.</i>	97
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku <i>Other Securities Listing Issuance and/or Listing Chronology since the initial issuance until end of fiscal year</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	<i>Includes the information, as follows:</i> 1. <i>Name of other securities, other securities issuance date, interest/yield rate of other securities, and maturity date of other securities;</i> 2. <i>Other securities offering price;</i> 3. <i>Name of stock exchange where other securities are listed; and</i> 4. <i>Securities rating.</i> <i>Notes: if the Company does not have other securities listing chronology and issuance, the condition shall be disclosed.</i>	97
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang <i>Name and address of stock market supporting institution and/or profession</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadmindistrasikan saham perusahaan;  2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan  3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	<i>Includes the information, as follows:</i> 1. <i>Name and address of Shares Registrar/ Company's Shares Administrator;</i> 2. <i>Name and Address of Public Accountant Firm; and</i> 3. <i>Name and address of rating company.</i>	102-103
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional <i>National and International scales awards received and/or valid certifications in recent fiscal year</i>	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional.	<i>National and International scales awards received and/or valid certifications in recent fiscal year.</i>	33-37



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) <i>Name and address of subsidiary or branch office or representative office (if any)</i>	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/ perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	<i>Includes the information, as follows:</i> 1. Name and address of the subsidiary; and 2. Name and address of branch/ representative office. <i>Notes: if the Company does not have any subsidiary/branch office/representative office, shall be disclosed.</i>	112-115
17	Informasi pada Website Perusahaan <i>Information at Official Website</i>	Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;  4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan  6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	<i>Includes the information, at least, as follows:</i> 1. Shareholders information until individual end-owners;  2. Code of Conducts contents; 3. Information about General Meetings of Shareholders (GMS) at least including agenda discussed in the GMS, GMS Minutes of Meeting Summary and important date information, such as GMS announcement date, GMS invitation date, GMS Summary publication date;  4. Separated Financial Statements (5 recent years); 5. Profile of Board of Commissioners and Board of Directors; and 6. Charter of the Board of Commissioners, Committees and Internal Audit Unit	116
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal <i>Education and/or training program participated by Board of Commissioners, Board of Directors, the Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit</i>	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan.	<i>Includes the information, at least, as follows (type and person who is relevant to participate in):</i> 1. Education and/or training program for Board of Commissioners; 2. Education and/or training program for Board of Directors; 3. Education and/or training program for Audit Committee; 4. Education and/or training program for Remuneration and Nomination Committee; 5. Education and/or training program for Other Committees; 6. Education and/or training program for Corporate Secretary; and 7. Education and/or training program for Internal Audit Unit.  <i>Notes: if there is no education and/or training program done in the fiscal year, the condition shall be disclosed.</i>	249, 261, 293, 306, 312-313



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
<b>V. Analisa &amp; Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan/Management's Discussion &amp; Analysis on the Company's Performance</b>				
1	Tinjauan operasi per segmen usaha <i>Operational Review by Business Segment</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	The information contains, as follows: 1. Explanation about each business segment. 2. Performance by business segment, including: a. Production; b. Increasing/decreasing production capacity; c. Sales/Revenue; and d. Profitability.	173-177
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan <i>Description on Financial Performance</i>	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain & penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas.	Financial performance analysis including comparison of financial performance in recent fiscal year with earlier year and the cause of increasing/decreasing performance (narrative explanation and table), includes the information, as follows: 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Current liabilities, non-current liabilities and total liabilities; 3. Equity; 4. Sales/Revenue, expense and profit (loss), comprehensive income & total comprehensive income (loss); and 5. Cash flows.	178-193
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan <i>Discussion and analysis on solvency and receivables collectability by presenting calculation of ratio that are relevant with the Company's industry</i>	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	Explanation on : 1. Solvency, both short-term and long-term; and 2. Receivables collectability ratio.	194



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
4	Bahasan tentang struktur modal ( <i>capital structure</i> ) dan kebijakan manajemen atas struktur modal ( <i>capital structure policy</i> ) <i>Discussion on capital structure and capital structure policy</i>	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal ( <i>capital structure policies</i> ); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	<i>Explanation on:</i> 1. <i>Capital structure description comprising of interest/sukuk based liabilities and equity; and</i> 2. <i>Capital structure policies; and</i> 3. <i>Basis for capital structure policy preference</i>	195
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir <i>Discussion on material commitment for capital expenditure</i>	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	<i>Explanation on:</i> 1. <i>Name of the committed party;</i> 2. <i>Purpose of the commitment;</i> 3. <i>Soruce offund expected to fulfill the commitment;</i> 4. <i>Denomination currency; and</i> 5. <i>Initiatives plannedby the Company as protection from related foreign currency.</i>  <i>Notes: if the Company does not have any commitment related with capital expenditure in the recent fiscal year, the condition shall be disclosed.</i>	196
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir <i>Discussion on capital expenditure realization in recent fiscal year</i>	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.	<i>Explanation on:</i> 1. <i>Type of capital expenditure;</i> 2. <i>Purpose of capital expenditure; and</i> 3. <i>Value of capital expenditure realization in recent fiscal year.</i>  <i>Notes: if there is no capital expenditure realization, the condition shall be disclosed.</i>	197



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan <i>Information on comparison between target at beginning of fiscal year with the result (realization), and target or projection to be achieved within one upcoming period in terms of revenue, profit, capital structure or others considered necessary for the Company.</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Comparison between target at beginning of fiscal year and result (realization); and</i>  2. <i>Target or projection to be achieved within one upcoming period</i>	197-198
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan <i>Subsequent material information and fact after accountant reporting date</i>	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	<i>Description on subsequent material event after accountant reporting date including its impact to future performance and business risk.</i> <i>Notes: If there is no subsequent material information after accountant reporting date, the condition shall be disclosed.</i>	199
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan <i>Description on business prospect</i>	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	<i>Description on business prospect related with the industry and economics generally followed by quantitative supporting data from reliable sources.</i>	199-201
10	Uraian tentang aspek pemasaran <i>Description on marketing aspect</i>	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	<i>Description on marketing aspect of the Company's products and/or services, i.e. marketing strategy and market share.</i>	201-203
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir <i>Description on dividend policy and amount of cash dividend per share and total dividend per annum that is announced or paid within 2 (two) recent fiscal years</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Dividend policy;</i> 2. <i>Total dividend paid;</i> 3. <i>Total cash dividend per share;</i> 4. <i>Payout ratio; and</i> 5. <i>Cash dividend announcement and payment date in each year.</i>  <i>Notes: If no dividend payment, the reason shall be disclosed.</i>	203



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/ atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku <i>Employee and/or management stock option plan (ESOP/MSOP)</i>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;</li> <li>2. Jangka waktu;</li> <li>3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan</li> <li>4. Harga exercise.</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.</p>	<p><i>The information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Amount of ESOP/MSOP shares and realization;</i></li> <li>2. <i>Maturity;</i></li> <li>3. <i>Requirement for eligible employee and/or management;</i></li> <li>4. <i>Exercise price.</i></li> </ol> <p><i>Notes: If the program is unavailable, the condition shall be disclosed.</i></p>	203
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) <i>Public offering proceeds realization (in the course of the Company has a mandatory to report proceeds realization)</i>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total perolehan dana;</li> <li>2. Rencana penggunaan dana;</li> <li>3. Rincian penggunaan dana;</li> <li>4. Saldo dana; dan</li> <li>5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</p>	<p><i>The information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Total proceeds;</i></li> <li>2. <i>Proceeds realization plan;</i></li> <li>3. <i>Detail of proceeds realization;</i></li> <li>4. <i>Outstanding; and</i></li> <li>5. <i>Date of GMS approval on the change of proceeds realization (if any).</i></li> </ol> <p><i>Notes: if the public offering proceeds realization information is not available, the condition shall be disclosed.</i></p>	203
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi <i>Material information on investment, expansion, divestment, business merger/joint, acquisition and/or debt/capital restructuring</i>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;</li> <li>2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;</li> <li>3. Alasan dilukannya transaksi;</li> <li>4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;</li> <li>5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan</li> <li>6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.</p>	<p><i>The information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Name of the transaction and nature of the affiliated relation;</i></li> <li>2. <i>Explanation about the transaction fairness;</i></li> <li>3. <i>Reason of the transaction;</i></li> <li>4. <i>Realization of the transaction during the recent fiscal year period;</i></li> <li>5. <i>Company policy related with transaction review mechanism; and</i></li> <li>6. <i>Compliance with related Law and regulation.</i></li> </ol> <p><i>Notes: if the transaction is unavailable, the condition shall be disclosed.</i></p>	203
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang- undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir <i>Description on change in regulation in recent fiscal year.</i>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama peraturan perundang- undangan yang mengalami perubahan; dan</li> <li>2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan</p>	<p><i>The information contains information, as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Name of changing regulation; and</i></li> <li>2. <i>Impacts (quantitative and/or qualitative) to the Company (if significant) or statements that the impact is less material.</i></li> </ol> <p><i>Notes: if there is no changing regulation, the condition shall be disclosed.</i></p>	205



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir <i>Impact to the Company Description on change in accounting policy implemented in recent fiscal years</i>	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	<i>Description includes:</i> 1 <i>Change in accounting policy;</i> 2 <i>Reason of the change to the accounting policy; and</i> 3 <i>Quantitative impact on the financial statements</i> <i>Notes: If there is no change in accounting policy, the condition shall be disclosed.</i>	205-212
17	Informasi kelangsungan usaha <i>Information on Business Sustainability</i>	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.	<i>Disclosure of information, as follows:</i> 1. <i>Issues with potential significant impact towards the Company's business sustainability in the recent fiscal year.</i> 2. <i>Assessment form the management on issues explained at point 1; and</i> 3. <i>Assumption used by the Management in the assessment.</i>	212-216

Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.

*Notes: If there is no issue with potential significant impact towards the Company's business sustainability in the recent fiscal year, the underlying assumption of the management for ensuring that there is no with potential significant impact towards the Company's business sustainability in the recent fiscal year shall be disclosed.*

## VI. Tata Kelola Perusahaan/Good Corporate Governance

1	Uraian Dewan Komisaris <i>Description on Board of Commissioners</i>	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	<i>Description includes:</i> 1. <i>Description on Board of Commissioners' responsibility;</i> 2. <i>Evaluation to performance of each Committee under the Board of Commissioners and evaluation basis; and</i> 3. <i>Disclosure on Board Charter (Board of Commissioners Working Guideline and Procedure).</i>	245-252
2	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) <i>Information about Independent Commissioner (minimum 30% of total Board of Commissioners)</i>	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	<i>Includes the information, as follows:</i> 1. <i>Independent Commissioner appointment criteria; and</i> 2. <i>Statement of Independency for every Independent Commissioner.</i>	253-254



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
3	Uraian Direksi <i>Description of Board of Directors</i>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;</li> <li>Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan</li> <li>Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).</li> </ol>	<p><i>The information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Scope of individual duty and responsibility for every Board of Directors member;</i></li> <li><i>Assessment on the Committees under the Board of Directors (if any); and</i></li> <li><i>Disclosure on Board Charter (Board of Directors Working Guideline and Procedure).</i></li> </ol>	255-265
4	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi <i>GCG Assessment for Fiscal Year 2015 including, at least, Board of Commissioners and Board of Directors aspects</i>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kriteria yang digunakan dalam penilaian;</li> <li>Pihak yang melakukan penilaian;</li> <li>Skor penilaian masing-masing kriteria;</li> <li>Rekomendasi hasil penilaian; dan</li> <li>Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.</p>	<p><i>The information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Assessment criteria;</i></li> <li><i>Name of the Assessor;</i></li> <li><i>Score for each criteria;</i></li> <li><i>Assessment recommendation; and</i></li> <li><i>Reason for recommendation that is not/not yet implemented.</i></li> </ol> <p><i>Notes: If there is no GCG Assessment in 2015, the condition shall be disclosed.</i></p>	224-237
5	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Description on remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors</i>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;</li> <li>Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;</li> <li>Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;</li> <li>Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi;</li> <li>Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan</li> <li>Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).</li> </ol> <p>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.</p>	<p><i>The information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Disclosure of Board of Commissioners remuneration proposal until stipulation procedure;</i></li> <li><i>Disclosure of Board of Directors remuneration proposal until stipulation procedure;</i></li> <li><i>Remuneration structure indicating remuneration component and amount per component for every Board of Commissioners member;</i></li> <li><i>Remuneration structure indicating remuneration component and amount per component for every Board of Directors member;</i></li> <li><i>Disclosure of Board of Directors remuneration indicator; and</i></li> <li><i>Disclosure of performance and non-performance incentives and/or stock option received by every Board of Commissioners and Board of Directors member (if any).</i></li> </ol> <p><i>Notes: If the performance and non-performance incentives and/or stock option received by every Board of Commissioners and Board of Directors member are unavailable, the condition shall be disclosed.</i></p>	274-278



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
6	Frekuensi & Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) <i>Meeting frequency &amp; attendance list that is attended by majority of the members in Board of Commissioners meeting (minimum once in 2 months), Board of Directors meeting (minimum once in 1 month), and Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting (Management Meeting) (minimum once in 4 months)</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Meeting date;</i> 2. <i>Meeting participants; and</i> 3. <i>Meeting agenda.</i> <i>for every Board of Commissioners meeting, Board of Directors meeting or Management Meeting</i>	263-273
7	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu <i>Information about ultimate and controlling shareholders, both direct and non-direct shareholders until individual shareholder.</i>	Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.  Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki se kurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	<i>Presented as scheme or chart, with separation between ultimate and controlling shareholders.</i>  <i>Notes: Ultimate shareholders refer to any party with direct and indirect shares ownership minimum 20% (twenty per cent) of voting rights from total shares with voting rights issued by a Company who are not controlling Shareholders.</i>	237
8	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali <i>Disclosure of affiliation among the Board of Directors members, Board of Commissioners and Ultimate/Controlling Shareholders</i>	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.  Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Affiliation among the Board of Directors members;</i>  2. <i>Affiliation between Board of Directors and Board of Commissioners members;</i>  3. <i>Affiliation between Board of Directors members with Ultimate and/or Controlling Shareholders;</i> 4. <i>Affiliation among the Board of Commissioners members; and</i>  5. <i>Affiliation between Board of Commissioners members with Ultimate and/or Controlling Shareholders.</i>  <i>Notes: If the affiliation is unavailable, the condition shall be disclosed.</i>	287-290



No.	Kriteria <i>Criteria</i>	Penjelasan	Description	Halaman <i>Page</i>
9	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	<i>The information includes:</i> 1. Name and position of Audit Committee members; 2. Educational background (Major and Institution) and career history (Position, Instituition, and tenure) of the Audit Committee members; 3. Independence of Audit Committee members; 4. Description of duty and responsibility; 5. Description of Audit Committee working report in the fiscal year; and 6. Audit Committee meeting frequency and attendance level.	291-298
10	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi <i>Nomination and/or Remuneration Committee</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi.	<i>The information includes:</i> 1. Name, position and brief profile of Nomination and/or remuneration committee members; 2. Independence of nomination and/or remuneration committee members; 3. Description of duty and responsibility; 4. Description of nomination and/or remuneration committee working report in the fiscal year; and 5. Nomination and/or remuneration committee meeting frequency and attendance level; 6. Statements of nomination and/or remuneration committee charter; and 7. Board of Directors succession policy.	299
11	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan <i>Other Committees under the Board of Commissioners established by the Company</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	<i>The information includes:</i> 1. Name, position, and brief profile of the other committee's members; 2. Independence of other committee's members; 3. Description of duty and responsibility; 4. Description of working report by the other committees; and 5. Other committees meeting frequency and attendance level.	300-305
12	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan <i>Description of Corporate Secretary Duty and Function</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	<i>The information includes:</i> 1. Name and brief profile of Corporate Secretary; 2. Domicile; 3. Description of duty and responsibility; and 4. Corporate secretary working report in the fiscal year.	306-307



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
13	Uraian mengenai unit audit internal <i>Description on Internal Audit Unit</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	<i>The information includes:</i> 1. Name of Internal Audit Unit Chief; 2. Total personnel (internal auditor) at Internal Audit Unit; 3. Certification as internal audit profession; 4. Position of internal audit unit in the organization structure; 5. Description of internal audit unit working report; and 6. Party who appointed and discharged Head of Internal Audit Unit.	308-315
14	Akuntan Publik <i>Public Accountant</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. Name and period of public accountant auditing the annual financial statements for 5 recent years; 2. Name and period of Public Accountant Firm auditing annual financial statements for 5 recent years; 3. Amount of fee for each service provided by the public accountant in recent fiscal year; and 4. Other service provided by Public Accountant Firm besides annual financial statements audit service  <i>Notes: If there is no other service provided, the condition shall be disclosed.</i>	316
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan <i>Description on Risk Management</i>	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	<i>The information includes:</i> 1. Explanation on risk management system implemented by the Company 2. Explanation on evaluation done to effectiveness of the risk management system; 3. Explanation on risks profile of the Company; and 4. Risk mitigation plan.	317-327



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
16	Uraian mengenai sistem pengendalian intern <i>Description on internal control system</i>	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian internal, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i> ); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal pada tahun buku.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Brief explanation on internal control system including financial and operational controlling;</i> 2. <i>Explanation of internal control system compliance with international-standard framework (COSO – internal control framework); and</i> 3. <i>Explanation on evaluation to the internal control system</i>	308-315
17	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup <i>Description on corporate social responsibility related with environment</i>	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Activity target/plan in 2016 as implemented by the management;</i> 2. <i>Activity realization and quantitative impact from the activity; and related with environmental initiative engaged with operational activity of the Company, such as environment-friendly and recycle material and energy consumption, waste treatment system, environment issue complaint mechanism, environmental aspect consideration in loans disbursement for the customers, and others</i> 3. <i>Environmental certification.</i>	348-349
18	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja <i>Description on corporate social responsibility related with Employment, Occupational Health and Safety</i>	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Activity target/plan in 2016 as implemented by the management; and</i> 2. <i>Activity realization and quantitative impact from the activity related with employment, occupational health and safety practice such as equality of gender and job opportunity, employee turnover ratio, remuneration, occupational issue handling mechanism, and others.</i>	350-353



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
19	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan <i>Description on corporate social responsibility related with social and community development</i>	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 3. Biaya yang dikeluarkan Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Activity target/plan in 2016 as implemented by the management;</i> 2. <i>Activity realization and impact from the activity; and</i> 3. <i>Allocated budget</i> <i>Related with social and community development, such as local workers employment, community development in operational area, social facilities and infrastructures development, other types of donation, anti-corruption policy and procedure communication, anti-corruption training and others.</i>	354-356
20	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen <i>Description on corporate social responsibility related with responsibility to customers</i>	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Activity target/plan in 2016 as implemented by the management; and</i> 2. <i>Activity realization and impact from the activity</i> <i>Related with product responsibility such as customer health and safety, product information, channel, customer complaint number and handling and others</i>	357-361
21	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan <i>Litigation encountered by the Company, subsidiary, Board of Directors and/or Board of Commissioners members serving in the Annual Report period</i>	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Case/lawsuit summary;</i> 2. <i>Case/lawsuit settlement status;</i>  3. <i>Risk encountered by the Company and value of the litigation/lawsuit; and</i> 4. <i>Administrative sanction charged to the Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members by the authorized regulator (stock market, banking and other authorities) in recent fiscal year (or statements offree from any administrative sanction).</i> <i>Notes: In the course of the Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members do not encounter any litigation, the condition shall be disclosed.</i>	333-335



No.	Kriteria <i>Criteria</i>	Penjelasan	Description	Halaman <i>Page</i>
22	Akses informasi dan data perusahaan <i>Corporate Information and Data Access</i>	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	<i>Description on the availability of corporate information and data access publicly, i.e via website (in Indonesian and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting and others</i>	336
23	Bahasan mengenai kode etik <i>Description on Code of Conducts</i>	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	<i>The information includes:</i> 1. <i>Code of Conducts provisions;</i> 2. <i>Disclosure that Code of Conducts prevail for entire organization level;</i> 3. <i>Code of Conducts dissemination;</i> 4. <i>Punishment for every violation as stipulated in the Code of Conducts (normative);</i> 5. <i>Number of Code of Conducts violation, punishment administered in recent fiscal year</i> <i>Notes: If Code of Conducts violation is unavailable in recent fiscal year, the condition shall be disclosed.</i>	329-332
24	Pengungkapan mengenai whistleblowing system <i>Disclosure on Whistle Blowing System</i>	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	<i>The information includes Whistle Blowing System mechanism, as follows:</i> 1. <i>Fraud report submission;</i> 2. <i>Protection to the Whistle Blower;</i> 3. <i>Report handling;</i> 4. <i>Report Manager authority; and</i> 5. <i>Total report received and processed in recent fiscal year; and</i> 6. <i>Punishment/follow-up on the report that had been processed completely during the fiscal year.</i> <i>Notes: If neither incoming or processed report in recent fiscal year, the condition shall be disclosed.</i>	337-343
25	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors Composition Diversity Policy</i>	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	<i>Description of written policy of the Company on Board of Commissioners and Board of Directors composition diversity policy in terms of educational background (major), career history, age and gender.</i> <i>Notes: if the policy is unavailable, the condition shall be disclosed altogether with the consideration.</i>	279-280



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
<b>VII. Informasi Keuangan / Financial Information</b>				
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan <i>Declaration from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on Financial Statements Responsibility</i>	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	<i>Compliance with regulations related with Financial Statements Responsibility</i>	LK
2	Opini auditor independen atas laporan keuangan <i>Independent Auditor Opinion on the Financial Statements</i>			LK
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini <i>Description of Independent Auditor in the Opinion</i>	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	<i>Description includes information, as follows:</i> 1. Name & signature; 2. Date of Audit Report; and 3. KAP and Public Accountant Registries.	LK
4	Laporan keuangan yang lengkap <i>Complete Financial Statements</i>	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau memuat penyajian kembali pos- pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	<i>Full disclosure of financial statements parts, as follows:</i> 1. Statements of financial position (balance sheet); 2. Statements of profit or loss; 3. Statements of equity change; 4. Statements of cash flows; 5. Note on the financial statements; and 6. Comparative statements on earlier period; and 7. Statements of financial position at beginning of earlier period when the entity implemented certain accounting policy retrospectively or restating the financial statement accounts, or when the entity reclassified the accounts in the financial statements (if relevant)	LK
5	Perbandingan tingkat profitabilitas <i>Comparison of profitability</i>	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	<i>Comparative profit (loss) for the year and earlier year</i>	LK



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
6	Laporan Arus Kas <i>Statements of Cash Flows</i>	<p>Memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;</li> <li>2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;</li> <li>3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan</li> <li>4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.</li> </ol>	<p><i>The information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Classification of three activity categories: operating, investing and financing;</li> <li>2. Implementation of direct method to report cash flows from operating activities;</li> <li>3. Separation of disclosure between inflow and outflow cash in recent year on operating, investing and financing activities; and</li> <li>4. Disclosure of non-cash transaction that shall be disclosed in the notes on financial statements.</li> </ol>	LK
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi <i>Summary of Accounting Policy</i>	<p>Meliputi sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;</li> <li>2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;</li> <li>3. Pajak penghasilan;</li> <li>4. Imbalan kerja; dan</li> <li>5. Instrumen Keuangan.</li> </ol>	<p><i>The information, at least, includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statement of compliance with the FAS;</li> <li>2. Basis of Financial Statements measurement and preparation;</li> <li>3. Recognition of income and expenses;</li> <li>4. Employment benefits; and</li> <li>5. Financial Instruments.</li> </ol>	LK
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi <i>Disclosure of related party transaction</i>	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;</li> <li>2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan</li> <li>3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.</li> </ol>	<p><i>The disclosure includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Name of related parties; and nature and relation with the related parties;</li> <li>2. Amount of the transaction and percentage total related income and expenses; and</li> <li>3. Amount of balance and percentage to total assets or liabilities.</li> </ol>	LK



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan <i>Disclosure of taxation-related information</i>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;</li> <li>2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;</li> <li>3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016;</li> <li>4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan</li> <li>5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.</li> </ol>	<p><i>The disclosure shall present information as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Fiscal reconciliation and current tax calculation;</i></li> <li><i>2. Explanation on relationship between tax income (expense) and accounting income;</i></li> <li><i>3. Statements of reconciled Taxable Income (LKP) is placed as basis for the Entity Income Tax Annual SPT submission;</i></li> <li><i>4. Detail of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial statements for every presentation period, and total deferred tax income (expenses) recognized in statements of profit or loss if the amount is unrecognized in the total deferred tax assets or liabilities recognized in the statements of financial position; and</i></li> <li><i>5. Disclosure of any tax dispute event</i></li> </ol>	LK
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap <i>Disclosure related with fixed assets</i>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penyusutan yang digunakan;</li> <li>2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;</li> <li>3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan</li> <li>4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.</li> </ol>	<p><i>The disclosure shall present information as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Depreciation method applied;</i></li> <li><i>2. Disclosure on selected accounting policy between revaluation model and cost model;</i></li> <li><i>3. Significant method and assumption applied to estimate fair value of the fixed assets (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and</i></li> <li><i>4. Reconciliation of total fixed assets gross booked value and accumulative depreciation at beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.</i></li> </ol>	LK



No.	Kriteria Criteria	Penjelasan	Description	Halaman Page
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi <i>Disclosure related with operation segment</i>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;</li> <li>2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;</li> <li>3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan</li> <li>4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.</li> </ol>	<p><i>The disclosure shall present information as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. General information including factors applied to identify the reported segment;</i></li> <li><i>2. Information on profit or loss, assets and liabilities of the reported segment;</i></li> <li><i>3. Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities and other material elements of the segments to total related in the entity; and</i></li> <li><i>4. Disclosure at entity level, including information about product and/or service, geographical area and main customers.</i></li> </ol>	LK
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan <i>Disclosure related with Financial Instruments</i>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;</li> <li>2. Nilai wajar dan hierarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;</li> <li>3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;</li> <li>4. Kebijakan manajemen risiko; dan</li> <li>5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.</li> </ol>	<p><i>The disclosure shall present information as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Detail information of owned financial instruments by classification;</i></li> <li><i>2. Fair value and its hierarchical level for every financial instrument group;</i></li> <li><i>3. Explanation of risk related with the financial instrument; market risk, credit risk and liquidity risk;</i></li> <li><i>4. Risk management policy; and</i></li> <li><i>5. Quantitative risk analysis related with financial instrument.</i></li> </ol>	LK
13	Penerbitan laporan keuangan <i>Financial Staements Publication</i>	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan</li> <li>2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.</li> </ol>	<p><i>The disclosure shall present information as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Date of authorization for the financial statements publication; and</i></li> <li><i>2. Authorized party of the financial statements.</i></li> </ol>	LK



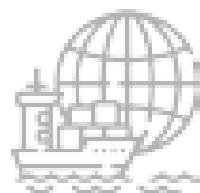
## Highlight 2016

**Rp4,20 Triliun**  
Trillion  
**9,3%**

**Pendapatan Usaha**  
Revenues



**Laba Usaha** Operating Income  
**Rp234,31 Miliar**  
Billion  
**59,39%**



**Total Aset** Total Assets  
**Rp6,21 Triliun**  
Trillion  
**9,3%**

**Armada Kapal Perintis**  
Pioneer Ships Fleet

**46 Kapal**  
Vessels



**27 Kapal**  
Vessels  
**Armada Kapal Penumpang**  
Passenger Ships Fleet



**6 Kapal**  
Vessels  
**Armada Kapal Tol Laut**  
Tol Laut Ships Fleet

**Total Penumpang** Total Passengers

**3,552,254 Orang**  
Pax

**48,388 ton/m<sup>3</sup>**

**Muatan Cargo**  
Cargo



**10,043 teus**

**Muatan Kontainer**  
Containers

**Mitra Travel Aktif**  
Active Travel Partner



**234 Travel**  
Travels

**Jumlah Pelabuhan Singgah**  
Total Shelter Ports

**98 Pelabuhan**  
Ports



**96.380 Mil Laut**  
Sea Miles

**Jumlah Mil Laut**  
Total Sea Miles



## Penghargaan 2016

Awards 2016



### *Transportation Safety Award 2016 Peringkat 3*

Lembaga Pemberi Penghargaan  
Awarding Institution

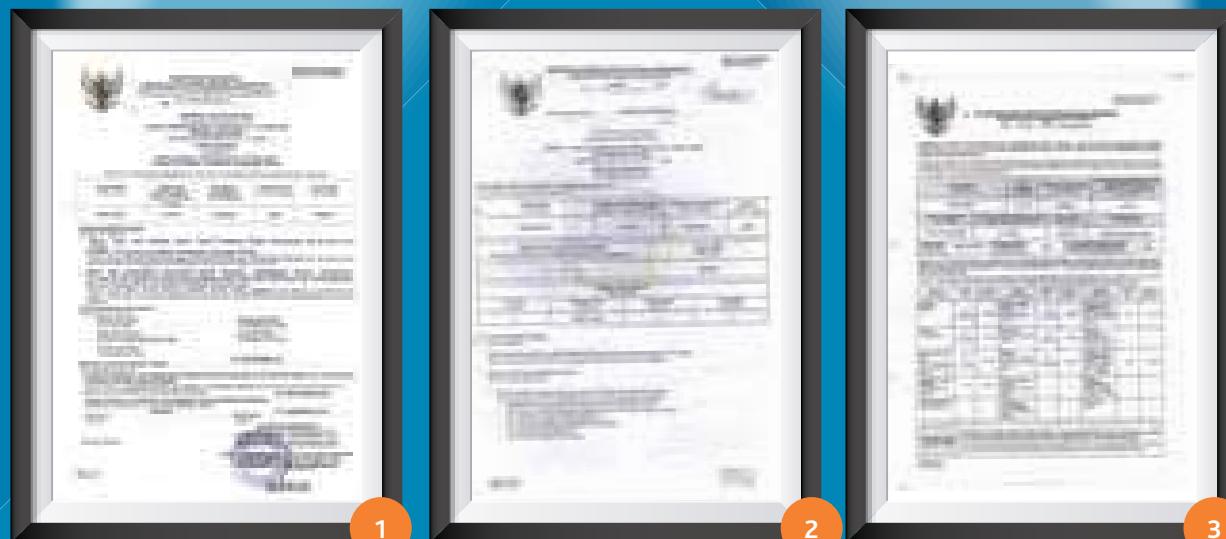
**Kementerian Perhubungan  
Republik Indonesia**

**Ministry of Transportation  
Republic of Indonesia**

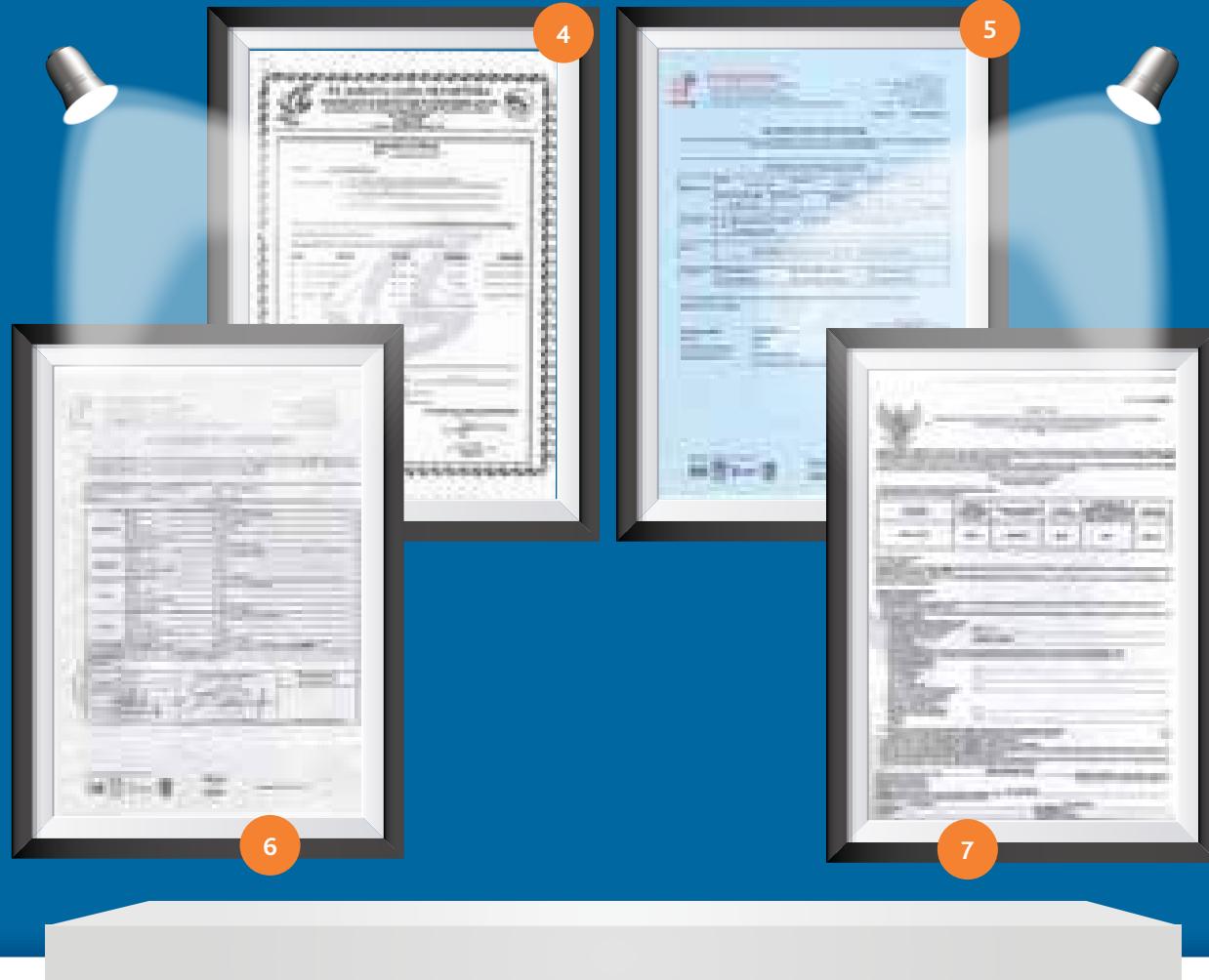


## Sertifikasi 2016

### Certifications 2016



No.	Nama Sertifikat Name of Certificate	Lembaga Pemberi Sertifikat Certification Institution	Tanggal Perolehan Certification Date	Masa Berlaku Validity
1.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal Ship Pollution Prevention National Certificate	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia	14 Desember 2016 December 14, 2016	21 September 2017 September 21, 2017
2.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Passengers Vessels Safety Certificate	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia	26 Oktober 2015 October 26, 2015	25 Januari 2016 January 25, 2016
3.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Minimum Safe Manning Document	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia	25 Juli 2016 July 25, 2016	12 Oktober 2016 October 12, 2016



No.	Nama Sertifikat Name of Certificate	Lembaga Pemberi Sertifikat Certification Institution	Tanggal Perolehan Certification Date	Masa Berlaku Validity
4.	Sertifikat PMK PMK Certificate	PT Sarana Gama Sejahtera	22 Maret 2016 March 22, 2016	21 Maret 2017 March 21, 2017
5.	Sertifikat Hydrostatic Release Unit (HRU) Hydrostatic Release Unit (HRU) Certificate	PT Segara Permai	28 Maret 2016 March 28, 2016	28 Maret 2017 March 28, 2017
6.	Sertifikat Lifeboat Arrangements Lifeboat Arrangements Certificate	PT Segara Permai	28 Maret 2016 March 28, 2016	
7.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran Dirt Pollution Prevention International Certificate	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia	1 Juli 2016 July 1, 2016	30 September 2016 September 30, 2016



## Sertifikasi 2016

Certifications 2016

### Data Sertifikat Kapal Penumpang Tahun 2016

Passenger Ships Certificates 2016

No	Nama Kapal Ship Name	Sertifikat Garis Muat Load Line Certificate		
		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal / Date	
			Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Valid Thru
1	KM Awu	00805-SB	3/4/2017	5/4/2017
2	KM Bukit Raya	18450	9/30/2014	3/27/2019
3	KM Binaiya	17663	6/2/2014	3/25/2019
4	KM B. Siguntang	022286	10/24/2016	5/23/2021
5	KM Ciremai	16928	1/24/2014	8/1/2018
6	KM Dobonsolo	16428	11/15/2013	10/11/2018
7	KM Dorolonda	22308	10/25/2016	7/11/2021
8	KM Egon	7840	9/30/2015	6/29/2020
9	KM G Dempo	15416	6/18/2013	20/06/2018
10	KM Kelimutu	19857	5/7/2015	2/4/2020
11	KM Kelud	16701	12/23/2013	10/27/2018
12	KM Lawit	021644	5/26/2016	12/8/2019
13	KM Leuser	15649	7/24/2013	5/28/2018
14	KM Lambelu	13670	7/20/2012	5/15/2017
15	KM Labobar	18264	9/12/2014	6/26/2019
16	KM Nggapulu	13285	5/3/2012	4/5/2017
17	KM Pangrango	13091	11/9/2016	4/9/2017
18	KM Sirimau	20599	9/21/2015	5/17/2020
19	KM Sinabung	2297	1/23/2013	11/1/2017
20	KM Sangiang	17763	6/19/2014	5/12/2019
21	KM Tilong Kabilia	20030	6/12/2015	3/4/2020
22	KM Tatamailau	21020	1/19/2016	3/25/2020
23	KM Tidar	22932	1/26/2017	11/26/2021
24	KM Umsini	20345	8/10/2015	7/28/2020
25	KM Wilis	19872	5/11/2015	2/11/2020
26	KM Caraka Jn lii-4	01876-TP	10/25/2016	3/24/2017
27	KM Caraka Jn lii-22	14906	3/8/2013	11/12/2017
28	KM Caraka Jn lii-32	17897	7/4/2014	5/12/2019
29	Kfc Jet Liner	16233	10/22/2013	9/11/2018



	Sertifikat Lambung/Hull Certificate			Sertifikat Mesin/Machine Certificate			Lembaga Klasifikasi Certification Institution	
	Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal /Date		Nomor Sertifikat Certificate Number	Tanggal/Date			
		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Valid Thru		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Valid Thru		
	00805-SB	3/4/2017	5/4/2017	00805-SB	3/4/2017	5/4/2017	PT BKI	
	26818	9/30/2014	3/27/2019	17743	9/30/2014	3/27/2019	PT BKI	
	25691	6/2/2014	3/25/2019	16972	6/2/2014	3/25/2019	PT BKI	
	032733	10/24/2016	5/23/2021	021470	10/24/2016	5/23/2021	PT BKI	
	24688	1/24/2014	8/1/2018	16352	1/24/2014	8/1/2018	PT BKI	
	24027	11/15/2013	10/11/2018	15918	11/15/2013	10/11/2018	PT BKI	
	22308	10/25/2016	7/11/2021	22308	10/25/2016	7/11/2021	PT BKI	
	29877	9/30/2015	6/29/2020	19842	9/30/2015	6/29/2020	PT BKI	
	22611	6/18/2013	6/20/2018	14967	6/18/2013	6/20/2018	PT BKI	
	28781	5/7/2015	2/4/2020	19093	5/7/2015	2/4/2020	PT BKI	
	24385	12/23/2013	10/27/2018	16157	12/23/2013	10/27/2018	PT BKI	
	031385	5/26/2016	12/8/2019	020818	5/26/2016	12/8/2019	PT BKI	
	22926	7/24/2013	5/28/2018	15175	7/24/2013	5/28/2018	PT BKI	
	20036	7/20/2012	5/15/2017	13235	7/20/2012	5/15/2017	PT BKI	
	26550	9/12/2014	6/26/2019	17557	9/12/2014	6/26/2019	PT BKI	
	19467	5/3/2012	4/5/2017	12868	5/3/2012	4/5/2017	PT BKI	
	19217	11/9/2016	5/9/2017	12725	11/9/2016	5/9/2017	PT BKI	
	29831	9/21/2015	5/17/2020	19806	9/21/2015	5/17/2020	PT BKI	
	3446	1/23/2013	11/1/2017	2291	1/23/2013	11/1/2017	PT BKI	
	25838	6/19/2014	5/12/2019	17073	6/19/2014	5/12/2019	PT BKI	
	29020	6/12/2015	3/4/2020	19261	6/12/2015	3/4/2020	PT BKI	
	30434	1/19/2016	3/25/2020	20212	1/19/2016	3/25/2020	PT BKI	
	34080	1/26/2017	11/26/2021	22911	1/26/2017	11/26/2021	PT BKI	
	29448	8/10/2015	7/28/2020	19553	8/10/2015	7/28/2020	PT BKI	
	28800	5/11/2015	2/11/2020	19106	5/11/2015	2/11/2020	PT BKI	
	01876-TP	10/25/2016	4/24/2017	01876-TP	10/25/2016	4/24/2017	PT BKI	
	21841	3/8/2013	11/12/2017	14427	3/8/2013	11/12/2017	PT BKI	
	26008	7/4/2014	5/12/2019	17167	7/4/2014	5/12/2019	PT BKI	
	23767	10/22/2013	9/11/2018	15742	10/22/2013	9/11/2018	PT BKI	





# Ikhtisar Kinerja 2016

## Performance Highlights 2016

---

“

Raihan pendapatan tahun 2016 mengalami pertumbuhan 108,90% dibandingkan pendapatan usaha tahun 2015 sebesar Rp3.907.466 juta.

Revenue realization grew 108.90% in 2016 if compared with Rp3,907,466 million revenues booked in 2015.

”





# Ikhtisar Keuangan

## Financial Highlights

Keterangan (dalam juta Rupiah)	2016	2015*	2014*	2013	2012	Description (in million Rupiah)
<b>Laba Rugi Komprehensif /Statements of Comprehensive Profit (Loss)</b>						
Pendapatan usaha	4,201,752	3,853,628	2,970,314	2,494,374	2,722,232	Operating Income
Laba (Rugi) Bruto	747,426	560,220	256,400	(57,477)	331,460	Gross Profit (Loss)
Laba (Rugi) Usaha	234,310	147,007	56,901	577,972	62,760	Operating Income (Loss)
Laba (Rugi) sebelum kepentingan non-pengendali	248,403	98,931	4,396	(622,358)	24,198	Profit (Loss) Before Non-Controlling Interest
Jumlah laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	370	(288)	(202)	(122)	(122)	Profit (Loss) Attributable to Non-Controlling Interest
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	248,773	98,643	4,194	(622,480)	24,086	Profit (Loss) For The year
Pendapatan (beban) Komprehensif Lain	(33,420)	2,079	(27,377)	(47,269)	-	Other Comprehensive Income (Loss)
Laba (Rugi) Komprehensif tahun Berjalan	215,353	100,722	31,571	(669,749)	24,086	Comprehensive Income (Loss) For The Year
Laba Bersih Per Saham Dasar (Nilai Penuh)	30,481	14,256	4,809	-	3,669	Net Income per Share (Full Amount)
<b>Laporan Posisi Keuangan (Neraca)/Statements of Financial Positions (Balance Sheets)</b>						
Jumlah Aset Lancar	2,542,571	2,060,529	1,339,481	1,216,668	1,536,620	Total Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	3,668,520	3,832,366	3,996,387	4,141,036	4,214,965	Total Noncurrent Assets
Jumlah Aset	6,211,091	5,892,895	5,335,868	5,357,704	5,751,585	Total Assets
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	590,326	802,673	862,434	766,797	583,703	Total Current Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	155,439	402,568	386,569	535,781	443,100	Total Noncurrent Liabilities
Jumlah Liabilitas	745,765	1,205,241	1,249,003	1,302,578	1,026,803	
Jumlah Ekuitas	5,465,325	4,687,654	4,086,865	4,055,126	4,724,782	Total Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	6,211,090	5,892,895	5,335,868	5,357,704	5,751,585	Total Liabilities and Equity
<b>Arus Kas Konsolidasian/Consolidated Cash Flows</b>						
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	788,812	121,629	(51,514)	(134,546)	83,639	Cash Flows from Operating Activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(54,066)	(90,809)	(19,819)	(47,565)	(44,709)	Cash Flows from Investing Activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	27,760	437,756	19,851	75,133	(53,692)	Cash Flows from Financing Activities
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	839,091	370,415	421,998	528,975	543,737	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1,601,598	839,091	370,515	421,998	528,975	Cash and Cash Equivalents at End of Year



Keterangan (dalam juta Rupiah)	2016	2015*	2014*	2013	2012	Description (in million Rupiah)
Rasio Keuangan/Financial Ratio						
Rasio Usaha						
Rasio Laba Terhadap Aset	3.98%	1.68%	0.08%	18.93%	42.00%	Operating Ratio Return on Assets (ROA)
Rasio Laba Terhadap Ekuitas	4.72%	2.11%	0.11%	16.52%	0.51%	Return on Equity (ROE)
Rasio Laba Kotor Terhadap Pendapatan	18.40%	14.48%	8.58%	2.30%	12.18%	Net Profit Margin
Rasio Laba Terhadap Pendapatan	5.55%	2.56%	0.14%	26.85%	0.89%	Gross Profit Margin
Rasio Keuangan						
Rasio Lancar	430.71%	256.71%	155.31%	158.67%	266.53%	Current Ratio
Rasio Kas	271.31%	107.71%	38.02%	50.54%	90.53%	Cash Ratio
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	13.65%	25.71%	30.56%	32.12%	21.73%	Debt to Equity Ratio
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	12.01%	20.45%	23.41%	24.31%	17.85%	Debt to Assets Ratio
Rasio Pertumbuhan						
Penjualan	15.04%	30.00%	20.00%	-837.00%	9.72%	Sales
Laba Bersih	106.92%	2151.00%	101.00%	-2671.94%	1634.85%	Net Income
Jumlah Aset	5.40%	10.00%	-0.40%	-6.85%	-0.49%	Total Assets
Jumlah Ekuitas	16.60%	15.00%	0.78%	-14.71%	-0.80%	Total Equity

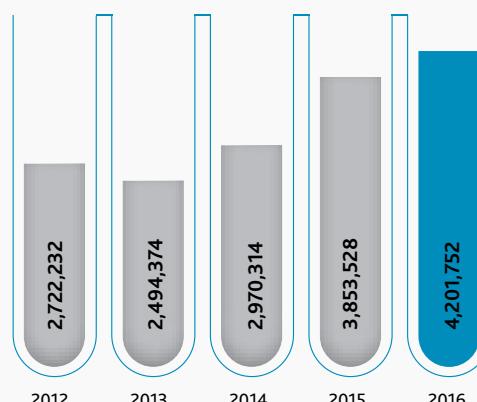
## Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting

### Chart of Key Financial Highlights

#### Pendapatan Usaha

Operating Revenue

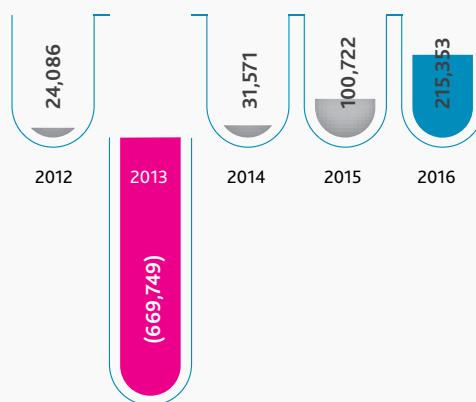
(dalam juta rupiah)/(in million Rupiah)



#### Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Comprehensive Income (Loss) For The Year

(dalam juta rupiah)/(in million Rupiah)



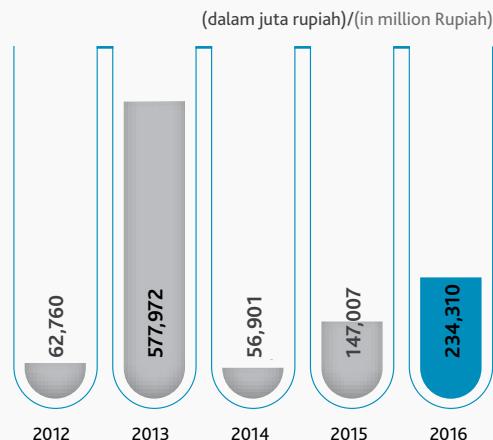


## Laporan Tahunan 2016 Annual Report

PT PELNI (Persero)

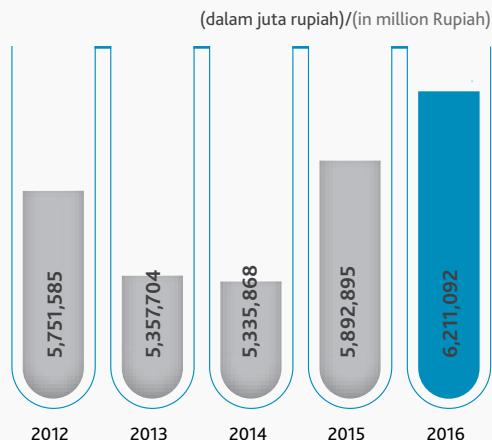
### Laba (Rugi) Usaha

Operating Income (Loss)



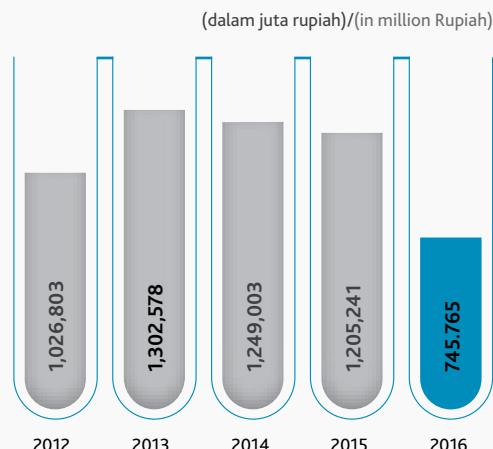
### Jumlah Aset

Total Assets



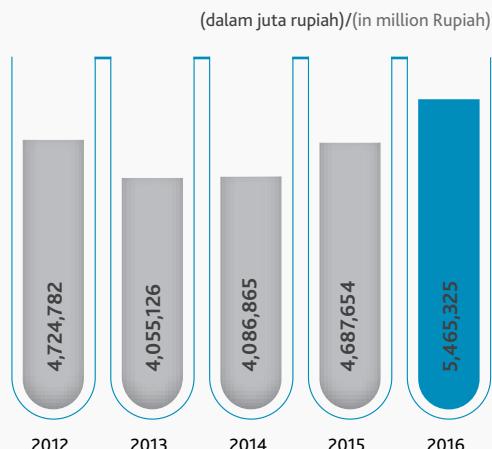
### Jumlah Liabilitas

Total Liabilities



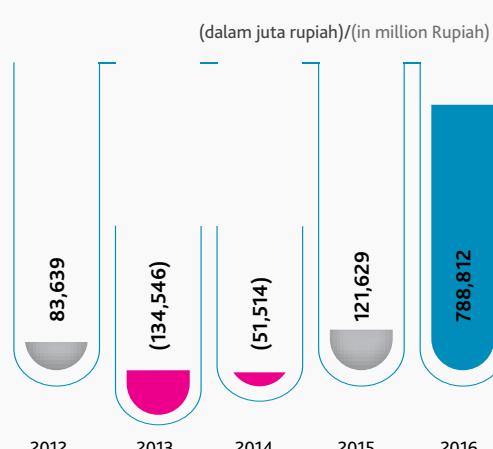
### Jumlah Ekuitas

Total Equity



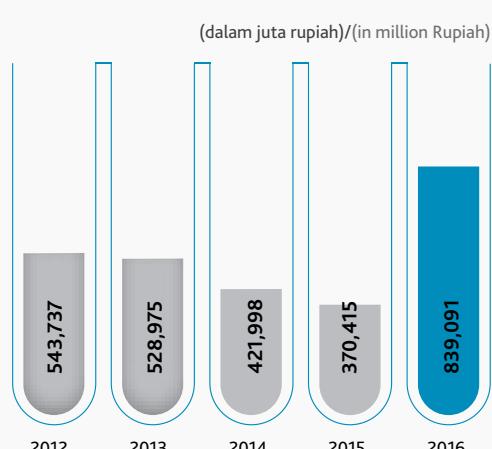
### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities



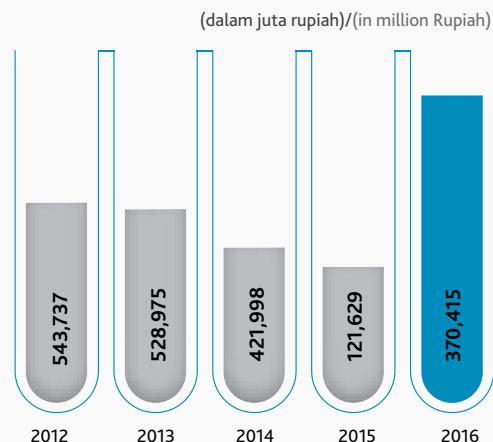
### Kas dan Setara Kas Awal Tahun

Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year

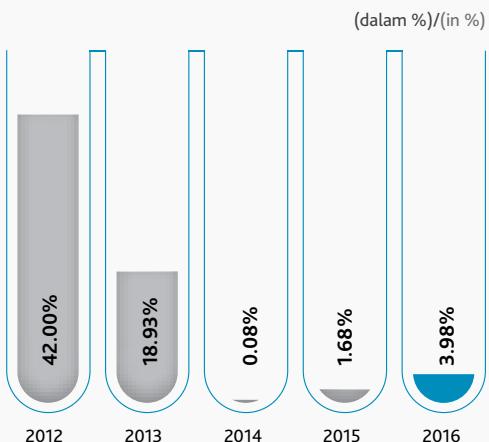




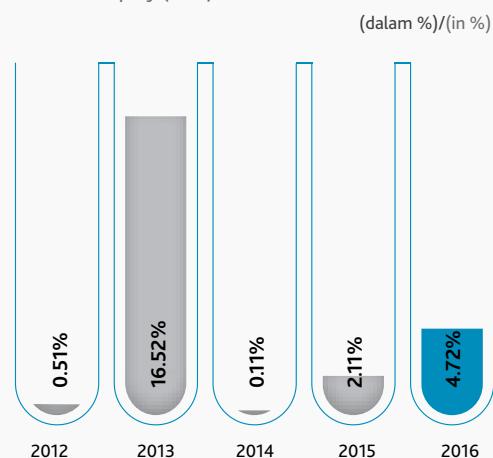
**Kas dan Setara Kas Akhir Tahun**  
Cash and Cash Equivalents at End of Year



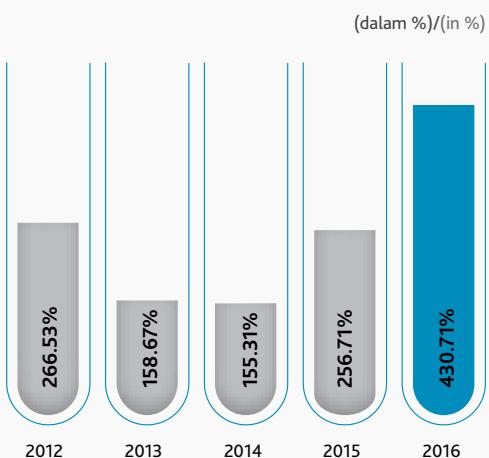
**Rasio Laba Terhadap Aset**  
Return on Assets



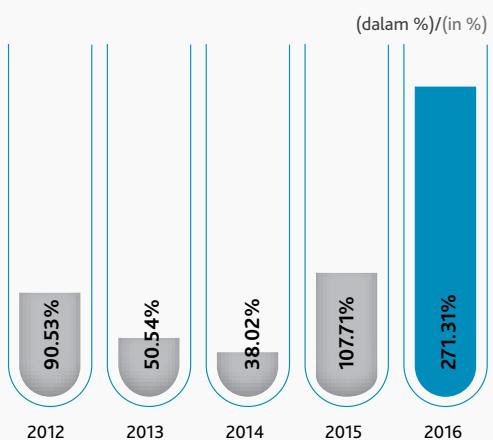
**Rasio Laba Terhadap Ekuitas**  
Return on Equity (ROE)



**Rasio Lancar**  
Current Ratio



**Rasio Kas**  
Cash Ratio







# Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

## Report To The Stakeholders

---

“

Segenap Manajemen dan Insan  
PELNI berkomitmen untuk terus  
meningkatkan kualitas Tata Kelola  
Perusahaan yang Baik di Perseroan  
dan mencapai skor evaluasi  
penerapan GCG yang semakin baik  
di masa yang akan datang.

Entire Management and PELNI People are committed  
to continuously improve quality of Good Corporate  
Governance in the Company and achieve higher GCG  
assessment score in the future.

”





“

Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian PT PELNI (Persero) tahun 2016 berhasil melampaui target sebagai kontribusi dari pemberahan pembukuan keuangan, efisiensi serta pengawasan yang efektif selama tahun 2016 terhadap kegiatan operasional Perseroan yang berhasil mengurangi terjadinya beban biaya operasional.

The Board of Commissioners evaluates that realization of PT PELNI (Persero) performance in 2016 that exceeding the target was contributed from financial administration improvement, efficiency as well as effective monitoring throughout 2016 over the Company's operational activity that decrease the operating expenses.

”



**Leon Muhamad**  
Komisaris Utama/  
President Commissioner



# Laporan Dewan Komisaris

## Report from Board of Commissioners

### Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Kami Hormati,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya serta dukungan yang diberikan oleh Pemegang Saham dan segenap Pemangku Kepentingan, atas nama Dewan Komisaris, kami dapat menyampaikan bahwa di tengah dinamika dan tantangan di industri pelayaran nasional selama tahun 2016, PT PELNI (Persero) tetap mampu mencapai pertumbuhan kinerja usaha dan pencapaian kinerja keuangan yang memuaskan.

### Penilaian Atas Kinerja Direksi

Di tengah perbaikan kondisi makroekonomi Indonesia yang ditutup pada level 5,02% per 31 Desember 2016, industri pelayaran nasional menghadapi sejumlah tantangan, khususnya penurunan jumlah penumpang dan angkutan barang. Terjadinya penurunan angkutan barang juga diikuti oleh persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan swasta yang menawarkan jasa dan layanan serupa. Di sisi lain, Dewan Komisaris melihat adanya penugasan dari Pemerintah masih menjadi peluang yang dapat dioptimalkan oleh Perseroan untuk mempertahankan pertumbuhan kinerja.

Ditengah kondisi makroekonomi dan tren industri pelayaran yang cukup menantang tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berhasil memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi tersebut dengan mengoptimalkan penugasan *Public Service Obligation* (PSO) dari Pemerintah meliputi subsidi angkutan pelayaran dan rute transportasi pelayaran hingga ke daerah terpencil. Di tengah kondisi perbaikan ekonomi tersebut, subsidi yang diberikan oleh Pemerintah juga meningkat sehingga mendorong Perseroan untuk meningkatkan kinerja secara positif.

Secara umum, berdasarkan capaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2016, Dewan Komisaris menilai Direksi berhasil mencapai kinerja melampaui target dengan membukukan Laba Bersih Setelah Pajak sebesar Rp248.772 juta atau 151,05% dari target RKAP 2016 sebesar Rp164.694 juta. Hal ini terutama didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Usaha sebesar 108,88% dari Rp3.868.893 juta pada tahun 2015 menjadi Rp4.212.399 juta pada tahun 2016.

Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian Laba Bersih Setelah Pajak dan Pendapatan Usaha yang melebihi target tersebut merupakan kontribusi dari pembenahan pembukuan keuangan, efisiensi serta pengawasan yang efektif selama tahun 2016 terhadap kegiatan operasional Perseroan yang berhasil mengurangi terjadinya beban biaya operasional.

### Our Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Praise The Almighty God for his Blessing and Grace as well as support from our Shareholders and all Stakeholders, on behalf of the Board of Commissioners, We would report that amidst challenging and dynamic of national shipping industry throughout 2016, PT PELNI (Persero) successfully achieved satisfactory business and financial performance growth.

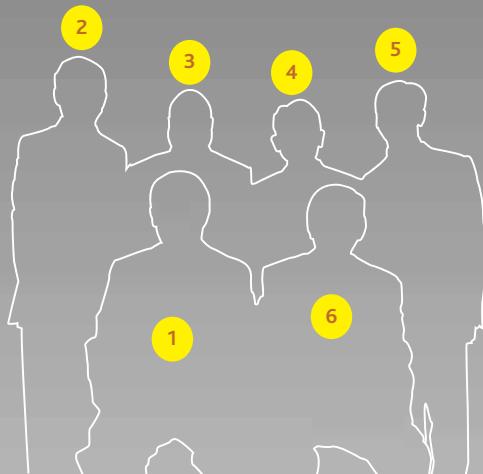
### Evaluation on Board of Directors Performance

In the middle of Indonesian macroeconomics condition that was closed at 5.02% level on December 31, 2016, national shipping industry experienced challenges, particularly decreasing number of passengers and cargo. The decrease of cargo was also followed with fiercer competition with private companies who offered similar services. On the other hand, the Board of Commissioners also views that assignment of the Government still brought opportunity to be optimized by the Company in maintaining the performance growth.

Amidst the challenging macroeconomics and shipping industry trends, the Board of Commissioners evaluated that the Board of Directors had been successfull in addressing the economic growth opportunity by optimizing Public Service Obligation (PSO) assignment from the Government including subsidy in shipping transportation and shipping transporation route covering the remote area. In this recovering economic trend, the Government's subsidy was also higher that encouraged the Company to book a positive performance.

In general, according to realization of Budget Plan (RKAP) 2016, the Board of Commissioners assumed the Board of Directors had recorded performance exceeding the target by booking Net Profit of Rp248,772 million or 151.05% from Rp164,694 million targeted in the RKAP 2016. This was mainly driven by Revenues growth by 108.88% from Rp3,868,893 million in 2015 to Rp4,212,399 million in 2016.

The Board of Commissioners also evaluates that realization of Net Profit and Revenues that are exceeding the targets was contributed from financial administration improvement, efficiency as well as effective monitoring throughout 2016 over the Company's operational activity that decrease the operating expenses.



**1. Leon Muhamad**  
Komisaris Utama/  
President Commissioner

**4. Sudarto**  
Komisaris/  
Commissioner

**2. Raldi Hendro Koestoyer**  
Komisaris/  
Commissioner

**5. Satya Bhakti Parikesit**  
Komisaris/  
Commissioner

**3. Wolter B. Hesegem**  
Komisaris/  
Commissioner

**6. Omo Dahlan**  
Komisaris Independen/  
Independent Commissioner





Terkait kinerja Perseroan selama tahun 2016, Dewan Komisaris mencatat adanya tantangan signifikan dalam aspek pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki dampak terhadap pencapaian kinerja Perseroan secara keseluruhan. Dewan Komisaris menyarankan Manajemen untuk terus melakukan efisiensi terhadap aspek Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan Perseroan, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang di seluruh wilayah operasional PT PELNI (Persero).

## Pandangan Atas Prospek Usaha

Sesuai dengan Program Kerja Perseroan untuk 5 (lima) tahun mendatang, Dewan Komisaris melihat prospek usaha PT PELNI (Persero) akan dipengaruhi oleh adanya penugasan tambahan dari Pemerintah yang sangat menantang. Salah satu penugasan yang memiliki prospek menjanjikan bagi Perseroan adalah inisiatif untuk mengembangkan Wisata Bahari yang telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2016 melalui program wisata gerhana bulan dengan hasil cukup memuaskan sehingga sebaiknya konsep tersebut dapat terus ditindaklanjuti dengan perhitungan yang matang.

Di sisi lain, seiring dengan inisiatif Pemerintah untuk terus menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah terpencil untuk memperkecil kesenjangan antar satu daerah dengan daerah lain, Dewan Komisaris melihat bahwa agenda Pemerintah tersebut dapat membawa peluang bagi PT PELNI (Persero) untuk berkontribusi sebagai BUMN Pelayaran yang memiliki armada transportasi laut hingga pulau-pulau terpencil melalui layanan Kapal Perintis.

Peran serta PT PELNI (Persero) dalam mendukung program Pemerintah tersebut juga telah dilaksanakan melalui layanan Kapal Tol Laut yang telah memiliki 6 (enam) trayek pelayaran per 31 Desember 2016 dengan armada KM Freedom, KM Mentari Perdana, KM CJN III-22, KM Meratus Ultima I, KM CHN III – 32 dan KM CJN III-4.

Dewan Komisaris melihat bahwa optimalisasi pelayanan Kapal Tol Laut dan Kapal Perintis akan dapat meningkatkan peluang pendapatan bagi Perseroan serta memberikan kontribusi terhadap masyarakat, pembangunan lingkungan serta menjamin aksesibilitas masyarakat dan menjadikan PT PELNI (Persero) sebagai Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Menjadi Pilihan Utama Masyarakat.

Ke depan, terkait dengan penguatan kinerja Perseroan dan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris yang disampaikan dalam forum-forum pertemuan Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris mengimbau bahwa Perseroan harus melakukan penguatan dalam layanan logistik atau angkutan barang melalui anak perusahaan, PT Sarana Bandar Nasional (SBN) melalui penguatan *networking* dan *trust* kepada seluruh Stakeholders.

Related with the Company's performance in 2016, the Board of Commissioners noted significant challenge in Human Resources (HR) management and development aspects with implication to the Company's overall performance achievement. The Board of Commissioners deliberately suggests the Management to continue efficiency program on Human Resources aspect based on the Company's needs at Head Office and Branch Offices across operational area of PT PELNI (Persero).

## View on Business Prospect

In accordance with 5 (five) Years Working Program, the Board of Commissioners analyzes that business prospect of PT PELNI (Persero) will be influenced by challenging additional assignment from the Government. One of the assignments with promising prospect for the Company is initiative to develop Marine Tourism that has been implemented since 2016 by organizing Moon Eclipse tour program with positive result, therefore, this concept shall be followed-up with thorough preparation.

On the other hand, in line with the Government's initiative to continuously bridge all territory of Indonesia, primarily remote area to bridge inter-region disparity, the Board of Commissioners views that the Government's agenda brings opportunity for PT PELNI (Persero) to contribute as a Shipping SOE with marine transportation fleet covering remote islands through the provision of pioneer ships.

Contribution of PT PELNI (Persero) in supporting the Government's Program has also been done through Tol Laut vessels service with 6 (six) shipping routes as of December 31, 2016 supported by fleets, among others, KM Freedom, KM Mentari Perdana, KM CJN III-22, KM Meratus Ultima I, KM CHN III – 32 and KM CJN III-4.

The Board of Commissions concerns that optimization of the Tol Laut and Pioneer vessels services will increase revenues opportunity for the Company as well as contribute to the society, develop the community as well as guarantee the public accessibility and develop PT PELNI (Persero) as a reliable and most-preferred shipping company for the society.

Going forward, in relation ith the Company's performance growth and according to the Board of Commissioners' resolutions as presented in the Board of Commissioners and Board of Directors meetings, the Board of Commissioners deliberately suggests to strengthen logistic or cargo services through subsidiary, PT Sarana Bandar Nasional (SBN) by expanding network and trust to all Stakeholders.



## **Pandangan Atas Praktik Tata Kelola Perusahaan, Komite Dewan Komisaris dan Penerapan Whistle Blowing System (WBS)**

Sebagai salah satu Organ Utama dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan seluruh Manajemen atas pengelolaan Perseroan selama tahun 2016. Terkait dengan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite Audit dan Komite Kebijakan Risiko. Dewan Komisaris juga telah mengoptimalkan fungsi Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi, terutama terkait kebijakan manajemen risiko dan *loss potential* dalam kegiatan operasional selama tahun 2016.

Secara khusus mengenai praktik Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System (WBS)* di Perseroan, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi WBS di Perseroan untuk terus diperbaiki sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan dan arahan Pemegang Saham. Mekanisme WBS diharapkan dapat diterapkan dengan mekanisme pelaporan dan pemberian sanksi yang lebih tegas untuk meningkatkan akuntabilitas dalam seluruh aktivitas bisnis dan operasional Perseroan.

Terkait proses pengawasan tersebut, Dewan Komisaris menilai perlunya peningkatan dalam aspek pengawasan, khususnya pengawasan terhadap armada kapal yang sudah tua dan memerlukan perbaikan. Merujuk pada laporan kerja dan rekomendasi dari Komite Audit, Dewan Komisaris melihat perlunya aktivitas *owner survey* oleh suatu tim atau struktur khusus di bawah Direksi yang independen terhadap unit kerja lain untuk melakukan analisa kelayakan armada kapal. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa armada kapal PT PELNI (Persero) untuk selalu berada dalam kondisi baik dan memberikan layanan prima kepada seluruh pengguna jasa pelayaran dan angkutan barang melalui sarana transportasi laut.

Dalam rangka mengembangkan kompetensi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan, anggota Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam sejumlah pelatihan selama tahun 2016 antara lain Penyegaran BUMN dan *Workshop Pengembangan Aplikasi New PELNI Ticketing System (NPTS)*.

## **View on Corporate Governance Practice, Committee Under the Board of Commissioners and Whistle Blowing System (WBS) Implementation**

As a Main Structure in Good Corporate Governance implementation, the Board of Commissioners had carried out supervisory and advisory functions to the Board of Directors and Management over the Company's management in 2016. Related with Good Corporate Governance (GCG) practice, in carrying out the supervisory and advisory duties, the Board of Commissioners is also assisted by Audit Committee and Risk Policy Committee. The Board of Commissioners has also optimized functions of the Committees under the Board of Commissioners to provide suggestion and recommendation to the Board of Directors, particularly risk management policy and loss potential in the operational activities throughout 2016.

Particularly related with Whistle Blowing System (WBS) practice in the Company, the Board of Commissioners evaluates that WBS implementation needs to be improved in accordance with the Law and Shareholders Aspiration. The WBS mechanism is expected to be implemented with firm reporting and punishment mechanism to improve accountability in every business and operational activities of the Company.

In relation with the supervisory process, the Board of Commissioners also views the importance of supervisory aspect improvement, primarily monitoring over the aging vessels that required major repair. Referring to Audit Committee working report and recommendations, the Board of Commissioners found owner survey activity by autonomous and independent team or special structure under the Board of Directors is necessary to perform vessels feasibility analysis. This is intended to ensure that vessel fleet of PT PELNI (Persero) to always be under good condition and deliver service excellence to all shipping and logistic services users by means of marine transportation modes.

In order to develop the Board of Commissioners competency in supervisory duty implementation, the Board of Commissioners had participated in trainings throughout 2016, namely, SOE Refreshment and New PELNI Ticketing System (NPTS) Application Development.



## Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Terkait dengan komposisi Dewan Komisaris, kami dapat menyampaikan bahwa tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris selama tahun 2016.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-83/MBU/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris, pada tahun 2016, komposisi Dewan Komisaris di PT PELNI (Persero) juga didukung oleh Komisaris Independen yang dijabat oleh Bapak Omo Dahlan.

Susunan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) per 31 Desember 2016, sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Leon Muhamad
Komisaris Independen	: Omo Dahlan
Komisaris	: Sudarto
	Satya Bhakti Parikesit
	Wolter B. Hesegem
	Raldi Hendro Koestoyer

## Apresiasi

Akhir Kata, Dewan Komisaris melihat bahwa Direksi dan seluruh Manajemen telah memberikan kontribusi dan dedikasi yang optimal terhadap pencapaian kinerja Perseroan untuk tahun 2016. Atas hasil yang dicapai oleh PT PELNI (Persero) pada tahun 2016, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi mendalam kepada Direksi dan seluruh karyawan atas kerja keras dalam membawa pertumbuhan kinerja yang positif kepada Perseroan.

Dewan Komisaris juga berterima kasih kepada pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Perseroan, serta kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, baik Pemerintah, mitra kerja dan segenap pelanggan atas kerja sama dan hubungan yang harmonis selama tahun 2016. Kami berharap hubungan yang baik ini akan dapat terus terpelihara dan membawa hasil kinerja lebih baik di masa yang akan datang.

## Change in Board of Commissioners Composition

In terms of the Board of Commissioners composition, We report that there is no change in Board of Commissioners' composition throughout 2016.

Pursuant to Minister of State-Owned Enterprise Decree Number SK-83/MBU/06/2015 regarding Appointment and Discharge of Board of Commissioners Members, in 2016, the Board of Commissioners composition at PT PELNI (Persero) is also supported by Independent Commissioner, Mr. Omo Dahlan.

PT PELNI (Persero) Board of Commissioners composition as of December 31, 2016 is as follows:

President Commissioner	: Leon Muhamad
Independent Commissioner	: Omo Dahlan
Commissioner	: Sudarto
	Satya Bhakti Parikesit
	Wolter B. Hesegem
	Raldi Hendro Koestoyer

## Appreciation

Finally, the Board of Commissioners regards the Board of Directors and all Management have given optimum contribution and dedication on the Company's performance achievement throughout 2016. Considering the results achieved by PT PELNI (Persero) in 2016, the Board of Commissioners sincerely expressed utmost appreciation to the Board of Directors and employees for perseverance in bringing positive performance growth for the Company.

The Board of Commissioners would also thank our Shareholders for trust and support given to the Company as well as to other Stakeholders, such as the Government, business partners and our customers for harmonious partnership and relationship in 2016. We expect this harmonious relationship will be maintained and bring even better performance in the upcoming years.

Jakarta, Juni 2017

Jakarta, June 2017



Leon Muhamad

Komisaris Utama

President Commissioner



## Profile Dewan Komisaris

### Profile of Board of Commissioners

**Leon Muhamad**

**Komisaris Utama**

**President Commissioner**

Warga Negara Indonesia, lahir di Padang tanggal 4 April 1954, 62 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan di Akademi Ilmu Pelayaran (sekarang STIP). Beliau mengawali karir di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun 1987 dan menjabat di berbagai posisi strategis antara lain sebagai Atase Perhubungan Indonesia di Singapura (2004 – 2008), Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut (2009 – 2011) hingga diangkat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2012 – sekarang).

Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT PELNI (Persero) sejak 17 November 2015 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-232/MBU/11/2015 tanggal 17 November 2015.

Indonesian Citizen, born in Padang on April 4, 1954, 62 years old. Lives in Jakarta. He graduated from Akademi Ilmu Pelayaran (recently known as STIP). He started his career at Marine Transportation General Directorate in 1987 and served in strategic positions, among others, Indonesia Transportation Attaché in Singapore (2004 – 2008), Director of Marine Traffic and Transportation, Marine Transportation General Directorate (2009 – 2011) until was appointed as Marine Transportation General Directorate and General Secretary of Ministry of Transportation (2012 – now).

He is appointed as President Commissioner at PT PELNI (Persero) since November 17, 2015 pursuant to Minister of SOE Decree Number SK-232/MBU/11/2015 dated November 17, 2015.





**Omo Dahlan**  
**Komisaris Independen**  
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon tanggal 13 Juli 1947, 69 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Institusi Ilmu Keuangan. Selama karirnya, Beliau pernah menduduki berbagai posisi strategis antara lain Auditor Utama Keuangan IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektur Utama Pengawasan Intern dan Khusus, Kepala Perwakilan BPK Yogyakarta.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT PELNI (Persero) sejak 21 November 2012 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-415/MBU/2012 tanggal 21 November 2012.

Indonesian Citizen, born in Cirebon on July 13, 1947, 69 years old. Lives in Jakarta. He earned Bachelor Degree of Economics from Institusi Ilmu Keuangan. During his career, He served in strategic positions, among others, Main Financial Auditor IV, Supreme Audit Agency (BPK), Main Inspectorate of Internal and Special Audit, Head of BPK Yogyakarta Representative.

He is appointed as Independent Commissioner at PT PELNI (Persero) since November 21, 2012 pursuant to Minister of SOE Decree Number SK-415/MBU/2012 dated November 21, 2012.



**Wolter B. Hesegem**

Komisaris

Commissioner



Warga Negara Indonesia, lahir di Ibiroma tanggal 11 Maret 1977, 39 tahun. Domisili di Papua. Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Silas Papare, Jayapura dan gelar Magister Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Kepala Seksi Rumah Tangga Sekda Papua.

Beliau menjabat sebagai Komisaris PT PELNI (Persero) sejak 21 November 2012 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-415/MBU/2012 tanggal 21 November 2012.

Indonesian Citizen, born in Ibiroma on March 11, 1977, 39 years old. Lives in Papua. He earned Bachelor Degree from Universitas Silas Papare, Jayapura and Master Degree from Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). He is also currently serving as Head of Internal Affairs Section, Papua Regional Secretary.

He is appointed as Commissioner at PT PELNI (Persero) since November 21, 2012 pursuant to Minister of SOE Decree Number SK-415/MBU/2012 dated November 21, 2012.



**Raldi Hendro Koestoe  
Komisaris  
Commissioner**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 10 April 1958, berusia 58 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Sains dari Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Indonesia dan gelar *Master of Science* dalam Bidang *Regional Science* dari University of Queensland, Australia tahun 1986 dan meraih gelar *Philosophy of Doctor Environmental Planning* dari Griffith University, Australia. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Staf Ahli Menko Perekonomian Republik Indonesia bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup.

Beliau menjabat sebagai Komisaris PT PELNI (Persero) sejak 8 Januari 2014 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-01/MBU/2014 tanggal 08/01/2014.

Indonesian Citizen, born in Jakarta on April 10, 1958, 58 years old. Lives in Jakarta. He earned Bachelor Degree of Science from Faculty of Math and Natural Science, Universitas Indonesia and Master Degree of Science in Regional Science from University of Queensland, Australia in 1986 and Philosophy of Doctor Environmental Planning from Griffith University, Australia. He is also currently serving as Expert Staff for The Republic of Indonesia Coordinative Minister of Economics in Technology and Environment sector.

He is currently serving as Commissioner at PT PELNI (Persero) since January 8, 2014 pursuant to Minister of SOE Decree Number SK-01/MBU/2014 dated Jauary 8, 2014.





**Satya Bhakti Parikesit**  
**Komisaris**  
Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Cimahi tanggal 6 November 1972, berusia 44 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan gelar Magister dari Universitas Padjajaran serta *Ph.D of International Law* dari University of Nottingham, Inggris. Selama karirnya, Beliau pernah menduduki berbagai posisi strategis hingga diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet dan Asisten Deputi Bidang Perundang-Undangan bidang Perekonomian.

Beliau menjabat sebagai Komisaris PT PELNI (Persero) sejak 17 November 2015 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-232/MBU/11/2015 tanggal 17 November 2015.

Indonesian Citizen, born in Cimahi on November 6, 1972, 44 years old. Lives in Jakarta. He earned Bachelor Degree of Law from Universitas Indonesia and Master Degree of Law from Universitas Padjajaran and Ph.D of International Law from University of Nottingham, England. During his career, He served in strategic positions, until appointed as Expert Staff in Legal and International Relation, Cabinet Secretariate and Assistant of Deputy in Legal, Economy sector.

He is appointed as Commissioner at PT PELNI (Persero) since November 17, 2015 pursuant to Minister of SOE Decree Number SK-232/MBU/11/2015 dated November 17, 2015.



**Sudarto  
Komisaris**

Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Madiun tanggal 9 April 1969, 47 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, *Master of Business Administration* dari International University of Japan dan *Doctor of Philosophy* dari School of Business And Economics dari University of New South Wales, Australia. Selama karirnya, Beliau pernah menduduki berbagai posisi strategis hingga diangkat sebagai Direktur Transformasi Perbendaharaan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Beliau menjabat sebagai Komisaris PT PELNI (Persero) sejak 17 Oktober 2014 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-218/MBU/2014 tanggal 17/10/2014.

Indonesian Citizen, born in Madiun on April 9, 1969, 47 years. Lives in Jakarta. He earned Bachelor Degree of Economics from Universitas Indonesia, Master of Business Administration from International University of Japan and Doctor of Philosophy from School of Business and Economics from University of New South Wales, Australia. During his career, He served in strategic positions, until was appointed as Director of Treasury Transformation at Treasury General Directorate, Ministry of Finance Republic of Indonesia.

He is appointed as Commissioner at PT PELNI (Persero) since October 17, 2014 pursuant to Minister of SOE Decree Number SK-218/MBU/2014 dated October 17, 2014.





“

Raihan pendapatan tahun 2016 mengalami pertumbuhan 108,90% tahun 2015 dan Laba Bersih Setelah Pajak pada tahun 2016 mencapai 151,05% di atas target RKAP 2016.

Revenue realization grew 108.90% in 2016 if compared with 2015 and Net Profit was 151.05% exceeding the target set in RKAP 2016.

”



Elfien Goentoro  
Direktur Utama/  
President Director



# Laporan Direksi

## Report from Board of Directors

### Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT PELNI (Persero) dapat melewati tahun 2016 dengan pencapaian kinerja yang baik dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir. Seiring dengan upaya konsolidasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan sejak tahun 2013, Manajemen berhasil mencatat beberapa capaian kinerja yang memuaskan dalam aspek kinerja keuangan dan kinerja operasional untuk tahun buku 2016.

Tren perbaikan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai 5,02% pada akhir tahun 2016 masih diiringi oleh sejumlah tantangan bagi industri pelayaran nasional. Beberapa hal yang membawa dampak signifikan terhadap perkembangan industri pelayaran nasional antara lain kebijakan Pemerintah dalam membangun infrastruktur bandara dan pelabuhan. Di tengah peningkatan layanan *Low Cost Carrier* (LCC) atau Penerbangan Bertarif Rendah, sektor transportasi pelayaran mencatat penurunan penumpang sejak tahun 2012. Pada tahun 2016, penurunan penumpang mencapai 16% dibandingkan tahun 2015.

Disisilain,dalam aspek angkutan barang,Perseroan masih melihat prospek yang positif pada tahun 2016 dengan mencatatkan pertumbuhan sekitar 7% untuk angkutan barang yang didukung oleh operasional Tol Laut sebagai salah satu inisiatif Pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas, mendistribusikan hasil pembangunan dan memperkecil kesenjangan antar daerah di Indonesia. Di sisi lain, *assessment* yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi laut juga berdampak pada pengembangan bisnis Perseroan selama tahun 2016.

### Analisis Atas Kinerja Tahun 2016

Kondisi makroekonomi yang masih menandakan tren pelemahan serta kompetisi dalam sektor transportasi dan angkutan barang nasional menghadirkan sejumlah peluang dan tantangan bagi perkembangan kinerja Perseroan. Dalam rangka mengatasi setiap tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang yang hadir selama tahun 2016, Direksi dan segenap Manajemen telah mengimplementasikan strategi transformasi baik dalam aspek bisnis maupun operasional guna meningkatkan kinerja Perseroan. Selain implementasi kebijakan yang bersifat transformasional, Manajemen juga terus melakukan efisiensi di segala bidang guna mendukung kebutuhan pengembangan bisnis dan usaha Perseroan.

### Dear Honored Shareholders and Stakeholders,

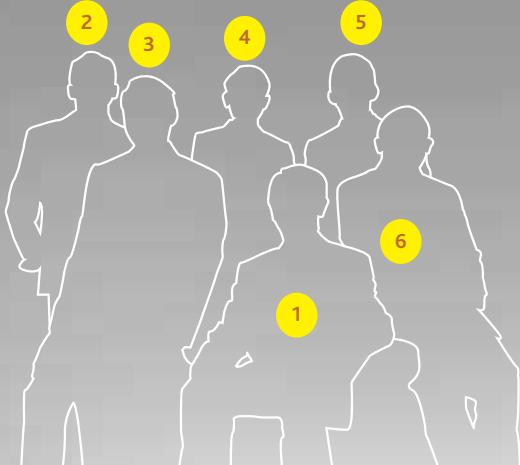
We praise God The Almighty, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) or PT PELNI (Persero) successfully closed 2016 with satisfactory performance within recent 5 (five) years. In line with on going consolidation and performance improvement programs since 2013, the Management managed to record satisfactory performance achievement in financial and operational aspects for fiscal year 2016.

Indonesian economic recovery trend that achieved 5.02% by the end of 2016 was still followed by several challenges for national shipping industry. Couples of conditions that brought significant impacts towards the national shipping industry growth were among others Government's policy in airport and port infrastructure development. In the middle of rapid growth of Low-Cost Carrier (LCC) or budget airlines, the shipping transportation sector recorded decreasing passenger since 2012. In 2016, the decrease of passenger achieved 15% if compared with 2015.

On the other hand, in terms of cargo logistic aspect, the Company still views a promising prospect in 2016 by recording growth around 7% for cargo vessels as supported by the operations of Tol Laut as one of the Government's initiative in improving accessibility, distributing the development outcome and bridging regional gaps in Indonesia. On the other hand, assessment that was done by Ministry of Transportation to improve marine transportation safety and comfort also encouraged the Company's business development throughout 2016.

### Analysis on Performance 2016

The macroeconomics condition still indicated a sluggish trend and competition in national transportation and logistic sectors that brought challenges and opportunities for the Company's performance growth. In order to solve every challenge and optimize opportunity in 2016, the Board of Directors and all Management have implemented the transformation strategy both in business and operational aspects to improve the Company's performance. Besides the implementation of transformative policy, the Management also continuously drives efficiency in all aspects to support the Company's business development in the future.



**1. Elfien Goentoro**

Direktur Utama

President Director

**4. Muhammad Tukul Harsono**

Direktur Operasi dan Pelayanan

Director of Operations and Services

**2. Wibisono**

Direktur Keuangan

Director of Finance

**5. Harry Boediarto Soewarto**

Direktur Komersial

Director of Commercial

**3. Olih Masolich Sodikin**

Direktur Armada dan Teknik

Director of Fleets and Technical

**6. Insan Purwarisya L. Tobing**

Direktur SDM & Umum

Director of HR & General Affairs





Sebagai hasil dari penerapan strategi tersebut, per 31 Desember 2016, PT PELNI (Persero) berhasil membukukan Pendapatan sebesar Rp4.212.400 juta dan Laba Bersih Setelah Pajak sebesar Rp248.773 juta. Analisis lebih lanjut mengenai kinerja Perseroan tahun buku 2016 meliputi kebijakan strategis, perbandingan antara capaian kinerja dan target dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Tahun 2016 serta kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2016, dijelaskan sebagai berikut:

### Kebijakan Strategis

PT PELNI (Persero) menyadari bahwa kondisi transportasi memiliki dinamika yang terus berkembang seiring dengan pergeseran kondisi makroekonomi dan implementasi kebijakan Pemerintah. Memperhatikan kondisi tahun 2016, Manajemen telah menerapkan beberapa kebijakan strategis sebagai landasan program kerja yang direalisasikan selama tahun 2016, antara lain:

#### 1. Perbaikan Sistem Manajemen SDM

Dalam beberapa tahun terakhir, aspek Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi fokus utama dalam akselerasi kinerja Perseroan. Selama tahun 2016, Manajemen terus melakukan proses pembentahan SDM melalui efisiensi dan transformasi *mindset* serta budaya kerja, termasuk melakukan pemetaan Anak Buah Kapal (ABK) dan pembaruan struktur organisasi PT PELNI (Persero).

#### 2. Pengoperasian Kapal Tol Laut, Perintis dan Ternak

PT PELNI (Persero) terus melakukan penambahan armada Tol Laut, Kapal Perintis dan Kapal Ternak untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas ke seluruh wilayah Indonesia. Per 31 Desember 2016, Perseroan mengoperasikan 6 (enam) unit Kapal Tol Laut, 46 (empat puluh enam) Kapal Perintis dan 1 (satu) unit Kapal Ternak. Secara keseluruhan ketiga jenis armada tersebut memberikan kontribusi laba mencapai Rp56.151 juta terhadap total perolehan laba Perseroan untuk tahun buku 2016.

Dalam operasi Kapal Tol Laut, PT PELNI (Persero) berperan sebagai operator dengan tanggung jawab pengangkutan dari *Container Yard* (CY) ke *Container Yard* (CY). Di sisi lain, operasionalisasi Kapal Ternak merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 26 Tahun 2016 Tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak yang bertujuan untuk mengelola tarif angkutan ternak hingga ke wilayah Indonesia bagian Timur. Selanjutnya, operasionalisasi Kapal Perintis merupakan perwujudan dari dukungan nyata PT PELNI (Persero) terhadap kebijakan Pemerintah untuk memberikan pelayanan jasa penumpang dan angkutan barang hingga daerah terpencil dan terluar di Indonesia.

As result of those strategies implementation, as of December 31, 2016, PT PELNI (Persero) booked revenues of Rp4,212,400 million and Net Income of Rp248,773 million. Further analysis on the Company's performance in fiscal year 2016 included strategic policy, comparison between performance and target in Budget Plan (RKAP) 2016 as well as issues in 2016 are explained below:

### Strategic Policy

PT PELNI (Persero) realizes that transportation condition has growing dynamics in line with shifting macroeconomics condition and implementation of Government's policy. Considering the condition in 2016, the Management had implemented strategic policies as foundation of the working program to be implemented in 2016, among others:

#### 1. HR Management System Improvement

In these recent years, Human Resources (HR) aspect still becomes the main focus in the Company's performance acceleration. Throughout 2016, the Management continuously performs HR arrangement process through efficiency, mindset and corporate culture transformation including Ship Crew (ABK) Mapping and revision to PT PELNI (Persero) Organization Structure.

#### 2. Operations of Tol Laut, Pioneer and Cattle Vessels

PT PELNI (Persero) continues to enlarge vessels fleet for Tol Laut, Pioneer and Cattle vessels to improve service quality and accessibility across Indonesian territory. As of December 31, 2016, the Company operated 6 (six) units Tol Laut vessels, 46 (forty six) Pioneer ships and 1 (one) Cattle Ship. Overall, these three fleets contributed profit achieving Rp56,151 million to total profit realization booked by the Company in fiscal year 2016.

In the operations of Tol Laut vessels, PT PELNI (Persero) acts as operator with transporting responsibility between the Container Yards (CY). On the other hand, operation of Cattle Ship refers to Appendix of Ministry of Transportation Republic of Indonesia Regulation Number PM 26 of 2016 concerning Cargo Tariff for Subsidized Cattle Ship Operations aiming to manage cattle logistic tariff covering Eastern Indonesia area. Next, the operation of Pioneer Ship manifested concrete support from PT PELNI (Persero) towards the Government's Policy to provide passenger and cargo logistic service until the remote and border area of Indonesia.



Melalui implementasi kebijakan Kapal Tol Laut, Perintis dan Ternak merupakan Perseroan merealisasikan komitmen menyediakan transportasi untuk daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dengan tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan serta keamanan pelayaran.

### 3. Pengadaan Kapal Barang dan Tol Laut

Di tengah perubahan tren jasa angkutan dan pelayaran nasional, Manajemen melihat bahwa segmen pelayanan angkutan barang memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang jika dibandingkan dengan segmen angkutan penumpang. Oleh karena itu, selama tahun 2016, PT PELNI (Persero) juga berfokus dalam menambah armada Kapal Barang, termasuk armada Kapal Tol Laut. Proses pengadaan kapal tahun 2016 dilakukan dengan mengelompokkan tipe kapal yang dibutuhkan yaitu 4 (empat) unit kapal kontainer 200 – 450 Teus dan 2 (dua) unit kapal kontainer 451-700 Teus.

Melalui implementasi strategi pengadaan Kapal barang dan Tol Laut, Perseroan berupaya untuk menjamin ketersediaan barang dan menekan disparitas harga barang pokok dan barang penting antara wilayah Jawa dan Luar Jawa.

### 4. Penerapan *single class* pada kapal penumpang

Strategi *single class* pada kapal penumpang merupakan salah satu upaya Manajemen untuk mengatasi ketatnya persaingan dengan layanan transportasi udara. Perubahan strategi kelas penumpang tersebut telah diterapkan tahun 2016 pada 3 (tiga) kapal untuk rute-rute tertentu dari 26 kapal, antara lain KM Kelud, KM Dorolonda, dan KM Kelimutu. Untuk periode tahun 2016, strategi *single class* tersebut terutama berfokus pada segmen pariwisata dan akan terus dikembangkan pada segmen layanan pelayaran PT PELNI (Persero) lainnya.

### 5. Implementasi *New PELNI Ticketing System* (NPTS)

Pada tahun 2016 PT PELNI (Persero) telah mengimplementasikan aplikasi *New PTS* (*PELNI Ticketing System*) di semua kapal penumpang PELNI. Aplikasi ini merupakan modernisasi dari aplikasi *Ticketing Oracle* yang telah digunakan sejak tahun 2010 hingga tahun 2015. Pelaksanaan pekerjaan pengembangan Aplikasi *New PTS* merupakan kerjasama antara PT PELNI (Persero) dengan PT Peruri *Digital Security* (PDS) sesuai kontrak No.TH.3.2-01/SS/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang di-addendum per tanggal 27 September 2016. Implementasi *New PELNI Ticketing System* (NPTS) pada tahun 2016 juga telah bekerja sama dengan Indomaret sebagai salah satu saluran pembayaran tiket kapal penumpang PELNI. Pemantauan implementasi NPTS juga telah dilakukan secara online melalui [http://mis.sqiva.com/pelni\\_monitoring](http://mis.sqiva.com/pelni_monitoring).

Through the implementation of Tol Laut, Pioneer and Cattle vessels policy, the Company has realized the commitment to provide transportation for marginal, remote, outer and border area by concerning and maintaining the shipping safety and security.

### 2. Cargo and Tol Laut Vessels Procurement

Amidst changing trend in national transportation and shipping services, the Management views that cargo service segment still has promising prospect in the future if compared with passenger segment. Therefore, throughout 2016, PT PELNI (Persero) was also focused on increasing number of Cargo vessels fleet, including the Tol Laut vessels. In 2016, vessels procurement process was done by classifying the vessels type such as 4 (four) units 200- 450 Teus container vessels and 2 (two) units 451 – 700 Teus container vessels.

Through the implementation of Cargo and Tol Laut vessels procurement, the Company strives to guarantee availability of commodities and reduce price disparity of groceries and other essentials between Java and Non-Java islands.

### 4. Implementation of Single Class at Passenger Ship

Single class strategy at Passenger Ship became one of the Management's initiative to overcome competition with airlines services. Changing strategy of the passenger class had been implemented in 2016 at 3 (three) vessels for particular routes from existing 26 vessels such as KM Kelud, KM Dorunda and KM Kelimutu. For 2016 period, the single class strategy was primarily focused on tourism segment and will be continuously developed in other shipping services offered by PT PELNI (Persero).

### 5. Implementation of NEW PELNI Ticketing System (NPTS)

In 2016, PT PELNI (Persero) had implemented New PTS (*PELNI Ticketing System*) in all passenger ships of PELNI. This application is modernization of *Ticketing Oracle* application that had been implemented since 2010 until 2015. Implementation of New PTS Application Development project is cooperation between PT PELNI (Persero) and PT Peruri *Digital Security* (PDS) based on Contract Number TH.3.2-01/SS/2015 dated January 30, 2015 with addendum as per September 27, 2016. Implementation of New PELNI Ticketing System (NPTS) in 2016 has also cooperated with Indomaret as one of PELNI passenger ship ticket payment channels. Monitoring on the NPTS implementation has also been done online via [http://mis.sqiva.com/pelni\\_monitoring](http://mis.sqiva.com/pelni_monitoring).



## 6. Implementasi *Enterprise e-Business Suite (EBS)*

PT PELNI (Persero) juga berinisiatif untuk melaksanakan pengembangan aplikasi keuangan sesuai dengan *best practice* dengan melakukan implementasi *Oracle e-Business Suite (EBS)* modul *finance* pada tahun 2016. Pelaksanaan implementasi dilakukan melalui kerjasama sinergi BUMN dengan PT Telkom Indonesia sesuai kontrak No.TH.09.16/16-02/SS/2016 tanggal 16 September 2016 meliputi penyediaan lisensi, *hardware*, tenaga ahli, pelatihan serta pendampingan dan dukungan selama tahap awal *Go Live*.

## 7. Penerapan *Human Resource Management (HRM)*

Aplikasi *Human Resource Management (HRM)* dikembangkan bertujuan untuk mengelola data kepegawaian PELNI yang terdiri dari 6 (enam) kriteria fungsional yaitu Manajemen Pegawai, Manajemen Absensi, Manajemen Organisasi, Manajemen *user*, Data Statistik dan Data Update.

Selain kebijakan strategis di atas, Perseroan juga menerapkan program-program penumpang yang non konvensional yang bertujuan untuk mengubah *mindset* calon penumpang dalam menggunakan jasa pelayaran PT PELNI (Persero) tidak hanya untuk mencapai tujuan, tetapi juga untuk *lifestyle business*. Berkaitan dengan armada, PT PELNI (Persero) mengambil langkah ekspansif pada tahun 2016 dengan mengoperasikan 80 (delapan puluh) kapal. Peningkatan jumlah armada kapal mengindikasikan penguatan kinerja PT PELNI (Persero) sejak tahun 2014 yang terus diiringi oleh efisiensi untuk memastikan bahwa seluruh armada, sebagai alat produksi, dapat terus beroperasi secara optimal dan menghasilkan laba bagi Perseroan.

## Perbandingan Hasil dan Target Kinerja Tahun 2016

Melalui implementasi kebijakan strategis di atas, PT PELNI (Persero) mencatat kinerja yang memuaskan pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan dalam RKAP 2016, meskipun indikator produksi Perseroan mencatat beberapa penurunan.

Pada tahun 2016, jumlah penumpang dan muatan barang mengalami penurunan masing-masing sebesar 12,57% dan 8,60% jika dibandingkan dengan capaian jumlah penumpang dan muatan barang pada tahun 2015. Namun, muatan *container* yang diangkut pada tahun 2016 mencatat peningkatan 15,41% dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Secara spesifik, muatan kendaraan mengalami penurunan sebesar 52,34% dan muatan ternak mengalami kenaikan 100% dibandingkan tahun 2015. Kenaikan muatan ternak secara signifikan didorong oleh adanya penugasan dari pemerintah untuk kapal perintis dan kapal angkutan ternak.

## 6. Implementation of Enterprise e-Business Suite (EBS)

PT PELNI (Persero) also has an initiative to develop financial application based on best practice by implementing Oracle e-Business Suite (EBS) finance module in 2016. Implementation was done under SOE Synergy cooperation with PT Telkom Indonesia with contract number TH.09.16/16-02/SS/2016 dated September 16, 2016 including provision of license, hardware, experts, training and assistance as well as support during the early Go Live phase.

## 7. Implementation of Human Resource Management (HRM)

The Human Resource Management (HRM) application is developed to manage employment data of PELNI comprising of 6 (six) functional criteria, among others: Employee Management, Presence Management, Organization Management, User Management, Statistical Data and Data Update.

Other than strategic policies that are mentioned above, the Company has also implemented non-conventional passenger programs aiming to transform mindset of prospective passenger in using services of PT PELNI (Persero) not only to achieve the target but also for business lifestyle. In terms of fleet size, PT PELNI (Persero) took expansive movement in 2016 by operating 80 (eighty) vessels. Increasing number of the vessels indicated PT PELNI (Persero)'s performance growth since 2014 that is followed by efficiency to ensure that all fleets, as means of production, to be operated optimally and generated profit for the Company.

## Comparison Between Performance Result and Target 2016

Through implementation of strategic policies that were mentioned above, PT PELNI (Persero) recorded satisfactory performance if compared with targets set in RKAP 2016, despite the Company recorded a decrease in several production indicators.

In 2016, total passenger and cargo decreased by 12.57% and 8.60%, respectively, if compared with achievement of total passenger and cargo in 2015. However, the container cargo recorded an increase of 15.41% in 2016 if compared with realization in 2015. Specifically, vehicle cargo decreased by 52.34% and cattle cargo increased 100% if compared with 2015. Significant increase of cattle cargo was driven by assignment from the Government for pioneer ship and cattle ship.



Meskipun jumlah penumpang dan muatan barang mengalami penurunan, secara konsolidasi, PT PELNI (Persero) berhasil membukukan pendapatan usaha mencapai Rp4.477.678 juta atau mencapai 80,06% dari RKAP Tahun 2016 sebesar Rp5.593.013 juta. Tidak tercapainya pendapatan sesuai target RKAP diakibatkan oleh tidak tercapainya target RKAP pada masing-masing pos pendapatan di mana Pendapatan Usaha Perkapalan hanya membukukan pendapatan Rp3.609.268 juta atau 76,15% dari RKAP, Pendapatan Usaha Non-Perkapalan membukukan Rp40.346 juta atau 50,83% dari RKAP dan Pendapatan Usaha Perusahaan Anak hanya mencapai Rp828.064 juta atau 107,02% dari target RKAP 2016. Sekalipun demikian, raihan pendapatan tahun 2016 mengalami pertumbuhan 115,04% dibandingkan pendapatan usaha tahun 2015 sebesar Rp3.892.201 juta.

Di sisi lain, capaian Laba Bersih Setelah Pajak pada tahun 2016 sebesar Rp248.773 juta atau 151,05% di atas target RKAP 2016 sebesar Rp164.694 juta dan mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 251,46% dibandingkan capaian Laba Bersih Setelah Pajak Tahun 2015 yaitu Rp98.930 juta. Pencapaian Laba Bersih Setelah Pajak melampaui target RKAP tersebut merupakan kontribusi dari implementasi kebijakan strategis Manajemen dalam mengoptimalkan alat produksi serta efisiensi aspek operasional selama tahun 2016.

## Kendala Yang Dihadapi Tahun 2016

Manajemen melihat bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Perseroan pada tahun 2016 adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Perseroan saat ini tengah berada pada suatu fase transformasi untuk mengubah pola pikir seluruh Insan PELNI terhadap standar pelayanan minimum dalam jasa angkutan pelayaran dan angkutan barang yang diberikan oleh Perseroan. Dalam kondisi aktual, pelayanan dalam setiap armada kapal tidak lagi cukup hanya dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum yang diterapkan oleh Kementerian Perhubungan. Manajemen senantiasa mengarahkan seluruh Insan PELNI untuk memberikan pelayanan *service excellence* dan *hospitality* yang prima dengan standar pelayanan merujuk pada *best practice* di sektor pariwisata.

Selain tantangan dalam melakukan transformasi *mindset* SDM dan standar pelayanan, Perseroan juga tetap mewaspadai tantangan kompetisi sektor transportasi dan jasa angkutan yang terus berkembang serta adanya kemungkinan *entrance* dari perusahaan pelayaran swasta pada rute-rute yang dikelola oleh Perseroan saat ini.

## Analisis Prospek Usaha

Memasuki tahun 2017, Manajemen memandang bahwa PT PELNI (Persero) memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Untuk meraih peluang pertumbuhan di tahun mendatang, Manajemen telah mempersiapkan 2 (dua) portfolio bisnis

Despite decreasing number of passenger and cargo, PT PELNI (Persero) booked consolidated revenues achieving Rp4,477,678 million or 80.06% of Rp5,593,013 million targeted in RKAP 2016. Revenue achievement below the RKAP target was due to achievement below the target in each revenue account where Revenues from Shipping Business only booked Rp3,609,268 million or 76.15% from the RKAP, Non-Shipping Business booked Revenues of Rp40,346 million or 50.83% from the RKAP and Revenues from Subsidiaries only achieved Rp828,064 million or 107.02% from the RKAP 2016 target. However, revenue realization grew 115.04% in 2016 if compared with Rp3,892,201 million revenues booked in 2015.

On the other hand, realization of Net Profit achieved Rp248,773 million in 2016 or 151.05% exceeding Rp164,694 million targeted in RKAP 2016 or significantly increased by 251.46% if compared with Net Income realization in 2015 that was Rp98,930 million. The realization of Net Income exceed the RKAP target was contributed from implementation of strategic policy by the Management in optimizing production modes as well as operational aspect efficiency throughout 2016.

## Issues in 2016

The Management views that the greatest challenge for the Company in 2016 was coming from Human Resources (HR) aspect. The Company is currently under transformation phase to transform mindset of all PELNI People towards minimum service standard in the shipping and cargo transportation services that are provided by the Company. In the actual condition, the services provided in every vessel fleet are no longer sufficient if only referring to Minimum Service Standard applied by the Ministry of Transportation. The Management always leads the PELNI People to provide service and hospitality excellence with service standard referring to best practice in tourism sector.

Besides a challenge in transforming mindset of our people, the Company also concerns challenge from growing competition in transportation and logistic sectors as well as possibility of entrance from private shipping company in routes that are currently managed by the Company.

## Business Prospect Analysis

Approaching 2017, the Management views that PT PELNI (Persero) has a promising business prospect. To seize growth opportunity in the upcoming year, the Management has prepared 2 (two) business portfolio, tourism program and cargo or logistic



yaitu program wisata dan angkutan barang atau logistik. Hal ini merupakan bagian dari fokus Manajemen pada tahun 2017 untuk meningkatkan pangsa pasar dan kontribusi pendapatan dari segmen penumpang non-konvensional, yaitu penumpang yang memiliki kebutuhan *lifestyle business* dan *event on board*. Dalam segmen *event on board*, Perseroan menyediakan fasilitas untuk berbagai event antara lain pelatihan, *study tour*, *meeting*, *gathering* ataupun *event wisata*. Untuk mengoptimalkan pangsa pasar di segmen pariwisata, Perseroan telah merancang paket-paket wisata untuk diluncurkan pada tahun 2017 bekerja sama dengan berbagai mitra strategis untuk menawarkan paket wisata bernali tambah kepada pelanggan.

Selain prospek usaha dari program-program baru yang menjanjikan, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pelayaran, pengembangan usaha PT PELNI (Persero) juga akan dipengaruhi secara signifikan oleh implementasi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan seluruh wilayah Indonesia untuk terhubung satu sama lain dan program kerja Pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Manajemen melihat bahwa ke depan, Pemerintah akan terus mendorong implementasi kebijakan transportasi dan angkutan barang hingga ke wilayah terpencil di Indonesia yang akan menjadi suatu peluang tersendiri bagi PT PELNI (Persero) yang memiliki *core business* pelayaran hingga ke pulau-pulau terpencil dan terluar di wilayah Republik Indonesia.

Terkait dengan prospek usaha Perseroan ke depan, Manajemen mencermati bahwa saat ini era transportasi dan angkutan pelayaran sudah berubah. Saat ini, industri pelayaran juga menghadapi *digital competition era* di mana perusahaan yang dapat bertahan adalah perusahaan yang dapat cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Ke depan, Perseroan akan terus melakukan upaya transformasi untuk mencapai *sustainable growth* bagi PT PELNI (Persero).

## Penerapan Tata Kelola Perusahaan

PT PELNI (Persero) menempatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagai landasan bagi seluruh aktifitas bisnis dan operasional untuk membangun BUMN yang berkinerja unggul dan beretika kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Komitmen terhadap GCG direalisasikan melalui pembentukan organ-organ Perseroan sesuai dengan kaidah dan landasan GCG di Indonesia baik Organ Utama seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi maupun Organ Pendukung seperti komite-komite, Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan *Whistle Blowing System* (WBS).

Sebagai bentuk evaluasi terhadap penerapan GCG di Perseroan, PT PELNI (Persero) juga telah secara rutin melakukan *GCG Assessment* secara berkala setiap tahun, baik *Self-Assessment*

transportation. These also become part of Management's focus in 2017 to gain market share and increase revenue contribution from non-conventional passenger segments that targets passenger with lifestyle business and event on board demands. In event on board segment, the Company provides facilities for events such as training, study tour, meeting, gathering and tourism event. To optimize market share in tourism segment, the Company has designed tourism package to be launched in 2017 in cooperation with strategic partners to offer added-value tourism package to the customers.

Besides business prospect from new and promising programs, as a State-Owned Enterprise (SOE) in shipping sector, business development of PT PELNI (Persero) will also influence significantly by implementation of The Republic of Indonesia Government's policy that aims to bridge entire territory of Indonesia to be connected as well as other working programs of the Government to bridge gap in one region with another. The Management analyzes that the Government will continuously support transportation and cargo logistic policy until remote area of Indonesia that will bring another opportunity for PT PELNI (Persero) with shipping core-business until the smallest and brother islands in the Republic of Indonesia territory.

Related with the Company's business prospect in the future, the Management observes shifting of transportation and shipping era nowadays. The shipping industry is currently also embracing digital competition era where the survived companies are they who are capable to adapt with technology development and changing customer's needs. Going forward, the Company will continue the transformation to achieve sustainable growth for PT PELNI (Persero).

## Corporate Governance Implementation

PT PELNI (Persero) places Good Corporate Governance as foundation for entire business and operational activities to develop SOE with excellent performance and ethics to all Shareholders and Stakeholders. The GCG Commitment is manifested by establishing Corporate structures in accordance with GCG principle and framework in Indonesia both the Main Structures such as General Meetings of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors as well as Supporting Structures such as the Committees, Corporate Secretary, Internal Audit and Whistle Blowing System.

As means of GCG implementation evaluation, PT PELNI (Persero) also has regularly conducted GCG Assessment every year both *Self-Assessment* and *Assessment by Independent Assessor*.



maupun *Assessment* oleh asesor independen. Pada tahun 2016, Perseroan telah melaksanakan *GCG Assessment* bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan capaian skor **80,785** dan predikat **BAIK**.

Selain melalui *GCG Assessment*, Perseroan juga telah melaksanakan evaluasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dengan mengadopsi "*Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence*" dan merujuk pada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan *Key Performance Indicators (KPI)* dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Pada Badan Usaha Milik Negara. Untuk tahun 2016, PT PELNI (Persero) memperoleh skor **431,25** dibanding target skor **300,00** atau nilai capaian sebesar 143,83%.

Segenap Manajemen dan Insan PELNI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan dan mencapai skor evaluasi penerapan GCG yang semakin baik di masa yang akan datang.

Selama tahun 2016, anggota Direksi juga telah berparitispasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi yaitu Seminar Nasional Infrastruktur, Transportasi dan Logistik Nasional yang diselenggarakan oleh BUMN Executive Club dengan tema "Pengembangan Infrastruktur & Transportasi Terpadu dalam Mendukung Sistem Logistik Nasional."

## Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Sebagai bagian dari transformasi Perseroan yang berlangsung pada tahun 2016, Manajemen melakukan perubahan komposisi anggota Direksi, yaitu Direksi Operasi & Pelayanan dan Direksi SDM & Umum. Posisi Datep Purwa Saputra sebagai Direktur SDM & Umum digantikan oleh Insan Purwarisyia L. Tobing dan posisi Daniel Ecber Bangongan sebagai Direktur Operasi dan Pelayanan digantikan oleh Muhammad Tukul Harsono.

Kepada Datep Purwa Saputra dan Daniel Ecber Bangongan, segenap Manajemen dan Karyawan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi serta kerja keras yang diberikan kepada PT PELNI (Persero). Kepada Insan Purwarisyia L. Tobing dan Muhammad Tukul Harsono kami ucapkan selamat bergabung dan marilah kita bersama bahu-membahu dalam mencapai kinerja PT PELNI (Persero) yang lebih baik lagi.

In 2016, the Company conducted the GCG Assessment in cooperation with Finance and Development Supevisory Agency (BPKP) with score of 80.785 and GOOD predicate.

Other than GCG Assessment, the Company had also conducted Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) by adopting Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence" and referring to Minister of SOE Letter Number S-08/S.MBU/2013 regarding Explanation of Key Performance Indicators (KPI) Policy and Excellent Performance Assessment (KPKU) Criteria in State Owned Enterprise. For 2016, PT PELNI (Persero) achieved 431.25 or achieved 143.83% if compared to the targeted score of 300.00.

Entire Management and PELNI People are committed to continuously improve quality of Good Corporate Governance in the Company and achieve higher GCG assessment score in the future.

In 2016, the Board of Directors had also participated in training and competency development programs, such as National Infrastructure, Transportation and Logistic held by BUMN Executive Club with theme "Integrated Infrastructure & Transportation Development in Supporting National Logistic System."

## Change in Board of Directors Composition

As part of corporate transformation in 2016, the Management also changed composition of the Board of Directors members which were Director of Operations & Services and Director of HR & General Affairs. Position of Detep Purwa Saputra as Director of HR & General Affairs was replaced by Insan Purwarisyia L. Tobing and Daniel Ecber Bangongan as Director of Operations & Services was replaced by Muhammad Tukul Harsono.

To Datep Purwa Saputra and Daniel Ecber Bangongan, the Management and Employees appreciate dedication and contribution as well as endeavor for PT PELNI (Persero). To Insan Purwarisyia L. Tobing and Muhammad Tukul Harsono, welcome and let's work together in pursuing higher performance for PT PELNI (Persero).



Dengan demikian, perubahan komposisi anggota Direksi PT PELNI (Persero), sebagai berikut:

**Periode 1 Januari 2016 – 1 Desember 2016:**

Direktur Utama	: Elfien Goentoro
Direktur Keuangan	: Wibisono
Direktur Armada dan Teknik	: Olih Masolich Sodikin
Direktur Komersial	: Harry Boediarto Soewarto
Direktur Operasi dan Pelayanan	: Daniel E. Bangunan
Direktur SDM dan Umum	: Datep Purwa Saputra

**Periode 1 Desember 2016 – 31 Desember 2016:**

Direktur Utama	: Elfien Goentoro
Direktur Keuangan	: Wibisono
Direktur Armada dan Teknik	: Olih Masolich Sodikin
Direktur Komersial	: Harry Boediarto Soewarto
Direktur Operasi dan Pelayanan	: Muhammad Tukul Harsono
Direktur SDM dan Umum	: Insan Purwarisya L. Tobing

## Penutup

Mewakili Direksi dan seluruh Manajemen PT PELNI (Persero), kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada PT PELNI (Persero) selama tahun 2016. Kami juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dewan Komisaris atas setiap arahan dan rekomendasi yang diberikan terkait pengelolaan Perseroan yang kami jalankan selama tahun 2016.

Kepada seluruh karyawan, terima kasih atas kerja keras dalam mencapai target kinerja PT PELNI (Persero) dan marilah kita terus berusaha lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih mendalam kepada seluruh mitra kerja dan pelanggan atas kepercayaan terhadap PT PELNI (Persero). Dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, kami yakin PT PELNI (Persero) dapat terus melangkah dan berkembang sebagai penyedia layanan transportasi dan angkutan pelayaran terdepan di Indonesia.

Therefore, the change of PT PELNI (Persero) Board of Directors members is as follows:

**January 1, 2016 – December 1, 2016:**

President Director	: Elfien Goentoro
Director of Finance	: Wibisono
Director of Fleets and Engineering	: Olih Masolich Sodikin
Director of Commercial	: Harry Boediarto Soewarto
Director of Operations and Services	: Daniel E. Bangunan
Director of HR and General Affairs	: Datep Purwa Saputra

**December 1, 2016 – December 31, 2016 Period:**

President Director	: Elfien Goentoro
Director of Finance	: Wibisono
Director of Fleet and Technical	: Olih Masolich Sodikin
Director of Commercial	: Harry Boediarto Soewarto
Director of Operations and Services	: Muhammad Tukul Harsono
Director of HR and General Affairs	: Insan Purwarisya L. Tobing

## Closing Statements

On behalf of PT PELNI (Persero) Board of Directors and Management, We sincerely express our gratitude to all Shareholders and Stakeholders for every trust and support provided to PT PELNI (Persero) throughout 2016. We also convey our utmost appreciation to the Board of Commissioners for every direction and recommendation related with management of the Company that had been implemented in 2016.

To our employees, thank you for your hard work in achieving performance target of PT PELNI (Persero) and let's move forward towards higher achievements. We also express our utmost appreciation to our partners and customers for their trusts to PT PELNI (Persero). With support and cooperation from all parties, We believe that PT PELNI (Persero) will continue develop and evolve as the leading transportation service and shipping fleets provider in Indonesia.

**Jakarta, Juni 2017**

Jakarta, June 2017

**Elfien Goentoro**  
**Direktur Utama**  
President Director



## Profile Direksi

### Profile of Board of Directors

**Elfien Goentoro**

**Direktur Utama**

**President Director**



Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk tanggal 6 Juni 1963, 53 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau meraih *Diploma Management Studies* dari Canterbury Business School, University of Kent, Inggris tahun 1993, Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1987 dan *Master of Business Administration (MBA)* dari Centerbury Business School, University of Kent, Inggris tahun 1994 dan Doktor Program Bisnis Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran tahun 2017.

Sepanjang karirnya, Beliau pernah menjabat di berbagai posisi strategis antara lain Direktur *Corporate Development* Lucky Textile Group (2002 – 2005), Direktur Utama PT Hanwei Guna Usaha (2007 – 2010), serta ditunjuk pula sebagai Komite GCG, SDM dan Teknologi PT Pertamina (Persero) (2007 – 2010). Selanjutnya, Beliau menjabat sebagai Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Strategis PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (2010 – 2011), Komisaris PT Krakatau Daya Listrik (2010 – 2014), Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Pertamina EP Cepu (2011 – 2014) hingga hingga diangkat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT PELNI (Persero) (2014 – 2015) dan Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Rumah Sakit PELNI (2015 – sekarang).

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT PELNI (Persero) sejak 22 Juni 2015 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-99/MBU/06/2015.

Indonesian Citizen, born in Nganjuk on June 6, 1963, 53 years old. He earned Diploma Management Studies from Canterbury Business School, University of Kent, England in 1993, Bachelor Degree of Chemical Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1987 and Master of Business Administration from Centerbury Business School, University of Kent, England in 1994 and Ph.D Degree of Business Management from Faculty of Economics and Business, Universitas Padjajaran in 2017.

Previously, during his career, He served in several positions, among others, Director of Corporate Development Lucky Textile Group (2002 – 2005), President Director of PT Hanwei Guna Usaha (2007 – 2010), who was also appointed as GCG, HR and Technology Committee at PT Pertamina (Persero) (2007 – 2010). Next, He was also appointed as Expert in Strategic Planning at PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (2010 – 2011), Commissioner at PT Krakatau Daya Listrik (2010 – 2014), Commissioner and Chairman of Audit Committee at PT Pertamina EP Cepu (2011 – 2014) until appointed as Director of Commercial and Business Development at PT PELNI (Persero) (2014 – 2015) and He is also currently serving as President Commissioner at PT Rumah Sakit PELNI (2015 – now).

He is appointed as President Director of PT PELNI (Persero) since June 22, 2015 pursuant to Minsiter of SOE Decree Number SK-99/MBU/06/2015.

**Olih Masolich Sodikin**  
**Direktur Armada dan Teknik**

Director of Fleets and Technical

Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis tanggal 22 September 1959, 57 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau meraih menyelesaikan pendidikan di Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Republik Indoensia tahun 1984 dan meraih berbagai sertifikasi di bidang pelayaran antara lain Ahli Mesin Kapal "A" tahun 1984, Diklat BP3IP Strata AMK "B" tahun 1988, Ahli Mesin Kapal "B" tahun 1988, Diklat BP3IP Strata AMK "C" Tahun 1992 dan Ahli Teknika Tingkat 1 (ATT I) tahun 2002.

Beliau mengawali karir di Perseroan sejak tahun 1986 dan menjabat di berbagai posisi strategis antara lain Pengawas Bidang Teknik pada DPA tahun 1998 – 2000, Kabag FRD/RR, Divisi Teknik tahun 2000 – 2002, Kabag Galangan Surya/Dock Surabaya tahun 2002 sebelum diangkat sebagai Kepala Divisi Teknik tahun 2002, Senior Manager Teknik tahun 2008 – 2009, Senior Manager SDM tahun 2009 – 2010, Senior Manager Pemasaran dan Pengembangan Usaha tahun 2010 – 2011, Senior Manager Pengadaan tahun 2011 hingga diangkat sebagai Direktur Armada & Teknik sejak tahun 2012. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Pelita Djaya (PIDC).

Beliau menjabat sebagai Direktur Armada dan Teknik PT PELNI (Persero) sejak 4 Februari 2013 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-125/MBU/2013.

Indonesian Citizen, born in Ciamis on September 22, 1959, 57 years old. Lives in Jakarta. He graduated his education from Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Republic of Indonesia in 1984 and obtained shipping certificaitons, among others "A" Ship Machine Expert in 1984, BP3IP Training AMK "B" Level in 1988, "B" Ship Machine Expert in 1988, BP3IP Training AMK "C" Level in 1992 and Engineering Expert Level 1 (ATT I) in 2002.

He started his career in the Company since 1986 and served in strategic positions, among others, Supervisor at Engineering Unit, DPA in 1998 – 2000, Head of FRD/RR Unit, Engineering Division in 2000 – 2002, Head of Galangan Surya Unit/Dock, Surabaya in 2002 before appointed as Head of Enginering Division in 2002, Engineering Senior Manager in 2008 – 2009, Human Resources Senior Manager in 2009 – 2010, Marketing and Business Development Senior Manager in 2010 – 2011, Procurement Senior Manager in 2011 until was appointed as Director of Fleet & Technical since 2012. He is also currently serving as Commissioner at PT Pelita Djaya (PIDC).

He is appointed as Director of Fleet and Technical at PT PELNI (Persero) since February 4, 2013 pursuant to Minsiter of SOE Decree Number SK-125/MBU/2013.





**Muhammad Tukul Harsono**  
**Direktur Operasi dan Pelayanan**  
**Director of Operations and Services**

Warga Negara Indonesia, lahir di Demak tanggal 1 November 1967, 49 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ahli Nautika Tingkat I BP3IP tahun 2007 dan *Master Mariner* dari Universitas BP3IP tahun 2007.

Beliau mengawali karir di Perseroan sejak tahun 1994 sebagai Perwira Kapal Perintis KM. Nagura hingga diangkat sebagai *Owner Surveyor* tahun 2006. Sepanjang karirnya, Beliau pernah menjabat di berbagai posisi strategis antara lain Kepala Pengawas Internal SPI (2008-2009), Head of DPA CO/SMK3 (2009-2012), Kepala Cabang GMPT PT PELNI (Persero) Cabang Ambon (2013), *Senior Manager HRD* (2013), Kepala Cabang GM PT PELNI Cabang Makassar (2014) hingga diangkat sebagai Direktur Utama PT PIDC (Anak Perusahaan PT PELNI (Persero)) (2014) dan Direktur PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (2016).

Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pelayanan PT PELNI (Persero) sejak 1 Desember 2016 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-263/MBU/12-2016.

Indonesian Citizen, born in Demak on November 1, 1967, 49 years old. Lives in Jakarta. He earned Bachelor Degree of Nautical Science, Level I, BP3IP in 2007 and Master of Mariner from Universitas BP3IP in 2007.

He started his career in the Company since 1994 as Vessel Officer at KM. Nagura until appointed as Owner Surveyor in 2006. Throughout his career, He served in strategic positions, among others, Head of Internal Audit SPI (2008 – 2009), Head of DPA CO/SMK3 (2009 – 2012), Head of Branch GM PT PELNI (Persero) Ambon Branch (2013), HRD Senior Manager (2013), Head of PT PELNI (Persero) Makassar Branch (2014) until was appointed as President Director of PIDC (Subsidiary of PT PELNI (Persero)) (2014) and Director of Dock & Vessels at Kodja Bahari (2016).

He is appointed as Director of Operations and Services at PT PELNI (Persero) since December 1, 2016 pursuant to Minister of SOE Decree Number SK-263/MBU/12/2016.



### Harry Boediarto Soewarto

Direktur Komersial

Director of Commercial

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 30 Januari 1956, 60 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Planologi dari Institut Teknologi Bandung tahun 1982 dan saat ini sedang menyelesaikan program studi Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

Beliau mengawali karir sebagai Staf Perum Pelabuhan II Tanjung Priok pada tahun 1983 – 1987 sebelum bergabung dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan tahun 1987 – 1991. Selama karirnya di Kementerian Perhubungan, Beliau menduduki berbagai posisi strategis hingga diangkat sebagai Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2011 – 2012, Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi (PKKPJT) – Kementerian Perhubungan, tahun 2012 – 2014, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut tahun 2014 – 2015 dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, BALITBANGHUB, Kementerian Perhubungan, tahun 2015.

Beliau menjabat sebagai Direktur Komersial PT PELNI (Persero) sejak 21 Agustus 2015 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-148/MBU/08/2015.

Indonesian Citizen, born in Bandung on January 30, 1956, 60 years old. Lives in Jakarta. He earned Bachelor Degree of Planology Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1982 and currently enrolling Postgraduate Degree of Environmental Science, Universitas Indonesia.

He started his career as Staff at Perum Pelabuhan II Tanjung Priok in 1983 – 1987 before joining with Marine General Directorate, Ministry of Transportation in 1987 – 1991. During his career at the Ministry of Transportation, He served in strategic positions until was appointed as Director of Navigation, Marine Transportation General Directorate in 2011 – 2012, Director of Transportation Partnership and Service Studies Center (PKKPJT) – Ministry of Transportation in 2012 – 2014, Director of Marine Transportation Traffic in 2014 – 2015 and Director of Marine Transportation Research and Development, BALITBANGHUB, Ministry of Transportation in 2015.

He is appointed as Director of Commercial at PT PELNI (Persero) since August 21, 2015 pursuant to Minister of SOE Decree Number SK-148/MBU/08/2015.





**Wibisono**  
**Direktur Keuangan**  
Director of Finance



Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 10 April 1956, 60 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jenderal Soedirman tahun 1984 dan Magister Manajemen Bisnis Administrasi Teknologi dari Institut Teknologi Bandung tahun 1997.

Beliau mengawali karir sebagai Staf Koordinasi Program di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara tahun 1984 – 1990 dan kemudian melanjutkan karir sebagai Staf Deputi Perencanaan di Badan Pengelola Industri Strategis tahun 1990 – 1992 hingga diangkat sebagai Kepala Bagian Sistem dan Prosedur di Badan Pengelola Industri Strategis tahun 1992 – 1998. Beliau melanjutkan karir sebagai Sekretaris Komisaris di PT Industri Kereta Api tahun 1995 – 2001 dan menduduki berbagai posisi strategis di Kementerian BUMN antara lain sebagai Kepala Sub-Direktorat Perusahaan Perhubungan tahun 1999 – 2000, Kepala Sub-Direktorat Perhubungan Laut tahun 2000 – 2001 dan menjabat sebagai Komisaris PT Dok dan Perkapalan Surabaya tahun 1999 – 2003. Pada tahun 2001, Beliau ditunjuk sebagai Direktur Keuangan PT Sarana Bandar Nasional sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama PT Sarana Bandar Nasional tahun 2007 – 2014 dan diangkat sebagai Direktur PT PELNI (Persero) sejak tahun 2007. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT RS PELNI.

Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan PT PELNI (Persero) sejak 4 Februari 2013 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-125/MBU/2013.

Indonesian Citizen, born in Bandung on April 10, 1956, 60 years old. Lives in Jakarta. He earned Bachelor Degree of Economics from Universitas Jenderal Soedirman in 1984 and Master Degree of Engineering Administration Business Management from Institut Teknologi Bandung in 1997.

He started his career as Program Coordiantion Staff at PT Industri Pesawat Terbang Nusantara in 1984 – 1990 and continued his career as Planning Deputy Staff at Strategic Industry Management Agency in 1990 – 1992 until was appointed as Head of System and Procedure at Strategic Industry Management Agency in 1992 – 1998. He continued his career as Board of Commissioners Secretary at PT Industri Kereta Apil in 1995 – 2001 and served in strategic positions at Ministry of SOE, among others, Head of Transportation Company Sub-Directorate in 1999 – 2000, Head of Marine Transportation Sub-Directorate in 2000 – 2001 and appointed as Commissioner at PT Dok and Perkapalan Surabaya in 1999 – 2003. In 2001, He was appointed as Finance Director at PT Sarana Bandar Nasional before appointed as President Commissioner at PT Sarana Bandar Nasional in 2007 – 2013 and Director at PT PELNI (Persero)since 2007. He is also currently serving as Commissioner at PT RS PELNI.

He is appointed as Director of Finance at PT PELNI (Persero) since February 4, 2013 pursuant to Minister of SOE Decree Number SK-125/MBU/2013.



**Insan Purwarisya L. Tobing**  
**Direktur SDM & Umum**  
Director of HR & General Affairs

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 12 Maret 1965, 51 tahun. Domisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran tahun 1988.

Sepanjang karirnya, Beliau pernah menjabat di berbagai posisi strategis antara lain Asisten Manajer Perencanaan dan Pengembangan PT Pertamina – Direktorat Hulu (2004 – 2005), Manajer Perencanaan dan Pengembangan SDM (2006 – 2007), VP HRD PT Pertamina EP (2007 – 2010), VP People Management PT Pertamina (Persero) (2010 – 2012) hingga diangkat sebagai SVP HR Development PT Pertamina (Persero) (2012 – 2016).

Beliau menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum PT PELNI (Persero) sejak 1 Desember 2016 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-263/MBU/12/2016.

Indonesian Citizen, born in Bandung on March 12, 1965, 51 years old. Lives in Jakarta. He earned Bachelor Degree of International Relation from Universitas Padjajaran in 1988.

During his career, previously, He served in strategic positions, among others, Planning and Development Manager Assistant at PT Pertamina – Upstream Directorate (2004 – 2005), HR Planning and Development Manager (2006 – 2007), VP HRD at PT Pertamina EP (2007 – 2010), VP People Management at PT Pertamina (Persero) (2010 – 2012) until appointed as SVP HR Development at PT Pertamina (Persero) (2012 – 2016).

He is appointed as Director of HR and General Affairs at PT PELNI (Persero) since December 1, 2016 pursuant to Minister of SOE Decree Number SK-263/MBU/12/2016.





## Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016

### Responsibility on Annual Report 2016

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PELNI (Persero) tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2017

We, the undersigned, herewith declare that all information contained in PT PELNI (Persero) Annual Report 2016 had been fully disclosed and being solely responsible upon accountability of this annual report contents.

This statements is made truthfully.

Jakarta, June 2017

Dewan Komisaris  
Board of Commissioners

**Leon Muhamad**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

**Omo Dahlan**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner

**Satya Bhakti Parikesit**  
Komisaris  
Commissioner

**Wolter B. Hesegem**  
Komisaris  
Commissioner

**Raldi Hendro Koestoeer**  
Komisaris  
Commissioner

**Sudarto**  
Komisaris  
Commissioner



## Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 Responsibility on Annual Report 2016

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PELNI (Persero) tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2017

We, the undersigned, herewith declare that all information contained in PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Annual Report 2016 had been fully disclosed and being solely responsible upon accountability of this annual report contents.

This statements is made truthfully.

Jakarta, June 2017

**Direksi**  
Board of Directors

**Elfien Goentoro**  
Direktur Utama  
President Director

**Muhammad Tukul Harsono**  
Direktur Operasi dan Pelayanan  
Director of Operations and Services

**Harry Boediarto Soewarto**  
Direktur Komersial  
Director of Commercial

**Olih Masolich Sodikin**  
Direktur Armada dan Teknik  
Director of Fleets and Technical

**Wibisono**  
Direktur Keuangan  
Director of Finance

**Insan Purwarisya L. Tobing**  
Direktur SDM & Umum  
Director of HR & General Affairs





# Profil Perusahaan

## Company Profile

---

“

Dalam perkembangannya,  
**PT PELNI (Persero)** tidak hanya  
melayani jasa transportasi kapal  
laut, Kami pun memberikan  
layanan paket wisata bahari  
ke pulau-pulau yang memiliki  
keindahan bawah laut dan  
pemandangan alam yang  
mengagumkan.

During its progress, PT PELNI (Persero) does not only provide marine vessels transportation service but also marine tourism package to islands with beautiful underwater and landscape

”





# Identitas Perusahaan

## Corporate Identity

<b>Nama Perusahaan</b> Company Name	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia
<b>Nama Panggilan</b> Called Name	PELNI
<b>Bidang Usaha</b> Line of Business	Pelayaran Shipping
<b>Badan Hukum</b> Legal Entity	Perseroan Terbatas Limited Liability Company
<b>Status Perusahaan</b> Company Status	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State-Owned Enterprise (SOE)
<b>Tanggal Pendirian</b> Date of Establishment	28 April 1952 April 28, 1952
<b>Tanggal Operasi</b> Date of Operation	28 April 1952 April 28, 1952
<b>Dasar Pendirian</b> Establishment Deeds	Akta pendirian No. 92 tanggal 28 April 1952 yang dibuat dihadapan Raden Kadiran Notaris di Jakarta. Establishment Deeds No. 92 dated April 28, 1952 drafted before Raden Kadiran Notary in Jakarta.
<b>Kepemilikan Saham</b> Shares Ownership	100% Pemerintah Indonesia 100% owned by The Republic of Indonesia Government
<b>Modal Dasar</b> Authorized Capital	Rp13.000.000.000.000
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> Subscribed and Fully Paid-in Capital	Rp6.565.092.000.000
<b>NPWP</b>	01.001.637.6-093.000
<b>TDP</b>	09.05.1.50.37082.
<b>SIUP</b>	BXXV-845/AL.58
<b>Jumlah Karyawan</b> Total Employees	4.498 (2016) 4.710 (2015)
<b>Alamat Perusahaan</b> Address	Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat 10130  Telp: (021) 6334342 Fax: (021) 63854130
<b>Website</b>	<a href="http://www.pelni.co.id">www.pelni.co.id</a>



## Sejarah Singkat

### Brief History

Sejarah berdirinya PT PELNI (Persero) bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Latar belakang pendirian Yayasan PEPUSKA diawali dari penolakan pemerintah Belanda atas permintaan Indonesia untuk mengubah status maskapai pelayaran Belanda yang beroperasi di Indonesia, N.V. K.P.M (*Koninklijke Paketvaart Matschappij*) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pemerintah Indonesia juga menginginkan agar kapal-kapal KPM dalam menjalankan operasi pelayarannya di perairan Indonesia menggunakan bendera Merah Putih. Pemerintah Belanda dengan tegas menolak semua permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan modal awal 8 (delapan) unit kapal dengan total tonnage 4.800 DWT (*dead weight ton*), PEPUSKA berlayar berdampingan dengan armada KPM yang telah berpengalaman lebih dari setengah abad. Persaingan benar-benar tidak seimbang ketika itu, karena armada KPM selain telah berpengalaman, jumlah armadanya juga lebih banyak serta memiliki kontrak-kontrak monopoli. Akhirnya pada 28 April 1952 Yayasan PEPUSKA resmi dibubarkan.

Pada saat yang sama didirikanlah PT PELNI (Persero) dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta Akta Notaris Nomor 92 tahun 1952.

Dalam perkembangannya, PT PELNI (Persero) tidak hanya melayani jasa transportasi kapal laut, Kami pun memberikan layanan paket wisata bahari ke pulau-pulau yang memiliki keindahan bawah laut dan pemandangan alam yang mengagumkan, seperti Kepulauan Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan dan Tomini.

Pada tahun 2015 PT PELNI (Persero) dipercaya Pemerintah RI sebagai operator Kapal Perintis, Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak yang menjangkau di wilayah Indonesia.

Sejak awal pendirian di tahun 1952 hingga 31 Desember 2016, PT PELNI (Persero) belum pernah melakukan pergantian nama.

Establishment history of PT PELNI (Persero) was initiated after the issuance of Joint Decree between Minister of Transportation and Minister of Public Works on September 5, 1950 declaring establishment of Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PEPUSKA).

Background of PEPUSKA Foundation establishment was begun when the Government of Netherlands rejected request from Indonesia to change status of N.V. K.P.M (*Koninklijke Paketvaart Matschappij*), a Netherlands shipping company operated in Indonesia into a Perseroan Terbatas (PT)/Limited Liability Company. The Government of Indonesia also wished the vessels of KPN to use Red and White flag during their shipping operations in Indonesian water territory. The Government of Netherland firmly rejected all appeals submitted by the Republic of Indonesia Government.

With initial capital of 8 (eight) units vessel with total tonnage of 4,800 DWT (*dead weight ton*), PEPUSKA sailed side to side with KPM fleets with more than half of century experience. At that time, this was such an unbalanced competition not only due to bigger fleets but also monopoly contracts. Finally on April 28, 1952, Pepuska Foundation was officially dismissed.

At the same time, PT PELNI (Persero) was established pursuant to Minister of Transportation Decree Number M.2/1/2 dated February 28, 1952 and Number A.2/1/2 dated April 19, 1952 and Notarial deeds Number 92 of 1952.

During its progress, PT PELNI (Persero) does not only provide marine vessels transportation service but also marine tourism package to islands with beautiful underwater and landscape such as Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan and Tomini Islands.

Since 2015, PT PELNI (Persero) was mandated by the RI Government to serve as operator for pioneer, Tol Laut and Cattle vessels covering entire Indonesian territory.

Since early establishment in 1952 up to December 31, 2016, PT PELNI (Persero) has never changed name of the Company.



## Jejak Langkah Perusahaan

### Milestones

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Issuance of Joint Decree (SKB) between Minister of Transportation and Minister of Public Works dated September 5, 1950 declaring Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Perubahan status hukum PT PELNI (Persero) menjadi Perusahaan Negara (PN) dan menjadikan PT PELNI (Persero) sebagai Agen Pemerintah (*Government Agency*).

PT PELNI (Persero) legal entity was changed into Perusahaan Negara (PN)/State Company and brought PT PELNI (Persero) as Government Agency.

1950

1952

1953

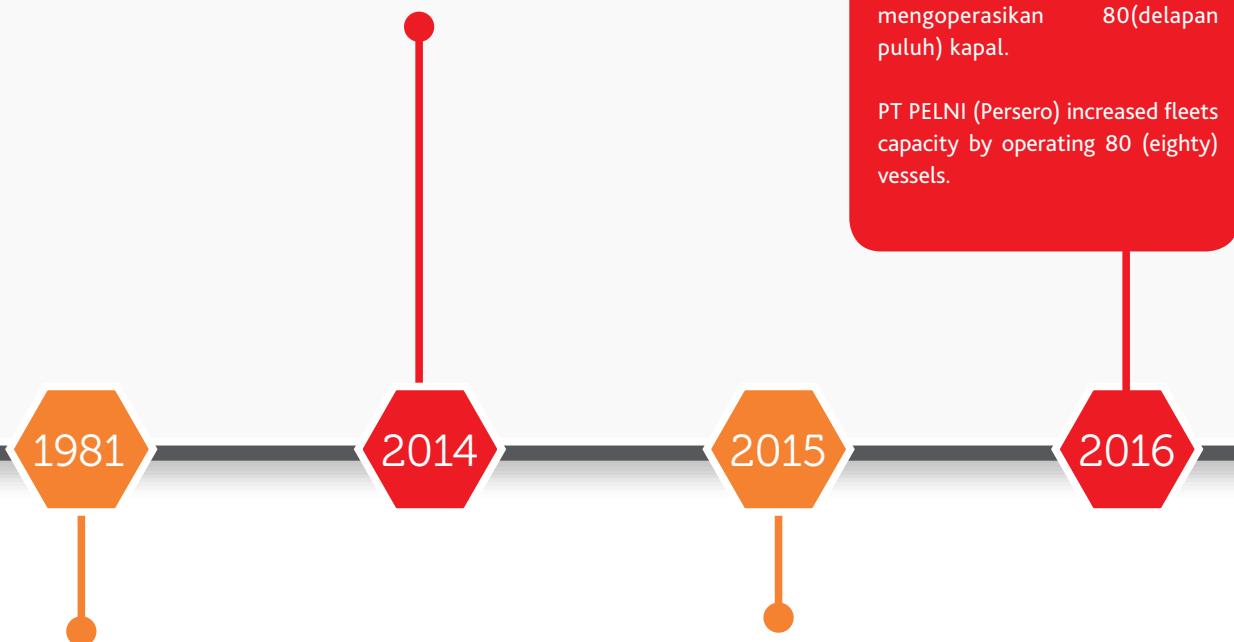
1975

PT PELNI (Persero) resmi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R. Djuanda No. 2/1/2 tanggal 23 Februari 1952.

PT PELNI (Persero) was officially established under Minister of Transportation R. Djuanda Decree Number 2/1/2 dated February 23, 1952.

Perubahan status hukum PN PELNI menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Maret 1973 dan Akta Notaris Nomor 31/1975.

PN PELNI legal entity was changed into Perusahaan Perseroan under Government Regulation Number March 17, 1973 and Notarial Deeds Number 31/1975.



Penyerahan pengelolaan pelayaran perintis kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 35 unit Kapal Perintis.

Delegation of pioneer shipping management to PT PELNI (Persero) by operating 35 units pioneer ship.

Penunjukkan PT PELNI (Persero) oleh Pemerintah RI sebagai operator Kapal Perintis, Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak yang menjangkau di wilayah Indonesia.

Appointment of PT PELNI (Persero) by The Republic of Indonesia Government as operator of pioneer, Tol Laut and Cattle vessels covering territory of Indoensia.



## Bidang Usaha

### Line of Business

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan yaitu untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang usaha pelayaran dalam dan luar negeri untuk angkutan penumpang, hewan dan barang dalam bentuk unit curah kering atau cair dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan, kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh PT PELNI (Persero) adalah:

- a. Kegiatan usaha jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran berjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu.
- b. Kegiatan usaha jasa keagenan usaha pelayaran.
- c. Kegiatan usaha jasa operasi terminal, pergudangan, angkutan rede dan ekspedisi/*forwarding*.
- d. Kegiatan usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok/reparasi kapal.
- e. Kegiatan *charter* dan *broker* kapal.
- f. Kegiatan jasa konsultan, pendidikan, pelatihan dan pelayanan kesehatan.

Pursuant to Articles of Association, purpose and objectives of the Company are to participate in implementing and supporting policy and program of the Government in economy sector and national development generally as well as development in domestic and overseas shipping business for passenger, cattle and cargo as liquid or dry bulk units by implementing Limited Liability Company.

According to the purpose and objective of the Company's establishment, business activity that is operated by PT PELNI (Persero) is among others:

- a. Passenger and cargo transportation business with scheduled and on demand (charter) shipping network.
- b. Shipping agency service business.
- c. Terminal, warehouse, rede transportation and expedition/forwarding operation services.
- d. Vessels maintenance and ship docking/reparation services.
- e. Ship charter and broker services.
- f. Consulting, education, training and health services.



## Produk dan Jasa Products And Services



### Jasa Perkapalan

#### Kapal 2 in 1

Kapal jenis 2 in 1 adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Welf dan dibangun di galangan Pepenburg, Jerman. Kapal 2 in 1 ini memiliki kapasitas 1583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu Kapal tipe 2 in 1 ini secara resmi diberi nama KM Gunung Dempo, dibuat sejak pertengahan 2006 dan panjang 146,80 m dengan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot.

Kapal jenis 2 in 1 ini beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di pulau-pulau kecil dan terdepan di Indonesia, yang tidak hanya memerlukan angkutan penumpang, tapi juga angkutan barang-barang kebutuhan pokok maupun barang-barang lain seperti pakaian, furniture hingga kendaraan bermotor.

#### Kapal Penumpang Serbaguna

Kapal jenis 3 in 1 adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan mobil sekaligus. Kapal Motor Dobonsolo dan Kapal Motor Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis 3 in 1, yaitu kapal serbaguna yang dapat mengangkut kontainer di bagian depan dan belakang serta penumpang dan mobil. Kapal ini telah dimodifikasi di galangan Sembawang Singapura.

### Shipping Services

#### 2 in 1 Ship

2 in 1 Ship is a type of ship with capacity to carry passenger and containers that is designed by Meyer Welf and built at Pepenburg Shipyard, Germany. The 2 in 1 ship has capacity of 1,583 passengers and 98 containers. One of the 2 in 1 ships is officially named KM Gunung Dempo and built in mid-2006 with total length of 146.80 m and sailing speed over 20 knot.

The 2 in 1 ship is operated to serve public needs, primarily in small and outer islands of Indonesia, who not only requiring passenger vessels but also transportation for groceries and other commodities such as apparel, furniture and vehicle.

#### Multipurpose Passenger Ship

The 3 in 1 ship type is multipurpose passenger ship with capacity to carry containers, passenger and car simultaneously. KM Dobonsolo and KM Ciremai are passenger ships which have been modified into 3 in 1 ship type, the multipurpose ships for carrying container at the front and back sides as well as passenger and car. The ships had been modified at Sembawang Shipyard, Singapore.



Kemampuan kapal 3 in 1 PT PELNI (Persero) dalam mengangkut kontainer dan kendaraan roda empat, secara langsung berkontribusi dalam mendistribusikan kebutuhan pokok di wilayah Indonesia bagian timur yang dipasok dari kota-kota besar bagian barat seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar.

### Kapal Barang

Untuk keperluan distribusi barang logistik ke seluruh wilayah Indonesia, kami menyediakan kapal barang untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

PT PELNI (Persero) memiliki 3 kapal barang yaitu KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 dan KM Caraka Jaya Niaga- 32 dengan kapasitas muat yang berbeda-beda. Ketiga kapal ini dibangun di Galangan PT PAL Surabaya, dengan spesifikasi:

1. KM Caraka Jaya Niaga III – 4 dibangun pada tahun 1988 memiliki DWT 3000 T/M.
2. KM Caraka Jaya Niaga III – 22 dibangun pada tahun 1986 dengan DWT 3650 T/M.
3. KM Caraka Jaya Niaga III – 32 dibangun pada tahun 1993 dengan DWT 3650 T/M.

### Kapal Tol Laut

Kapal Tol Laut dioperasikan merujuk pada:

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.

Capacity of PT PELNI (Persero)'s 3 in 1 ships in carrying containers and four-wheels vehicle contribute directly in distributing groceries to Eastern Indonesia that are supplied from western major cities such as Jakarta, Surabaya and Makassar.

### Cargo Ship

For logistic distribution across Indonesian region, we provide cargo ship to carry large-volume cargo with excellent service and supported by professional personnel.

PT PELNI (Persero) has 3 cargo ships, among others, KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 and KM Caraka Jaya Niaga- 32 with different capacities. These three ships were built at Shipyard of PT PAL Surabaya with specification, as follows:

1. KM Caraka Jaya Niaga III – 4 that was built in 1988 with DWT of 3000 T/M.
2. KM Caraka Jaya Niaga III – 22 that was built in 1986 with DWT of 3650 T/M.
3. KM Caraka Jaya Niaga III – 32 that was built in 1993 with DWT of 3650 T/M.

### Tol Laut Ship

Tol Laut Ship is operated referring to:

- Presidential Regulation Number 106 of 2015 regarding Public Service Obligation Implementation for Marine Cargo.



- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*).

Saat ini, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 6 (enam) armada Kapal Tol Laut yaitu KM Freedom, KM Mentari Perdana, KM Caraka Jaya Niaga III – 22, KM Meratus Ultima I, KM Caraka Jaya Niaga III – 32 dan KM Caraka Jaya III – 4.

#### Jenis Muatan Kapal Tol Laut:

Jenis muatan Kapal Tol Laut terdiri dari 2 (dua) kategori barang yaitu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kategorisasi muatan Kapal Tol Laut dijelaskan sebagai berikut:

- Minister of Transportation Regulation Number PM. 4 of 2016 as Amendment to Minister of Transportation Regulation Number PM 161 of 2015 regarding Public Service Obligation for Marine Cargo.
- Presidential Decree Number 71 of 2015 regarding Stipulation and Storing of Groceries and Valuable Goods.
- Minister of Transportation Regulation Number 10 of 2016 regarding Marine Cargo Transportation Tariff in Public Service Obligation Implementation.

PT PELNI (Persero) currently operates 6 (six) Tol Laut ships fleet, among others, KM Freedom, KM Mentari Perdana, KM Caraka Jaya Niaga III – 22, KM Meratus Ultima I, KM Caraka Jaya Niaga III – 32 and KM Caraka Jaya III – 4.

#### Type of Tol Laut Ship Cargo:

Type of Tol Laut Ship Cargo consists of 2 (two) cargo categories, that are groceries and valuable goods. Pursuant to Presidential Regulation Number 71 of 2015 regarding Stipulation and Storing of Groceries and Valuable Goods, classification of Tol Laut cargo is explained below:



Barang Kebutuhan Pokok/Groceries	Barang Penting/ Valuable Goods
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian/Agricultural groceries:	
1. Beras/Rice	1. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai
2. Kedelai bahan baku tahu dan tempe Cabe Soy as material for tofu and soybean cake	2. Pupuk
3. Cabe/chilli	3. Gas Elpiji 3 (tiga) kilogram
4. Bawang merah/Onion	4. Triplek
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri/Industrial groceries:	5. Semen
1. Gula/Sugar	6. Besi baja konstruksi
2. Minyak goreng/Oil	7. Baja ringan
3. Tepung terigu/Wheat Flour	
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan dan Perikanan: Livestock and Fisheries product groceries:	
1. Daging sapi/Meat	1. Seeds, including rice, corn and soy
2. Daging ayam ras/Chicken	2. Fertilizer
3. Telur ayam ras/ Eggs	3. Elpiji Gas 3 (three) kilogram
4. Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang Fresh fish, such as milkfish, mackerel and tuna/mackerel tuna/ skipjack tuna	4. Plywood
	5. Cement
	6. Construction Steel
	7. Light steel

## Kapal Ternak

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 1 (satu) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dengan rute Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

## Kapal Perintis

Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak. Dasar hukum pengelolaan Kapal Perintis, antara lain:

- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/7/1/DJPL-15 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/5/18/DJPL-15 Tentang Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2016 Serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya Tanggal 30 November 2015.

Saat ini, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 46 (empat puluh enam) Kapal Perintis yang menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia.

## Cattle Ship

PT PELNI (Persero) operates 1 (one) Cattle Ship, KM Camara Nusantara I with route of Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. The operation of cattle ship aims to help the Government implements lower meat price and increase welfare of the breeders in domestic cow breeding center.

## Pioneer Ship

Pioneer ship fleet is part of Government's assignment to PT PELNI (Persero) besides Tol Laut and Cattle ships. Legal Frameworks of Pioneer Ship management are among others:

- Presidential Regulation Number 2 of 2016 regarding State-Owned Pioneer Ship Public Service Obligation Implementation.
- The Republic of Indonesia Minister of Transportation Regulation Number PM. 6 of 2016 regarding State-Owned Pioneer Ship Public Service Obligation Implementation.
- Marine Transportation General Directorate Decree Number AL.108/7/1/DJPL-15 as the Second Amendment on Marine Transportation General Directorate Decree Number AL.108/5/18/DJPL-15 regarding Route Network and Requirement for Pioneer Shipping Vessel Budget year 2016 and Implementation Provisions dated November 30, 2015.

PT PELNI (Persero) currently operates 46 (forty six) Pioneer Ships covering remote area across Indonesia.



## Fasilitas Kapal

PT PELNI (Persero) menyediakan tenaga kerja profesional dan fasilitas terbaik demi kenyamanan penumpang dalam melakukan perjalanan menggunakan armada PELNI, meliputi:

a. **Fasilitas yang umum yang tersedia di kapal**

- 1) Hiburan Live Music
- 2) Toilet
- 3) Play Ground
- 4) Mini Gym
- 5) Jogging Track
- 6) Mini Theatre
- 7) Sun Bathing
- 8) Mushola
- 9) Klinik
- 10) Cafetaria

b. **Fasilitas permakanan**

- 1) Restoran (Ruang Makan)
- 2) Bread Toaster
- 3) Combi Oven
- 4) Peralatan dapur

## Ship Facilities

PT PELNI (Persero) provides professional personnel and excellent facilities to ensure convenience of our passenger in using PELNI fleets, among others:

a. General Ship Facilities

1. Live Music
2. Toilet
3. Play Ground
4. Mini Gym
5. Jogging Track
6. Mini Theatre
7. Sun Bathing
8. Mushola
9. Clinic
10. Cafetaria

b. Dining Facility

1. Restaurant (Dining Room)
2. Bread Toaster
3. Combi Oven
4. Cooking Utensils



## Manajemen Keselamatan

PT PELNI (Persero) menempatkan faktor keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional, meliputi keselamatan penumpak, penyediaan dan pemeliharaan alat-alat penolong wajib di kapal, perlindungan asuransi dan lain-lain sesuai peraturan keselamatan internasional, sebagai berikut:

1. Regulasi IMO:
  - SOLAS 1974 Consolidated 2004 (Chpater IX: ISM-Code)
  - MARPOL 78 Consolidated 2006
  - STCW 95 (KM. 70 tahun 1998, PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan)
  - COLREG 72 (*Collision Regulation* tahun 72)
2. *International Load Line Convention* (ILLC) 1966

## Strategic Business Unit (SBU)

### Keagenan Kapal

Jenis Layanan Keagenan:

1. Clearance in 7 out
2. Bunker, Fresh Water, Provision Supply
3. Crew Attendance
4. Protecting Agent
5. Protecting Agent
6. Custom Clearance
7. Layanan Sea Pollution
8. Layanan Garbage Removal

## Safety Management

PT PELNI (Persero) treats safety factor as main priority in every operational activities including passenger safety, safety equipment provision and maintenance and others referring to international safety regulation, as follows:

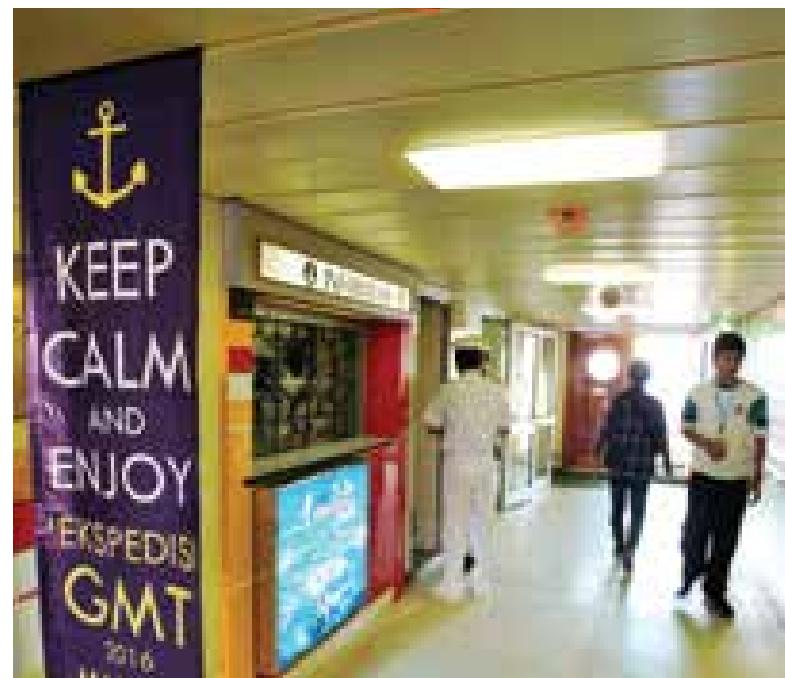
1. IMO Regulation:
  - SOLAS 1974 Consolidated 2004 (Chpater IX: ISM-Code)
  - MARPOL 78 Consolidated 2006
  - STCW 95 (KM. 70 of 1998, PP No. 7 of 2000 on Marine)
  - COLREG 72 (*Collision Regulation* in 72)
2. International Load Line Convention (ILLC) 1966

## Strategic Business Unit (SBU)

### Ship Agency

Type of Agency Services:

1. Clearance in 7 out
2. Bunker, Fresh Water, Provision Supply
3. Crew Attendance
4. Protecting Agent
5. Protecting Agent
6. Custom Clearance
7. Sea Pollution Service
8. Garbage Removal Service



## Hotel Bahtera

Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

## Galangan Surya Surabaya

Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PELNI tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI Maintenance Facilities (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin space dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

## Bisnis Properti

Persewaan ruang kantor dari aset gedung PT PELNI (Persero) yang tersebar di seluruh cabang PT PELNI (Persero). Selain itu, bisnis properti juga meliputi persewaan ruang beriklan di atas kapal PELNI serta persewaan toko dan cafe di atas kapal.

## Bahtera Hotel

Hotel that has meeting and training center facilities equipped with meeting room facility that has capacity over 200 pax as well as other supporting facilities.

## Galangan Surya Surabaya

Established since May 20, 1996, the Shipyard handled 500-type PELNI ships, such as KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI Maintenance Facilities (PMF), strategic projection to guarantee docking and repair space for all vessels (including large ships) that are operated by PT PELNI (Persero).

## Property Business

Office space renta from PT PELNI (Persero)'s building assets spread across branch office of PT PELNI (Persero). In addition, the property business also includes onboard advertising space rental on PELNi ships as well as onboard store and café rental.



## Visi dan Misi

### Vision and Mission

#### Penetapan Visi dan Misi

Visi dan Misi PT PELNI (Persero) telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 81A/HKO.01/DIR/VI-2010 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan.

#### Stipulation of Vision and Mission

Vision and Mission of PT PELNI (Persero) has been authorized by Board of Directors Decree No. 81A/HKO.01/DIR/VI-2010 about the Corporate Vision and Mission Stipulation

# Visi

## Vision

**“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”**

#### Tangguh:

1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (*company's value growth*).
2. *Center of Excellence* usaha pelayaran nasional: SDM, Produksi, Distribusi, Pelayanan, dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan.
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal.

#### Pilihan Utama Pelanggan:

1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima.
2. *Load Factor* Minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang.

**“To Become a Strong Shipping Company and Customers Preferred Choice”**

#### Integrity:

1. Maximum growth of the company (*company's value growth*)
2. Centre of excellence of national marine: human resources, productions, distributions, services, environment safety and health.
3. Having optimum archipelago's route networks.

#### Customer's preferred choice:

1. Focus on customers, in order to give best services.
2. Load factors, minimum 90% for passengers and 90% for goods.



# Misi

## Mission

1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai Perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (*Stakeholders*), dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
1. Managing and developing marine transportation to ensure public accessibility to support the realization of National Outlook (Wawasan Nusantara).
2. Raising revenue contribution for the country, employees, as well as taking part on the development of environment and public services.
3. Enhancing corporate value throughout creativity, innovation and human capital competency development.
4. Operating fair business by promoting mutual beneficiary principle for all stakeholders and implementing the *Good Corporate Governance* (GCG).

## Budaya Perusahaan

### Corporate Culture

#### INTEGRITY

Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten, komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan dalam kinerja berdasarkan tuntutan "*Stakeholders*".

Each individual in the Company should act with integrity (honesty, consistency, commitment, bravery and trust), to achieve excellence in performance referring to stakeholders' demand.

#### SERVICE EXCELLENCE

Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

Focus on the customers to provide excellent service and ensure that the managed product/ service will meet customers' demand.

#### CONTINUOUS LEARNING

Setiap Insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.

Each individual in the company has to be able to transform himself or herself continuously, based on the existing or the future demand.

#### CARENESS

Menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan untuk karyawan, mitra kerja, pelanggan maupun masyarakat pada umumnya.

Taking care of security and health of employees, business partners, customers or society.

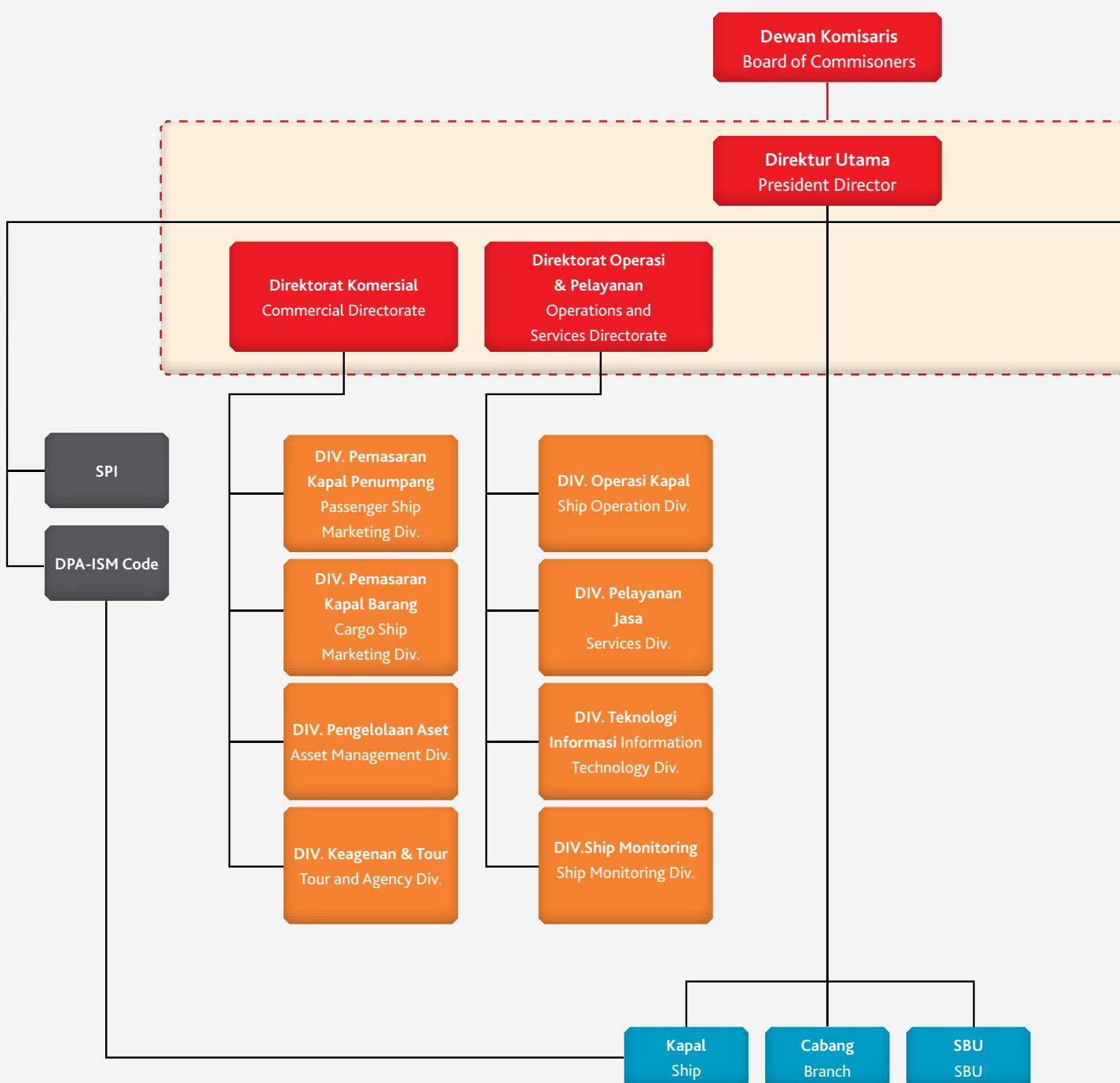


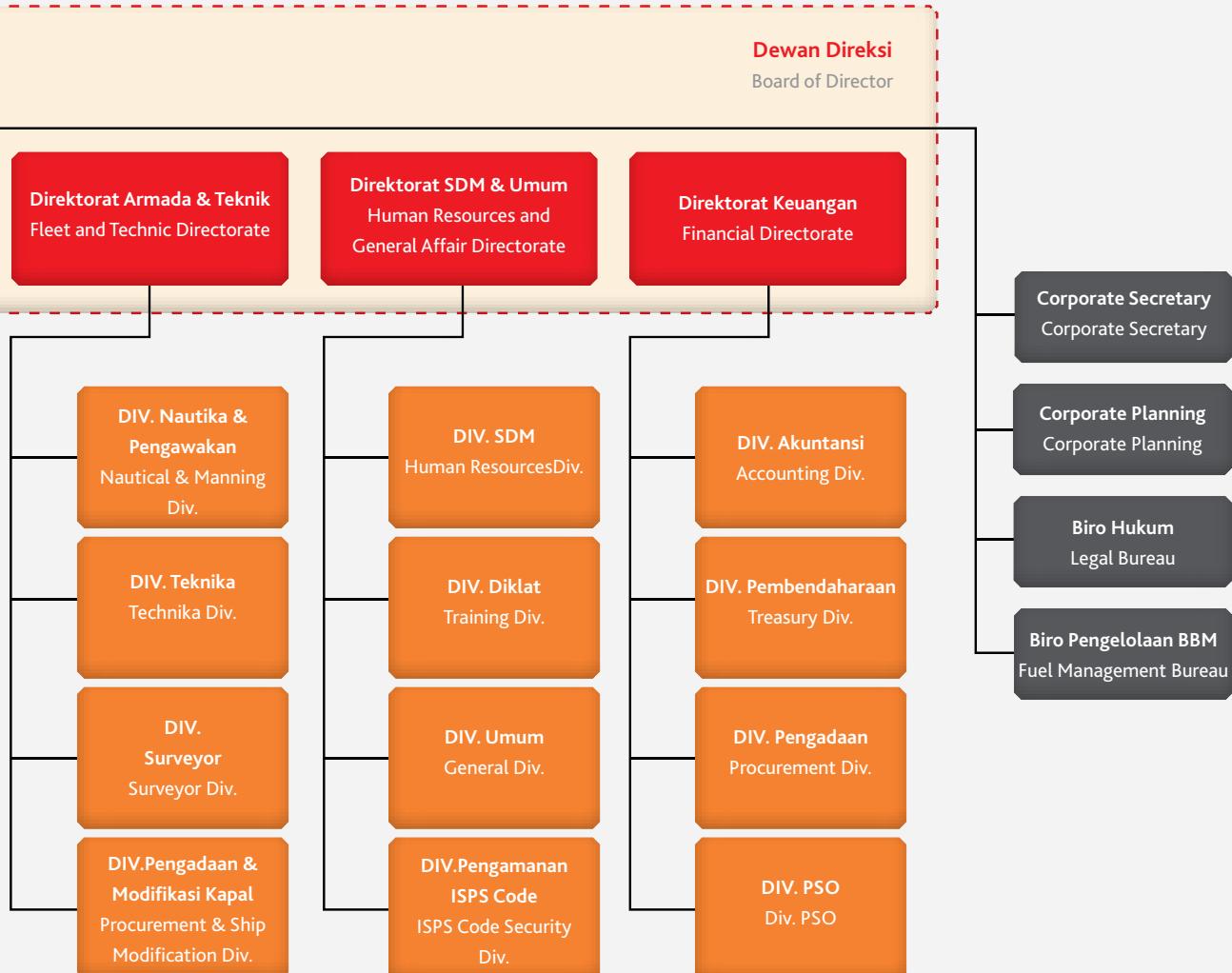
## Struktur Organisasi

### Organization Structure

Struktur Organisasi disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 04.12/3/SK/HKO.01/2016 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi No. 09.08/1/SK/HKO.01/2015 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Organization structure is validated under Board of Directors Decree Number 04.12/3/SK/HKO.01/2016 as Amendment to Board of Directors Decree Number 09.08/1/SK/HKO.01/2015 regarding Organization Structure, Main Duty and Function of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.







**Elfien Goentoro**  
**Direktur Utama**  
**President Director**

**O.M. Sodikin**  
**Direktorat Armada & Teknik**  
Fleet and Technic Directorate

**Insan Purwarisyah L. Tobing**  
**Direktorat SDM & Umum**  
Human Resources and General Affairs  
Directorate

**Haryoso**  
Divisi Teknika  
Technika Division

**Capt. Bayu Sochmawardi A.**  
Divisi SDM  
Human Resources Division

**Capt. Labani**  
Divisi Nautika  
Nautical Division

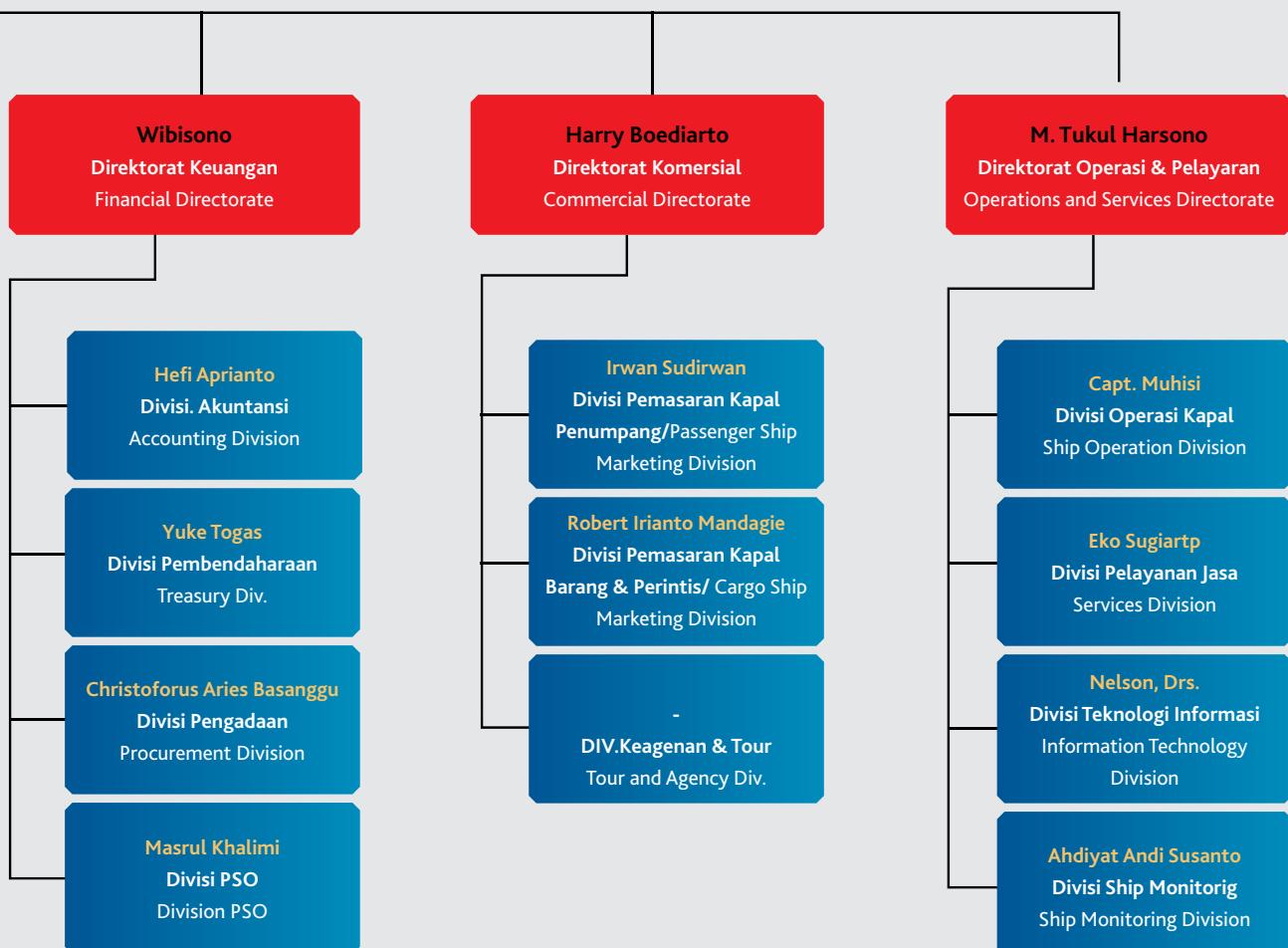
**Lenggo Geni Arbi**  
DIV. Umum  
General Div.

**Aprisman Dedi**  
Divisi. Surveyor  
Surveyor Division

**Subiyantoro**  
Divisi Diklat  
Training Division

**Alamsyah**  
Divisi.Pengadaan & Modifikasi  
Kapal/Procurement & Ship  
Modification Division

**Udjang Kerdjawan Agung**  
Divisi Pengamanan ISPS  
Code/ ISPS Code Security  
Division





## Pejabat Eksekutif Executives

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan/Sk Pengangkatan Basis of Appointment/Appointment Decree
Didik Dwi Prasetyo, S.sos	Corporate Secretary	07.30/1/SK/HKO.01/2015
Ernesto	Kepala Satuan Pengawas Internal Head of Internal Audit Unit	TH. 7.1-01/SS/2014
Yanto Duriyanto, Capt.	Head of DPA - ISM Code	01.20/01/SK/HKO.01/2016
Irwan Sudirwan, St.	SM Pemasaran Kapal Penumpang SM Passenger Ship Marketing	01.20/01/SK/HKO.01/2016
Yuke Togas, Se	SM Perbendaharaan/SM Treasury	04.01/5/SK/HKO.01/2015
Akif Syam Sh.	Senior Manager Hukum Legal Senior Manager	04.01/5/SK/HKO.01/2015
Eko Sugiarto, Se.,Mm.	SM Pelayanan Jasa/SM Services	06.15/2/SK/HKO.01/2016
Bayu Sochmawardi A. Capt	SM. SDM/SM Human Capital	06.15/2/SK/HKO.01/2016
Kunto Handono, Mm	SM Asset	01.20/01/SK/HKO.01/2016
Labani, Capt.	SM Nautika & Pengawakan/SM Nautical & Crew	06.15/2/SK/HKO.01/2016
Muhisi ,Capt.	SM Operasi Kapal/SM Ships Operation	02.11/1/SK/HKO.01/2015
Robert Irianto Mandagie	SM Pemasaran Kapal Barang & Perintis SM Cargo & Pioneer Ships Marketing	01.20/01/SK/HKO.01/2016
Hefi Aprianto, Se	SM Akuntansi/SM Accounting	12.16/1/SK/HKO.01/2015
Alamsyah	SM Pengadaan/Modifikasi Kapal SM Vessels Procurement/Modification	12.03/2/SK/HKO.01/2014
Nelson, Drs.	SM Teknologi Informasi SM Information Technology	10.21/1/SK/HKO.01/2016
Aprisman Dedi	SM Surveyor	02.03/1/SK/HKO.01/2016
Lenggo Geni Arbi S, Sh,Mh.	SM Umum/SM General Affairs	07.30/1/SK/HKO.01/2015
Masrul Khalimi, St.	SM PSO	01.20/01/SK/HKO.01/2016
Ahdiyat Andi Susanto	SM Ship Monitoring	06.15/2/SK/HKO.01/2016
Subiyantoro, Se.	SM Diklat/SM Training and Development	06.15/2/SK/HKO.01/2016
Cahyono Rubiyan	SM BBM & Pelumas/SM Oil Fuel & Lubricants	10.01/1/SK/HKO.01/2014
Deddy Sugiri	Staf Utama Dirut/Main Staff of President Director	TH.8.4-02/SS/2014
Putut Basuki Putro	Staf Utama Dirut,Bid.Org.&Umum Main Staff of President Director, Organization & General Affairs Division	07.30/1/SK/HKO.01/2015
Andi Samsul Hadi	SM Corporate Planning	07.30/1/SK/HKO.01/2015
Haryoso	SM Teknika/SM Technical	02.03/1/SK/HKO.01/2016
Christoforus Aries Basanggu, Se.ak	SM Pengadaan/SM Procurement	12.29/09/S/001/2015
Udjang Kerdjawan Agung	SM Pengamanan ISPS-Code SM ISPS-Code Security	10.25/1/SPPT/DIR.SDM&UMUM/2016



## Komposisi Pemegang Saham

### Shareholders Composition

PT PELNI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikannya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Per 31 Desember 2016, tidak ada Direktur dan Komisaris yang memiliki saham PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) whose shares are 100% owned by The Republic of Indonesia Government.

As of December 31, 2016, there was neither Board of Directors and Board of Commissioners with shares ownership of PT PELNI (Persero).

## Kronologi Pencatatan Saham

### Shares Listing Chronology

Per 31 Desember 2016, Perseroan belum melakukan penawaran saham kepada publik dan kepemilikan saham 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian informasi mengenai tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham dan tindakan korporasi serta nama bursa di mana saham dicatatkan tidak relevan untuk disajikan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2016, the Company had not executed shares offering to public and the shares are 100% owned by The Republic of Indonesia Government. Therefore, information about shares listing year, total shares outstanding, shares par value, shares public offering and corporate action as well as name of stock exchange where the shares are listed are irrelevant to be presented in this Annual Report.

## Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

### Other Securities Listing Chronology

Per 31 Desember 2016, Perseroan tidak melakukan pencatatan efek lainnya sehingga informasi mengenai nama efek, nilai penawaran, nama bursa tempat efek dicatatkan dan peringkat efek tidak relevan untuk disajikan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2016, the Company had not listed other securities, therefore, information about name of securities, offering price, name of stock exchange where the securities are listed and securities rating are irrelevant to be presented in this Annual Report.



## Struktur Grup Perusahaan

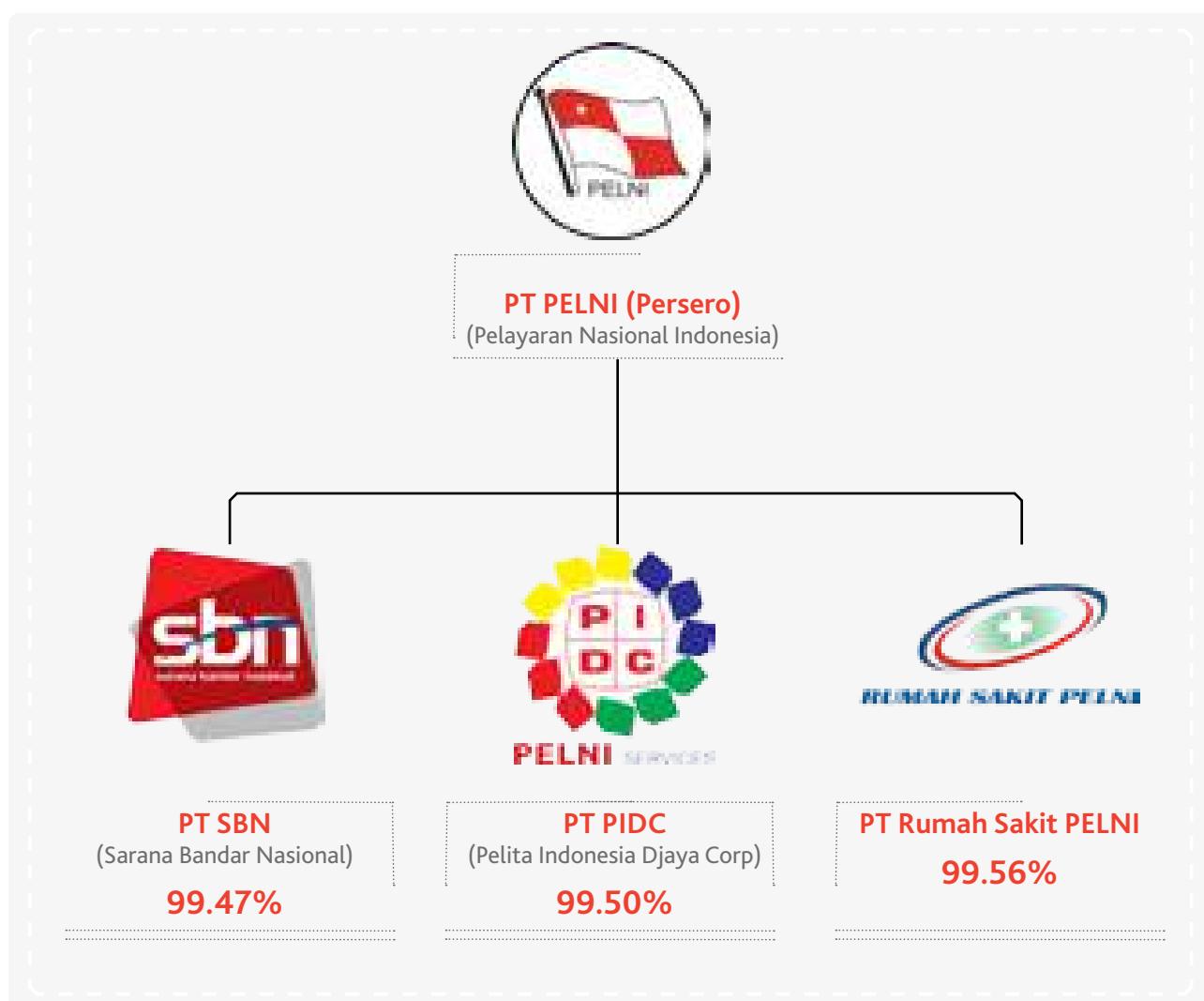
### Corporate Group Structure

PT PELNI (Persero) memiliki 3 (tiga) anak perusahaan yaitu PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) dengan kepemilikan saham 99,47%, PT Pelita Indonesia Djaya Grup (PIDC) dengan kepemilikan saham 99,50% dan PT Rumah Sakit PELNI dengan kepemilikan saham 99,96%.

Per 31 Desember 2016, Struktur Grup PT PELNI (Persero) sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) has 3 (three) subsidiaries that are PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) with 99.47% shares ownership, PT Pelita Indonesia Djaya Grup (PIDC) with 99.50% shares ownership and PT Rumah Sakit PELNI with 99.96% shares ownership.

As of December 31, 2016, Structure Group of PT PELNI (Persero) is as follows:





## Entitas Anak & Asosiasi Subsidiary & Association

Per 31 Desember 2016, Anak Perusahaan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2016, subsidiaries of PT PELNI (Persero) are as follows:

No.	Nama Perusahaan Name of Company	Saham PELNI Shares of PELNI	Bidang Usaha Line of Business	Status Operasi Operating Status
1.	PT Sarana Bandar Nasional (SBN)	99,47%	Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, <i>custom clearance</i> , pedalaman depo.  Transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.	Beroperasi Operating
2.	PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)	99,50%	Jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengutusan kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal.  General trading, port services, custom delegation company, cleaning service, security service, management service for bed, drinking and bottled water supply, hotel management service, onboard entertainment service.	Beroperasi Operating
3.	PT Rumah Sakit PELNI	99,96%	Rumah Sakit/Hospital	Beroperasi Operating

Per 31 Desember 2016, PT PELNI (Persero) tidak memiliki entitas asosiasi.

As of December 31, 2016, PT PELNI (Persero) did not have associated entity.

### Informasi Mengenai Anak Perusahaan

#### 1. PT Sarana Bandar Nasional (SBN)

PT Sarana Bandar Nasional (SBN) merupakan anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal milik induk perusahaan maupun kapal-kapal lainnya yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cardogoring*, *receiving delivery*. Wilayah usaha PT SBN meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan didukung oleh 57 kantor cabang dan sub-cabang yang beroperasi di pelabuhan besar dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan kantor pusat di Jakarta.

Pada tahun 2016 PT SBN membukukan laba sebesar Rp40,790 juta atau 115,60% dari anggaran laba sebesar Rp35,285 juta dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 laba sebesar Rp35,281 juta mengalami peningkatan laba sebesar Rp5,508 juta atau 15,61%.

### Information About Subsidiary

#### 1. PT Sarana Bandar Nasional (SBN)

PT Sarana Bandar Nasional (SBN) is subsidiary of the Company that is operated in loading and unloading from and to ships owned by the Company and other ships including stevedoring, cardogoring, receiving delivery. Operational area of PT SBN covers Indonesian territory supported by 57 branch offices and sub-branch offices which were operated in major and small ports located from Sabang to Merauke with Head Office in Jakarta.

In 2016, PT SBN booked profit of Rp40.790 million or 115.60% from Rp35.285 million profit budget and if compared with realization in 2015 that was Rp35.281 million recorded profit growth of Rp5.508 million or 15.61%.



Susunan Manajemen SBN per 31 Desember 2016, sebagai berikut:

Komisaris Utama : Daniel E. Bangonan  
 Komisaris : August Haris  
 Direktur Utama : Suharyanto  
 Direktur Operasional : Murdiyoto  
 Direktur Keuangan : Nofiyetti Edizar

**Alamat** : Jl. Cempaka Putih Tengah II B.13-144, Cempaka Putih, Jakarta – 10510  
**Telp** : 021- 4287 9000 Fax: 021-4287 8389  
**Email** : info@ptsbn.co.id  
**Web** : www.ptsbn.co.id

## 2. PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)

PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC) merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang Jasa Kepengurusan Transportasi (JPT), Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), *cleaning service*, *bunkering BBM*, Jasa Pengamanan, Sewa Pergudangan, Sewa Forklift, Multimoda Transportasi, hotel dan restoran.

Pada tahun 2016 PIDC membukukan laba sebesar Rp23,437 juta atau 140,50% dari anggaran laba sebesar Rp16,681 juta dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 laba sebesar Rp13,611 juta mengalami peningkatan laba sebesar Rp9,825 juta atau 72,18%.

Susunan Manajemen PIDC per 31 Desember 2016, sebagai berikut:

Komisaris Utama : O.M. Sodikin  
 Direktur Utama : Effendi  
 Direktur Operasi : Asiano Y. I. Lontoh

**Alamat** : Gedung PT PELNI (Persero) Cabang Tanjung Priok  
 Jl. Palmas No. 2, Tanjung Priok Jakarta Utara  
**Telp** : 021- 43933184  
**Fax** : 021- 43931623

As of December 31, 2016, composition of SBN Management is as follows:

President Commissioner : Daniel E. Bangonan  
 Commissioner : August Haris  
 President Director : Suharyanto  
 Director of Operations : Murdiyoto  
 Director of Finance : Nofiyetti Edizar

**Address** : Jl. Cempaka Putih Tengah II B.13-144, Cempaka Putih, Jakarta – 10510  
**Phone** : 021- 4287 9000 Fax: 021-4287 8389  
**Email** : info@ptsbn.co.id  
**Web** : www.ptsbn.co.id

## 2. PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)

PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC) is subsidiary of Company that is operated in Transprotation Management (JPT) Service, Custom Service Management (PPJK), cleaning sevice, Oil Fuel bunkering, Security Services, Warehouse Service, Forklift Service, Multi-modal Transportation, hotel and restaurant.

In 2016, PIDC booked profit of Rp23.437 million or 140.50% from profit budget targeted of Rp16.681 million and if compared with profit realization in 2015 that was Rp13.611 million recording profit growth of Rp9.825 million or 72.18%.

As of December 31, 2016, composition of PIDC Management is as follows:

President Commissioner : O.M. Sodikin  
 President Director : Effendi  
 Director of Operations : Asiano Y. I. Lontoh

**Address** : Gedung PT PELNI (Persero) Tanjung Priok Branch  
 Jl. Palmas No. 2, Tanjung Priok North Jakarta  
**Telp** : 021- 43933184  
**Fax** : 021- 43931623



### 3. PT Rumah Sakit PELNI

PT Rumah Sakit PELNI (RS PELNI) merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang pelayanan dan pendidikan kesehatan, dengan bidang usaha secara khusus meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan.
- c. Pelayanan Jasa Konsultan Manajemen Kesehatan.
- d. Perdagangan Farmasi dan Peralatan Kesehatan.
- e. Pelayanan Gizi Masyarakat.
- f. Pelayanan Kebugaran Kesehatan Masyarakat/ Senam Ibu Hamil.
- g. Pelayanan ASKES/BPJS.
- h. Pelayanan Kegiatan Penunjang Kesehatan Lainnya.

Pada tahun 2016 RS. PELNI membukukan laba sebesar Rp32,757 juta atau 108,39% dari yang dianggarkan laba sebesar Rp30,221 juta dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 laba sebesar Rp22,730 juta mengalami peningkatan laba sebesar Rp10,027 juta atau 44,11%.

Susunan Manajemen RS PELNI per 31 Desember 2016, sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Elfien Goentoro
Komisaris	:	Darmansyah
Komisaris	:	Wibisono
Direktur Utama	:	Fathema Djan Rachmat
Direktur Adm & Keuangan	:	Muhamad Kartobi
Direktur Operasional	:	Rooshardianty Suryandari
Direktur Medis	:	Astari Mayang Anggarani

**Alamat :** Jl. Aipda KS Tubun No. 92-94 Jakarta Pusat - DKI Jakarta 11410

**Telp :** 021-5306901

**Fax :** 021-4287 8389

**Email :** pemasaran@rspelni.net

**Web :** www.rspelni.co.id

### 3. PT Rumah Sakit PELNI

PT Rumah Sakit PELNI (RS PELNI) is subsidiary that is operated in health services and education with particular business lines are including:

- a. Health Services.
- b. Health Education and Training.
- c. Health Management Consulting Service.
- d. Pharmacy and Medical Device Trading.
- e. Community Nutrients Service.
- f. Community Health Fitness/Maternity Gym Service.
- g. ASKES/BPJS Service.
- h. Other Health Supporting Services.

In 2016, RS PELNI booked profit of Rp32.757 million or 108.39% from profit budget of Rp30.221 million and if compared with realization in 2015 that was profit of Rp22.730 million, experienced profit growth by Rp10.027 million or 44.11%.

As of December 31, 2016, composition of RS PELNI Management is as follows:

President Commissioner	:	Elfien Goentoro
Commissioner	:	Darmansyah
Commissioner	:	Wibisono
President Director	:	Fathema Djan Rachmat
Director of Administration	:	Muhamad Kartobi
& Finance		
Director of Operations	:	Rooshardianty Suryandari
Director of Medical	:	Astari Mayang Anggarani

**Address :** Jl. Aipda KS Tubun No. 92-94 Jakarta Pusat - DKI Jakarta 11410

**Telp :** 021-5306901

**Fax :** 021-4287 8389

**Email :** pemasaran@rspelni.net

**Web :** www.rspelni.co.id



# Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

## Stock Market Supporting Institution and Professions

### Kantor Akuntan Publik

**Djoko, Sidik & Indra**

Kantor Pusat : Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19<sup>th</sup> Floor  
Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310  
Indonesia

Phone : 62-21 39838734,39838735,  
Fax : 62-21 39832081  
Website : kapdsi.comm  
e-mail : kapdsi.kpusat@gmail.com  
NIUKAP : 959/KM.1/2014

**Biaya:** Rp652,025,000

Jasa yang Diberikan: Jasa audit laporan keuangan yaitu jasa audit kepatuhan dan laporan kinerja Perseroan.

### Notaris:

**Ida Adiningsih, S.H**

Alamat:  
Jl Kembang Raya No 15 A, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

**Hasbullah Abdul Rasyid, S.H**

Alamat:  
Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A.  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-2  
Kuningan Jakarta Selatan

### Kuasa Hukum:

**LQQ media Law Office**

Alamat:  
Gedung Citylofts Unit 10.12  
Jl KH Mas Mansyur No. 121  
Jakarta Pusat

**Kantor Advokat Deni Simorangkir SH MH**

Alamat:  
Jl. Tebet Timur Dalam V K Nomor 3  
Jakarta Selatan

**Dedy Kurniadi & CO**

Alamat:  
Wisma Tugu Raden Saleh, 5th floor  
Jl. Raden Saleh Raya No 44  
Jakarta Pusat

**Anggraeni & Partner**

Alamat:  
Jl. Wolter Mongonsidi No 122-124 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

### Public Accountant Firm

**Djoko, Sidik & Indra**

Head Office : Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19<sup>th</sup> Floor  
Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310  
Indonesia

Phone : 62-21 39838734,39838735,  
Fax : 62-21 39832081  
Website : kapdsi.comm  
e-mail : kapdsi.kpusat@gmail.com  
NIUKAP : 959/KM.1/2014

**Fee :** Rp652,025,000

Provided Service: Financial Statements Audit including compliance report and performance report audits.

### Notary:

**Ida Adiningsih, S.H**

Alamat:  
Jl Kembang Raya No 15 A, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

**Hasbullah Abdul Rasyid, S.H**

Alamat:  
Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A.  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-2  
Kuningan Jakarta Selatan

### Legal Attorney:

**LQQ media Law Office**

Alamat:  
Gedung Citylofts Unit 10.12  
Jl KH Mas Mansyur No. 121  
Jakarta Pusat

**Deni Simorangkir SH MH Advocate Office**

Alamat:  
Jl. Tebet Timur Dalam V K Nomor 3  
Jakarta Selatan

**Dedy Kurniadi & CO**

Alamat:  
Wisma Tugu Raden Saleh, 5th floor  
Jl. Raden Saleh Raya No 44  
Jakarta Pusat

**Anggraeni & Partner**

Alamat:  
Jl. Wolter Mongonsidi No 122-124 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan



#### M & G Associates

Alamat:  
Senayan Trade Center Lt 5 No 17-22  
Jl Asia Afrika Gelora Senayan  
Jakarta Pusat

#### M & G Associates

Address:  
Senayan Trade Center Lt 5 No 17-22  
Jl Asia Afrika Gelora Senayan  
Jakarta Pusat

#### Effendy & Remy Attorney & Counselor at Law

Alamat:  
Gedung Lina 2nd Floor Suite 205  
Jl. HR Rasuna Said Kav B-7  
Kuningan – Jakarta Selatan

#### Effendy & Remy Attorney & Counselor at Law

Address:  
Gedung Lina 2nd Floor Suite 205  
Jl. HR Rasuna Said Kav B-7  
Kuningan – Jakarta Selatan

#### Tekky Toreh & Partner

Alamat:  
Jl Pulomas Barat XI No. 22  
Jakarta Timur

#### Tekky Toreh & Partner

Address:  
Jl Pulomas Barat XI No. 22  
Jakarta Timur

### Biro Administrasi Efek

Per 31 Desember 2016, Perseroan belum mencatatkan saham dan efek-efek sehingga belum menggunakan jasa Biro Administrasi Efek.

### Securities Registrar

As of December 31, 2016, the Company had neither listed shares nor securities, therefore, the Company did not hire any Securities Registrar.

### Perusahaan Pemeringkat Efek

Per 31 Desember 2016, Perseroan belum mencatatkan saham dan efek-efek sehingga belum menggunakan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek.

### Rating Agency

As of December 31, 2016, the Company had not listed had neither listed shares nor securities, therefore, the Company did not hire any Rating Agency.

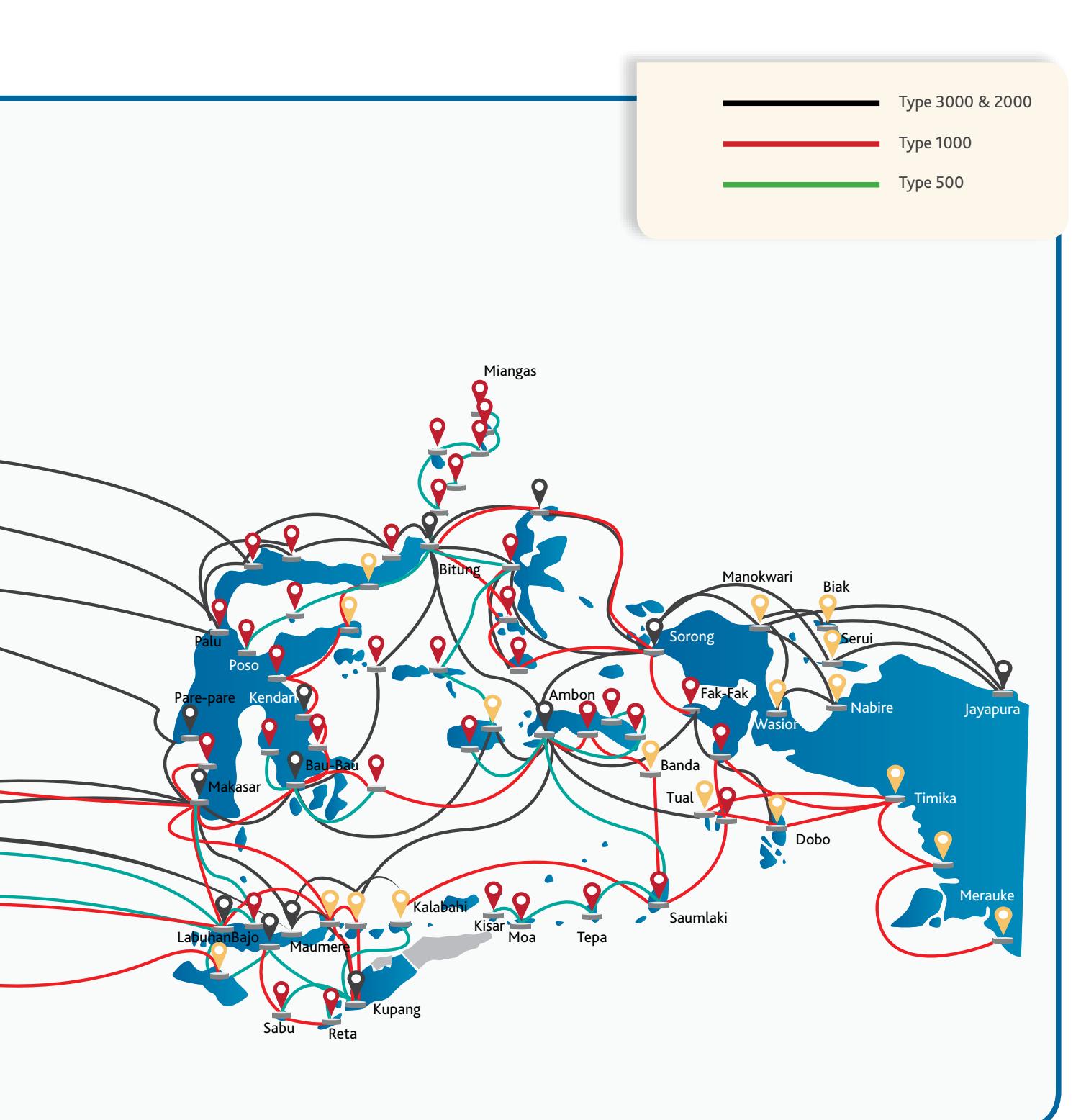


## Peta Wilayah Operasi Jaringan Trayek Kapal

### Ship Route Network Operational Area

- Jumlah Pelabuhan Singgah Tahun 2016 adalah 98 Pelabuhan
- Jumlah Kapal PSO tahun 2016 adalah 26 Kapal
- Jumlah Ruas Tahun 2016 adalah 1200 ruas
- Total Nil tahun 2016 adalah 96.380 Mil Laut
- Total port of call in 2016 were 98 ports
- Total PSO Ship in 2016 were 26 Ships
- Total Lines in 2016 were 1,200 lines
- Total Nil in 2016 were 96,380 Sea Miles







## Jaringan Trayek Tol Laut Tahun 2016

The Toll Route Network Sea 2016





T - 1 =		KM. Freedom
T - 2 =		KM. Mentari Perdana
T - 3 =		KM. CJN III-22
T - 4 =		KM. Meratus Ultima I
T - 5 =		KM. CJN III-32
T - 6 =		KM. CJN III-4





## Jaringan Trayek Nasional Kapal Perintis Tahun 2016

National Route Network Ship Pioneer 2016







## Rute Kapal Ternak 2016

Cattle Ship Route 2016



No.	Provinsi/ Pangkalan Province/Base	Kode Trayek Route Code	Jaringan Trayek dan Jarak Mil A network of Routes and distance Miles	Jumlah Jarak The Amount Of Distance	Ukuran dan Type Kapal The size and Type of ship	Pelayaran 1 Round Voyage Cruise 1 Round Voyage
1	Nusa Tenggara Timur					
2	Kupang	RT-1	Kupang - 201 - Waingapu - 150 - Bma - 202 - Lembar - 280 - Tg. Perak- 189 - Tg. Emas- 110 - Cirebon- 150 - Tg. Priok- 1084- Kupang	2366	654 DWT / 2000 GT	14 Hari





# Nama dan Alamat Anak Perusahaan, Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative Office



## PT PELNI (Persero)

**Kantor Pusat/Head Office**  
Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta 10130  
Telp. +6221-6334342  
Fax. +6221-63854130  
Email: humas@pelni.co.id

Marketing:  
Telp: +6221 6385 50962  
Email : divisi.pemasaran@pelni.co.id

## Anak Perusahaan/Subsidiaries

### PT Sarana Bandar Nasional (SBN)

Jl. Cempaka Putih Tengah II B.13-144  
Cempaka Putih, Jakarta -10510 \

Telp : 021 - 4287 9000  
Fax. : 021 - 4287 8389  
Email : info@ptsbn.co.id  
Web. : www.ptsbn.co.id

### Rumah Sakit PELNI Petamburan

Jl. Aipda Ks Tubun No. 92-94  
Jakarta Pusat – DKI Jakarta 11410

Telp : 021 – 5306901  
Fax. : 021 – 5483145  
Email : pemasaran@rspelni.net  
Web. : www.rspelni.co.id

### Pelita Djaya Indonesia Corporation (PIDC)

Gedung PT PELNI Cabang Tanjung Priok  
Jl. Palmas No.2 Tanjung Priok, Jakarta Utara

Telp : 021 – 4393 3184  
Fax. : 021 – 4393 1623  
Email : pt.pidc@gmail.com

## Strategic Business Units

### Galangan Surya Surabaya

Jl. Nilam Barat No. 39 Surabaya 60165  
Telp : (031) 3291909, 3292961  
Fax. : (031) 3291909  
Email : galangan@pelni.co.id

### Hotel Bahtera Cipayung

Jl.Raya Puncak Cipayung No. 256 Bogor  
Telp : (0251) 8254251, 8257451.  
Fax : (0251) 8256663.  
Email : hotelbahtera@hotelbahtera-pelni.co.id

## Cabang A/Branch A

### Tg Priok

Jl. Palmas No. 2, Tanjung Priok Jakarta Utara  
Telp : 021-43933184  
Fax : 021-43931623  
Email : tg-priok@pelni.co.id

### Makassar

Jl. Sawerigading No. 14, Makassar  
Telp. 0411 – 3614861  
Fax. 0411-3631395, 3614788  
Email: makassar@pelni.co.id

### Surabaya

Jl. Pahlawan No.112-114, Surabaya  
Telp : 031-3293197  
Fax : 031-3538958, 3293195  
Email : surabaya@pelni.co.id



### Cabang B/Branch B

<b>Jayapura</b> Jl. Argapura No. 15, Jayapura Selatan Papua Telp : 0967-533270, 533070, 531412 Fax : 0967-531921, 533370 Email : jayapura@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Argapura No. 15, Jayapura Selatan, Papua Telp : 0967-533270	<b>Sorong</b> Jl. Jend. A.Yani, Kompleks Pelabuhan, Sorong Telp : 0951-321860 Fax : 0951-323873 Email : sorong@pelni.co.id	<b>Ambon</b> Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Ambon Telp : 0911-348219, 353161, 342328 Fax : 0911-352049 Email : ambon@pelni.co.id
<b>Semarang</b> Jl. Mpu Tantular 25-27 Semarang Telp : 024-3540238, 3546722 Fax : 024-3555156 Email : semarang@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Mpu Tantular 25-27 Semarang Telp : 024 3546722	<b>Bau-Bau</b> Jl. Pahlawan No.1, Bau Bau, Sul-Tra Telp : 0402-2821258, 2821905, 2822705 Fax : 0402-2821188 Email : bau-bau@pelni.co.id	<b>Balikpapan</b> Jl. Yos Sudarso No. 1 Balikpapan Telp : 0542-424171,422410 Fax : 0542-735009 Email : balikpapan@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Yos Sudarso No. 1 Balikpapan Telp : 0542-424171,422410
<b>Kupang</b> Jl. Pahlawan No.7 RT 002/001Kel.Fatufeto Kec. Alak Kupang, NTT Telp : 0380-821944, 823898 Fax : 0380-833646 Email : kupang@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Pahlawan No.7 RT 002/001Kel.Fatufeto Kec. Alak Kupang, NTT Telp : 0380-821944	<b>Bitung</b> Jl. Sam Ratulangi no 7 Bitung, Bitung Kota Sulawesi Utara Telp : 0438-36352 Fax : 0438-33588 Email : bitung@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Sam Ratulangi no 7 Bitung, Bitung Kota Sulawesi Utara Telp : 0438- 35818	<b>Manokwari</b> Jl. Siliwangi No.24 Manokwari – Papua Barat Telp : 0986-215166, 215167, 215165 Fax : 0986-215168 Email : manokwari@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Siliwangi No.24 Manokwari – Papua Barat Telp : 0986-215166, 215167
<b>Tg. Pinang</b> Jl. Jend. A. Yani No. 06 Tg. Pinang Kepulauan Riau Telp : 0771-21513, 21933 Fax : 0771-23427 Email : tg-pinang@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jend. A. Yani No. 06 Tg. Pinang Kepulauan Riau Telp : 0771-21513		

### Cabang C/Branch C

<b>Batam</b> Jl. DR Cipto Mangunkusumo No. 4, Tanjung Pingir, Sekupang, Pulau Batam Telp : 0778-322181, 321070 Fax : 0778-321085, 325586 Email : batam@pelni.co.id	<b>Pare-Pare</b> Jl. Lasiming No. 44 Pare Pare, Sul-Sel Telp : 0421-21017, 24709 Fax : 0421-23079 Email : pare-pare@pelni.co.id Penjualan Tiket : Jl. Lasiming No. 44 Pare Pare, Sul-Sel Telp. 0421-21017	<b>Nabire</b> Jl. Frans Kaisepo No. 14, Nabire Papua Telp : 0984-22850, 23181 , 25072 Fax : 0984-21350 Email : nabire@pelni.co.id Penjualan Tiket : Jl. Frans Kaisepo No. 14, Nabire Papua   Telp. 0984- 23181
<b>Ternate</b> Jl. Jend.A.Yani, Kompleks Pelabuhan, Ternate, Maluku Utara Telp : 0921-3121434, 4124434 Fax : 0921-3121276 Email : ternate@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Jend.A.Yani, Kompleks Pelabuhan, Ternate, Maluku Utara Telp : 0921-3125474	<b>Medan/Belawan</b> Jl.Gunung Krakatau No 17A,Medan 20239  Telp : 061 42065268 Fax : 061-42065267 Email : belawan@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl.Gunung Krakatau No 17A,Medan 20239  Telp : 061 42065268	<b>Pontianak</b> Jl. St. Abdurahman No. 12 Pontianak, Kal-Bar  Telp : 0561-748124 , 748129 Fax : 0561-748131 Email : pontianak@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. St. Abdurahman No. 12 Pontianak  Telp : 0561-748124 , 748129



<b>Kumai</b> Jl. Sudirman, SH No. 16 Pangkalan Bun / Kumai Kal-Teng Telp : 0532-24420 Fax : 0532-24073 Email : kumai@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Sudirman SH No. 16 Pangkalan Bun ,Kumai Kal-Teng Telp : 0532-24420	<b>Tarakan</b> Jl. Kusuma Bangsa No. 100 RT 07/03 Kec.Gunung Lingkas Kel.Tarakan Timur Tarakan Kota Telp : 0551-51169, 25440 Fax : 0551-21529 Email : tarakan@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Kusuma Bangsa No. 100 RT 07/03 Kec.Gunung Lingkas Kel.Tarakan Timur Tarakan Kota Telp : 0551- 25440	<b>Nunukan</b> Jl. A. Yani No. 11 Nunukan – Kalimantan Tenggara Telp : 0556-21309, 22984 Fax : 0556-21029 Email : nunukan@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. A. Yani No. 11 Nunukan – Kalimantan Tenggara Telp : 0556-21309
<b>Fak-Fak</b> Jl. D.I. Panjaitan, Fak Fak,Papua Barat Telp : 0956-23230, 23371 Fax : 0956-22556 Email : fak-fak@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. D.I. Panjaitan, Fak Fak,Papua Barat Telp : 0956-23230	<b>Maumere</b> Jl. Don Juan No. 6 kota Uneng Kab Sikka,Flores NTT Telp : 0382-2427060 Email : maumere@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Don Juan No. 6 kota Uneng Kab Sikka,Flores NTT Telp : 0382-2427060	<b>Serui</b> Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo, Serui Yapen-Papua Telp : 0983-32309, 32347 Fax : 0983-31552 Email : serui@pelni.co.id Penjualan Tiket : Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo, Serui- Papua Telp : 0983-32309
<b>Biak</b> Jl. Jend.Sudirman No. 37 Biak Telp : 0981-23255, 23256 Fax : 0981-22225 Email : biak@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Jend.Sudirman No. 37 Biak Telp : 0981-23255, 23256	<b>Sampit</b> Jl. Jend. A. Yani No. 70 Sampit Kal-Teng Telp : 0531-22006, 23994 Fax : 0531-24502 Email : sampit@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Jend. A. Yani No. 70 Sampit,Kal-Teng Telp : 0531 22006	<b>Bali/Denpasar</b> Jl. Raya Kuta No. 299 Kuta Badung, Denpasar- Bali Telp : 0361-762263 Fax : 0361-763964 Email : denpasar@pelni.co.id Penjualan Tiket : 1. Jl. Raya Kuta No. 299 Kuta Badung,Denpasar- Bali 2. Jl. Raya Pelabuhan Benoa Bali Telp : 0361 763 964
<b>Larantuka</b> Jl. Basuki Rahmat No 60, Flores Timor Telp : 0383-21155 Fax : 0383-21153 Email : larantuka@pelni.co.id Penjualan Tiket : Jl. F. Basuki Rahmat No 60 Flores Timor	<b>Tual</b> Jl. Ahmad Yani No.2 Lodar El Kota Tual Maluku Tenggara Telp : 0916-22520, 24092 Fax : 0916-21181 Email : tual@pelni.co.id	<b>Namlea</b> Jl. Bandar Angin, Namlea, Kepuluuan Buru, Maluku Telp : 0913 – 21272 Email : namlea@pelni.co.id Penjualan tiket : Jl. Bandar Angin, Namlea Telp : 0913 – 21272

## Cabang D/Branch D

<b>Palu</b> Jl. R.A. Kartini No. 96 Palu, Sulawesi Tenggara Telp : 0451-421696 Fax : 0451-423237 Email : palu@pelni.co.id	<b>Timika</b> Jl. Kartini No. 5, Mimika Baru – Timika Papua Telp : 0901-3126660 Fax : 0901-321106 Email : timika@pelni.co.id	<b>Ende</b> Jl. Kathedral No.2, Ende,Flores NTT Telp : 0381-21043 Fax : 0381-21419 Email : pelniende@yahoo.co.id Penjualan Tiket : Jl. Kathedral No.2, Ende,Flores NTT Telp. 0381-21043
<b>Kendari</b> Jl. Lakidende No.10, Kendari, Sulawesi Tenggara Telp : 0401-3121935 Fax : 0401-3122156 Email : kendari@pelni.co.id Penjualan Tiket : Jl. Lakidende No.10, Kendari, Sulawesi Tenggara Telp : 0401-3121935	<b>Bima</b> Jl. Kesatria No. 2,Kota Bima, NTB Telp : 0374-42046 Fax : 0374-42625 Email : bima@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl.Marthalinata Kota Bima,NTB Telp : 0374 - 42203	<b>Waingapu</b> Jl. Hasanuddin No.1 Waingapu Telp : 0387-61028 Fax : 0387-61027 Email : waingapu@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Hasanuddin No.1 Waingapu Telp : 0387-61665



### Cabang D/Branch D

<b>Kotabaru/Batulicin</b> Jl. Pelabuhan Samudera No. 125, Butulicin, Kotabaru Telp : 0518-70822 Fax : 0518-71419 Email : kotabaru@pelni.co.id	<b>Dobo</b> Jl.Yos Sudarso No. 22 Dobo,Kepulauan Aru - Maluku Telp : 0917-21300, 21400 Fax : 0917-21500 Email : dobo@pelni.co.id	<b>Toli-Toli</b> Jl.Yos Sudarso No. 399 Kel. Sidoarjo Kab. Toli-Toli, Sul-Teng Telp : 0453-23210, 22357 Fax : 0453-21376 Email : toli-toli@pelni.co.id Penjualan Tiket : Jl.Yos Sudarso No. 399 Kel. Sidoarjo Kab. Toli-Toli, Sul-Teng Telp 0453- 22537 - 23210
<b>Kaimana</b> Jl. Pelabuhan No.4, Kaimana Telp : 0957-21009 Fax : 0957-21464 Email : kaimana@pelni.co.id  Penjualan Tkiet : Jl. Pelabuhan No.4 Telp 0957-21009	<b>Tg.balai Karimun</b> Jl. Mayjen Mt. Haryono No. 11 Sei Ayam,Tebing Tg. Balai Karimun Telp : 0777-325446 Fax : 0777-325460 Email : tg-balai@pelni.co.id Penjualan Tiket : Jl. Mayjen Mt. Haryono No. 11 Sei Ayam,Tebing Tg. Balai Karimun Telp 0777-325446	<b>Merauke</b> Jl. Sabang No.318, Merauke Papua Telp : 0971-3330373 Email : merauke@pelni.co.id  Penjualan Tiket : Jl. Sabang No.318, Merauke Papua Telp 0971-3330373

### Luwuk

Jl. Sungai Danau Limboto No.74 Luwuk, Sul-Teng  
Telp : 0461-21564, 23013  
Fax : 0461-21888  
Email : luwuk@pelni.co.id  
Penjualan Tiket : Jl. Sungai Limboto No.74 Luwuk, Sul-Teng  
Telp : 0461-21564

### Sub Cabang/Sub Branch

<b>Gorontalo</b> Jl. 23 Januari No 182,Kelurahan Biawao,Kecamatan kota Selatan, Gorontalo Telp : 0435 82089 Fax : 0435 821145 Penjualan Tiket : Jl. 23 Januari No 182 Telp : 0435 82089	<b>Ampenan</b> Jl. Industri No 1 Ampenan, Mataram NTB Telp : 0370 637212 Fax : 631604  Penjualan Tiket : Jl. Industri No 1 Ampenan, Mataram NTB Telp : 0370 637212	<b>Pangkalpinang</b> Jl.Hamidah No 67 Pangkalpinang Telp : 0717-422216,43316 Fax : 0717-421304 Email : pk-pinang@pelni.co.id Penjualan Tiket : Jl.Hamidah No 67 Pangkalpinang Telp : 0717-422216
<b>Labuan Bajo</b> Jl.Trans Flores, pasar Baru Labuan Bajo Kab Manggarai Barat NTT Telp : 0385- 2440304 e-mail : labuan-bajo@pelni.co.id Penjualan Tiket : Jl.Trans Flores,pasar Baru Labuan Bajo Kab Manggarai Barat NTT Telp : 0385- 2440304		<b>Tahuna</b> Jl.Sudirman No 35 Kota Tahuna,Kab. Kepulauan Sangie Telp : 0432- 21053 Fax : 0432- 22566 Penjualan Tiket : Jl.Sudirman No 35 Kota Tahuna,Kab.Kepulauan Sangie Telp : 0432- 21053



## Informasi Pada Website Perusahaan

### Information at Company Website

Perseroan menampilkan informasi yang relevan dan terkini mengenai kondisi Perseroan yang dapat diakses oleh publik dalam situs resmi Perseroan <https://www.pelni.co.id/>.

Informasi Perusahaan yang disajikan dalam situs tersebut antara lain meliputi:

- Informasi mengenai produk, layanan dan akses informasi pemesanan tiket PELNI.
- Call Center INFO PELNI
- Informasi Tata Kelola Perusahaan PELNI meliputi Pedoman GCG, Kode Etik (*Code of Conducts*), Board Manual, Pakta Integritas, Laporan Tahunan serta informasi terkait Tata Kelola Perusahaan lainnya yang relevan.

The Company presents relevant and up-to-date information about the Company's condition that area accessible for public at official website at <https://www.pelni.co.id/>.

Corporate information that are presented at the website are including:

- Information about products, services and information access for PELNI ticket purchase.
- INFO PELNI Call Center.
- PELNI Corporate Governance Information including Code of GCG, Code of Conducts, Board Manual, Integrity Pact, Annual Report and other relevant information related with Corporate Governance.





## Peristiwa Penting

### Event Highlights 2016

5 Januari 2016/January 5, 2016



#### MoU Aerofood ACS

#### MoU Aerofood ACS

Untuk meningkatkan kualitas sajian makanan bagi penumpang kelas ekonomi di KM Kelud, PT PELNI (Persero) menandatangani kerja sama *catering service* dengan Aerofood ACS. Melalui kerja sama tersebut, Penumpang ekonomi kapal PELNI akan mendapatkan fasilitas makan tiga kali sehari (sarapan, siang, dan malam). Dengan sajian makanan dari Aerofood ACS, selain menu makanan yang bervariatif, penumpang juga akan mendapatkan *supplement food* berupa susu kemasan atau jus kemasan khusus untuk menu makan malam.

Sebagai proyek percontohan di KM Kelud, kerja sama pelayanan *catering service* di KM Kelud diharapkan dapat segera dilakukan di kapal penumpang PELNI yang lainnya. Saat ini PT PELNI (Persero) mengoperasikan 25 kapal penumpang, melayani 45 pelabuhan dengan kurang lebih 1.200 rute.

To improve quality of meals served for economy class passengers on KM Kelud, PT PELNI (Persero) signed catering service MoU with Aerofood ACS. Through this partnership, economy class passenger on PELNI Ship will get three-meals per day facility (breakfast, lunch and dinner). With meal package from Aerofood ACS, besides wide variety of meal menu, the passenger will also receive supplement food such as packaged milk or juice for dinner menu.

As pilot project on KM Kelud, catering service on KM Kelud is expected to be implemented immediately on other PELNI passenger ships. PT PELNI (Persero) is currently operating 25 passenger vessels serving over 1,200 routes and 45 ports.



**8 Januari 2016/January 8, 2016**



**Peringatan Gerhana Matahari Total (GMT) di Bangka Belitung:  
Kemenko Maritim Ajak Rombongan naik KM Kelud PELNI**

**Total Eclipse (GMT) at Bangka Belitung: Coordinative Minister of Marine Invited Group Visitor to Board KM Kelud Owned by PELNI**

Dalam rangka memeriahkan peristiwa alam langka, Gerhana Matahari Total 2016, PT PELNI (Persero) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk menyaksikan langsung GMT di wilayah perairan Bangka Belitung. Untuk mengangkut sekitar 1.100 orang dari rombongan Kemenko Maritim, PELNI menyediakan armada terbaiknya yang telah berpengalaman dalam menghadirkan event nasional di atas kapal, yaitu KM Kelud.

In order to celebrate rare natural phenomena, Total Eclipse in 2016, PT PELNI (Persero) cooperated with Coordinative Minister of Marine Sector to directly watch GMT at Bangka Belitung water territory. To carry around 1,100 pax from Kemenko Maritim group, PT PELNI (Persero) had provided best and well-experience flets as well as organizing obboard national events on KM Kelud.

**20 – 22 Januari 2016/January 20 – 22, 2016**



**RAPIM 1: Melalui Perubahan Dengan Optimalisasi Potensi dan Biaya Terukur Kita Wujudkan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat**

**1<sup>st</sup> Executive Meeting: Through Transformation with Potential Optimization and Measured Cost, We Actualize Improvement of Public Service**

PT PELNI (Persero) menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) 1 tanggal 20 – 22 Januari 2016 di Kantor Pusat PT PELNI (Persero). Rapim dihadiri oleh seluruh Manajemen baik Direksi, Senior Manager dan Kepala Cabang hingga perwakilan kapal. Kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi program ke seluruh level pimpinan guna menciptakan harmonisasi di tingkat pimpinan.

PT PELNI (Persero) held Executive Meeting (Rapim) I on January 20 – 22, 2016 at Head Office of PT PELNI (Persero). The meeting was attended by all Management including the Board of Directors, Senior Manager and Branch Office Head up to ship representative. This activity aimed to synchronize the program until Executive Level to create harmonization at Executive Level.



28 Januari 2016/ January 28, 2016



#### Serah Terima Sertifikat ISO Galangan Surya Galangan Surya ISO Certificate Awarding

Galangan Surya Surabaya, salah satu *Strategic Business Unit* (SBU) PT PELNI (Persero) berhasil memperoleh 3 (tiga) sertifikat dari PT Sucofindo, yaitu SNI ISO9011:2004/SNI 19 – 14001:2005 dan OHSAS 18001:2007. Sertifikat ini menjadi pengakuan bahwa Galangan Surya Surabaya sebagai Perusahaan dok kapal memiliki proses bisnis berstandar internasional.

Galangan Surya Surabaya, a Strategic Business Unit (SBU) of PT PELNI (Persero) successfully obtained 3 (three) certificates from PT Sucofindo, among others, SNI ISO9011:2004/SNI 19 – 14001:2005 and OHSAS 18001:2007. These certificates reflect acknowledgement that as a ship dock company, Galangan Surya has international-standard business process.

#### Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Perhubungan Saksikan Alih Terima Kapal Perintis Sanus 46 Ke PELNI

DKI Jakarta Governor and Minsitry of Transportation  
Witnessed Sanus 46 Pioneer Ship Hand Over to PELNI

Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bennomor AL.108/8/4/OTPL-15 pada 31 Desember 2015 tentang Pengalihan Pengoperasian Kapal Perintis tanggal 28 Januari 2016 dilakukan penyerahan terima Kapal Perintis SABUK NUSANTARA 46 dari KSOP Sunda Kelapa kepada PT PELNI (Persero). Penyerahan terima SANUS 46 disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan.

Following-up Marine Transportation General Directorate Minsitry of Transportation Circular Letter Number AL.108/8/4/ OTPL-15 on December 31, 2015 regarding Pioneer Ship Operation Transfer, on January 28, 2016, SABUK NUSANTARA 46 pioneer ship hand over ceremony was held from KSOP Sunda Kelapa to PT PELNI (Persero). SANUS 46 hand over ceremony was witnessed directly by Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama and Ignatious Jonan, Minister of Transportation.



**29 Januari 2016/January 29, 2016**



#### **Penandatanganan MoU antara PT PELNI (Persero) dan Kementerian Sosial**

**MoU Signing Between PT PELNI (Persero) and Ministry of Social Affairs**

Penandatanganan dilakukan di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016. Kerja sama tersebut menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk bekerjasama meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

The signing ceremony was held at Ministry of Social Affairs Building, Jakarta on January 29, 2016. The partnership manifested commitment of both parties to cooperate in improving qualit of life and welfare of Indonesian people.

**29 Januari 2016/January 29, 2016**



#### **MoU PELNI dan BPN**

#### **MoU PELNI and BPN**

Pada tanggal 29 Januari 2016, PT PELNI (Persero) menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Badan Pertanahan Nasional dan PT PELNI (Persero) mengenai Legalisasi dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah milik PT PELNI (Persero). Dalam kesempatan tersebut, PT PELNI (Persero) diwakili oleh Direktur Utama, Elfien Goentoro dan BPN diwakili oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursydan Baldan.

On January 29, 2016, PT PELNI (Persero) signed Memorandum of Understanding with Ministry of Agrarian Affairs and Planology via State Land Agency and PT PELNI (Persero) concerning PT PELNI (Persero) Land Assets Issue Legalization and Process. In this event, PT PELNI (Persero) was represented by President Director, Elfien Goentoro and BPN was represented by Ferry Mursydan Baldan, Minister of Agrarian Affairs and Planology.



11 Februari 2016/February 11, 2016



**PELNI Dukung Peningkatan Layanan Angkutan Barang Tol Laut**

**PELNI Support Service Improvement for Tol Laut Cargo Fleets**

Untuk mendorong peningkatan layanan angkutan barang tol laut, PT PELNI (Persero) melalui Direktur Komersial Harry Boediarto, mengusulkan sejumlah hal yang dirasa perlu dilakukan para *stakeholders* terkait kegiatan angkutan barang tol laut.

In order to support service improvement for Tol Laut fleets, through Director of Commercial Harry Boediarto, PT PELNI (Persero) proposed area of improvement for the Stakeholders in relation with Tol Raud cargo fleets activity.

19 Februari 2016/February 19, 2016



**Penandatanganan MoU Sinergi BUMN antara PT PELNI (Persero) dan PT POS Indonesia (Persero)**

**Signing of SOE Synergy MoU Between PT PELNI (Persero) and PT POS Indonesia (Persero)**

Penandatanganan MoU Sinergi BUMN antara PT PELNI (Persero) dan PT POS Indonesia (Persero) dilaksanakan di Hotel Jayakarta, Bandung tanggal 19 Februari 2016. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun sinergi bisnis antara PT PELNI (Persero) dan PT POS Indonesia (Persero), khususnya dalam bidang logistik.

Signing of SOE Synergy MOU Between PT PELNI (Persero) and PT POS Indonesia (Persero) was held at Jayakarta Hotel, Bandung on February 19, 2016. The partnership aimed to build business synergy between PT PELNI (Persero) and PT POS Indonesia (Persero), especially in logistic sector.

1 Maret 2016/March 1, 2016



**Sinergi BUMN: PELNI Gandeng BULOG Hingga Indah Karya**

**SOE Synergy: PELNI Invited BULOG Up to Indah Karya**

Dalam rangka mendukung sinergi BUMN tanggal 1 Maret 2016, PT PELNI (Persero) mengadakan penandatanganan nota kesepahaman dengan 8 (delapan) BUMN. Delapan perusahaan plat merah yang dimaksud adalah Banda Ghara Reksa; Brantas Abipraya; Indah Karya; Surveyor Indonesia; Sucofindo; BULOG; Semen Indonesia; Pertamina.

In order to support SOE synergy on March 1, 2016, PT PELNI (Persero) signed Memorandum of Understanding with 8 (eight) SOEs. The eight public companies are Banda Ghara Reksa; Brantas Abipraya; Indah Karya; Surveyor Indonesia; Sucofindo; BULOG; Semen Indonesia; Pertamina.



**19 April 2016/April 19, 2016**



#### **Donor Darah**

#### **Blood Donation**

PT PELNI (Persero) menyelenggarakan kegiatan sosial Donor Darah tanggal 19 April 2016 di Kantor Pusat PT PELNI (Persero). Seluruh Direksi, Direksi Anak Perusahaan, pegawai PT PELNI dan Pegawai Anak Perusahaan turut berpartisipasi dalam acara tersebut

PT PELNI (Persero) organized Blood Donation event on April 19, 2016 at Head Office of PT PELNI (Persero). The event was participated by all Board of Directors, Subsidiary Directors, employees of PT PELNI (Persero) and subsidiaries.

**19 April 2016/April 19, 2016**



#### **Sailing Tour Karimun Jawa**

#### **Karimun Jawa Sailing Tour**

Guna mendukung program Wisata Bahari, PT PELNI (Persero) menyelenggarakan *Sailing Tour* Karimun Jawa yaitu berlayar dengan KM Kelimutu pada tanggal 19 April 2016 dengan melibatkan BAKIS PELNI dan PELNI Cabang Semarang. Kegiatan tersebut juga melibatkan 50 anak yatim piatu di Semarang.

In order to support Marine Tourism program, PT PELNI (Persero) organized Karimun Jawa Sailing Tour as shipping with KM Kelimutu on April 19, 2016 and involvin BAKIS PELNI and PELNI Semarang Branch. The event was also invited 50 orphans in Semarang.

**28 April 2016/April 28, 2016**



#### **Ulang Tahun PT PELNI (Persero)**

#### **Anniversary of PT PELNI (Persero)**

Manajemen PT PELNI (Persero) menyelenggarakan perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-64 pada 28 April 2016. Menginjak usia ke-64 tahun 2016, manajemen PELNI terus memantapkan perannya sebagai BUMN sekaligus pelayanan masyarakat yang lebih baik

Management of PT PELNI (Persero) held 64<sup>th</sup> Anniversary on April 28, 2016. Entering age of 54 years in 2016, management of PELNI will continue to advance better roles both as SOE and public service obligation.

11 Mei 2016/May 11, 2016

**Tandatangani Nota Kesepahaman, PELNI Gandeng BNN Awasi Peredaran Narkotika di Jalur Pelayaran**

Pada tanggal 11 Mei 2016, PT PELNI (Persero) atau PELNI mendangani Nota Kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional di Kantor Pusat PT PELNI. Kerjasama ini dilakukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotik dan prekursor narkotika di jalur pelayaran.

**Signing Memorandum of Understanding, PELNI Cooperated with BNN to Watch Drugs Circulation at Shipping Route**

On May 11, 2016, PT PELNI (Persero) or PELNI signed Memorandum of Understanding with Badan Narkotika Nasional at Head Office of PT PELNI (Persero). This cooperation aimed to prevent and eradicate abuse and distribution of drugs precursors in shipping line.

2 – 4 Juni 2016/June 2 – 4, 2016



**Rapim 2: Melalui Perubahan Inovasi dan Optimalisasi Kita Raih Kinerja Tahun 2016**

**Executive Meeting 2: Through Inovation and Optimization, Let's Achieve Performance In 2016**

PT PELNI (Persero) menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) 2 tanggal 2 – 4 Juni 2016 di Hotel Novotel, Bogor. Rapim dihadiri oleh seluruh Manajemen baik Direksi, Senior Manager dan Kepala Cabang hingga perwakilan kapal. Kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi program ke seluruh level pimpinan guna menciptakan harmonisasi di tingkat pimpinan.

PT PELNI (Persero) held Executive Meeting II on June 2 – 4, 2016 at Novotel Hotel, Bogor. The meeting was attended by all Management including Board of Directors, Senior Manager and Branch Head up to Ship Representative. This activity was intended to syncronize programs to all Executive levels to create harmony at Top Management Level.

15 Juli 2016/July 15, 2016



**Pemberian Beasiswa 2016**

**Scholarship Program 2016**

PT PELNI (Persero) memberikan beasiswa Magister (S2) kepada 10 (sepuluh) orang pegawai di universitas terkemuka dalam negeri antara lain Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya dan Universitas Indonesia.

PT PELNI (Persero) awarded Master Degree (S2) scholarships to 10 (ten) employees to study at reputable domestic universities such as Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya and Universitas Indonesia.



**15 September 2016/September 15, 2016**



#### Dukung Kemenpar, PELNI Luncurkan Paket Wisata Bahari 6 Destinasi

Supported by Ministry of Tourism, PELNI Launched 6 Destinations Marine Tourism

Dalam rangka mendukung program Kementerian Pariwisata dalam meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara di tahun 2016, PT PELNI (Persero) kembali meluncurkan Paket Wisata Bahari. Peluncuran 6 (enam) Destinasi Paket Wisata Bahari PT PELNI (Persero) Tahun 2016 dilakukan langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya di Wonderful Indonesia Travel Fair 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata di Ecopark Ancol, Jakarta tanggal 15 September 2016.

In order to support programs of Ministry of Tourism to increase number of domestic and international tourists in 2016, PT PELNI (Persero) again launched Marine Tourism Package. The launching of 6 (six) Marine Tourism Package Destinations by PT PELNI (Persero) 2016 was inaugurated by Arief Yahya, Minister of Tourism at Wonderful Indonesia Travel Fair 2016 held by Ministry of Tourism at Ecopark Ancol, Jakarta on September 15, 2016.

**21 – 24 September 2016/September 21 – 24, 2016**



#### Rapim 3: Dengan Semangat Transformasi Berbasis IT Kita Tingkatkan Efisiensi dan Daya Saing Untuk Mencapai Target Perusahaan

Executive Meeting 3: With IT-Based Transformation Spirit Let's Improve Efficiency and Competitiveness To Achieve The Company's Target

PT PELNI (Persero) menyelenggarakan Rapat Pimpinan (Rapim) 3 tanggal 21 – 24 September 2016 di Grand Inna Hotel, Bali. Rapim dihadiri oleh seluruh Manajemen baik Direksi, Senior Manager dan Kepala Cabang hingga perwakilan kapal. Kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi program ke seluruh level pimpinan guna menciptakan harmonisasi di tingkat pimpinan.

PT PELNI (Persero) held Executive Meeting III on September 21 – 24, 2016 at Grand Inna Hotel, Bali. The Executive Meeting was attended by all Management including Board of Directors, Senior Manager and Branch Head up to Ship Representative. This activity was intended to synchronize programs to all Executive levels to create harmony at Top Management Level.

23 Desember 2016/ December 23, 2016



**Tiket Kapal PELNI Sudah Dapat Dibeli di Alfamart dan Indomaret Terdekat**

PELNI Ship Ticket is Available for Purchase at Nearest Alfamart and Indomaret

Pengguna kapal PELNI kini semakin dimudahkan dalam memperoleh tiket karena sudah dapat dibeli di gerai Alfamart dan Indomaret terdekat. Penambahan saluran distribusi penjualan tiket kapal PELNI ini merupakan implementasi dari Program *New PELNI Ticketing System* (NPTS) oleh PT PELNI (Persero) dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan.

Customer of PELNI ship has easier access to purchase ticket that has been available at nearest Alfamart and Indomaret outlets. This additional PELNI ship ticket sales distribution channel is implementation of New PELNI Ticketing System (NPTS) by PT PELNI (Persero) as an effort to improve quality of services to the customers.

28 Desember 2016/December 28, 2016



**Bebas dari Kandas, KM Sinabung Siap Lanjutkan Pelayaran**

Free from Grounding, KM Sinabung is Ready to Continue Sailing

Setelah lima hari berusaha, KM Sinabung berhasil dikeluarkan dari posisi kandas di alur masuk Pelabuhan Tual, Selasa tanggal 27 Desember 2016. Dengan dukungan dari berbagai pihak, KM Sinabung dapat kembali melayani masyarakat di rute Surabaya-Makassar-BauBau-Ambon-Tual-Ambon-Ternate-Bitung-Bacan-Sorong-Manokwari-Biak, terhitung tanggal 28 Desember 2016.

After five days of struggle, KM Sinabung was successfully pulled out from Grounding position at Tual Port Inflow in Tuesday, December 27, 2016. Supported by various parties, KM Sinabung backed to serve the society in Surabaya-Makassar-BauBau-Ambon-Tual-Ambon-Ternate-Bitung-Bacan-Sorong-Manokwari-Biak route since December 28, 2016.





# Fungsi Penunjang Bisnis

## Business Supporting Function

.....

“

Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan di tahun 2016, PT PELNI (Persero) melakukan fokus pada *Competency Assessment and Development* serta *Corporate Culture Development*.

In line with Corporate Long-Term Plan, in 2016, PT PELNI (Persero) focused on Competency Assessment and Development as well as Corporate Culture Development.

”



## Sumber Daya Manusia Human Resources

"Untuk mewujudkan visi sebagai perusahaan pelayaran yang tangguh dan pilihan utama pelanggan, PT PELNI (Persero) menyadari pentingnya pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi dan kinerja, serta mengedepankan komitmen *service excellence* sebagai pedoman pelayanan utama kepada seluruh Stakeholders PT PELNI (Persero)."

*"To achieve its vision as tough and most-preferred shipping company for the customers, PT PELNI (Persero) realizes the importance of competency and performance based Human Resources Management as well as promoting service excellence commitment as main service guideline to all stakeholders of PT PELNI (Persero)."*



## Kebijakan Pengelolaan SDM 2016

## HR Management Policy 2016

### Survival 2015

- Turn Around
- Retrenchment
- Main Business Focus
- Financial Restructuring
- Organizational Restructuring
- Asset Optimization

### Consolidation 2016-2017

- Competency Assessment and Development
- Customer Development
- Corporate Culture Development
- Production Facility Improvement
- Strategic Alliances

### Growth 2018-2019

- Market Development
- New Business Development
- Culture Strengthening
- Production Facility Development
- Operational Excellence

Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan di tahun 2016, PT PELNI (Persero) melakukan fokus pada *Competency Assessment and Development* serta *Corporate Culture Development*. Berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwa PT PELNI (Persero) sedang mengembangkan kebijakan dan sistem yang mendukung pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Di tahun 2016, PT PELNI (Persero) memulai untuk merumuskan transformasi organisasi, bisnis dan budaya. Struktur Organisasi PT PELNI (Persero) disahkan melalui SK Direksi No: 01.17/1/SK/HKO.01/2017 tentang Struktur Organisasi PT PELNI (Persero). Selain itu penyusunan kamus kompetensi dan penilaian kinerja yang berbasis kompetensi juga sudah dimulai dengan, hal-hal sebagai berikut:

- a. Asesmen kompetensi untuk pejabat struktural;
- b. *Talent mapping* untuk supervisor, senior dan junior staff kantor pusat;
- c. Penyusunan kamus kompetensi; dan
- d. Review sistem manajemen kinerja yang lebih objektif dan berbasis kinerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tahun 2016 PT PELNI (Persero) masih dalam tahap awal dalam perumusan kebijakan pengelolaan pegawai yang berbasis kompetensi.

In line with Corporate Long-Term Plan, in 2016, PT PELNI (Persero) focused on Competency Assessment and Development as well as Corporate Culture Development. Based on this consideration, PT PELNI (Persero) is currently policy and system to support developing competency-based HR management. In 2016, PT PELNI (Persero) started to formulate transformation of organization, business and culture. Organization Structure of PT PELNI (Persero) is validated under Board of Directors Decree Number 01.17/1/SK/HKO.01/2017 on Organization Structure of PT PELNI (Persero). In addition, formulation of competency dictionary and competency-based performance assessment had been also started with following aspects:

- a. Competency assessment for structural officers;
- b. Talent mapping for supervisor, senior and junior staffs at Head Office;
- c. Formulation of competency dictionary;
- d. Review more objective and performance-based performance management system.

According to aspects that are mentioned above, in 2016, PT PELNI (Persero) was under early phase in the competency-based employee management policy formulation.



## **Merit System & Performance Management System**

Perseroan menerapkan aplikasi *Merit System* sejak tahun 1999 dalam melakukan penilaian atas kinerja pegawai yang bertujuan untuk memperoleh hasil penilaian kinerja individu yang objektif dan transparan. *Merit System* ini diberikan kepada seluruh pegawai yang dilakukan secara berkala dalam rentang waktu 1 (satu) periode penilaian yaitu 6 (enam) bulan sekali atau per semester.

Sejak tahun 2009, PT PELNI (Persero) juga menerapkan program Penilaian Karya Pegawai (PKP). PKP Kelompok telah berjalan dengan baik dan konsisten dengan selalu dilaksanakan penilaian setiap triwulan. Hasil dari perhitungan PKP Kelompok ini setiap triwulan akan dihitung dan akan disahkan dalam sebuah Surat Keputusan Direksi. Surat Keputusan Direksi ini akan menjadi dasar dalam pemberian penghasilan pegawai. Namun di tahun 2015 dilakukan penyempurnaan dan evaluasi terhadap sistem Penilaian Karya Pegawai, yang pada awalnya dilakukan setiap triwulan menjadi setiap semester dan pembobotan beberapa parameter yang disesuaikan kembali.

Untuk Penilaikan Karya Pegawai Individu baru dilaksanakan semenjak tahun 2012 dan sudah berjalan selama empat tahun. Dalam masa implementasinya, PKP Individu terus mengalami perbaikan dan penyesuaian, baik dari sistem penilaian maupun aplikasi di Sistem Informasi Manajemen SDM. Di tahun 2016 dilakukan evaluasi terhadap parameter dalam sistem Penilaian Karya Pegawai Individu agar dapat diselaraskan dengan *Key Performance Indicator* perusahaan dengan ditambahkan parameter *non-performance*. Hal-hal tersebut di atas tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No: 10.05/2/SK/HKO.01/2015 tentang Penilaian Kinerja Pegawai.

Divisi SDM sebagai pelaksana Sistem Manajemen Kinerja atau *Performance Management System* (PMS) memberikan data berupa laporan yang transparan terkait kinerja masing-masing pegawai per semester. Hasil penilaian kinerja tersebut menjadi dasar pertimbangan Manajemen Perusahaan dalam pemberian *reward*, peningkatan remunerasi, pengembangan karir pegawai seperti promosi, rotasi, dan sebagainya. Selain itu, hasil penilaian kinerja ini juga menjadi dasar dalam pemberian *punishment* seperti surat peringatan, penundaan kenaikan pangkat, demosi, mutasi sampai pemutusan hubungan kerja.

## **Merit System & Performance Management System**

The Company implements Merit System application since 1999 and performs employee performance assessment to generate objective and transparent individual performance assessment result. The Merit System prevails for all employees and is done regularly within 1 (one) assessment period, or 6 (six) months or in every semester.

Since 2009, PT PELNI (Persero) also implement Employee Work Assessment (PKP). Group PKP has been done very well and consistently through quarter assessment. Result of Group PKP assessment will be calculated and submitted in Board of Directors Decree quarterly. The Board of Directors Decree will become the basis for employee remuneration package. However, in 2015, there were improvement and evaluation on the Employee Work Assessment system which previously done quarterly to semester and the weight of parameters was also adjusted.

On the other hand, Individual Employee Work Assessment has been implemented since 2012 and conducted in every four years. In its implementation, Individual PKP is improving and adjusted in terms of assessment system and application in HR Management Information System. In 2016, the Company evaluated the parameters in Individual Employee Work Assessment to be aligned with corporate Key Performance Indicators by adding non-performance parameters. This has been stipulated in Board of Directors Decree Number 10.05/2/SK/HKO.01/2015 regarding Employee Performance Assessment.

As executor of Performance Management System (PMS), the HR Division supplied data as transparent performance report of each employee in semester basis. The performance assessment report is used by the Management as consideration of reward, remuneration appraisal, employee career development such as promotion, rotation and others. In addition, the performance assessment result is also applied as consideration of punishment such as warning letter, promotion postpone, demotion, mutation until employment termination.



## Rekrutmen SDM

Sebagai BUMN yang bergerak dalam sektor pelayaran, Perseroan memberikan kesempatan berkarir yang sama berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan unit kerja di Perseroan. Peluang berkarir di PT PELNI (Persero) memberlakukan atas kesetaraan tanpa adanya diskriminasi gender, agama, suku bangsa maupun hal lainnya.

Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan pegawai untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selama tahun 2016, Perseroan melaksanakan 3 (tiga) jenis program rekrutmen pegawai PT PELNI (Persero), antara lain:

### a. Rekrutmen pegawai darat

Rekrutmen pegawai darat dilakukan bekerja sama dengan PPM Manajemen sesuai SPK No: TH 915/SS/2016 tentang Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Assessment Pegawai PT PELNI (Persero). Pegawai darat yang direkrut di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Posisi/Position	2016
1.	Pegawai profesional/Professional Employee	10
2.	Fresh Graduate/Fresh Graduate	-
Jumlah/Total		10

Perekrutan untuk pegawai *fresh graduate* masih dalam tahapan pembahasan dengan pihak manajemen. Sesuai dengan evaluasi yang dilakukan, bahwa perusahaan akan melakukan rekrutmen secara bertahap, sesuai dengan dengan prioritas kebutuhan.

### b. Rekrutmen Pegawai Laut

Perekrutan untuk pegawai laut dilakukan di tahun 2016, terutama untuk posisi perwira (ijazah ANT dan ATT) untuk mengisi kekosongan posisi yang ada di PT PELNI (Persero) berikut merupakan jumlah pegawai laut yang direkrut oleh PT PELNI (Persero).

## Employee Recruitment

As SOE that is operated in shipping sector, the Company guarantees fair career opportunity based on competency standard and requirement in each working unit in the Company. Career opportunity at PT PELNI (Persero) adapts fairness principle without any discrimination based on gender, religion, ethnicity and other aspects.

The recruitment system will be done transparently based on man power planning to support achievement of the Company's short-term and long-term targets achievement. Throughout 2016, the Company held 3 (three) PT PELNI (Persero) employee recruitment program, as follows:

### a. Ground Employee Recruitment

Ground employee recruitment was done in cooperation with PPM Management referring to SPK Number TH/915/SS/2016 regarding PT PELNI (Persero) Employee Assessment Project. Total ground employees that were recruited in 2016 is as follows:

Fresh Graduate recruitment is under discussion process with the Management. Based on the evaluation, the Company will perform recruitment gradually based on priority.

### b. Offshore Employee Recruitment

Offshore employee recruitment was done in 2016 primarily for officer position (with ANT and ATT Diploma) to be assigned in existing vacant positions at PT PELNI (Persero). Total offshore employees that were recruited by PT PELNI (Persero) is as follows:



No.	Posisi Awak Kapal Crew Position	2016	Keterangan Description
1.	Kapal Milik/Owned-Ship		
	ANT III	19	Rekrutmen dilakukan sesuai dengan Nota Dinas No. 04.30/5/300/2015 perihal ijin prinsip rekrutmen ANT III dan ATT III Recruitment was done according to Official Memo Number 04.30/5/300/2015 regarding ANT III and ANT III recruitment principal permit
	ATT III	31	
	ETO	27	Rekrutmen ETO bekerjasama dengan Politeknik Pelayaran Surabaya The ETO recruitment cooperated with Politeknik Pelayaran Surabaya
	Dokter Umum General Practitioner	5	Rekrutmen dilakukan sesuai ND No. 06.27/02/ND/310/2016 perihal ijin prinsip rekrutmen dokter dan perawat Recruitment was done according to Official Memo Number 06.27/02/ND/310/2016 regarding doctors and nurse recruitment principal permit
	Perawat Nurse	6	
	KKM	3	Dilakukan perekruitment professional Professional Recruitment
2.	Kapal Perintis/Pioneer Ship	882	-
	Jumlah/Total	973	

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan rekrutmen pegawai darat dan pegawai laut adalah sebagai berikut:

Total Budget that was allocated by the Company for ground and offshore employees recruitment in 2016 is as follows:

No	Keterangan Description	Anggaran 2016 Budget 2016	Realisasi 2016 Realization 2016
1	Rekrutmen Pegawai Darat Ground employees recruitment	Rp2.280.500.000	Rp920.825.610
2	Rekrutmen Pegawai Laut Offshore employees recruitment	Rp321.501.159	Rp190.540.000
	Jumlah/Total	Rp2.602.001.159	Rp1.111.365.610

## Profil SDM 2016

Per 31 Desember 2016, jumlah pegawai Perseroan adalah 4.563 orang atau sedikit menurun sebesar 3,2% dibandingkan 4.714 pegawai pada tahun 2015. Penurunan jumlah pegawai tersebut disebabkan oleh pegawai pensiun dan keluar.

Perseroan memberikan perlakuan dan kesempatan pengembangan karir yang setara kepada seluruh karyawan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, ras maupun hal lainnya yang bersifat diskriminasi

Deskripsi profil SDM berdasarkan level jabatan, jenis kelamin, status kepegawaian, tingkat pendidikan dan usia pada tahun 2016, sebagai berikut:

## Employee Demography 2016

As of December 31, 2016, total employees achieved 4,563 employees or slightly decreased by 3.2% if compared with 4,714 employees in 2015. A decrease in employee number was due to retired and resigned employees.

The Company provides fair treatment and career opportunity to all employees without any discrimination by gender, ethnicity, religion, race and other discriminative aspects.

Description of employee demography based on position level, gender, employment status, educational level and age in 2016 are explained below:



### Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

### Employee Composition Based on Position Level

Level Jabatan Position Level	2016	2015	2014
Top Manager (2-4)	131	134	134
Middle Manager (5-7)	488	512	488
Lower Manager (8-9)	510	485	477
Staff (10-11)	566	611	604
Officer (12-16)	2868	2972	3212
Jumlah/Total	4563	4714	4915

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

### Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2016	2015	2014
Pria/Male	3897	4000	4170
Wanita /Female	666	714	745
Jumlah/Total	4563	4714	4915

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

### Employee Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2016	2015	2014
Organik/Organic	3880	4008	4265
Non Organik/Non Organic	683	706	650
Jumlah/Total	4563	4714	4915

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

### Employee Composition Based on Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2016	2015	2014
Doktor/Ph.D	0	0	0
Pasca Sarjana/Post-Graduate	87	100	88
Sarjana/Bachelor Degree	621	655	628
Diploma/Diploma	346	361	350
≤ SLTA/≤ High School	2971	3075	3297



Tingkat Pendidikan Education Level	2016	2015	2014
ANT I	89	95	79
ANT II	50	56	37
ANT III	97	75	126
≤ ANT IV	14	17	12
ATT I	97	106	69
ATT II	33	35	49
ATT III	120	84	91
≤ ATT IV	38	55	89
Jumlah/Total	4563	4714	4915

**Posisi Pegawai Berdasarkan Usia****Employee Composition Based on Age**

Usia (Tahun) Age (Years)	2016	2015	2014
> 55	262	293	333
50 - 55	1081	978	901
40 - 49	2114	2267	2436
31 - 39	515	564	652
< 30	591	612	593
Jumlah/Total	4563	4714	4915

**Pengembangan kompetensi SDM**

Dalam rangka menjamin kelangsungan bisnis Perusahaan yang berkesinambungan serta menghadapi era disruptif dengan persaingan bisnis yang semakin kompetitif, PT PELNI (Persero) senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan semangat belajar pegawai untuk siap bertransformasi dengan meningkatkan kualitas pegawai sebagai aset utama Perusahaan. Upaya tersebut diimplementasikan melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan yang dilakukan secara berkala, sehingga setiap pegawai PT PELNI akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni sesuai dengan SK No: 24/hko.01/DIR/I-2009 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai PT PELNI (Persero). Pelatihan dititikberatkan pada pembentukan personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja yang menunjang transformasi bisnis perusahaan saat ini.

**Employee Competency Development**

In order to ensure the Company's business sustainability and to deal with disruptive era amidst fiercer business competition, PT PELNI (Persero) strives to ignite learning spirit of the employees to be ready for transformation and develop quality of the employees as main assets of the Company. The effort was implemented through training and knowledge-transfer program that had been done regularly to provide adequate knowledge and skill to every employee of PT PELNI (Persero) in accordance with Decree Number 24/HKO.01/DIR/I-2009 regarding PT PELNI (Persero) Employee Education and Training scheme. The trainings were focused on developing qualified personal with expertise, working competency and loyalty that support current business transformation in the Company.

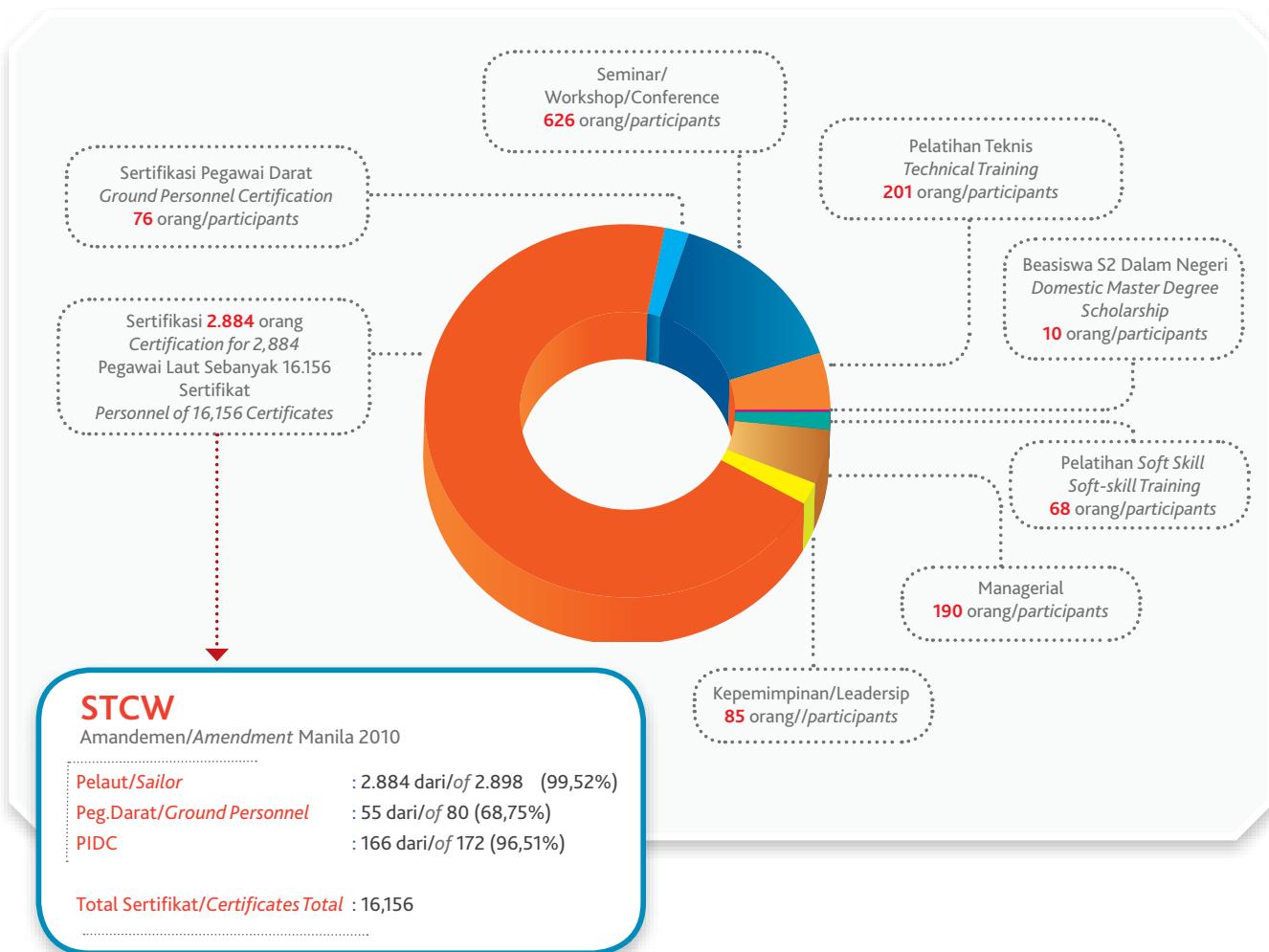


a. Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan

Sepanjang tahun 2016 PT PELNI (Persero) sudah mengirimkan 3.260 pegawai (73%) sudah melaksanakan pengembangan dan pelatihan guna memperkuat kompetensi inti pegawai. Pengembangan kompetensi yang dimaksud tersebut dapat berupa seminar, workshop dan sertifikasi serta pelatihan penjenjangan yang dilakukan oleh perusahaan.

a. Total Trained Employees

Throughout 2016, PT PELNI (Persero) delegated 3,260 employees (73%) to participate in development and training programs to strengthen core competency of the employees. The competency building included seminar, workshop and certification as well as staging trainings that are provided by the Company.





Adapun kegiatan program pelatihan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Training program activities that had been done throughout 2016 are as follows:

No	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Total Participants
A.	Pegawai Darat/ Ground Staff		
1	Pelatihan Pengembangan Managerial Managerial Development Training	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Managerial Tingkat Madya 1. Managerial Training Middle Level</li> <li>2. Pelatihan Pengembangan SQ For Senior Manager &amp; Manager Dan Mentoring &amp; Group Coaching Clinic For Senior Manager &amp; Manager (5 Batch) 2. SQ Development Training for Senior Manager &amp; Manager and Mentoring &amp; Group Coaching Clinic for Senior Manager &amp; Manager (5 batch)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30</li> <li>160</li> </ul>
	Sertifikasi Profesi Ahli Expert Professional Certification	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Pengawasan Internal/Internal Audit Unit: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diklat Audit Internal Tingkat Dasar I Basic Internal Audit I Training</li> <li>b. Training Satuan Pengawas Internal Oleh BPKP Internal Audit Training by BPKP</li> </ul> </li> <li>2. Hukum/Legal : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Advocacy Professional Training</li> <li>b. Pelatihan Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi Export Import Management Training and Simulation</li> <li>c. Workshop "Mekanisme Pelelangan Aset Perusahaan" Workshop "Corporate Assets Auction Mechanism "</li> </ul> </li> <li>3. Dpa-Ism Code : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan Internal Auditor Ism-Code Internal Auditor ISM-Code Training</li> <li>b. Pelatihan Dpa-Ism Code DPA-ISM Code Training</li> </ul> </li> <li>4. Akutansi &amp; Perbendaharaan/Accounting &amp; Treasury <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Isak Terbaru 2015 Serta Brief Analysis Ifrs" Workshop "Overview And Analysis Psak"</li> <li>b. Pelatihan "Pph Pasal 21 Update Ptakp 2016" Training "Income Tax Article 21 Update PTKP 2016"</li> </ul> </li> <li>5. Divisi Aset/Assets Division: Pelatihan <i>Certification Optimized Asset (COA)</i> Certification Optimized Asset (COA) Training</li> <li>6. Direktorat Armada &amp; Teknik/Fleet &amp; Technical Directorate: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. In House Training Marine Surveyor/ In House Training Marine Surveyor</li> <li>b. <i>Training Sistem Automatic PLC Basic</i> Training Automatic PLC Basic System</li> </ul> </li> <li>7. Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Products and Service Procurement Certification</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>32</li> <li>2</li> <li>4</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>1</li> <li>21</li> <li>6</li> <li>1</li> </ul>



No	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Total Participants
	8. <i>Corporate Planning:</i>		
	a. Pelatihan Assesor KPKU KPKU Assessor Training		4
	b. Pelatihan Interpretasi Interpretation Training		7
	c. <i>Training ISO 31000 ERM Fundamental</i> ISO 31000 ERM Fundamental Training		1
	d. <i>ISSSO 31000 Series 2 Risk Assessment Technique (Teknik Assesmen Risiko)</i> ISO 31000 Series 2 Risk Assessment Technique (Risk Assessment Method)		1
	9. Divisi Pengamanan/Security Division:		
	a. Cso-Isps Code Oleh Bki		3
	b. Internal Auditor (Ispscode)		2
	1. Pelatihan <i>Basic Computing</i> Basic Computing Training		17
3	Pelatihan Teknis Technical Training	2. Pelatihan Bahasa Inggris Untuk Dit. Armada & Teknik English Training for Fleet & Technical Directorate	21
	3. Pelatihan Teknik Negosiasi Negotiation Skill Training		90
	4. <i>In House Training</i> Kearsipan In House Training on Archiving		58
4	Pelatihan Leadership Leadership Training	1. <i>Change Management</i> Oleh Rhenald Kasali 1. Change Management by Rhenald Kasali	83
	2. <i>Effective Leadership</i> 1. Effective Leadership		2
5	Pelatihan Softskill Softskill Training	1. Internalisasi <i>Corporate Culture &amp; Etika</i> For Senior Manager dan Manager Internalization of Corporate Culture & Ethics for Senior Manager and Manager	68
	2. Optimasi Sinergi Internal Pengelola SDM PT PELNI (Persero) Optimizing Internal Synergy of PT PELNI (Persero) HR Managers		35
	3. Optimasi Sinergi Internal/ <i>Shared Meaning</i> Direktorat SDM Dan Umum (Lanjutan) Oleh Bapak Taufik Bahaudin Optimizing Internal/Shared Meaning Synergy in HR and General Affairs Directorate (advane) by Mr. Taufik Bahaudin		35
6	Workshop	Public Training	
	1. Pelatihan <i>Professional Director Program</i> Oleh Indonesian Institute For Corporate Directorship (IICD) Professional Director Program oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship Training by (IICD)		7
	2. <i>Workshop Lelang Penghapusan Aset Perusahaan</i> Oleh LiPP Workshop Corporate Assets Write-Off Auction by LIPP		2
	3. Pelatihan Revaluasi Aset Assets Revaluation Training		1
	4. Pelatihan Minaut Indonesia <i>Problem Solving</i> Di PPM Minaut Indonesia Problem Solving Training at PPM		2
	5. Training Pph Pasal 21 Konsep Dan Teori Perhitungan Pph Pasal 21 Income Tax Article 21 Training, Concept and Theory of Income Tax Article 21 Calaculation Training		2



No	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Total Participants
6.	<i>Training Hukum Pertanahan</i> Land Legal Training		2
7.	<i>Pelatihan Filing Management Di Ppm</i> Filing Management Training at PPM		1
8.	<i>Pelatihan Electronic Filing &amp; Document Management System</i> Electronic Filing & Document Management System Training		2
9.	<i>Workshop Implementasi Prosedur Dan Tata Cara Lelang Penghapusan Aset Berdasarkan PMK Terbaru No. 27/Pmk.06/2016</i> Workshop Implementation of Assets Write-Off Auction based on Recent PMK No. 27/PMK.06/2016		1
10.	<i>Designing Standard Operating Procedure (Sop)</i>		3
11.	<i>Workshop Manajemen Serikat Pekerja</i> Workshop Workers Union Management		1
12.	<i>Human Resources Management Oleh PPM Manajemen</i> Human Resources Management by PPM Manajemen		3
13.	<i>Financial Statement Analysis</i>		1
14.	<i>Workshop Nasional "Manajemen Perjalanan Dinas"</i> Workshop Nasional "Business Trip Management "		2
15.	<i>Bussiness Process Mapping</i>		4
16.	<i>Feasibility Study</i>		1
Workshop	17. Tata Cara Pembukuan, Penghapus Bukuan Dan Pemindah Tanganan Aset Tetap BUMN" "SOE Fixed Assets Administration, Write-Off and Transfer Method"		2
	18. "Competency Based Human Resources Management" "Competency based Human Resources Management"		1
19.	<i>Competency Based Recruitmen And Selection</i>		1
20.	<i>Workshop Ketenagakerjaan tanggal 20-21 Desember 2016</i> Employment Workshop on December 20 – 21, 2016		4
21.	<i>Designing Learning Program</i>		1
<b>INHOUSE TRAINING</b>			
22.	pengukuran KPI Korporat Corporate KPI Assessment		35
23.	<i>Training SMK3 dan P2K3</i> Training SMK3 and P2K3		30
24.	<i>Workshop Sosialisasi SAP, EBS Oracle System, dan Shipping Finance</i> Workshop SAP, EBS Oracle System, and Shipping Finance Socialization		150
25.	<i>Workshop "Penyusunan Buku Laporan dan Skoring KPKU"</i> Workshop "KPKU Report and Scoring Book Preparation"		95
26.	<i>Workshop Interpretasi Hasil Assessment Talent Mapping PT. LeadPro</i> Workshop Interpretation of PT LeadPro Talent Mapping PT. LeadPro Assessment result		35



No	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Total Participants
<b>PUBLIC TRAINING</b>			
7	Seminar	1. Seminar FSPS BUMN 2. Seminar <i>One Day Workshop &amp; Discussion "Pengelolaan Holding Company"</i> Seminar One Day Workshop & Discussion " Holding Company Management" 3. Seminar & Munas FKSPI 2016 4. Seminar "BUMN Pasca Putusan MK No 62/PUU-XI/2013" Seminar "SOCE Post MK Verdict No 62/PUU-XI/2013" 5. Seminar Nasional Pelaksanaan PKWT & <i>Outsourcing</i> Pasca Putusan MK No.27/ PUU-IX/2011 dan No.07/PUU-XII/2014 National Seminar Implementation of PKWT & Outsourcing Post MK Verdict No.27/PUU-IX/2011 and No.07/PUU-XII/2014 6. Seminar Strategi Mengelola Program CSR/PKBL BUMN Seminar SOE CSR/PKBL Program Management Strategy 7. Seminar <i>Neuro Linguistic Program (NLP)</i> 8. Seminar "Whistle Blowing System" 9. Seminar "Pengembangan Kapasitas dalam rangka Pemberdayaan Lingkungan Kerja Pemerintah" Seminar "Capacity Building to Empower Government Working Circumstances" 10. Seminar Arah dan Strategi CSR BUMN / BUMD Seminar SOE/ROE CSR Direction and Strategy 11. Undangan mengikuti <i>In House Training</i> bagi Designated Person Ashore Perusahaan Pelayaran dan Manajemen Operasional Kapal Invitation to In House Training bagi Designated Person Ashore for Shipping Company and Ship Operation Management	2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 55 106 7 2 1
8	Talent Mapping	1. <i>Talent Mapping Brainware</i> untuk pejabat setingkat Senior Manager & Manager Talent Mapping Brainware for Executives at Senior Manager & Manager Levels 2. <i>Talent Mapping LEADPRO</i> untuk pejabat setingkat Supervisor & Senior Staff Talent Mapping LEADPRO for Executives at Supervisor & Senior Staff Levels	55 106
9	Program Beasiswa Scholarship Program	1. Program Beasiswa S2 ITB Master Degree Scholarship Program to ITB 2. Program Beasiswa S2 ITS Master Degree Scholarship Program to ITS 3. Program Beasiswa S2 UI Master Degree Scholarship Program to UI	7 2 1



No	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Total Participants
B.		Pegawai Laut/Offshore Training	
1.	Revalidasi Dan Pemutakhiran STCW Amandemen 2010 Manila Revalidation and Updating STCW Amendment 2010 MANILA	Revalidasi Dan Pemutakhiran Stcw Amandemen 2010 Manila Sudah Dilaksanakan Untuk 2.884 Orang Pegawai Laut Dengan 16.156 Sertifikat. Pencapaian Pada Tahun 2016 Secara Garis Besar Sudah Sebesar 88,26% (Rincian : Pegawai Laut 99,52%, Pegawai Darat 68,75%, Dan Pidc 96,51%). Revalidation and Updating STCW Amendment 2010 Manila had been conducted for 2,884 offshore employees with 16,156 certificates. In 2016, the achievement was overall 88.26% (detail : offshore employees achieved 99.52%, ground employees 68.75%, and PIDC 96.51 %).	2884
2.	Orientasi Pegawai Baru New Employee Orientation	Orientasi Dokter Kapal Ship Doctor Orientation	6
3.	Pelatihan Teknis Technical Training	1. Pelatihan Admin Untuk PUK Kapal Administration Training for SHIP PUK 2. Pelatihan Teknis Calon PUK Technical Training for PUK Candidate	10 5

b. Biaya pengembangan kompetensi pegawai

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2016 untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pendidikan, seminar, workshop, sertifikasi dan beasiswa adalah:

b. Employee Competency Development Budget

Total budget that was disbursed by the Company in 2016 for implementation of employee competency development activities through training, education, seminar, workshop, certification and scholarship is as follows:

No.	Keterangan/Description	Anggaran 2016/Budget 2016	Realisasi 2016/Realization 2016
1.	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Darat Ground Staff Education & Training	Rp 5.033.725.116	Rp 3.806.159.252
2.	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Laut Offshore Staff Education & Training	Rp 10.014.211.077	Rp 8.571.391.976

## Remunerasi dan Kesejahteraan SDM

Dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas pegawai terhadap Perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai, Perseroan telah menetapkan remunerasi pegawai yang didasarkan atas hasil penilaian kinerja. Pemberian remunerasi pegawai Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait lainnya.

Komponen remunerasi yang diberikan kepada pegawai Perseroan, antara lain gaji pokok, insentif prestasi serta berbagai tunjangan dan fasilitas. Tunjangan dan Fasilitas yang dimaksud tersebut diantaranya adalah:

- Tunjangan Pengawasan/Komando kepada Nakhoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), Mualim I serta Masinis I tertuang dalam SK Direksi No. 01.20/3/SK/HKO.01/2015 tanggal 20 Januari 2015.

## Employee Remuneration and Welfare

In order to raise employee performance motivation and loyalty to the Company and to improve the employee's welfare, the Company has stipulated employee remuneration based on performance assessment result. The employee remuneration package has also complied with prevailing Law and regulation, including Provincial Minimum Wage (UMP) and Ministry of Man Power and Transmigration regulation and other related regulations.

Component of employee's remuneration package includes basic salary, performance incentives and other allowances and facilities. The allowance and facilities are including:

- Monitoring/Command Allowance for Captain, Head of Engine Room (KKM), Mualim I and Machinist I as stipulated under Board of Directors Decree Number 01.20/3/SK/HKO.01/2015 dated January 20, 2015.



- b. Tunjangan Pimpinan Pejabat Struktural kepada pejabat struktural di kantor pusat, SBU, cabang, Ketua YKPP per Agustus 2013 dan tertuang dalam:
  - SK Direksi No. 12.31/4/SK/HKO.01/2014 tentang Pemberian Tunjangan Pimpinan Pejabat Struktural PT PELNI (Persero);
  - 95/HKO.01/DIR/X-2013 tentang Tunjangan Ketua dan Sekretaris Task Force Team Diversifikasi Usaha; dan
  - SK No. 98/ HKO.01/ DIR/X-2013 tentang Tunjangan Ketua Yayasan Kesehatan Pensiunan PT PELNI (Persero).
- c. Pemberian Tunjangan Profesi untuk Jabatan Fungsional tertuang dalam SK Direksi No. 07.23/1/SK/HKO.01/2014 tanggal 23 Juli 2014.
- d. Tunjangan Penyesuaian kepada seluruh pegawai Perseroan. Pemberian tunjangan ini telah berlangsung sejak tahun 2011, dan terus meningkat pada tahun 2012, 2013, dan 2014.
- e. Selama tahun 2016 terdapat kenaikan gaji pokok pegawai sebesar 10% terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 07.26/1/SK/HKO.01/2016 tentang Kenaikan Gaji Pokok bagi Pegawai Status Organik PT PELNI (Persero).

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh pegawai organik PT PELNI (Persero), agar dapat menjamin kesejahteraan pegawai pada saat memasuki usia pensiun. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dana Pensiun PELNI (DPP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Adapun DPP diperuntukkan bagi pegawai organik yang bergabung/masuk sampai dengan tahun 2006, sedangkan DPLK diperuntukkan bagi pegawai organik yang bergabung dari tahun 2007 dan seterusnya.

Rincian realisasi biaya remunerasi dan paket kesejahteraan Perseroan untuk periode tahun 2016, adalah sebagai berikut:

- b. Allowance for Structural Executives Chief for Structural Executives at Head Office, SBU, Branch Office, Director of YKPP as per August 2013 and stipulated in:
  - Board of Directors Decree Number 12.31.4/SK/HKO.01/2014 regarding Allowance for PT PELNI (Persero) Structural Executive Chief;
  - 95/HKO.01/DIR/X-2013 regarding Allowance for Chairmana and Secretary of Business Diversification Task Force Team;
  - SK No. 98/HKO.01/DIR/X-2013 regarding Allowance for Director of Yayasan Kesehatan Pensiunan PT PELNI (Persero).
- c. Profession Benefit for Functional Position as stipulated in Board of Directors Decree Number 07.23/1/SK/HKO.01/2014 dated July 23, 2014.
- d. Adjustment allowance for all employees. This allowance has been paid since 2011 and is increasing by amount in 2012, 2013 and 2014.
- e. Throughout 2016, there was employee salary appraisal by 10% effective since August 1, 2016 as stipulated in Board of Directors Decree Number 07.26/1/SK/HKO.01/2016 regarding Basic Salary Appraisal for Employees with Organic Status at PT PELNI (Persero).

In addition, the Company also provided defined-benefit pension program for all organic employees of PT PELNI (Persero) to guarantee employee welfare when entering pension age. This program is implemented in cooperation with PELNI Pension Funds (DPP) and Financial Institution Pension Funds (DPLK). The DPP that is dedicated for organic employees who joined/was hired up to 2006, however, DPLK is provided for organic employees joining since 2007 onwards.

Detail explanation of remuneration expense and welfare package for 2016 period is as follows:

No.	Keterangan/Description	Anggaran 2016/Budget 2016	Realisasi 2016 Realization 2016
1.	Gaji Pegawai Pusat & Cabang/Head & Branch Employee Salary	Rp104,956,731,962.00	Rp94,356,366,731.00
2.	Gaji Pegawai Laut / ABK/Offshore/ABK Salary	Rp365,480,131,735.00	Rp211,894,005,073.00
3.	Biaya RS PELNI, BPJS Kesehatan, dan Pembelian Obat/Alat Kesehatan Untuk Poliklinik Kapal Allowance for RS PELNI, BPJS Kesehatan, and Drugs/Medical Device Purchase for Ship Polyclinic	Rp19,605,554,533.00	Rp12,575,876,173.00
4.	Biaya Premi Asuransi Pegawai (Jasindo & Jiwasraya) Employee Insurance Premium (Jasindo & Jiwasraya)	Rp6,599,700,929.00	Rp5,432,084,632.00



### Sistem Rewards and Punishment PELNI

Sebagai bagian dari sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan *Merit System* yang diterapkan oleh Perseroan, pengelolaan SDM juga dilengkapi oleh mekanisme *Reward and Punishment* di mana setiap pegawai yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan tingkat capaian dan, sebaliknya, bagi para pelaku pelanggaran yang terbukti dalam mekanisme yang sah, akan dijatuhi hukuman.

Pada tahun 2016, PELNI memberikan penghargaan dedikasi kerja 30 tahun, 25 tahun dan 16 tahun kepada para pegawai di seluruh entitas kantor pusat, kantor cabang dan unit usaha Perseroan lainnya serta menjatuhkan 42 sanksi disiplin, dengan rincian sebagai berikut:

### Penghargaan Pegawai PELNI 2016

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PELNI (Persero) mengenai penghargaan yang diberikan kepada pegawai, maka jumlah pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan masa kerja dan tertuang dalam SK No: 04.28/I/SK/HKO.01/2016 Tanggal 28 April 2016 tentang Pemberian Penghargaan Masa Kerja 30 tahun, 25 tahun, 16 tahun, dan 08 tahun adalah berikut ini:

### PELNI Reward and Punishment System

As part of performance-based HR management system and Merit System that are implemented in the Company, the HR management is also supported with Reward and Punishment mechanism where every outstanding employees will receive reward based on achievement, and who committed violation will be punished under legal mechanism.

In 2016, PELNI awarded working dedication award for 30 years, 25 years and 16 years working period for employees in all head office, branch office and other business units and administered 42 discipline sanctions with detail explanation as follows:

### PELNI Employee Reward 2016

According to Joint Working Agreement between PT PELNI (Persero) and PT PELNI (Persero) Workers Union on Employee Reward, total employees who received working period reward and stipulated in DEcree Number 04.28/I/SK/HKO.01/2016 dated April 28, 2016 regarding Reward for 30 years, 25 years, 16 years and 8 years working period are as follows:



NO	Penghargaan Reward	Pusat Head Office	Cabang Branch Office	ABK	Hotel Bahtera	Galangan	Jumlah Total
1.	30 TAHUN/YEARS	5	4	21	1	0	31
2.	25 TAHUN/YEARS	31	42	120	3	1	197
3.	16 TAHUN/YEARS	5	21	58	4	0	88
<b>TOTAL</b>							<b>316</b>

### Sanksi Disiplin Pegawai PELNI 2016

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PELNI (Persero) tentang pemberian sanksi disiplin untuk pegawai yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka berikut ini merupakan jumlah pemberian hukuman disiplin yang diberikan pegawai PT PELNI (Persero):

No	Jenis Hukuman Type of Punishment	Pegawai/Employee		Jumlah Total
		Darat Ground	Laut Offshore	
1.	Teguran Tertulis/ Written Caution	3	2	5
2.	Peringatan Tertulis/ Written Warning	1	4	4
3.	Peringatan Keras/ Hard Warning	0	13	8
4.	Peringatan Keras terakhir/ Final Hard Warning	0	1	1
5.	Skorsing/ Suspension	2	11	22
6	PHK/ Employee Termination	0	4	2
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>35</b>	<b>41</b>

### PELNI Employee Disciplion Sanction 2016

According to Joint Working Agreement between PT PELNI (Persero) and PT PELNI (Persero) Workers Union regarding discipline sanction administration for employees who violate regulation that is stipulated by the Company. Based on this provision, total discipline sanction for employees of PT PELNI (Persero) is as follows:



## Teknologi Informasi

### Information Technology

*"Seiring dengan komitmen untuk menghadirkan layanan pelayaran yang handal dan terpercaya, PT PELNI (Persero) terus mengembangkan penerapan Teknologi Informasi di seluruh kegiatan operasional dan pelayanan selama tahun 2016."*

*"Inline with commitment to provide reliable and trustworthy services, PT PELNI (Persero) continues developing Information Technology application in all operational and service aspects throughout 2016."*



## Implementasi Program-Program Kerja Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) Tahun 2016

Pada tahun 2016, Divisi Teknologi Informasi sebagai unit pengelola teknologi informasi di PT PELNI (Persero) telah menjalankan program-program kerja yang tertuang dalam RKAP 2016. Program-program kerja tersebut dilaksanakan berdasarkan kepada kebijakan-kebijakan teknologi informasi PELNI yaitu:

- a. Menyediakan infrastruktur dasar yang handal dan mampu memenuhi *service level agreement* (SLA);
- b. Menyediakan aplikasi/sistem informasi yang saling terintegrasi yang mencakup seluruh aspek bisnis perusahaan;
- c. Menyusun dan menjalankan tata kelola teknologi informasi sesuai *best practice* dan peraturan di Indonesia; dan
- d. Menyediakan kecukupan sumber daya manusia TI baik dari kuantitas maupun kualitas.

Pencapaian terhadap program-program kerja Divisi Teknologi Informasi per 31 Desember 2016 sesuai dengan target kinerja dalam RKAP terbagi dalam dua kelompok yaitu, program kerja rutin dan program kerja inisiatif. Pencapaian program-program kerja tersebut dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 1 Realisasi program kerja rutin teknologi informasi PELNI 2016**

## PT PELNI (Persero) Information Technology Working Program Implementation 2016

In 2016, as Information Technology Manager unit at PT PELNI (Persero), Information Technology Division has implemented working programs as stipulated in RKAP 2016. The working programs were carried out according to PELNI Information Technology policies, as follows:

- a. To provide reliable basic infrastructure with capability to fulfill Service Level Agreement (SLA);
- b. To provide integrated information application/system that covers entire business aspects of the Company;
- c. To prepare and perform information technology governance based on best practice and regulation in Indonesia;
- d. To provide sufficient IT personnel in terms of quantity and quality.

Achievement of Information Technology Division working programs as of December 31, 2016 according to performance target in the RKAP is classified into two groups, such as regular working program and initiative working program. Achievement of the working programs are explained in the table below:

**Table 1 Realization of PELNI Information Technology regular working program 2016**

No.	Program Kerja Rutin Regular Working Program	Pencapaian Achievement
1.	Layanan Jaringan PELNI NET PELNI NET Network Service	Program kerja berhasil dilaksanakan 100% Working Program is completed 100%
2.	Layanan Internet Internet Service	Program kerja berhasil dilaksanakan 100% Working Program is completed 100%
3.	Layanan Access Point Name (APN) PELNI PELNI Access Point Name (APN) Service	Program kerja berhasil dilaksanakan 100% Working Program is completed 100%
4.	Seat Management 1	Program kerja berhasil dilaksanakan 100% Working Program is completed 100%
5.	Seat Management 2 (tambahan untuk permintaan Kantor Pusat, Cabang, dan Kapal) Seat Management 2 (additional based on request from Head Office, Branch Office and Ships)	Program kerja berhasil dilaksanakan 100% pada Desember 2016 Working Program is completed 100% % as of December 2016



Tabel 2 Realisasi program kerja inisiatif teknologi informasi PELNI 2016

Table 2 Realization of PELNI Information Technology Initiative working program 2016

No.	Program Kerja Inisiatif Initiative Working Program	Pencapaian Achievement
1.	Pengembangan Aplikasi Oracle <i>E-Business Suite</i> Oracle E-Business Suite Application Development	Pada Desember 2016, telah memasuki tahapan UAT Entering UAT Phase in December 2016
2.	Pengembangan SIM SDM/HR <i>SIM Development</i>	Program ini untuk sementara ditunda karena ada prioritas <i>Oracle EBS Finance</i> The program is postponed temporarily due to priority on Oracle EBS Finance
3.	Peremajaan Perangkat <i>Server Supporting Applications</i> Server Supporting Application Device Update	Program kerja berhasil dilaksanakan 100% pada April 2016 Working Program is completed 100% in April 2016
4.	Peremajaan Perangkat Jaringan Network Update	Telah dilakukan beberapa pengadaan yang terkait dengan perangkat jaringan. Selain itu, pada Desember 2016, telah dilaksanakan pemasangan perangkat jaringan <i>Fiber Optic</i> di Kantor Pusat Procurement related with network device. In addition, in December 2016, Fiber Optic installation had been done at Head Office
5.	Pemeliharaan & Pengembangan Aplikasi Oracle Oracle Application Maintenance & Development	Program kerja berhasil dilaksanakan 100%. Working program is completed 100%.
6.	ATS Oracle	Program kerja ini berkaitan dengan pembelian lisensi Aplikasi <i>Oracle EBS Modul Financial</i> This working program is related with Oracle EBS Modul Financial Application License purchase
7.	<i>Disaster Recovery Center (Hosting)</i>	Program kerja ini ditunda mengingat kesiapan Co-Location Data Center PELNI pada akhir tahun 2016. This working program is postponed considering preparation of PELNI Co-Location Data Center by the end of 2016.
8.	Renovasi Ruang Server Server Room Renovation	Anggaran program kerja ini diganti menjadi program kerja Pengadaan Perangkat <i>Server-Server Utama/Primer dan Manage Service Co-Location Data Center</i> . This working program was replaced with Main/Primary Servicers Procurement and Manage Service Co-Location Data Center Working Programs.
9.	Pelatihan & Sertifikasi Teknologi Informasi Information Technology Training and Certification	Program kerja ini belum berhasil dilaksanakan dan ditunda pada tahun 2017 This working program has not yet implemented and postponed until 2017
10.	Perangkat <i>Dashboard Monitoring System</i> Dashboard Monitoring System Infrastructure	Program kerja ini berhasil dilaksanakan 100%. Working Program is completed 100%.
11.	Maintenance Cabang & Kapal Branch & Ship Maintenance	Program kerja ini berhasil dilaksanakan 100%. Working Program is completed 100%.
12.	Lisensi Microsoft Office untuk Kantor Pusat, Kapal, & Cabang Microsoft Office License for Head Office, Ship & Branch Office	Program kerja ini berhasil dilaksanakan 100%. Working Program is completed 100%.



No.	Program Kerja Inisiatif Initiative Working Program	Pencapaian Achievement
13.	Sistem Telekomunikasi di atas Kapal Onboard Telecommunication System	<p>Program kerja ini berhasil dilaksanakan pada 10 kapal (dari target 26 kapal). Perluasan program ini akan dilanjutkan kembali setelah Aplikasi Admin Kapal diimplementasikan.</p> <p>This working program was successfully implemented in 10 ships (from 26 ships targeted). Expansion of this program will be continued after implementation of Ship Administration Application.</p>
14.	Penyusunan Tata Kelola TI PELNI PELNI IT Governance Preparation	<p>Program kerja ini berhasil dilaksanakan 100%. Penyusunan SK Direksi atas pengesahan Tata Kelola dan Rencana Strategis TI PELNI dilakukan pada tahun 2017</p> <p>Working Program is completed 100%. Formulation of Board of Directors Decree on validation of PELNI IT Governance and Strategic Plan will be done in 2017</p>
15.	Pembangunan Aplikasi E-office E-office Application Development	<p>Pengembangan aplikasi E-Office sedang dilakukan. Pengadaan perangkat-perangkat pendukung akan dilakukan pada tahun 2017</p> <p>E-Office application development is on process. The supporting infrastructures procurement will be done in 2017</p>

Sesuai empat jenis kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan TI PELNI yang telah dideskripsikan sebelumnya, berikut ini penjelasan gambaran singkat pada masing-masing *domain* teknologi informasi yaitu, aplikasi/sistem informasi, infrastruktur & workstation, organisasi & sumber daya manusia, dan tata kelola TI yang telah dilakukan pada tahun 2016.

## 1. Infrastruktur & Workstation

### Infrastruktur Jaringan

Divisi TI mengelola infrastruktur teknologi informasi yang ada di Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kapal. Secara umum pada tahun 2016, terdapat beberapa perubahan signifikan pada infrastruktur jaringan milik PT PELNI (Persero) yaitu:

1. Penambahan *link* konektivitas jaringan antara *co-location* di *data center* milik Telkom di Sentul dengan Kantor Pusat PELNI;
2. Penambahan kapal-kapal yang mengimplementasikan jaringan VSAT Marine menjadi 10 kapal yaitu KM Tidar, KM Kelud, KM Gunung Dempo, KM Nggapulu, KM Sinabung, KM Dorolonda, KM Lambelu, KM Bukit Siguntang, KM Dobonsolo, dan KM Labobar; dan
3. Implementasi perangkat *fiber optic* (FO) di Kantor Pusat PELNI.

Divisi TI juga tetap mengelola dan menyediakan infrastruktur jaringan yang bersifat rutin tahunan yaitu, jaringan VPN/VSAT IP bagi cabang/pelabuhan, layanan VPN Anywhere/APN (*access point name*) bagi cabang/pelabuhan (untuk kebutuhan *backup* penjualan tiket *online* dan *departure control system*) dan jaringan internet bagi kantor pusat.

According to four policy types in PELNI IT development and management as previously described, brief explanation on each information technology domain such as information application/system, infrastructure & workstation, organization & human resources and IT Governance as done in 2016 are as follows:

## 1. Infrastructure & Workstation

### 1. Network Infrastructure

IT Division manages information technology infrastructure at Head Office, Branch Office and Ships. In general, throughout 2016, there were significant changes in network infrastructure of PT PELNI (Persero), as follows:

1. Changing network connectivity link between co-location at data center of Telkom at Sentul with PELNI Head Office;
2. Additional ships that implement VSAT Marine into 10 ships, among others, KM Tidar, KM Kelud, KM Gunung Dempo, KM Nggapulu, KM Sinabung, KM Dorolonda, KM Lambelu, KM Bukit Siguntang, KM Dobonsolo, and KM Labobar;
3. Implementation of fiber optic (FO) infrastructure at PELNI Head Office.

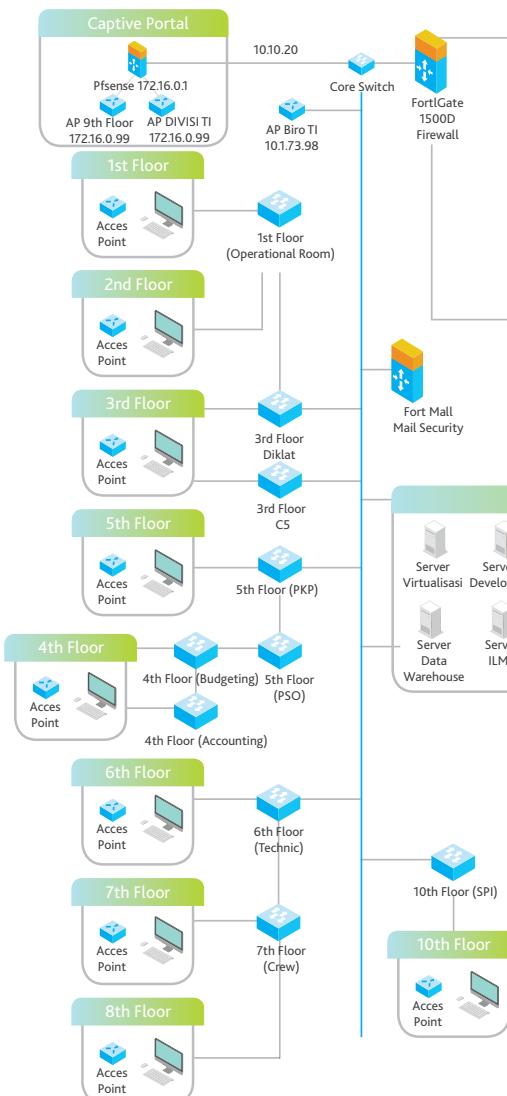
IT Division also manages and provides annual network infrastructure such as VPN/VSAT IP for branch/port, VPN Anywhere/APN (*access point name*) services for branch/port (for online ticket sales and departure control system back up) as well as internet network for head office.



## Laporan Tahunan 2016 Annual Report

PT PELNI (Persero)

Berikut ini topologi secara umum infrastruktur jaringan PT PELNI (Persero):



Gambar 1 Topologi Infrastruktur Jaringan PT PELNI (Persero)

### Infrastruktur Data Center

Dari sisi infrastruktur *data center*, PT PELNI (Persero) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia menyediakan *co-location* bagi server-server dan perangkat pendukung aplikasi-aplikasi utama PELNI di *data center* milik Telkom Sigma (anak perusahaan PT Telkom Indonesia) yang berlokasi di Sentul. Penyediaan *co-location* ini guna menjamin keamanan, kelayakan, dan ketesediaan sumber daya bagi server-server yang dimiliki PELNI.

### Workstation

Semenjak tahun 2015, PELNI telah menerapkan penyediaan perangkat *workstation* (perangkat kerja) bagi para pegawai

General topology of network infrastructure at PT PELNI (Persero) is as follows:

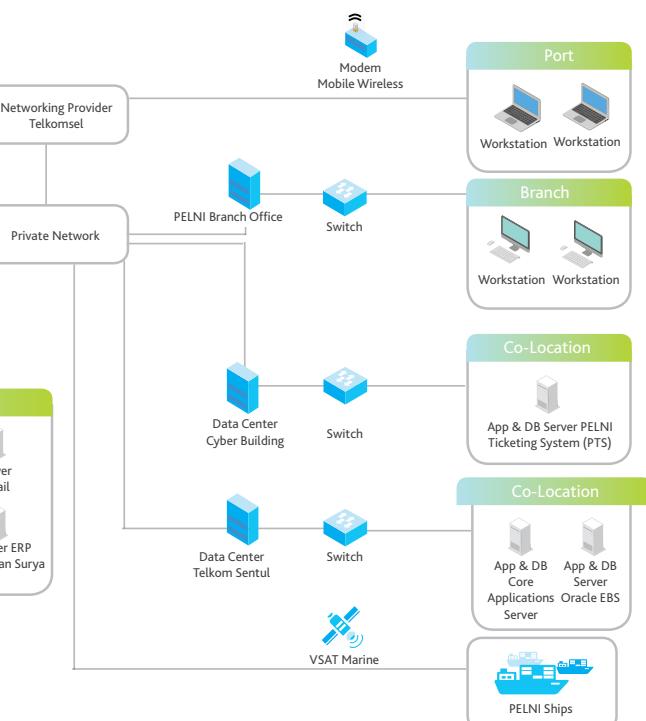


Illustration 1 PT PELNI (Persero) Network Infrastructure topology

### Data Center Infrastructure

In terms of data center infrastructure, PT PELNI (Persero) cooperates with PT Telkom Indonesia and provides co-location for servers and PELNI main applications supporting infrastructures at data center of Telkom Sigma (subsidiary of PT Telkom Indonesia) that is located at Sentul. This co-location provision aims to guarantee security, feasibility and resources availability for servers that are PELNI.

### Workstation

Since 2015, PELNI has implemented workstation infrastructure (working infrastructure) for PELNI employees with rental (seat



PELNI dengan metode sewa (*seat management*). Metode *seat management* memudahkan PELNI dalam pengelolaan perangkat-perangkat *workstation* tersebut. Hal tersebut dikarenakan vendor pelaksana pekerjaan harus memberikan layanan kepada PELNI berupa penyediaan, pemeliharaan, dan pengantian perangkat. Layanan tersebut diukur dan dijamin dalam bentuk *service level agreement (SLA)* yang disepakati baik PELNI maupun vendor dalam suatu kontrak. Pada tahun 2016, terdapat empat pekerjaan pengadaan perangkat *workstation* dengan metode *seat management* yaitu:

Tabel 3 Pekerjaan Pengadaan Perangkat *Workstation* dengan Metode *Seat Management*

No.	Nama Pekerjaan Project Name	Vendor Vendor	Keterangan Description
1.	Pengadaan Layanan <i>Seat Management</i> PT PELNI (Persero) PT PELNI (Persero) Seat Management Service Procurement	PT Astra Grahia Information Technology	<i>Seat management</i> pertama yang dilaksanakan di PELNI untuk kebutuhan Kantor Pusat, Cabang, dan Kapal Penumpang. The first seat management pertama done at PELNI for requirement at Head Office, Branch Office and Passenger Ships.
2.	Pengadaan Perangkat <i>Hardware</i> untuk Kebutuhan DCS dengan Layanan <i>Seat Management</i> Hardware Device Procurement for DCS Requirement with <i>Seat Management</i> Service	PT Astra Grahia Information Technology	<i>Seat management</i> untuk kebutuhan DCS di pelabuhan-pelabuhan yang membutuhkan. Seat management for DCS requirement at ports in need
3.	Pengadaan Perangkat <i>Hardware</i> untuk Kebutuhan Admin Kapal, Kantor Pusat, dan Cabang PT PELNI (Persero) dengan Menggunakan Skema <i>Seat Management</i> Hardware devices procurement for Ship Administration, Head Office and Branch Office of PT PELNI (Persero) using <i>Seat Management</i> Scheme	PT Access Micro System	<i>Seat management</i> yang ditujukan untuk memenuhi tambahan kebutuhan dari Kantor Pusat dan Cabang, serta untuk mendukung implementasi Admin Kapal. Seat management that is dedicated to fulfill additional requirement in Head Office and Branch Office as well as to support implementation of Ship Administration
4.	Pekerjaan Pengadaan Layanan <i>Seat Management</i> Kapal Perintis PT PELNI (Persero) PT PELNI (Persero)Pioneer Ship <i>Seat Management</i> Service Procurement	PT Telkom Indonesia	<i>Seat management</i> yang ditujukan untuk kebutuhan perangkat <i>workstation</i> (PC, printer, UPS) sebanyak 46 unit di kapal-kapal perintis PELNI. Seat management yang ditujukan untuk kebutuhan perangkat <i>workstation</i> (PC, printer, UPS) sebanyak 46 unit di kapal-kapal perintis PELNI

## 2. Aplikasi

Pembangunan dan pengembangan aplikasi-aplikasi yang ada di PT PELNI (Persero) didasarkan kepada kebutuhan fungsi-fungsi bisnis milik perusahaan. Berikut ini pemaparan aplikasi-aplikasi PELNI berdasarkan fungsi-fungsi bisnis perusahaan:

management) method. The seat management method eased PELNI in managing the workstation infrastructure. This is due to the project vendor shall deliver service to PELNI as procurement, maintenance and replacement of the devices. The services are evaluated and guaranteed under Service Level Agreement (SLA) that is agreed both by PELNI and the vendor in a contract. In 2016, there was four workstation devices procurement project with seat management method, as follows:

Table 3 Workstation Device Procurement Project with Seat Management Method

*Seat management* yang ditujukan untuk kebutuhan perangkat *workstation* (PC, printer, UPS) sebanyak 46 unit di kapal-kapal perintis PELNI. Seat management yang ditujukan untuk kebutuhan perangkat *workstation* (PC, printer, UPS) sebanyak 46 unit di kapal-kapal perintis PELNI

## 2. Application

Development and upgrade of existing application at PT PELNI (Persero) based on requirements of business functions of the Company. PELNI application mapping based on business functions in the Company is as follows:



Gambar 2 Peta Aplikasi Berdasarkan Fungsi Bisnis PT PELNI (Persero)

Illustration 2 Application Mapping Based on Business Function at PT PELNI (Persero)



Berdasarkan hasil formulasi arsitektur sistem informasi/aplikasi pada dokumen Tata Kelola dan Rencana Strategis TI PELNI periode 2017-2021, rencana arsitektur aplikasi PELNI ke depan digambarkan sebagai berikut:

Based on information/application system architecture formulation result in PELNI IT document Governance and Strategic Plan for 2017 – 2021 period, PELNI application architecture plan in the future is illustrated below:



Gambar 3 Arsitektur Aplikasi PELNI 2017-2021

Arsitektur aplikasi Teknologi Informasi dibagi menjadi enam (6) kelompok fungsi yaitu Pengendalian, Eksekutif, Hubungan Supplier & Teknik, Operasi, Hubungan Customer, dan Manajemen Sumber Daya. Berdasarkan kebutuhan pengembangan, maka terdapat 9 inisiatif aplikasi yang perlu penyediaan/pengadaan baru, 15 inisiatif aplikasi yang perlu perubahan/peremajaan/upgrade, dan satu (1) inisiatif aplikasi yang perlu terminasi/deaktivasi.

Pada tahun 2016, beberapa pencapaian penting dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi baik yang dikembangkan secara internal maupun eksternal adalah sebagai berikut:

Illustration 3 PELNI Application Architecture 2017 - 2021

Information Technology application architecture is divided into 6 (six) functional groups, such as Controlling, Executive, Supplier & Technical Relation, Operations, Customer Relation and Human Resources Management. Based on development requirement, there are 9 application initiatives that need new procurement/supply, 15 application initiatives that need modification/renewal/upgrade and one (1) application initiative that needs to be terminated/deactivated.

In 2016, key achievements in information technology application development and upgrade both internally and externally are as follows:



### Portal Aplikasi PELNI

Salah satu perkembangan signifikan pada teknologi informasi PELNI adalah implementasi dari Portal Aplikasi PELNI yang beralamat di <http://portal.pelni.co.id>. Portal Aplikasi PELNI merupakan pintu masuk untuk mengakses semua aplikasi-aplikasi yang dikembangkan secara internal oleh Divisi TI. Portal Aplikasi PELNI dapat diakses baik dari jaringan internal PELNI maupun dari eksternal (internet).

### PELNI Application Portal

One of significant development on PELNI information technology is implementation of PELNI Application Portal with address at <http://portal.pelni.co.id>. PELNI application portal is entrance to access all applications developed internally by IT Division. PELNI Application Portal is accessible both from PELNI internal and external networks (internet).



Gambar 4 Tampilan Pilihan Aplikasi pada Portal PELNI

### Aplikasi New PELNI Ticketing System (New PTS)

Pada tahun 2016 PT PELNI (Persero) telah mengimplementasikan aplikasi New PTS (PELNI Ticketing System) di semua kapal-kapal penumpang PELNI. Aplikasi ini merupakan modernisasi dari aplikasi *Ticketing Oracle* yang telah digunakan sejak tahun 2010 hingga 2015. Pelaksanaan pekerjaan pengembangan Aplikasi New PTS merupakan kerjasama antara PT PELNI dengan PT Peruri Digital Security (PDS) sesuai kontrak No.TH.3.2-01/SS/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang di-addendum per tanggal 27 September 2016. Aplikasi New PTS dibangun sesuai dengan bisnis proses yang ingin dituju yang diturunkan dalam suatu dokumen BRS (*Bussiness Requirement and Specification*). Alur proses bisnis pemasaran dan penjualan pada aplikasi New PTS digambarkan sebagai berikut:

Illustration 4 Layout of Application Options at PELNI Portal

### New PELNI Ticketing System (New PTS) Application

In 2016, PT PELNI (Persero) has implemented new PTS (PELNI Ticketing System) in all PELNI passenger ships. This application is modernization of Oracle Ticketing application that has been implemented since 2010 until 2015. Implementation of New PTS Application Development is cooperation between PT PELNI with PT Peruri Digital Security (PDS) based on Contract Number TH.3.2-01/SS/2015 dated January 30, 2015 with addendum dated September 27, 2016. New PTS application is developed based on expected business process that is descended into a BRS (Business Requirement and Specification) document. Marketing and sales business process scheme at New PTS application is illustrated below:



Gambar 5 Alur Proses Bisnis Pemasaran dan Penjualan pada Aplikasi New PTS

#### Aplikasi Employee Self Service (ESS)

Pengembangan Aplikasi ESS ditujukan bagi seluruh pegawai PELNI untuk mengelola biodata, mengetahui data kesehatan, *curriculum vitae*, absensi, gaji, koperasi, *leaving notice*, dan KPI. Selain itu, terdapat menu untuk melakukan *input* tiket permintaan penanganan insiden & layanan TI. Melalui aplikasi ini, pegawai dapat proaktif dan bertanggung jawab untuk meng-update biodata dan mengetahui segala yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Data dan informasi yang diperoleh melalui aplikasi *Employee Self Service* kemudian akan digunakan untuk mendukung kinerja Direktorat SDM & Umum. Berikut ini contoh tampilan aplikasi *Employee Self Service*:

Illustration 5 New PTS Application Marketing and Sales Business Process Scheme

#### Employee Self Service (ESS) Application

ESS Application Development is dedicated for all PELNI employees to manage profile, acknowledge health data, curriculum vitae, presence, salary, cooperatives, leaving notice and KPI. In addition, there is also menu for IT incident & service handling inquiry ticket. Through this application, the employees will be able to be proactive and responsible in updating their profile and acknowledge every aspects related with their rights and obligations. Data and information that are acquired via Employee Self Service application will be used to support performance of HR & General Affairs Directorate. Sampling of Employee Self Service application layout is as follows:

Gambar 6 Tampilan Aplikasi *Employee Self Services*

#### **Website dan Email**

Website resmi PT PELNI (Persero) dikelola sendiri oleh Divisi Teknologi Informasi baik dari sisi pengembangan maupun pemeliharaan. Website PELNI beralamat di [www.pelni.co.id](http://www.pelni.co.id) telah beroperasi sejak bulan September 2010. Untuk manajemen konten, pada admin website disediakan halaman administrator. Para admin konten ditunjuk sesuai SK Direksi No.04.16/2/SK/HKO.01/2015 perihal Tim Pengoperasian dan Pengembangan Website PT PELNI (Persero) tanggal 16 April 2015 yaitu berada pada *Corporate Secretary* dan Divisi Pemasaran Kapal Penumpang, sedangkan Divisi TI bertanggung jawab pada sisi pengembangan dan operasional serta *support*.

Sesuai dengan implementasi aplikasi NPTS di semua kapal penumpang, maka pada 22 November 2016, website PELNI telah sepenuhnya menggunakan web service dari *application programming interface (API)* milik aplikasi NPTS untuk menu pencarian jadwal kapal dan reservasi/*booking* tiket.

Sejak tahun 2012, Divisi TI telah mengelola sendiri aplikasi *email* yang digunakan oleh seluruh jajaran Komisaris, Direksi, dan pegawai PELNI. Aplikasi *email* PELNI mulai digunakan secara luas pada tahun 2014 dan meningkat pesat pada tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan adanya implementasi *mailing-list* dan transaksi reservasi *online* untuk semua kapal penumpang PELNI.

Illustration 6 Employee Self Service Application Layout

#### **Website and Email**

Official website of PT PELNI (Persero) is managed autonomously by Information Technology Division in terms of its development and maintenance. Website of PELNI is addressed at [www.pelni.co.id](http://www.pelni.co.id) and has been operated since September 2010. In terms of content management, the website admin is provided at administrator page. The contents administrators are appointed referring to Board of Directors Decree Number 04.16/2/SK/HKO.01/2015 regarding PT PELNI (Persero) Website Operations and Development Team dated April 16, 2015 that is under Corporate Secretary and Passenger Ship Marketing Division, however, the IT Division is responsible on development and operations as well as support aspects.

According to NPTS application implementation in all passenger ships, on November 22, 2016, website of PELNI has fully deployed web service from application programming interface (*API*) of NPTS application for ship schedule and ticket booking/reservation menu.

Since 2012, IT Division has managed email application autonomously that is used by all management, commissioner, director and employee of PELNI. PELNI email application has been broadly used since 2014 and rapidly grew in 2015. This was due to implementation of mailing-list and online reservation transaction for all PELNI passenger ships.



#### Aplikasi Oracle e-Business Suite Modul Finance

Pada tahun 2016, sesuai arahan Direksi, PT PELNI (Persero) berinisiatif untuk melaksanakan pengembangan aplikasi keuangan dengan mengikuti proses-proses bisnis yang teruji (*best practice*) di banyak perusahaan sukses di dunia. Oleh karena itu, PELNI memilih *Oracle E-Business Suite (EBS)* modul *finance management* sebagai aplikasi yang akan diimplementasikan. Sebelum implementasi dilaksanakan, diperlukan upaya-upaya untuk memastikan proses perencanaan yang matang sebelum implementasi dilakukan. Oleh karena itu, pada Mei hingga Juli 2016, PT PELNI (Persero) telah menyusun perencanaan implementasi aplikasi. Proses pembangunan dan pengembangan aplikasi tersebut dimulai pada September 2016 dan diharapkan dapat mulai diimplementasikan pada Maret 2017.

#### Aplikasi Human Resources Management (HRM)

Aplikasi HRM dibangun ditujukan bagi Divisi SDM untuk mengelola data-data kepegawaian PT PELNI (Persero). Aplikasi HRM terintegrasi dengan aplikasi ESS, hal ini memungkinkan Divisi SDM dapat mengelola dan menyetujui data-data yang sudah dimasukkan oleh para pegawai di aplikasi ESS. Berikut ini tampilan aplikasi HRM:

The screenshot shows a web-based application interface for managing employee certificates. The main title is "Sertifikat Pegawai". Below the title, there is a search bar with placeholder text "Cari sertifikat pegawai..." and a "Cari" button. The main content area displays a table with the following columns: No., Nama, Tanggal Berlaku, Tgl Pengesahan, Tgl Revisi, Status Sertifikat, and Action. There are eight rows of data, each representing an employee's certificate information. The "Action" column contains small blue icons, likely for editing or deleting records.

No.	Nama	Tanggal Berlaku	Tgl Pengesahan	Tgl Revisi	Status Sertifikat	Action
1	John Doe	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
2	Jane Smith	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
3	Michael Johnson	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
4	Sarah Williams	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
5	David Brown	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
6	Emily Davis	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
7	Robert Green	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
8	Sarah Williams	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	

Gambar 7 Tampilan Aplikasi Human Resource Management (HRM)

#### Oracle e-Business Suite Finance Module

In 2016, according to recommendation from the Board of Directors, PT PELNI (Persero) has an initiative to develop financial application by adapting business process best practice worldwide. Therefore, PELNI chose Oracle E-Business Suite (EBS) finance management module as an application to be implemented. Before the implementation phase, efforts to ensure mature pre-implementation planning process had been conducted. Therefore, from May until July 2016, PT PELNI (Persero) has formulated application implementation planning. The application development and upgrade process was started in September 2016 and expected to be implemented in March 2017.

#### Human Resources Management (HRM) Application

HRM Application is established and dedicated for HR Division to manage employment data at PT PELNI (Persero). The HRM application is integrated with ESS application that enables HR Division to manage and approve the data that have been input by employees at ESS application. Layout of HRM application is as follows:

The screenshot shows a web-based application interface for managing employee certificates. The main title is "Sertifikat Pegawai". Below the title, there is a search bar with placeholder text "Cari sertifikat pegawai..." and a "Cari" button. The main content area displays a table with the following columns: No., Nama, Tanggal Berlaku, Tgl Pengesahan, Tgl Revisi, Status Sertifikat, and Action. There are eight rows of data, each representing an employee's certificate information. The "Action" column contains small blue icons, likely for editing or deleting records.

No.	Nama	Tanggal Berlaku	Tgl Pengesahan	Tgl Revisi	Status Sertifikat	Action
1	John Doe	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
2	Jane Smith	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
3	Michael Johnson	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
4	Sarah Williams	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
5	David Brown	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
6	Emily Davis	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
7	Robert Green	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	
8	Sarah Williams	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	Belum Dikonfirmasi	

Illustration 7 Human Resource Management (HRM) Application Layout



### Aplikasi Asset Management

Aplikasi *Asset Management* dibangun ditujukan bagi Divisi Pengelolaan Aset untuk mengelola data-data aset PT PELNI (Persero) dan pemanfaatannya seperti penyewaan, kontrak-kontrak, dan kondisi aset.

### Aplikasi Helpdesk IT Ticketing System

Aplikasi *Helpdesk IT Ticketing System* dibangun ditujukan bagi Divisi TI untuk mengelola permintaan penanganan layanan dan insiden TI PT PELNI (Persero).

### Aplikasi Operation Monitoring

Aplikasi *Operation Monitoring* dibangun secara umum ditujukan bagi Divisi *Ship Monitoring* untuk memantau kondisi operasional kapal-kapal PT PELNI (Persero) (*Report Kapal, Ship Tracking*). Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi *Noon Position* yang ada di kapal-kapal tersebut. Selain itu, terdapat modul *Report Cabang* (*Noon Position Cabang*) untuk cabang-cabang, biaya kepelabuhanan, dan *monitoring* penumpang. Sedangkan NMS (*Network Monitoring System*) digunakan oleh Divisi TI untuk memantau kondisi server dan jaringan PELNI.

### Aplikasi SPSE

Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung program *e-procurement* atau LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di PT PELNI (Persero). Aplikasi SPSE merupakan kerjasama antara PELNI dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang dapat mengelola pengadaan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Aplikasi SPSE telah digunakan PT PELNI (Persero) mulai tahun 2010. User utama dari aplikasi ini ada Divisi Pengadaan. Lisensi aplikasi SPSE tidak berbayar, sedangkan untuk perangkat keras server, PT PELNI (Persero) menyediakan sendiri.

### Aplikasi E-Rekrutmen

Aplikasi *E-Rekrutmen* adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu memudahkan proses rekrutmen pegawai. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh Divisi TI. Aplikasi ini mulai *live* sejak Februari 2015 dan dapat diakses publik melalui alamat <http://rekrutmen.pelni.co.id>. Aplikasi E-Rekrutmen menyediakan fitur-fitur sebagai berikut:

- Registrasi dan manajemen biodata *Applicant* (pelamar)
- Manajemen Vacancy (Manajemen Lowongan kerja)
- *Reporting*
- *Announcement*

### Asset Management Application

Asset Management application is developed and dedicated for Asset Management Division to manage PT PELNI (Persero) assets data and utilization such as rental, contracts and assets condition.

### IT Ticketing System Helpdesk Application

IT Ticketing System Helpdesk Application is developed and dedicated for IT Division to manage IT service and incident handling inquiry at PT PELNI (Persero).

### Operation Monitoring Application

Operating Monitoring Application is developed and dedicated generally for Ship Monitoring Division to monitor condition of PT PELNI (Persero) ships operations (Ship Report, Ship Tracking). This application is integrated with Noon Position application in the ships. In addition, there is also Branch Report module (Branch Noon Position) for branch offices, ports fees and passenger monitoring. However, the NMS (Network Monitoring System) is used by IT Division to monitor condition of PELNI's server and network.

### SPSE Application

SPSE (Electronic Procurement System) application is an application that is used to support e-procurement or LPSE (Electronic Procurement Service) programs at PT PELNI (Persero). The SPSE Application is cooperation between PT PELNI (Persero) with State Procurement Policy Agency (LKPP). This application provides features to manage the procurement transparently and accountable.

The SPSE application has been applied at PT PELNI (Persero) since 2010. The primary users of this application is Procurement Division. SPSE application license is free, meanwhile, for server hardware is provided autonomously by PT PELNI (Persero).

### E-Recruitment Application

E-Recruitment Application is an application that is applied to help simplifying employee recruitment process. This applicaiton is developed and upgraded by IT Division. This application has been go live since 2015 and accessible for public at <http://rekrutmen.pelni.co.id>. The E-Recruitment application provides features, as follows:

- Applicant registration and profile management.
- Vacancy Management (Job Vacancy Management).
- Reporting.
- Announcement.



Pada tahun 2016, aplikasi ini telah digunakan oleh Divisi SDM untuk melakukan berbagai rekrutmen untuk kebutuhan tenaga ABK seperti Dokter, Perawat, dan Jenang di atas Kapal.

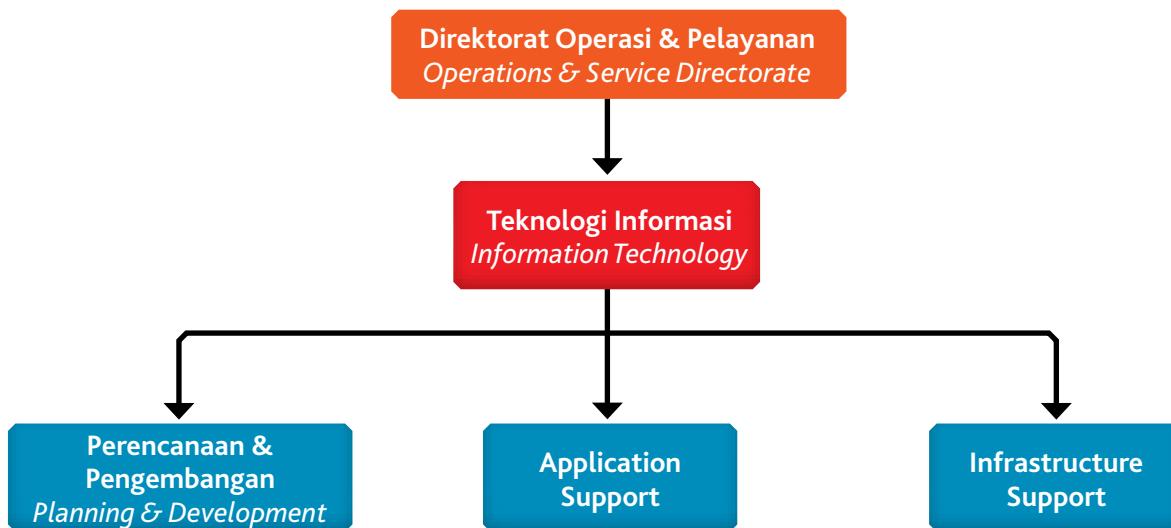
### 3. Organisasi & Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2016, secara korporat, organisasi Divisi TI berada di bawah naungan Direktorat Operasi & Pelayanan. Divisi TI dikepalai oleh seorang *senior manager* terbagi dalam 3 bidang/ bagian yang masing-masing dikepalai oleh seorang *manager*. Ada pun ketiga bidang tersebut yaitu, Bidang Perencanaan & Pengembangan, Bidang *Application Support*, dan Bidang *Infrastructure Support*. Berikut ini struktur organisasi Divisi TI PT PELNI (Persero):

In 2016, this application has been used by HR Division to perform recruitment process for ABK crew requirement such as onboard Doctor, Nurse and Steward.

### 3. Organization & Human Resources

In 2016, by corporate, IT Division organization is under the Operation & Service Directorate. The IT Division is supervised by a senior manager that is classified into 3 units that each supervised by a manager. The three units are Planning & Development Unit, Application Support unit and Infrastructure Development Unit. PT PELNI (Persero) IT Division Organization Structure is as follows:



Gambar 8 Struktur Organisasi Divisi TI PELNI Tahun 2016

Per Desember 2016, jumlah pegawai di Divisi TI adalah 28 orang dengan sebagian besar berlatar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi. Dari 28 orang tersebut terdapat 1 pejabat *senior manager*, 3 pegawai pejabat setingkat *manager*, 2 orang tenaga profesional, 1 orang supervisor, dan 21 pegawai setingkat staf/*officer*.

### 4. Tata Kelola Teknologi Informasi

Sejak tahun 2014, PT PELNI (Persero) telah memiliki dokumentasi tata kelola dan rencana strategis teknologi informasi yang tercantum dalam SK Direksi No.30/HKO.01/DIR/III/2014. Sesuai SK Direksi tahun 2014 dan Permen BUMN No.2/MBU/2013 tersebut, Tata Kelola TI PT PELNI (Persero) terdiri dari 2 jenis

Illustration 8 PELNI IT Division Organization Structure 2016

As per 2016, total employees at IT Division is 28 personnel who mostly hold education background in information technology. From 28 personnel, there is 1 senior manager officers, 3 officers at manager level, 2 professional staffs, 1 supervisor and 21 staffs or officers.

### 4. Information Technology Governance

Since 2014, PT PELNI (Persero) has information technology governance and strategic plan as stipulated under Board of Directors Decree Number 30/HKO.01/DIR/III/2014. According to Board of Directors Decree in 2014 and Minister of SOE Regulation Number 2/MBU/2013, PT PELNI (Persero)



yaitu, kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Masing-masing jenis kebijakan terdiri dari beberapa kategori yaitu:

IT Governance consists of 2 types, such as strategic policy and operational policy. Each of the policy comprises of categories, as follows:

## Strategis/Strategic

Penetapan Peran TI/IT Role Set-Up

Perencanaan TI/IT Planning

Proses dan Organisasi TI/IT Process and Organization

Pengelolaan Sumber Daya TI/IT Resource Management

Pengelolaan Investasi TI/IT Investment Management

Pengelolaan Risiko TI/IT Risk Management

## Operasional/Operational

Pengelolaan Layanan TI/IT Service Management

Pengelolaan Sekuriti/Security Management

Pengelolaan Layanan Pihak ketiga/Third Party Service Management

Monitor dan Evaluasi Kinerja TI/IT Performance Monitor and Evaluation

Monitor dan Evaluasi Pengendalian Internal TI/  
IT Internal Control Monitor and Evaluation

Pengelolaan Kepatuhan Regulasi Eksternal/  
External Regulation Compliance Management

Gambar 9 Kebijakan-kebijakan dalam tata kelola TI PELNI

Penyusunan tata kelola dan rencana strategis TI tersebut merupakan kewajiban setiap BUMN dalam periode 3 hingga 5 tahun sekali yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No.Per-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi BUMN.

Pada tahun 2016, Divisi TI berinisiatif melakukan perbaruan tata kelola dan rencana strategis TI. Hal ini diperlukan karena kebutuhan bisnis PT PELNI (Persero) yang dinamis ditandai dengan penambahan beberapa lini bisnis yaitu, Kapal Tol Laut, Kapal Perintis, dan Kapal Ternak. Selain itu, perkembangan dunia TI yang sangat pesat serta kemajuan kompetitor dalam bidang TI mengharuskan PT PELNI (Persero) untuk mengubah strategi, visi, dan misi TI perusahaan dalam 3 sampai 5 tahun ke depan.

Pada kuartal IV tahun 2016, PT PELNI (Persero) bekerja sama dengan PT Equine Global untuk menyusun dokumen tata kelola dan rencana strategis TI periode 2017-2021. Per 31 Desember 2016, penyusunan dokumen telah mencapai tahap *draft* dokumen yang akan dipaparkan dan didiskusikan dalam *workshop* final yang melibatkan pimpinan unit kerja bisnis Januari 2017. Selanjutnya, *draft* dokumen tersebut akan disahkan oleh Direksi dan dibuatkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi.

Illustration 9 Policies in PELNI IT Governance

Formulation of IT governance and strategic plan is obligation for every SOE within every 3 to 5 years period referring to Minister of SOE Regulation Number PER-2/MBU/2013 regarding Technology Management Preparation Guideline in SOE.

In 2016, the IT Division had an initiative to revise IT governance and strategic plan. This is important due to dynamic business need of PT PELNI (Persero) as indicated by additional business lines such as Tol Laut Ship, Pioneer Ship and Cattle Ship. In addition, rapidly growing IT sector as well as competitor progress in IT sector require PT PELNI (Persero) to revise corporate IT strategy, vision and mission for the next 3 until 5 years.

In the 4<sup>th</sup> quarter of 2016, PT PELNI (Persero) cooperated with PT Equine Global to formulate IT governance document and strategic plan for 2017 – 2021 period. As of December 31, 2016, the document preparation was under document drafting stage that will be presented and discussed in final workshop involving head of working/business units in January 2017. Next, the document draft will be validated by the Board of Directors and ratified as Board of Directors Decree.



## Rencana Pengembangan Teknologi Informasi di Tahun 2017

Beberapa hal yang akan menjadi fokus untuk perbaikan layanan Divisi Teknologi Informasi pada tahun 2017, antara lain:

1. Pengembangan *disaster recovery plan* (DRP) dan *disaster recovery center* (DRC).
2. Perbaikan kondisi ruang server di Kantor Pusat melalui pembenahan dari sisi fasilitas-fasilitas standar sebagai ruang server;
3. Peningkatan koneksi kapal dengan meningkatkan implementasi VSAT Marine di kapal-kapal lainnya selain 10 kapal penumpang yang telah memiliki koneksi pada tahun 2016;
4. Perbaikan kualitas jaringan di pelabuhan-pelabuhan yang masih memiliki kendala koneksi;
5. Integrasi antar aplikasi-aplikasi yang sudah diimplementasikan untuk memperkuat proses-proses bisnis yang ada di PT PELNI (Persero);
6. Pengembangan aplikasi pada proses-proses bisnis inti (*core businesses*) PT PELNI (Persero) meliputi, manajemen pengadaan, manajemen pengelolaan angkutan muatan ol laut & ternak, manajemen pemasaran & penjualan tiket penumpang kapal perintis, manajemen pemeliharaan kapal, pengelolaan arsip dokumen dan *workflow*, pengelolaan kinerja dan proses terkait lainnya.

## Information Technology Development Plan in 2017

Aspects that will become focus of Information Technology Division service improvement in 2017 are among others:

1. Disaster Recovery Plan (DRP) and Disaster Recovery Center (DRC) development.
2. Improvement of server room condition at Head Office by renovating standard facilities as the server room;
3. Increase ship connectivity by upgrading VSAT Marine implementation in other ships besides 10 passenger ships with connectivity facility in 2016;
4. Improve network quality at ports with connectivity issues;
5. Integration of currently implemented applications to strengthen existing business process at PT PELNI (Persero);
6. Application development in core business processes of PT PELNI (Persero) including procurement management, Toll Laut and Cattle Ship cargo management, pioneer ship passenger ticket sales and marketing management, archive document and workflow management, performance management and other related process.



## Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

### Procurement Governance

Transformasi bisnis proses dan operasional yang dilaksanakan oleh PT PELNI (Persero) selama tahun 2016 juga didukung oleh penguatan dan perbaikan prosedur pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap tahap proses pengadaan barang dan jasa, PT PELNI (Persero) menerapkan etika dan prinsip-prinsip pengadaan (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel) yang telah terkandung dalam kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Perseroan. Di sisi lain, PT PELNI (Persero) juga mengedepankan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh perusahaan berpengalaman memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa.

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa merujuk pada *Standard Operational Procedure* Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PELNI (Persero) yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 29A/HKO.01/DIR/II-2012 dengan perubahan terakhir terkait dengan kewenangan Direksi dalam proses pengadaan barang dan jasa atau penggunaan anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 11.07/3/SK/HKO.01/2017 telah memiliki jiwa yang sama dengan Peraturan Menteri BUMN terkait Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor Per-5/MBU/2008 dan Nomor Per-15/MBU/2012.

Business process and operational transformation that was done by PT PELNI (Persero) throughout 2016 was also supported by strengthening and improving the procurement procedure. This aims to ensure the procurement process has complied with Good Corporate Governance principles as well as other prevailing Law and regulation. In every procurement process, PT PELNI (Persero) adapts procurements ethics and principles (efficient, effective, transparent, competitive, fair and accountable) as contained in the Company procurement policy. On the other hand, PT PELNI (Persero) also prioritizes the Product and Service supplier with experience and best service quality offering, competitive price, after-sales guarantee as well as project execution by well-experienced and expert company in accordance with the product and service requirement.

The procurement process implementation refers to prevailing Procurement Standard Operational Procedure at PT PELNI (Persero) that is stipulated under Board of Directors Decree Number 29A/HKO.01/DIR/II.2012 with the latest amendment related with the Board of Directors' authority in procurement process according to Board of Directors Decree Number 10.07/1/SK/HKO.01/2015 with similar consent with Minister of SOE Regulation on Procurement under Regulation Number PER-5/MBU/2008 and Number PER-15/MBU/2012.

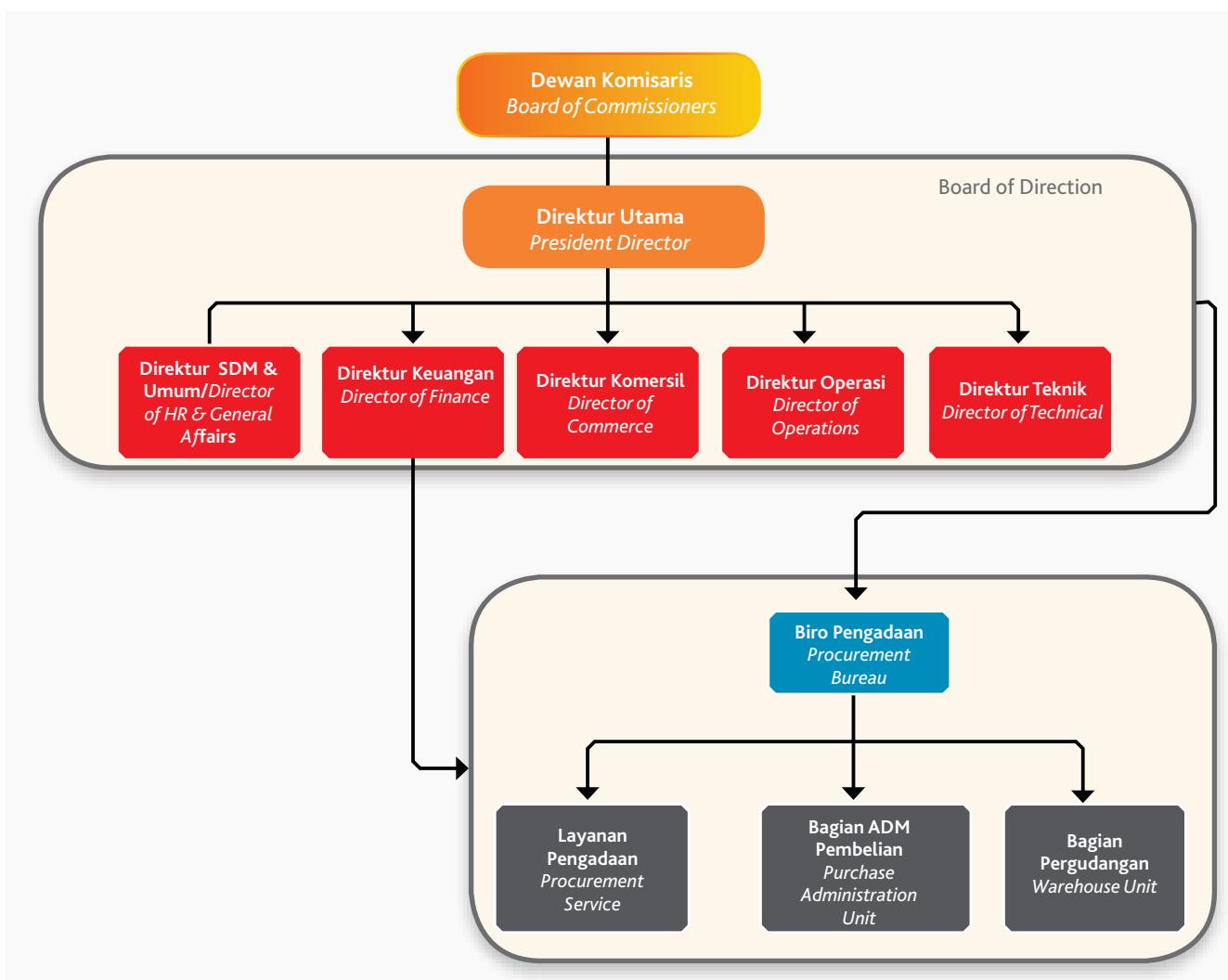


Struktur Organisasi Biro Pengadaan PT PELNI (Persero) digambarkan sebagai berikut:

### Struktur Organisasi Divisi Pengadaan

PT PELNI (Persero) Procurement Bureau Organization Structure is illustrated below:

### Organization Structure Procurement Division



Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Perseroan berusaha mengoptimalkan sinergi BUMN sebagai upaya untuk pemberdayaan BUMN dengan prinsip saling menguntungkan. Pemilihan Penyedia telah dilakukan secara terbuka bagi pihak yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Seluruh proses pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan, Perseroan juga telah memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleksitas dan bernilai tinggi, PT PELNI (Persero)

In the implementation of product and service procurement, the Company strives to optimize SOE Synergy as an effort to empower SOE with mutual beneficiary principle. The vendor selection has been done transparently for parties who meet the requirements and implemented under fair competition. The entire procurement process was implemented according to clear and transparent procedures. The Company also has Owner Estimation (OW) price that is calculated based on expertise and accountable data. For complex and high-value projects, PT PELNI (Persero) applies LPSE channel to invite the vendor

menggunakan sarana LPSE untuk mengundang Penyedia berkompetensi melalui <http://lpse.pelni.co.id>. Perubahan dan perbaikan sistem terus dilakukan secara bertahap agar seluruh informasi mudah diakses oleh pihak manapun dan dapat cepat memperoleh informasi apabila dibutuhkan.

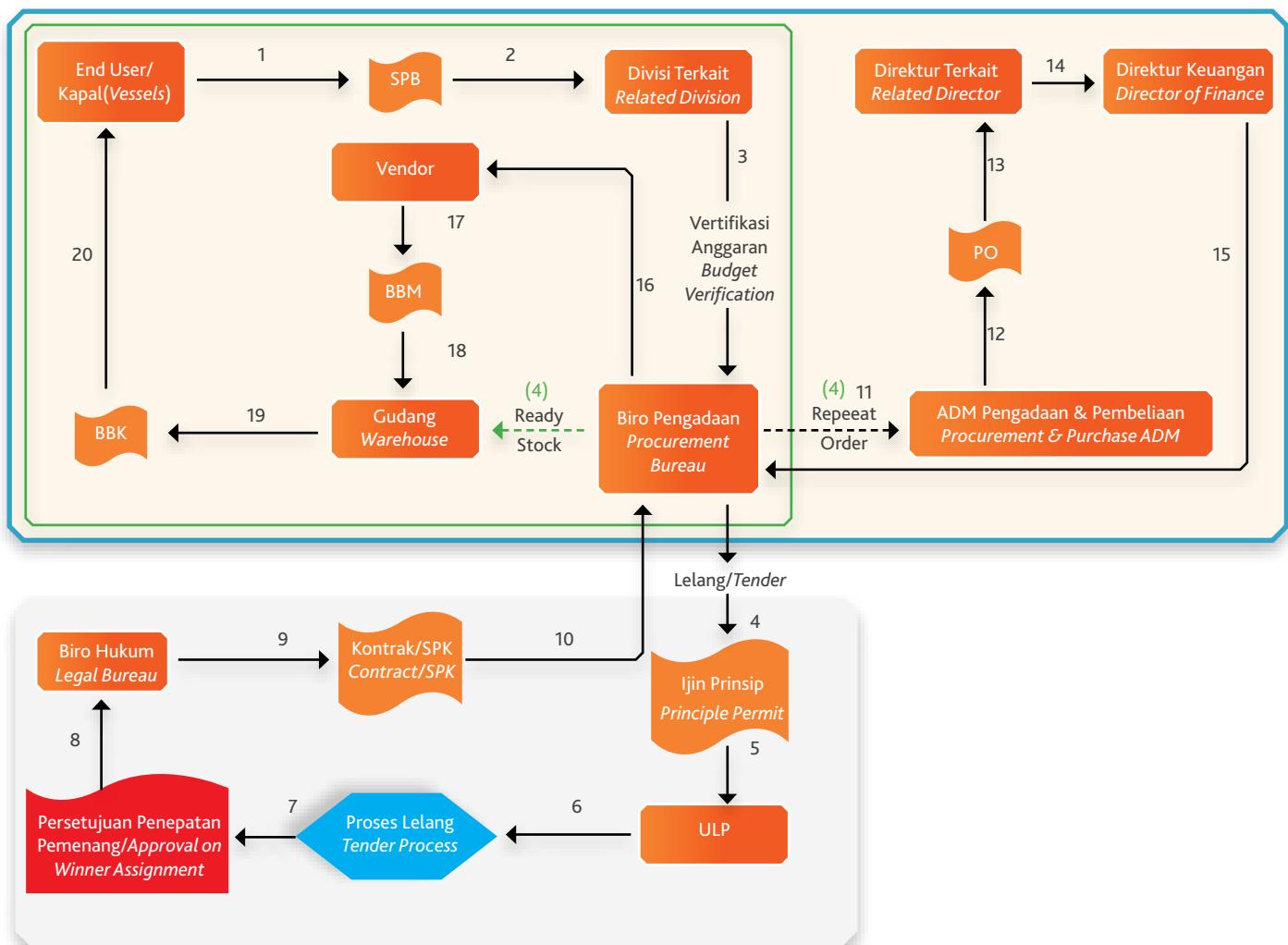
to compete via <http://lpse.pelni.co.id>. System revision and improvement are done continuously and gradually in order to ensure the information is accessible for every party to acquire necessary information quickly.

# Diagram Alur Pengadaan Barang Dan Jasa PT PELNI (Persero)

Divisi Pengadaan

PT PELNI (Persero) Procurement Chart

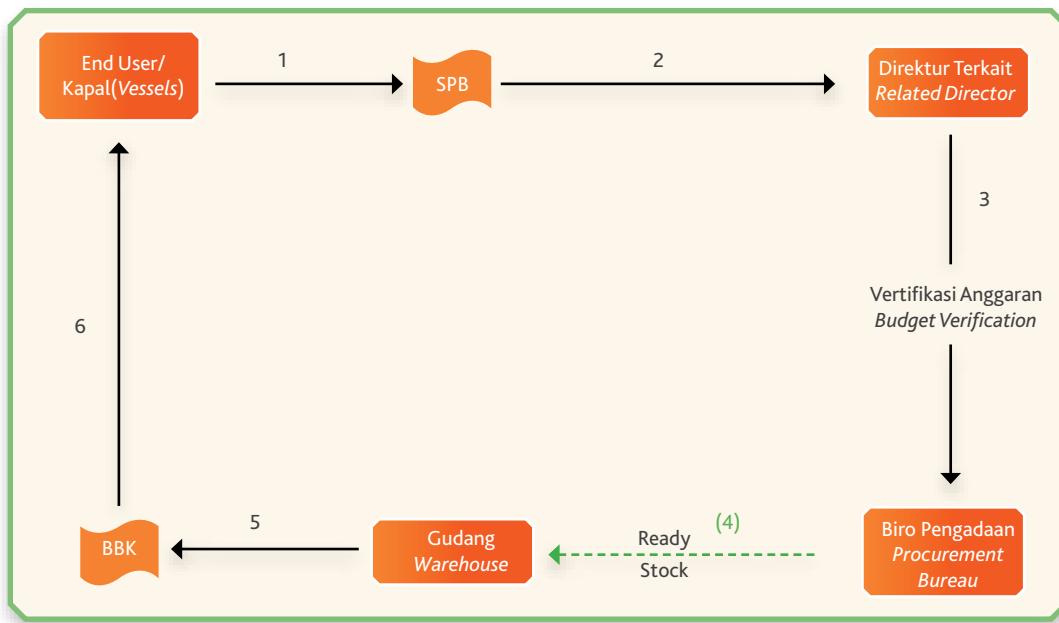
Procurement Division





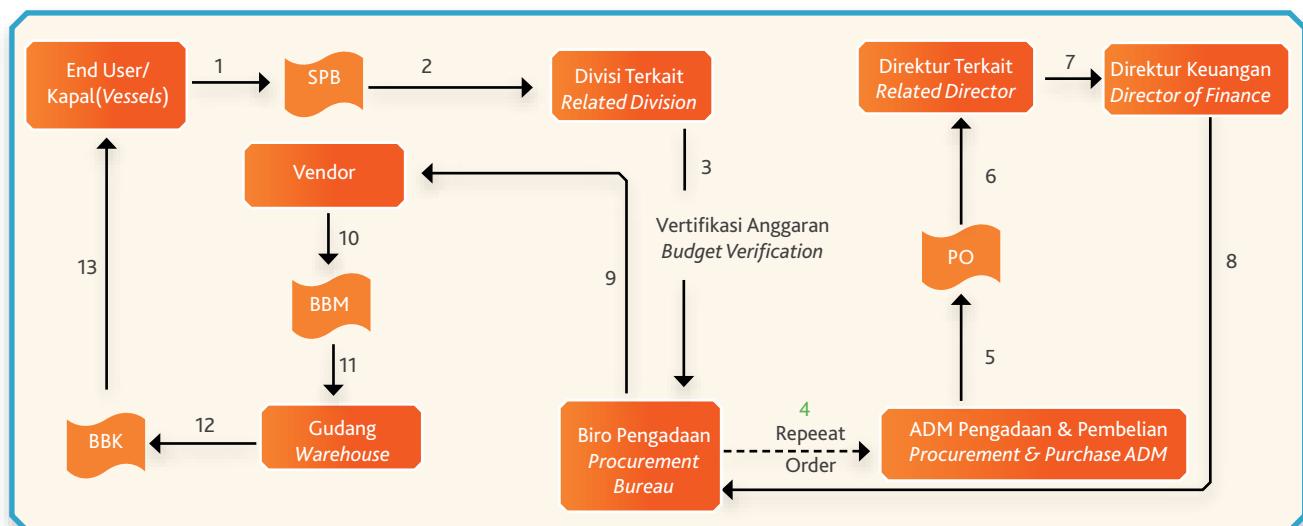
### Permintaan Barang Ready Stock

### Ready Stock Product Request



### Pengadaan Barang (Repeat Order)

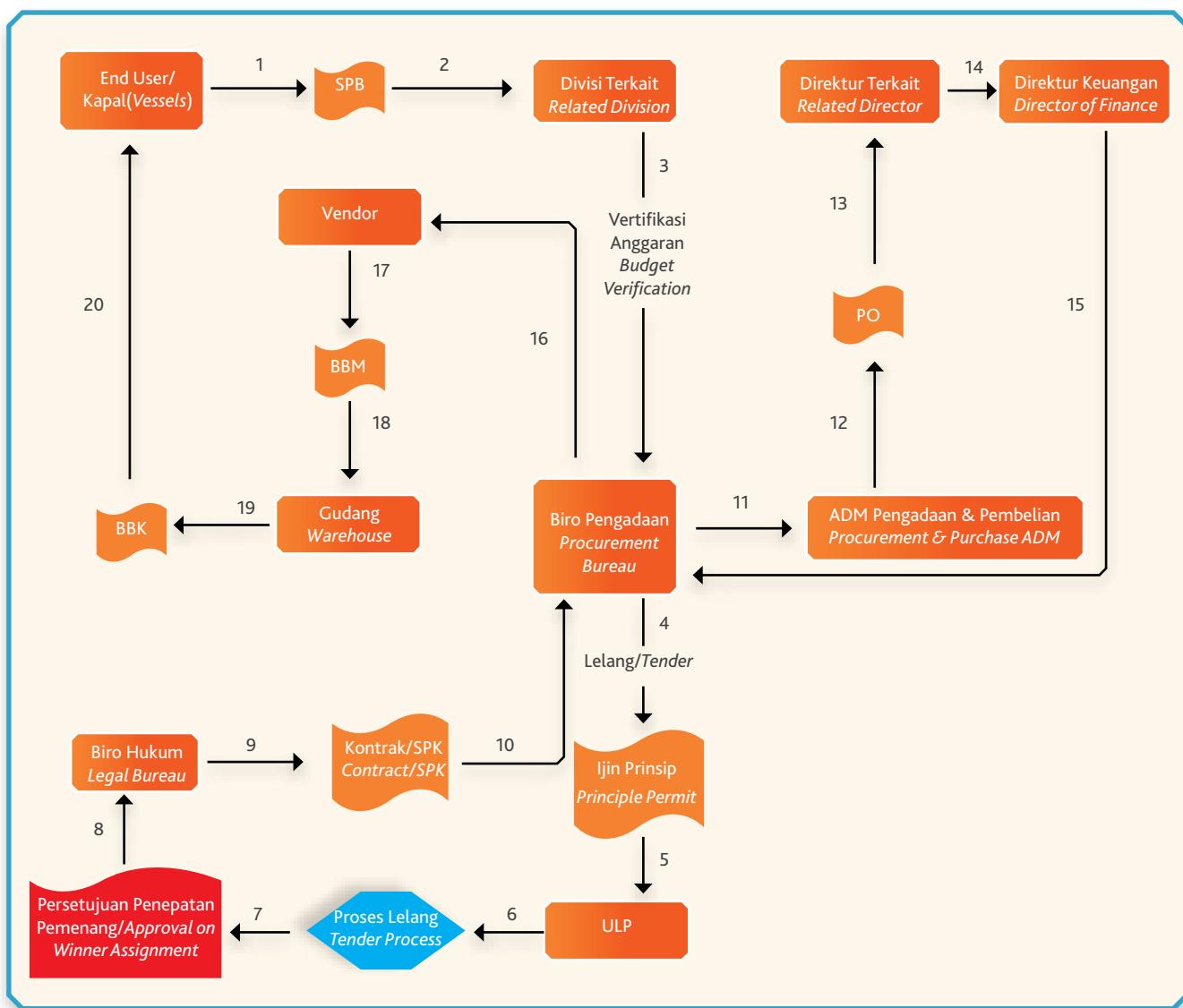
### Procurement (Repeat Order)





## Pengadaan Barang Melalui Lelang

## Procurement via Tender



ULP

= Unit Layanan Pengadaan/Procurement Unit

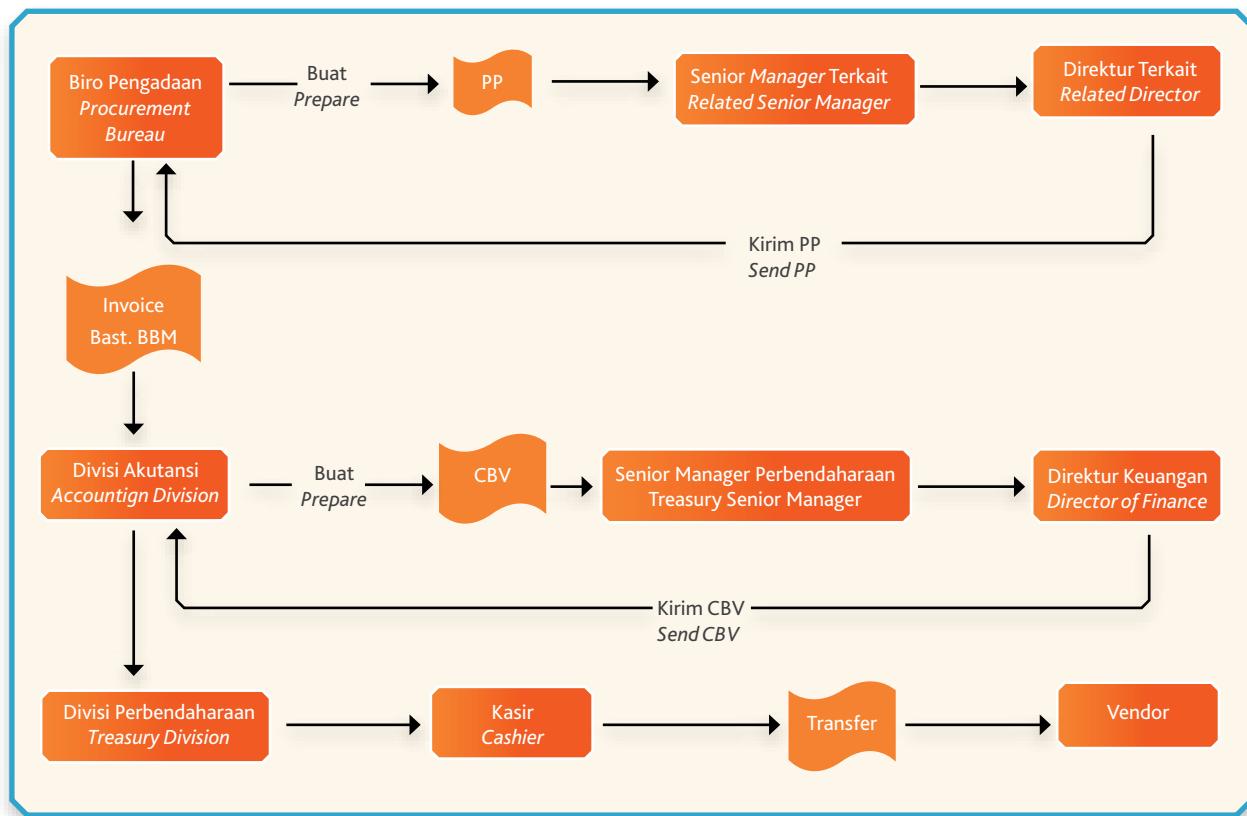


## Sistem Pembayaran Pengadaan Barang Dan Jasa PT PELNI (Persero)

Biro Pengadaan

## PT PELNI (Persero) Procurement Payment System

Procurement Bureau



PP = Permintaan Pembayaran/Payment Request

CBV = Cash Bank Voucher



## Testimoni Vendor

Setelah kami menjadi rekanan di PT PELNI (Persero), kami merasakan bahwa proses pengadaan di PT PELNI (Persero) sekarang sangat baik dan efisien.

Dari proses lelang, penawaran, evaluasi hingga kontrak. Semua dijalankan dengan cepat mudah dan transparan.

### Ratna Sari

Sales Executive

PT Bumi Cahaya Unggul

Saat ini PT PELNI (Persero) menurut kami telah banyak mengalami perubahan Dimana kami selaku *Maker* sangat merasakan hal tersebut. *Improvement* yang dilakukan di organisasinya sangat signifikan semata-mata untuk dapat mendukung bisnis perusahaan agar lebih terstruktur dan efisien.

Kami pun selaku *Principle* dari *Product* Wartsila di Indonesia sangat senang dan bersemangat Untuk dapat mendukung PT PELNI (Persero) secara langsung agar dapat lebih berkembang dalam ketatnya persaingan global.

### Handy Prasetyanto

Account Manager

PT Wartsila Indonesia

PT PELNI (Persero) adalah salah satu *shipowner* yang unik di Indonesia, karena sebagian besar armadanya dibuat di Galangan Eropa yang terkenal dengan kualitasnya. Banyak produk Rolls-Royce Marine terpasang di armada kapal PT PELNI (Persero) tersebut dan kami berharap bisa terus meningkatkan kerjasama untuk mendukung pertumbuhan PT PELNI (Persero).

### Dian Firmansyah

Business Development Analyst

PT Rolls-Royce Indonesia

## Vendor Testimony

After being vendor of PT PELNI (Persero), We experience that procurement process at PT PELNI (Persero) has now been very good and efficient.

Since the tender, offering until contract process. Every process is done promptly, easily and transparently.

### Ratna Sari

Sales Executive

PT Bumi Cahaya Unggul

PT PELNI (Persero) has currently undergone significant changes where as the maker, We deeply experience this condition. Improvement in the organization was very significant and solely intended to support the Company's business process to be more structured and efficient.

As Principle of Wartsila product in Indonesia, we are very happy and excited to support PT PELNI (Persero) directly to grow further amidst tight global competition.

### Handy Prasetyanto

Account Manager

PT.Wartsila Indonesia

PT PELNI (Persero) is a unique shipowner in Indonesia, this is because most of its fleets were built in European shipyard that is famous for the quality. Most of Rolls-Royce Marine products are installed in the PT PELNI (Persero) vessel fleets where we expect to continue advancing our partnership to support growth of PT PELNI (Persero).

### Dian Firmansyah

Business Development Analyst

PT Rolls-Royce Indonesia







# Analisa dan Pembahasan Manajemen

## Management Discussion and Analysis

.....

“

**Target Laba perusahaan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 305,623 juta atau 142.16% dibandingkan Tahun 2016. Penghasilan di tahun 2017 diharapkan dapat meningkat sebesar 29.10% atau sebesar Rp. 1,302,948 juta dari tahun 2016.**

In 2017, the Company targeted profit to achieve Rp305.623 million or 142.16% if compared with 2016. In 2017, Revenues is expected to grow by 29.10% or Rp1,302,948 million from 2016.

”



## Tinjauan Makroekonomi

### Macroeconomic Review

Sepanjang tahun 2016, situasi perekonomian global pada 2016 masih diliputi oleh ketidakpastian. Kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara maju dengan pondasi makroekonomi domestik yang relatif kuat. Tren pemulihan ekonomi dunia belum signifikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang berjalan lambat, kecuali ekonomi AS yang terus membaik. Perbaikan kondisi ekonomi AS, diindikasikan dari menguatnya sektor tenaga kerja dan meningkatnya inflasi, yang mendorong Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) untuk menaikkan *Fed Fund Rate* (FFR) pada bulan Desember 2016 yang berpotensi meningkatkan *cost of borrowing* di pasar keuangan global.

Di sisi lain, India dan Cina mencatat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi global dan perbaikan sejumlah harga komoditas. Meskipun masih pada level yang rendah, kenaikan harga minyak dunia mulai terjadi dan berpotensi meningkat seiring kesepakatan OPEC untuk menurunkan produksinya. Pertumbuhan ekonomi Cina pada tahun 2016 didorong oleh sektor konsumsi dan investasi. Konsumsi Cina pada tahun 2016 cenderung lebih solid, didukung oleh stimulus untuk mendukung penjualan sektor properti dan otomotif. Penjualan otomotif dan properti meningkat pada tahun 2016 pasca penerapan pelonggaran kredit dan pemberian subsidi oleh Pemerintah.

Throughout 2016, global economy condition in 2016 was still overshadowed by uncertainty. The condition was not only experienced by emerging markets but also advanced countries with relatively strong domestic macroeconomic foundations. World's economic recovery trend was less significant as in line with slow economic growth in the advanced countries, except US that continuously showing economic recovery. The US economic recovery was indicated by stronger man power sector and increasing inflation rate that encouraged The Federal Reserves (The Fed) to adjust Fed Fund Rate (FFR) in 2016 that may potentially increase cost of borrowing in the global financial market.

On the other hand, India and China recorded economic growth that are expected to be engine of global economic growth and improvement of commodity prices. Despite still arrived at low level, world's oil price increase was surge and potentially higher as OPEC agreement to reduce its production. In 2016, China economic growth was driven by consumption and investment sectors. China's consumption in 2016 was stronger that was supported by stimulus to encourage sales in property and automotive sectors. The automotive and property sales increased in 2016 after the implementation of credit moderation and subsidy facility from the Government.



Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 secara *year on year* (yoY) sebesar 5,02% berada sedikit dari yang dikehendaki Pemerintah yaitu sebesar 5,2%, namun dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 4,88%, terjadi kenaikan. Tidak tercapainya disebabkan penerimaan negara hanya tercapai sebesar Rp1.551,18 triliun atau hanya 86,9% dari target APBN. Hal tersebut juga disebabkan konsumsi pemerintah anjlok hingga 4,05%. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sebesar Rp12,406 triliun dan PDB per Kapita sebesar Rp47,9 Juta, adalah merupakan sedikit negara di dunia yang memiliki pertumbuhan positif.

Sedangkan dinamika politik tahun pertama pasca pesta demokrasi yang diselenggarakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sekali telah dilalui dengan baik, sehingga dinamika yang diperkirakan akan terjadi secara ekstrim dapat dikendalikan oleh Pemerintah Indonesia yang memiliki legitimasi yang tinggi dari rakyat Indonesia, sehingga negara dalam kondisi yang kondusif dan menjadikan pembelajaran berpolitik dan berdemokrasi secara sehat bagi masyarakat, sehingga bangsa Indonesia dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain yang telah terlebih dahulu maju peradabannya, berjalan dengan baik terjadi sebagai wujud demokrasi telah berjalan dengan baik, seperti yang diharapkan.

Sehingga apabila sumber daya alam yang dimiliki dapat dikelola dengan baik, profesional dan inovatif akan memberikan *value added* yang luar biasa sehingga bangsa Indonesia dipastikan akan dapat mensejahterakan seluruh rakyatnya, selain itu perekonomian negara Indonesia akan sejajar dengan negara yang telah memiliki tingkat ekonomi yang dikategorikan maju di dunia. Apalagi pada awal tahun 2016 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi telah diberlakukan, sehingga dengan persiapan yang matang untuk menjaga daya saing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dengan memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini, sehingga diharapkan Indonesia akan menjadi *leader* di kalangan negara-negara ASEAN dan akan menjadi salah satu negara besar di dunia pada masa mendatang.

Indonesia economic growth achievement in 2016 reached 5.02% by year on year (yoY) or slightly below the Government's expectation of 5.2%, however, if compared with 4.88% achievement in 2015, the growth is higher. The realization below the target was due to state revenue only achieved Rp1,551.18 trillion or 86.9% from the APBN target. This was also due to fall of Government's consumption to 4.05%. Gross Domestic Product (GDP) achieved Rp12.406 trillion and GDP per Capita achieved Rp47.9 million or brought Indonesia as one of the countries with positive growth worldwide.

However, political dynamics during the first period of post-democratic event held in every 5 (five) years had been passed very well, therefore, the projection of extreme turbulence was successfully controlled by the Government of Indonesia with high legitimacy from Indonesian people, therefore, the Country was under conducive condition and became a lesson learn for fair political and democratic life for the society, thus, Indonesia has now well-managed and being equal with other countries with more advance civilization that manifests the democracy has been implemented properly as expected.

If the national natural resources are managed optimally, professionally and innovatively, this will generate huge value-added to ensure Indonesia will bring welfare to all of its people, moreover, economy of Indonesia will be equal with other countries that are classified as advanced economy countries in the world. Furthermore, at beginning of 2016, ASEAN Economic Community (AEC) has been officially implemented, therefore, thorough preparation to maintain competitive advantage of Indonesia towards an excellent nation by optimizing its natural resources is expected to bring Indonesia as leader among the ASEAN countries and will become one of major countries worldwide in the future.



## Tinjauan Industri Pelayaran

### Shipping Industry Outlook

Tren perlambatan makroekonomi juga berdampak pada berlanjutnya perlambatan aktivitas perdagangan internasional, yang berdampak pada aktivitas pengiriman internasional. Berdasarkan data Dwery Financial Research, pendapatan kotor dari bisnis pelayaran global diperkirakan mengalami penurunan hingga US\$5,2 miliar pada 2016. Perkembangan industri pelayaran global mencatat kejadian paling fenomenal tahun 2017 ditandai oleh tutupnya perusahaan pelayaran kargo terbesar ke-7 dunia, Hanjin Shipping Co.

Kondisi-kondisi yang membawa dampak signifikan bagi lesunya industri pelayaran sepanjang tahun 2016 diawali oleh penurunan bisnis batubara, pelarangan ekspor batubara menggunakan *tug and barge* ke Filipina dan yang paling signifikan adalah masih lesunya harga minyak dunia yang mengakibatkan mandeknya kegiatan pengeboran minyak dan gas. Bidang ini dimana normalnya membutuhkan banyak kapal untuk menunjang operasi Migas.

Industri pelayaran dan perkapalan dalam negeri mengalami masa surut sepanjang tahun 2016 seiring dengan inisiatif pemerintah Indonesia melaksanakan proyek Tol Laut dan menjadikan negara kita sebagai poros maritim. Pergantian kepemimpinan di Kementerian Perhubungan memberikan perubahan arah kebijakan untuk mengikutsertakan swasta dalam proyek Tol Laut tidak hanya sebatas kepada pembangunan kapal milik Pemerintah tetapi juga mengajak kapal swasta untuk langsung berperan dalam program tersebut.

Di tengah kondisi yang cukup menantang, industri pelayaran nasional tetap mencatat beberapa prospek pertumbuhan. Data yang dipublikasikan oleh Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa Pemerintah telah menetapkan target 306 lokasi pelabuhan laut dalam kurun waktu 2015 – 2019 dan berhasil merealisasikan 57 lokasi pada kurun waktu 2015 – 2016. Selain itu, bisnis *offshore* juga dinilai membaik seiring dengan peningkatan harga minyak dan *full capacity* dalam *tug boat* yang mendukung peningkatan harga komoditas.

Macroeconomic slowing trend was also affected to slow international trading activity that influenced international cargo activity. According to data released by Dwery Financial Research, gross revenue of global shipping business was estimated to decrease to US\$5.2 billion in 2015. Global shipping industry growth also recorded the most phenomenal event in 2017 indicated by the liquidation of Hanjin Shipping Co., the seventh biggest cargo shiping company worldwide.

These conditions brought significant impact for sluggish shipping industry throughout 2016 that was started by collapsing coal business, restriction of coal export using tug and barge to Philippines and low global oil pirce became the most significant factors that caused stagnant oil and gas drilling activities. In the normal period, these sectors required high many ships to support Oil and Gas operations.

Domestic shipping and maritime transportation industries was very challenging throughout 2016 as the Government's initiative to implement Tol Laut project and develop the country as center of maritime business. Changing reign in Ministry of Transportation also reformed policy to cooperate with private sector in Tol Laut projects limitedly on state-owned ships construction but also to invite private sectors to participate directly in these programs.

Amidst the challenging condition, national shipping industry still recorded growth prospects. The data published by Ministry of Transportation explained that the Government has set targets of 306 Sea Port locations within 2015 – 2019 period and also successfully realized 57 locations in 2015 – 2016. In addition, offshore business was also seen recovering in line with increasing oil price and full capacity of tug boat that supported the commodity price rebound.



## Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha

### Performance Review By Business Segment

Perseroan membukukan pendapatan dari 2 (dua) segmen yaitu Segmen Perkapalan dan Segmen Non-Perkapalan. Penjelasan dan kinerja mengenai masing-masing segmen usaha termasuk produksi, pendapatan usaha dan profitabilitas dijelaskan sebagai berikut:

#### Segmen Perkapalan

Realisasi penghasilan perkapalan pada Tahun 2016 mencapai sebesar Rp3,609,268 juta atau 76.15% dari anggaran sebesar Rp4,739,850 juta, bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp3,351,176 juta mengalami peningkatan sebesar Rp258,093 juta atau 7.70%.

Di sisi lain, jumlah realisasi biaya Tahun 2016 sebesar Rp3,110,237 juta atau 72.08% dari anggaran sebesar Rp4,314,728 juta, bila dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp3,011,984 juta mengalami peningkatan sebesar Rp98,253 juta atau 3.26%.

Secara umum, profitabilitas segmen perkapalan untuk tahun buku 2016 mencatat laba sebesar Rp499,031 juta atau 117.39% dari anggaran laba sebesar Rp425,122 juta, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 laba sebesar Rp339,192 juta mengalami peningkatan sebesar Rp159,840 juta atau 47.12%

Realisasi kinerja segmen perkapalan berdasarkan layanan yang diberikan, dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Kinerja Segmen Perkapalan Tahun 2015 – 2016  
(dalam jutaan Rupiah)

The Company booked revenues from 2 (two) segments, that are Shipping segment and Non-Shipping Segment. Explanation and performance of each business segment including production, business revenues and profitability are as follows:

#### Shipping Segment

Realization of shipping revenues in 2016 achieved Rp3.609.268 million or 76.15% from Rp4.739.850 million budgeted and if compared with realization in 2015 that was Rp3.351.176 million or increased Rp258.093 million or 7.70%.

On the other hand, total cost realization in 2016 amounted to Rp3.110.237 million or 72.08% from Rp4.314.728 million budgeted, if compared with realization in 2015 that was Rp3.011.984 million increased Rp98.253 million or 3.26%.

In general, profitability of shipping segment in fiscal year 2016 recorded profit of Rp499.031 million or 117.39% from Rp425.122 million profit budget in 2015, if compared with realization in 2015 that was Rp339.192 million, the Company recorded Rp159.840 million growth.

Realizaiton of shipping segment based on sevices is explained below:

Realizaiton of Shipping Segment Performance 2015 – 2016  
(in million Rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2015 Realization 2015	Realisasi 2016 Realization 2016	Selisih Difference	%
Unit	31	80	49	158.06%
Penumpang (orang)/Passenger (Pax)	4,231,532	3,699,448	-532,084	-12.57%
Barang (Ton/M3)/Cargo (Ton/M3)	75,570	69,067	-6503	-8.61%
Container (Teus)/Container (Teus)	12,501	14,427	1,926	15.41%
Kendaraan (Unit)/Vehicle (Unit)	12,753	6,078	-6675	-52.34%
Hewan (Ekor)/Cattle (animals)	0	11,812	11,812	100.00%



## 1. Kapal Penumpang

Pada tahun 2016, Perseroan mengoperasikan alat produksi kapal penumpang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit. Perbandingan operasi kapal penumpang tahun 2015 dan 2016 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian Description	Realisasi Tahun 2015 Realization 2015	2016	
		Anggaran Budget	Realisasi Realization
<b>Kapal Penumpang (Unit)/Passenger Ship (Unit)</b>			
Type 3000	1	1	1
Type 2000	11	11	11
Type 1000	9	9	9
Type 500	3	3	3
Type RoRo	3	2	3
Jumlah/Total	27	26	27

Pada tahun 2016, kapal penumpang melayani total penumpang sebanyak 3,552,254 orang atau 77.08% dari anggaran sebanyak 4,608,801 orang, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebanyak 4,231,532 orang terdapat penurunan sebanyak 679,278 orang atau 16.05%.

Muatan barang yang diangkut pada tahun 2016 sebanyak 48,388 T/M3 atau 67.60% dari anggaran sebanyak 71,575 T/M3, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebanyak 44,212 T/M3 terdapat peningkatan sebanyak 4,176 T/M3 atau 9.45%.

Muatan kendaraan yang diangkut dalam tahun 2016 sebanyak 6,078 unit atau 46.08% dari target anggaran sebanyak 13,190 unit, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebanyak 12,753 unit terdapat penurunan sebanyak 6,675 unit atau 52.34%.

Muatan kontainer yang diangkut dalam tahun 2016 sebanyak 10,043 Teus atau 80.25% dari target anggaran sebanyak 12,515 Teus bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebanyak 12,413 Teus terdapat penurunan sebanyak 2,370 Teus atau 19.09%.

## 1. Passenger Ship

In 2016, the Company operated 27 units (twenty seven) passenger ship as production modes. Comparative passenger ship operation in 2015 and 2016 is explained as follows:

In 2016, passenger ship served total passengers of 3,552,254 pax or 77.08% from 4,608,801 pax budgeted, if compared with realization in 2015 that was 4,231,532 pax, the figure decreased 679,278 or 16.05%.

In 2016, cargo load achieved 48.388 T/M3 or 67.60% from 71,575 T/M3 budget, if compared with realization in 2015 that was 44,212 T/M3, the Company recorded 4,176 T/M3 or 9.45% growth.

Vehicle load achieved 6.078 units in 2016 or 46.08% from 13,190 units targeted in the budget, if compared with realization in 2015 that was 12.753 units, the Company recorded 6.675 units or 52.34% decrease.

Container load achieved 10.043 Teus in 2016 or 80.25% from 12,515 Teus targeted in the budget, if compared with realization in 2015 that was 12.413 Teus, the Company recorded 2,370 Teus or 19.09% decrease.



Realisasi penghasilan pada Tahun 2016 mencapai sebesar Rp3,172,438 juta atau 89.31% dari anggaran sebesar Rp3,552,200 juta, bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp3,310,622 juta mengalami penurunan sebesar Rp138,184 juta atau 4.17%. Di sisi lain, jumlah realisasi biaya Tahun 2016 sebesar Rp2,729,558 juta atau 84.77% dari anggaran sebesar Rp3,219,868 juta, bila dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp2,956,172 juta mengalami penurunan sebesar Rp226,614 juta atau 7.67%.

Segmen Kapal Penumpang membukukan laba sebesar Rp442,880 juta dari anggaran laba sebesar Rp332,332 juta, bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 laba sebesar Rp354,450 juta mengalami peningkatan sebesar Rp88,430 juta atau 24.95%.

## 2. Kapal Barang (Tol Laut)

Pada tahun 2016, Perseroan mengoperasikan sebanyak 6 (enam) unit armada terdiri dari 3 unit kapal milik dan 3 (tiga) unit Kapal Charter.

Segmen kapal barang (Tol Laut) membukukan laba sebesar Rp27,533 juta dari anggaran laba sebesar Rp24,255 juta, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 rugi sebesar Rp15,541 juta mengalami peningkatan sebesar Rp43,074 juta.

## 3. Kapal Ternak

Pada tahun 2016, Perseroan mengoperasikan 1 (satu) unit armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara.

Segmen kapal ternak membukukan laba sebesar Rp1,081 juta dari anggaran laba sebesar Rp3,082 juta, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 laba sebesar Rp283 juta mengalami peningkatan laba sebesar Rp798 juta atau 281.46%.

## 4. Kapal Perintis

Pada tahun 2016, Perseroan mengoperasikan 46 (empat puluh enam) armada Kapal Perintis.

Segmen Kapal Perintis membukukan laba sebesar Rp27,537 juta atau 42.45% dari anggaran laba sebesar Rp64,865 juta.

In 2016, realization of the revenues achieved Rp3.172.438 million or 89.31% from Rp3.552.200 million budget, if compared with realization in 2015 that was Rp3.310.622 million, recorded Rp138.184 million or 4.17% decrease. On the other hand, total cost realization in 2016 achieved Rp2.729.558 million or 84.77% from Rp3.219.868 million budget, if compared with realization in 2015 that was Rp2.956.172 million, the Company recorded Rp226.614 million or 7.67% decrease.

Passenger Ship segment booked profit of Rp442.880 million from Rp332.332 million profit budget, if compared with profit realization in 2015 that was Rp354.450 million, the Company recorded Rp88.430 million or 24.95% growth.

## 2. Cargo (Tol Laut) Ship

In 2016, the Company operated 6 (six) units fleet consisted of 3 owned-ships and 3 (three) units charter ships.

The cargo (Tol Laut) ship segment booked profit of Rp27.533 million from Rp24.255 million profit budget, and if compared with realization in 2015, that was loss of Rp15.541 million, the Company recorded Rp43.074 million growth.

## 3. Cattle Ship

In 2016, the Company operated 1 (one) unit Cattle Ship, KM Camara Nusantara.

Cattle ship segment booked profit of Rp1.081 million from Rp3.082 million profit budget, and if compared with realization in 2015, that was profit of Rp283 million, the Company recorded profit growth by Rp798 million or 281.46%.

## 4. Pioneer Ship

In 2016, the Company operated 46 (forty six) pioneer ships fleet.

Pioneer ship segment booked profit of Rp27.537 million or 42.45% from profit budget of Rp64.865 million.



## Segmen Non-Perkapalan

Pada tahun 2016, segmen non-perkapalan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp40,567 juta atau 51.06 % dari anggaran sebesar Rp79,453 juta, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp56,976 juta mengalami penurunan sebesar Rp16,409 juta atau 28.80%.

Realisasi biaya usaha non-perkapalan tahun 2016 dicapai sebesar Rp24,809 juta atau 65.31% dari anggaran sebesar Rp37,990 juta, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar Rp32,883 juta mengalami penurunan sebesar Rp8,073 juta atau 24.55%.

Dengan demikian, segmen non-perkapalan membukukan laba sebesar Rp15,757 juta atau 38.00% dari anggaran laba sebesar Rp41,464 juta dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 laba sebesar Rp24,093 juta mengalami penurunan laba sebesar Rp 8,336 juta atau 34.60%.

Realisasi Kinerja Segmen Non-Perkapalan Tahun 2015 – 2016 (dalam jutaan Rupiah)

Uraian Description	Realisasi 2015 Realization 2015	Realisasi 2016 Realization 2016	Selisih Difference	%
Usaha Perbengkelan Unit Kapal Ship Unit Docking Service	28	21	-7	-25.00%
Wisma Bahtera Cipayung Wisma Bahtera Cipayung	52,88	40,60	-12,28	-23.22%
BOR	32.645	24.007	-8.638	-26.46%
Jumlah Tamu/Total Guests	4	4	0	100.00%
Ruang Pertemuan/Meeting Room	3.155	1.727	-1428	-45.26%
Usaha Keagenan (Call)/Agency Business (Call)				

### 1. Hotel Bahtera Cipayung

Pada tahun 2016, segmen usaha Hotel Bahtera Cipayung mencatat realisasi kinerja BOR sebesar 40,60 %, mengalami penurunan 23,22% dibandingkan tahun 2015 sebesar 52,88%. Realisasi tersebut diakibatkan oleh terjadinya penurunan jumlah tamu dari sebanyak 32.645 orang di tahun 2015 menjadi 24.007 orang di tahun 2016 atau menurun 26,46%. Ruang pertemuan sebanyak 4 ruang atau sama dengan tahun 2015.

Total penghasilan usaha segmen Hotel Bahtera Cipayung mencapai Rp7.613 juta pada tahun 2016, mengalami penurunan 31,91% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp11.180 juta. Dengan demikian, segmen Hotel Bahtera Cipayung membukukan rugi sebesar Rp789 juta atau menurun 181,34% dibandingkan capaian laba tahun 2015 sebesar Rp970 juta.

## Non-Shipping Segment

In 2016, non-shipping segment booked revenues of Rp40.567 million or 51.06% from Rp79.453 million budget, if compared with realization in 2015 that was Rp56.976 million, the Company recorded Rp16.409 million or 28.80% decrease.

Realization of non-shipping business cost in 2016 achieved Rp24.809 million or 65.31% from Rp37.990 million budget, if compared with realization in 2015 that was Rp32.883 million, the Company recorded Rp8.073 million or 24.55% decrease.

Therefore, non-shipping segment booked profit of Rp15.757 million or 38.00% from Rp41.464 million profit budget and if compared with realization in 2015 that was profit of Rp24.093 million, the Company's profit decreased Rp8.336 million or 34.60%.

Realization of Non-Shipping Segment Performance 2015 – 2016 (in million Rupiah)

### 1. Hotel Bahtera Cipayung

In 2016, Hotel Bahtera Cipayung business segment booked BOR performance realization of 40.60% or decreased 23.22% if compared with 52.88% in 2015. The realization was due to decreasing number of guests from 32.645 guests in 2015 to 24.007 guests in 2016 or decreased 26.46%. Meeting room booked 4 room occupancy or equal realization with 2015.

Total revenues of Hotel Bahtera Cipayung business segment achieved Rp7,613 million in 2016, decreased 31.91% if compared with Rp11,180 million in 2015. Therefore, Hotel Bahtera Cipayung segment booked loss of Rp789 million or decreased 181.34% if compared with profit realization in 2015 amounted to Rp970 million.



## 2. Pengusahaan Aset

Pengusahaan Aset membukukan penghasilan dari sewa perkantoran sebesar Rp11.313 juta pada tahun 2016 atau tumbuh 16,64% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp9.699 juta. Pengusahaan Aset membukukan laba sebesar Rp11.313 juta atau meningkat 16,64% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp9.699 juta.

## 3. Usaha Perbengkelan

Per 31 Desember 2016, segmen usaha perbengkelan mencatat realisasi produksi sebesar 21 unit atau menurun 25% dibandingkan tahun 2015 sebesar 28 unit.

Segmen usaha perbengkelan membukukan penghasilan usaha sebesar Rp16.972 juta pada tahun 2016 atau turun 43,52% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp30.049 juta. Capaian laba segmen usaha perbengkelan tahun 2016 sebesar Rp 756 juta atau turun 90,19% dibandingkan laba tahun 2015 sebesar Rp7.705 juta.

## 4. Usaha Keagenan

Usaha keagenan mencatat capaian *call cargo* luar negeri sebesar 107 *call* atau menurun 71,92% dibandingkan tahun 2015 sebesar 281 *call*. *Call Tourist* membukukan 15 *call* atau turun 87,70% dibandingkan tahun 2015 sebesar 122 *call*. *Cargo* dalam negeri membukukan realisasi 1.605 *call* atau turun 39,48% dibandingkan tahun 2015 sebesar 2.652 *call*. Untuk *Flash/lash Barges*, Perseroan belum membukukan realisasi dari RKAP sebesar 5 *call* pada tahun 2016.

Penghasilan usaha keagenan mencapai Rp4.551 juta atau turun 24,24% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp6.007 juta. Secara keseluruhan, usaha keagenan mencatat laba sebesar Rp4.477 juta atau 21,72% dibandingkan laba usaha keagenan tahun 2015 sebesar Rp5.719 juta.

## 2. Assets Concession

Assets concession booked revenues from office rental amounted to Rp11,313 million in 2016 or grew 16.64% if compared with Rp9,699 million booked in 2015. The assets concession booked profit of Rp11,313 million or increased 16.64% if compared with Rp9,699 million booked in 2015.

## 3. Workshop Business

As of December 31, 2016, Workshop business segment recorded product realization of 21 units or decreased 25% if compared with 28 units booked in 2015.

Workshop business segment booked revenues of Rp16,972 million in 2016 or decreased 43.52% if compared with Rp30.049 million booked in 2015. Achievement of workshop business segment profit achieved Rp756 million in 2016 or decreased 90.19% if compared with Rp7,705 million booked in 2015.

## 5. Agency Business

Agency business recorded international cargo call achievement of 107 calls or decreased 71.92% if compared with 281 calls booked in 2015. Call Tourist booked 15 calls or decreased 87.70% if compared with 122 calls booked in 2015. Domestic cargo booked 1,605 calls realization or decreased 39.48% if compared with 2,652 calls in 2015. For Flash/Lash Barges, the Company had not booked any realization from 5 calls budgeted in the RKAP 2016.

Agency business revenue achieved Rp4,551 million or decreased 24.24% if compared with Rp6,007 million booked in 2015. In general, agency business recorded profit of Rp4,477 million or 21.72% if compared with agency business profit in 2015 that was Rp5,719 million.



## Tinjauan Kinerja Keuangan

### Financial Review



#### Aset

Sampai dengan 31 Desember 2016, jumlah aset Perseroan yang terbagi menjadi 40,94% aset lancar dan 59,06% aset tidak lancar tercatat sebesar Rp3.668.520 juta, mengalami penurunan Rp163.846 juta atau 4,28% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp3.832.366 juta. Penurunan total aset Perseroan ini sebagian besar diakibatkan oleh akumulasi penyusutan aktiva tetap.

(dalam juta Rupiah)

#### Assets

As of December 31, 2016, total assets comprised of 40.94% current assets and 59.06% non-current assets and achieved Rp3,668,520 million that decreased Rp163,846 million or 4.28% from previous position of Rp3,832,366 million in previous position. The decrease in total assets was mainly due to accumulation of fixed assets depreciation.

(in million Rupiah)

Tabel Aset Tahun 2016, 2015 Dan 2014/Table of Assets in 2016, 2015 and 2014

Aset Assets	31 Desember 2016 December 31, 2016	31 Desember 2015* December 31, 2015*	31 Desember 2014* December 31, 2014*	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Different	%
Aset Lancar/Current Assets					
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	885,614.54	732,418	364,826	153,196	20.92%
Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash and Cash Equivalents	710,984	101,673	5,689	609,311	599.29%
Penempatan Jangka Pendek Short-Term Investment	5,000	5,000	160	-	0.00%
Piutang Usaha Accounts Receivables	272,795	185,895	114,125	86,901	46.75%



**Tabel Aset Tahun 2016, 2015 Dan 2014/Table of Assets in 2016, 2015 and 2014**

<b>Aset Assets</b>	<b>31 Desember 2016 December 31, 2016</b>	<b>31 Desember 2015* December 31, 2015*</b>	<b>31 Desember 2014* December 31, 2014*</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)</b>	
				<b>Selisih Different</b>	<b>%</b>
(Setelah dikurangi porsi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 1 January 2015/31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp9.282.853.975, Rp7.075.367.277 dan Rp4.920.110.119) (Net of provision for impairment at December 31, 2016, 2015 and January 1st 2015/December, 31 2014 respectively Rp9.282.853.975, Rp7.075.367.277 and Rp4.920.110.119)					
Piutang lain-lain/ Other Receivables	7,890	12,086	29,591	(4,196)	-34.72%
(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp222.551.921, Rp202.093.926 dan Rp1.950.341.262) (Net of provision provision for impairment at December 31, 2016, 2015 and January 1st 2015/December, 31 2014 respectively Rp222.551.921, Rp202.093.926 and Rp1.950.341.262)					
Persediaan/Inventories	462,928	575,712	445,748	(112,784)	-19.59%
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	17,620	19,665	16,802	(2,045)	-10.40%
Uang Muka/Advances Payment	25,443	62,399	52,543	(36,956)	-59.23%
Pendapatan Masih Harus Diterima Accrued revenue	132,145	356,709	308,820	(224,565)	-62.95%
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	22,152	8,972	1,177	13,180	146.90%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	2,542,571	2,060,530	1,339,481	482,041	23.39%



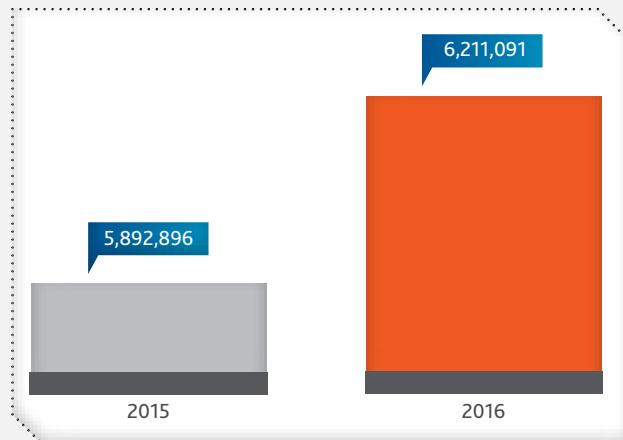
Tabel Aset Tahun 2016, 2015 Dan 2014/Table of Assets in 2016, 2015 and 2014

Aset Assets	31 Desember 2016 December 31, 2016	31 Desember 2015* December 31, 2015*	31 Desember 2014* December 31, 2014*	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Different	%
Aset Tidak Lancar/Npn-Current Assets					
Properti Investasi Investment Property	22,981	23,963	23,969	(982)	-4.10%
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp20.960.976.697, Rp19.794.417.172 dan Rp18.153.769.622) (Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2016, 2015 and January 1st 2015/31 December 2014 respectively for: Rp20.960.976.697, Rp19.794.417.172 and Rp18.153.769.622)					
Aset tetap/Fixed Assets	3,467,049	3,630,293	3,766,395	(163,244)	-4.50%
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp4.814.023.048.832, Rp4.569.369.403.489 dan Rp4.132.660.342.615) (Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2016, 2015 and January 1st 2015/ December 31 2014 respectively: Rp4.814.023.048.832, Rp4.569.369.403.489 and Rp4.132.660.342.615)					
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	4,536	3,271	3,536	1,265	38.68%
Aset lain-lain/Other Assets	128,408	138,088	176,490	(9,680)	-7.01%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	45,546	36,751	25,996	8,795	23.93%
Jumlah Aset Tidak Lancar English	3,668,520	3,832,366	3,996,387	(163,846)	-4.28%
<b>Jumlah Aset Total Assets</b>	<b>6,211,091</b>	<b>5,892,896</b>	<b>5,335,868</b>	<b>318,195</b>	<b>5.40%</b>

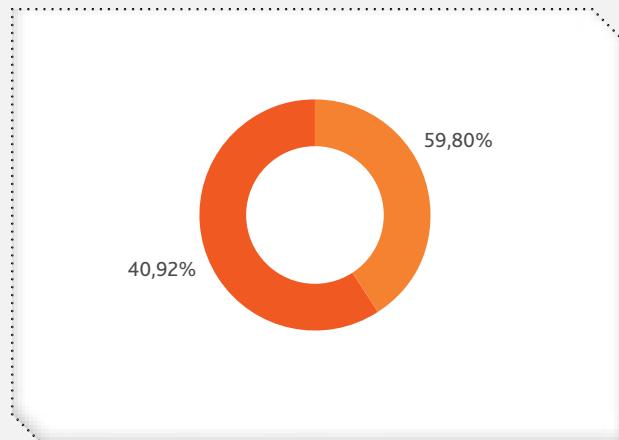
\*Disajikan Kembali  
• Restated



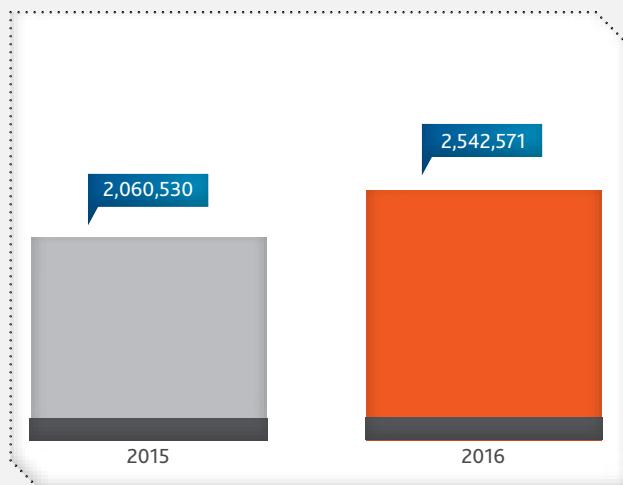
### Aset/Assets



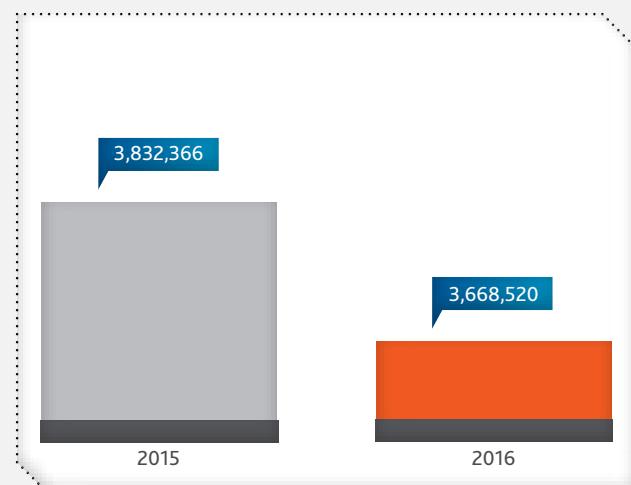
### Komposisi Aset 2016/ Assets Composition 2016



### Aset Lancar/ Current Assets



### Aset Tidak Lancar/ Non-Current Assets



#### Aset Lancar

Aset lancar tumbuh 23,39% menjadi Rp2.542.571 juta pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.060.530 juta. Peningkatan Aset Lancar terutama dikontribusikan oleh meningkatnya kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar 599,29%.

#### Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meningkat 20,92% dari Rp732.418 juta pada tahun 2015 menjadi Rp885.614,54 juta pada tahun 2016. Peningkatan Kas dan Setara Kas dikarenakan adanya penerimaan *Public Service Obligation* (PSO), Subsidi atas Kapal Perintis, Tol Laut dan Kapal Ternak.

#### Current Assets

Current assets grew 23.39% to Rp2,542,571 million in 2016 from Rp2,060,530 million booked in the previous year. The increasing current assets was primarily contributed from higher restricted cash and cash equivalents by 599.29%.

#### Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents increased 20.92% from Rp732,418 million in 2015 to Rp885,614.54 million in 2016. The increasing cash and cash equivalents was contributed from Public Service Obligation (PSO) revenue, Subsidy for Pioneer Ship, Tol Laut Ship and Cattle Ship.



### Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas dibatasi penggunaannya meningkat signifikan 599,29% dari Rp101.673 juta pada tahun 2015 menjadi Rp720.984 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan LC dan Bank Garansi.

### Penempatan Jangka Pendek

Penempatan jangka pendek stabil pada posisi Rp5.000 juta baik untuk tahun 2015 dan 2016. Kondisi ini diakibatkan oleh penempatan jangka pendek anak perusahaan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero).

### Piutang Usaha

Piutang usaha tumbuh 46,75% dari Rp185.895 juta pada tahun 2015 menjadi Rp272.795 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini diakibatkan oleh kekurangan pembayaran *Public Service Obligation* (PSO) tahun 2014 dan 2015 oleh Kementerian Perhubungan.

### Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain mencatat penurunan sebesar 34,72% dari Rp12.086 juta pada tahun 2015 menjadi Rp7.890 juta pada tahun 2016. Penurunan tersebut diakibatkan berkurangnya uang jaminan bank di tahun 2016.

### Persediaan

Perseroan mencatat persediaan sebesar Rp462.928 juta pada tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 19,59% dari Rp575.722 juta pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya persediaan suku cadang (*spare parts*) khususnya di atas kapal.

### Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka mengalami penurunan 10,40% dari Rp19.665 juta pada tahun 2015 menjadi Rp17.620 juta pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya nilai biaya asuransi dialokasikan di tahun 2016.

### Uang Muka

Uang muka mengalami penurunan 59,23% dari Rp62.399 juta pada tahun 2015 menjadi Rp25.443 juta pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh Penurunan tersebut diakibatkan berkurangnya uang muka tambang pasasi dan muatan di tahun 2016.

### Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar mengalami sedikit penurunan sebesar 4,28% dari Rp3.832.366 juta pada tahun 2015 menjadi Rp3.668.520 juta pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai aset tetap akibat penyusutan aset di tahun 2016.

### Restricted Cash and Cash Equivalents

Restricted cash and cash equivalents significantly increased by 599.29% from Rp101,673 million in 2015 to Rp720,984 million in 2016. Increase was driven by increasing cash and cash equivalents used as collateral for LC and Guarantee Bank.

### Short-Term Investment

Short-term investment was stable at Rp5,000 million position both for 2015 and 2016. This condition was due to short-term investment of the subsidiaries with PT Bank Negara Indonesia (Persero).

### Account Receivables

Account receivables grew 46.75% from Rp185,895 million in 2015 to Rp272,795 million in 2016. Increase was driven by underpayment of Public Service Obligation (PSO) in 2014 and 2015 from Ministry of Transportation.

### Other Receivables

Other receivables recorded 34.72% decrease from Rp12,086 million in 2015 to Rp7,890 million in 2016. Decrease was due to lower guarantee funds with banks in 2016.

### Inventories

The Company booked inventories of Rp462,928 million in 2016, decreased 19.59% from Rp575,722 million booked in 2015. Decrease was driven by decreasing spare parts inventories, especially onboard spare parts.

### Prepaid Expenses

Prepaid expenses decreased 10.40% from Rp19,665 million in 2015 to Rp17,620 million in 2016. Decrease was driven by depreciation of insurance cost allocated in 2016.

### Advances Payment

Advances payment decreased 59.23% from Rp62,399 million in 2015 to Rp25,443 million in 2016. Decrease was driven by decreasing advances payment from Ticketing and Cargo payment in 2016.

### Non-Current Assets

Non-current assets was slightly decreased by 4.28% from Rp3,832,366 million in 2015 to Rp3,668,520 million in 2016. The decrease was driven by decreasing fixed assets value due to assets depreciation in 2016.



### Properti Investasi

Properti investasi mencatat penurunan sebesar 4,10% dari Rp23.963 juta pada tahun 2015 menjadi Rp22.981 juta pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai properti investasi akibat penyusutan di tahun 2016.

### Aset Tetap

Perseroan mencatat aset tetap sebesar Rp3.467.049 juta pada tahun 2016, sedikit menurun sebesar Rp163.244 juta atau 4,50% dibandingkan Rp3.630.293 juta pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh akumulasi penyusutan di tahun 2016.

### Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud meningkat 38,68% dari Rp3.271 juta pada tahun 2015 menjadi Rp4.536 juta pada tahun 2016. Peningkatan disebabkan oleh penambahan *software/piranti lunak komputer* di tahun 2016.

### Aset Lain-Lain

Aset lain-lain mengalami penurunan 7,01% dari Rp138.088 juta pada tahun 2015 menjadi Rp128.408 juta pada tahun 2016. Penurunan disebabkan oleh akumulasi penyusutan aktiva & persediaan tidak dapat digunakan di tahun 2016.

### Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan tumbuh 23,03% dari Rp36.751 juta menjadi Rp45.546 juta pada tahun 2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penyisihan piutang, liabilitas imbalan kerja dan penyusutan aset tetap yang dibukukan oleh Perseroan selama tahun 2016.

### Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan sampai dengan 31 Desember 2016 yang terbagi menjadi 79,16% liabilitas jangka pendek dan 20,84% liabilitas jangka panjang tercatat sebesar Rp155.439 juta, mengalami penurunan Rp247.129 juta atau 61,39% dibanding posisi tahun sebelumnya sebesar Rp402.568 juta. Penurunan nilai liabilitas Perseroan ini sebagian besar dikarenakan terdapat konversi pinjaman pokok atas Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA) kepada Pemerintah sebesar Rp564.807.589.000 menjadi Penyertaan Modal Negara.

### Investment Properties

Investment properties booked 4.10% decrease from Rp23,963 million in 2015 to Rp22,981 million in 2016. The decrease was due to decreasing investment properties value due to depreciation in 2016.

### Fixed Assets

The Company booked fixed assets of Rp3,467,049 million in 2016 that was slightly decreased by Rp163,244 million or 4.50% if compared with Rp3,630,393 million booked in 2015. Decrease was due to accumulated depreciation in 2016.

### Intangible Assets

Intangible Assets increased 38.68% from Rp3,271 million in 2015 to Rp4,536 million in 2016. Increase was driven by additional computer software in 2016.

### Other Assets

Other assets decreased 7.01% from Rp138,088 million in 2015 to Rp128,408 million in 2016. The decrease was contributed from accumulated assets depreciation and unused inventories in 2016.

### Deferred Tax Assets

Deferred tax assets grew 23.03% from Rp36,751 million to Rp45,546 million in 2016. Increase was driven by increasing receivables allowance, employee benefits liability and fixed assets depreciation that was booked by the Company throughout 2016.

### Liabilities

As of December 31, 2016, total liabilities were divided into 79.16% current liabilities and 20.84% non-current liabilities that recorded Rp155,439 million or decreased Rp247,129 million or 61.39% if compared with position of Rp402,568 million booked in the previous year. Decreasing liabilities was mostly due to conversion of principal loans from Subsidiary Loan Agreement (SLA) to Government amounted to Rp564,807,589,000.



(dalam juta Rupiah)/(In Million Rupiah)

Tabel Liabilitas Tahun 2016, 2015 Dan 2014/Table of Liabilities in 2016, 2015 and 2014

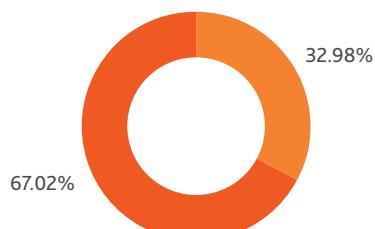
Liabilitas Liabilities	31 Desember 2016 December 31, 2016	31 Desember 2015* December 31, 2015*	31 Desember 2014* December 31, 2014*	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Different	%
Liabilitas Jangka Pendek/Current Liabilities					
Utang usaha/Accounts Payable	157,386	172,010	187,096	(14,624)	-8.50%
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	219,932	141,018	81,865	78,915	55.96%
Pinjaman Jangka Pendek Short-Term Loans	-	-	90,000	-	0.00%
Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Current Maturities of Long-Term Loans	40,086	235,632	234,475	(195,546)	-82.99%
Utang Bunga/Interest Payables	-	57,893	58,137	(57,893)	-100.00%
Uang Muka Diterima Advances Received	15,552	23,580	24,902	(8,028)	-34.05%
Pendapatan Diterima Dimuka Unearned Revenues	18,541	29,493	17,817	(10,952)	-37.14%
Utang Pajak/Tax Debt	51,724	42,579	21,722	9,145	21.48%
Utang Lain-Lain/Other Payables	87,105	100,468	146,420	(13,363)	-13.30%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	590,326	802,673	862,434	(212,347)	-26.45%
Liabilitas Jangka Panjang/ Non-Current Liabilities					
Liabilitas Imbalan Paska Kerja Employment Benefits Obligation	76,369	33,031	37,907	43,338	131.21%
Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun Non-Current Maturities of Long- Term Loans	79,070	369,537	348,662	(290,468)	-78.60%
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	155,439	402,568	386,569	(247,129)	-61.39%
<b>TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES</b>	<b>745,765</b>	<b>1,205,242</b>	<b>1,249,003</b>	<b>(459,476)</b>	<b>-38.12%</b>

\* Disajikan Kembali

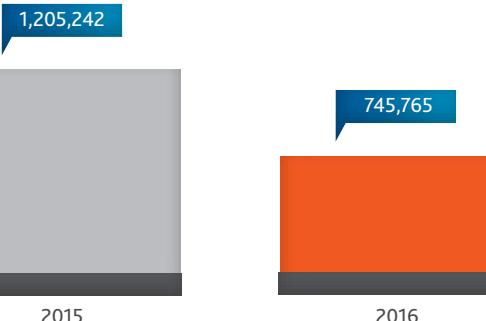
\* Restated



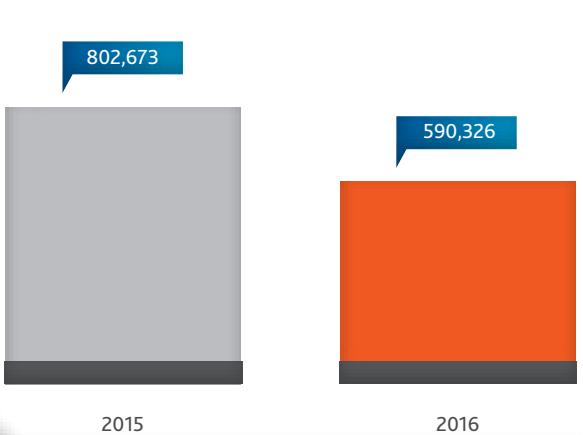
### Komposisi Aset 2016/ Liabilities Composition 2016



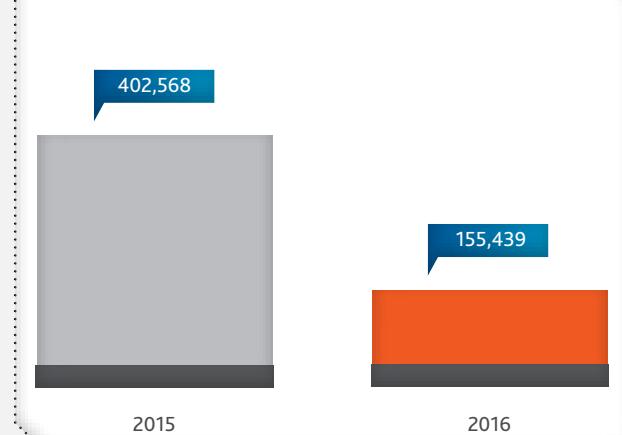
### Total Liabilitas/ Total Liabilities



### Liabilitas Jangka Pendek/ Current Liabilities



### Liabilitas Jangka Panjang/ Non-Current Liabilities



### Liabilitas Jangka Pendek

Pada tahun 2016, liabilitas jangka pendek sebesar Rp590.326 juta, menurun Rp459.476 juta, atau 38,12% dibanding tahun 2015 sebesar Rp402.568 juta. Penurunan ini terutama karena menurunnya pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun.

### Utang Usaha

Pada tahun 2016, utang usaha mengalami penurunan Rp14.624 juta atau 8,50% dari Rp172.010 juta pada tahun 2015 menjadi Rp157.386 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama karena arus kas PT PELNI (Persero) membaik sehingga pembayaran ke vendor/*supplier* lebih cepat.

### Current Liabilities

In 2016, current liabilities amounted to Rp590,326 million, decreased Rp459,476 million or 38.12% if compared with Rp402,568 million booked in 2015. Decrease was primarily due to decreasing current maturities of long-term loans.

### Accounts Payables

In 2016, accounts payables decreased Rp14,624 million or 8.50% from Rp172,010 million in 2015 to Rp157,386 million in 2016. Decrease was mainly due to improving cash flows of PT PELNI (Persero) that enabled faster payment to vendors/suppliers.



### Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Pada tahun 2016, biaya yang masih harus dibayar meningkat Rp78.915 juta atau 55,96% dari Rp141.018 juta pada tahun 2015 menjadi Rp219.932 juta pada tahun 2016. Peningkatan diakibatkan terdapat penambahan akru pembebanan di tahun 2016.

### Pinjaman Jangka Pendek

Pada tahun 2016, Perseroan tidak membukukan liabilitas dalam bentuk pinjaman jangka pendek.

### Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Pada tahun 2016, pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp40.086 juta, mengalami penurunan sebesar Rp195.546 juta atau 82,99% dari Rp235.632 juta pada tahun 2014 menjadi Rp40.086 juta pada tahun 2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat konversi pinjaman pokok atas Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA) kepada Pemerintah menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN).

### Utang Bunga

Pada tahun 2016, Perseroan tidak membukukan adanya liabilitas dalam bentuk utang bunga sehingga mengalami penurunan 100% dari jumlah utang bunga tahun 2015 yaitu Rp57.893 juta.

### Uang Muka Diterima

Pada tahun 2016, uang muka diterima mengalami penurunan Rp8.028 juta atau 34,05% dari Rp23.580 juta pada tahun 2015 menjadi Rp15.552 pada tahun 2016. Penurunan tersebut sebagian besar dikarenakan uang muka diterima pasasi dan uang muka pelayanan kesehatan banyak yang sudah diakui menjadi penghasilan.

### Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka mengalami penurunan Rp10.952 juta atau 37,14% dari Rp29.493 juta pada tahun 2015 menjadi Rp18.541 juta pada tahun 2016. Penurunan tersebut sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya pendapatan diterima dimuka pasasi dan muatan.

### Utang Pajak

Pada tahun 2016, utang pajak tumbuh Rp9.145 juta atau 21,48% dari Rp42.579 juta pada tahun 2015 menjadi Rp51.724 juta pada tahun 2016. Peningkatan dikontribusikan oleh utang pungutan PPh pasal 25 tahun 2016.

### Utang Lain-lain

Pada tahun 2016, utang lain-lain sebesar Rp87.105 juta, mengalami penurunan sebesar Rp13.363 juta atau 13,30% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp100.468 juta. Penurunan ini dikarenakan terdapat pembayaran utang KSO atas modifikasi kapal KM. Dobonsolo dan KM. Ciremai.

### Accrued Expenses

In 2016, accrued expenses increased Rp78,915 million or 55.96% from Rp141,018 million booked in 2015 to Rp219,932 million in 2016. Increase was contributed from additional accrual expense in 2016.

### Short-Term Loans

In 2016, the Company did not book any liability as short-term loans.

### Current maturities of Long-Term Loans

In 2016, current maturities of long-term loans amounted to Rp40,086 million, decreased Rp195,546 million or 82.99% from Rp235,632 million in 2014 to Rp40,086 million booked in 2016. The increase was driven by conversion of loans principal on Subsidiary Loan Agreement (SLA) to the Government.

### Interest Payables

In 2016, the Company did not book any liabilities as interest payables that decreased 100% from total interest payables booked in 2015, Rp57,893 million.

### Advances Received

In 2016, advances received decreased Rp8,028 million or 34.05% from Rp23,580 million in 2015 to Rp15,552 million in 2016. Decrease was mainly contributed from Ticketing and health care advances received that had been recognized as revenues.

### Unearned Revenues

Unearned revenues decreased Rp10,952 million or 37.14% from Rp29,493 million in 2015 to Rp18,541 million booked in 2016. The decrease was primarily driven by decreasing revenues from ticketing and cargo.

### Tax Debt

In 2016, tax debt grew Rp9,145 million or 21.48% from Rp42,579 million in 2015 to Rp51,724 million in 2016. Increase was contributed from Income Tax Article 25 collection proceeds in 2016.

### Other Payables

In 2016, other payables amounted to Rp87,105 million, decreased Rp13,363 million or 13.30% if compared with Rp100,468 million booked in 2015. Decrease was due to Joint Operation loans payment for KM Dobonsolo and KM Ciremai ships modification.



### Liabilitas Jangka Panjang

Pada tahun 2016, liabilitas jangka panjang sebesar Rp155.439 juta, mengalami penurunan Rp247.129 juta atau 61,39% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp402.568 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat konversi pinjaman pokok atas Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA) kepada Pemerintah menjadi ekuitas/ Penyertaan Modal Negara.

### Liabilitas Imbalan Paska Kerja

Pada tahun 2016, liabilitas imbalan paska kerja sebesar Rp76.369 juta, meningkat sebesar Rp43.338 juta atau 131.21% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp33.031 juta. Peningkatan tersebut didorong perhitungan aktuaris atas kewajiban imbalan pasca kerja di tahun 2016.

### Pinjaman Jangka Panjang Jatuh Tempo Lebih Dari Satu Tahun

Pada tahun 2016, pinjaman jangka panjang jatuh tempo lebih dari satu tahun mengalami penurunan sebesar Rp290.468 juta atau 78,60% yaitu dari Rp369.537 juta pada tahun 2015 menjadi Rp79.070 juta pada tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat konversi pinjaman pokok atas Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA) kepada Pemerintah menjadi ekuitas.

### Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan sampai dengan 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp5.465.326 juta, mengalami peningkatan Rp777.672 juta atau 16,59% dari Rp4.687.64 juta pada tahun 2015. Pertumbuhan ekuitas Perseroan ini sebagian besar dikarenakan konversi pinjaman pokok atas Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA) kepada Pemerintah sebesar Rp564.807.589.000.

(dalam juta Rupiah)/(In Milion Rupiah)

Tabel Ekuitas Tahun 2016, 2015, Dan 2014/Table of Equity in 2016, 2015 and 2014

Ekuitas Equity	31 Desember 2016 December 31, 2016	31 Desember 2015* December 31, 2015*	31 Desember 2014* December 31, 2014*	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Different	%
Modal saham Capital Stock	7,065,092	7,065,092	6,565,092	-	-
(Modal dasar sebanyak 13.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 7.065.092 saham dengan nilai moninal Rp1.000.000 per saham) (As much as 13,000,000 shares Authorized, issued and fully paid shares 7.065.092 with a nominal value of Rp 1.000.000 per share)					

### Non-Current Liabilities

In 2016, non-current liabilities amounted to Rp155,439 million, decreased Rp247,129 million or 61.39% if compared with Rp402,568 million booked in 2015. Decrease was contributed from conversion of Subsidiary Loan Agreement (SLA) to Government as Equity.

### Employee Benefits Obligation

In 2016, employee benefits obligation amounted to Rp76,369 million, increased Rp43,338 million or 131.21% if compared with Rp33,031 million booked in 2015. Increase was driven by actuarial calculation on employee benefits obligation booked in 2016.

### Non-Current Maturities of Long-Term Loans

In 2016, non-current maturities of long-term loans decreased Rp290,468 million or 78.60% from Rp369,537 million booked in 2016 to Rp79,070 million in 2016. Decrease was due to conversion of Subsidiary Loan Agreement (SLA) to Government as Equity.

### Equity

As of December 31, 2016, total equity achieved Rp5,465,326 million, increased Rp777,672 million or 16.59% from Rp4,687.64 million in 2015. Increasing equity was primarily contributed from conversion of Subsidiary Loan Agreement (SLA) to Government of Rp564,807,589,000.

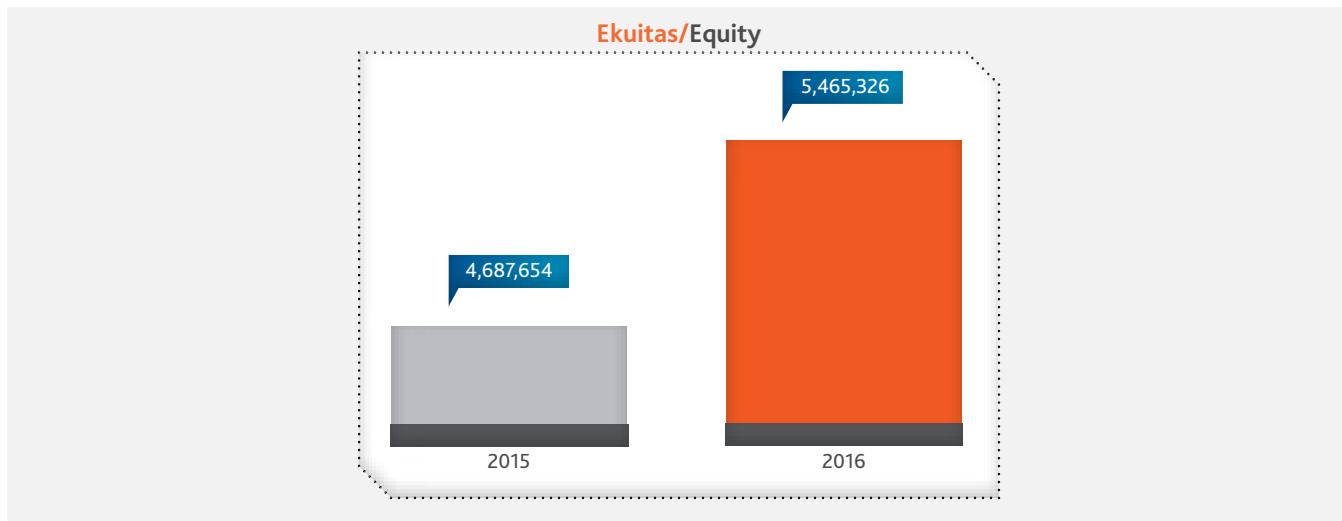


Tabel Ekuitas Tahun 2016, 2015, Dan 2014/Table of Equity in 2016, 2015 and 2014

Ekuitas Equity	31 Desember 2016 December 31, 2016	31 Desember 2015* December 31, 2015*	31 Desember 2014* December 31, 2014*	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
				Selisih Different	%
Cadangan Umum/General Reserves	164,190	66,534	55,530	97,657	146.78%
Penyertaan Modal Pemerintah Government Equity	564,951	144	144	564,808	393359.38%
Saldo Laba (Rugi) Retained Earnings (Loss)	(2,277,575)	(2,427,335)	(2,514,750)	149,760	-6.17%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Components	(52,735)	(17,812)	(19,892)	(34,922)	196.06%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	1,402	1,032	741	370	35.85%
<b>TOTAL EKUITAS/TOTAL EQUITY</b>	<b>5,465,326</b>	<b>4,687,654</b>	<b>4,086,865</b>	<b>777,672</b>	<b>16.59%</b>

\*Disajikan Kembali

\*Restated



## Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp248.773 juta, lebih tinggi Rp149.842 juta atau 151,46% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp98.931 juta. Pertumbuhan Laba Tahun berjalan tersebut mengakibatkan peningkatan laba per saham dasar/(Earnings Per Share – EPS) sebesar Rp35.159 per saham di tahun 2016 dibandingkan Rp13.962 per saham di tahun 2015. Total Laba Komprehensif tahun berjalan pada tahun 2016 lebih tinggi Rp114.343 juta atau 113,20% menjadi Rp215.352,95 juta dibanding dengan tahun 2015 sebesar Rp101.010,12 juta.

## Profit For The Year and Total Comprehensive Income

In 2016, profit for the year realization achieved Rp248,773 million that was Rp149,842 million or 151.46% higher than Rp98,931 million booked in 2015. Increasing profit for the year was resulting higher earnings per share (EPS) of Rp35,169 per share in 2016 if compared with Rp13,962 per share booked in 2015. Total Comprehensive Income for the year in 2016 was Rp114,343 million or 113.20% higher to Rp25,352.95 million if compared with Rp101,010.12 million booked in 2015.



(dalam juta Rupiah)/(In Milion Rupiah)

Tabel Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2016 dan 2015  
Table of Statements of Income and Other Comprehensive Incomes in 2016 and 2015

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Statements of Income and Other Comprehensive Income	2016	2015 *	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
			Selisih Different	%
Pendapatan Usaha/Operating Revenues	4,212,400	3,868,893	343,507	8.88%
Reduksi Pendapatan Usaha/Reduction in Operating Revenues	(10,648)	(15,265)	(4,617)	-30.24%
<b>Pendapatan Usaha Bersih/Gross Profit</b>	<b>4,201,752</b>	<b>3,853,628</b>	<b>348,124</b>	<b>9.03%</b>
Beban usaha/Operating Expenses	(3,454,325)	(3,293,408)	160,918	4.89%
<b>LABA USAHA/PROFIT (LOSS) GROSS</b>	<b>747,425</b>	<b>560,220</b>	<b>187,205</b>	<b>33.42%</b>
Beban Administrasi dan Umum General and Administrative Expenses	(507,146)	(446,066)	(61,081)	13.69%
Beban Pemasaran/ Marketing Expenses	(5,970)	(6,567)	(597)	-9.10%
<b>Laba (Rugi) Usaha/Profit (Loss) Business</b>	<b>234,309</b>	<b>107,588</b>	<b>126,722</b>	<b>117.78%</b>
Pendapatan (Beban Non Usaha)/ Financial Expenses				
Pendapatan Bunga/ Interest Income	36,168	8,401	(61,081)	13.69%
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih Income (Expenses) Other Net	29,292	31,018	(61,081)	13.69%
Beban Bunga Pinjaman/ Interest Expense Loan	(25,338)	(27,310)	(61,081)	13.69%
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak/Income (Loss) Before Tax</b>	<b>274,432</b>	<b>119,697</b>	<b>(61,081)</b>	<b>13.69%</b>
<b>Penghasilan (Beban) Pajak Benefit (Expense) Income Tax</b>				
Kini/Current	(34,453)	(31,521)	2,932	9.30%
Tangguhan/ Deferred	8,793	10,754	(1,961)	-18.24%
	(25,660)	(20,767)	(4,893)	23.56%
<b>Laba Tahun Berjalan/Profit Current Year</b>	<b>248,773</b>	<b>98,931</b>	<b>149,842</b>	<b>151.46%</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income</b>				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss				
Pengukuran kembali atas Program imbalan pasti Re-measurement, On Defined Benefit Plan	(33,419.55)	2,079.24	(35,499)	-1707.29%
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Items That Will Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss				
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak/Other Comprehensive Income For The Year After Tax	(33,419.55)	2,079.24	(35,499)	-1707.29%
<b>Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit Current Year</b>	<b>215,352.95</b>	<b>101,010.12</b>	<b>114,343</b>	<b>113.20%</b>



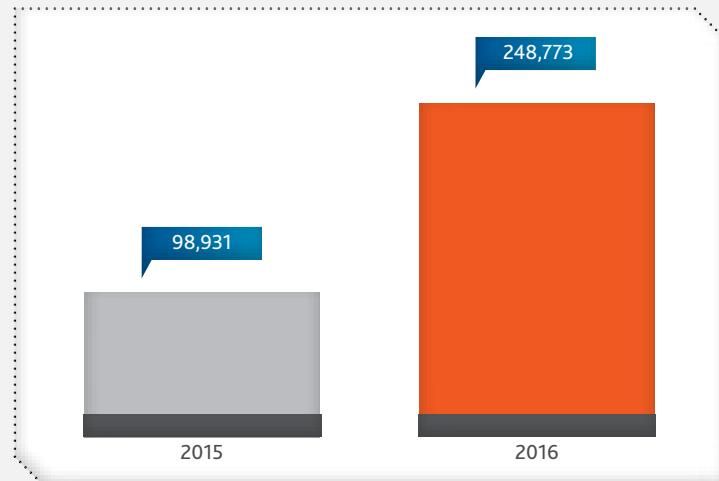
**Tabel Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Tahun 2016 dan 2015**  
**Table of Statements of Income and Other Comprehensive Incomes in 2016 and 2015**

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Statements of Income and Other Comprehensive Income	2016	2015 *	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
			Selisih Different	%
<b>Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:</b> Profit Current Year Attributable to:				
Pemilik entitas induk/ Owner of Parent Entity	248,403	98,643		
Kepentingan Nonpengendali/ Non-Controlling Interest	370	288	82	-28.46%
	248,773	98,931	149,842	151.46%
<b>Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:</b> Total Comprehensive Profit Attributable to:				
Pemilik entitas induk/Owner of Parent Entity	214,983	100,722	114,261	113.44%
Kepentingan Nonpengendali/Non-Controlling Interest	370	288	82	28.46%
	215,353	101,010		
<b>Laba Bersih Per Saham Dasar/Basic Earnings Per Share</b>	<b>35,159</b>	<b>13,962</b>		

\*Disajikan Kembali

\*Restated

### Laba Tahun Berjalan/Profit Current Year



### Pendapatan Usaha

Perseroan membukukan pendapatan usaha berasal dari penugasan pemerintah, tambang pasir, layanan kesehatan, tambang muatan, pendapatan Kapal Perintis, bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, tambang muatan Tol Laut, *repair docking*, sewa ruangan kapal, sewa ruangan wisma, tambang pasir perintis, keagenan dan angkutan bandar, pendapatan kapal ternak, tambang muatan perintis, rede transport, pendapatan sewa gedung dan pendapatan lainnya.

### Operating Revenues

The Company booked operating revenues from government assignments, ticketing, health services, freight, pioneer ship, loading and unloading, sea cargo ship, charges of Tol Laut cargo, repair docking, rent spa ships, rent homestead, ticketing of pioneer, agency, cattle ship, pioneer freight, rede transport, building rental income and others.



Pada tahun 2016, pendapatan usaha tumbuh Rp343.507 juta atau 8,88% dari Rp3.668.893 juta pada tahun 2015 menjadi Rp4.212.400 juta pada tahun 2016. Peningkatan tersebut didorong oleh pendapatan perkапalan atas tambahan penugasan program pemerintah (Tol Laut, Perintis, dan Ternak) dan meningkatnya pendapatan anak perusahaan di tahun 2016.

### **Pendapatan Usaha Bersih**

Pendapatan usaha bersih merupakan perolehan pendapatan usaha setelah dikurangi reduksi pendapatan usaha. Pada tahun 2016, Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp4.201.752 juta atau mengcatat pertumbuhan sebesar Rp348.124 juta atau 9,03% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp3.853.628 juta. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha dan menurunnya reduksi pendapatan atas tiket penumpang.

### **Laba Usaha**

Perseroan mencatat laba usaha sebesar Rp747.425 juta pada tahun 2016, meningkat sebesar Rp187.205 juta atau 33,42% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp560.220 juta. Pertumbuhan laba usaha didorong oleh meningkatnya pendapatan usaha khususnya perkapan dan usaha anak perusahaan.

### **Laba (Rugi) Usaha**

Perseroan membukukan laba (rugi) usaha sebagai perolehan Laba Usaha dikurangi beban administrasi dan umum dan beban pemasaran. Pada tahun 2016, laba (rugi) usaha sebesar Rp234.309 juta, mencatat pertumbuhan sebesar Rp126.722 juta atau 117,78% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp107.588 juta. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan bertambahnya pendapatan bunga deposito di tahun 2016.

### **Laba (Rugi) Sebelum Pajak**

Pada tahun 2016, Perseroan membukukan laba (rugi) sebelum pajak sebesar Rp274.432 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp154.735 juta atau 129,27% dibandingkan tahun 2015 yaitu Rp119.697 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh berkurangnya beban bunga pinjaman sebesar Rp1.971.347.899.

### **Penghasilan (Beban) Pajak**

Perseroan membukukan penghasilan (beban) pajak sebesar Rp25.660 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.893 juta atau 23,56% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp20.767 juta. Peningkatan penghasilan (beban) pajak disebabkan oleh meningkatnya PPh badan kini menjadi Rp34.452.830.066 di tahun 2016.

### **Laba Tahun Berjalan**

Per 31 Desember 2016, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp248.773 juta, meningkat sebesar Rp149.842 juta atau 151,46% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp98.931 juta. Realisasi pertumbuhan laba tahun berjalan dikontribusikan oleh peningkatan laba rugi usaha di tahun 2016.

In 2016, operating revenues grew Rp343,507 million or 8.88% from Rp3,668,893 million in 2015 to Rp4,212,400 million in 2016. Increase was driven by shipping revenues from additional government assignments (Tol Laut, pioneer and cattle) and increasing revenues from subsidiaries in 2016.

### **Gross Profit**

Gross profit is result of deduction of operation revenues after reduction in operating revenues. In 2016, the Company booked gross profit of Rp4,201,752 million or recorded Rp348,124 million or 9.03% growth if compared with Rp3,853,628 million. Growth was driven by increasing operating revenues and decreasing reduction in operating revenues from passenger ticket.

### **Operating Profit**

The Company booked operating profit of Rp747,425 million in 2016, increased by Rp187,205 million or 33.42% if compared with Rp560,220 million. Increasing profit business was driven by higher gross profit realization, primarily shipping and subsidiary business.

### **Profit (Loss) Business**

The Company booked profit (loss) business as acquisition of operating profit deduced by general and administrative and marketing expenses. In 2016, profit (loss) business achieved Rp234,309 million, recorded Rp126,722 million or 117.78% growth if compared with Rp107,588 million booked in 2015. Increase was namely contributed from increasing interest income from time deposit in 2016.

### **Income (Loss) Before Tax**

In 2016, the Company booked Income (loss) before tax achieved Rp274,432 million, increased Rp154,735 million or 129.27% if compared with Rp119,697 million booked in 2015. Increase was driven by decreasing loans interest expense by Rp1,971,347,899.

### **Income Tax Benefit (Expense)**

The Company booked income tax benefit (expense) Rp25,660 million, recorded Rp4,893 million or 23.56% growth if compared with Rp20,767 million booked in 2015. Increasing income tax benefit (expense) was contributed from increasing entity current Income Tax to Rp34,452,830,066 in 2016.

### **Profit For The Year**

As of December 31, 2016, the Company booked profit for the year of Rp248,773 million, increased by Rp149,842 million or 151.46% if compared with Rp98,931 million booked in 2015. Realization of profit for the year growth was contributed from increasing operating income (loss) booked in 2016.



## Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Per 31 Desember 2016, Perseroan membukukan total laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp215.352,95 juta, meningkat sebesar Rp114.343 juta atau 113,20% dari tahun 2015 sebesar Rp101.010,12 juta. Realisasi pertumbuhan total laba komprehensif tahun berjalan dikontribusikan oleh peningkatan laba rugi usaha.

## Arus Kas

Saldo kas dan setara kas akhir tahun 2016 mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun 2015 dari Rp839.091 juta menjadi Rp1.601.599 juta pada tahun 2016, tumbuh sebesar Rp762.508 juta atau 90,87%. Pertumbuhan kas dan setara kas pada akhir tahun tersebut dikontribusikan oleh penerimaan *Public Service Obligation* serta adanya subsidi terhadap pengoperasian Kapal Tol Laut, Ternak dan Perintis.

(dalam juta Rupiah)/(in Million Rupiah)

Tabel Laporan Arus Kas Tahun 2016, 2015 Dan 2014  
Table of Statements of Cash Flows in 2016, 2015 and 2014

Laporan Arus Kas Statements of Cash Flows	2016	2015	Kenaikan/(Penurunan) English	
			Selisih English	%
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	788,812	121,629	667,183	548.54%
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities	(54,066)	(90,809)	36,744	-40.46%
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	27,760	437,756	(409,996)	-93.66%
Penurunan Bersih Kas Dan Setara Kas Net Increase (Decrease) In Cash And Cash Equivalent	762,507	468,576	293,931	62.73%
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun Beginning Balance Cash And Cash Equivalent	839,091	370,515	468,576	126.47%
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun Ending Balance Cash And Cash Equivalent	1,601,599	839,091	762,508	90.87%

## Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp788.812 juta, meningkat sebesar Rp667.183 juta atau 548,54% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp121.629 juta. Peningkatan arus kas dari aktivitas operasi secara signifikan terutama dikontribusikan oleh penerimaan *Public Service Obligation* serta Subsidi atas pengoperasian Kapal Tol Laut, Kapal Ternak dan Kapal Perintis.

## Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2016 sebesar (Rp54.066) juta, mengalami penurunan Rp36.744 juta atau 40,46% dibandingkan tahun 2015 sebesar (Rp90.809) juta. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi diakibatkan oleh penurunan pengeluaran kas atas pembelian aset tetap, aset dalam penyelesaian dan aset lain-lain.

## Total Comprehensive Income For The Year

Asof December 31, 2016, the Company booked total comprehensive income for the year amounted to Rp215,352.95 million, increased Rp114,343 million or 113.20% from Rp101,010.12 million booked in 2015. Realization of total comprehensive income for the year was contributed from increasing operating income (loss).

## Cash Flows

At the end of 2016, cash and cash equivalent balance recorded significant growth if compared with Rp839,091 million booked in 2015 to Rp1,601,599 million in 2016, grew Rp762,508 million or 90.87%. Increasing cash and cash equivalents at the end of the year that was contributed from Public Service Obligation and subsidy for operations of Tol Laut, Cattle and Pioneer Ships.

## Cash Flows from Operating Activities

In 2016, net cash flows from operating activities achieved Rp788,812 million, grew Rp667,183 million or 548.54% if compared with Rp121,629 million that was booked in 2015. Increasing cash flows from operating activities significantly was mainly contributed from Public Service Obligation income and Subsidy on the operations of Tol Laut, Cattle and Pioneer ships.

## Cash Flows from Investing Activities

In 2016, net cash flows from investing activities achieved (Rp54,066) million or decreased Rp36,744 million or 40.46% if compared with (Rp90,809) million booked in 2015. Decrease in the net cash flows for investing activities was due to a decrease in outflow cash from fixed assets purchase, assets under construction and other assets.



### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan di tahun 2016 sebesar Rp27.760 juta, mengalami penurunan sebesar Rp409.996 juta atau 93,66% dibandingkan tahun 2015 yaitu Rp437.756 juta. Penurunan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut diakibatkan oleh pada tahun 2015 terdapat penerimaan atas dana PMN sebesar Rp500.000.000.000 di mana pada tahun 2016, Perseroan hanya membukukan aktivitas pendanaan dari pinjaman bank.

### Rasio Kinerja Keuangan

### Cash Flows from Financing Activities

In 2016, cash flows from financing activities achieved Rp27,760 million or decreased Rp409,996 million or 93.66% if compared with Rp437,756 million booked in 2015. The decrease in cash flows was contributed form PMN proceeds in 2015 of Rp500,000,000,000 where in 2016 the Company only booked financing activity from bank loans.

### Financial Ratio

Rasio Usaha	2016	2015	2014	2013	2012	Operating Ratio
<b>Rasio Usaha /Operating Ratio</b>						
Rasio Laba Terhadap Aset	3.98%	1.68%	0.08%	18.93%	42.00%	Return on Assets (ROA)
Rasio Laba Terhadap Ekuitas	4.72%	2.11%	0.11%	16.52%	0.51%	Return on Equity (ROE)
Rasio Laba Kotor Terhadap Pendapatan	18.40%	14.48%	8.58%	2.30%	12.18%	Net Profit Margin
Rasio Laba Terhadap Pendapatan	5.55%	2.56%	0.14%	26.85%	0.89%	Gross Profit Margin
<b>Rasio Keuangan/Financial Ratio</b>						
Rasio Lancar	430.71%	256.71%	155.31%	158.67%	266.53%	Current Ratio
Rasio Kas	271.31%	107.71%	38.02%	50.54%	90.53%	Cash Ratio
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	13.65%	25.71%	30.56%	32.12%	21.73%	Debt to Equity Ratio
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	12.01%	20.45%	23.41%	24.31%	17.85%	Debt to Assets Ratio
<b>Rasio Pertumbuhan/Growth Ratio</b>						
Penjualan	15.04%	30.00%	20.00%	-837.00%	9.72%	Sales
Laba Bersih	106.92%	2151.00%	101.00%	-2671.94%	1634.85%	Net Income
Jumlah Aset	5.40%	10.00%	-0.40%	-6.85%	-0.49%	Total Assets
Jumlah Ekuitas	16.60%	15.00%	0.78%	-14.71%	-0.80%	Total Equity

Per 31 Desember 2016, berdasarkan capaian rasio usaha, PT PELNI (Persero) mencatat pertumbuhan Rasio Laba Terhadap Aset menjadi 3,98% dari 1,68% pada tahun 2015. Seiring dengan perbaikan Rasio Laba Terhadap Aset, PT PELNI (Persero) juga membukukan Rasio Laba Terhadap Ekuitas lebih tinggi dari 2,11% pada tahun 2015 menjadi 4,72% pada tahun 2016.

As of December 31, 2016, based on business ratio achievement, PT PELNI (Persero) booked Return on Assets Ratio of 3.98% from 1.68% in 2015. In line with improving Return on Assets Ratio, PT PELNI (Persero) also booked higher Return on Equity Ratio that was 2.11% higher if compared with 2015, to 4.72% in 2016.



Perbaikan Rasio Laba Terhadap Aset dan Rasio Laba Terhadap Ekuitas tersebut didorong oleh peningkatan realisasi Laba Bersih selama tahun 2016.

## Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga selama tahun 2016 dapat dilihat dari rasio likuiditas Perseroan. Rasio likuiditas yang dihitung dengan cara aset lancar dibagi liabilitas lancar lebih tinggi 343,91% atau sebesar 832,85%. Hal ini menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek Perseroan meningkat di tahun 2016.

### Rasio Likuiditas

#### 1. Rasio Kas

Perseroan menunjukkan angka rasio kas sebesar 271,31 %, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 104,54 %. Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar yang lebih *liquid* (*liquid assets*).

#### 2. Rasio Lancar

Rasio lancar pada tahun 2016 menunjukkan angka 430,71 %, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 256,71%. Hal ini menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek Perseroan meningkat di tahun 2016.

## Tingkat Kolektibilitas Piutang

Selama tahun 2016, periode penagihan piutang terhitung selama 24 hari atau mengalami kenaikan dari periode penagihan di tahun 2015 yang terhitung selama 13 hari. Kenaikan periode penagihan piutang menunjukkan adanya peningkatan piutang dan penjualan pada 2016.

Improving Return on Assets and Return on Equity Ratio were driven by increasing Net Profit realization throughout 2016.

## Solvency

The Company's capability to settle liabilities with third parties throughout 2016 is indicated by liquidity ratio. The liquidity ratio is calculated by dividing current assets to current liabilities that was 343.91% higher or 832.85%. This indicated the Company has better capability to settle short-term liabilities in 2016.

### Liquidity Ratio

#### 1. Cash Ratio

The Company booked cash ratio of 271.31%, or improved from 104.54% booked in 2015. Cash ratio is applied to measure the Company's capability in paying current liabilities backed by current assets with more liquid assets.

#### 2. Current Ratio

In 2016, current ratio stood at 430.71% or higher than 256.71% booked in 2015. This indicated the Company has better capability to settle current liabilities in 2016.

## Receivables Collectability Period

Throughout 2016, receivables collection period was recorded 24 days or longer than collection period of 13 days in 2015. The longer receivables collection period indicated increasing receivables and sales in 2016.

**Tabel Kolektibilitas Piutang (Dalam Jutaan Rupiah)**  
Table of Receivables Collectability (in million Rupiah)

Rasio Ratio	Tahun/ Year		
	2016	2015	2014
Piutang Usaha/ Account Receivables	272.795	185.895	114.125
Pendapatan Usaha/ Operating Revenues	4.212.400	3.868.893	2.986.630
Lama Penagihan Rata-rata (hari)/ Average Collection Period (days)	24	13	9
Rasio Perputaran Piutang (%)/ Receivables Inventory Ratio (%)	6,48%	4,80%	3,82%



## Struktur Modal Dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

## Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Komposisi Struktur Modal Capital Structure Composition	31 Desember 2016 December 31, 2016		31 Desember 2015 December 31, 2015		31 Desember 2014 December 31, 2014		Perubahan (%) Different (%)
	Jumlah (Rp juta) Total (Rp million)	%	Jumlah (Rp juta) Total (Rp million)	%	Jumlah (Rp juta) Total (Rp million)	%	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	590,326	9.50%	802,673	13.62%	862,434	16.16%	-26.45%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	155,439	2.50%	402,568	6.83%	386,569	7.24%	-61.39%
Total Liabilitas Total Liabilities	745,765	12.01%	1,205,242	20.45%	1,249,003	23.41%	-38.12%
Ekuitas/Equity	5,465,326	87.99%	4,687,654	79.55%	4,086,865	76.59%	16.59%
Total Aset Total Assets	6,211,091	100.00%	5,892,896	100.00%	5,335,868	100.00%	5.40%

Struktur modal Perseroan lebih didominasi oleh ekuitas dibandingkan dengan liabilitas. Pada tahun 2016, aset yang dibiayai oleh liabilitas sebesar 12,01% lebih rendah dibandingkan tahun 2015 sebesar 20,45%. Adapun aset yang dibiayai oleh ekuitas pada tahun 2016 sebesar 87,99% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 79,55%.

Capital structure of the Company is dominated by equity than liabilities. In 2016, total assets financed by liabilities was 12.01% or lower than 20.45% in 2015. The assets backed by equity achieved 8.99% in 2016 or was higher than 79.55% in 2015.



## Ikatan Yang Material Untuk Investasi Barang Modal

## Material Commitment on Capital Expenditure

No.	Investasi Investment	Tujuan Purpose	Sumber Dana Source of Funds	Nilai Investasi Investment Value	Langkah-langkah yang Direncanakan Perusahaan untuk Melindungi Risiko dari Posisi Mata Uang Asing yang Terkait Initiatives Planned by the Company to Prevent Risk from Related Foreign Currency
1.	Alat Kesehatan Medical Device	Peralatan PT. Rumah Sakit PELNI Equipment for PT Rumah Sakit PELNI	Dana Sendiri Equity	Rp10.096Juta/ Million	Tidak ada risiko mata uang asing No Foreign Currency Risk
2.	Bangunan RS Hospital Building	Menunjang Kelengkapan Fasilitas Ruang di RS. PELNI To support room facility at RS PELNI	Dana Sendiri Equity	Rp8.901Juta/ Million	Tidak ada risiko mata uang asing No Foreign Currency Risk
3.	Alat Bongkar Muat Loading and Unloading Equipment	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional PT. SBN To support operational equipment for PT SBN	Dana Sendiri Equity	Rp6.329Juta/ Million	Tidak ada risiko mata uang asing No Foreign Currency Risk
4.	Alat Produksi Lainnya Other means of production	Menunjang Kelengkapan Perlatan Operasional usaha perbungkelan, Hotel Bahtera, Kantor pusat dan cabang. To support operational equipment for warehouse, Bahera Hotel, Head and Branch Offices	Dana Sendiri Equity	Rp6.472Juta/ Million	Tidak ada risiko mata uang asing No Foreign Currency Risk
5.	Renovasi Gedung Building Renovation	Fasilitas Gedung kantor dan Rumah office building and house facilities	Dana Sendiri Equity	Rp13.484Juta/ Million	Tidak ada risiko mata uang asing No Foreign Currency Risk
6.	Kendaraan Bermotor Vehicle	Fasilitas Kendaraan bermotor untuk operator kantor Operational vehicle facility for office	Dana Sendiri Equity	Rp1.141Juta/ Million	Tidak ada risiko mata uang asing No Foreign Currency Risk
7.	Investasi Kantor Office Investment	Menjunjang Kelengkapan Fasilitas Kantor To Support Office Facility	Dana Sendiri Equity	Rp21.244Juta/ Million	Tidak ada risiko mata uang asing No Foreign Currency Risk



## Investasi Barang Modal

Perseroan melakukan investasi barang modal pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Investasi Investment	Tujuan Investasi Investment Purpose	Nilai Investasi (Rp juta) Investment Value (Rp million)
1	Alat Kesehatan Medical Device	Peralatan PT. Rumah Sakit PELNI Equipment for PT Rumah Sakit PELNI	Rp. 10.096 juta/ Million
2	Bangunan RS Hospital Building	Menunjang Kelengkapan Fasilitas Ruang di RS. PELNI To support room facility at RS PELNI	Rp. 8.901 juta/ Million
3	Alat Bongkar Muat Loading and Unloading Equipment	Menunjang kelengkapan peralatan operasional PT. SBN To support operational equipment for PT SBN	Rp. 6.329 juta/ Million
4	Alat Produksi Lainnya Other means of production	Menunjang kelengkapan peralatan operasional usaha perbengkelan, Hotel Bahtera, kantor pusat dan cabang To support operational equipment for warehouse, Bahera Hotel, Head and Branch Offices	Rp. 6.472 juta/ Million
5	Renovasi Gedung Building Renovation nglish	Menunjang Fasilitas Gedung Kantor dan Rumah Dinas To support office building and house facilities	Rp. 13.484 juta/ Million
6	Kendaraan Bermotor Vehicle	Menunjang Fasilitas Kendaraan bermotor untuk operasional kantor To Support Operational vehicle facility for office	Rp. 1.141 juta/ Million
7	Investasi Kantor Office Investment	Menunjang kelengkapan fasilitas Kantor To Support Office Facility	Rp. 21.244 juta/ Million
Jumlah/ Total			Rp. 67.666 juta/ Million

## Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil Yang Dicapai (Realisasi), Dan Target Atau Proyeksi Yang Ingin Dicapai Untuk Satu Tahun Mendatang

## Capital Expenditure

The Company allocated capital expenditure investment in 2016, with detail as follows:

Comparison between Target at Beginning of Fiscal Year with Achievement (Realizatin) and Target or Projection for Next Year

No.	Uraian Description	Realisasi Audited 2015 Audited Realization 2015	Tahun 2016 Years 2016		RKAP 2017	5:4	5:3	6:5
			RKAP	REALISASI Realization				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. USAHA/Business:								
1.	PEMDAPATAN/Revenue:							
a.	Pendapatan Usaha Perkapalan Shipping Business Income	3,351,176	4,739,850	3,609,268	4,654,777	76.15	107.70	128.97
b.	Pendapatan Usaha Non Perkapalan Non-Shipping Business Income	56,872	79,381	40,346	89,939	50.83	70.94	222.92
c.	Pendapatan Perusahaan Anak Income From Subsidiaries	484,153	773,782	828,064	1,035,909	107.02	171.03	125.10
Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Revenues		3,892,201	5,593,013	4,477,678	5,780,626	80.06	115.04	121.10
2.	BIAYA/Expenses:							
a.	Biaya Usaha Perkapalan Shipping Business Expense	3,011,984	4,314,728	3,110,237	4,058,397	72.08	103.26	130.49



## Laporan Tahunan 2016 Annual Report

PT PELNI (Persero)

No.	Uraian Description	Realisasi Audited 2015 Audited Realization 2015	Tahun 2016 Years 2016		RKAP 2017	5:4	Prosentase Percentage	
			RKAP	REALISASI Realization			5:3	6:5
b.	Biaya Usaha Non-Perkapalan Non-Shipping Operating Expenses	26,315	31,607	18,983	49,818	60.06	72.14	262.43
c.	Biaya Perusahaan Anak Operating Expenses in Subsidiaries	255,109	486,573	524,481	683,681	107.79	205.59	130.35
	Jumlah Biaya usaha Total Operating Expenses	3,293,408	4,832,908	3,653,701	4,791,896	75.60	110.94	131.15
	Laba/Rugi Kotor Usaha Gross Operating Profit/Loss	598,793	760,105	823,977	988,730	108.40	137.61	119.99
II.	Biaya overhead/ Overhead Cost:	452,633	520,313	521,542	577,592	100.24	115.22	110.75
	Laba/rugi bersih usaha Net Operating income/loss	146,161	239,791	302,435	411,138	126.12	206.92	135.94
III.	DILUAR USAHA/ Non-Business							
a.	Pendapatan/ Revenues	185,873	54,958	71,491	53,860	130.08	38.46	75.34
b.	Biaya/ Expenses	173,764	43,390	56,254	46,007	129.65	32.37	81.78
	Laba di luar usaha Non-Operating Expenses	12,110	11,568	15,237	7,853	131.72	125.83	51.54
	L/R SENDIRI SEBELUM PAJAK Separated Income/Loss Before Tax	158,270	251,359	317,672	418,991	126.38	200.72	131.89
IV	Manfaat (besaran) pajak penghasilan Income Tax Benefit (Expense)							
	-Final/ Final	38,573	56,878	43,240	55,857	76.02	112.10	129.18
	-Kini/ Current	31,521	29,788	34,453	57,511	115.66	109.30	166.93
	-Tangguhan/ Deferred	(10,754)	-	(8,793)	-	0.00	81.76	-
		59,339	86,666	68,900	113,368	79.50	116.11	164.54
	L/R Sebelum kepentingan non pengendali/Income/Loss Before Non-Controlling Interest	98,931	164,693	248,773	305,623	151.05	251.46	122.85
V	Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	288	-	370	-	0.00	128.46	-
VI	Laba/Rugi Konsolidasian English	98,643	164,693	248,403	305,623	150.83	251.82	123.04
VII	Pendapatan (bebani) Komprehensif lain Other Comprehensive Incomes	2,079	0	(33,420)	-	0.00	0.00	-
VIII	Laba/Rugi Komprehensif Comprehensive income/loss	100,722	164,693	214,983	305,623	130.54	213.44	142.16

Realisasi Hasil Usaha Tahun 2016 Perusahaan memperoleh laba sebesar Rp248,403 juta atau 150.83% dari anggaran laba sebesar Rp164,693 juta, dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 laba sebesar Rp 98,643 juta mengalami peningkatan sebesar Rp149,760 juta atau 151.82%. Nilai EBITDA perusahaan positif/laba sebesar Rp603.197 juta.

In 2016, operating result realization booked profit of Rp248.403 million or 150.83% from profit target of Rp164.693 million, and if compared with realization in 2015 that recorded profit of Rp98.643 million experienced positive growth by Rp149.760 million or 151.82%. The Company booked EBITDA as positive/profit of Rp603.197 million.



Target Laba perusahaan Tahun 2017 adalah sebesar Rp305,623 juta atau 142.16% dibandingkan Tahun 2016. Penghasilan di tahun 2017 diharapkan dapat meningkat sebesar 29.10% atau sebesar Rp1,302,948 juta dari tahun 2016.

### Informasi Material Mengenai Ekspansi, Divestasi, Akuisisi Dan Restrukturisasi Hutang Dan Modal

#### Ekspansi

Hingga 31 Desember 2016, Perseroan Tidak Melakukan Aktivitas Terkait Ekspansi.

#### Divestasi

Hingga 31 Desember 2016, Perseroan Tidak Melakukan Aktivitas Terkait Divestasi.

#### Akuisisi

Hingga 31 Desember 2016, Perseroan Tidak Melakukan Aktivitas Terkait Akuisisi.

#### Restrukturisasi Hutang Dan Modal

Hingga 31 Desember 2016, Perseroan Tidak Melakukan Aktivitas Terkait Restrukturisasi Hutang Dan Modal.

### Informasi Dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Hingga akhir tahun 2016, Perseroan tidak memiliki informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan sehingga Laporan Tahunan 2016 tidak menyajikan informasi dan fakta material terkait tanggal kejadian, jenis dan uraian, serta dampak kejadian.

### Prospek Usaha

Indonesia adalah negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah berupa perairan dengan letak geografis antara 95° sampai 142° Bujur Timur dan membentang antara 6° Lintang Utara sampai dengan 11° Lintang Selatan yang memiliki 5 (lima) Pulau Besar dan 183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu) pulau atau yang terbujur dari Sabang Sampai Merauke dan terbentang dari Miangas sampai Pulau Rote.

Oleh karenanya dalam rangka membuka isolasi peradaban dan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lain diperlukan adanya sarana transportasi yang memadai yang dapat menghubungkan antara satu daerah ke daerah lain, sehingga dapat mengkomunikasikan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang berada disuatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang tidak terlalu lama, meskipun daerah tersebut dipisahkan oleh geografi yang terpisah-pisah antara satu tempat dengan tempat yang lain yang tersebar diseluruh bumi Nusantara yang dihuni oleh sekitar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) jiwa dengan penduduk dibelahan lain dunia ini. Hal

In 2017, the Company targeted profit to achieve Rp305.623 million or 142.16% if compared with 2016. In 2017, Revenues is expected to grow by 29.10% or Rp1,302,948 million from 2016.

### Material Information On Expansion, Divestment, Acquisition And Debt And Capital Restructuring

#### Expansion

As Of December 31, 2016, The Company Did Not Execute Any Activity Related With Expansion.

#### Divestment

As Of December 31, 2016, The Company Did Not Execute Any Activity Related With Divestment.

#### Acquisition

As Of December 31, 2016, The Company Did Not Execute Any Activity Related With Acquisition.

#### Debt And Capital Restructuring

As Of December 31, 2016, The Company Did Not Execute Any Activity Related With Debt And Capital Restructuring.

### Subsequent Material Information and Fact After Accountant Reporting Date

As end of 2016, the Company did not record subsequent material information and fact after accountan reporting date, therefore, the Annual Report 2016 did not present material information and fact related with event date, type and description as well as impact.

### Business Prospect

Indonesia is an archipelago whose two per third of the territory is ocean and located at 95° until 142° East Longitude and 6° North Latitude until 11° 1 South Latitude with 5 (five) Main Islands and 183,000 (one hundred and eighty three thousand) islands located from Sabang until Merauke and spread across Miangas until Rote Island.

Therefore, in order to eliminate civilization and economy barrier among one region to another, an adequate means of transportation to connect one region to another is needed, as well as to communicate one person to another who are located in one place to other places in relatively short time, despite the regions are separated geographically where all of the area that are located nationwide are inhabited by total population of 250,000,000 (two hundred and fifty million) where the



ini hanya dapat dilakukan dengan transportasi yang memadai diantaranya menggunakan transportasi kapal laut yang salah satunya diusahakan oleh PT PELNI (Persero).

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas PT PELNI (Persero) yang merupakan salah satu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara, memiliki tugas yang mulia sebagai perusahaan yang bergerak dalam transportasi laut, diharapkan akan dapat mengatasi segala hal yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Selain itu PT PELNI (Persero) diharapkan menjadi katalisator terhadap tumbuhnya perekonomian daerah dan terbukanya isolasi yang memisahkan antara satu orang dengan yang lainnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, satu adat dengan istiadat yang lain dan akan menjadi perekat sesama anak bangsa dan dunia, sehingga dapat menjalin komunikasi antara negara-negara yang berada di belahan bumi ini.

Apalagi Pemerintah Republik Indonesia seperti yang telah disampaikan dalam pidatonya oleh Presiden Republik Indonesia ketujuh yang menginginkan Indonesia dapat terhubung antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga meminimalisasi kesenjangan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya PT PELNI (Persero) diharapkan akan dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain memiliki tugas untuk menghubungkan dan membuka isolasi daerah yang terpencil, maka dengan keberadaan PT PELNI (Persero) yang memiliki *core business* Transportasi menggunakan kapal laut yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia terhadap negara lain, diharapkan akan membawa perubahan *mind set* (pola pikir) masyarakat di daerah yang sebelumnya terisolasi menjadi lebih moderat sehingga menjadi bangsa yang maju peradabannya di dunia dan tidak ada lagi istilah daerah tertinggal dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga semua orang menjadi manusia yang tinggi peradabannya. Disamping itu PT PELNI (Persero) diharapkan akan dapat menggapai VISI-nya yaitu " Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Menjadi Pilihan Utama Masyarakat ", dengan Misi:

- Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksebilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara.
- Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan, serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
- Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi dan pengembangan kompetisi Sumber Daya Manusia.
- Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (stakeholder) dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

remaining population live in other part of the globe. This is only possible to be done through sufficient transportation using marine vessels transportation as operated by PT PELNI (Persero).

To solve the issues mentioned above, PT PELNI (Persero) is one of company whos shares are fully owned by the Government with noble assignment as an enterprise that is operated in marine transportation business and expected to overcome every issue to bridge one area with another. In addition, PT PELNI (Persero) is also expected to be the catalyst of regional economy growth and to eliminate barrier that separated one person to another as well as one location to another, one custom to another that will strengthen binding among all youth in the nation and the world, to engage in international communication around the world.

Furthermore, The Republic of Indonesia Government, as stated in the seventh speech of Republic of Indonesia President that wished Indonesia to be connected on all regions and to minimize disparity among the regions, therefore, PT PELNI (Persero) is expected to safeguard the unity of Republic of Indonesia as a nation.

Besides the duty to connect and eliminate barrier of the remote area, existence of PT PELNI (Persero) with Transportation as core business uses marine vessels as proud of Indonesia as a nation towards other countries, the Company is expected to bring mindset transformation for the society in rural area who are previously isolated to become more moderate into a nation with progressive civilization in the world and to eliminate the terms of marginal region in the mean time, to develop all people with high civilization. In addition, PT PELNI (Persero) is also expected to achieve its vision "To Become a Strong Shipping Company and Customers Preferred Choice," with the mission:

- Managing and developing marine transportation to ensure public accessibility to support the realization of National Outlook (Wawasan Nusantara).
- Raising revenue contribution for the country, employees, as well as taking part on the development of environment and public services.
- Enhancing corporate value throughout creativity, innovation and human capital competency development.
- Operating fair business by promoting mutual beneficiary principle for all stakeholders and implementing the Good Corporate Governance (GCG).



Begitu banyaknya tempat yang indah telah dilimpahkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan jumlah penduduk yang saat ini menduduki peringkat keempat di dunia, memerlukan sarana transportasi khususnya melalui laut, sehingga dapat bertatap muka antara satu orang dengan orang yang lain antara penduduk satu daerah dengan daerah yang lain dan satu negara dengan negara yang lain didunia ini. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu sarana transportasi diantaranya menggunakan sarana kapal laut, sehingga PT PELNI (Persero) sangatlah dinanti kehadirannya

## Aspek Pemasaran

Pada tahun 2016, Perseroan merealisasikan program kerja di bidang pemasaran, sebagai berikut:

No	Informasi yang diperlukan Required Information	Penjelasan Explanation
a	Program Kerja Tahun 2016 Working Program 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan New PELNI Ticketing System <i>New PELNI Ticketing System Development</i></li> <li>Pengadaan Blanke Single Ticket <i>Single Ticket Form Procurement</i></li> <li>Pengadaan Perangkat Cetak Tiket Mandiri <i>Self-Printed Ticket Device Tender</i></li> <li>Campaign Tools Sosialisasi NPTS <i>NPTS Socialization Campaign Tools</i></li> <li>Stock Opname Ticket/Ticket Stock Opname</li> <li>Sosialisasi NPTS/Socialization of NPTS</li> <li>Pengadaan perangkat penunjang admin over bagasi <i>Over-baggage admin supporting device procurement</i></li> <li>Sertifikasi, Pelatihan, Study Visit SDM <i>Personnel Certification, Training and Study Visit</i></li> <li>Pengadaan Petugas Penukaran Tiket dan Reservasi <i>Ticket Exchange and Reservation Officers Procurement</i></li> </ul>
b	Kendala Pelaksanaan Program Kerja 2016 Issues of Working Program 2016 Implementation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian modul aplikasi NPTS hanya 70%, terkendala keterlambatan dari <i>developer</i> aplikasi <i>Completion of NPTS application module is only 70%, constrained by delay from the application developer</i></li> <li>Program Kerja Pengadaan Perangkat Penunjang Admin kapal dan Overbagasi tidak dapat dilaksanakan jika modul aplikasi belum terselesaikan 100% <i>Ship and Over-baggage Supporting Device Procurement failed to be implemented if the application module has not yet 100% completed</i></li> <li>Program Kerja Pengadaan Perangkat Cetak Tiket Mandiri dan Petugas Penukaran Tiket terkendala oleh terbatasnya opsi perangkat penukaran tiket yang sesuai dengan spesifikasi tiket PELNI <i>Self-Printed Ticket Device and Ticket Exchange Officer Procurement Working Plans were constrained due to limited ticket exchange device option according to specs of PELNI ticket.</i></li> </ul>

With many beautiful landscape as blessing from The Almighty God for Indonesia comprising of thousand of islands with total population reaching the fourth rank in the world, the Country requires means of transportation, particularly sea transportation to connect one person to another and people who live in one area to another as well as one country to another worldwide. Therefore, a required transportation includes marine vessels transportation that makes existence of PT PELNI (Persero) is highly expected.

## Marketing Aspect

In 2016, the Company had implemented working program in marketing sector, as follows:



No	Informasi yang diperlukan Required Information	Penjelasan Explanation
c	Evaluasi Program Kerja thn 2016 Evaluation of working program 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk program kerja Pengembangan NPTS, pembayaran fee transaksi disesuaikan dengan persentase penyelesaian pekerjaan developer For NPTS development working program, the transaction fee payment is adjusted with developer project completion percentage</li> <li>Program Kerja Pengadaan Perangkat Cetak Tiket Mandiri dan Petugas Penukaran Tiket dengan penajakan kerja sama dengan mitra B2B untuk kesiapan perangkat cetak tiket mandiri Self-Printed Ticket Device and Ticket Exchange Officer Tender Working Program through partnership initiative with B2B partners for self-printed ticket device readiness</li> <li>Program Kerja Pengadaan Perangkat Penunjang Admin kapal dan Overbagasi, menunggu kesiapan modul aplikasi Ship and Over-Baggage Admin Supporting Device Tender Working Program awaits readiness of application module</li> </ul>
d	Sasaran/Target Program Kerja tahun 2016 Working program target 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian 5 Modul Aplikasi NPTS Completion of 5 NPTS Application Modules</li> <li>Implementasi NPTS untuk 26 Kapal Penumpang NPTS implementation for 26 passenger ships</li> <li>Menambah jaringan penjualan dengan bekerja sama dengan mitra b2b, <i>modern channeling</i> Additional sales network by cooperating with b2b partners and modern channeling</li> </ul>
e	Kebijakan Kapal Penumpang Tahun 2016 Passenger ship policy 2016	Pengisian data penumpang sesuai dengan identitas diri Passenger data form based on identity
f	Kebijakan Tarif Kapal Penumpang tahun 2016 Passenger Ship Tariff Policy 2016	Kebijakan penurunan tarif kelas ekonomi sebesar 3% sesuai dengan SK Direksi nomor: 05.25/1/SK/HKO.01/2016 tanggal 25 Mei 2016 Economy class tariff reduction policy by 3 according to Board of Directors Decree Number 05.25/1/SK/HKO.01/2016 dated May 25, 2016

Selain program kerja tersebut, Perseroan juga menerapkan kebijakan untuk mendorong aktivitas pemasaran lini kapal penumpang, antara lain melalui penyesuaian penurunan tarif penumpang sebesar 3%, memberikan diskon untuk kelas kabin tertentu serta mulai mengembangkan produk *lifestyle* untuk segmen MICE (*Meeting, Incentives, Conference and Exhibition*) serta segmen pariwisata.

Selain program pemasaran berupa promosi kepada pelanggan, Perseroan juga terus memperbaiki layanan reservasi tiket, melalui berbagai akses sebagai berikut:



**Call Center**  
(021) 162/162



**Online Reservation**  
Website:  
[www.pelni.co.id](http://www.pelni.co.id)



**Indomaret**



**Loket PT.PELNI**



**Travel Agent**  
PT. PELNI

Besides those working programs, the Company has also implemented policy to encourage marketing activity in passenger ship business line, among others, by adjusting passenger tariff by 3%, implementation of discount for particular cabin class and lifestyle product development for MICE (Meeting, Incentives, Conference andExhibition) segments as well as tourism segment.

Other than marketing program as promotion to the customers, the Company also continuously improves ticket reservation service through various accesses, as follows:



## Pangsa Pasar

Pangsa pasar PT PELNI (Persero) didominasi oleh karakter penumpang menengah ke bawah dengan barang bawaan (kargo) yang signifikan serta penumpang yang tinggal atau menuju daerah tanpa adanya layanan transprotasi udara. Pangsa pasar Perseroan lainnya adalah *shipper* yang membutuhkan alat angkut terjadwal.

## Kebijakan Dividen

Untuk Periode tahun buku 2016, Manajemen menetapkan Kebijakan Dividen yaitu 100% dividen dialokasikan sebagai cadangan modal.

## Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/Atau Manajemen Yang Dilaksanakan Perusahaan (Esop/Msop)

Hingga akhir tahun 2016, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen sehingga Laporan Tahunan 2016 tidak menyajikan informasi terkait program tersebut, seperti informasi jumlah saham, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/ atau manajemen yang berhak.

## Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Hingga akhir tahun 2016, Perseroan tidak mendaftarkan Perusahaan di pasar modal dan tidak melakukan penawaran umum saham kepada publik (*Initial Public Offering*), sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak relevan untuk disajikan pada Laporan Tahunan ini.

## Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Untuk periode tahun buku 2016, Perseroan membukukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

## Market Share

Market share of PT PELNI (Persero) is dominated by characteristic of middle-low passenger with significant cargo as well as passengers who stay or depart to several area without aircraft transportation service. Another market share of the Company is the shipper with regular transportation needs.

## Dividend Policy

For fiscal year 2016 period, the Management had stipulated Dividend Policy where 100% of the dividends are allocated as capital reserves.

## Employee and/or Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)

As end of 2016, the Company did not have any employee and/or management stock option plan, therefore, the Annual Report 2016 did not present any information related with the program such as total shares outstanding, terms, requirement for eligible employee and/or management.

## Realization of Public Offering Proceeds

As the end of 2016 the Company was neither listed in any stock exchange nor public offering (*Initial Public Offering*), therefore, information about realization of public offering proceeds is irrelevant to be presented in this Annual Report.

## Material Information With Conflict of Interest and/or Affiliated Party Transaction

For fiscal year 2016 period, the Company booked affiliated party transactions, as follows:



No.	Pihak-Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ <i>Nature of relationship</i> Related Parties	Transaksi/Transactions
1	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	Setara Kas Cash equivalent
2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	Setara Kas Cash equivalent
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	Setara Kas Cash equivalent
4	Kementerian Perhubungan c.q. Karo Perencanaan	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable -Payable
5	PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable -Payable
6	PT ASDP Indonesia Ferry	Entitas Lelang yang Dikelola Oleh Pemerintah R.I. Auction Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable -Payable
7	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable -Payable
8	PT Pupuk Kaltim (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia	Utang Piutang Receivable -Payable
9	Yayasan Kesehatan Pensiunan PELNI	Personil Kunci Common Key Management	Utang Piutang Receivable -Payable
10	PT Sarana Gama Sejahtera	Personil Kunci Common Key Management	Utang Piutang Receivable -Payable
11	PT Sarana Bandar Nasional	Entitas Anak/Subsidiaries	Penyertaan, Hutang Piutang / Interest, Receivable – payable
12	PT Pelita Indonesia Djaya	Entitas Anak/Subsidiaries	Penyertaan, Hutang Piutang / Interest, Receivable – payable
13	PT Rumah Sakit PELNI	Entitas Anak/Subsidiaries	Penyertaan, Hutang Piutang / Interest, Receivable – payable



## Perubahan Harga Dan Dampak Terhadap Perusahaan

Selama tahun 2016, Perseroan mencatat terjadinya perubahan harga BBM serta penyesuaian tarif kapal penumpang berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 05.25/I/SK/HK0.01/2016 tentang Tarif Angkutan Kapal Penumpang di PT PELNI (Persero) mengenai penurunan tarif dasar penumpang sebesar 3%.

Kenaikan harga BBM dan penurunan tarif dasar penumpang pada tahun 2016 tidak menyebabkan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan dan operasional PT PELNI (Persero) selama tahun 2016.

## Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

Per 31 Desember 2016, Perseroan tidak mencatat adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

## Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Perusahaan Pada Tahun Buku Terakhir

### Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang relevan dengan aktivitas operasi dan wajib diterapkan pada tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Perseroan dan Entitas Anak telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

### Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penjelasan mengenai dampak dari perubahan kebijakan akuntansi selama tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk periode pada atau setelah 1 Januari 2015.

- PSAK 1 (Revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan Perubahan signifikan antara lain:

##### 1) Perubahan Judul

Perubahan Judul Laporan Pendapatan Komprehensif Lain menjadi "Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain".

## Change in Price and Impact to The Company

Throughout 2016, the Company record a change in Oil Fuel price and passenger ship tariff adjustment referring to Board of Directors Decree No. 05.25/I/SK/HK0.01/2016 regarding Passenger Ship Tariff at PT PELNI (Persero) declaring that the passenger basic tariff decreased by 3%.

Increasing Oil Fuel price and passenger basic tariff price decrease in 2016 did not cause significant impact on financial and operational performance of PT PELNI (Persero) throughout 2016.

## Change in Legislation with Significant Impact to the Company

As of December 31, 2016, the Company did not record any change in legislation with significant impact to the Company.

## Change in Accounting Policy Implemented by the Company in Recent Fiscal Year

### Reason of Accounting Policy Revision

The Company and Subsidiaries adopted Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") relevant new and revised by operating activities and shall be applied on that date. Certain accounting policies of the Company and its Subsidiaries have been changed as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

### Impact of Revised Accounting Policy

Explanation about impact of the revised accounting policy in 2016 is explained below:

- Standards and interpretations effective for periods on or after January 1, 2015.

- PSAK 1 (Revised 2013), Presentation of Financial Statements Significant changes include:

##### 1) Change of title

Changes in Other Comprehensive Income Statements title became " Statement of Income and Other Comprehensive Income."



**2) Penyajian Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif**

Mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua bagian yaitu; Laba Rugi dan Pos Penghasilan Komprehensif Lain.

**3) Penyajian Pos Penghasilan Komprehensif Lain**

Mensyaratkan entitas untuk menyajikan pos penghasilan komprehensif lain (OCI) yang akan direklasifikasi ke laporan laba rugi pada periode berikutnya setelah penghentian pengakuan terpisah atas pos dari OCI yang tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi.

**4) Pajak Penghasilan**

Mensyaratkan pajak penghasilan atas pos yang disajikan dalam OCI harus dialokasikan antara pos yang mungkin akan direklasifikasi ke laporan laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi, jika pos dalam OCI disajikan sebelum pajak.

- PSAK 4 (Revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri**

PSAK 4 (Revisi 2013): Laporan Keuangan Tersendiri menggantikan PSAK 4 (2009): Laporan Keuangan konsolidasianan dan Laporan Keuangan Tersendiri.

Mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.

- PSAK 15 (Revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**

Mengatur perlakuan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan mengatur penerapan metode ekuitas pada akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama

Mengatur perlakuan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan mengatur penerapan metode ekuitas pada akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.

- PSAK 24 (Revisi 2013), Imbalan Kerja**

Perubahan signifikan antara lain:

- 1) Kapan mengakui, dan bagaimana mengukur, liabilitas terkait dengan penyelesaian program imbalan pasti multipemberi kerja, atau keluarnya entitas dari program.

**2) Statements of Income and Comprehensive Income**

Requires an entity to present a statement of income and other comprehensive income in two parts, namely; Income and Other Comprehensive Income Accounts.

**3) Presentation of Other Comprehensive Income Post**

Requires an entity to present other comprehensive income post (OCI) to be reclassified to profit or loss in the period following the termination of separate recognition on the post of OCI that will not be reclassified to profit or loss.

**4) Income Tax**

Requires income tax on postal presented in OCI should be allocated between the posts that may be reclassified to the income statement and are not to be reclassified to profit or loss, if the post in OCI are presented before tax.

- PSAK 4 (Revised 2013), Separate Financial Statements**

PSAK 4 (Revised 2013): Separate Financial Statements replaces PSAK 4 (2009): Financial Statements konsolidasianan and Separate Financial Statements.

Set the accounting requirements for investments in subsidiaries, joint ventures and associates when an entity parent present separate financial statements as additional information.

- PSAK 15 (Revised 2013), Investments in Associates and Joint Venture**

Prescribes the accounting treatment of investment in associates and organize the implementation of the equity method in accounting for investments in associates and joint ventures.

Set the accounting requirements for investments in subsidiaries, joint ventures and associates when an entity parent present separate financial statements as additional information.

- PSAK 24 (Revised 2013), Employee Benefit**

Significant changes include:

- 1) When to recognize, and how to measure, liabilities associated with defined benefit plans multipemberi completion of work, or discharge from the program entities.



- 2) Entitas harus mengakui liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laporan posisi keuangan.
- 3) Penangguhan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria tidak diizinkan. Keuntungan dan kerugian aktuarial langsung diakui dalam OCI.
- PSAK 65 (Revisi 2013), Laporan Keuangan Konsolidasian  
Menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.
  - PSAK 66 (Revisi 2013), Pengaturan Bersama  
PSAK 66: Pengaturan Bersama menggantikan PSAK 12 (2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama dan ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas – Kontribusi Aset Non Moneter oleh Venturer.  
Menetapkan prinsip-prinsip pelaporan keuangan entitas yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama (yaitu pengaturan bersama).
  - PSAK 67 (Revisi 2013), Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain.  
PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain menggantikan pengaturan pengungkapan dalam PSAK 4 (2009): Laporan Keuangan konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri, PSAK 12 (2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama, dan PSAK 15 (2009): Investasi pada Entitas Asosiasi.  
Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi:
    - Sifat dan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas lain; dan
    - Dampak dari kepentingan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.  - PSAK 68 (Revised 2013), Pengukuran Nilai Wajar  
PSAK 68 menetapkan hirarki nilai wajar yang mengkategorikan *input* dalam tiga level. Hierarki nilai wajar memberikan prioritas tertinggi kepada harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*input* Level 1) dan prioritas terendah untuk *input* yang tidak dapat diobservasi (*input* Level 3).
- 2) The entity should recognize a liability (asset) in the net defined benefit statement of financial position.
- 3) Suspension recognition of actuarial gains and losses are not allowed. Gains and losses are recognized directly in OCI.
- PSAK 65 (Revised 2013), Consolidated Financial Statements  
Establishes the principle of the preparation and presentation of financial statements when an entity controls konsolidasian one or more other entities.
  - PSAK 66 (Revised 2013), Joint Arrangements  
PSAK 66: Joint arrangements replaces PSAK 12 (2009): Interests in Joint Ventures and ISAK 12: Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers assets.  
Establishes the principles of financial reporting entity has an interest in a jointly controlled setting (is joint arrangements).
  - PSAK 67 (Revised 2013), Disclosure of Interests in Other Entities  
PSAK 67: Disclosure of Interests in Other Entities override disclosures under PSAK 4 (2009): Report of Consolidated Financial and Separate Financial Statements, PSAK 12 (2009): Interests in Joint Ventures, and PSAK 15 (2009): Investments in Associates.  
Requires an entity to disclose information that enables users of financial statements to evaluate:
    - The nature and risks associated with its interests in other entities; and
    - The impact of the interest on its financial position, financial performance, and cash flows of the entity.  - PSAK 68, Measurement of Fair Value  
PSAK 68 set a fair value hierarchy that categorizes the inputs into three levels. Fair value hierarchy gives the highest priority to price kuotasi (without adjustment) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 inputs) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 inputs).



- PSAK No. 46 (Revisi 2014), Pajak Penghasilan  
Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi. Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. Tidak mengatur tentang pajak final dan hal khusus mengenai Surat Ketetapan Pajak.
- PSAK No. 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset  
Pengaturan investasi pada entitas anak dan ventura bersama dalam laporan keuangan tersendiri mengacu pada PSAK 4 (2013): Laporan Keuangan Tersendiri.

Pengukuran nilai wajar dikurangi biaya pelepasan mengacu pada hierarki nilai wajar dalam PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar. Memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode:

- Jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) dan apakah jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) merupakan nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya.
  - Jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, entitas mengungkapkan:
    - Tingkat hirarki nilai wajar sesuai dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar;
    - Teknik penilaian (level 2 dan 3); dan
    - Setiap asumsi utama yang mendasari manajemen untuk menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (level 2 dan 3).
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Penyajian
  - PSAK No. 50 (revisi 2014) – Instrumen Keuangan: Penyajian, kecuali Paragraf 07, 26, PA41 berlaku Prospektif. PSAK ini menggantikan PSAK No.50 (revisi 2010) – Instrumen Keuangan: Penyajian.

Liabilitas keuangan pada penyelesaian instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, pada saat pengakuan awal diakui sebesar nilai kini dari jumlah penebusan, dan direklasifikasi dari ekuitas. Pengaturan mengenai pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dihapus dan dicatat sesuai dengan PSAK 46: Pajak Penghasilan.

- PSAK No. 55 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

- PSAK No. 46 (Revised 2014), Tax Income  
Set the deferred tax assets and liabilities from assets that are not depreciated is measured using the revaluation model. Set the deferred tax assets and liabilities from investment property measured using the fair value model. Does not regulate the final tax and particulars concerning tax assessment letter.

- PSAK No. 48 (Revised 2014), Impairment of Assets  
Setting investments in subsidiaries and joint ventures in the separate financial statements referred to in PSAK 4 (2013): Separate Financial Statements.

Measurement of fair value less costs of disposal refers to the fair value hierarchy in PSAK 68: Measurement of Fair Value. Provide additional disclosure requirements for each individual asset or cash-generating unit which impairment losses have been recognized or reversed during the period:

- The recoverable amount of the asset (cash-generating units) and whether the recoverable amount of the asset (cash -generating unit) is its fair value less costs to sell or its value in use.
  - If the recoverable amount is fair value less costs of disposal, the entity shall disclose:
    - Level fair value hierarchy in accordance with PSAK 68: Measurement of Fair Value;
    - Assessment techniques (level 2 and 3); and
    - The main assumptions underlying any management to determine fair value less costs of disposal (level 2 and 3).
- PSAK No. 50 (Revised 2014), Financial Instruments: Presentation
  - PSAK No. 50 (revised 2014) - Financial Instruments: Presentation, except paragraphs 07, 26, PA41 apply Prospective. PSAK No 50 supersedes PSAK 50 (revised 2010)

Financial Instruments: Presentation. Financial liabilities at the completion of equity instruments issued entity, upon initial recognition are recognized at the present value of the redemption amount, and reclassified from equity. Arrangements regarding income tax relating to distributions to holders of equity instruments and transaction costs deleted and recorded in accordance with PSAK 46: Income Taxes.

- PSAK No. 55 (Revised 2014), Financial Instruments: Recognition and Measurement.



PSAK No. 55 (revisi 2014) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, kecuali Paragraf 09, 13, 28, 43A, 47, 88, PP46, PP52, PP64, PP76, PP76A, PP80, PP81, PP96 berlaku Prospektif. Paragraf 02 (g), 97, dan 100 berlaku prospektif untuk seluruh kontrak yang belum berakhir pada periode tahun buku yang dimulai atau setelah 1 Januari 2015. PSAK ini menggantikan PSAK No.55 (revisi 2011) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Mengatur pencatatan instrumen keuangan saat nilai wajar pada saat pengakuan berbeda dengan harga transaksinya.

Mengatur pengungkapan atas pengukuran atas nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Mengatur penghentian instrumen lindung nilai. Instrumen lindung nilai tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan jika:

- Sebagai konsekuensi hukum atau regulasi atau pengenalan hukum atau regulasi.
- Perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai yang terbatas pada perubahan lain yang diperlukan untuk efek pengganti atas pihak lawan.

Mengatur tanggal pencatatan instrumen keuangan saat nilai wajar pada saat pengakuan berbeda dengan harga transaksi.

- PSAK No. 60 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengungkapan  
PSAK No. 60 (revisi 2014) – Instrumen Keuangan: Pengungkapan, kecuali Paragraf 03, 28, 30, 31, 32, dan Lampiran A berlaku Prospektif. PSAK ini menggantikan PSAK No.60 (revisi 2010) – Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Pengaturan pengungkapan dan hierarki nilai wajar mengacu pada PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.

Ketika entitas tidak mengakui laba rugi pada pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan karena nilai wajar tidak dapat dibuktikan oleh harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penialian, entitas mengungkapkan:

- Kebijakan akuntansi untuk mengakui perbedaan nilai wajar pada pengakuan awal dan harga transaksi.
- Agregat perbedaan yang belum diakui dalam laba rugi.
- Alasan entitas menyimpulkan harga transaksi bukan merupakan bukti terbaik dari nilai wajar.

Memberikan persyaratan pengungkapan yang berbeda untuk entitas yang mengalihkan aset keuangan yang tidak dihentikan pengakumannya secara keseluruhan dan pengungkapan aset keuangan yang dihentikan secara keseluruhan.

PSAK No. 55 (revised 2014) - Financial Instruments: Recognition and Measurement, except for paragraphs 09, 13, 28, 43A, 47, 88, PP46, PP52, PP64, PP76, PP76A, PP80, PP81, PP96 apply Prospective. Paragraph 02 (g), 97, and 100 applies prospectively to all contracts that have not expired during the period of the financial year beginning on or after January 1, 2015. PSAK supersedes ISAK 55 (revised 2011) - Financial Instruments: Recognition and Measurement.

Set the recording of the current financial instruments fair value at the time of recognition differs from the transaction price.

Set the disclosures of fair value measurement of financial assets or financial liabilities. Set the termination of the hedging instrument. Hedging instruments can not be deemed to have expired or sold, terminated or carried out if:

- As a consequence of the introduction of laws or regulations or laws or regulations.
- Other changes, if any, on the hedging instrument that is limited to the other changes necessary to effect a replacement on the opposing side.

Set the recording date when the fair value of financial instruments at the time of recognition differs from the transaction price.

- PSAK No. 60 (Revised 2014), Financial Instruments: Disclosures  
PSAK No. 60 (revised 2014) - Financial Instruments: Disclosures, except for paragraphs 03, 28, 30, 31, 32, and Attachment A Prospective applicable. PSAK upersedes PSAK 60 (revised 2010) - Financial Instruments: Disclosures.

Setting disclosure and fair value hierarchy refers to PSAK 68: Measurement of Fair Value.

When an entity does not recognize gain or loss on initial recognition of financial assets and financial liabilities as fair value can not be proven by kuotasi prices in active markets for identical assets or liabilities or based on a valuation technique, the entity shall disclose:

- Accounting policy to recognize the difference in the fair value at initial recognition and the transaction price.
- Aggregate differences not recognized in profit or loss.
- Reason entities conclude the transaction price is not the best evidence of fair value.

Provide different disclosure requirements for entities that transfer financial assets that are not derecognised as a whole and disclosure of financial assets are terminated as a whole.



- ISAK No. 26 (Revisi 2014), Penilaian Kembali Derivatif Melekat
- Pencabutan PSAK 12 (Revisi 2009) "Bagian Partisipasi Ventura Bersama"
- Pencabutan ISAK 12 "Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Non Moneter Oleh Venturer"
- Pencabutan ISAK 7 "Konsolidasian Entitas Bertujuan Khusus"

Penerapan lebih dini terhadap revisi dan standar baru tidak diperkenankan. Manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan.

- ISAK No. 26 (Revisi 2014), Penilaian Kembali Derivatif Melekat
- Pencabutan PSAK 12 (Revisi 2009) "Bagian Partisipasi Ventura Bersama"
- Pencabutan ISAK 12 "Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Non Moneter Oleh Venturer"
- Pencabutan ISAK 7 "Konsolidasian Entitas Bertujuan Khusus"

Penerapan lebih dini terhadap revisi dan standar baru tidak diperkenankan.

Manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan.

#### • ISAK 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan

Intepretasi ini ditetapkan untuk akuntansi pengalihan aset tetap oleh entitas yang menerima pengalihan tersebut dari pelanggannya.

Intepretasi ini digunakan untuk membahas masalah pengakuan, pengukuran dan pencatatan pengalihan aset dari pelanggan.

#### • ISAK 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

Mengatur mengenai pertukaran utang dengan ekuitas (*debt for equity swap*). Instrumen ekuitas yang diterbitkan kepada kreditur untuk mengakhiri seluruh atau sebagian dari utang dinilai sebesar nilai wajar instrumen ekuitas yang diterbitkan, kecuali nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka entitas mengukur instrumen ekuitas tersebut sebesar nilai wajar liabilitas yang diakhiri.

#### b. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk periode pada atau setelah 1 Januari 2014

- ISAK 29, Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka

- SAK No. 26 (Revisi 2014), Revaluation of Embedded Derivatives
- Revocation of PSAK 12 (Revised 2009) "Interests Joint Ventures"
- Revocation of ISAK 12 "Jointly Controlled Entities Non-Monetary Contributions by Venturers"
- Revocation of ISAK 7 " Consolidated Special Purpose Entities"

Early application of the revised and new standards are not allowed. Management is still evaluating the possible impact of the adoption of these new and revised standards and its influence on financial statement presentation.

- ISAK No. 26 (Revisi 2014), Revaluation of Embedded Derivatives
- Revocation of PSAK 12 (Revised 2009) "Interests Joint Ventures"
- Revocation of ISAK 12 "Jointly Controlled Entities Non-Monetary Contributions by Venturers"
- Revocation of ISAK 7 " Consolidated Special Purpose Entities"

Early application of the revised and new standards are not allowed.

Management is still evaluating the possible impact of the adoption of these new and revised standards and its influence on financial statement presentation.

#### • ISAK 27, Transfer of Assets from Customers

Such is set for the transfer of fixed assets accounting by entities that receive such transferred of customers.

This interpretation is used to discuss the problem of recognition, measurement and recording of the transfer of assets from customers.

#### • ISAK 28, Termination of Financial Liabilities with Equity Instruments

Regulates the exchange of debt for equity (debt for equity swap). Equity instruments issued to a creditor to terminate all or part of the debt is valued at wjar value of equity instruments issued, unless the fair value can not be measured reliably, then the entity 's equity instruments are measured at fair value liabilities are terminated.

#### b. Standards and interpretations effective for periods on or after January 1, 2014

- ISAK 29, Stripping Costs in the Production Phase of Open Mines



- PSAK 12, Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum

Penerapan standar dan interpretasi tersebut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian, dan ISAK atas 29 dan PPSAK 12 merupakan standar dan interpretasi yang tidak relevan untuk diterapkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian.

**c. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif dan telah diterapkan**

Berikut ini standar baru dan standar revisi serta interpretasi yang relevan namun tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian.

- PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK 13 (revisi 2011), Properti Investasi
- PSAK 16 (revisi 2011), Aset Tetap
- PSAK 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja
- PSAK 26 (Revisi 2011), Biaya Pinjaman
- PSAK 28 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
- PSAK 30 (Revisi 2011), Sewa
- PSAK 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi
- PSAK 36 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- PSAK 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan
- PSAK 50 (Revisi 2010), Instrumen Keuangan: "Penyajian"
- PSAK 53 (Revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: "Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 56 (Revisi 2011), Laba Per Saham
- PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- PSAK 62, Kontrak Asuransi
- PSAK 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- ISAK 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK 16, Perjanjian Jasa Konsesi
- ISAK 17, Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai

- PSAK 12, Revocation of PSAK 33: Activity Stripping and Environmental Management in General Mining

The application of these standards and interpretations did not cause significant changes in the accounting policies of the Company and does not provide a material impact on the amounts reported in the financial statements consolidation, and IFAS on 29 and PPSAK 12 standards and interpretations that are not relevant to be applied by the Company up to the date of issuance consolidated financial statements.

**c. Standards and interpretations that will be effective and has been applied**

The following new standards and revised standards and interpretations that are relevant but no material impact on the consolidated financial statements.

- PSAK 10 (Revised 2010),The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
- PSAK 13 (Revised 2011), Investment Property
- PSAK 16 (Revised 2011), Fixed Assets
- PSAK 18 (Revised 2010), Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
- PSAK 24 (Revised 2010), Employee Benefits
- PSAK 26 (Revised 2011), Borrowing Costs
- PSAK 28 (Revised 2011),Accounting for Insurance Contracts
- PSAK 30 (Revised 2011), Lease
- PSAK 34 (Revised 2010), Construction contracts
- PSAK 36 (Revised 2011),Life Insurance Contract Accounting
- PSAK 46 (Revised 2010), Income Tax
- PSAK 50 (Revised 2010),Financial Instruments: "Presentation"
- PSAK 53 (Revised 2010), Share-based Payment
- PSAK 55 (Revised 2011), Financial Instruments: "Recognition and Measurement"
- PSAK 56 (Revised 2011),Earnings Per Share
- PSAK 60, Financial Instruments: Disclosures
- PSAK 61, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
- PSAK 62, Insurance contracts
- PSAK 63, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
- ISAK 15, PSAK 24 - Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
- ISAK 16, Concession Services Agreement
- ISAK 17, Interim Financial Reporting and Impairment



- ISAK 20, Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
- ISAK 22, Perjanjian Konsensi Jasa Pengungkapan
- ISAK 23, Sewa Operasi - Insentif
- ISAK 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa.
- ISAK 25, Hak Atas Tanah
- ISAK 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

- ISAK 20, Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
- ISAK 22, Disclosure Services Concession Agreement
- ISAK 23, Operating Leases – Incentives
- ISAK 24, Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of Lease.
- ISAK 25, Land Rights
- ISAK 28, Termination of Financial Liabilities with Equity Instruments

## Informasi Kelangsungan Usaha

Manajemen memiliki beberapa asumsi berkaitan dengan kelangsungan usaha PT PELNI (Persero) di masa yang akan datang khususnya asumsi berdasarkan kondisi makroekonomi dan kebijakan Pemerintah di bidang transportasi serta pengangkutan barang melalui sarana transportasi maritim.

### Asumsi Kondisi Makroekonomi

Berdasarkan laporan BAPPENAS tentang *Outlook Perekonomian Indonesia 2017*, APBN 2017 menetapkan asumsi target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 sebesar 5,1 persen. Namun demikian, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut akan sangat tergantung pada beberapa faktor. Pertama, efektivitas kebijakan Pemerintah dalam mitigasi resiko ekonomi ke depan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kedua, keberhasilan reformasi ekonomi yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun terakhir.

Di sisi eksternal, risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia diperkirakan masih berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS). Perlambatan ekonomi RRT yang terjadi sejak akhir tahun lalu diperkirakan masih akan terjadi selama beberapa waktu ke depan. Sebagai negara importir terbesar kedua di dunia, perlambatan ekonomi di RRT tidak hanya merugikan mitra dagangnya secara langsung namun juga menyebabkan penurunan permintaan dunia secara keseluruhan, yang akhirnya dapat berujung pada perlambatan ekonomi global. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah RRT di tengah kondisi global yang melemah, serta sejauh mana kebijakan tersebut akan efektif mengurangi perlambatan ekonomi tersebut, perlu dipantau oleh Pemerintah Indonesia agar dapat menyusun kebijakan antisipasi yang tepat.

Di tengah perekonomian global yang cenderung melambat, Indonesia justru berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya yang cukup tinggi. Pada triwulan III tahun 2016 pertumbuhan PDB Indonesia tercatat sebesar 5,0 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,7 persen. Pertumbuhan tersebut utamanya

## Information on Business Continuity

The Management has assumptions related with business continuity of PT PELNI (Persero) in the future, especially assumption based on macroeconomics condition and Government's policy in transportation and logistic via maritime transportation.

### Macroeconomics Condition Assumption

According to report published by BAPPENAS on Indonesia Economy Outlook 2017, APBN 2017 stipulated Indonesia economic growth target assumption in 2017 at 5. Per cent. However, achievement of the economic growth target will highly rely on several factors. First, effectiveness of Government's policy in mitigating upcoming economic risks, both occurred due to national or international factors. Second, success of economic reform that has been implemented within the last 2 (two) years.

On the external side, the greatest risk for Indonesian economy is estimated to be coming from People Republic of Taiwan (PRT) and United States (US). The PRT economic slowdown had occurred since the last year and projected will be prolong within the next upcoming years. As second largest importer country worldwide, economic slow down in PRC that brought loss to the trading partner also directly led to decreasing overall global demand resulted to global economic slow down. The policy that will be implemented by PRC Government amidst slowing global condition as well as how far the policy will effectively reduce the economic slow down shall be monitored by the Republic of Indonesia Government to formulate correct anticipatory policy.

Amidst slowing global economy, Indonesia successfully retained the economic growth at high level. In the 3rd quarter of 2016, Indonesia recorded 5.0 per cent (yoy) GDP growth, that was higher than the same quarter in the same year that only achieved 4.7 percent. The growth was primarily contributed by consumption expenditure (5.0 per cent growth), and



berasal dari pengeluaran konsumsi (tumbuh 5,0 persen), dan pengeluaran investasi (tumbuh 4,1 persen). Sementara itu, pengeluaran pemerintah mengalami penurunan, karena adanya kebijakan penghematan belanja pemerintah. Peran pengeluaran konsumsi (53,8 persen) dan investasi (31,6 persen) merupakan yang terbesar dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya, sehingga keduanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III tahun 2016.

### Asumsi Kondisi Industri Maritim dan Perkapalan Nasional

Pemulihan ekonomi dunia membawa prospek yang menjanjikan bagi pertumbuhan industri maritim dan perkapalan nasional setelah mengalami keterpurukan selama beberapa tahun terakhir. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan peta jalan (*road map*) pembangunan industri perkapalan di Indonesia hingga tahun 2025 nanti. Industri ini pun diharapkan bisa memproduksi dan mereparasi semua jenis kapal dari yang berukuran kecil hingga besar.

Salah satu sasarannya pada 2020, klaster industri perkapalan nasional sudah mampu memproduksi kapal berkapasitas 200 ribu ton bobot mati (*dead weight tonnage/DWT*) di mana semua jenis kapal, mulai dari kapal barang, kapal penumpang, dan kapal tanker bisa diproduksi. Segmen reparasi juga harus sudah bisa mempunyai kemampuan untuk 200 ribu DWT.

Di sisi lain, Pemerintah akan meningkatkan kemampuan desain dan rekayasa kapal yang akan didukung pula oleh pengembangan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN). Industri bahan baku dan komponen lokal, serta pengembangan pusat peningkatan keterampilan SDM perkapalan juga terus ditingkatkan. Pemerintah juga akan mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negeri sebagai *base load* untuk pengembangan industri perkapalan. Selain itu, kerja sama dengan industri perkapalan di negara lain yang sudah maju juga akan terus didorong.

Kawasan khusus industri galangan kapal juga akan dikembangkan untuk menarik investor asing dan lokal. Dukungan lain terkait prospek tersebut adalah terkait kebijakan perbaikan iklim usaha, seperti soal pajak, suku bunga, dan tata niaga. Dalam peta klaster industri perkapalan nasional, Kemenperin menetapkan, pada 2015-2020, produksi pelat dengan ketebalan hingga 30 milimeter (mm) sudah harus tumbuh dan berkembang di dalam negeri. Selain itu, PDRKN ditargetkan mampu menyuplai kebutuhan desain galangan kapal nasional.

investment expenditure (4.1 per cent growth). On the other hand, Government expenditure was also decreasing due to Government Expenditure efficiency policy. Contribution from the consumption expenditure (53.8 per cent) and investment (31.6 per cent) became the largest contributors if compared with other expenditures, therefore, both became engine of Indonesian economic growth in the 3rd quarter of 2016.

### Maritime Industry and National Shipping Condition Assumption

Global economic recovery brought a promising prospect for maritime and national shipping industry growth after the downfall within these couple of years. The Ministry of Industry (Kemenperin) has prepared shipping industry development road map in Indonesia up to next 2025. This industry is expected to produce and repair all of ship types starting from small to large size.

One of the target in 2020 is that the national shipping industry cluster to build ship with capacity of 200 thousand ton dead weight tonnage (DWT) in all ship types starting from cargo ship, passenger ship and tanker ship to be produced. The reparation segment is also expected to have capacity for 200 thousand DWT.

On the other hand, the Government will also improve ship design and engineering capabilities that will be also supported by development of National Ship Design and Engineering Center (PDRKN). Local raw material and component industry, as well as development of shipping personnel development center will be also upgraded. The Government plans to secure and optimize domestic market as base load for shipping industry development. In addition, partnership with shipping industry in other advanced countries will be also continuously encouraged.

Shipyard industry special zone is also planned to be developed to seize foreign and local investors. Other supports related with this prospect is related to business climate recovery policy such as taxation, interest rate and commerce. In the national shipping industry cluster mapping, the Kemenperin stipulated in 2015 – 2020, production of 30 milimetre (mm) plate shall be grown and developed in the country. In addition, PDRKN is targeted to supply the requirement for national shipyard design.



## Kelangsungan Usaha PELNI

Berdasarkan asumsi atas kondisi makroekonomi dan industri maritim serta perkembangan nasional tersebut, Manajemen menilai bahwa Perseroan berada dalam kondisi yang stabil dan akan mampu mempertahankan kelangsungan usaha di masa yang akan datang.

Melalui program Nawa Cita yang diusung oleh Pemerintah, PT PELNI (Persero) juga dipercaya untuk memegang peran penting dalam menjalankan beberapa program pemerintah antara lain program Tol Laut, pengoperasian Kapal Ternak dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Tanjung Priok dan menjadi operator kapal perintis serta berkontribusi dalam meningkatkan popularitas wisata bahari Nusantara di kalangan wisatawan domestik dan mancanegara.

Asumsi tersebut juga didukung oleh peran PT PELNI (Persero) dalam beberapa aspek, antara lain:

### 1. Infrastruktur Negara

PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi publik antar pulau (daerah yang sudah dan sedang berkembang) termasuk angkutan transmigrasi dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

### 2. Agen Pembangunan

PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi publik ke wilayah pulau terpencil dan terluar guna mempercepat pembangunan dan membuka isolasi geografis seperti Miangas, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Nunukan.

### 3. Sistem Logistik

PT PELNI (Persero) mengangkut kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat seluruh Indonesia termasuk di pulau-pulau terpencil dan terluar guna stabilisasi harga antara daerah dan pusat.

### 4. Kedaulatan NKRI

PT PELNI (Persero) menyediakan akses untuk keperluan sosial politik Negara dan pertahanan nasional melalui kunjungan regular antar pulau.

### 5. Tanggap Darurat

PT PELNI (Persero) menyediakan angkutan dengan kapasitas besar, cepat dan handal ke seluruh pelosok Nusantara untuk kondisi darurat nasional.

## Business Continuity of PELNI

Based on macroeconomics and maritime as well as national shipping industry condition, the Management evaluates that the Company is under stable condition and will be able to maintain business continuity in the future.

Through Nawa Cita program that is carried out by the Government, PT PELNI (Persero) is also mandated to play important role in implementing Government's programs such as Tol Laut program, operations of Cattle Ship from East Nusa Tenggara (NTT) to Tanjung Priok and acts as pioneer ship operator and contributes in spreading popularity of National maritime tourism among domestic and international travellers.

The assumptions are also supported by role of PT PELNI (Persero) in several aspects, as follows:

### 1. State Infrastructure

PT PELNI (Persero) provides inter islands public transportation access (developed and developing regions) including transmigration and TKI (Indonesian Workers).

### 2. Agent of Development

PT PELNI (Persero) provides public transportation access to remote and border islands to accelerate development and eliminate geographical isolation such as Miangas, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Nunukan.

### 3. Logistic System

PT PELNI (Persero) carries groceries and other essentials for society across Indonesian territory including in remote and border islands to stabilize price between rural and urban (central) area.

### 4. NKRI Sovereignty

PT PELNI (Persero) provides access for national social and political needs as well as national security through inter-island regular visit.

### 5. Emergency

PT PELNI (Persero) provides large-capacity, fast and reliable fleets nationwide for national emergency condition.



Kelangsungan usaha PT PELNI (Persero) juga didukung oleh proyek percepatan atau *Quick Win* yang akan diterapkan pada tahun 2017, sebagai berikut:

Business continuity of PT PELNI (Persero) is also supported by acceleration or Quick Win project to be implemented in 2017, as follows:

### **Quick Win Project PELNI 2017**

Proyek 1 Project 1	<b>Pengoperasian Kapal Cruise</b> Mengadakan Kerja Sama Operasi dalam Pengadaan dan Pengoperasian Kapal Cruise dengan PT Patra Jasa Operation of Cruise Ship Operation Partnership in Cruise Ship Procurement and Operation with PT Patra Jasa
Proyek 2 Project 2	<b>Pengembangan Paket Wisata</b> Kapal PELNI hadir sebagai penginapan terapung yang menawarkan fasilitas yang nyaman dan memanjakan peserta wisata selama menikmati keindahan alam bawah Indonesia. Perusahaan juga bekerja sama dengan operator wisata lokal di setiap destinasi wisata. Tourism Package Development PELNI Ship exists as floating hotel offering comfortable facilities and brings convenience for the tourists during holiday in the beautiful maritime landscape of Indonesia. The Company also cooperates with local tourism operators in every tourism destination.
Proyek 3 Project 3	<b>Pengembangan Lifestyle Business</b> Pengembangan produk konvensional menjadi produk <i>lifestyle</i> yaitu menciptakan kapal menjadi <i>venue</i> untuk MICE. Lifestyle Business Development Conventional product development into Lifestyle product and creates ship as MICE Venue.
Proyek 4 Project 4	<b>Pengusahaan Angkutan Penumpang Kapal Penumpang dan RoRo</b> Pasenger and RoRo Ship Passengers Business
Proyek 5 Project 5	<b>Pengusahaan Angkutan Penumpang Kapal Perintis</b> Konektivitas kapal Perintis dengan kapal Penumpang dan Penjualan Tiket Penumpang kapal Perintis secara Sistem. Pioneer Ship Business Connectivity of Pioneer Ship with Passenger Ship and Pioneer Ship Passenger Ticket Sales by System.
Proyek 6 Project 6	<b>Kerja Sama Strategis PELNI dan Maersk Line (MSL)</b> PELNI akan menjadi mitra MSL untuk mengangkut barang-barang tujuan dari kawasan timur Indonesia menuju pelabuhan Bitung sebagai <i>International Hub Port</i> yang bertujuan ke seluruh dunia. PELNI and Maersk Line (MSL) Strategic Plan PELNI will join as partner of MSL to carry cargo from Eastern Indonesia to Bitung Ports as International Hub Port worldwide.
Proyek 7 Project 7	<b>Pengembangan Aplikasi Transaksi dan Pelaporan Angkutan Barang</b> Cargo Transportation Transaction and Reporting Applications
Proyek 8 Project 8	<b>Pengusahaan Angkutan Barang Kapal Penumpang dan RoRo</b> Pasenger and RoRo Ships Business
Proyek 9 Project 9	<b>Pengusahaan Angkutan Barang Kapal Perintis, Ternak dan Logistik</b> 1. Pendistribusian bahan kebutuhan pokok ke daerah terpencil di seluruh Indonesia. 2. Memberikan konektivitas dari satu pulau ke pulau lain dalam penyebaran barang kebutuhan pokok. 3. Menekan inflasi di daerah. 4. Pendistribusian barang berharga ke daerah terpencil. 5. Pengoptimalan pendistribusian pakan ternak untuk muatan balik.  Pioneer Ship, Cattle Ship and Logistic Cargo Ship Business 1. Groceries distribution to remote area across Indonesia. 2. Provide connectivity from one to another island to distribute groceries. 3. Reduce inflation at regional level. 4. Distribution of valuable goods to remote area. 5. Optimizing feed mill distribution for back cargo.
Proyek 10 Project 10	<b>Pengusahaan Angkutan Barang Kapal Tol Laut</b> Pengoperasian kapal barang untuk menjalankan penugasan Pemerintah. Tol Laut Cargo Ship Business Operation of cargo ship as Government Assignment.



### Quick Win Project PELNI 2017

Proyek 11 Project 11	Budaya Perusahaan dalam menunjang pencapaian kinerja Corporate Culture to support performance achievement
	<p>Peningkatan pendapatan dari <i>Assets Management</i>            Meningkatkan pendapatan dari aset milik perusahaan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periklanan di atas kapal</li> <li>2. Kerja sama sinergi dengan anak perusahaan untuk poliklinik di aset Perseroan</li> <li>3. Renovasi bangunan milik perusahaan</li> </ol>
Proyek 12 Project 12	<p>Increasing revenue from Assets Management            Increasing revenue from internal assets, throughout:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onboard Advertising</li> <li>2. Synergy Partnership with subsidiaries for policlinic in the Company's Assets</li> <li>3. Renovation of Company's building</li> </ol>
Proyek 13 Project 13	<p><i>Performance Management System</i>            Peningkatan motivasi pegawai sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan. Implementasi <i>Performance Appraisal</i> sebagai metode pengukuran kinerja pegawai.  <i>Performance Management System</i>            Improve employee motivation as a method to improve productivity in the Company. Implementation of Performance Appraisal as employee performance appraisal method.</p>
Proyek 14 Project 14	<p>Pengelolaan Oracle EBS            Penggunaan aplikasi <i>Oracle e-Business Suite</i> untuk mewujudkan perusahaan berbasis sistem informasi terintegrasi.  <i>Oracle EBS Management</i>            Implementation of Oracle e-Business Suite application to establish Company based on integrated information system.</p>
Proyek 15 Project 15	<p>Pengelolaan Sparepart menggunakan Aplikasi berbasis Teknologi Informasi            Penggunaan aplikasi berbasis IT dalam pengelolaan <i>sparepart</i> mulai dari permintaan dari kapal, verifikasi, pengadaan, distribusi ke kapal sampai dengan palaporan pemakaian <i>sparepart</i> sehingga penggunaan <i>sparepart</i> dapat dimonitor secara cepat dan akurat.  <i>Sparepart Management</i> using Information Technology based application            Implementation of IT-based application in sparepart management starting from request from ship, procurement, distribution to the ship until spare-part use report to be monitored quickly and accurately.</p>
Proyek 16 Project 16	<p>Pengadaan Kapal barang PMN            Pelaksanaan proses pengadaan armada kapal sesuai prinsip pengadaan sehingga dapat terealisasi tepat waktu.  <i>PMN Cargo Ship Procurement</i>            Implementation of vessels procurement process based on procurement principle to be executed on time.</p>
Proyek 17 Project 17	Pengembangan Armada PELNI PELNI Fleets expansion.







# Tata Kelola Perusahaan

## Good Corporate Governance

.....

“

Perseroan menempatkan GCG sebagai landasan penting untuk menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan dengan penguatan struktur dan mekanisme pengelolaan secara internal yang didukung oleh kepatuhan eksternal terhadap seluruh perangkat peraturan perundang-undangan.

The Company places GCG as fundamental aspect to create sustainable growth through management structure and management consolidation internally that is also supported with external compliance with all regulatory frameworks.

”



Perseroan menerapkan struktur dan mekanisme GCG dengan tujuan untuk menjalankan suatu proses dan struktur untuk mencapai target kinerja serta mewujudkan akuntabilitas Perseroan guna menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di PT PELNI (Persero) merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

The Company implements GCG structure and mechanism aiming to operate process and structure to achieve performance target and accountability of the Company to generate added-value for the Shareholders and Stakeholders by considering interests of other Stakeholders.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) practice at PT PELNI (Persero) refers several prevailing Laws in Indonesia, among others, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company and Minister of State-Owned Enterprise Decree Number Kep-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002 regarding Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise (SOE).



Pelaksanaan GCG di Perseroan mengadaptasi 5 (lima) prinsip GCG yaitu:

GCG implementation in the Company adapts 5 (five) GCG principles, as follows:

### Implementasi Prinsip GCG PT PELNI (Persero)

### PT PELNI (Persero) GCG Principles Implementation

Prinsip Principle	Implementasi Implementation
Transparansi Transparency	Melaksanakan aktivitas keterbukaan informasi melalui pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Pemegang Saham, dan melalui pelaporan keuangan dan melalui media komunikasi resmi.  Perform information disclosure activity by fulfilling reporting obligation to the Shareholders as well as financial reporting and through official communication media.
Akuntabilitas Accountability	Memiliki struktur tata kelola perusahaan yakni organ utama yang saling menunjang terciptanya pelaksanaan tugas yang transparan dan independen. Perseroan juga telah melengkapi pedoman-pedoman yang berfungsi untuk menjadi panduan penerapan tata kelola perusahaan.  Having corporate governance structure including main structures that are supports implementation of transparent and independent duty. The Company also has equipped manuals that are functioned as corporate governance implementation guideline.
Tanggung Jawab (Responsibilitas) Responsibility	Menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang bersifat <i>cross check</i> untuk memastikan responsibilitas dari masing-masing fungsi struktur tata kelola perusahaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya tanpa benturan kepentingan dan intervensi.  Implementation of cross-check corporate governance mechanism to ensure responsibility of each function of the corporate governance structure to exercise their duty and responsibility properly without conflict of interest and intervention.
Independensi Independency	Perseroan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun intervensi dan dominasi dari pihak manapun.  The Company is managed professionally without conflict of interest and intervention from any party.
Kewajaran Fairness	Perseroan menerapkan kesetaraan kepada segenap pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  The Company implements fairness principle to all stakeholders in accordance with prevailing law and regulation.



## Komitmen Terhadap Penerapan GCG

Perseroan menempatkan GCG sebagai landasan penting untuk menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan dengan penguatan struktur dan mekanisme pengelolaan secara internal yang didukung oleh kepatuhan eksternal terhadap seluruh perangkat peraturan perundang-undangan. Komitmen pelaksanaan GCG di Perseroan diwujudkan dalam rangkaian pedoman terkait pelaksanaan GCG dan penandatanganan Pakta Integritas GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Pedoman GCG PT PELNI (Persero)
2. Pedoman *Code of Conduct* PT PELNI (Persero)
3. Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
4. Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT PELNI (Persero)
5. Pakta Integritas PT PELNI (Persero)
6. Pedoman Penanganan Gratifikasi PT PELNI (Persero)
7. Pedoman dan Sistem Manajemen Risiko PT PELNI (Persero)
8. Laporan Tahunan (Annual Report) PT PELNI (Persero)

## Commitment on GCG Implementation

The Company places GCG as fundamental aspect to create sustainable growth through management structure and management consolidation internally that is also supported with external compliance with all regulatory frameworks. GCG implementation commitment in the Company is manifested as several manual books related with GCG implementation and GCG integrity pact signing by the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

1. PT PELNI (Persero) Code of GCG
2. PT PELNI (Persero) Code of Conducts
3. PT PELNI (Persero) Board Manual for Board of Directors and Board of Commissioners
4. PT PELNI (Persero) Conflict of Interest
5. PT PELNI (Persero) Integrity Pact
6. PT PELNI (Persero) Anti-Gratification Manual
7. PT PELNI (Persero) Risk Management Guideline and System
8. PT PELNI (Persero) Annual Report



## Roadmap GCG

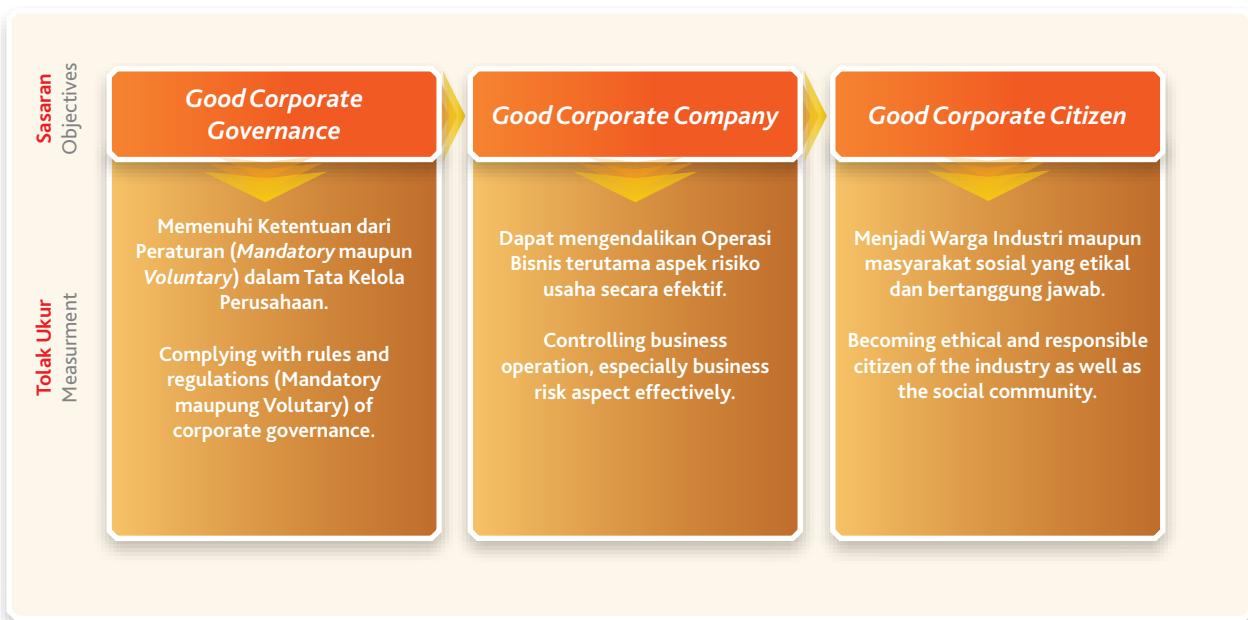
### GCG Road Map

Perseroan telah memiliki *Roadmap GCG* yang didasarkan pada *Roadmap GCG* yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Mengacu pada *Roadmap GCG* tersebut, sasaran akhir *Roadmap GCG* PT PELNI (Persero) adalah terwujudnya Perusahaan sebagai *good corporate citizen* sehingga PT PELNI (Persero) dapat tumbuh berkelanjutan. *Roadmap GCG* PT PELNI (Persero) digambarkan sebagai berikut:

#### Road Map GCG PT PELNI (Persero)

The Company has GCG Road Map based on GCG Road Map prepared by National Committee of Governance Policy (KNKG). Referring to the GCG Road Map, final objective of PT PELNI (Persero) GCG Road Map is establishment of the Company as good corporate citizen to ensure PT PELNI (Persero) has sustainable growth. PT PELNI (Persero) GCG Road Map is illustrated as follows:

#### PT PELNI (Persero) GCG Road Map





# Asesmen GCG

## GCG Assessment

Perseroan melaksanakan evaluasi praktik GCG melalui kegiatan Asesmen GCG (*GCG Assessment*) secara berkala guna mengukur kualitas pelaksanaan GCG pada masing-masing Organ Perseroan. Untuk periode tahun buku 2016, Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP dengan capaian skor **80,785** atau predikat BAIK dengan rincian sebagai berikut:

### Ringkasan Hasil GCG Asesmen PT PELNI (Persero) 2016

The Company evaluated GCG practice through GCG Assessment activity periodically to evaluate quality of GCG implementation in each Corporate structure. For fiscal year 2016 period, GCG Assessment was done by BPKP with **80.785** score achievement or GOOD predicate and detail as follows:

### PT PELNI (Persero) GCG Assessment Result Summary

No.	Aspek/Indikator/Parameter Pengujian Criteria Explanation	Bobot Weight	Capaian Tahun 2016 2016 Achievement		Penjelasan Explanation
			Skor Score	Percentase Percentage	
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan.  Commitment on Sustainable Corporate Governance	7.000	5.681	81.157	Baik  Good
2.	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal  Shareholders and GMS/Capital Owner	9.000	8.135	90.388	Sangat Baik  Very Good
3.	Dewan Komisaris /Dewan Pengawas  Board of Commissioners/Supervisory Board	35.000	31.461	89.888	Sangat Baik  Very Good
4.	Direksi  Board of Directors	35.000	29.389	83.968	Baik  Good
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi  Information Disclosure and Transparency	9.000	6.119	67.994	Cukup Baik  Fair
6.	Aspek Lainnya  Other Aspects	5.000	0.000	0.000	
Skor Keseluruhan Total Score		100.000	80.785	80.785	Baik  Good

### Realisasi Rekomendasi Assessment GCG 2015

Pada tahun 2016, PT PELNI (Persero) melaksanakan assessment yang dilakukan oleh BPKP. Hasil skor assessment GCG untuk praktik tahun 2015 menunjukkan hasil dengan cukup baik dengan capaian skor **77,83** atau predikat "CUKUP BAIK," dengan rincian sebagai berikut:

### Realization of GCG Assessment 2015 Recommendation

In 2016, PT PELNI (Persero) conducted assessment by BPKP. GCG Assessment score for practice in 2015 indicated good result with score of **77.83** score or "**VERY GOOD**" predicate with detail as follows:



## Ringkasan Hasil GCG Asesmen PELNI 2015

## PT PELNI (Persero) GCG Assessment 2015 Result Summary

No.	Aspek/Indikator/Parameter Pengujian Criteria Explanation	Bobot Indicator Weight	Capaian Tahun 2016 2015 Achievement		Penjelasan Explanation
			Skor Score	Persentase Achievement %	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan  Commitment on Sustainable Corporate Governance	7.00	4,74	67.696	Cukup Baik  Fair
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal  Shareholders and GMS/Capital Owner	9.00	7,84	87.102	Sangat Baik  Very Good
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas  Board of Commissioners/Supervisory Board	35.00	31,24	89.248	Sangat Baik  Very Good
IV	Direksi  Board of Directors	35.00	28,29	80.832	Baik  Good
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi  Information Disclosure and Transparency	9.00	5,72	63.558	Cukup Baik  Fair
VI	Pengungkapan Informasi dan Transparansi  Other Aspects	-	-	0.000	
Skor Keseluruhan Total Score		100	77,83	77,83	Baik  Good

Status tindak lanjut usulan rekomendasi Asesmen GCG tahun 2015, sebagai berikut:

Status of GCG Assessment 2015 recommendation follow-up is as follows:

No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
1.	Melakukan peninjauan dan pemutakhiran Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku.  Review and update Code of GCG and Code of Conducts.	GCG and Pedoman Perilaku sudah di-review dan dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tahun 2016. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) telah diperbarui dan disahkan melalui SK Direksi Nomor: 12.29/06/SK/HKO.01/2016. Pedoman Perilaku PT PELNI (Persero) telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 12.29/01/SK.HKO.01/2016  <i>Code of GCG and Code of Conducts have been reviewed and updated under PT PELNI (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners Decree 2016. Code of GCG had been updated and validated under Board of Directors Decree Number: 12.29/06/SK/HKO.01/2016. PT PELNI (Persero) Code of Conducts has been updated and validated under Board of Directors Decree No. 12.29/01/SK.HKO.01/2016.</i>



No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
2.	<p>Direksi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab GCG PT PELNI (Persero) menyusun laporan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS minimal setahun sekali.</p> <p>The Board of Directors who is appointed as GCG supervisor at PT PELNI (Persero) to prepare Good Corporate Governance Implementation report to be presented to the Board of Commissioners and GMS minimum once in a year.</p>	<p>Surat Direktur Utama Nomor: 03.24/01/S/001/2016 perihal Laporan Penerapan GCG PT PELNI (Persero) tahun 2015 yang ditujukan kepada Yth DEKOM</p> <p>President Director Letter Number 03.24/01/S/001/2016 concerning PT PELNI (Persero) GCG implementation report 2015 addressed to the Board of Commissioners</p>
3.	<p>Melakukan Sosialisasi Pedoman GCG &amp; Pedoman Perilaku bagi Insan PELNI.</p> <p>Socialization of Code of GCG and Code of Conducts for PELNI People.</p>	<p>Sosialisasi Pedoman GCG &amp; Pedoman Perilaku bagi Insan PELNI dilaksanakan di 6 Kapal, 6 cabang dan Galangan Surya Surabaya. Sosialisasi yang sudah dilaksanakan di KM Kelud 29 Januari 2016, KM Dorolonda pada 16 Maret 2016, Cabang Surabaya &amp; Galangan Surya Surabaya pada 15 Maret 2016. Sosialisasi juga dilakukan melalui milis pegawai PELNI dan website.</p> <p>Socialization of Code of GCG and Code of Conducts for PELNI People was held at 6 ships, 6 branch offices and Galangan Surya Surabaya. The socialization had been done at KM Kelud on January 29, 2016, KM Dorolonda on March 16, 2016, Surabaya Branch &amp; Galangan Surya Surabaya on March 15, 2016. The socialization was also done via mailing list of PELNI's employee and website.</p>
4.	<p>Lebih meningkatkan upaya menindaklanjuti areas of improvement (AOI) hasil assessment penerapan GCG tahun sebelumnya guna meningkatkan perolehan skor pada tahun yang akan datang.</p> <p>To improve effort in following-up GCG assessment areas of improvement (AOI) to increase the score in the next year.</p>	<p>Areas of improvement (AOI) hasil assessment penerapan GCG tahun sebelumnya ditindaklanjuti guna meningkatkan perolehan skor pada tahun yang akan datang.</p> <p>GCG assessment areas of improvement (AOI) of previous year had been followed-up to increase the score in the next year.</p>
5.	<p>Meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan lebih intensif dalam rangka meningkatkan pemahaman Insan PELNI terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi.</p> <p>To intensify socialization activity more intensively in order to develop knowledge of PELNI People's understanding on anti-gratification policy.</p>	<p>Sudah dilakukan melalui media internal perusahaan yaitu milis pegawai, website dan Roll Banner yang di Kantor Pusat, Cabang dan Kapal. Sosialisasi dengan Mitra, Rekanan dan Vendor dilaksanakan pada 07 Mei 2016 di Auditorium PT PELNI (Persero).</p> <p>Had been carried out via internal media, such as employee mailing list, website and Roll banner at Head Office, Branch Office and Ships. The socialization with Partners and Vendors was held on May 7, 2016 at Auditorium PT PELNI (Persero).</p>
6.	<p>Menginstruksikan Unit kerja penanggungjawab pengendalian gratifikasi untuk membuat rencana kegiatan dan melaporkan kegiatannya sepanjang satu tahun.</p> <p>Instruction to Anti-Gratification supervisor unit to prepare activity plan and report the activity done throughout the year.</p>	<p>SE Nomor 01.11/1/SE/HKO.01/2016 perihal pelaporan gratifikasi setiap bulan diinstruksikan kepada Pimpinan Unit Kerja Kantor Pusat, Cabang dan Kapal agar menyampaikan laporan Gratifikasi sebelum tanggal 05 setiap bulannya. Dalam SK Direksi Nomor : 12.29/03/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Pedoman Gratifikasi PT PELNI (Persero) mekanisme dan tata laksana pelaporan atas penolakan, penerimaan dan pemberian Gratifikasi. SK Direksi Nomor : 12.29/02/SK/HKO.01/2016 Pedoman Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).</p> <p>Circular Letter Number 01.11/1/SE/HKO.01/2016 regarding monthly gratification report that is instructed to Head of Working Unit at Head Office, Branch Office and Ships to submit Gratification report before the 5<sup>th</sup> day every month. In Board of Directors Decree Number 12.29/03/SK/HKO.01/2016 regarding PT PELNI (Persero) Anti-Gratification mechanism and reporting procedure on Gratification rejection, acceptance and giving. Board of Directors Decree No. 12/29/SK/HKO.01/2016 Anti-Gratification (UPG) Manual.</p>



No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
7.	Menyusun kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan ( <i>whistle blowing system</i> ) dan pelaksanaan atas kebijakan tersebut.  Formulate whistle blowing system policy and implementation of the WBS policy.	Landasan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran di PT PELNI (Persero) merujuk pada SK Pedoman WBS No 12.29/04/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Pelanggaran ( <i>Whistle Blowing System</i> ) PT PELNI (Persero).  PT PELNI (Persero) Whistle Blowing System Policy at PT PELNI (Persero) refers to WBS Manual Decree No. 12.29/04/SK/HKO.01/2016 regarding PT PELNI (Persero) Whistle Blowing System Manual.
8.	Menginstruksikan unit kerja penanggungjawab <i>whistle blowing system</i> untuk menyusun rencana sosialisasi kebijakan <i>whistle blowing system</i> .  Instruction the responsible unit of whistle blowing system to prepare the socialization policy plan of whistle blowing system.	Pedoman Pelanggaran ( <i>Whistle Blowing System</i> ) PT PELNI (Persero) sudah dipublikasikan melalui milis pegawai dan pada website PELNI.  The PT PELNI (Persero) Whistle Blowing System Manual have been published through an employee mailing list and on the PELNI website.
9.	Mendokumentasikan secara lengkap pelaksanaan uji kepatuhan dan kelayakan bagi Calon Direksi dan membuat Berita Acara hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatuhan.  Comprehensive documentation of the implementation of compliance and feasibility tests for Candidates of the Board of Directors and prepare Minutes of the results of the Feasibility and Compliance Feasibility Assessment.	Sudah didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku  Has been documented in accordance with prevailing regulation
10.	Menetapkan anggota Direksi yang definitif oleh RUPS/ Pemilik Modal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir.  Appoint definitive member of the Board of Directors by the General Meeting of Shareholders/Capital Owners no longer than 30 (thirty) days after the term of office expires.	Sudah dilaksanakan, Tahun 2016 tidak ada Jabatan Direksi yang definitif  <i>Already implemented, there is no definitive Board of Directors position in 2016</i>
11.	Lebih tepat waktu dalam memberikan persetujuan/ keputusan atas usulan perusahaan yang perlu mendapat persetujuan Pemegang Saham.  More timely in granting approval/decision on the company's proposal to be approved by the Shareholder.	Sudah dilaksanakan  Completed
12.	Melakukan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan mendokumentasikan proses penjaringan dan penilaian calon Anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.  Evaluate the candidates for the Board of Commissioners and document the process of appraising and appraising prospective members of the Board of Commissioners in accordance with prevailing regulations.	Sudah dilaksanakan  Completed
13.	Memberikan arahan secara spesifik mengenai pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan.  Provide specific direction on the discussion and evaluation on the implementation of Good Corporate Governance in the company.	Sudah dilaksanakan  Completed



No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
14.	Dalam menetapkan gaji/honorium Direktur Utama dan Dewan Komisaris memuat formula perhitungannya  In determining the salary/honorarium of the President Director and the Board of Commissioners shall contain the formula for calculation.	Sudah dilaksanakan  Completed
15.	Mendokumentasikan pembahasan dan respon Dewan Komisaris atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari stakeholders berikut penyampaian saran penyelesaian kepada Direksi.  Documentation of the discussion and response of the Board of Commissioners on suggestions, expectations, problems and complaints from stakeholders following the submission of the proposed settlement to the Board of Directors.	Sudah didokumentasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai arahan Dewan Komisaris  Has been documented and acted upon by the Board of Directors in accordance with the direction of the Board of Commissioners.
16.	Memberikan arahan pengawasan dan evaluasi atas <i>internal control</i> secara keseluruhan baik oleh SPI maupun auditor independen.  Provide guidance on integrated monitoring and evaluation of internal control by both SPI and independent auditors.	Dewan Komisaris memberikan arahan pengawasan dan evaluasi atas internal control.  The Board of Commissioners provides direction for monitoring and evaluation of internal control.
17.	Melakukan telaah atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.  Reviewing the internal control system policy/design as well as implementation.	Dewan Komisaris sudah melakukan telaah atas kebijakan sistem pengendalian intern.  The Board of Commissioners has reviewed the internal control system policy.
18.	Dewan Komisaris memberikan tanggapan yang memadai atas arahan tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya.  The Board of Commissioners responds appropriately to the direction of the management succession policy and its implementation.	Dekom memberikan arahan terkait kebijakan suksesi manajemen.  The Board of Commissioners provides direction related to management succession policy.
19.	Memberikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.  Memberikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.	Dewan Komisaris memberikan arahan terkait kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.  The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors regarding accounting policies and preparation of financial statements and their implementation.
20.	Menyusun rencana mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.  Prepare plan for monitoring and providing advice on procurement policies and their implementation.	Sudah tertuang dalam RKA Dewan Komisaris tahun 2017.  Has been stipulated in the Board of Commissioners RKA 2017.
21.	Menyusun rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dalam RTK Dewan Komisaris.  Prepare a discussion plan on the policy and implementation of the management of a subsidiary/joint venture company in the Board of Commissioners RTK.	Sudah ada rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.  There is already a discussion plan on the policy and implementation of the management of subsidiaries/joint ventures.



No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
22.	Menyusun dan menyampaikan pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen dan tingkat capaian target kinerja anggota Direksi secara individu.  Compile and report the performance achievements of each Directorate based on the targets in the Contract of Management and the level of performance achievement of individual members of the Board of Directors.	Sudah dilakukan penilaian individu terkait kinerja Direksi secara individu.  <i>Individual assessments have been conducted on Directors individual performance.</i>
23.	Membuat dan mendokumentasikan surat kuasa ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam rapat dengan alasan ketidakhadiran dalam rapat dan disampaikan secara tertulis apabila tidak hadir dalam rapat Direksi dan menuangkannya dalam risalah rapat.  Create and document the power of attorney regarding the absence of the Board of Commissioners in the meeting on the grounds of the absence of the meeting and submitted in writing if not present at the Board of Directors meeting and put it in the minutes of the meeting.	Sudah dilaksanakan  Completed
24.	Memuat dalam setiap risalah rapat mengenai evaluasi (pemantauan progress) dan pembahasan untuk tindak lanjut pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.  Include evaluation (monitoring progress) and discussion for follow-up implementation of the previous meeting decision in every minutes of the meeting.	Sudah dilaksanakan  Completed
25.	Melakukan peninjauan dan pemutakhiran Piagam Komite Audit secara berkala dan mengesahkan program kerja tahunan kedua Komite Dewan Komisaris.  Review and update the Charter of the Audit Committee periodically and ratify the annual work program of the two Committees under the Board of Commissioners.	Sudah dilaksanakan  Completed
26.	Menginstruksikan kedua Komite Dewan Komisaris untuk menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan dengan substansi laporan memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.  Instruction to two Committees under the Board of Commissioners to prepare quarterly reports and annual reports with the substance of the report contains a comparison of the realization of activities with the annual work program as well as the substance of the results of its activities and recommendations.	Sudah dilaksanakan  Completed
27.	Lebih mengoptimalkan peran Kedua Komite Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.  To optimize the role of the two Committees of the Board of Commissioners in supporting the implementation of the duties of the Board of Commissioners.	Sudah dilaksanakan  Completed



No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
28.	<p>Menyelenggarakan program pengenalan untuk seluruh Direksi yang baru diangkat (apabila ada) baik yang berasal dari luar maupun dalam perusahaan dengan substansi sesuai kebijakan yang ada di perusahaan dan melengkapinya dengan pengisian daftar hadir bagi Direksi dan peserta lain yang hadir.</p> <p>To organize introduction program for all newly appointed Directors (if any) from outside or within the company with substance in accordance with company policy and completing it by filling out the attendance list for the Board of Directors and other participants present.</p>	<p>Sudah dilaksanakan pada Rapat Direksi 30 Desember 2016</p> <p>Done in Board of Directors Meeting on December 31, 2016</p>
29.	<p>Merealisasikan rencana pelatihan bagi anggota Direksi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut.</p> <p>Realization of the training plan for the members of the Board of Directors and prepare a report on the implementation of the activity.</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p> <p>Completed</p>
30.	<p>Melakukan pembahasan rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.</p> <p>Discuss the promotion plan and mutation of one level of position under the Board of Directors intensively in the Board of Directors Meeting and submitted to the Board of Commissioners/Supervisory Board for the opportunity of giving direction to the promotion and mutation plan.</p>	<p>Dibahas pada rapat dan tertuang pada risalah rapat.</p> <p>Discussed in the meeting and disclosed in Minutes of Meeting.</p>
31.	<p>Melakukan review, menyempurnakan dan menetapkan mekanisme dalam merespon peluang bisnis yang memuat antara lain pengaturan mengenai dokumentasi terhadap setiap proses yang dilakukan oleh direksi dalam merespon usulan bisnis, kewajiban Direksi untuk melakukan analisa dengan memperhatikan risiko yang akan dihadapi dalam memilih peluang bisnis.</p> <p>Perform review, revision, refining and establishing mechanisms to respond to business opportunities that include, among others, the regulation of documentation of any process undertaken by the Board of Directors in response to business proposals, the obligation of the Board of Directors to conduct an analysis with due regard to the risks to be faced in choosing business opportunities.</p>	<p>Dalam agenda rapat ERM &amp; Komite Risiko, Rapat Dewan Komisaris dan Komite Risiko serta pada rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi dibahas mengenai risiko perusahaan dan strategi bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan</p> <p>In the agenda of the ERM &amp; Risk Committee meeting, the Board of Commissioners and Risk Committee meetings and at the joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors discussed the Company's risks and business strategies to improve the performance of the company</p>
32.	<p>Menyusun dan menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja, memuat penjelasan mengenai Indikator Kinerja, minimal berupa formula/rumus, cara-cara penilaian, informasi sumber data, saat pelaporan, dan sebagainya.</p> <p>Compile and define the performance appraisal system/guidelines, contains an explanation of Performance Indicators, at least formulas/formulas, assessment methods, data source information, when reporting, and on wards.</p>	<p>Terdapat Penilaian Kinerja Individu sesuai dengan formula dari Divisi SDM</p> <p>There is an Individual Performance Assessment in accordance with the formula of the HR Division.</p>



No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
33.	Menyusun kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi.  Formulate performance contracts for each position within the organizational structure.	Kontrak Kerja ditandatangani oleh Pejabat Struktural  Working Contracts are signed by Structural Officials
34.	Melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan. Tindak lanjut hasil evaluasi capaian kinerja yang belum sesuai target dievaluasi secara berkala.  Conduct analysis and evaluation on performance achievements for positions/units under the Board of Directors and corporate level. Follow-up of performance evaluation results that have not been on target are evaluated periodically.	Corporate Planning menganalisis dan mengevaluasi capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan. Tindak lanjut hasil evaluasi capaian kinerja yang belum sesuai target dievaluasi secara berkala.  Corporate Planning analyzes and evaluates performance achievements for positions/units under the Board of Directors and corporate level. Follow-up of performance evaluation results that have not been on target are evaluated periodically.
35.	Menyusun memiliki target kinerja individu masing-masing Direksi.  Prepare to have individual performance target of each Director.	KPI masing-masing Direksi disusun berdasarkan target Kinerja tahun 2016.  Board of Directors individual KPI shall be compiled based on the 2016 Performance target.
36.	Menyusun rencana audit atas teknologi informasi baik oleh SPI maupun auditor eksternal.  Prepare audit plan on information technology by both SPI and external auditors.	Audit Teknologi Informasi tahun 2016 direncanakan diaudit secara internal. <i>Self assessment</i> yang dilakukan oleh internal PELNI untuk melihat tingkat kematangan tata kelola TI diperoleh total nilai sebesar 2.04 ( <i>COBIT Maturity</i> ).  In 2016, Information Technology Audit was planned internally. Self assessment conducted by internal PELNI to see the level of IT governance maturity obtained a total value of 2.04 (COBIT Maturity).
37.	Menyusun dan menetapkan SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).  Develop and set up Customer Service SOP and Minimum Service Standards (SPM).	Standar Pelayanan Minimum (SPM) dituangkan dalam SK Direksi No. 06.22/1/SK/HKO.01/2016 Tanggal 22 Juni 2016 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kapal PT PELNI (Persero).  Minimum Service Standards (SPM) is stipulated in Decree No. BoD. 06.22/1/SK/HKO.01/2016 dated June 22, 2016 on Standard Passenger Vessel Service of PT PELNI (Persero).
38.	Melakukan sosialisasi SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).  Disseminate Customer Service SOP and Minimum Service Standards (SPM).	SK Direksi No. 06.22/1/SK/HKO.01/2016 tanggal 22 Juni 2016 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kapal PT PELNI (Persero) telah diinformasikan kepada seluruh pegawai darat dan laut melalui millis pegawai PELNI.  Board of Directors Decree No. 06.22/1/SK/HKO.01/2016 dated June 22, 2016 About Standard Passenger Vessel Service PT PELNI (Persero) has been informed to all ground and offshore personnel via PELNI employees mailing list.
39.	Menyusun dan menetapkan pedoman/kebijakan pengadaaan dipublikasikan/dapat diakses pemasok/calon pemasok.  Formulate and enforce procurement guidelines/policies published/accessible to suppliers/potential suppliers.	SOP Pengadaaan Barang & Jasa telah di-upload pada website PELNI  Procurement SOP has been uploaded on PELNI website.
40.	Menyusun rencana pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan.  Develop an optimal procurement plan based on the calculation of the company's needs.	Rencana pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan tertuang dalam KPI Divisi Pengadaan.  Procurement plan is optimally based on the calculation of the company's needs contained in the KPI Procurement Division.



## Laporan Tahunan 2016 Annual Report

PT PELNI (Persero)

No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
41.	<p>Menyusun dan menetapkan kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan <i>knowledge</i>, <i>skill</i> dan <i>ability</i> yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pasca pendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan belum disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi perusahaan (Diklat).</p> <p>Prepare and formulate education and training policies/ programs to provide increased knowledge, skills and abilities that can be used to improve employee performance effectiveness and post-education performance evaluation policies and training to measure educational and training outcomes have not been adapted to changes in organizational structure (Training &amp; Development).</p>	<p>1. SK Direksi Nomor: 04.12/3/SK/HKO.01/2016 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor: 09.08/1/SK/HKO.01/2015 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi PT. PELNI (Persero).  2. SK Direksi Nomor: 09.01/1/SK/HKO.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT. PELNI.</p> <p>1. Board of Directors Decree Number: 04.12/3/SK/HKO.01/2016 concerning Amendment to the Board of Directors Decree Number: 09.08/1/SK/HKO.01/2015 regarding Organizational Structure, Main Duties and Functions of PT PELNI (Persero).  2. Board of Directors Decree Number: 09.01/1/SK/HKO.01/2016 regarding Organization and Working Procedure of Branch Office of PT PELNI (Persero).</p>
42.	<p>Menerapkan sistem penilaian kinerja (<i>performance appraisal</i>) bagi secara konsisten.</p> <p>Implement performance appraisal system consistently.</p>	<p>Indikator kinerja per individu dibuat atasan langsung dan dimasukkan dalam sistem aplikasi PKP sebagai dasar penilaian tiap semester</p> <p>Individual performance indicators are made by direct supervisors and are incorporated into the PKP application system as the basis for assessment in every semester.</p>
43.	<p>Menetapkan target kinerja individu, penilaian atas capaiannya, analisa dan evaluasi atas capaiannya dan penerapan <i>job tender</i>.</p> <p>Stipulate individual performance targets, assessment of achievements, analysis and evaluation of their performance and application of job tender.</p>	<p>SK Direksi No 09.30/5/SK/HKO.01/2017 tentang Pola Pengembangan Karir Jabatan Pegawai PT PELNI (Persero) pasal b. SK Direksi No. tentang SOP Direktorat SDM &amp; Umum bagian "Perencanaan Karir".</p> <p>Board of Directors Decree No. 09.30/5/SK/HKO.01/2017 on Career Development Pattern Position Employees PT PELNI (Persero) article b. Board of Directors Decree No. On the SOP of the Directorate of Human Resources &amp; General section of "Career Planning".</p>
44.	<p>Menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan melaksanakan survei kepuasan karyawan.</p> <p>Develop and stipulate assessment methods policy to measure employee satisfaction and conduct employee satisfaction surveys.</p>	<p>Surat Edaran Direktur SDM &amp; Umum No. 05.20/1/SE/HKO.03/2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Survei Keterikatan Pegawai.</p> <p>Director of Human Resources &amp; General Affairs Circular Letter No. 05.20/1/SE/HKO.03/2016 dated May 20, 2016 concerning the Employee Engagement Survey.</p>
45.	<p>Melakukan pengukuran kepuasan karyawan belum dilaksanakan secara berkala dan tindakan atau program kerja untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan karyawan tidak ada</p> <p>Performing employee satisfaction survey that has not been implemented on a regular basis and action or work program to follow up the results of employee satisfaction survey does not exist</p>	<p>Tahun 2016 melalui Surat Edaran Direktur SDM &amp; Umum No. 05.20/1/SE/HKO.03/2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Survei Keterikatan Pegawai. Hasil laporan survei keterikatan pegawai tahun 2016 adalah 77% terikat.</p> <p>In 2016, under Director of Human Resources &amp; General Affairs Decree No. 05.20 / 1 / SE / HKO.03 / 2016 dated May 20, 2016 concerning the Employee Engagement Survey. Employee engagement survey report 2016. The result is 77% enganged.</p>
46.	<p>Membuat laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus.</p> <p>Prepare Shares ownership report in the company and other companies to the Company (Corporate Secretary) to be recorded in the Special Register.</p>	<p>Corporate Secretary mencatat kepemilikan saham PELNI adalah 100% Miliki Negara dan Ada Lembar Fakta Integritas yang ditandatangan oleh Direksi &amp; Dewan Komisaris terkait tidak memiliki Saham di PELNI.</p> <p>Corporate Secretary noted that ownership of PELNI shares are 100% owned by the Government supported by Integrity Facts that were signed by Board of Directors &amp; Board of Commissioners declaring no shares ownership with PT PELNI (Persero).</p>



No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
47.	<p>Menyusun dan menetapkan pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</p> <p>Prepare and stipulate the Board of Directors Meeting Guideline and Procedure, minimum to formulate the meeting ethics and preparation of minutes of meetings, follow-up evaluation of the results of previous meetings, and discussion on the direction/ recommendation and/or decision of the Board of Commissioners/Supervisory Board.</p>	<p>Pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.</p> <p>the Board of Directors Meeting Guideline and Procedure, minimum to formulate the meeting ethics and preparation of minutes of meetings, follow-up evaluation of the results of previous meetings, and discussion on the direction/ recommendation and/or decision of the Board of Commissioners/Supervisory Board.</p>
48.	<p>Mendokumentasikan dalam risalah rapat mengenai evaluasi (pemantauan <i>progress</i>) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan pembahasan tindak lanjut hasil keputusan rapat sebelumnya yang belum selesai.</p> <p>Documentation in the minutes of the meeting on evaluation (monitoring progress) on the implementation of the decision of the outcome of the previous meeting and discussion of the follow-up of the results of previous unfinished meeting decisions.</p>	<p>Terdokumentasi</p> <p>Documented</p>
49.	<p>Menyampaikan Laporan hasil penugasan pengawasan intern kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.</p> <p>Submit the Internal Audit Assignment Report to the Board of Commissioners/Supervisory Board cq Audit Committee.</p>	<p>Laporan hasil penugasan pengawasan intern disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.</p> <p>Internal Audit Assignment Reports are submitted to the Board of Commissioners/Supervisory Board cq Audit Committee.</p>
50.	<p>Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretaris perusahaan. Dalam laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan hanya memuat program dan realisasi disertai target dan capaianya dan Sekretaris Perusahaan menyusun rencana kerja mengenai program pengenalan untuk Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Evaluate the execution of duties and work programs of the Corporate Secretary. In the realization report of the implementation of the activities the Corporate Secretary only contains the program and the realization accompanied by its targets and achievements and the Corporate Secretary prepares a work plan regarding the introduction program for the Board of Directors and Board of Commissioners.</p>	<p>Sudah dilaksanakan dalam Program Kerja Corporate Secretary Tahun 2016</p> <p>Has been implemented in Corporate Secretary Working Program of 2016</p>
51.	<p>Memuat target dan capaian program kerja Sekretaris Perusahaan dalam laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan.</p> <p>Formulate targets and achievements of the Corporate Secretary's work program in the realization report of the Corporate Secretary's activities.</p>	<p>Tercantum dalam KPI Corporate Secretary tahun 2016</p> <p>Stipulated in Corporate Secretary KPI 2016</p>



No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
52.	<p>Menyusun rencana kerja mengenai program pengenalan perusahaan untuk Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat serta membuat dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus.</p> <p>Prepare a work plan on the company's introduction program for the newly appointed Board of Directors and Board of Commissioners and create and maintain a list of shareholders and special lists.</p>	<p>Dilaksanakan pada pergantian Direksi tahun 2016</p> <p>Implemented in Board of Directors succession in 2016</p>
53.	<p>Menginstruksikan kedua Komite Dewan Komisaris untuk menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan dengan substansi laporan memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.</p> <p>Instruction to two Committees under the Board of Commissioners to prepare quarterly reports and annual reports with the substance of the report contains a comparison of the realization of activities with the annual work program as well as the substance of the results of its activities and recommendations.</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p> <p>Completed</p>
54.	<p>Lebih mengoptimalkan peran Kedua Komite Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p> <p>To optimize the role of the two Committees under the Board of Commissioners in supporting the implementation of the duties of the Board of Commissioners.</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p> <p>Completed</p>
55.	<p>Menyelenggarakan program pengenalan untuk seluruh Direksi yang baru diangkat (apabila ada) baik yang berasal dari luar maupun dalam perusahaan dengan substansi sesuai kebijakan yang ada di perusahaan dan melengkapinya dengan pengisian daftar hadir bagi Direksi dan peserta lain yang hadir.</p> <p>Organize orientation program for all newly appointed Directors (if any) from outside or within the company with substance in accordance with company policy and completing it by filling out the attendance list for the Board of Directors and other participants present.</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p> <p>Completed</p>
56.	<p>Menyusun dan menetapkan kebijakan/pedoman standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan direksi dan kesegeraan pengkomunikasian keputusan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi serta belum ada pengaturan pengambilan keputusan yang harus diambil Direksi di luar rapat Direksi.</p> <p>Prepare and stipulate the policy/guidance of time standards for the immediate level of the decision of the board of directors and the immediate decision making communication to the organizational level under the board of directors and there is no regulatory decision-making that should be taken by the Board of Directors outside the board of directors meeting.</p>	<p>Tertuang dalam Pedoman Tata Laksana Kerja Direksi &amp; Dewan Komisaris ditetapkan dalam SKB Direksi &amp; Dewan Komisaris Nomor: 12.29/05/SK/HKO.01/2016 dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang ditetapkan dalam SK Direksi Nomor: 12.29/06/SK/HKO.01/2016.</p> <p>As stipulated in the Board of Directors &amp; Board of Commissioners Board of Directors' Decree No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 and Corporate Governance Guidelines (GCG) as stipulated in Decree No. 12.29/06/SK/HKO.01/2016.</p>



No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
57.	Melakukan pembahasan rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.  Discuss the promotion plan and mutation of one level of position under the Board of Directors intensively in the Board of Directors Meeting and submitted to the Board of Commissioners / Supervisory Board for the opportunity of giving direction to the promotion and mutation plan.	Dibahas dalam rapat Direksi  Discussed in the Board of Directors Meeting
58.	Melakukan <i>review</i> , menyempurnakan dan menetapkan mekanisme dalam merespon peluang bisnis yang memuat antara lain pengaturan mengenai dokumentasi terhadap setiap proses yang dilakukan oleh Direksi dalam merespon usulan bisnis, kewajiban Direksi untuk melakukan analisa dengan memperhatikan risiko yang akan dihadapi dalam memilih peluang bisnis.  Performing review, refining and establishing mechanisms to respond to business opportunities that include, among others, the regulation of documentation of any process undertaken by the Board of Directors in response to business proposals, the obligation of the Board of Directors to conduct an analysis with due regard to the risks to be faced in choosing business opportunities.	Sudah dilaksanakan  Completed
59.	Menyusun kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi.  Formulate performance contracts for each position within the organizational structure.	Sudah dilaksanakan  Completed
60.	Melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan. Tindak lanjut hasil evaluasi capaian kinerja yang belum sesuai target dievaluasi secara berkala.  Conduct analysis and evaluation on performance achievements for positions/units under the Board of Directors and corporate level. Follow-up of performance evaluation results that have not been on target are evaluated periodically.	Sudah dilaksanakan  Completed
61.	Laporan kinerja teknologi belum disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (termasuk hasil audit TI) secara berkala.  The technology performance report has not been submitted to the Board of Commissioners/Supervisory Board (including IT audit report) regularly.	Laporan kinerja teknologi disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (termasuk hasil audit TI) secara berkala.  The technology performance report is submitted to the Board of Commissioners / Board of Trustees (including IT audit results) regularly.
62.	Menyusun dan menetapkan SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).  Develop and set up Customer Service SOP and Minimum Service Standards (SPM).	Sudah dilaksanakan  Completed



No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
63.	Melakukan sosialisasi SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).  Disseminate Customer Service SOP and Minimum Service Standards (SPM).	Sudah dilaksanakan  Completed
64.	Menyusun dan menetapkan pedoman/kebijakan pengadaaan dipublikasikan/dapat diakses pemasok/calon pemasok.  Compile and enforce procurement guidelines/policies published/accessible to suppliers/potential suppliers.	Sudah dilaksanakan  Completed
65.	Melakukan sosialisasi kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan perusahaan.  Disseminate risk management policies to all employees of the company.	Sudah dilaksanakan  Completed
66.	Menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka ( <i>framework</i> ) pengendalian intern dan uraian sistem pengendalian yg diterapkan perusahaan.  Stipulate internal control system design that regulates the framework of internal control and description of the control system applied by the company.	Sudah dilaksanakan  Completed
67.	Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas.  Evaluate the effectiveness of internal control at the entity level.	Sudah dilaksanakan  Completed
68.	Menginstruksikan kepada Direksi anak perusahaan untuk menandatangani sertifikasi terhadap laporan keuangan anak perusahaan, melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian intern tingkat korporat, dan menerbitkan <i>internal control report</i> -nya.  Instruction to the Board of Directors of a subsidiary to sign certificates of the subsidiary's financial statements, evaluate the effectiveness of corporate-level internal controls, and publish its internal control report.	Sudah dilaksanakan  Completed
69.	Menindaklanjuti seluruh hasil temuan internal dan auditor eksternal (KAP dan BPK) dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan.  To follow up all internal and external audit findings (KAP and BPK) and submit reports to the Board of Commissioners/Supervisory Board periodically for at least 3 (three) months.	Sudah dilaksanakan  Completed
70.	Menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan) secara tepat waktu.  Submit tax obligations (SPT Annual or monthly) documents on time.	Dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan) secara tepat waktu.  Tax obligations (SPT Annual or monthly) documents on time submission.



No.	Uraian Description	Status Pelaksanaan Implementation Status
71.	Membuat laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus.  Prepare Shares ownership report in the company and other companies to the Company (Corporate Secretary) to be recorded in the Special Register.	Sudah dilaksanakan  Completed
72.	Menyusun dan menetapkan pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.  Prepare and stipulate the guidelines/meetings of the Board of Directors Meeting, at a minimum set of meeting ethics and preparation of minutes of meetings, follow-up evaluation of the results of previous meetings, and discussion on the direction/ recommendation and/or decision of the Board of Commissioners/Board of Supervisors.	Sudah dilaksanakan  Completed
73.	Menyesuaikan kecukupan tenaga auditor dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau Divisi SDM dengan kebutuhan perusahaan.  Adjust the adequacy of the auditor's power is generated from the workload analysis performed by the SPI and/or the HR Division with the needs of the company.	Sudah dilaksanakan  Completed
74.	Mensosialisasikan dan mempublikasikan informasi perusahaan pada website maupun media internal perusahaan sesuai dengan klasifikasi kerahasiaan.  Disseminate and publish company information on the website or internal media of the company in accordance with the classification of confidentiality.	Sudah dilaksanakan  Completed

## Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali Ultimate And Controlling Shareholder Informations

Pemegang Saham Utama dan pengendali PT PELNI (Persero) adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan wakil kuasa Pemegang Saham adalah Kementerian Negara BUMN Republik Indonesia.

Majority and Controlling Shareholders of PT PELNI (Persero) is The Republic of Indonesia Government where The Ministry of SOE acts as shareholders Attorney.



# Struktur Organ GCG Perusahaan

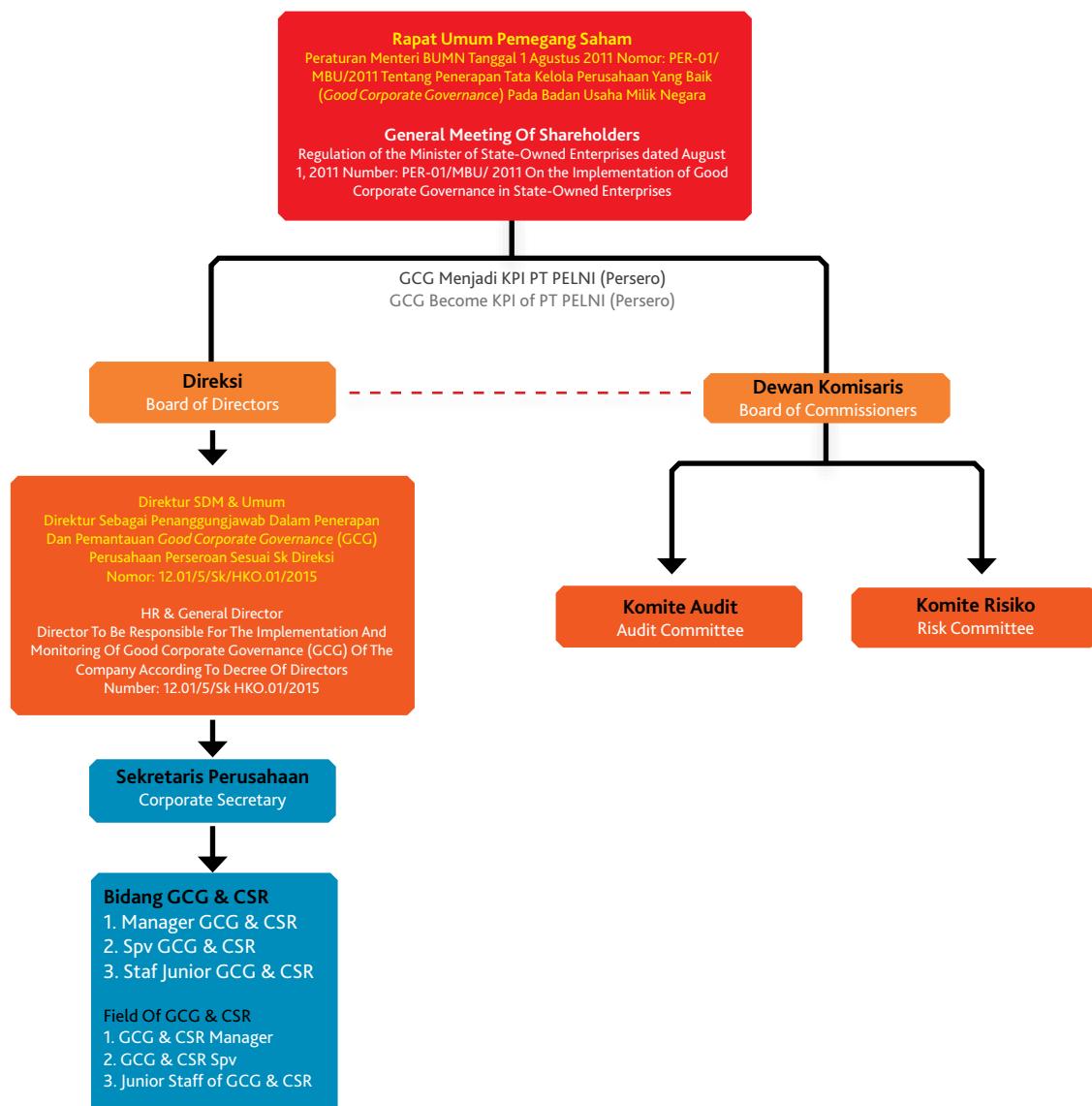
## Corporate GCG Structure

Sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan telah memiliki struktur *Governance* yang terdiri terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama PT PELNI (Persero) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun Organ Pendukung PT PELNI (Persero) diantaranya Komite Audit, Komite Kebijakan Risiko, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Manajemen Risiko. Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masing-masing organ mempunyai peran penting dalam penerapan *GCG* dan menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

In compliance with The Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Company has established Governance Structure comprises of Main Structure and Supporting Structure. Main Structure of PT PELNI (Persero) consisted of General Meetings of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners. Supporting Structure of PT PELNI (Persero) includes Audit Committee, Risk Policy Commitee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Risk Management. As disclosed in the Articles of Association and other prevailing Law, each of the structure has important role in GCG implementation and exercise function, duty and responsibility on behalf of the Company's interest.

### Struktur GCG PT PELNI (Persero)

### PT PELNI (Persero) GCG Structure





## Rapat Umum Pemegang Saham

### General Meetings of Shareholders



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perusahaan yang memiliki kewenangan khusus yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, seperti perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta mengevaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta kewenangan lain terkait dengan penggunaan dan alokasi laba bersih Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan terdapat 2 (dua) jenis RUPS,yaitu:

1. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari Pemegang Saham.

### RUPS Tahunan

Pada tahun 2016, PT PELNI (Persero) menyelenggarakan 1 (satu) RUPS Tahunan pada tanggal 3 Juni 2016 di Ruang Rapat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan.

Agenda dan keputusan RUPS Tahunan 2016 adalah sebagai berikut:

General Meeting of Shareholders (GMS) is a corporate structure with distinctive authority that is neither delegated to the Board of Commissioners nor Board of Directors such as Articles of Association amendment, appointment and discharge of Board of Directors and Board of Commissioners members as well as evaluate performance of each Board of Commissioners and Board of Directors member, and other authorities related with disbursement and allocation of the Company's net profit.

According to provisions in the Articles of Association, there are two types of GMS, as follows:

1. Annual GMS, that is held every year minimum 6 (six) months after the end of fiscal year.
2. Extraordinary GMS, that is held any time if considered necessary by the Board of Directors under written request from the Board of Commissioners or Shareholders.

### Annual GMS

In 2016, PT PELNI (Persero) held 1 (one) Annual GMS on June 3, 2016 at Meeting Room of Financial Service, Survey and Consulting Business Deputy.

Annual GMS 2016 Agenda and Resolutions are as follows:



Agenda RUPS Tahunan/Annual GMS Agenda	Keputusan/Decision
<b>Agenda Pertama</b> Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Penyajian Kembali Tahun Buku 2014 dan 2013, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab ( <i>volledig acquit et decharge</i> ) Kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2015.	Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 termasuk Penyajian Kembali Tahun Buku 2014 dan 2013, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh KAP Drs. Mudjiono & Widiarto.  Approved the Annual Report and ratified the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2015 including Restatement of Fiscal Year 2014 and 2013, the Approval of the Board of Commissioners Oversight Report and the Ratification of the Financial Statements of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year 2015 audited by KAP Drs. Mudjiono & Widiarto.
First Agenda Approval of the Annual Report and Ratification of Financial Statements of the Company for Fiscal Year 2015 including Restatement of Fiscal Year 2014 and 2013, Approval of the Board of Commissioners Suezvisory Report the validation of the Financial Statements of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year 2015, and the Granting of Resettlement and Disclaimer of Responsibility ( <i>volledig acquit Et decharge</i> ) To the Board of Directors on the Acts of the Company and Board of Commissioners for the Supervision of the Company during the Fiscal Year 2015.	
<b>Agenda Kedua</b> Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015.	Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2015 sebesar Rp98.643.157.235, yaitu seluruhnya untuk cadangan.
Second Agenda Stipulation of the Company's net profit fiscal year 2015 realization .	Approved the consolidated use of the consolidated net profit attributable to the Parent Entity in Fiscal Year 2015 amounted to Rp98,643,157,235, which is fully allocated as reserves.
<b>Agenda Ketiga</b> Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.	Menetapkan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas lainnya Tahun Buku 2016 serta Tantiem Tahun Buku 2015 untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) akan ditetapkan secara tersendiri.
Third Agenda Stipulation of Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration	Stipulate amount of salary/honorarium and other facilities of the Fiscal Year 2016 and Incentives for Fiscal Year 2015 for Board of Directors and Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) will be stipulated separately.
<b>Agenda Keempat</b> Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.	Menetapkan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan proses pelelangan Kantor Akuntan Publik (KAP) Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
Fourth Agenda Appointment of Public Accountant Firm (KAP) to audit Financial Statements and Partnership and Community Development Program Financial Statements for Fiscal Year ended on December 31, 2016.	Stipulate delegation of authority to the Board of Commissioners to perform tender process for appointment of Public Accountant Firm (KAP) to audit Financial Statements and Partnership and Community Development Program Financial Statements for Fiscal Year ended on December 31, 2016.



Agenda RUPS Tahunan/Annual GMS Agenda	Keputusan/Decision
<b>Agenda Kelima</b> Pertanggungjawaban Penggunaan PMN Tahun 2015  Fifth Agenda Accountability Report on PMN Disbursement 2015	Menyetujui pertanggungjawaban penggunaan PMN sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 PT PELNI (Persero) Tahun 2015 dengan ketentuan semua kegiatan dan penggunaan telah digunakan sesuai dengan kajian Bersama PMN pada PT PELNI (Persero) Tahun 2015 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 dan Nomor: Per-11/MBU/09/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN.  Approved the accountability report on PMN Disbursement as of February 29, 2016 PT PELNI (Persero) Year 2015 with the stipulation that all activities and use have been used in accordance with Joint assessment of PMN at PT PELNI (Persero) 2015 and Minister of SOE Regulation no. PER-08/MBU/06/2015 and Number: Per-11 / MBU/09/2015 regarding Reporting Guidelines of the Realization of the Additional Use of PMN Funds.

## Status dan Tindak Lanjut Hasil Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2015, Perseroan menyelenggarakan 1 RUPS Tahunan yang menghasilkan 14 (empat belas) arahan dengan status tindak lanjut atas keputusan RUPS Tahun 2015, sebagai berikut:

### Status Realisasi Arahan RUPS PELNI Tahun Buku 2015

## Previous Year GMS Resolutions Status and Follow-Up

In 2015, the Company held 1 Annual GMS that summarized 14 (fourteen) resolutions with follow-up status on GMS 2015 resolutions, as follows:

### PELNI GMS Fiscal Year 2015 Resolutions Realization Status

No.	Arahan RUPS GMS Resolution	Status Tindak Lanjut Follow-Up Status
1.	RKAP dan RKA PKBL Tahun 2016 yang disahkan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. Untuk memudahkan pengolahan dan pengawasan, maka RKAP Tahun 2016 agar dirinci dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) bulanan dengan mengupayakan pendapatan merupakan target minimal dan peningkatan biaya harus lebih rendah daripada peningkatan pendapatan.	RKAP Tahun 2016 telah dijabarkan secara bulanan.  RKAP 2016 had been described in monthly basis.

The ratified RKAP and RKA PKBL 2016 became a work guideline in the management of the company by the Board of Directors and as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners. To facilitate processing and supervision, the RKAP of 2016 to be detailed in the monthly Operational Work Plan (RKO) by seeking revenue is the minimum target and the cost increase should be lower than the revenue increase.



No.	Arahan RUPS GMS Resolution	Status Tindak Lanjut Follow-Up Status
2.	<p>Kesanggupan Direksi untuk merealisasikan target-target dalam RKAP Tahun 2016 dan dituangkan dalam Kontrak Manajemen yang terdiri dari beberapa indikator kinerja kunci (KPI) yang dijabarkan dan diterapkan ke seluruh unit perusahaan</p> <p>Capability of the Board of Directors to realize the targets in the RKAP 2016 and set forth in the Management Contract consisting of several key performance indicators (KPIs) that are translated and applied to all units of the company.</p>	<p>KPI telah dijabarkan dan dilakukan penandatanganan kontrak manajemen antara Direksi dengan Senior Manager, Manager dan seluruh pegawai.</p> <p>KPI has been translated and the management contract has been signed between the Board of Directors with Senior Manager, Manager and all employees.</p>
3.	<p>RKAP Tahun 2016 ini merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2016-2018. Direksi diminta untuk segera menyampaikan RJPP tahun 2016-2018 kepada Pemegang Saham.</p> <p>The RKAP 2016 is part of the Company's Long Term Plan (RJPP) of 2016-2018. The Board of Directors is requested to immediately submit RJPP year 2016-2018 to the Shareholders.</p>	<p>RJPP tahun 2016-2018 telah disampaikan kepada Pemegang Saham dan sedang menunggu pembahasan lanjutan RJPP 2016- 2018.</p> <p>The RJPP of 2016-2018 has been submitted to Shareholders and is awaiting further discussion of RJPP 2016- 2018.</p>
4.	<p>Direksi diminta untuk membuat MPTI (<i>Master Plan Teknologi Informasi</i>) selaras dengan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) paling lambat Februari 2016, sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-02/MBU/2015 tanggal 27 Februari 2015.</p> <p>The Board of Directors is required to make the MPTI (<i>Master Plan of Information Technology</i>) in line with the RJPP (<i>Long Term Plan</i>) no later than February 2016, in accordance with the Regulation of the Minister of SOE Number PER-02/ MBU/2015 dated February 27, 2015.</p>	<p>Telah dibuat <i>Master Plan</i> dan <i>Tata Kelola TI</i></p> <p>IT Master Plan and Governance have been formulated.</p>
5.	<p>Direksi agar konsisten dalam melengkapi pengisian portal-portal BUMN, yakni <i>Portal Financial Information System</i>, <i>Portal Aset</i>, <i>Porta SDM</i>, dan <i>Portal Publik</i>. Pemutakhiran data dalam portal tersebut agar dilaporkan dalam laporan kinerja triwulan.</p> <p>Board of Directors to be consistent in carrying out charging Portals-SOE portals, the Financial Information System Portal, Asset Portals, Human Resources Portals, and Public Portal. Updates of data within the portal to be reported in quarterly performance reports.</p>	<p>Telah dilaksanakan pengisian data sampai dengan laporan <i>unaudited</i> tahun 2016 pada portal BUMN.</p> <p>Data has been completed until the preparation of unaudited report 2016 in BUMN Portal.</p>
6.	<p>Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 63 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, Direksi diminta untuk melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. Pemisahan pembukuan tersebut agar dimulai dilakukan dalam detail <i>breakdown</i> RKAP 2016 serta pelaporan kinerja baik triwulan maupun tahunan</p> <p>In accordance with the provisions of Article 63 paragraph (5) of Government Regulation No. 45/2005 concerning the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs, the Board of Directors is required to separate the assignment with bookkeeping in order to achieve the company's business objectives. Separation of bookkeeping to commence is done in detail breakdown RKAP 2016 and reporting performance both quarterly and annual</p>	<p>Scara pelaporan telah dilakukan pemisahan pembukuan PSO baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan. Dan telah dipisahkan sesuai dengan Audit BPK RI.</p> <p>Reporting has been done through separation of PSO monthly, quarterly or annual bookkeeping. And has been separated in accordance with Audit BPK RI.</p>



No.	Arahan RUPS GMS Resolution	Status Tindak Lanjut Follow-Up Status
7.	<p>Direksi diminta untuk menjalankan program BUMN bersih yang mengacu kepada Surat Edaran Menteri BUMN nomor:SE-05/MBU/2015 tanggal 20 September 2015 tentang <i>Road Map</i> menuju BUMN Bersih dan Surat Nomor:S-684/MBU/2015 tanggal 12 November 2015.</p> <p>The Board of Directors is required to implement a clean SOE program referring to the Minister of SOE Letter No. SE-05 / MBU / 2015 dated September 20, 2015 on Road Map to BUMN Bersih and Letter Number: S-684 / MBU / 2015 dated November 12, 2015.</p>	<p>Telah dilaksanakan <i>assessment</i> oleh BPKP mengenai pelaksanaan BUMN Bersih pada PT PELNI</p> <p>An assessment had been undertaken by BPKP regarding the implementation of BUMN Bersih program at PT PELNI (Persero)</p>
8.	<p>Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan Penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI) dan <i>Soft Loan Agreement</i> (SLA), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK/05/2007 tanggal 19 Februari 2007 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: 31/PB/2007, RKAP agar memuat informasi mengenai posisi RDI dan SLA, skema rencana dan jadwal penyelesaian, serta informasi yang relevan lainnya dalam satu bab tersendiri dan menjadi bagian tak terpisahkan dari RKAP Tahun 2016.</p> <p>In order to improve the supervision and Settlement of Investment Fund Account (RDI) and Soft Loan Agreement (SLA), pursuant to Regulation of the Minister of Finance No. 17 / PMK / 05/2007 dated February 19, 2007 and Regulation of Director General of Treasury Number 31/PB/2007, RKAP to include information on RDI and SLA positions, plan schemes and completion schedules, as well as other relevant information in a separate chapter and become an integral part of the RKAP of 2016.</p>	<p>Telah mendapat persetujuan oleh Menteri Keuangan sesuai Nomor: S-608/MK/.05/2016 tanggal 7 Agustus 2016 perihal persetujuan penyelesaian piutang Negara pada PT PELNI (Persero) dan sesuai dengan PP Nomor 87 Tahun 2016 bahwa utang pokok SLA telah dijadikan Penyertaan Modal Negara.</p> <p>Approved by the Minister of Finance pursuant No. S-608/MK/05/2016 dated August 7, 2016 regarding the approval of the settlement of state receivables to PT PELNI (Persero) and pursuant to Government Regulation Number 87 of 2016 that SLA principal debt has been made as State Equity Participation.</p>
9.	<p>RKAP bersifat fleksibel sehingga apabila terdapat perubahan asumsi atau kondisi tertentu diluar kendali manajemen yang berdampak signifikan terhadap target-target, maka RKAP tersebut dapat segera diajukan revisi kepada Pemegang Saham setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi Dewan Komisaris termasuk penyesuaian KPI.</p> <p>RKAP is flexible so that if there is a change of certain assumptions or conditions beyond the control of management that have a significant impact on the targets, the RKAP can be submitted immediately to the Shareholders after getting the recommendation of the Board of Commissioners including the adjustment of KPI.</p>	<p>Telah dilakukan revisi RKAP, sesuai surat persetujuan pemegang saham Nomor: S-531/MBU/09/2016 Perihal Persetujuan Revisi RKAP Tahun 2016 PT PELNI (Persero).</p> <p>RKAP revision has been made, in accordance with the approval letter of shareholder Number: S-531/MBU/09/2016 regarding PT PELNI (Persero) RKAP Revision Approval 2016.</p>
10.	<p>Dalam pengadaan kapal agar didasarkan pada studi kelayakan yang memadai. Selain itu dalam pelaksanaannya agar senantiasa mengutamakan prinsip transparansi, kehati-hatian, akuntabilitas, sumber pembiayaan yang paling menguntungkan serta mempertimbangkan risiko-risiko termasuk operasional dan keuangan.</p> <p>In ship procurement to be based on an adequate feasibility study. In addition, in its implementation to always prioritize the principles of transparency, prudence, accountability, the most profitable source of financing and consider the risks including operational and financial.</p>	<p>Telah dibuat studi kelayakan terkait rencana pengadaan kapal dan telah dibuat SOP pengadaan kapal dengan BPKP.</p> <p>A feasibility study has been made regarding the procurement plan of the ship and has been made procurement SOP with BPKP.</p>
11.	<p>Direksi diminta untuk melaksanakan perawatan dan <i>docking</i> kapal sesuai dengan jadwal direncanakan sehingga dapat memaksimalkan produksi dan pendapatan perusahaan serta mengendalikan biaya pemeliharaan dan <i>docking</i> kapal.</p> <p>The Board of Directors is required to carry out maintenance and docking of vessels in accordance with the planned schedule so as to maximize the production and income of the company as well as controlling the cost of ship maintenance and docking.</p>	<p>Pelaksanaan <i>dock</i> perawatan pada saat <i>low season</i>.</p> <p>Implementation of maintenance dock on during low season.</p>



No.	Arahan RUPS GMS Resolution	Status Tindak Lanjut Follow-Up Status
12.	<p>Direksi diminta untuk mengoptimalkan anggaran investasi, dimana setiap rencana investasi agar ditujukan untuk menjaga tingkat pertumbuhan serta memperbaiki mutu layanan perusahaan</p> <p>The Board of Directors was required to optimize the investment budget, where each investment plan is aimed at maintaining growth rates and improving the quality of the company's services.</p>	<p>Realisasi investasi saham hanya 67,66% dari anggaran karena keterbatasan <i>cash flow</i> perusahaan. Investasi pengadaan kapal Tol Laut belum dapat dilaksanakan menunggu pencairan dan PMN dari Pemerintah.</p> <p>The realization of share investment is only 67.66% of the budget due to limited cash flow of the company. Investment of procurement of Toll Laut vessels has not been conducted pending disbursement and PMN from the Government.</p>
13.	<p>Direksi diminta untuk memperhatikan saran dan pendapat Dewan Komisaris, sebagaimana yang telah disampaikan dalam suratnya Nomor: 76/DK/XII-2015 tanggal 17 Desember 2015. Tanggapan Dewan Komisaris tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan RUPS ini.</p> <p>The Board of Directors is requested to pay attention to the advice and opinion of the Board of Commissioners, as stated in its letter Number: 76/DK/XII-2015 dated December 17, 2015. The response of the Board of Commissioners is an integral part of this GMS Decision.</p>	<p>Dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Implemented in accordance with the direction of GMS</p>
14.	<p>Buku RKAP Tahun 2016 yang disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham dengan memperhatikan pembahasan-pembahasan dalam RUPS ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.</p> <p>The RKAP 2016 submitted by the Board of Directors to Shareholders with due attention to the discussions in this GMS is an integral part of the resolution of this GMS.</p>	<p>Dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Implemented in accordance with the direction of GMS</p>



## Dewan Komisaris

### Board of Commissioners

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi secara kolegial. Selain fungsi pengawasan dan pemberian nasihat tersebut, Dewan Komisaris juga bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap prinsip GCG dan pengelolaan perusahaan yang sehat.

Dewan Komisaris secara terus-menerus memantau efektivitas kebijakan Perseroan serta proses pengambilan keputusan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil pengawasan disertai kajian dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan pada RUPS sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi. Dewan Komisaris juga mengevaluasi dan menyetujui RKAP yang disusun Direksi setiap tahunnya.

The Board of Commissioners exercises supervisory and advisory functions over the Company's management activity that is implemented collectively by the Board of Directors. Other than the supervisory and advisory functions, the Board of Commissioners is also responsible to ensure compliance with GCG and healthy management principles.

The Board of Commissioners continuously supervises effectiveness of the Company policy as well as decision making process by the Board of Directors, including the implementation of strategy to meet expectation of the shareholders and stakeholders. The supervisory report is equipped by Board of Commissioners review and opinion to be presented to the GMS as part of Board of Directors performance assessment. The Board of Commissioners also evaluates and approves the RKAP that is prepared by the Board of Directors annually.



## Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS). Proses pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris merujuk pada Anggaran Dasar PT PELNI (Persero), Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroran Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2009 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta *Board Manual* Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

## Komposisi dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Selama Tahun 2016, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris dan sampai dengan 31 Desember 2016, komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 6 (enam) orang, termasuk Komisaris Utama. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-415/MBU/2012 tanggal 21 November 2012, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-218/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan SK-232/MBU/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero), maka susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

### Komposisi Dewan Komisaris 2016

No.	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
1.	Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commissioner	SK-232/MBU/11/2015 tanggal 17 November 2015 SK-232/MBU/11/2015 dated November 17, 2015
2.	Omo Dahlan	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK-415/MBU/2012 tanggal 21/11/2012 SK-415/MBU/2012 dated 21/11/2012
3.	Sudarto	Komisaris Commissioner	SK-218/MBU/2014 tanggal 17/10/2014 SK-218/MBU/2014 dated 17/10/2014
4.	Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	SK-232/MBU/11/2015 tanggal 17/11/2015 SK-232/MBU/11/2015 dated 17/11/2015
5.	Wolter B. Hesegem	Komisaris Commissioner	SK-415/MBU/2012 tanggal 21/11/2012 SK-415/MBU/2012 dated 21/11/2012
6.	Raldi Hendro Koestoeer	Komisaris Commissioner	SK-01/MBU/2014 tanggal 08/01/2014 SK-01/MBU/2014 dated 08/01/2014

## Board of Commissioners Appointment and Discharge

The Board of Commissioners members are appointed and discharged by the General Meetings of Shareholders (GMS). The Board of Commissioners appointment and discharge process refers to PT PELNI (Persero) Articles of Association, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, Law Number 19 of 2003 on SOE, Minister of SOE Regulation Number PER-04/MBU/2009 on Board of Directors and Board of Commissioners Appointment and Discharge in SOE and PT PELNI (Persero) Articles of Association.

## Board of Commissioners Composition and Segregation of Duty

Throughout 2016, there was no change in terms of Board of Commissioners composition and as of December 31, 2016, the Board of Commissioners comprised of 6 (six) members, including the President Commissioner. Pursuant to Minister of State-Owned Enterprise Decree Number SK-415/MBU/2012 dated November 21, 2012, Minister of State – Owned Enterprise Decree Number SK-218/MBU/10/2014 dated October 17, 2014 and Decree Number SK-232/MBU/11/2015 dated November 17, 2015 concerning Appointment and Discharge of PT PELNI (Persero) Board of Commissioners Members, the Board of Commissioners composition as of December 31, 2016 is as follows:

### Board of Commissioners Composition 2016



Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

## Tugas dan Tanggung Dewan Komisaris

Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab meliputi berbagai aspek berikut:

1. Tugas Pengawasan
2. Tugas dalam Rapat Umum Pemegang Saham
3. Tugas dalam Manajemen Risiko
4. Tugas dalam Sistem Pengendalian Internal
5. Tugas dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
6. Tugas dalam Sistem Teknologi Informasi
7. Tugas dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia
8. Tugas dalam Pengadaan Barang dan Jasa
9. Tugas dalam Sistem Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing*)
10. Tugas dalam pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan
11. Tugas dalam Pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan
12. Tugas menilai kinerja Direksi
13. Tugas dalam Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
14. Tugas dalam Nominasi dan Seleksi Calon Direksi.

Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian tugas diantara para anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian tugas Direksi. Pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran Anggota Dewan Komisaris baik secara kolektif maupun secara perorangan. Pembagian tugas antara Dewan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

All of the Board of Commissioners members have necessary integrity, competency, reputation and experience as well as expertise to exercise their function and duty.

## Board of Commissioners Duty and Responsibility

Supervisory and advisory duties by the Board of Commissioners are implemented through the implementation of duties and responsibilities covering the following aspects:

1. Duties of Supervision
2. Duties in the General Meeting of Shareholders
3. Tasks in Risk Management
4. Tasks within the Internal Control System
5. Tasks in Transparency and Confidentiality of Information
6. Tasks in Information Technology Systems
7. Tasks in the Management of Human Resources
8. Assignment in Procurement of Goods and Services
9. Tasks in the Management and Follow-up Reporting System of Breach (*Whistle Blowing*)
10. Duties in the management of a Subsidiary / Joint Venture
11. Duties in the Election of candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries / Joint Ventures
12. The task of assessing the performance of the Board of Directors
13. Duties in the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors
14. Duties in Nomination and Selection of Prospective Directors.

To ensure effective role of the Board of Commissioners, segregation of duties among the Board of Commissioners members consider the Board of Directors' division of duties. The Board of Commissioners member's division of duties is intended to ensure that the implementation of duties of each member of the Board of Commissioners technically on the aspect in charge can be run smoothly, effectively and efficiently, in accordance with their respective responsibilities and authorities so that there is clarity on the role of members of the Board of Commissioners either collectively or individually. The division of duties between the Board of Commissioners of the Company, as follows:



No.	Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duty and Responsibility
1.	Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commissioner	Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap hal-hal strategis dan <i>Good Corporate Governance</i> .  To coordinate Board of Commissioners duty and activity implementation as well as recommendation to the Board of Directors regarding strategic issues and Good Corporate Governance.
2.	Omo Dahlan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan bidang pengawasan internal dan akuntansi serta sebagai Ketua Komite Audit.  Supervisory and advisory duties to the Board of Directors on internal audit and accounting fields and Chairman of Audit Committee.
3.	Sudarto	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan bidang keuangan dan anggaran serta pelaksanaan sistem teknologi informasi.  Supervisory and advisory duties to the Board of Directors on finance and budget fields as well as information technology system implementation.
4.	Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan bidang sumber daya manusia, hukum, dan organisasi serta sebagai Ketua Komite Kebijakan Risiko.  Supervisory and advisory duties to the Board of Directors on human resources, legal and organization fields as well as Chairman of Risk Policy Committee.
5.	Wolter B. Hesegem	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan bidang armada dan teknik.  Supervisory and advisory duties to the Board of Directors on fleets and technical fields.
6.	Raldi Hendro Koestoeer	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perusahaan bidang usaha dan komersial.  Supervisory and advisory duties to the Board of Directors on business and commercial fields.

## Program Pengenalan Dewan Komisaris

Perseroan menyelenggarakan program pengenalan Dewan Komisaris bertujuan agar agar Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman dapat mengenal dan memahami kegiatan dan kondisi Perusahaan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.

Dewan Komisaris menetapkan kebijakan untuk diadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

## Board of Commissioners Orientation Program

The Company conducts an introduction to the Board of Commissioners program to enable the Board of Commissioners from various backgrounds and experiences to be familiar with and understand the Company's activities and conditions. The responsibility for conducting the recognition program rests with the Corporate Secretary or any person who performs the functions of the Corporate Secretary.

The Board of Commissioners stipulates a policy of introduction program for newly appointed members of the Board of Commissioners.



Materi program pengenalan setidaknya memuat:

- 1) Prinsip-prinsip GCG.
- 2) Gambaran umum perusahaan.
- 3) Kewenangan yang didelegasikan.
- 4) Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris.

Pada tahun 2016, tidak dilaksanakan program pengenalan Dewan Komisaris karena tidak ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru.

## Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Perseroan menyelenggarakan program pelatihan bagi Dewan Komisaris untuk meningkatkan pengetahuan anggota Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada Direksi. Selama tahun 2016, anggota Dewan Komisaris berpartisipasi dalam program Penyegaran BUMN yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 24 Februari 2016 serta Workshop Pengembangan Aplikasi New PELNI Ticketing System (NPTS).

## Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris 2016

Berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan yang dilakukan Dewan Komisaris pada tahun 2016, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian tanggapan atas Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA-PKBL) PT PELNI (Persero) Tahun 2016.
2. Pengawasan atas pelaksanaan RKAP tahun 2016.
3. Pengawasan dan pemberian nasihat atas hasil audit dan review pengendalian intern.
4. Pengawasan dan pemberian nasihat atas penyusunan RKAP tahun 2017.
5. Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris.
6. Pemantauan pengendalian internal Perseroan.
7. Memberikan usulan penunjukan dan evaluasi penugasan Kantor Akuntan Publik (KAP).
8. Pemantauan pengembangan SDM dan kepatuhan hukum Perseroan.
9. Pemantauan pengelolaan risiko Perseroan.
10. Pemantauan kinerja operasional Perseroan.

Introduction program material at least includes:

- 1) GCG Principles.
- 2) Company overview.
- 3) Delegated authority.
- 4) Duties and responsibilities of the Board of Directors and Commissioners.

In 2016, there was no Board of Commissioners orientation program due to no appointment of new Board of Commissioners member.

## Board of Commissioners Training and Competency Development Program

The Company organizes training program for the Board of Commissioners to develop knowledge of the Board of Commissioners members in order to supervise and provide recommendation to the Board of Directors. Throughout 2016, the Board of Commissioners members participated in SOE Refreshment program that was held in Jakarta on February 24, 2016 and New PELNI Ticketing System (NPTS) Application Development Workshop.

## Board of Commissioners Activity Report 2016

Based on duty, authority and responsibility regulated in Article 15 of Articles of Association, the activities implemented by the Board of Commissioner in 2016 are as follows:

1. Opinion to PT PELNI (Persero) Budget Plan (RKAP) and PKBL Budget Plan (RKA-PKBL) 2016.
2. Monitoring over the implementation of RKAP 2016.
3. Supervision and advise on internal audit report and review.
4. Supervision and advise on RKAP 2017 preparation.
5. Monitoring implementation of Board of Commissioners Good Corporate Governance.
6. Monitoring the company's internal control.
7. Provide Public Accountant Firm (KAP) assignment appointment and evaluation.
8. Monitoring Human Resources development and legal compliance.
9. Monitoring risk management.
10. Monitoring operational performance.



11. Pemantauan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum.
12. Pemantauan penggunaan dan penyusunan anggaran Perseroan.
13. Pemantauan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).
14. Pemantauan kehandalan alat produksi.
15. Pemantauan pelaksanaan sistem teknologi informasi.

### **Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2016**

Seluruh keputusan hasil Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Notulen Rapat dimonitor tindak lanjut penyelesaiannya pada setiap Rapat berikutnya. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah memberikan berbagai rekomendasi dan keputusan yang perlu menjadi perhatian Direksi sebagai berikut:

1. Dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris pada 2 Februari 2016 yang tertuang dalam risalah rapat nomor 03/DK/II-2016 tanggal 15 Februari 2016, Dewan Komisaris menyampaikan arahan terkait IT sebaiknya mengikuti *best practice* yang sudah ada, termasuk proses e-ticketing. setiap cabang harus mempunyai sistem yang sama agar proses bisnis berjalan dengan baik.
2. Dalam rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris pada 31 Mei 2016 tertuang dalam risalah rapat nomor 13/DK/VI-2016 tanggal 10 juni 2016, Dewan Komisaris menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah agar muatan penumpang kapal seluruhnya jadi *single class*, maka Direksi sebaiknya perlu melakukan evaluasi untuk melakukan efisiensi SDM di atas kapal. Dalam rapat internal Dewan Komisaris pada 19 Februari 2016, Dewan Komisaris membahas terkait hal-hal sebagai berikut: arahan Pemegang Saham adalah membentuk anak perusahaan, namun jika membentuk Direktorat baru tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sedangkan pengoperasian Kapal Perintis dan Kapal Tol Laut sudah harus berjalan di tahun ini. Usul untuk menambahkan posisi satu kotak di bawah Direktorat Komersial dan perubahan nomenklatur Senior Manajer dinilai cukup tepat untuk saat ini sehingga dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

11. Monitoring public service obligation implementation.
12. Monitoring budget realization and formulation.
13. Monitoring preparation of financial statements based on accounting standard that is generally applied in Indonesia (SAK).
14. Monitoring reliability of production tools.
15. Monitoring implementation of information technology system.

### **Board of Commissioners Recommendation and Decree 2016**

All of Management Meeting (Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting) Resolutions that were disclosed in the Minutes of Meeting had been followed-up for the completion in the next meeting. Throughout 2016, the Board of Commissioners had submitted recommendations and decrees as concern for the Board of Directors, as follows:

1. In the Management Meeting on February 2, 2016 as stipulated in Minutes of Meeting Number 03/DK/II-2016 dated February 15, 2016, the Board of Commissioners delivered recommendation on IT that shall comply with existing best practice, including e-ticketing process. Every branch shall have similar system in order to ensure smooth business process.
2. In the Management Meeting on May 31, 2016 as stipulated in Minutes of Meeting No. 13/DK/VI-2016 dated June 10, 2016, the Board of Commissioners explained that in relation with the Government Policy to implement single class ship cargo and passenger, the Board of Directors shall evaluate onboard personnel efficiency. In the Board of Commissioners internal meeting on February 19, 2016, the Board of Commissioners discussed related issues as follows: Shareholders resolution to establish subsidairy, however, establishment of new Directorate will require log time where operation of pioneer ship and Tol Laut ships have to be executed within this year. Recommendation to add one position under Commercial Directorate and revision to Senior Manager nomenclature were seen effective for present time that were considered to be approved.



## Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam hubungannya dengan organ perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) bagi Dewan Komisaris, sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 12.29/05/SK/HKO.01/2016 tentang tentang Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Tata laksana kerja tersebut berisi panduan bagi Dewan Komisaris yang berisikan, antara lain:

1. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris;
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
4. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris;
5. Wewenang Dewan Komisaris;
6. Hak Dewan Komisaris;
7. Etika Jabatan;
8. Rapat Dewan Komisaris;
9. Komite-Komite Dewan Komisaris;
10. Sekretaris Dewan Komisaris;

## Board Manual for Board of Commissioners

In terms of relationship with other corporate structures regarding implementation of duty and responsibility, the Board of Commissioners has Board Manual for Board of Commissioners as working guideline for the Board of Commissioners that is validated under PT PELNI (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners Joint Decree No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 regarding PT PELNI (Persero) Working Manual (*Board Manual*) for Board of Directors and Board of Commissioners. The Baord Manual dicloses guideline for the Board of Commissioners, amogn others:

1. Board of Commissioners requirement and composition;
2. Board of Commissioners Responsibility;
3. Board of Commissioners Duty and Responsibility;
4. Board of Commissioners Task and Obligation;
5. Board of Commissioners Authority;
6. Board of Commissioners Rights;
7. Position Ethics;
8. Board of Commissioners Meeting;
9. Committees Under the Board of Commissioners;
10. Board of Commissioners Secretary;



## Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Tahun 2016, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat Nani Sukamto.

## Profil Sekretaris Dewan Komisaris



### Nani Sukamto

Lahir di Sleman tanggal 6 Agustus 1985. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Analis Hukum dan Kepala Sub-bidang Layanan Hukum BUMN 1B.

Born in Sleman on August 6, 1985. Graduated Bachelor Degree from Universitas Gadjah Mada. Previously, She served as Legal Analyst and Head of Legal Service Sub-Unit BUMN 1B.

Fungsi dan penugasan Sekretaris Dewan Komisaris tahun 2016 meliputi:

1. Menyiapkan bahan rapat dan menyusun risalah rapat Dewan Komisaris.
2. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
3. Memberikan bantuan ringkasan laporan manajemen.
4. Mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
5. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Mengadministrasikan undangan rapat Dewan Komisaris.
7. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Membuat surat-surat keluar dan mendokumentasikan surat-surat Dewan Komisaris.

## Board of Commissioners Secretary

In order to support implementation of Board of Commissioners' function and effectiveness, the Board of Commissioners is assisted by Board of Commissioners Secretary. In 2016, the Board of Commissioners Secretary is served by Nani Sukamto.

## Profile of Board of Commissioners Secretary

Function and assignment of Board of Commissioners in 2016 are including:

1. Preparing Board of Commissioners meeting material and minutes of meeting.
2. Perform other secretariate duties.
3. Provide support to management report summary.
4. Collect relevant material and information related with Board of Commissioners duty implementation.
5. Coordinate with Corporate Secretary regarding any issue related with the Board of Commissioners and Board of Directors.
6. Administer Board of Commissioners meeting invitation.
7. As liaison officer between Board of Commissioners and Board of Directors.
8. Prepare outgoing letters and document the Board of Commissioners letters.



## Komisaris Independen

### Independent Commissioner

Komisaris Independen merupakan Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-83/MBU/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang menjadi Komisaris Independen Bapak Omo Dahlan.

### Kriteria Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen di Perseroan merujuk dan telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-83/MBU/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perseroan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

### Pernyataan Tentang Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana disebutkan di atas dan telah dinyatakan oleh Komisaris Independen dengan menandatangani surat pernyataan yang diperbarui setiap tahun.

Independent Commissioner is a Board of Commissioners member who is appointed from external candidate of the Company (without any affiliation with the Company) under transparent and independent appointment process, with sufficient integrity and competency, free from any influence that is related with personal or other parties' interests as well as capability to act objectively and independently referring to GCG principles.

Pursuant to Minister of State-Owned Enterprise Letter Number SK-83/MBU/06/2015 regarding Appointment and Discharge of Board of Commissioners Members, number of Independent Commissioner is minimum 30% (thirty percent) from all Board of Commissioners members. As of December 31, 2016, the Company has appointed 1 (one) Board of Commissioners member, Mr. Omo Dahlan.

### Independent Commissioner Criteria

Independent Commissioner criteria in the Company refers and has complied with Minister of State-Owned Enterprise Letter Number SK-83/MBU/06/2015 regarding Appointment and Discharge of Board of Commissioners Members, as follows:

- Not working or having responsibility to plan, manage, control or supervise the Company's activity within the last 6 (six) months.
- Not having any shares either directly or non-directly in the Company.
- Not having any affiliation with the Company, other members of Board of Commissioners, Board of Directors or Ultimate Shareholders.
- Not having any business affiliation either directly or non-directly related with the Company's business activity.

### Statement of Independent Commissioner

Independent Commissioner in the Company has fulfilled independency criteria as mentioned above and had been declared by the Independent Commissioner by signing statements of integrity pact that is updated annually.



**Aspek Independensi**  
Independency Aspect

Omo Dahlan

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain

V

Not having any affiliation with other Directors and/or Board of Commissioners members

Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan

V

Not serving as Board or Directors in the Company that is affiliated with the Company

Tidak bekerja pada lembaga pemerintahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

V

Not working in government agency within the last three years

Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

V

Not working in the Company or its affiliation within three last years

Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya

V

Not having any financial affiliation either directly or non-directly with the Company or other companies providing service and product to the Company and its affiliation

Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perseroan

V

Free from business interest and activity or other relationships that may constraint or disrupt the Board of Commissioners' capability to act and think independently in the Company's circumstances.



## Direksi

### Board of Directors

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perusahaan. Tugas utama Direksi adalah bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan. Direksi juga menjadi kunci bagi keberlangsungan aktivitas serta operasional Perusahaan, memastikan kinerja optimal dan nilai tambah optimal bagi Pemegang Saham. Tiap-tiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

The Board of Directors is the organ of the Company which is responsible and responsible collegial in managing the Company. The main duties of the Board of Directors are to act and represent for and on behalf of the Company. The Board of Directors is fully responsible for performing its duties in the interest of the Company in achieving its vision and mission. The Board of Directors is also key to the continuity of the Company's activities and operations, ensuring optimum performance and optimal value added for Shareholders. Each member of the Board of Directors can perform the task and make decisions according to the division of duties and authority.



## Persyaratan, Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui RUPS sesuai dengan aturan hukum dan perundangan yang berlaku serta anggaran dasar dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Direksi meliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal yang bersifat umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan material yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

Selain persyaratan formal dan material, calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*). Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta pengalaman di bidang usaha perusahaan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya.

## Komposisi Direksi

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-125/MBU/2013, SK-148/MBU/08/2015, SK-99/MBU/06/2015 dan Nomor: SK- 263/MBU/2016, susunan Direksi Perseroan per 31 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Direksi Name of Director	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Jabatan Date of Appointment	SK Pengangkatan Appointment Decree
1.	Elfien Goentoro	Direktur Utama President Director	22 Juni 2015 June 22, 2015	SK-99/MBU/06/2015
2.	Wibisono	Direktur Keuangan Director of Finance	04 Februari 2013 February 04, 2013	SK-125/MBU/2013
3.	Olih Masolich Sodikin	Direktur Armada & Teknik Director of Fleet & Technical	04 Februari 2013 February 04, 2013	SK-125/MBU/2013
4.	Harry Boediarto Soewarto	Direktur Komersial Director of Commercial	21 Agustus 2015 August 21, 2015	SK-148/MBU/08/2015
5.	Muhammad Tukul Harsono	Direktur Operasi & Pelayanan Director of Operations & Service	01 Desember 2016 December 01, 2016	SK-263/MBU/12-2016
6.	Insan Purwarisya L Tobing	Direktur SDM & Umum Director of HR & General Affairs	01 Desember 2016 December 01, 2016	SK-263/MBU/12-2016

## Board of Directors Appointment and Discharge Requirement, Composition

Board of Directors member appointment and discharge are done at GMS in accordance with prevailing Law and Regulation as well as Articles of Association and Minister of SOE Regulation Number Per-03/MBU/02/2015 regarding Board of Directors Member Appointment and Discharge Requirement and Procedure. The mandatory requirement for Board of Directors member candidate includes formal and material requirements. Formal requirement is general and according to the prevailing Law and material requirement is set of provisions that are adjusted with the Company's business needs and nature.

Other than formal and material requirements, the Board of Directors member candidate shall also comply with fit and proper test requirement. The Board of Directors member shall have sufficient and relevant knowledge with their position as well as experience in the Company's business field and/or other fields that are relevant with their positions.

## Board of Directors Composition

Pursuant to Copy of Minister of State-Owned Enterprise Decree Number SK-125/MBU/2013, SK-148/MBU/08/2015, SK-99/MBU/06/2015 and Number: SK- 263/MBU/2016, the Board of Directors composition as of December 31, 2016 is as follows:



## Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau pembatasan-pembatasan atau arahan-arahan lebih lanjut yang disepakati oleh Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas, Direksi bertanggung Jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Pembagian tugas Masing masing Fungsi Direksi adalah sebagai berikut:

### Direktur Utama

- 1) Melaksanakan program pemerintah dalam sub sektor perhubungan laut di seluruh wilayah Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya baik yang dimiliki perusahaan sendiri atau dari pihak ketiga, usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan perusahaan dalam pemberian jasa transportasi laut atas angkutan manusia, barang dan tugas-tugas kepentingan dan lain sebagainya secara optimal, aman, teratur, dan tertib. Dengan memperhatikan keselamatan pelayanan dan perlindungan khususnya pencemaran laut, sesuai dengan ketentuan internasional dan peraturan-peraturan nasional yang berlaku.
- 2) Melaksanakan ketentuan-ketentuan anggaran dasar perusahaan Perseroan Terbatas PT PELNI (Persero).
- 3) Menetapkan pola kebijaksanaan umum/khusus yang menyangkut pelaksanaan pengelolaan seluruh kegiatan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek dalam suatu pola perencanaan yang strategis guna pencapaian sasaran perusahaan yang ditetapkan dalam RUPS serta arahan-arahannya.
- 4) Memimpin dan mengkoordinir para anggota Direksi dalam pelaksanaan perencanaan operasional seluruh kegiatan direktorat-direktorat beserta jajarannya secara efektif dan efisien, yang menyangkut sub sektor perhubungan laut dalam jasa transportasi laut atas angkutan manusia, barang dan lain-lain bagi pertumbuhan dan perekonomian negara.

## Board of Directors Duty and Responsibility

The Board of Directors are in charge and responsible to carry out all actions related to the management of the company for the benefit of the company and in accordance with the purposes and objectives of the company and represent the company both within and outside the court on all matters and all the events with restrictions as stipulated in the laws, statutes and/or restrictions or further directives agreed by the shareholders by the General Meeting of Shareholders (GMS).

In performing their duties, the Board of Directors are responsible to the General Meeting of Shareholders (RUPS). Accountability of Board of Directors to the General Meeting of Shareholders (GMS) is a manifestation of accountability supervising the management of the company in the implementation of corporate governance principles.

As for the tasks division of each function of the Board of Directors is as follows:

### President Director

- 1) Implement government programs in the sub sector of sea transport in the whole of Indonesia by taking advantage of good resources owned by the company itself or from third parties, other businesses that support the company in the provision of marine transportation services on transportation of passengers, goods, other duties interest and so forth optimally, securely, regularly and orderly. By paying attention to the safety and protection services, especially marine pollution, according to international law and applied national regulations.
- 2) Implement the provisions of the Statute of PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI).
- 3) Establish the pattern of public/special policies concerning the implementation of the management of all the company's activities both long and short term in a pattern of strategic planning in order to achieve corporate goals that has been set out in the AGM and its directions.
- 4) To lead and coordinate the board members in the implementation of the operational planning of all activities of the directorate s and the staffs effectively and efficiently, which involves sea transport subsectors through marine transportation services on shipment of passengers, goods and others for the growth and the country's economy.



- 5) Memimpin, membina, mengkoordinir, dan menetapkan kebijaksanaan umum/khusus terhadap pengelolaan dan kegiatan anak-anak perusahaan, usaha-usaha lain, Kerja Sama Operasi (KSO), semua yayasan yang terkait guna keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan pertumbuhan, pengembangan serta laba perusahaan.
- 6) Melakukan pengawasan secara langsung atau tidak langsung maupun melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) atas segala kegiatan didalam ruang lingkup perusahaan, anak perusahaan, usaha-usaha lain, semua yayasan yang terkait, demikian pula penerapan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 7) Bersama-sama dengan anggota Direksi menyusun dan menyampaikan laporan-laporan kegiatan perusahaan secara berkala untuk diajukan kepada Pemegang Saham atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- 8) Menindaklanjuti semua hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan melaporkan hasilnya kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris.
- 9) Mengatur, menetapkan, mengingatkan dan memberhentikan pejabat pada jabatan-jabatan dalam lingkungan perusahaan, anak perusahaan, usaha-usaha lain dan sebagainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan atau berdasarkan saran-saran dari para anggota Direksi.
- 10) Memantau perkembangan dunia usaha secara umum yang berkaitan dengan perkembangan moneter dan ekonomi terhadap langkah-langkah kebijaksanaan Pemerintah guna melakukan penyesuaian atas program kerja perusahaan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek dalam menentukan kiat-kiat usaha di segala bidang.
- 5) Lead, develop, coordinate, and establish policy enforcing the general/specific to the management and activities of subsidiaries, other businesses, Joint Operation and all foundations which related to success in achieving the goals and growth, development as well as corporate profits.
- 6) To control directly or indirectly or through the Internal Control Unit for all activities within the scope of the company, subsidiaries, other businesses, all related foundations, as well as the imposition of sanctions in accordance with the applied regulations.
- 7) Together with members of the Board of Directors prepare and submit reports on the company's activities on a regular basis to be submitted to the Shareholders on the Work Plan and Company's Budget.
- 8) Follow up to all the results of General Meeting of Shareholders (RUPS) and report the results to the shareholders through the Board of Commissioners.
- 9) Organize, assign, warn and dismiss officials on certain positions within the company, subsidiaries, others businesses and forth in accordance with the applicable regulations and or through suggestions from the members of the board of directors.
- 10) Monitor the development of the business world in general related to monetary and economic developments on Government's policy to make adjustments on the company's work program which good for long- and even for short-term in determining the business tips in all fields.

### Direktur Komersial

- 1) Menyiapkan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan program kerja perusahaan di bidang pemasaran dan pengembangan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan.
- 2) Menyiapkan pengaturan kebijakan berskala korporat di bidang pemasaran dan pengembangan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin dapat dicapainya kinerja produksi penjualan, pangsa pasar dan pendapatan usaha jasa-jasa perusahaan yang optimal.

### Director of Commercial

- 1) Setting up a long-, medium-and short-term work plan and work program in the field of marketing and business development that can be done by the company.
- 2) Setting up policies in corporate's scale in marketing and business development that can be done by the company in accordance with applicable regulations in order to ensure the accomplishments of production performance of sales, market share and revenue of optimized company's services.



- 3) Mengkoordinir, mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pemasaran dan pengembangan usaha pada seluruh unit kerja perusahaan.
- 4) Menyiapkan laporan berkala dan laporan khusus hasil kegiatan pemasaran dan pengembangan usaha jasa-jasa perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Direktur Operasi dan Pelayanan

- 1) Menyiapkan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan program kerja perusahaan di bidang pengoperasian kapal, pelayanan jasa angkutan laut dan kegiatan operasi penunjangnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan.
- 2) Menyiapkan pengaturan kebijakan berskala korporat di bidang pengoperasian kapal, pelayanan jasa angkutan laut dan kegiatan operasional penunjang yang dapat dilakukan oleh perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin dapat tercapainya kinerja keselamatan operasi jasa, efektivitas dan efisiensi operasi jasa, produksi jasa angkutan, kualitas pelayanan jasa dan kepuasan pengguna jasa perusahaan yang optimal.
- 3) Menyiapkan laporan berkala dan laporan khusus hasil kegiatan pengoperasian kapal dan pengembangan usaha jasa – jasa perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Direktur Armada dan Teknik

- 1) Menyiapkan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan program kerja perusahaan di bidang penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan alat produksi jasa angkutan laut serta fasilitas penunjang usaha jasa – jasa perusahaan.
- 2) Menyiapkan pengaturan kebijakan berskala korporat di bidang penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan alat produksi jasa angkutan laut dan fasilitas penunjangnya guna menjamin kelaikan laut (*seaworthiness*), kesiapan pakai (*serviceability performance*) dan kehandalan (*reliability*) kapal serta fasilitas penunjangnya menurut jenis, spesifikasi dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang optimal.
- 3) Mengkoordinir, mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan penyediaan, persiapan pakai dan kehandalan alat produksi jasa angkutan laut serta fasilitas penunjangnya pada seluruh unit kerja perusahaan.

- 3) Coordinate, organize and control the implementation of marketing and business development activities in all units of the company.
- 4) Prepare reports periodically and special reports on the results of marketing activities and business development of company's services in accordance with the applicable regulations.

### Director of Operations and Services

- 1) Prepare long-, medium- and short-term work plan and work program in the field of vessel operations, marine transportation services and activities supporting operations that can be performed by the company.
- 2) Setting policy based on corporate's scale in the field of ships operations, sea transportation service and supported operational activities that can be done by the company in accordance with applicable regulations in order to guarantee to the achievement of the safety performance of service operations, effectiveness and efficiency of service operations, production of transport services, quality services and optimum service user satisfaction.
- 3) Prepare reports periodically and special reports on the results of the ships operations and business development of company's services in accordance with applicable regulations.

### Director of Fleets and Technical

- 1) Setting up a long-, medium- and short-term work plan and work program in the field of supply, maintenance, maintenance and repair of production equipment and facilities for marine transportation services supporting business of company's services.
- 2) Setting policies based on corporate's scale in the supply, preserve, maintenance and repair of production instruments of marine transportation services and supporting facilities to ensure the seaworthiness, serviceability performance and reliability of vessels as well as supporting facilities by types, specifications and numbers in accordance with the company's needs optimally.
- 3) Coordinate, organize and control the organization of the supply, serviceability performance and reliability of production instruments as well as marine transportation services supporting facilities in all units of the company.



- 4) Menyiapkan laporan berkala dan laporan khusus hasil kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan kapal sebagai alat produksi berikut fasilitas penunjang usaha jasa angkutan laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Direktur Keuangan

- 1) Menyiapkan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan program kerja perusahaan di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran, akuntansi, perpendaharaan, program kemitraan dan bina lingkungan.
- 2) Menyiapkan pengaturan kebijakan berskala korporat di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran, akuntansi, perpendaharaan, program kemitraan dan bina lingkungan perusahaan guna menjamin dapat dicapainya kinerja keuangan perusahaan yang optimal.
- 3) Mengkoordinir, mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan anggaran, akuntansi, perpendaharaan, program kemitraan dan bina lingkungan pada seluruh unit kerja perusahaan.
- 4) Menyiapkan laporan berkala dan laporan khusus hasil kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran, akuntansi, perpendaharaan, program kemitraan dan bina lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Direktur SDM & Umum

- 1) Menyiapkan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan program kerja perusahaan di bidang pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi personalia, pengelolaan organisasi, administrasi dan layanan umum kerumahtanggaan kantor, penyediaan, pemeliharaan dan pengamanan asset umum perusahaan.
- 2) Menyiapkan pengaturan kebijakan berskala korporat di bidang pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi personalia, pengelolaan organisasi, administrasi dan layanan umum kerumahtanggaan kantor, penyediaan, pemeliharaan dan pengamanan asset umum perusahaan.

- 4) Prepare reports periodically and special reports on the results of the provision, serviceability performance and reliability of the ship as production instruments as well as supporting facilities of sea transport services in accordance with applicable regulations.

#### Director of Finance

- 1) Setting up long-, medium- and short-term work plan and work program in the field of financial management which includes budgeting, accounting, treasury, partnerships and community development programs.
- 2) Setting up policies based on corporate's scale in the field of financial management which includes budgeting, accounting, treasury, and establish a partnership program within the company to ensure the accomplishment of optimum financial performance.
- 3) Coordinate, organize and control activities implementation of budgeting, accounting, treasury, partnerships and community development programs in all units of the company.
- 4) Prepare reports periodically and special reports on the results of financial management activities which includes budgeting, accounting, treasury, partnership and community development programs in accordance with applicable regulations.

#### Director of HR & General Affairs

- 1) Setting up long-, medium- and short term work plan and work program in the field of human resource management which includes human resources planning and development, personnel administration, organizational management, administration and household public office services, supply, maintenance and general assets safety of the company.
- 2) Setting policies based on corporate's scale in the field of human resource management which includes human resources planning and development, personnel administration, organizational management, administration and household public office services, supply, maintenance and general assets safety of the company.



- 3) Mengkoordinir, mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi personalia, pengelolaan organisasi, administrasi dan layanan umum kerumah-tanggaan kantor, penyediaan, pemeliharaan dan pengamanan asset umum perusahaan pada seluruh unit kerja perusahaan.
- 4) Menyiapkan laporan berkala dan laporan khusus hasil kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi personalia, pengelolaan organisasi, administrasi dan layanan umum kerumah-tanggaan kantor, penyediaan, pemeliharaan dan pengamanan asset umum perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Coordinate, organize and control activities implementation of human resource management which includes human resources planning and development, personnel administration, organizational management, administration and household public office services, supply, maintenance and general assets safety of the company on all units of the company's work,
- 4) Prepare reports periodically and special reports on the results of the activities of human resource management which includes human resources planning and development, personnel administration, organizational management, administration and household public office services, supply, maintenance and general assets safety of the company in accordance with the provisions of the apply.

## Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Direksi

Perseroan menyelenggarakan program pelatihan bagi anggota Direksi untuk meningkatkan pengetahuan anggota Direksi dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan Perseroan. Selama tahun 2016, anggota Direksi mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan kompetensi terkait pengelolaan Perseroan, antara lain Seminar Nasional Infrastruktur, Transportasi dan Logistik dengan Tema "Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi Terpadu dalam Mendukung Sistem Logistik Nasional" yang diselenggarakan oleh BUMN Executive Club di Jakarta tanggal 28 Juli 2016. Seminar tersebut dihadiri oleh Wibisono (Direktur Keuangan) dan Harry Boediarto (Direktur Komersial).

## Program Pengenalan/Orientasi Direksi

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wajib diberikan program pengenalan dan pendalaman pengetahuan bagi Anggota Direksi Perusahaan. Program Pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan, karena Anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan.

Program Pengenalan yang diberikan kepada Anggota Direksi antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh Perusahaan.

## Board of Directors Training and Competency Development Program

The Company implemented training program for the Board of Directors to develop knowledge of the Board of Directors members to perform managerial duty in the Company. Throughout 2016, the Board of Directors participated in various trainings to develop competency related with the Company's management, among others, National Seminar on Infrastructure, Transportation and Logistic with theme of "Integrated Infrastructure and Transportation Development to Support National Logistic System" that was held by BUMN Executive Club in Jakarta on July 28, 2016. The Seminar was attended by Wibisono (Director of Finance) and Harry Boediarto (Director of Commercial).

## Board of Directors Orientation Program

For smooth duty implementation, the Board of Directors member shall be provided by orientation and knowledge development programs. The orientation program is essential to be conducted due to the Board of Directors members may be appointed from various background, therefore, to establish as solid team work, the Orientation Program becomes mandatory.

The orientation program provided to the Board of Directors members includes aspects as follows:

1. Explanation about duty and responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors based on the legal aspect.
2. Implementation of good corporate governance principles by the Company.



3. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Pada tahun 2016, program orientasi Direksi diberikan kepada Anggota Direksi baru yaitu Muhammad Tukul Harsono dan Insan Purwarisy L. Tobing.

### **Pedoman Kerja Direksi**

Dalam hubungannya dengan organ perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) bagi Dewan Komisaris, sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) Nomor: 12.29/05/SK/HKO.01/2016 tentang tentang Tata Laksana Kerja (*Board Manual*) Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Tata laksana kerja tersebut berisi panduan bagi Dewan Komisaris yang berisikan, antara lain:

1. Kriteria Anggota Direksi dan Masa Jabatan Direksi;
2. Tanggung Jawab Direksi;
3. Tugas dan Kewajiban Direksi;
4. Wewenang Direksi;
5. Hak-Hak Direksi;
6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
7. Etika Jabatan;
8. Penetapan Kebijakan Pengurusan;
9. Komposisi dan Pembidangan Tugas;
10. Rapat Direksi;
11. Organ Pendukung Direksi.

### **Penilaian Atas Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi**

Hingga 31 Desember 2016, Direksi Perseroan belum membentuk komite-komite di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai Organ Pendukung Direksi.

3. Explanation about the Company in relationw ith purpose, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plan, competitive position, risk and other strategic issues.
4. Information that is related with delegated authority, internal and external audits, internal control system and policy and Audit Committee.

In 2016, the Board of Directors orientation program was provided for new Board of Directors members Muhammad Tukul Harsono and Insan Purwarisy L. Tobing.

### **Board Manual for Board of Directors**

In relation with other corporate structures related with duty and responsibility implementation, the Board of Commissioners has Working Guideline (*Board Manual*) for the Board of Commissioners as working guideline for the Board of Commissioners that is ratified under under PT PELNI (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners Joint Decree Number 12.29/05/SK/HKO.01/2016 regarding PT PELNI (Persero) Board Manual for Board of Directors and Board of Commissioners that discloses:

1. Board of Directors Members Criteria and Serving Period;
2. Board of Directors' Responsibility;
3. Board of Directors' Duty and Obligation;
4. Board of Directors' Authority;
5. Board of Directors' Rights;
6. Orientation Program and Capacity Building;
7. Position Ethics;
8. Stipulation of Managerial Policy;
9. Composition and Segregation of Duty;
10. Board of Directors Meeting;
11. Board of Directors Supporting Structure.

### **Evaluation to Committees Under the Board of Directors**

As of December 31, 2016, the Board of Directors had not yet established Committee under the Board of Directors. Implementation of the Board of Directors' duty is assisted by Corporate Secretary and Internal Audit Unit as Board of Directors' Supporting Structure.



## Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat

### Board of Commissioners Attendance Frequency

#### Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikitnya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan Perusahaan. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara setuju terbanyak. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat.

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal dan rapat dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris melaksanakan 11 (sebelas) rapat internal Dewan Komisaris. Jumlah kehadiran para Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

#### Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris 2016

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Total Board of Commissioners Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commissioner	11	11	100%
Omo Dahlan	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	10	93%
Sudarto	Komisaris Commissioner	11	7	64%
Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	11	7	64%
Wolter B. Hesegem	Komisaris Commissioner	11	7	64%
Raldi Hendro Koestoe	Komisaris Commissioner	11	6	55%

#### Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners holds meeting at least 1 (once) in a month or based on the Company's needs. Board of Commissioners Meeting Resolutions were taken based on collective consensus. If the collective consensus is failed to be achieved, the resolutions will be taken by voting. The Board of Commissioners may also take legitimate and binding resolutions without any meeting (circular).

Board of Commissioners meeting consists of internal meeting and meeting that invited Board of Directors to discuss the Company's operational and financial management aspects. In 2016, the Board of Commissioners held 11 (eleven) Board of Commissioners internal meetings. Attendance of the Board of Commissioners Members in the Board of Commissioners Meeting throughout 2016 is as follows:

#### Board of Commissioners Attendance Frequency 2016



## Agenda Rapat Dewan Komisaris 2016

## Board of Commissioners Meeting Agenda 2016

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Dewan Komisaris 2016 Board of Commissioners Meeting Agenda 2016
1.	29 Januari 2016 January 29, 2016	Laporan bulan Desember 2015 dan Unaudited 2015 Report as of December 2015 and Unaudited 2015  Tol Laut Tol Laut  Progress Kapal Perintis Pioneer Ship Progress  PSO dan PNN PSO and PNN
2.	19 Februari 2016 February 19, 2016	Laporan Bulan Januari 2016 Report as of January 2016
3.	29 April 2016 April 29, 2016	Pembahasan laporan realisasi bulan Maret dan s.d TW-I/2016 Discussion of realization report as of March and Q1/2016  Usulan perubahan Logo PT PELNI (persero) Recommendation to PT PELNI (persero) Logo Renewal  Laporan perjalanan dinas Komut ke Luar negeri (Jerman) President Commissioner overseas business trip (Germany) Report
4.	31 Mei 2016 May 31, 2016	Pembahasan Laporan Realisasi anggaran bulan April dan s.d April 2016 Discussion of Budget Realization Report as of April and up to April 2016
5.	22 Juni 2016 June 22, 2016	Laporan Realisasi Anggaran bulan Mei dan s.d Mei 2016 Discussion of Budget Realization Report as of May and up to May 2016  Laporan hasil Rapim PT PELNI tanggal 1-4 Juni 2016 PT PELNI Executive Meeting Result on June 1 – 4, 2016
6.	21 Juli 2016 July 21, 2016	Surat DPR tentang Penjualan KM. Ganda Dewata DPR Letter on KM Ganda Dewata Sales  Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Audited Tahun Buku 2016 Appointment of Public Accountant Firm (KAP) Audited Fiscal Year 2016  Laporan Realisasi usaha TW-II dan Semester I/2016 Business realization report as of Q2 and 1 <sup>st</sup> Semester of 2016
7.	19 Agustus 2016 August 19, 2016	Laporan Realisasi Anggaran bulan Juli dan s.d Juli 2016 Budget realization report as of July and until July 2016  Tanggapan Dewan Komisaris atas surat BPK-RI terkait TL. Temuan dan Rekomendasi BPK-RI Board of Commissioners opinion on BPK-RI Letter related with follow-up to BPK RI finding and recommendation  Tanggapan Dewan Komisaris atas surat Direksi No.08.05/05/S/001/2016 tanggal 5 Agustus 2016 Perihal Permohonan Dinas keluar Negeri terkait MoU PT PELNI (Persero)-Meyer werft GmbH & Co. KG-KFW IPEX Bank GmbH tanggal 18 April 2016 Board of Commissioners opinion on Board of Directors Letter No.08.05/05/S/001/2016 dated August 5, 2016 regarding Overseas Business Trip Proposal Related with MoU Between PT PELNI (Persero)-Meyer werft GmbH & Co. KG-KFW IPEX Bank GmbH dated April 18, 2016
		Konversi hutang menjadi penyertaan modal PT PELNI (Persero) kepada PT RS. PELNI Debt to Investment Conversion from PT PELNI (Persero) to RS. PELNI
8.	30 September 2016 September 30, 2016	Pembahasan Laporan realisasi Anggaran bulan Agustus dan s.d Agustus Tahun 2016 Discussion of Budget Realization Report as of August up to August 2016
9.	31 Oktober 2016 October 31, 2016	Pembahasan Laporan realisasi Anggaran TW-III dan s.d TW-III Tahun 2016 Discussion of Budget Realization Report as of Q3 and up to Q3 of 2016
10.	30 November 2016 November 30, 2016	Pembahasan Laporan realisasi Anggaran bulan Oktober dan s.d Oktober Tahun 2016 Discussion of Budget Realization Report as of October and up to October 2016



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Dewan Komisaris 2016 Board of Commissioners Meeting Agenda 2016
11.	9 Desember 2016 December 2016	Pembahasan usulan perubahan struktur organisasi PT PELNI (Persero) tahun 2017 Discussion of PT PELNI (Persero) organization structure change in 2017
		Laporan realisasi penggunaan dana PMN TW-IV/2016 PMN Proceeds realization report as of Q4/2016
		Laporan kunjungan kerja Komite-Komite ke KM. Tidar di Semarang Committees working visit report to KM. Tidar in Semarang

## Rapat Direksi

Direksi dapat menyelenggarakan rapat untuk mengambil keputusan penting terkait kegiatan operasional dan bisnis Perseroan. Keputusan Direksi harus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka keputusan rapat akan diputuskan oleh Direktur Utama.

Rapat Direksi yang dilakukan secara internal maupun rapat Koordinasi bersama Dewan Komisaris selama tahun 2016 diselenggarakan sebanyak 48 (empat puluh delapan).

Daftar Kehadiran dan agenda yang dibahas dalam Rapat Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

## Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi 2016

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Direksi Total Board of Directors Meeting	Kehadiran Attendance	Percentase Percentage
Elfien Goentoro	Direktur Utama President Director	48	45	94%
Wibisono	Direktur Keuangan Director of Finance	48	41	85%
Olih Masolich Sodikin	Direktur Armada & Teknik Director of Fleet & Technical	48	43	90%
Harry Boediarto Soewarto	Direktur Komersial Director of Commercial	48	41	85%
Datep Purwa Saputra**	Direktur Operasi & Pelayanan Director of Operations & Services	48	43	90%
Daniel E. Bangonan**	Direktur SDM & Umum Director of HR & General affairs	48	42	88%
Muhammad Tukul Harsono*	Direktur Operasi & Pelayanan Director of Operations & Services	48	1	2%
Insan Purwarisya L Tobing*	Direktur SDM & Umum Director of HR & General affairs	48	1	2%

### Keterangan:

\*) Menjabat sejak tanggal 1 Desember 2016

\*\*) Menjabat hingga tanggal 1 Desember 2016

## Board of Directors Meeting

The Board of Directors may organize meeting to take important decisions related with the Company's operational and business activities. The Board of Directors' resolutions shall be taken based on collective consensus. If the consensus is failed to be achieved, the resolutions will be taken by voting and if agree and not agree voting are equal, the meeting resolution will be decided by President Director.

Board of Directors Internal Meeting and coordination meeting with the Board of Commissioners were held in 48 (forty eight) meetings throughout 2016.

List of attendance and discussed agenda in the Board of Directors meetings in 2016 are as follows:

## Board of Directors Meeting Frequency 2016

### Remarks:

\*) Serving since December 1, 2016

\*\*) Serving until December 1, 2016



## Agenda Rapat Direksi 2016

## Board of Directors Meeting Agenda 2016

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2016 Board of Directors Meeting Agenda 2016
1.	05 Januari 2016 January 05, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapal Perintis</li> <li>Kapal Tol Laut</li> <li>Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Pengadaan Sparepart Kapal</li> <li>Trayek Kapal Penumpang</li> <li>Optimalisasi Aset/Kapal</li> <li>Pembahasan FRD &amp; RR</li> <li>Pengadaan Seragam Pegawai</li> <li>Persiapan Rapim Januari 2016</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pioneer Ship</li> <li>Tol Laut Ship</li> <li>Tol Laut Ship Procurement</li> <li>Ship Spare Part Procurement</li> <li>Passenger Ship Route</li> <li>Assets/Vessels Optimization</li> <li>FRD &amp; RR Discussion</li> <li>Employee Uniform Procurement</li> <li>Executive Meeting Preparation in January 2016</li> </ul>
2.	12 Januari 2016 Januari 12, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Penilaian Kinerja Kepala Cabang dan Cabang</li> <li>Pembahasan Kesiapan Permakanan Penumpang</li> <li>Pembahasan Kapal Perintis</li> <li>Pembahasan Tol Laut</li> <li>Presentasi Evaluasi Keseluruhan Paket Wisata Bahari</li> <li>Investasi Dana Pensiun</li> <li>Dokumentasi Surat dan SK</li> <li>Gross Akta KM Pangrango</li> <li>Penambahan KPI dari BUMN</li> <li>PMN untuk Kapal Barang Tol Laut</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Branch Office and Branch Performance Assessment</li> <li>Discussion of Passenger Meal Preparation</li> <li>Pioneer Ship Discussion</li> <li>Tol Laut Discussion</li> <li>Presentation of Maritime Tourism Package Overall Evaluation</li> <li>Pension Funds Investment</li> <li>Letter and Decree Documentation</li> <li>KM Pangrango Gross Deeds</li> <li>Additional KPI from SOE</li> <li>PMN for Tol Laut Cargo Ship</li> </ul>
3.	19 Januari 2016 Januari 19, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Trayek Penumpang Kapal thn 2016</li> <li>Ijin Prinsip Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Tindaklanjut Pertanggungjawaban UM</li> <li>Penetapan Kelas Cabang</li> <li>Persiapan RAPIM Januari 2016</li> <li>Unaudited Kinerja 2015 dan Audit KAP &amp; BPK</li> <li>Report Kapal Perintis dan Tol Laut</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluation of Passenger Ship Route 2016</li> <li>Tol Laut Ship Procurement Principal License</li> <li>UM Accountability Follow-Up</li> <li>Branch Office Stipulation</li> <li>Executive Meeting Preparation in January 2016</li> <li>Unaudited Performance 2015 and KAP &amp; BPK Audit</li> <li>Pioneer and Tol Laut Ships Report</li> </ul>
4.	26 Januari 2016 Januari 26, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progress report frozen food and new ramming</li> <li>Pembahasan hasil evaluasi trayek kapal penumpang 2016</li> <li>Evaluasi RAPIM Januari 2016</li> <li>Progress Kapal Perintis, Tol Laut dan Kapal Hewan</li> <li>Evaluasi Maintenance Kapal PELNI dan Kapal Perintis</li> <li>Evaluasi Terkait Asset Pelindo</li> <li>Pembahasan DPP</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Frozen Food and New Ramming Progress Report</li> <li>Discussion of passenger ship route evaluation report 2016</li> <li>Evaluation of Management Meeting as of January 2016</li> <li>Progress of Pioneer Ship, Tol Laut and Cattle Ship</li> <li>Evaluation of PELNI Ship and Pioneer Ship Maintenance</li> <li>Evaluation related to Pelindo's Assets</li> <li>DPP Discussion</li> </ul>
5.	02 Februari 2016 February 02, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan kapal penumpang non-PSO menjadi PSO</li> <li>Pembahasan persiapan prelaunching implementasi frozen food di KM Kelud</li> <li>Progress &amp; standar operasional Kapal Perintis, Tol Laut dan Kapal Hewan</li> <li>Optimalisasi aset, rencana pengembangan fasilitas pelabuhan</li> <li>Pengadaan sparepart kapal</li> <li>BBM kapal penumpang dan kapal perintis</li> <li>Persiapan Rapat Dekom</li> <li>Laporan pengawas DPP</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of Non-PSO Passenger Ship into PSO</li> <li>Discussion of frozen food implementation pre-launching at KM Kelud preparation</li> <li>Pioneer Ship, Tol Laut and Cattle Ship Progress &amp; Standard Operation</li> <li>Optimization of assets, port facility development plan</li> <li>Ship spare-parts procurement</li> <li>Passenger Ship and Pioneer Oil Fuel</li> <li>Board of Commissioners Meeting Preparation</li> <li>DPP Supervisor Report</li> </ul>
6.	09 Februari 2016 February 09, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progress Kapal Perintis dan Pengadaan Kapal Barang</li> <li>Pembahasan Tol Laut &amp; Masalah Muatan Laporan Voyage Terakhir</li> <li>Tindak Lanjut Rapat Dekom</li> <li>Kesiapan Kapal Ternak</li> <li>Revisi Logo Perusahaan</li> <li>Konsep Media Promosi Paket Wisata Tahun 2016</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>The progress Ship Pioneer Freighter and procurement</li> <li>Discussion Of Expressway Sea Voyage Report Charge Issue &amp; Last</li> <li>A Follow-up Meeting Of Dekom</li> <li>Cattle Ship Readiness</li> <li>Revision Of The Corporate Logo</li> <li>The concept of Media promotion tour package 2016</li> </ul>
7.	16 Februari 2016 February 16, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan evaluasi frozen food</li> <li>Mapping keamanan di atas kapal</li> <li>Progress perints dan tol laut</li> <li>SOP dan RAB kapal perintis</li> <li>Progress kapal PSO menjadi non PSO</li> <li>Pembahasan WLA SDM &amp; Pengawakan ABK</li> <li>Pembahasan laporan manajemen bulan januari</li> <li>Laporan rencana MoU Sinergi BUMN dengan PELNI</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Discussion of frozen flood evaluation</li> <li>Mapping of onboard security</li> <li>Pioneer and Tol Laut Progress</li> <li>Pioneer Ship SOP and RAB</li> <li>PSO Ship Progress into non-PSO</li> <li>Discussion of Human Resources WLA &amp; ABK Shipping</li> <li>Discussion of Management Report as of January</li> <li>SOE Synergy MoU Plan with PELNI Report</li> </ul>



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2016 Board of Directors Meeting Agenda 2016
8.	17 Februari 2016 February 17, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentasi Trayek Kapal Penumpang sesuai dengan Kesepakatan Rapat BOD 16 Februari 2016</li> <li>Pembahasan Sewa Kapal Tol Laut</li> <li>Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Januari 2016</li> <li>Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Dekom</li> <li>Progress Report Direktorat</li> <li>Laporan BKI atas Survei Kapal Perintis &amp; Laporan Docking Februari</li> <li>Presentation of Passenger Ship Route according to BOD Meeting Resolution on February 16, 2016</li> <li>Discussion of Tol Laut Ship Rental</li> <li>Discussion of Management Report as of January 2016</li> <li>Discussion of Board of Commissioners Meeting Follow-Up</li> <li>Direktorat Progress Report</li> <li>BKI Report on Pioneer Ship Survey &amp; Docking Report as of February</li> </ul>
9.	15 Maret 2016 March 15, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghapusbukan Aset</li> <li>Kajian untuk perhitungan aktuaria/pensiunan</li> <li>YKPP dan Permasalahan renumerasi serta aktuaria</li> <li>Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Pengadaan Kapal penumpang multipurpose</li> <li>Pengadaan Sparepart</li> <li>Wisata Bahari Karimun Jawa</li> <li>Progress Kapal Perintis</li> <li>Frozen Food di KM Sinabung</li> <li>DCS Makassar</li> <li>Progress IT</li> <li>Logo Perusahaan</li> <li>Diklat Madya</li> <li>Assets Write-Off</li> <li>Review for actuarial/pension calculation</li> <li>YKPP and remuneration as well as actuaries issue</li> <li>Tol Laut Ship Procurement</li> <li>Multipurpose Passenger Ship Procurement</li> <li>Spare Parts Procurement</li> <li>Karimun Jawa Maritime Tourism</li> <li>Pioneer Ship Progress</li> <li>Frozen Food at KM Sinabung</li> <li>DCS Makassar</li> <li>IT Progress</li> <li>Company Logo</li> <li>Middle Level Training</li> </ul>
10.	22 Maret 2016 March 22, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif Uang Tambang Loose Cargo</li> <li>Progress Kapal Perintis, Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak</li> <li>Hail WLA SDM</li> <li>Presentasi dari Hay Group tentang Remunerasi</li> <li>Sistem Pensiun dan Struktur Penggajian</li> <li>Pengadaan Kapal Baru</li> <li>Loose Cargo Freight Money</li> <li>Pioneer Ship, Tol Laut Ship and Cattle Ship Progress</li> <li>HR Hail WLA</li> <li>Presentation from Hay Group on Remuneration</li> <li>Pension System and Payroll Structure</li> <li>New Ship Procurement</li> </ul>
11.	29 Maret 2016 March 29, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progress Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Persiapan Rapat dengan Dewan Komisaris</li> <li>Hasil KPI atau Kinerja Cabang</li> <li>Pembahasan Persiapan Angkutan Lebaran 2016</li> <li>Progress Pendapatan per Kapal</li> <li>Progress Kapal Perintis, Tol Laut dan Kapal Hewan</li> <li>Progress pengadaan Sparepart</li> <li>Rencana MoU dan Tim Pengadaan Kapal Penumpang</li> <li>Progress Hasil Audit KAP &amp; BPK</li> <li>Tol Laut Ship Procurement Progress</li> <li>Preparation of Meeting with Board of Commissioners</li> <li>Branch KPI or Performance Repot</li> <li>Discussion of Eid Holiday Transportation 2016</li> <li>Revenue by Ship Progress</li> <li>Pioneer Ship, Tol Laut Ship and Cattle Ship Progress</li> <li>Spare-parts procurement progress</li> <li>MoU Plan and Passenger Ship Procurement Team</li> <li>KAP &amp; BPK Audit Report Progress</li> </ul>
12.	04 April 2016 April 04, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Angkutan Lebaran tahun 2016</li> <li>Tindak Lanjut arahan Dekom pada Rapat tgl 31 Maret 2016</li> <li>Eid Holiday 2016 Transportation Preparation</li> <li>Follow-up of BOC Resolutions in Meeting on March 31, 2016</li> </ul>
13.	08 April 2016 April 08, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progress Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Pembahasan Hasil Audit BPK</li> <li>Laporan Progress Pengadaan Kapal Tol Laut, Kapal PSO, Kapal Perintis dan Ternak</li> <li>Laporan Hasil Audit BPK</li> <li>Pengembangan SDM</li> <li>Rencana Kunjungan Menteri BUMN Ethiopia</li> <li>Pengelolaan Aset PELNI</li> <li>Progress Pengadaan Sparepart</li> <li>Hasil Pertemuan dengan KFW Jerman</li> <li>Laporan terkait KM Wilis, KM Egon dan KM Gunung Dempo</li> <li>Incentif Angkutan Laut dan sanksi Hukuman</li> <li>Tol Laut Ship Procurement Progress</li> <li>Discussion of BPK Audit Report</li> <li>Tol Laut Ship, PSO Ship, Pioneer Ship and Cattle Ship Procurement Progress Report</li> <li>BPK Audit Report</li> <li>HR Development</li> <li>Minister of SOE Visit Plan to Ethiopia</li> <li>PELNI Assets Management</li> <li>Spare-part Procurement Progress</li> <li>Result of Meeting with KFW Jerman</li> <li>Report Related to KM Wilis, KM Egon and KM Gunung Dempo</li> <li>Incentives of Marine Transportation and Punishment</li> </ul>
14.	12 April 2016 April 12, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana MoU antara PELNI dengan MEYER dan KfW</li> <li>Progress Pengoperasian Tol Laut, Perintis dan Kapal Ternak</li> <li>Progress Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Pembahasan HUT PELNI dan Launching Logo</li> <li>Persiapan Lebaran 2016</li> <li>Temuhan BPK</li> <li>Laporan Pengadaan Sparepart</li> <li>Rencana Persiapan Rapat dengan Dewan Komisaris</li> <li>RJP Anak Perusahaan</li> <li>Program Pengembangan SDM</li> <li>MoU Plan between PELNI and MEYER and KIW</li> <li>Tol Laut Ship, Pioneer Ship and Cattle Ship Operation Progress</li> <li>Tol Laut Procurement Progress</li> <li>PELNI Anniversary and Logo Launching</li> <li>Eid Holiday 2016 Preparation</li> <li>BPK Findings</li> <li>Spare-part procurement report</li> <li>Meeting with Board of Commissioners Preparation Plan</li> <li>Subsidiary Business Plan</li> <li>HR Development Program</li> </ul>



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2016 Board of Directors Meeting Agenda 2016
15.	22 April 2016 April 22, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengoperasian Kapal Perintis</li> <li>Pengoperasian Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak</li> <li>Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Tugas &amp; Fungsi ABK</li> <li>Pengadaan Sparepart</li> <li>Tindaklanjut MoU PELNI-Meyer-kfW</li> <li>Persiapan Mudik Lebaran 2016</li> <li>Persiapan HUT PELNI KE 64</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pioneer Ship Operation</li> <li>Tol Laut and Cattle Ship Operation</li> <li>The Procurement Of The Vessel Tol Laut</li> <li>ABK Duty &amp; Function</li> <li>Spare-parts procurement</li> <li>PELNI-Meyer-Kfw MoU Follow-Up</li> <li>Eid Holiday Homcoming 2016 Preparation</li> <li>PELNI 64<sup>th</sup> Anniversary Preparation</li> </ul>
16.	25 April 2016 April 25, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progress Report Pengoperasian Kapal Perintis, Tol Laut &amp; Ternak</li> <li>Progress Report Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Presentasi Panitia HUT PELNI 64</li> <li>Progress Pelaksanaan Raming</li> <li>Pembahasan Konsep Permakanan Penumpang</li> <li>Persiapan Pra RUPS</li> <li>Laporan pengadaan Sparepart</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progress Report of Pioneer Ship, Tol Laut Ship &amp; Cattle Ship Operation</li> <li>Tol Laut Procurement Progress Report</li> <li>PELNI 64<sup>th</sup> Anniversary Committee Presentation</li> <li>Raming Implementation Progress</li> <li>Pasenger meal Concept Discussion</li> <li>Spare-part pcourement report</li> </ul>
17.	3 Mei 2016 May 3, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Angkutan Lebaran 2016</li> <li>Progress Report Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Persiapan RAPIM Mei 2016</li> <li>Progress Report Kapal Perintis dan Kapal Ternak</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Preparation of Lebaran 2016 Transportation</li> <li>Procurement Report on Marine Toll Ship Procurement</li> <li>RAPIM Preparation in May 2016</li> <li>Progress Report of Pioneer Ships and Cattle Ship</li> </ul>
18.	10 Mei 2016 May 10, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Angkutan Lebaran 2016</li> <li>Kapal Tol Laut, Kapal Perintis dan Muatan di kapal Penumpang</li> <li>Pengadaan Sparepart</li> <li>Pengadaan Permakanan</li> <li>PSO Kapal Penumpang</li> <li>Persiapan RAPIM bulan Mei 2016</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>paration of Lebaran 2016 Transportation</li> <li>Sea Toll Ships, Pioneer Ships and Cargo on Passenger ships</li> <li>Sparepart Procurement</li> <li>Procurement of Food</li> <li>PSO Passenger Ship</li> <li>RAPIM Preparation in May 2016</li> </ul>
19.	17 Mei 2016 May 17, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progress Report Pelaksanaan MoU dengan BUMN / INSTANSI</li> <li>Presentasi Konsultan SDM Tentang WLA/SK Formasi</li> <li>Presentasi PPM terkait dengan Diklat Managerial Muda</li> <li>Laporan Keuangan bulan April s/d april 2016</li> <li>Laporan Produksi penjualan kapal penumpang, kapal barang, kapal ternak, keagenan <i>life style business</i>, dan optimalisasi aset 2016</li> <li>Laporan persiapan lebaran 2016</li> <li>Laporan dock kapal</li> <li>Laporan Kapal Perintis, Tol Laut &amp; penjualan Kapal Penumpang</li> <li>Laporan Aset &amp; cabang Singapura</li> <li>Program Beasiswa SDM</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progress Report Implementation of MoU with SOE / INSTITUTION</li> <li>Human Resource Consultant Presentation About WLA / SK Formation</li> <li>PPM presentation related to Young Managerial Training</li> <li>Financial Statements from April to April 2016</li> <li>Production reports of sales of passenger ships, freight vessels, cattle ships, life style business agents, and Optimization of assets 2016</li> <li>Eid Holiday 2016 Preparation Report</li> <li>Ship dock report</li> <li>Report of pioneer vessels, sea tolls &amp; sales of passenger vessels</li> <li>Asset Report &amp; Singapore branch</li> <li>Emloyee Scholarship Program</li> </ul>
20.	24 Mei 2016 May 24, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progress Pengoperasian Kapal Perintis</li> <li>Sanksi kepada ABK yang melanggar ketentuan Perusahaan</li> <li>PSO</li> <li>Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Progress Pengoperasian Kapal Tol Laut</li> <li>Aset PELNI</li> <li>Seleksi Calon Kepala Perwakilan Cabang PELNI di Singapura</li> <li>Pemasaran muatan di Kapal Penumpang</li> <li>Pengembangan Sistem Komunikasi di Kapal</li> <li>Tindaklanjut Rapat Dekom pada 29 April 2016</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Progress of Pioneer Ship Operations</li> <li>Sanctions to ABK that violate the Company's provisions</li> <li>PSO</li> <li>Procurement of Marine Toll Ship</li> <li>Progress of Sea Toll Ship Operations</li> <li>Asset PELNI</li> <li>Selection of Chief Candidate of the PELNI Branch Representative in Singapore</li> <li>Marketing Cargo on Passenger Ship</li> <li>Development of Communication System in Ship</li> <li>Follow up of BOC Meeting on 29 April 2016</li> </ul>
21.	31 Mei 2016 May 31, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>IAL</li> <li>Standar Pelayanan di Kapal</li> <li>Persiapan RAPIM kedua tahun 2016</li> <li>Pengoperasian dan Pelayanan Kapal Perintis</li> <li>Pengadaan Kapal Penumpang</li> <li>Kinerja Koperasi, YKPP, DPP</li> <li>Progress Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Permasalahan Singapura</li> <li>RKAP 2016</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>IAL</li> <li>Service Standard on Ship</li> <li>Preparation of the second RAPIM of 2016</li> <li>Pioneer Ship Operations and Services</li> <li>Procurement of Passenger Ship</li> <li>Cooperative Performance, YKPP, DPP</li> <li>Procurement Procurement of Marine Toll Ship</li> <li>Singapore Issues</li> <li>RKAP 2016</li> </ul>



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2016 Board of Directors Meeting Agenda 2016	
22.	07 Juni 2016 June 07, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Docking Kapal</li> <li>Asuransi Pelaut sesuai PP 7 tahun 2000</li> <li>Cabang Singapura</li> <li>PMN Non Cash</li> <li>SOP, SLA, Kontrak dan Assessment Jenang Kapal</li> <li>Penarikan Saham PELNI di PT Aspan</li> <li>Pengadaan Pembelian Kapal Container sesuai PMN 500 M</li> <li>Persiapan Angkutan Lebaran tahun 2016</li> <li>Laporan MRT</li> <li>Sistem Komunikasi Kapal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ship Docking</li> <li>Sailor insurance according to PP 7 of 2000</li> <li>Singapore Branch</li> <li>Non-Cash PMN</li> <li>Ship SOP, SLA, Contract and Assessment</li> <li>PELNI Shares Divestment at PT Aspan</li> <li>Container Ship Purchase according to PMN 500 M</li> <li>Preparation of Idul Fitri holiday Transport 2016</li> <li>MRT Report</li> <li>Vessels Communication System</li> </ul>
23.	16 Juni 2016 June 16, 2016	Kelebihan Penumpang KM Tilongkabila	<ul style="list-style-type: none"> <li>KM Tilongkabila Passenger Excess</li> </ul>
24.	17 Juni 2016 June 17, 2016	Monitoring Angkutan Lebaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eid Transportation Monitoring</li> </ul>
25.	29 Juni 2016 June 29, 2016	Rotasi dan mutasi kepala Cabang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Branch Head Rotation and Mutation</li> </ul>
26.	12 Juli 2016 July 12, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Angkutan Lebaran 2016</li> <li>Monitoring Arus Balik Lebaran 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eid Holiday 2016 Transportation Evaluation</li> <li>Eid Homecoming Traffic Monitoring 2016</li> </ul>
27.	13 Juli 2016 July 13, 2016	Kelebihan Penjualan Tiket KM Egon di Semarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>KM Egon Ticket Sales Excess in Semarang</li> </ul>
28.	14 Juli 2016 July 14, 2016	Evaluasi Kinerja Travel Agent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluation to Travel Agent Performance</li> </ul>
29.	19 Juli 2016 July 19, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Laporan Arus Mudik dan balik pada Angkutan Lebaran 2016</li> <li>Laporan Progress Tol Laut, Kapal Perintis, Kapal Ternak</li> <li>Penghasilan Semester I</li> <li>Pengadaan Pelumas</li> <li>Persiapan Rapat DPP</li> <li>Rencana Kenaikan Biaya OAT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Homecoming Traffic in Eid Holiday Transportation 2016 Report Evaluation</li> <li>Tol Laut Ship, Pioneer SHip, Cattle Ship Progress Report</li> <li>Procurement as of 1st Semester</li> <li>Lubricants Procurement</li> <li>DPP Meeting Preparation</li> <li>Plan to Increase OAT Cost</li> </ul>
30.	25 Juli 2016 July 25, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penumpang Tanpa tiket di atas kapal</li> <li>Pembahasan Pengadaan kapal baru dengan Meyer</li> <li>Lokakarya pada Rapim ke-3 tahun 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No-ticket Passenger onboard</li> <li>Discussion of new ship procurement with Meyer</li> <li>Wokrshop in 3rd Executive Meeting 2016</li> </ul>
31.	26 Juli 2016 July 26, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Angkutan Lebaran 2016</li> <li>Progress Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Persiapan Pengadaan Kapal Baru dengan Tim Meyer</li> <li>Rolling Pegawai Cabang Semarang</li> <li>Jadwal Docking kapal Penumpang tahun 2016</li> <li>Persiapan Angkutan Natal dan tahun Baru</li> <li>Realisasi Program Kerja dan KPI Semester I tahun 2016</li> <li>Hasil Rapat dengan Pertamina</li> <li>Wisata Bahari 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eid Holiday Transportation 2016 Report</li> <li>Tol Laut Ship Procurement Progress</li> <li>New Vessel Procurement Preparation with Meyer Team</li> <li>Employee Rolling in Semarang Branch</li> <li>Passenger Ship Docking Schedule 2016</li> <li>Christmas and New Year Transportation Preparation</li> <li>Working Program and KPI Realization as of 1st Semester of 2016</li> <li>Result of Meeting with Pertamina</li> <li>Maritime Tourism 2016</li> </ul>
32.	08 Agustus 2016 August 08, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undangan Meyer, Jerman</li> <li>Wisata Bahari 2016</li> <li>Pengembangan SDM</li> <li>Arahan &amp; Evaluasi Menteri Perhubungan</li> <li>Proses Pengadaan Sparepart</li> <li>Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Survey Keterikatan Pegawai</li> <li>EBS</li> <li>Permakanan PELNI oleh Anak Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invitation From Meyer, Germany</li> <li>Maritime Tourism 2016</li> <li>HR Development</li> <li>Minister of Transportation Briefing &amp; Evaluation</li> <li>Spare-part procurement process</li> <li>Tol Laut Ship Procurement</li> <li>Employee Engagement Survey</li> <li>EBS</li> <li>PELNI Meal Supply by Subsidiary</li> </ul>



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2016 Board of Directors Meeting Agenda 2016	
33.	16 Agustus 2016 August 16, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan <i>Launching</i> Wisata Bahari</li> <li>Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo dan Agats</li> <li>Laporan Semester I tahun 2016</li> <li>Persiapan Rencana Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan ke Tanjung Priok</li> <li>Pelayanan di pelabuhan Baubau</li> <li>Rotasi dan Mutasi Pegawai Cabang Semarang</li> <li>Persiapan Rapim ke-3 tahun 2016</li> <li>Pegawai Cabang Singapura</li> <li>Laporan Manajemen Bulan Juli 2016</li> <li>Tindaklanjut hasil Assessment Pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maritime Tourism Launching Preparation</li> <li>Labuan Bajo and Agats Ports Development</li> <li>1<sup>st</sup> Semester 2016 Report</li> <li>Minister of Transportation Official Visit Plan to Tanjung Priok Preparation</li> <li>Services at Baubau Port</li> <li>Employee Rotation and Mutation in Semarang Branch</li> <li>Preparation of 3<sup>rd</sup> Executive Meeting 2016</li> <li>Employee of Singapore Branch</li> <li>Management Report as of July 2016</li> <li>Employee Assessment Result Follow-Up</li> </ul>
34.	18 Agustus 2016 August 18, 2016	Persiapan <i>Launching</i> Wisata Bahari	<ul style="list-style-type: none"> <li>The Preparation Of Launching Marine Tourism</li> </ul>
35.	19 Agustus 2016 August 19, 2016	Tindaklanjut Temuan SPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>SPI Findings Follow-Up</li> </ul>
36.	06 September 2016 September 06, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>New PELNI Ticketing System</i></li> <li>EBS</li> <li>Asumsi Penyusunan RKAP 2017</li> <li>Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li>Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>New PELNI Ticketing System</li> <li>EBS</li> <li>RKAP 2017 Preparation Assumption</li> <li>Tol Laut Ship Procurement</li> <li>BPK Audit Report Follow-Up</li> </ul>
37.	13 September 2016 September 13, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindaklanjut Arahan Menteri Perhubungan</li> <li>Pelaksanaan 6 destinasi Wisata Bahari tahun 2016</li> <li>Laporan Penugasan Pemerintah</li> <li>Revisi RKAP 2016</li> <li>Hasil <i>Mapping</i> Pegawai</li> <li>Hasil <i>Survey</i> Kapal Tol Laut</li> <li><i>Progress</i> Penugasan Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Follow-up of Briefing from Minister of Transportation</li> <li>Implementation of 6 Maritime Tourism in 2016</li> <li>Government Assignment Report</li> <li>RKAP 2016 Revision</li> <li>Employee Mapping Report</li> <li>Tol Laut Ship Survey Report</li> <li>Government Assignment Progress</li> </ul>
38.	20 September 2016 September 20, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Progress</i> Penjualan Ganda Dewata</li> <li>Solusi Permasalahan IT</li> <li><i>Progress</i> Laporan Operasional Kapal Perintis, Tol laut dan Kapal Ternak</li> <li>Kajian Tenaga PKL bagi ABK</li> <li>Penilaian Pegawai</li> <li>Asumsi Kebijakan RKAP 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ganda Dewata Sales Progress</li> <li>IT Issue Solution</li> <li>Pioneer Ship, Tol Laut Ship and Cattle Ship Operational Progress Report</li> <li>PKL Personnel Review for ABK</li> <li>Employee Appraisal</li> <li>RKAP 2017 Policy Assumption</li> </ul>
39.	27 September 2016 September 27, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Rapat DEKOM</li> <li>Pengelolaan Aset</li> <li>NPTS</li> <li>Kapal Penumpang Baru</li> <li>Pengadaan Kapal PMN</li> <li>Tindaklanjut Rapim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BOC Meeting Preparation</li> <li>Assets Management</li> <li>NPTS</li> <li>New Passenger Ship</li> <li>PMN Ship Procurement</li> <li>Executive Meeting Follow-Up</li> </ul>
40.	04 Oktober 2016 October 04, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Progress</i> Pembelian Kapal Barang</li> <li><i>Sparepart</i> Kapal</li> <li>Pengalihan OAT BBM dari Loco ke Franco</li> <li>YKPP</li> <li><i>Progress</i> kapal tol Laut, Perintis dan Kapal Ternak</li> <li>Wisata Bahari di Derawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cargo Ship Purchase Progress</li> <li>Ship sparepart</li> <li>OAT Fuel Transfer from Loco to Franco</li> <li>YKPP</li> <li>Tol Laut Ship, Pioneer Ship and Cattle Ship Progress</li> <li>Maritime Tourism at Derawan</li> </ul>
41.	11 Oktober 2016 October 11, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Progress</i> Wisata Bahari</li> <li>Kerjasama dengan Marsak Line</li> <li>Kapal <i>Cruise</i></li> <li>Pengadaan Kapal Tol Laut</li> <li><i>Stock opname</i> <i>sparepart</i></li> <li>Pelaksanaan NPTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maritime Tourism Progress</li> <li>Partnership with Marsak Line</li> <li>Cruise Ship</li> <li>Tol Laut Ship Procurement</li> <li>Spare-part stock opname</li> <li>NPTS implementation</li> </ul>
42.	14 Oktober 2016 October 14, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian Pengoperasionalan Kapal <i>Cruise</i></li> <li>Kerjasama dengan MSL (<i>Maersk Sea Land</i>)</li> <li>KPI Kontrak Manajemen 2016</li> <li><i>Progress</i> Pengadaan Tol Laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Review of Cruise Ship Operation</li> <li>Partnership with MSL (Maersk Sea Land)</li> <li>Management Contract KPI 2016</li> <li>Tol Laut Procurement Progress</li> </ul>



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2016 Board of Directors Meeting Agenda 2016	
43.	18 Oktober 2016 October 18, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progress Peraturan Pengoperasionalan Kapal Tol Laut</li> <li>Parameter KPI 2017</li> <li>Asumsi RKAP 2017</li> <li>Prospek Bisnis di Cabang Singapura</li> <li>Kondisi Kapal Perintis</li> <li>Angkutan Logistik Natuna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tol Laut Ship Operation Regulation Progress</li> <li>KPI Parameter 2017</li> <li>RKAP 2017 Assumption</li> <li>Business Prospect at Singapore Branch</li> <li>Pioneer Ship Condition</li> <li>Natuna Logistic Transportation</li> </ul>
44.	25 Oktober 2016 October 25, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progress Pengadaan Sparepart</li> <li>Langkah Pelepasan KM Lambelu di Pelabuhan Tarakan</li> <li>Persiapan CJN III-4 untuk pelayaran Tol Laut ke Natuna</li> <li>Progress Pembelian Kapal Tol Laut</li> <li>Operasional cabang Singapura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sparepart procurement progress</li> <li>KM Lambelu Bon Voyage Ceremony at Tarakan port</li> <li>Preparation of CJN III - 4 for Tol Laut Shipping to Natuna</li> <li>Tol Laut Ship Purchase Progress</li> <li>Singapore Branch Operations</li> </ul>
45.	09 November 2016 November 09, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Docking Kapal Bulan November 2016</li> <li>Pengadaan Kapal Container dari dana PMN 2015</li> <li>Laporan pengadaan Sparepart PELNI</li> <li>Re-routing kapal pada masa low season tahun 2017</li> <li>Laporan RKAP 2017 dari Direktorat Keuangan</li> <li>SDM PELNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementation of Ship Docking in November 2016</li> <li>Container Ship Procurement by PMN proceeds 2015</li> <li>PELNI Spare-part procurement report</li> <li>Ship re-counting during low season in 2017</li> <li>RKAP 2017 Report from Finance Directorate</li> <li>PELNI Human Resources</li> </ul>
46.	30 Desember 2016 Desember 30, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kenaikan Biaya Makan oleh ACS</li> <li>Persiapan Acara Tahun Baru 2017 di KM Umsini</li> <li>Kontrak PSO</li> <li>NPTS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Increasing Meal Cost by ACS</li> <li>New Year's Eve 2017 Preparation at KM Umsini</li> <li>PSO Contract</li> <li>NPTS</li> </ul>

## Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi

Sebagai realisasi dari hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, selama tahun 2016, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 11 (sebelas) Rapat Gabungan. Adapun agenda dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

### Frekuensi Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2016

## Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting (Management Meeting)

As realization of working relation between Board of Commissioners and Board of Directors, throughout 2016, the Board of Commissioners and Board of Directors held 11 (eleven) Management Meetings. The agenda and Board of Commissioners and Board of Directors members attendance levels in the Management Meeting throughout 2016 are as follows:

### Management Meeting Attendance Frequency

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Gabungan Total Management Meeting	Kehadiran Attendance	Percentase Percentage
Dewan Komisaris/Board of Commissioners				
Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commissioner	11	10	91%
Omo Dahlan	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	10	91%
Sudarto	Komisaris Commissioner	11	9	82%
Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	11	9	82%



Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Gabungan Total Management Meeting	Kehadiran Attendance	Percentase Percentage
Wolter B. Hesegem	Komisaris Commissioner	11	10	91%
Raldi Hendro Koestoyer	Komisaris Commissioner	11	9	82%
<b>Direksi/Board of Directors</b>				
Elfien Goentoro	Direktur Utama President Director	11	10	91%
Wibisono	Direktur Keuangan Director of Finance	11	10	91%
Olih Masolich Sodikin	Direktur Armada & Teknik Director of Fleet & Technical	11	11	100%
Harry Boediarto Soewarto	Direktur Komersial Director of Commercial	11	10	91%
Datep Purwa Saputra**	Direktur Operasi & Pelayanan Director of Operations & Services	11	11	100%
Daniel E. Bangonan**	Direktur SDM & Umum Director of HR & General affairs	11	11	100%
Muhammad Tukul Harsono*	Direktur Operasi & Pelayanan Director of Operations & Services	11	-	-
Insan Purwarisya L Tobing*	Direktur SDM & Umum Director of HR & General affairs	11	-	-

**Keterangan:**

\*) Menjabat sejak tanggal 1 Desember 2016

\*\*) Menjabat hingga tanggal 1 Desember 2016

**Remarks:**

\*) Serving since December 1, 2016

\*\*) Serving until December 1, 2016

**Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi  
2016****Management Meeting Agenda 2016**

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2016 Management Meeting Agenda 2016
1.	02 Februari 2016 February 02, 2016	Evaluasi Laporan Unaudited tahun 2015 Progress pelaksanaan tentang Kapal Perintis dan Tol Laut serta Kapal Ternak Tindak lanjut arahan Menteri Perhubungan dan arahan RUPS RKAP tahun 2016  Unaudited Report 2015 Evaluation Pioneer Ship and Toll Laut and Cattle Ship Implementation Progress Follow-Up of Minister of Transportation and GMS on RKAP 2016 Briefing



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2016 Management Meeting Agenda 2016
2.	26 Februari 2016 February 26, 2016	Evaluasi Keuangan Bulan Januari 2016 Tindak lanjut hasil rapat bersama bulan Januari 2016 Hasil kunjungan Dewan Komisaris ke wilayah Timur Indonesia  Evaluation of Finance as of January 2016 Follow-Up to Management Meeting Resolution as of January 2016 Board of Commissioners Visit Report to Eastern Indonesia
3.	31 Maret 2016 March 31, 2016	Tindak Lanjut hasil rapat bulan yang lalu/Februari Evaluasi Pembahasan Laporan realisasi anggaran bulan Februari 2016  Follow-Up of previous (February) Meeting Evaluation to Budget Realization Report discussion as of February 2016
4.	15 April 2016 April 15, 2016	Pembahasan Laporan Audit dan Laporan Manajemen Tahun Buku 2015  Discussion of Audit Report and Management Report Fiscal Year 2015
5.	29 April 2016 April 29, 2016	Tindak Lanjut hasil rapat bersama pada bulan Maret 2016 Evaluasi Laporan Keuangan Bulan Maret/Triwulan I tahun 2016  Follow-Up to Management Meeting Resolution in March 2016 Evaluation to Financial Statements in March/Q1 of 2016
6.	31 Mei 2016 May 31, 2016	Pembahasan Laporan Realisasi anggaran bulan April dan s.d April 2016 Tindak Lanjut hasil rapat bersama pada bulan April 2016 Evaluasi Laporan Keuangan bulan April dan s.d April tahun 2016  Discussion of Budget Realization in April as of April 2016 Follow-up to Management Meeting Resolution in April 2016 Evaluation of Financial Statements in April and as of April 2016
7.	03 Juni 2016 June 03, 2016	Laporan Audited Keuangan tahun buku 2015 Audited Financial Statements fiscal year 2015
8.	29 Juni 2016 June 29, 2016	Tindak lanjut hasil rapat bersama pada bulan Mei 2016 Evaluasi Laporan Keuangan Bulan Mei dan s.d Tahun 2016 Pembahasan Laporan Realisasi anggaran bulan Mei dan s.d Mei 2016  Follow-Up to Management Meeting Resolution in May 2016 Evaluation to Financial Statements as of May 2016 Discussion of Budget Realization in May as of May 2016
9.	01 Agustus 2016 August 01, 2016	Laporan realisasi anggaran triwulan s.d semester 1 Budget Realization Report as of 1st Semester of 2016
10.	01 September 2016 September 01, 2016	Laporan Realisasi Anggaran bulan Juli dan s.d Juli tahun 2016 Budget Realization Report in July as of July 2016
11.	30 September 2016 September 30, 2016	Laporan Realisasi Anggaran bulan Agustus s.d Agustus tahun 2016 Budget Realization Report in August as of August 2016



## Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

### Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan sesuai dengan Risalah RUPS PT PELNI (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Pengesahan Laporan Keuangan dan mengacu kepada peraturan Menteri Negara BUMN RI No: PER: 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Badan Usaha Milik Negara.

Merujuk surat kuasa Menteri BUMN Nomor SKU-32/D4.MBU/6/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan memperhatikan keputusan RUPS PT PELNI (Persero) tentang persetujuan atas laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun buku 2015 yang disahkan pada 03 Juni 2016 maka ditetapkan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi serta insentif kinerja tahun Buku 2015 sebagai berikut:

1. Gaji Dirut ditetapkan naik dari gaji tahun 2015. Gaji Direktur lainnya 90% dari gaji Dirut
2. Honorarium Komisaris ditetapkan 45% dari Gaji Dirut. Honorarium Dewan Komisaris ditetapkan 90% dari Komisaris Utama.
3. Tunjangan dan/ atau fasilitas bagi BOD & BOC ditetapkan mengacu pada PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014.
4. Gaji/Honorarium bagi Direksi & Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2016 berlaku efektif 1 Januari 2016.

### Prosedur Penetapan Remunerasi

Pada tahun 2016, Gaji/Honorarium, Tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2016 serta *tantiem* atas Kinerja Tahun Buku 2015 untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direksi membuat kajian perhitungan penghasilan diterima (*take home pay*) yang terdiri atas gaji, tunjangan, fasilitas dan *tantiem*/insentif kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK 46/MBU/2014 tentang Pedoman Perhitungan Gaji Direktur Utama dan *Tantiem*/Insentif Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- b. Usulan penghasilan ini dibahas bersama Dewan Komisaris yang selanjutnya akan diusulkan kepada Pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN. Pada tahun 2016 Direksi dan Komisaris telah mengajukan usulan kepada Menteri Negara BUMN dengan No. Surat 09/DK/II-2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Usulan *Tantiem* tahun 2015, Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016 PT PELNI (Persero), serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2016.

Board of Commissioners and Board of Directors remuneration is paid based on PT PELNI (Persero) GMS Minutes of Meeting on Approval to Annual Report and Validation of Financial Statements referring to Minister of SOE RI Regulation Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 regarding Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders Remuneration Policy in State-Owned Enterprise.

Referring to Minister of SOE Attorney Letter Number SKU-32/D4.MBU/6/2016 dated June 29, 2016, considering PT PELNI (Persero) GMS resolutions on approval to Annual Report and validation of Financial Statements Fiscal Year 2015 that was validated on June 3, 2015, Board of Commissioners and Board of Directors remuneration as well as performance bonus in fiscal year 2015 are as follows:

1. Salary of President Director was appraised compared with salary in 2015. Other Directors increased 90% from President Director salary.
2. Board of Commissioners honorarium was stipulated 45% of President Director's Salary. Board of Commissioners honorarium is stipulated 90% of President Commissioner.
3. Allowance and/or facilities for the BOD & BOC referring to PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014.
4. Salary/Honorarium for the Board of Directors & Board of Commissioners as well as benefits and facilities that are effective since January 1, 2016, as follows:

### Remuneration Procedure

In 2016, the Salary, Honorarium, Benefit and facilities for 2016 and incentives for performance booked in 2015 for Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

- a. The Board of Directors shall prepare a take home pay study consisting of salaries, allowances, facilities and performance tariffs/ incentives based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK 46/MBU/2014 on Guidelines for Salary of President Director and *Tantiem*/Performance Incentive Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Trustees of State-Owned Enterprises.
- b. This proposal of income is discussed with the Board of Commissioners which will be proposed to the Shareholders in this case the Ministry of SOEs. In 2016 the Board of Directors and Commissioners have submitted a proposal to the Minister of State Owned Enterprises with no. Letter 09/DK/II-2016 dated February 19, 2016 on *Tantiem* Proposal 2015, Remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of 2016 PT PELNI (Persero), and appointment of Public Accountant Office for Book Year 2016.



- c. RUPS mengesahkan besaran penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2016 serta *tantiem* atas Kinerja Tahun Buku 2015.
- d. Pemegang Saham akan memberikan penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2016 serta *tantiem* atas Kinerja Tahun Buku 2015. Untuk tahun 2016, Kementerian BUMN telah menetapkan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk tahun 2016 serta *Tantiem* atas Kinerja Tahun Buku 2015 melalui Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor SKU-32/D4.MBU/6/2016 tanggal 29 Juni 2016.

## Struktur dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari Gaji/Honorarium, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya keagamaan, transportasi, komunikasi dan santunan purna jabatan dan tunjangan transportasi. Fasilitas yang diberikan adalah fasilitas kesehatan, bantuan hukum dan perkumpulan profesi. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan merujuk kepada Surat Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Nomor: SKU-32/D4.MBU/6/2016 tanggal 29 Juni 2016 serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 07.28/1/SK/HKO.01/2016 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

- c. The General Meeting of Shareholders approves the amount of salary/honorarium, allowances and facilities for 2016 and *tantiem* for the Year 2015 Book Performance.
- d. Shareholders will award the Salary/Honorarium, Benefits and facilities for 2016 and *tantiem* for the Fiscal Year Performance 2015. For 2016, the Ministry of State-Owned Enterprises has set a Salary/Honorarium. Allowances and Facilities for 2016 and Incentives for the Performance of the Fiscal Year 2015 through the Letter of Attorney of the Minister of SOE Number SKU-32/D4.MBU/6/2016 dated June 29, 2016.

## Board of Commissioners Remuneration Structure and Amount

Board of Commissioners Remuneration structure comprised of salary/honorarium, allowance including religious day allowance, transportation and communication as well as post-employment allowance and transportaiton allowance. The facilities include health facility, general support and professional association. The Board of Commissioners remuneration structure refers to Minsiter of SOE as the Shareholders Number SKU-32/D4.MBU/6/2016 regarding Board of Directors and Board of Commissioners Revenue at PT PELNI (Persero).

Uraian Penghasilan Remuneration Type	Keterangan Description	
Honorarium Salary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama = 45% dari gaji Direktur Utama.</li> <li>• President Commissioner = 45% of President Director Salary.</li> <li>• Komisaris = 90% dari honorarium Komisaris Utama.</li> <li>• Commissioner = 90% of President Commissioner honorarium</li> </ul>	
Pendapatan bulanan/Monthly Salary		
Gaji Pokok/Basic Salary	Rp45.450.000	Rp40.905.000
Tunjangan Transportasi 20% dari honorarium perbulan Transportation Allowance 20% of monthly honorarium	20% dari honorarium perbulan 20% of monthly salary	20% dari honorarium perbulan 20% of monthly salary
Pendapatan Tahunan/Annual Salary		
Tunjangan Hari Raya Religious Day Allowance	Dibayarkan 1 kali Honorarium Paid equal with 1 month salary	Dibayarkan 1 kali Honorarium Paid equal with 1 month salary
Asuransi Purna Jabatan Post-Employment Benefit	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun Premium Paid by the Company is 25% of 1 year salary	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun Premium Paid by the Company is 25% of 1 year salary



Tunjangan/Fasilitas Allowance/Facility	Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris Commissioner
<i>Tantiem</i> Incentives	Dibayarkan sebesar 45% dari <i>Tantiem</i> Direktur Utama Paid 45% of President Director's Incentives	Dibayarkan sebesar 90% dari <i>Tantiem</i> Komisaris Utama Paid 90% of President Commissioner's Incentives
<b>fasilitas/Facilities</b>		
Kesehatan Health	Dalam bentuk asuransi kesehatan as health insurance	Dalam bentuk asuransi kesehatan as health insurance
Bantuan Hukum Legal Assistance	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost
Keanggotaan Profesi Professional Membership	Berupa uang pendaftaran dan iuran tahunan as registration fees and annual contribution	Berupa uang pendaftaran dan iuran tahunan as registration fees and annual contribution
Pakaian Seragam/Dinas Uniform/Official Clothes	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost

### Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2016 Board of Commissioners Remuneration 2016

Nama Name	Jabatan Position	Honorper Bulan(rp) Monthly Salary (Rp)	Tantiem (Rp) Incentives (Rp)
Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commissioner	Rp45.450.000	45% dari <i>Tantiem</i> Direktur Utama 45% of President Director's Incentives
Omo Dahlan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Rp40.905.000	90% dari <i>Tantiem</i> Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Sudarto	Komisaris Commissioner	Rp40.905.000	90% dari <i>Tantiem</i> Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	Rp40.905.000	90% dari <i>Tantiem</i> Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Wolter B. Hesegem	Komisaris Commissioner	Rp40.905.000	90% dari <i>Tantiem</i> Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Raidi Hendro Koestoeer	Komisaris Commissioner	Rp40.905.000	90% dari <i>Tantiem</i> Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives

Keterangan: \*) Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 ditetapkan sebesar Rp1.667.000.000.

Remarks \*) Board of Directors and Board of Commissioners incentive bonus for fiscal year 2015 was stipulated of Rp1,667,000,000.

### Struktur dan Jumlah Remunerasi Direksi

Komponen remunerasi Direksi per bulan terdiri dari gaji dan tunjangan perumahan. Adapun tunjangan lain meliputi tunjangan hari raya dan santunan purna jabatan. Paket remunerasi Direksi juga meliputi fasilitas penunjang seperti fasilitas kendaraan dinas, kesehatan, dan bantuan hukum, serta *tantiem*.

### Board of Directors Remuneration Structure and Amount

Monthly Board of Directors remuneration component comprising of salary and housing allowance. Other allowances include religious day allowance, post-employment benefit. The Board of Directors remuneration package also includes passenger facilities such as operational car , politic, health as well as incencitives.



Remunerasi Direksi didasarkan kepada Surat Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Nomor: SKU-32/D4.MBU/6/2016 tanggal 29 Juni 2016 serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 07.28/1/SK/HKO.01/2016 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

Remunerasi Direksi untuk kinerja tahun buku 2016 dilaksanakan sesuai dengan prosedur yaitu Direksi menyampaikan kajian remunerasi kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Menyampaikan tanggapan melalui kajian komite Dewan Komisaris dengan memerhatikan pencapaian kinerja perusahaan tahun 2016, sebagai berikut:

*Tantiem* untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun Buku 2015 ditetapkan sebagai berikut:

1. *Tantiem* Direktur Utama, Direktur & Komisaris Utama masing-masing 100%, 90% dan 45% dari *Tantiem* Direktur Utama sedangkan insentif Dewan Komisaris sebesar 90% dari *tantiem* Komisaris Utama. Besaran *tantiem* dihitung proporsional sesuai dengan masa kerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2015.
2. PPH menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Board of Directors remuneration is referred to Minister of SOE Regulation as Shareholder Number SKU-32/D4.MBU/6/2016 regarding PT PELNI (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration.

For the fiscal year 2015, The Board of Directors remuneration is implemented fairly as performance in fiscal year 2016 and carried out based on procedure, where the Board of Directors presented remuneration result. The Board of Commissioners submitted recommendation via Chairman of Committee review, the Board of Commissioners considering the company's performance achievement, as follows:

- Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2015 are stipulated as follows:
1. Incentives for President Director, Director & President Commissioner are 100%, 90% and 45%, respectively, from President Director's incentive, however, Board of Commissioners' incentive is 90% of the President Commissioner's incentive. Amount of the incentive is calculated proportionally based on working period of every Board of Directors and Board of Commissioners in Fiscal Year 2015.
  2. Income Tax is paid by the recipient and not allowed to be charged as Company's expense.

Uraian Penghasilan Remuneration Description	Keterangan Description	
Honorarium Salary	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama = 100%/President Director = 100%</li> <li>• Direksi = 90% dari Direktur Utama/Board of Directors = 90% of President Director</li> </ul>	
Tunjangan/Fasilitas Allowance/Facilities	Direktur Utama President Director	Direktur Director
Pendapatan bulanan/Month Remuneration		
Gaji Pokok/Basic Salary	Rp101.000.000	Rp90.900.000
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Rp27.500.000	Rp27.500.000
Pendapatan Tahunan/Annual Remuneration		
Tunjangan Hari Raya Religious Day Allowance	Dibayarkan 1 kali Gaji/Paid at Cost	Dibayarkan 1 kali Gaji/Paid at Cost
Asuransi Purna Jabatan Post Employment Benefit	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun Premium paid by the Company is 25% of 1 year salary.	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun Premium paid by the Company is 25% of 1 year salary.
<i>Tantiem</i> Incentives	Berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan dan dikaitkan dengan target-target KPI sesuai RKAP tahun yang bersangkutan dan telah ditetapkan dalam anggaran perusahaan Based on GMS/Minister stipulation in annual report and related with KPI targets based on RKAP of the current year.	Dibayarkan sebesar 90% dari <i>Tantiem</i> Direktur Utama Paid 90% of President Director's Incentives



Tunjangan/Fasilitas Allowance/Facilities	Direktur Utama President Director	Direktur Director
fasilitas/Facilities		
Kendaraan Vehicle	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan 1 (one) unit altogether with maintenance and operational cost by considering financial condition	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan 1 (one) unit altogether with maintenance and operational cost by considering financial condition
Kesehatan health	Dalam bentuk asuransi kesehatan as health insurance	Dalam bentuk asuransi kesehatan as health insurance
Bantuan Hukum Legal Assistance	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost
Keanggotaan Profesi Professional Membership	Berupa uang pendaftaran dan iuran tahunan Registration fee and annual contribution	Berupa uang pendaftaran dan iuran tahunan Registration fee and annual contribution
Club Membership Corporate Member	Uang pendaftaran dan iuran tahunan Registration fee and annual contribution	Uang pendaftaran dan iuran tahunan Registration fee and annual contribution
Biaya perwakilan Representation Cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost
Pakaian Seragam/Dinas Uniform/Official Clothes	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost

### Remunerasi Direksi pada 2016 Board of Directors Remuneration 2016

Nama Name	Jabatan Position	Honor per Bulan (Rp) Monthly Salary (Rp)	Tantiem (Rp) Incentives (Rp)
Elfien Goentoro	Direktur Utama President Director	Rp101.000.000	100%
Wibisono	Direktur/Director	Rp90.900.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Olih Masolich Sodikin	Direktur/Director	Rp90.900.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Harry Boediarto Soewarto	Direktur/Director	Rp90.900.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Muhammad Tukul Harsono	Direktur/Director	Rp90.900.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Insan Puwarisyia L. Tobing	Direktur/Director	Rp90.900.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives

Keterangan: \*) Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015 ditetapkan sebesar Rp1.667.000.000.

Remarks \*) Board of Directors and Board of Commissioners incentive bonus for fiscal year 2015 was stipulated of Rp1,667,000,000.

### Indikator Pengukuran Kinerja

Untuk memastikan struktur di perseroan berjalan dengan baik, Perseroan memiliki sistem penilaian kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Indikator Pengukuran Kinerja untuk mengukur kinerja Direksi tahun 2016 ditetapkan dalam Kontrak Manajemen Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2016 yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham.

### Key performance indicators

To ensure that structure in the Company has been running well. The Company has performance appraisal system for Board of Commissioners and Board of Directors that was implemented during the General Meetings of Shareholders (GMS). Key performance indicators to evaluate Board of Directors in 2016 is stipulated in Management Contract between Board of Directors and Board of Commissioners as reported to the Shareholder.



## Keberagaman Komposisi Direksi Dan Dewan Komisaris

### Board of Directors and Board of Commissioners Composition Diversity

Perseroan menilai bahwa keberagaman komposisi sangat diperlukan, meskipun regulasi dan Peraturan Perundang-undangan terkait belum mengatur hal tersebut. Keberagaman Komposisi pada Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman serta gender dapat memberikan berbagai macam sudut pandang terkait strategi pengelolaan Perusahaan agar menjadi lebih baik.

Berikut keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 2016:

The Company views that diversity in terms of composition is necessary, despite the regulation and related Law have not governing this aspect. Diversity on the Board of Commissioners and Board of Directors composition consists of academic qualification, expertise, experience and gender to bring various perspective related with the Company's management to be better.

Diversity of composition for each Board of Commissioners and Board of Directors member in 2016 period is explained below:

Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Akademik dan Keahlian Academic Qualification and Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commissioner	Akademi Ilmu Pelayaran Shipping Academy	62	Pria Male
Omo Dahlan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ilmu Ekonomi dan Audit Economics and Audit	69	Pria Male
Sudarto	Komisaris Commissioner	Ekonomi dan Manajemen Bisnis Economics and Business Management	47	Pria Male
Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	Hukum Legal	44	Pria Male
Wolter B. Hesegem	Komisaris Commissioner	Ilmu Pemerintahan Government Science	39	Pria Male
Raldi Hendro Koestoyer	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sains, Regional Science dan Environmental Planning Science, Regional Science and Environmental Planning	58	Pria Male
Direksi Board of Directors				
Elfien Goentoro	Direktur Utama President Director	Teknik Kimia dan Manajemen Bisnis Chemical Engineering and Business Management	53	Pria Male
Wibisono	Direktur Keuangan Director of Finance	Ekonomi dan Manajemen Bisnis Economics and Business Management	60	Pria Male



Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Akademik dan Keahlian Academic Qualification and Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Olih Masolich Sodikin	Direktur Armada & Teknik Director of Fleets & Technical	Ilmu Pelayaran Shipping Science	57	Pria Male
Harry Boediarto Soewarto	Direktur Komersial Director of Commercial	Planologi Planology	60	Pria Male
Muhammad Tukul Harsono	Direktur Operasi & Pelayanan Director of Operations & Services	Nautika dan Master Mariner Nautical and Master Mariner	49	Pria Male
Insan Purwarisya L Tobing	Direktur SDM & Umum Director of HR & General Affairs	Hubungan Internasional International Relations	51	Pria Male

Hingga akhir tahun 2016, Perseroan belum memiliki kebijakan spesifik yang mengatur mengenai keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Akan tetapi, kebijakan *Board Manual* di PT PELNI (Persero) telah mengatur kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan secara umum kebijakan tersebut mendorong terpilihnya orang-orang dari latar belakang yang beragam untuk kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

By the end of 2016, the Company had not formulated specific policy regulating diversity in the Board of Commissioners and Board of Directors composition. However, Board Manual Policy at PT PELNI (Persero) stipulates criteria for every Board of Commissioners and Board of Directors members, and generally the policy encouraged selection of candidates from various background as the Board of Commissioners and Board of Directors members.



# Penilaian Kinerja Direksi Dan Dewan Komisaris

## Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment

### Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Dan Direksi

Mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi di Perseroan merujuk pada surat Kementerian BUMN Nomor SK S-676/ BUMN/ MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen. Berdasarkan ketentuan tersebut, landasan penilaian kinerja Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan dalam *Key Performance Indicators (KPI)* Manajemen dan menjadi suatu Kontrak Manajemen antara Pemegang saham dengan Direksi Perseroan. Target-target yang telah disepakati bersama tertuang dalam Kontrak Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicators (KPI)* mencakup aspek finansial, operasional termasuk pelanggan dan aspek dinamis

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### Mekanisme Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penerapan *Key Performance Indicators (KPI)* dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada saat melakukan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk Badan Usaha Milik Negara.
2. Kuasa Pemegang Saham bersama Direksi dan Komisaris Dewan Pengawas masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempersiapkan *Key Performance Indicators (KPI)* yang akan dituangkan dalam Kontrak Manajemen antara pihak Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan Pihak Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas PT PELNI (Persero).
3. *Key Performance Indicators (KPI)* yang dipilih haruslah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mencerminkan kegiatan yang dominan pada perusahaan yang sekurang-kurangnya mencakup Aspek Operasional/Teknis dan Aspek Finansial.
4. Kontrak Manajemen dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada saat Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

### Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment

Board of Commissioners and Board of Directors performance assessment mechanism refers to Minister of SOE Letter No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 dated December 24, 2004 on Management Contract. According to this regulation, basis for the Board of Commissioners and Board of Directors Members performance assessment is explained in the Management Key Performance Indicators (KPI) and formulated as Management Contract between Shareholders and Board of Directors. The agreed targets are disclosed in the Management Contract and based on the Key Performance Indicators (KPI) including financial, operational including customer and dynamic aspects.

Board of Commissioners and Board of Directors performance assessment is done in the General Meetings of Shareholders (GMS).

### Board of Commissioners Performance Assessment Mechanism

The performance appraisal of the Board of Commissioners is carried out under the following mechanism:

1. Implementation of Key Performance Indicators (KPI) in the General Meetings of Shareholders during the validation of Budget Plan (RKAP) of the State-Owned Enterprise.
2. Altogether with the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board, the Shareholders Attorney prepares Key Performance Indicators (KPI) that will be disclosed as Management Contract between the Shareholders/Capital Owner with the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of PT PELNI (Persero).
3. The selected Key performance Indicators (KPI) shall be adjusted with characteristic of each State-Owned Enterprise (SOE) and reflected dominant activity in the Company at least covering Operational/Technical Aspect and Financial Aspect.
4. The concerned Management Contract is integrated part of General Meetings of Shareholders (GMS) Minutes of Meeting on Budget Plan (RKAP) ratification.



## Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Direksi Perseroan akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris secara kolektif. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris akan disampaikan dalam RUPS. Adapun penilaian Direksi diukur berdasarkan kriteria umum, yang meliputi: Komposisi, Kriteria, Perencanaan Strategis, Peran dan Tugas Tanggung Jawab, Program Pelatihan, Rapat Direksi, Efektivitas organ penunjang, Hubungan komunikasi, Pertanggungjawaban serta Komitmen Standar Etika.

## Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Indikator kinerja atau yang disebut sebagai *Key Performance Indicators (KPI)* yang digunakan untuk mengukur kinerja Direksi Perseroan, terdiri dari 5 (lima) perspektif berikut:

### 1. Perspektif Keuangan dan Pasar

Perspektif ini memfokuskan hasil-hasil finansial pasar utama dari perusahaan, yang bertujuan menunjukkan kesinambungan finansial dan pencapaian pasar

### 2. Perspektif Fokus Pelanggan

Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil kinerja fokus pada pelanggan dari perusahaan, yang bertujuan menunjukkan sebaik apa perusahaan telah memuaskan pelanggan dan keterkaitannya dalam hubungan jangka panjang

### 3. Perspektif Efektivitas Produk dan Proses

Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil kinerja produk dan operasional utama dari perusahaan, yang bertujuan memeragakan mutu dan nilai produk dan jasa yang menimbulkan kepuasan dan keterikan pelanggan. Selain itu, perspektif ini juga memfokuskan pada hasil-hasil proses utama lainnya dari perusahaan yang tidak dilaporkan dalam perspektif lainnya yang bertujuan memeragakan efektivitas dan efisiensi sistem kerja dan proses kerja

### 4. Perspektif Fokus Tenaga Kerja

Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil kinerja perusahaan dalam aspek fokus pada tenaga kerja, yang tujuannya adalah mengetahui seberapa baik perusahaan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang produktif, peduli, dan membangun keterikatan dan lingkungan pembelajaran untuk semua tenaga kerja

### 5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

Perspektif ini memfokuskan pada hasil-hasil utama perusahaan di bidang kepemimpinan senior dan tata kelola yang bertujuan untuk menunjukkan perusahaan yang mapan secara keuangan dan beretika yang memenuhi tanggung jawab sosialnya dan mendukung komunitas utamanya

## Board of Directors Performance Assessment

Performance of the Board of Directors will be evaluated by the Board of Commissioners collectively. Result of the Board of Directors performance assessment by the Board of Commissioners will be presented int he GMS. The Board of Directors assessment is evaluated based on Composition, Criteria, Strategic Planning, Role and Duty Responsibility, Training Program, Board of Directors Meeting, Effectiveness of Supporting Structure, Communication Relation and Ethical Standard Commitment.

## Board of Directors Performance Assessment Criteria

The performance indicators or Key Performance Indicators are applied to evaluate the Board of Directors performance and comprises of 5 (five) perspectives, as follows:

### 1. Financial and Market Perspective

This perspective focuses on key financial and market results achieved by the Company that is intended to present financial and market achievement sustainability.

### 2. Customer Focus Customer

This perspective focuses on performance achievement of customer focus recorded by the Company, that aims to present how far the Company has satisfied the customers and engagement in long-term relationship.

### 3. Product and Process Effectiveness Perspective

This perspective focuses on key product and operational performance achievement recored by the Company that is intended to demonstrate quality and value of the product and services that generate customers satisfaction and engagement. In addition, this perspective also focuses on other key process achievements of the Company that are not reported in other perspectives aiming to demonstrate effectiveness and efficiency of working system and process.

### 4. Employee Focus Perspective

This perspective focuses on company's performance achievement in employee focus aspect that is intended to measure how far the Company creating and maintaining productive and care working environment and build engagement and learning environment for all employees.

### 5. Leadership, Governance and Social Community Perspective

This perspective focuses on key achievements of the Company in senior leadership and governance that is intended to present a mature Company in terms of financial aspect as well as ethical that fulfills social responsibility and support its main community.



	Perspektif Perspective	No.	Key Performance Indicators Key Performance Indicators	Satuan Perspective	Realisasi Tahun 2016 Realization in 2016
1	Keuangan dan Pasar Financial and Market	1	EBITDA Margin/EBITDA Margin	%	13.47
		2	Pembayaran utang SLA (bunga + denda) SLA Loan Payment (interest + penalty)	Tanggal, Bulan Date, Month	30 (Mei, Juni, November, Desember) 30 (May, June, November, December)
		3	Jumlah penghasilan perkapalan Total Shipping Revenue	Rp. Juta/Million	3,693,323
2	Fokus Pelanggan Customer Focus	1	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	Skor/Score	3.80
		2	Indeks Kepuasan Shipper Shipper Satisfaction Index	Skor/Score	3.60
3	Efektivitas Produk dan Proses Product and process effectiveness	1	Fax Factor/Fax Factor	%	55.90
		2	Tingkat Keselamatan /Safety Ratio	Kecelakaan Accident	0
		3	Fleet utilization rate/Commission days Fleet utilization rate/Commission days	Hari/Days	17,710
		4	Lower maintenance as % of revenues Lower maintenance as % of revenues	%	9.64
		5	On time performance/On time performance	%	95.88
4	Fokus Tenaga Kerja Employee Focus	1	Indeks Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Survey	Skor/Score	3.6
		2	Pemenuhan standar kompetensi SDM Employee Competency Standard Fulfillment	%	97
5	Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan Leadership, Governance & Social Responsibility	1	Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Audit recommendations that have been followed-up	%	60.00
		2	Skor GCG/GCG Score	Skor/Score	77.79
		3	Skor KPDU/KPDU Score	Skor/Score	431.25
		4	Ketepatan Penyampaiaan Laporan Berkala BUMN On time SOE Regular Report Submission	%	100.00

## Hasil Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2016

Berdasarkan surat Kementerian BUMN No. SK S-676/ BUMN/ MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen, maka setiap perusahaan BUMN diwajibkan membuat *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen dan menjadi suatu Kontrak Manajemen antara Pemegang saham dengan Direksi BUMN.

## Performance Appraisal Results of Directors 2016

According to Minister of SOE Letter No. SK S-676/BUMN/ MBU/2004 dated December 24, 2004 on Management Contract, every SOE is regulated to formulate Management Key Performance Indicators (KPI) as Management Contract between the Shareholders with the Board of Directors in respective SOE.



Kontrak manajemen merupakan kesanggupan manajemen untuk mencapai target-target yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Target-target yang telah disepakati bersama tertuang dalam Kontrak Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicators (KPI)* mencakup aspek finansial, operasional termasuk pelanggan dan aspek dinamis.

Dari hasil penilaian diperoleh skor KPI Perseroan Tahun 2016 adalah sebesar 93,15% dengan rincian sebagai berikut:

1. Perspektif Keuangan dan Pasar

Diperoleh skor *Key Performance Indicator (KPI)* sebesar 23,79%

2. Perspektif Fokus Pelanggan

Diperoleh skor *Key Performance Indicator (KPI)* sebesar 18,65%

3. Perspektif Efektivitas Produk dan Proses

Diperoleh skor *Key Performance Indicator (KPI)* sebesar 19,47%

4. Perspektif Fokus Tenaga Kerja

Diperoleh skor *Key Performance Indicator (KPI)* sebesar 16,00%

5. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung jawab Kemasyarakatan

Diperoleh skor *Key Performance Indicator (KPI)* sebesar 15,25%

6. Keseluruhan Perspektif

Diperoleh skor KPI secara total sebesar 93,15%

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil KPI diatas, hasil pencapaian KPI Perusahaan tahun 2016 memperoleh skor 93,15% dengan predikat "Sangat Baik"

## Pihak Yang Melakukan Assessment

Sesuai dengan surat Kementerian BUMN No. SK S-676/ BUMN/ MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen, maka setiap BUMN diwajibkan membuat *Key Performance Indicator (KPI)* Manajemen yang dijadikan Kontrak Manajemen antara Pemegang Saham dengan Direksi BUMN tersebut.

Pihak yang melakukan assessment terhadap Perusahaan adalah Akuntan Publik, dalam hal ini dilakukan melalui audit *Key Performance Indicator (KPI)*. Pada tahun 2016 di lakukan oleh KAP Djoko, Siddik & Indra.

Management Contract is agreement of the management to achieve targets agreed by both parties that are Shareholders with Board of Directors and Board of Commissioners. Targets that have been agreed upon are contained in Contract Management based on Key Performance Indicators (KPI) covering financial, operational aspects including customer and dynamic aspects.

From the assessment result, score KPI Company 2016 achieved 93,15% with details as follows:

1. Financial and Market Perspective

*Key Performance Indicator score (KPI)* achieved 23.79%

2. Perspective of Customer focus

*Key Performance Indicator score (KPI)* achieved 18.65%

3. Products and Processes Effectiveness

*Key Performance Indicator (KPI)* Score achieved 19.47%

4. Employee Focus Perspective

*Key Performance Indicator score (KPI)* achieved at 16.00%

5. Leadership, Governance, and Social Responsibility Perspective

*Key Performance Indicator score (KPI)* achieved 15.25%

6. Overall Perspective

Total KPI score achieved 93.15%

According to the KPI score mentioned above, result of the Company's KPI achievement in 2016 achieved 93,15% with "Very Good" predicate.

## Assessor

According to Minister of SOE Letter No. SK S-6767/BUMN/ MBU/2004 dated December 24, 2004 on Management Contract, every SOE is regulated to formulate Management Key Performance Indicators (KPI) as Management Contract between the Shareholders with the Board of Directors in respective SOE.

The Company's assessor is Public Accountant, in this course, was done by Key Performance Indicators (KPI) audit. In 2016, the assessor was KAP Djoko, Siddik & Indra.



## Evaluasi Kinerja Direksi Berdasarkan Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Ungul (KPKU) BUMN

### Prosedur Pelaksanaan Assessment atas Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Kinerja Direksi juga dinilai oleh Tim yang ditunjuk Kementerian BUMN untuk menilai keunggulan kinerja perusahaan mengacu pada kriteria lain adalah kriteria penilaian keunggulan kinerja berbasis *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence* (MBCFPE).

Pelaksanaan pengukuran terhadap penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris di lingkungan Perseroan didasarkan kepada Pasal 44 Bab XII, Peraturan Meneg BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan surat dari Kementerian BUMN No. S-281/S.MBU/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Ungul (KPKU) Tahun 2015 dan 2016, serta dilakukan dengan hasil sebagai berikut:

## Board of Directors Performance Assessment Based on SOE Excellent Peformance Assessment Criteria (KPKU) Implementation

### Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment Procedure

Board of Directors performance is also evaluated by Team appointed by Ministry of SOE to assess excellence performance of the Company referring to other Criteria, which is performance excellence assessment based on Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCFPE).

Implementation of Board of Directors and Board of Commissioners performance assessment in the Company refers to Article 44 Chapter XII, Minister of SOE Regulation Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and Letter from Minister of SOE Number S-281/S.MBU/2014 regarding Implementation of Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) in 2015 and 2016 with result as follows:

Sub Kategori Sub-Category	Bobot Weight	Pencapaian Skor Tahun 2015 Score Achievement 2015	Bobot Weight	Pencapaian Skor Tahun 2016 Score Achievement 2016
Kepemimpinan Leadership				
Kepemimpinan Senior Senior Leadership	70	24,50	70	38,50
Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Governance and Social Responsibility	50	20,00	50	27,50
Perencanaan Strategis Strategic Planning				
Pengembangan Strategi Strategy Development	40	12,00	40	20,00
Implementasi Strategi Strategy Implementation	45	13,50	45	20,25
Fokus Pelanggan Customer Focus				
Suara Pelanggan Customer Inquiry	45	13,50	45	20,25
Keterikatan Pelanggan Customer Engagement	40	12,00	40	18,25



## Laporan Tahunan 2016 Annual Report

PT PELNI (Persero)

Sub Kategori Sub-Category	Bobot Weight	Pencapaian Skor Tahun 2015 Score Achievement 2015	Bobot Weight	Pencapaian Skor Tahun 2016 Score Achievement 2016
Pengukuran Assessment				
Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja Perusahaan Assessment, Analysis and Performance Improvement	45	11,25	45	18,00
Pengelolaan Informasi, Pengetahuan, dan Teknologi Informasi Information, Knowledge and Information Technology Management	45	15,75	45	18,00
Fokus Pada Tenaga Kerja Employee Focus				
Lingkungan Tenaga Kerja Man Power Circumstances	40	10,00	40	18,00
Keterikatan ( <i>Engagement</i> ) Tenaga Kerja Employee Engagement	45	11,25	45	18,00
Fokus Pada Operasi Operational Focus				
Sistem Kerja Working System	45	11,25	45	18,00
Proses Kerja Working Process	40	10,00	40	16,00
Skor Kategori Proses Process Category Score	550	165	550	249
Kinerja Produk dan Layanan Product and Service Performance	110	22,50	110	38,50
Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	90	21,25	90	34,00
Fokus Tenaga Kerja Employee Focus	80	21,25	80	34,00
Kepemimpinan dan Tata Kelola Leadership and Governance	80	20,00	80	36,00
Hasil Keuangan dan Pasar Financial and Market Result	90	22,50	90	40,00
Skor Kategori Hasil Result Category Score	450	107,5	450	182,5
Total Skor Total Score	1,000	272,5	1,000	431,5
Peringkat Rating	Early Development		Early Improvement	

# Hubungan Afiliasi Antara Direksi, Dewan Komisaris Dan Pemegang Saham

## Affiliation of Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders

Sesama Anggota Dewan Komisaris serta, antara Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping. Seluruh Anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan Pemegang Saham tentang Pelaksanaan GCG.

Hubungan keluarga dan keuangan antara Anggota Dewan Komisaris dengan sesama Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perusahaan periode tahun 2016 digambarkan dalam tabel berikut:

## Tabel Hubungan Afiliasi Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Among the Board of Commissioners members and between the Board of Commissioners and Board of Directors member are not having family affiliation until second degree both vertically and horizontally. Every Board of Commissioners member does not serve in dual position as prohibited by the Shareholders Regulation on GCG implementation.

Family and financial affiliation among the Board of Commissioners members with Board of Directors and/or Board of Commissioners members and Shareholders in 2016 are explained in the table below:

## Table of Board of Directos, Board of Commissioners and Shareholders Affiliation



Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Affiliation With						Financial Relationship withz Financial Affiliation withz					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Direksi Board of Directors												
Elfien Goentoro	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Wibisono	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Olih Masolich Sodikin	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Harry Boediarto Soewarto	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Muhammad Tukul Harsono	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Insan Purwarisyia L Tobing	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Selama tahun 2016, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun dengan Pemegang Saham.

Throughout 2016, all of Board of Commissioners and Board of Directors members were not having family and financial affiliations with other members of Board of Commissioners and Board of Directors or with the Shareholders.

## Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

## Board of Commissioners and Board of Directors Shares Ownership

Diantara anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi, masing- masing tidak memiliki saham, dengan rincian sebagai berikut:

The Board of Commissioners and Board of Directors do not have any shares ownership with detail as follows:

Nama Name	Kepemilikan Saham di Shares Ownership at		
	Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan Lain Other Companies
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
1. Leon Muhamad	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
2. Omo Dahlan	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
3. Sudarto	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
4. Satya Bhakti Parikesit	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
5. Wolter B. Hesegem	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
6. Raldi Hendro Koestoyer	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None



Nama Name	Kepemilikan Saham di Shares Ownership at		
	Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan Lain Other Companies
Direksi Board of Directors			
1. Elfien Goentoro	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
2. Wibisono	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
3. Olih Masolich Sodikin	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
4. Harry Boediarto Soewarto	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
5. Muhammad Tukul Harsono	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
6. Insan Purwarisya L Tobing	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

### Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Penjelasan rangkap jabatan di perusahaan atau instansi lain dijabarkan sebagai berikut:

### Board of Commissioners and Board of Directors Dual Position

Explanation of dual position in the Company or other institutions is as follows:dijabarkan sebagai berikut:

Nama Name	Rangkap Jabatan Dual Position	
	Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan/Instansi Lain Other Companies/Institutions
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
1 Leon Muhamad	Tidak ada None	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan General Secretary of Ministry of Transportation
2 Omo Dahlan	Tidak ada None	
3 Sudarto	Tidak ada None	Direktur Transformasi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Director of Treasury Transformation, Treasury General Directorate, Ministry of Finance
4 Satya Bhakti Parikesit	Tidak ada None	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet dan Asisten Deputi Bidang Perundang-Undangan bidang Perekonomian. Expert Staff in Legal and International Affairs, Cabinet Secretary and Deputy Assistant in Economic Law
5 Wolter B. Hesegem	Tidak ada None	Kepala Seksi Rumah Tangga, Sekda Papua Head of Internal Affairs Section, Papua Regional Secretary
6 Raldi Hendro Koestoeer	Tidak ada None	Staf Ahli Menko Perekonomian Republik Indonesia bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup. Expert Staff in Technology Innovation and Environment for The Republic of Indonesia Coord. Minister of Economy



Nama Name	Rangkap Jabatan Dual Position	
	Anak Perusahaan Subsidiary	Perusahaan/Instansi Lain Other Companies/Institutions
	Direksi Board of Directors	
1 Elfien Goentoro	Komisaris Utama PT RS PELNI President Commissioner of PT RS PELNI	Tidak ada None
2 Wibisono	Komisaris PT RS PELNI Commissioner of PT RS PELNI	Tidak ada None
3 Olih Masolich Sodikin	Komisaris PT PIDC Commissioner of PT PIDC	Tidak ada None
4 Harry Boediarto Soewarto	Tidak ada None	Tidak ada None
5 Muhammad Tukul Harsono	Tidak ada None	Tidak ada None
6 Insan Purwarisya L Tobing	Tidak ada None	Tidak ada None



## Komite Audit

### Audit Committee

Komite Audit merupakan organ dari Dewan Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Komite Audit bersifat independen dan mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### Piagam Komite Audit dan Pedoman Kerja

Sebagai pedoman pelaksanaan fungsi Komite Audit yang memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance*, Perseroan menetapkan Surat Keputusan No. 01/DKI/I-2016 tentang Piagam Komite Audit Perusahaan PT PELNI (Persero) tanggal 6 Januari 2016 sebagai pedoman untuk mengatur Anggota Komite Audit dalam melaksanakan dan menjalankan aktivitas sebagai Komite Audit.

*Audit Committee Charter* (Piagam Komite Audit) mengatur hal-hal mengenai Struktur Komite Audit, Persyaratan Keanggotaan, Tanggung Jawab komite Audit, Tugas Komite Audit, Wewenang Komite Audit, Rapat Komite Audit, Tanggung Jawab Pelaporan dan Masa Tugas.

### Persyaratan Komite audit

1. Pihak *ekstern* yang diangkat menjadi Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Mayoritas.
2. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Salah seorang dari Anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi atau Keuangan.

Audit Committee is structure under the Board of Commissioners that is established by the Board of Commissioners as mandated by Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprise. The Audit Committee is functioned to help the Board of Commissioners in carrying out the supervisory duty. Audit Committee is independent and autonomous, both in performing the duty and reporting activity as well as responsible directly to the Board of Commissioners.

The Audit Committee members are appointed and discharged by the Board of Commissioners and reported to the GMS. Serving period of the Audit Committee member shall not be longer than serving period of the Board of Commissioners according to provisions in the Articles of Association and may be reappointed for 1 (one) next period.

### Audit Committee Charter and Working Guideline

As guideline of Audit Committee function to comply with provisions of *Good Corporate Governance*, the Company stipulated Decree No. 01/DKI-2016 regarding PT PELNI (Persero) Audit Committee Charter dated January 6, 2016 as guideline to govern all of Audit Committee Members in carrying out and performing activities as Audit Committee.

*Audit Committee Charter* regulates aspects related to Audit Committee Structure, Membership Requirement, Audit Committee Responsibility, Audit Committee Duty, Audit Committee Authority, Audit Committee Meeting, Reporting Responsibility and Serving Period.

### Audit Committee Requirement

1. External party to be appointed as Audit Committee shall not have any business relation or affiliation with the Company, Director, Commissioner or Majority Shareholders.
2. To have high integrity, competency, sufficient knowledge and experience in the working field and good communication skill.
3. One of the Audit Committee Members shall have Accounting or Finance educational background.



## Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

## Komposisi Komite audit

Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. KEP.02/DK/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang pengangkatan Anggota Anggota Komite Audit, Susunan Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

## Komposisi Komite Audit 2016

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukkan Basis of Appointment
Omo Dahlan	Ketua Komite Audit (Komisaris Independen) Audit Committee Chairman (Independent Commissioner)	KEP-02/DK/VII/2015
Fatoni	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	KEP-01/DK/VII/2015
Awal Susmanto	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	KEP-02/DK/VII/2015

## Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Adapun profil ringkas anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

## Audit Committee Appointment and Discharge

Appointment and discharge of the Audit Committee members are done by Board of Commissioners based on a Decree issued by Board of Commissioners.

The Audit Committee members discharge may be administered if the concerned member entered end of his serving period and under the Board of Commissioners Decree is terminated due to not complying with the expected performance and/or being not competent in exercising the duty.

## Audit Committee Composition

Pursuant to Board of Commissioners Decree No. KEP.02/DK/VII/2015 dated July 3, 2015 regarding Appointment of Audit Committee Members, the Audit Committee Composition as of December 31, 2016 is as follows:

## Audit Committee Composition 2016

## Audit Committee Competency and Expertise

All of Audit Committee members have good integrity, competency and reputation. Brief profile of the Audit Committee members are as follows:



## Profil Ringkas Anggota Komite Audit

## Brief Profile of Audit Committee Member

Nama dan Jabatan Name and Position	Riwayat Singkat Brief Profile
<b>Omo Dahlan</b> Ketua Komite Audit (Komisaris Independen) Audit Committee Chairman (Independent Commissioner)	<p>Profil ringkas dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris Brief Profile is presented at Board of Commissioners Profile section</p>
	
<b>Fatoni</b> Anggota Komite Audit Audit Committee Member	<p>Menyelesaikan S1 Ekonomi di UII Yogyakarta tahun 1984 dan berkarir di Kementerian Perhubungan sejak tahun 1985 hingga saat ini. Selama karirnya di Kementerian Perhubungan, beliau pernah menempati berbagai jabatan penting misalnya Kasubbag Hubungan Lembaga RO Humas &amp; KSL tahun 1999, Kasubbag Hubungan Lembaga Pemerintah tahun 2002 dan saat ini menjabat sebagai Kabag TLHP Transportasi-ITJEN. Diangkat sebagai anggota Komite Audit PT PELNI (Persero) sejak tahun 2015.</p> <p>Completing his study in UII Yogyakarta for Bachelor of Economics in 1984 and a career in the Ministry of Transportation from 1985 to the present. During his career at the Ministry of Transportation, he has held various important positions e.g Subsection Relations Institute of Public Relations &amp; KSL RO 1999, Subsection Government Relations Institute in 2002 and currently serves as the Head of Transport TLHP-IG. Appointed as members of the Audit Committee of PT PELNI (Persero) since 2015.</p>
	
<b>Awal Susmanto</b> Anggota Komite Audit Audit Committee Member	<p>Lahir di Kebumen tanggal 11 Juni 1984. Menyelesaikan pendidikan D IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2010 dan aktif mengikuti berbagai pelatihan yaitu Diklat Konvergensi PSAK tahun 2011, Diklat pengadaan Barang Jasa tahun 2011 dan Diklat Analisis Jabatan 2012. Mengawali karir sebagai pelaksana pada Sub-bagian Akuntansi dan Verifikasi Kementerian BUMN tahun 2006. Tahun 2015 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Pelaksana pada Inspektorat Kementerian BUMN.</p> <p>Born in Kebumen on June 11, 1984. Graduated from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara for Diploma IV in 2010 and actively participated in various training namely Convergence Training of PSAK in 2011, the procurement of Goods and Services Training in 2011 and Position Analysis Training 2012. He began his career as an executive in the Accounting and Verification Subsection of SOE Ministry in 2006. From 2015 until now serves as the Executive in the Inspectorate of the Ministry of SOE.</p>
	



## Independensi Anggota Komite Audit

Independensi adalah syarat menjadi Komite Audit. Seorang anggota Komite Audit harus independen, obyektif dan profesional sebagaimana diatur dalam *Audit Committee Charter* yang diperbarui secara berkala menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel Pengungkapan Independensi Komite Audit Tahun 2016**

Komite Audit Audit Committee	Pejabat Eksekutif Kantor Akuntan Publik Executives of Public Accountant Firm	Afiliasi dengan Pemegang Saham Affiliation With Shareholders	Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi Family Affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	Memiliki Saham Perusahaan (Langsung/Tidak Langsung) Shares Ownership in the Company (Direct/ Non-Direct)	Hubungan Bisnis dengan Perusahaan Business Affiliation with the Company
Omo Dahlan	x	x	x	x	x
Fatoni	x	x	x	x	x
Awal Susmanto	x	x	x	x	x

## Hubungan Keluarga dan Keuangan Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit tersebut secara rinci adalah:

1. Melakukan review atas perencanaan audit Satuan Pengawasan Intern;
2. Melakukan review atas pelaksanaan audit yang dilakukan Satuan Pengawasan Intern untuk memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai rencana, dan supervisi audit telah dilakukan secara memadai untuk menjamin mutu pelaksanaan audit;
3. Melakukan review atas pelaporan Satuan Pengawasan Intern;

## Independency of Audit Committee

Independency is requirement to be appointed as Audit Committee. An Audit Committee member shall be independent, objective and professional as regulated in the Audit Committee Charter that is updated regularly to adjust with the prevailing Law.

**Table of Audit Committee Independence Disclosure 2016**

## Audit Committee Family and Financial Affiliation

All of Audit Committee members do not have any financial, managerial, shares ownership and/or family affiliations with the Board of Commissioners and Board of Directors that may influence their independency.

## Audit Committee Duty and Responsibility

The Audit Committee is in charge to provide recommendations to the Board of Commissioners on report or issue that is presented by the Board of Directors to the Board of Commissioners, to identify other issues that require concern from the Board of Commissioners and perform other duties related with the Board of Commissioners' duties. The Audit Committee's duties are explained as follows:

1. Conduct a review of the audit plan of the Internal Control Unit;
2. Conduct a review of the implementation of audits which have been done by Internal Audit Unit to ensure that the audit has been conducted according to plan, and audit supervision were sufficient to guarantee the quality of the audit;
3. Conduct a review of the reporting of the Internal Control Unit;



- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Melakukan penilaian atas tindak lanjut hasil audit untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal audit tidak menindak lanjuti laporan Satuan Pengawasan Intern;</p> <p>5. Melakukan komunikasi secara periodik dengan Satuan Pengawasan Intern;</p> <p>6. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan;</p> <p>7. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal;</p> <p>8. Menelaah tingkat kepatuhan Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p> | <p>4. Conduct an assessment of the follow-up of audit results to then take the steps necessary in the case of not following up audit reports of the Internal Control Unit;</p> <p>5. Conduct periodic communication with the Internal Control Unit;</p> <p>6. Reviewing the quality of financial information that will be issued by the company;</p> <p>7. Reviewing the effectiveness of internal controls;</p> <p>8. Reviewing the company's level of compliance to the legislation in force;</p> <p>9. Perform other tasks given by the Board of Commissioners.</p> |
|---|--|

### Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Komite Audit selama tahun 2016 melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan yang seluruhnya telah didokumentasi dalam notulen rapat. Rincian jumlah kehadiran masing-masing Anggota Komite Audit sesuai tabel berikut:

### Audit Committee Meeting Frequency and Attendance Level

In 2016, Audit Committee held 7 (Seven) meetings which all had been documented in Minutes of Meeting. Detail of Audit Committee member attendance is presented in table below:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Omo Dahlan	Ketua Chairman	7	7	100%
Fatoni	Anggota Member	7	7	100%
Awal Susmanto	Anggota Member	7	7	100%



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting Agenda
1.	07 Februari 2016 February 07, 2016	Rencana Kunjungan Komite Audit Ke Cabang Audit Committee Visit Plan to Branch
2.	02 Maret 2016 March 02, 2016	Pembahasan LHA Internasional Audit Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2015 International Audit Report Discussion as of 3rd Quarter and 4th Quarter of 2015
3.	04 Mei 2016 May 04, 2016	Rencana Kunjungan Komite Audit Ke Cabang dan Kapal Audit Committee Visit Plan to Branch and Ship
4.	10 Agustus 2016 August 10, 2016	Pembahasan LHA SPI Triwulan I/ 2016 Discussion of SPI Audit Report as of 1st Quarter/2016
5.	19 Agustus 2016 August 19, 2016	Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Produksi Utama (Kapal) PT PELNI (Persero) Implementation of Primary Modes of Production (SHIP) of PT PELNI (Persero)
6.	24 Agustus 2016 August 24, 2016	Pemaparan Pemeliharaan Kapal oleh Direktur Armada dan Teknik Discussion of Ship Maintenance Presentation by Director of Fleets and Technical
7.	07 Desember 2016 December 07, 2016	Pembahasan LHA SPI Triwulan III/ 2016 Discussion of SPI Audit Report as of 3rd Quarter/2016

## Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit 2016

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait peran untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terkait aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi, antara lain sebagai berikut:

### a. Bidang Manajemen

Komite Audit telah melakukan penelaahan dengan beberapa hasil rekomendasi terkait bidang manajemen, sebagai berikut:

1. Perbaikan dalam format laporan dan lampiran Laporan Manajemen.
2. Penyelesaian terhadap permasalahan berulang pada 2 kapal yaitu KM Ganda Dewata dan Kapal Jetliner.
3. Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan kapal perintis dan penyelesaian kendala teknis serta optimalisasi manajemen kapal perintis.
4. Optimalisasi program Pemerintah (Tol Laut) untuk meningkatkan pendapatan Perseroan.
5. Perbaikan manajemen kas Perseroan terutama terkait pencairan dana PSO.

## Audit Committee Duty Implementation Report 2016

Throughout 2016, the Audit Committee had carried out duty and responsibility related to its role to help the Board of Commissioners conducting supervisory and advisory duties related to managerial activity done by the Board of Directors, as follows:

### a. Management

Audit Committee had conducted review with recommendations related with management aspect, as follows:

1. To improve Management Report format and attachment.
2. To solve recurring issue in 2 ships, KM Ganda Dewata and Jetliner Shp.
3. To improve efficiency in pioneer ship management and technical issue settlement as well as optimization of pioneer ship management.
4. Optimization of Government Program (Tol Laut) to increase revenue of the Company.
5. To improve cash management, particularly related with PSO proceeds disbursement.



- 6. Perbaikan kualitas laporan kemajuan program kerja Perseroan.
  - 7. Menjaga kualitas Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulan kepada Komite Audit agar selalu tepat waktu.
  - 8. Perbaikan kualitas arus kas Perseroan.
  - 9. Agar meneruskan program efisiensi/pengawasan konsumsi BBM yang telah memberikan hasil cukup baik pada tahun 2016.
  - 10. Perbaikan perencanaan kinerja kapal penumpang untuk optimalisasi jumlah penumpang dan pendapatan.
  - 11. Agar meningkatkan upaya mencapai tujuan layanan kapal angkutan ternak yaitu untuk menurunkan harga daging.
  - 12. Optimalisasi penggunaan dana PMN.
- b. Bidang Audit Internal**
- Komite Audit telah melaksanakan telaah dan peninjauan terhadap kinerja SPI pada tahun 2016, dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
- 1. Terkait temuan SPI, masih banyak temuan yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2016. Merujuk pada kondisi tersebut, agar tindak lanjut yang belum dilaksanakan menjadi fokus pada tahun 2017 serta perlunya penyelenggaraan pertemuan rutin antara semua pihak yang diaudit dan SPI yang akan difasilitasi oleh Komite Audit untuk membahas tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI.
  - 2. Kualitas penyajian laporan hasil pemeriksaan SPI (triwulanan) sudah menunjukkan perbaikan kualitas. Terkait laporan tersebut, diperlukan konsistensi penyajian atribut temuan pada setiap laporan pemeriksaan.
  - 3. Peningkatan program pelatihan dan perbaikan kualitas SDM SPI, termasuk realisasi anggaran diklat sesuai dengan kebutuhan diklat SDM SPI.
  - 4. Peningkatan kualitas pemeriksaan kapal dan unit di kantor pusat.
- 6. To improve quality of working program progress report.
  - 7. To maintain quality of Monthly and Quarter Management Report to Audit Committee to be on time.
  - 8. To improve quality of Company's cash flows.
  - 9. To continue Oil Fuel consumption efficiency/monitoring program that had contributed positive result in 2016.
  - 10. To improve passenger ship performance planning to optimize number of passenger and revenue.
  - 11. To improve efforts to achieve cattle ships service purpose to reduce meat price.
  - 12. To optimize PMN proceeds disbursement.
- b. Internal Audit**
- The Audit Committee had reviewed and supervised performance of SPI in 2016 with recommendations as follows:
- 1. Related to SPI findings, most findings had not been followed-up in 2016. Considering this condition, the unprocessed follow-up shall become the focus of implementation in 2017 and the importance to organize regular meetings with auditee and SPI that will be facilitated by the Audit Committee to discuss SPI audit findings follow-up.
  - 2. Quality of SPI audit report (quarter) presentation had showing improvement in terms of quality. Related to this report, consistency of finding attribute presentation in every audit report is required.
  - 3. To improve SPI personnel training and quality development program, including training and education budget realization according to SPI personnel training requirement.
  - 4. To improve quality of ship and unit audits at Head Office.



### c. Bidang Audit Eksternal

#### 1. Penunjukkan KAP

Komite Audit berperan serta dalam proses penunjukan KAP untuk melakukan *general audit* tahun buku 2016, yaitu KAP Djoko, Sidik & Indra.

#### 2. Monitoring Proses Audit

Komite Audit melakukan komunikasi dengan KAP sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) kali selama proses audit. Hingga akhir tahun 2016, Komite Audit terlibat dalam *entry meeting* dengan KAP Djoko, Sidik & Indra yang membahas ruang lingkup, metodologi dan hal lain terkait proses audit.

#### 3. Menilai Hasil Pelaksanaan Audit Eksternal (KAP)

#### 4. Menilai Hasil Audit (BPK)

Komite Audit bersama dengan SPI telah melakukan *update* atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK pada PT PELNI (Persero) yang belum selesai/belum ditindaklanjuti.

### c. External Audit

#### 1. KAP Appointment

The Audit Committee participated in KAP appointment process to perform general audit in fiscal year 2016, who is KAP Djoko, Sidik & Indra.

#### 2. Audit Process Monitoring

Audit Committee communicated with the KAP based on needs, minimum 3 (three) times during the audit process. By the end of 2016, the Audit Committee involved in entry meeting with KAP Djoko, Sidik & Indra to discuss audit scope, methodology and other aspects related with audit process.

#### 3. Evaluate External Audit (KAP) Implementation Report.

#### 4. Evaluate Audit Report (BPK)

Audit Committee and SPI had updated follow-up to BPK audit result recommendation for PT PELNI (Persero) with pending/unprocessed status.

### d. Bidang Penugasan dari Dewan Komisaris

#### 1. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, Komite Audit tidak menemukan adanya masalah-masalah yang membutuhkan perhatian khusus Dewan Komisaris. Rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit terkait perubahan organisasi, rapat pembahasan proses pemeliharaan kapal dengan Direktorat Armatek serta rapat pembahasan mengenai pengelolaan kapal perintis dan sebagainya.

#### 2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Selama tahun 2016, Komite Audit telah melaksanakan penugasan Dewan Komisaris, yaitu:

- *Monitoring* pengelolaan operasional di cabang Makassar dan Bau-Bau serta peninjauan *docking* Kapal di Jakarta dan Makassar.
- Monitoring bersama dengan Komite Risiko di Cabang Semarang.

### d. Assignment from the Board of Commissioners

#### 1. Identified issues that required concern from the Board of Commissioners

Throughout 2016, Audit Committee did not find any issue that required special concern from the Board of Commissioners. Recommendations that were provided by the Audit Committee related with organizational change, ship maintenance process discussion meeting with Fleets & Technical Directorate and pioneer ship management and others.

#### 2. Carried out the duties assigned by the Board of Commissioners

Throughout 2016, the Audit Committee had carried out assignments from the Board of Commissioners, as follows:

- Monitoring operational management at Makassar and Bau-Bau Branch Office and ship Docking visit in Jakarta and Makassar.
- Joint Monitoring with Risk Committee to Semarang Branch.



## Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi

### Nomination and/or Remuneration Function

#### Komite Nominasi, Remunerasi dan Tata Kelola

Karena adanya pembatasan jumlah komite di bawah supervisi Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan usaha Milik Negara Nomor PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara, maka Perusahaan hanya mempunyai 2 (dua) komite di bawah supervisi Dewan Komisaris, namun demikian fungsi dan tugas Komite Nominasi dan Komite Remunerasi tetap dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko.

#### Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Perseroan telah memiliki mekanisme penetapan kandidat pengganti/suksesor Direksi, yaitu dengan mempunyai "Talent Pool" satu tingkat di bawah Direksi. Proses penilaian kompetensi dilakukan oleh Konsultan Independen. *Talent Pool* tersebut akan diajukan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

#### Nomination, Remuneration and Governance Committee

Due to limitation of number of Committees under the Board of Commissioners supervision, according to Minister of State-Owned Enterprise Regulation Number PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprise, the Company only has 2 (two) committees under the Board of Commissioners supervision, however, the Nomination and Remuneration Committee function and duty are exercised by the Board of Commissioners supported by Audit Committee and Risk Committee.

#### Board of Directors Succession Policy

The Company has a mechanism to appoint Board of Directors successor candidate with "Talent Pool" one level below the Board of Directors. The competency assessment process is done by Independent Consultant. Talent Pool will be proposed by the Board of Commissioners to the Shareholders.



# Komite Kebijakan Risiko

## Risk Policy Committee

Pembentukan Komite Kebijakan Risiko merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk memperkuat praktik pengawasan terhadap kebijakan dan sistem manajemen risiko di Perseroan sebagai bagian dari implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Terkait implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Kebijakan Risiko menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Komite Kebijakan Risiko PT PELNI (Persero) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) SK: Kep.03/DK/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Komite Kebijakan Risiko pada Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Anggota Komite Kebijakan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

### Komposisi Komite Kebijakan risiko

Organisasi Komite Kebijakan Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-05/DK/XI/2014 tanggal 29 Oktober 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Perubahan Anggota Komite Kebijakan Risiko pada Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) yang diperbarui dengan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-03/DK/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Risiko.

Susunan Komite Kebijakan Risiko per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

### Komposisi Komite Kebijakan Risiko 2016

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukkan Basis of Appointment
Satya Bhakti Parikesit	Ketua Komite Kebijakan Risiko (Komisaris) Risk Policy Committee Chairman (Commissioner)	SK: Kep.03/DK/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015
Purjono	Anggota Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Member	SK: Kep.03/DK/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015
Suyatman	Anggota Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Member	SK: Kep.03/DK/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015

Establishment of Risk Policy Committee is part of the Company's initiative to strengthen monitoring practice over risk management policy and system in the Company as part of Good Corporate Governance (GCG) implementation. In relation with the GCG implementation, role and function of Risk Policy Committee becomes very strategic to help and improve role of the Board of Commissioners in exercising supervisory function.

PT PELNI (Persero) Risk Policy Committee is established under PT PELNI (Persero) Risk Policy Committee Board of Commissioners Decree No. SK: Kep.03/DK/XII/2015 dated December 10, 2015 regarding Appointment and discharge of PT PELNI (Persero) regarding appointment and discharge of Risk Policy Committee Chairman under PT PELNI (Persero) Board of Commissioners. The Risk Policy Committee members are appointed and discharged by the Board of Commissioners and reported to the GMS.

### Risk Policy Committee Composition

Risk Policy Committee organization is established under Board of Commissioners Decree No. Kep-05/DK/XI/2014 dated October 29, 2014 regarding Tenure Extension and Change in the Risk Policy Committee Membership under PT PELNI (Persero) Board of Commissioners as amended under Board of Commissioners No. Kep-03/DK/XII/2015 dated December 10, 2015 regarding Appointment and Discharge of Risk Committee Chairman.

As of December 31, 2016, Risk Policy Committee composition is as follows:

### Risk Policy Committee Composition 2016



## Kompetensi dan Keahlian Anggota Komite Kebijakan Risiko

Seluruh Anggota Komite Kebijakan Risiko Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Adapun profil ringkas Anggota Komite Kebijakan Risiko adalah sebagai berikut:

### Profil Ringkas Anggota Komite Kebijakan Risiko

Nama dan Jabatan Name and Position	Riwayat Singkat Brief Profile
<b>Satya Bhakti Parikesit</b> Ketua Komite Kebijakan Risiko (Komisaris) Risk Policy Committee Chairman (Commissioner) 	Profil ringkas dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris Brief Profile is presented at Board of Commissioners Profile section
<b>Purjono</b> Anggota Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Member 	Lahir pada tanggal 4 Juli 1961. Menyelesaikan pendidikan D IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1990 dan Master of Commerce dari University of South Adelaide, Australia tahun 1995. Aktif berkarir di dunia pendidikan dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sejak tahun 1995 dan pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit PT PELNI (Persero) tahun 2008 hingga tahun 2012. Sejak tahun 2012 menjabat sebagai anggota Komite Kebijakan Risiko PT PELNI (Persero). Born on July 4, 1961. Completed his Diploma IV in the State College of Accountancy (STAN) in 1990 and Master of Commerce from the University of South Adelaide, Australia in 1995. Having career in education as a lecturer at the School of Accountancy (STAN) since 1995 and has served as a member of the Audit Committee PT PELNI (Persero) in 2008 to 2012. Since 2012 served as a member of the National Committee for Risk at PT PELNI (Persero).
<b>Suyatman</b> Anggota Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Member 	Lahir di Surakarta tanggal 7 Juni 1958. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, dan S2 Magister Transportasi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Menduduki beberapa jabatan penting antara lain sebagai Kabid Rencana dan Program Kanwilhub Propinsi Kalimantan Timur tahun 1998, Kabag Hubungan Antar Lembaga Biro dan KSLN hingga tahun 2001, Atase Perhubungan Konsulat Jendral RI Jeddah hingga tahun 2005 Kabag Perencanaan Kepegawaian Biro kepegawaian dan Organisasi sejak tahun 2006 hingga sekarang Born in Surakarta on June 7, 1958. Graduated as Bachelor of Economics at Sebelas Maret University, Surakarta, and Master in Transportation at Institut Teknologi Bandung (ITB). Held several key positions including as Head of Plans and Programs in East Kalimantan Province branch office in 1998, Head of Inter-Agency Relations Public Relations and KSLN until 2001, Transportation Attaché Consulate General of Republic of Indonesia-Jeddah until 2005 and Head of Employee Bureau Planning and organizations since 2006 until now



## Independensi Anggota Komite Kebijakan risiko

Salah satu persyaratan Komite Kebijakan Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya adalah independensi. Anggota Komite Kebijakan Risiko harus bersikap independen, obyektif dan profesional.

**Tabel Pengungkapan Independensi Komite Kebijakan Risiko 2016**

Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee	Pejabat Eksekutif Kantor Akuntan Publik Executives of Public Accountant Firm	Afiliasi dengan Pemegang Saham Affiliation With Shareholders	Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi Family Affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	Memiliki Saham Perusahaan (Langsung/Tak Langsung) Shares Ownership in the Company (Direct/Non-Direct)	Hubungan Bisnis dengan Perusahaan Business Affiliation with the Company
Satya Bhakti Parikesit	x	x	x	x	x
Purjono	x	x	x	x	x
Suyatman	x	x	x	x	x

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko bertugas untuk:

- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko semua bidang Perusahaan sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, jika diperlukan;
- Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat oleh Direksi;
- Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaanya serta semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko tersebut;
- Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko; dan

## Independency of Risk Policy Committee Members

One of requirements for the Risk Policy Committee in implementing duty and responsibility is independency. The Risk Policy Committee members shall be independent, objective and professional.

**Table of Risk Policy Committee Independence Disclosure 2016**

## Duty and Responsibility of Risk Policy Committee

The Risk Policy Committee has duty as follows:

- Provide input to the Board of Commissioners regarding the preparation of risk management improvements related to risk control all areas of the company prior to the approval of the Board of Commissioners;
- Discuss with the Board of Directors or unit of work related to risk management, if necessary;
- Study, reviewing policies and regulations on risk management policies made by the Board of Directors;
- Conduct periodic review of the risk management policies and their implementation guidelines as well as all the changes and adjustments to the risk management policies;
- To evaluate the model's accuracy and validity of the data used to measure the risk;



6. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar melakukan tidak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite Kebijakan Risiko.

6. Delivering input to the Board of Commissioners on matters that received attention and which need to be discussed with the Board of Directors, so could be followed up from the evaluation of the risk management by the Risk Policy Committee

### Risk Policy Committee Meeting

In 2016, the Risk Policy Committee organized 13 (thirteen) meetings which all have been documented in the Minutes of Meeting. Detail explanation about attendance of each Policy Committee member is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Satya Bhakti Parikesit	Ketua Chairman	13	12	92%
Purjono	Anggota Member	13	12	92%
Suyatman	Anggota Member	13	13	100%

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Meeting Agenda
1.	22 Januari 2016 January 22, 2016	<i>Monitoring</i> Kinerja Manajemen Risiko (ERM) tahun 2015 Laporan EMR Semester II tahun 2015 dan Mitigasi yang telah dilakukan <i>Monitoring</i> Rencana Kerja Manajemen Risiko (ERM) tahun 2016 Monitoring Risk Management (ERM) performance in 2015 EMR Semester II 2015 Report and Mitigation Plan <i>Monitoring</i> Risk Mangement (ERM) Working Plan 2016
2.	05 Februari 2016 February 05, 2016	Pembahasan Laporan Managemen Risiko Semester II tahun 2015 Discussion of Risk Management report as of 2 <sup>nd</sup> Semester of 2015
3.	18 Maret 2016 March 18, 2016	Pembahasan Perkembangan Pengelolaan Manajemen Risiko pada Direktorat SDM & Umum Discussion of Risk Management Progress at HR & General Affairs Directorate
4.	14 April 2016 April 14, 2016	Pembahasan Perkembangan Risiko-risiko Perusahaan Terkini Pembahasan Tindaklanjut Risiko Perusahaan <i>Discussion of Current Risk Progress</i> <i>Discussion of Risk Follow-Up</i>
5.	12 Mei 2016 May 12, 2016	Pembahasan <i>Current Issues</i> Risiko Perusahaan Pembahasan Tindaklanjut Risiko Perusahaan <i>Discussion of Corporate Risk Current Issues</i> <i>Discussion of Risk Follow-Up</i>
6.	20 Mei 2016 May 20, 2016	Persiapan/Antisipasi Angkutan Lebaran tahun 2016 <i>Eid Holiday Transprotation Preparation/Anticipation 2016</i>



No	Tanggal Date	Agenda Rapat Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Meeting Agenda
7.	09 Juni 2016 June 09, 2016	Pembahasan Perkembangan Risiko-risiko Perusahaan Terkini terkait Lebaran 2016 Pembahasan Tindaklanjut Risiko Perusahaan ke depan <i>Discussion of Actual Risk Progress During Eid al Fitr 2016</i> Discusion of Risk Follow-Up in the Future
8.	01 September 2016 September 01, 2016	Perkembangan Risiko Strategis Perusahaan bidang SDM <i>Monitoring</i> Mitigasi Risiko SDM Strategic Risk Progress in HR aspect HR Risk Mitigation Monitoring
9.	07 September 2016 September 07, 2016	Pemaparan dan Pembahasan Manajemen SDM Rencana Pengembangan SDM Human Resources Management Presentation and Discussion Human Resources Development Plan
10.	22 September 2016 September 22, 2016	Perkembangan Risiko Strategis Perusahaan oleh ERM <i>Monitoring</i> Mitigasi Risiko masing-masing Divisi Strategic Risk Progress by ERM Monitoring Risk Mitigation in Each Division
11.	26 September 2016 September 26, 2016	Laporan <i>Management</i> Risiko Triwulan II/2016 Risk Management Report as of 2 <sup>nd</sup> Quarter /2016
12.	27 Oktober 2016 Oktober 27, 2016	Laporan Triwulan III Tahun 2016 Evaluasi Kinerja ERM Triwulan III tahun 2016 Mitigasi Risiko Perusahaan Triwulan III tahun 2016 <i>Residual Risk</i> yang perlu penanganan lebih lanjut pada Semester IV tahun 2016 Report as of 3 <sup>rd</sup> Quarter of 2016 ERM performance Evaluation as of 3 <sup>rd</sup> Quarter of 2016 Risk Mitigation as of 3 <sup>rd</sup> Quarter of 2016 Residual Risk that required further mitigation in 4 <sup>th</sup> Semester of 2016
13.	28 November 2016 November 28, 2016	Pembahasan Laporan Manajemen Risiko Triwulan III/ 2016 Discussion of Risk Management Reprt as of 3 <sup>rd</sup> Quarter / 2016

## Realisasi Program Kerja Komite Kebijakan Risiko 2016

Pada tahun 2016, Komite Kebijakan Risiko telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 12 (dua belas) Rapat Internal Komite Kebijakan Risiko dan membahas laporan kinerja Perseroan, Laporan Manajemen Risiko dan hal lain yang dianggap perlu.
2. Melakukan 4 (empat) pertemuan dengan Unit Manajemen Risiko guna membahas potensi risiko, proses mitigasi risiko dan kecukupan staf yang ditugaskan serta pelaporan.
3. Melakukan 4 (empat) pertemuan dengan Direktorat Armada dan Teknik dan SDM dan melakukan *monitoring* potensi dan mitigasi risiko di Direktorat Armada dan Teknik dan Direktorat SDM secara periodik.

## Risk Policy Committee Working Program Realization 2016

In 2016, Risk Policy Committee had realized working program and activity, as follows:

1. Organize 12 (twelve) Risk Policy Committee Internal Meetings and discuss the Company's performance, Risk Management report and other important aspects.
2. Organize 4 (four) meetings with Risk Management Unit to discuss risk potential, risk mitigation process and adequacy of assigned staffs and reporting process.
3. Organize 4 (four) meetings with Fleet and Technical Directorate and monitoring risk potential and mitigation at Fleets and Technical Directorate and Human Resources Directorate periodically.



4. Melakukan evaluasi manajemen risiko Perseroan dengan menyampaikan 4 (empat) laporan evaluasi manajemen risiko (kuartal) kepada Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan penugasan khusus dari Dewan Komisaris serta memberikan saran dan/atau pendapat atas penugasan tersebut.
4. Evaluate the risk management by submitting 4 (four) risk management evaluation report (quarter) to the Board of Commissioners.
5. Perform special assignment from the Board of Commissioners as well as provide recommendation and/or opinion on the assignment.



# Sekretaris Perusahaan

## Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) serta menjaga kepatuhan PT PELNI (Persero) terhadap hukum dan perundang-undangan. Sekretariat Perusahaan juga mengembangkan misi untuk mendukung tampilan citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

### Profil Singkat Sekretaris Perusahaan



**Didik Dwi Prasetyo**  
Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary

Lahir di Malang pada 15 Oktober 1967, Domisili di Jakarta. Memperoleh gelar Ahli Madya Pelayaran dari Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Semarang dan gelar Sarjana Sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - Malang

*Born in Malang on October 15, 1967, Lives in Jakarta. He earned Shipping Middle Expert from Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Semarang and Bachelor Degree of Social Science from Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – Malang*

### Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Uraian Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

- Sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) meliputi hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham, regulator, lembaga lain dan publik;
- Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan;
- Memastikan bahwa PT PELNI (Persero) mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku;
- Membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan komunikasi terhadap publik internal dan eksternal;
- Mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan Perusahaan untuk mematuhi peraturan tersebut;

Corporate Secretary is a liaison officer between the Company and stakeholders as well as to maintain compliance of PT PELNI (Persero) with the Law and regulatory frameworks. The Corporate Secretary also carries mission to support positive corporate image building consistently and continuously through effective communication program management to all Stakeholders.

### Brief Profile of Corporate Secretary

### Duty and Responsibility of Corporate Secretary

Description of duties and responsibilities of the Corporate Secretary is as follows:

- As a liaison officer including the company's relationship with shareholders, regulators, other agencies and the public;
- Responsible for Corporate Secretariat;
- Ensure that PT PELNI (Persero) has obliged the applicable regulations on disclosure requirements;
- Make the planning, implementation and control of public communication activities to internal and external;
- Following the development of the applicable regulations for the company to comply with these regulations;



- Tugas dan tanggung jawab lainnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) dan perundang-undangan yang berlaku.

### Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2016

Adapun kegiatan-kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2016 antara lain:

- Sebagai pejabat penghubung (*liaison officer*) meliputi hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham, regulator, lembaga lain dan publik;
  - Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan;
  - Memastikan bahwa PT PELNI (Persero) mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku;
  - Membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan komunikasi terhadap publik internal dan eksternal;
  - Mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan mematikan Perusahaan untuk mematuhi peraturan tersebut;
  - Membuat dokumentasi;
  - Mengawal jalannya GCG dan CSR.
- Duties and other responsibilities, as stipulated in the PT PELNI (Persero) Articles of Association and the applicable legislation.

### Corporate Secretary Duty Implementation Reprt 2016

Activities of the Corporate Secretary in 2016 are among others:

- As a liaison officer including the company's relationship with shareholders, regulators, other agencies and the public;
- Responsible for Corporate Secretariat;
- Ensure that PT PELNI (Persero) has obliged the applicable regulations on disclosure requirements;
- Make the planning, implementation and control of public communication activities to internal and external;
- Following the development of the applicable regulations for the company to comply with these regulations;
- Creating documentation;
- Escorting the course of GCG and CSR.



## Satuan Pengawasan Intern (SPI) Internal Audit Unit (SPI)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Perseroan telah dilengkapi dengan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No: 12.22/2/SK/HKO.01/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang menjelaskan visi, misi, tujuan, ruang lingkup struktur, standar dan kode etik, wewenang, tugas dan tanggung jawab dari unit Satuan Pengawasan Intern. *Internal Audit Charter* disusun sebagai pedoman bagi SPI untuk dapat melaksanakan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan aktivitas Perusahaan. Satuan Pengawasan Intern Perseroan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka. SPI) yang diangkat dan diberhentikan Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

### Kedudukan Satuan Pengawasan Intern dan Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern (SPI) berkedudukan di Kantor Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang dapat menjamin pelaksanaan tugas Perusahaan sesuai mandat yang diterima dan peraturan yang berlaku, dengan mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas serta prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajiban.

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern di Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam struktur organisasi Perusahaan, SPI berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala SPI.
2. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Kepala SPI secara struktural bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Personil SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

Berdasarkan struktur organisasi dan kedudukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Perseroan, serta merujuk pada Piagam SPI, Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Internal Audit Unit in the Company has been equipped with Internal Audit Charter that is stipulated under Board of Directors Decree No. 12.22/2/SK/HKO.01/2014 dated December 22, 2014 that explains vision, mission, objectives, scope of structure, standard and code of ethics, authority, duty and responsibility of Internal Audit Unit. The Internal Audit Charter is prepared as guideline for SPI to exercise authority, duty and responsibility professionally, competent, independent and accountable to be accepted by all interested parties in carrying out the Company's activities. The Internal Audit Unit is supervised by Head of Internal Audit Unit (Ka. SPI) who is appointed and discharged by President Director with approval from the Board of Commissioners.

### Position of Internal Audit Unit and Party Who Appointed/Discharged the Head of Internal Audit Unit

Internal Audit Unit is assigned at Head Office and responsible directly to the President Director to establish internal control system to ensure implementation of Company's duty according to the delegated mandate and prevailing Law by referring to efficiency and effectiveness principles as well as GCG basic principles, among others, transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.

Position of Internal Audit Unit in the Company is explained as follows:

1. In the organization structure, SPI is under the President Director and supervised by Head of SPI.
2. Head of SPI is appointed and discharged by President Director with approval from Board of Commissioners
3. Head of SPI is responsible structurally to President Director and functionally to Board of Commissioners through Audit Committee.
4. SPI Personnel is responsible directly to Head of SPI.

Based on the organization structure and position of the Internal Audit Unit in the Company, as well as referring to Internal Audit Charter, the Head of Internal Audit Unit is appointed and discharged by President Director.



## Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan intern PT PELNI (Persero) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka. SPI) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Pada tahun 2016, Ka. SPI PT PELNI (Persero) dijabat oleh Ernesto.

## Profile of Internal Audit Unit

PT PELNI (Persero) Internal Audit Unit is supervised by Head of Internal Audit Unit (Ka. SPI) who is appointed and discharged by the President Director with approval from Board of Commissioners. In 2016, Head of SPI at PT PELNI (Persero) is served by Ernesto.



**Ernesto**

Kepala Satuan Pengawasan Intern  
Head of Internal Audit Unit

Lahir di Bukittinggi pada 7 Juni 1959. Memperoleh gelar MM pada tahun 2001. Menjadi Ka SPI PT PELNI (Persero) sejak 2014, sebelumnya menjabat EVP Internal Audit PT KAI (Persero). Adapun pelatihan yang telah diikuti antara lain *self mastery development program training* dan lain lain.

*in Bukittinggi on June 7, 1959. He earned MM Degree in 2001. He is appointed as Head of Internal Audit Unit at PT PELNI (Persero) since 2014, after serving as EVP Internal Audit at PT KAI (Persero). He participated in various trainings, among others, self-mastery development program training and others.*

## Struktur Organisasi SPI

## SPI Organization Structure





## Jumlah dan Kualitas Auditor Internal

SPI dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern yang dalam pelaksanaan pekerjaannya dibantu oleh Pengawas Intern Area I, Pengawas Intern Area II, Pengawas investigasi, Pengawas Administrasi & Evaluasi. Jumlah pegawai SPI Perseroan berjumlah 20 (dua puluh orang) dengan susunan internal auditor Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

### Komposisi Personil Satuan Pengawasan Intern 2016

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Ernesto	Internal Audit Internal Audit
2.	Nasib Padmomihardjo	Adviser Advisor
3.	Ani Widyastuti	Internal Auditor 1 Internal Auditor 1
4.	Agung Topo BS	Internal Auditor 2 Internal Auditor 2
5.	Dahlia	Quality Assurance Auditor Quality Assurance Auditor
6.	Donni Rachmadi	Investigative Auditor Investigative Auditor
7.	Atila	Pemeriksa Utama Main Auditor
8.	Damli,SE	Pemeriksa Utama Main Auditor
9.	Agus PS	Pemeriksa Utama Main Auditor
10.	M.Suwadi	Pemeriksa Utama Main Auditor
11.	Sriyanto	Pemeriksa Utama Main Auditor
12.	Deni Hendayana	Pemeriksa Utama Main Auditor
13.	Timbul Herman Tonik	Pemeriksa Utama Main Auditor
14.	Fahri Dirhamzah L	Pemeriksa Muda Junior Auditor
15.	Yusman Sugeng	Pemeriksa Muda Junior Auditor
16.	Sudjito	Pemeriksa Muda Junior Auditor
17.	Nunung Nuraeni	Pemeriksa Muda Junior Auditor

## Number and Quality of Internal Auditor

SPI is supervised by Head of Internal Audit Unit which duty implementation is assisted by Internal Auditor Area I, Internal Auditor Area II, Investigative Auditor, Administration & Evaluation Auditor. Total SPI Personnel is 20 (twenty) personnel with internal auditor composition as of December 31, 2016 is as follows:

### Internal Audit Unit Personnel Composition 2016



No.	Nama Name	Jabatan Position
18.	Bastian Ronald Ephraim G	Pemeriksa Pratama Pratama Auditor
19.	Ivan Eka Aditya	Senior Officer Senior Officer
20.	Rohanah	Senior Officer Senior Officer

### Internal Audit Charter

Dalam melaksanakan fungsinya, SPI merujuk Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 22 Desember 2014. Piagam Audit Internal merupakan landasan formal tertulis yang menjadi pedoman bagi Satuan Pengawasan Intern Perseroan dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Piagam Audit Internal memuat:

1. Pendahuluan
2. Visi dan Misi
3. Tujuan
4. Penyempurnaan
5. Struktur dan Kedudukan
6. Independensi dan Objektivitas
7. Tugas dan Tanggung Jawab
8. Wewenang
9. Persyaratan Auditor
10. Standar dan Kode Etik
11. Larangan Rangkap Tugas
12. Pola Hubungan
13. Riviup Internal Audit Charter
14. Penutup

### Tugas dan Tanggung Jawab SPI

Uraian Tugas dan tanggung jawab SPI yang ditetapkan berdasarkan Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
- b. Mengevaluasi integritas dan kehandalan, informasi dan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi tersebut;
- c. Mengevaluasi sistem yang diciptakan untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja, prosedur, peraturan perundungan yang memiliki dampak besar terhadap organisasi Perusahaan;

### Internal Audit Charter

In implementing its function, SPI complies with Internal Audit Charter as stipulated by the President Director on December 22, 2014. The Internal Audit Charter is written and formal guideline for the Internal Audit Unit in carrying out the duty and responsibility with competence, independent and accountable.

The Internal Audit Charter includes:

1. Introduction
2. Vision and Mission
3. Objectives
4. Improvement
5. Structure and Position
6. Independence and Objectiveness
7. Duty and Responsibility
8. Authority
9. Auditor Requirement
10. Standard and Code of Conducts
11. Dual Position Prohibition
12. Relationship Mechanism
13. Internal Audit Charter Review
14. Closing

### Duty and Responsibility of SPI

Description of SPI's duty and responsibility is stipulated based on Internal Audit Charter, as follows:

- a. Develop and implement the Annual Audit Work Program (PKAT);
- b. Evaluate the integrity and reliability, information and the tools used to identify, measure, classify and report such information;
- c. Evaluate system created to ensure compliance with policies, plans, procedures, laws and regulations that have a major impact on the organization of the company;



- d. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- e. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan penggunaan aset/alat produksi serta kegiatan lainnya.
- f. Melakukan audit atas badan usaha afiliasi dan Anak Perusahaan, atas permintaan Direktur Utama dan laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
- g. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- h. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, up. Komite Audit;
- i. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh SPI dan/ atau Auditor Eksternal;
- j. Melakukan evaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- k. Melakukan audit khusus, apabila diperlukan atas permintaan Direktur Utama atau sebagai pengembangan hasil audit sebelumnya.
- l. Melakukan kegiatan konsultasi berkaitan dengan pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, serta praktik tata kelola dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan secara berkesinambungan
- d. To test and evaluate the implementation of the internal control and risk management system in accordance with the company's policies;
- e. Perform an audit and assessment of the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and the use of assets/tools of production and other activities.
- f. Conduct an audit of a business affiliates and subsidiaries, at the request of the President Director and the report submitted to the Director and the Board of Commissioners of the subsidiaries;
- g. Provide suggestions for improvements and information on the activities examined at all levels of management;
- h. Create audit reports and submit the report to the Director and the Board of Commissioners, up. Audit Committee;
- i. Monitor, analyze and report on implementation of the improvements that have been suggested by Internal Control Unit and/or the External Auditors;
- j. Evaluate the quality of internal audits that being carried out;
- k. Conduct special audit, if necessary, at the request of the President Director or as a development of the previous audit results.
- l. Conduct consultations with regard to risk management, internal control systems, as well as corporate governance practices in an effort to improve the performance and value of the company on an ongoing basis.

## Pelatihan Internal Auditor 2016

Selama tahun 2016, Perseroan telah mengikutsertakan personil SPI dalam berbagai pelatihan yang relevan dengan kompetensi dan kebutuhan pelaksanaan tugas di SPI. Rincian pelatihan yang diikuti oleh masing-masing internal auditor, sebagai berikut:

## Internal Auditor Training 2016

Throughout 2016, the Company had participated SPI Personnel in relevant trainings with competency and duty implementation requirement in the SPI. Detail explanation of trainings participated by each internal auditors is as follows:



No.	Nama Name	Pelatihan Training
1.	Ernesto	AUDIT KINERJA PPA,PEMERIKSAAN OPERASIONAL PPA,EDP AUDIT, DDA,KPA,PENGETAHUAN PENGUSUTAN/PENYIDIKAN PUSDIKLAT BPKP Performance Audit, PPA Operational Audit, DDA, KPA, Investigation Knowledge, BPKP Training Center
2.	Nasib Padmomihardjo	DDA,AO,AK
3.	Ani Widayastuti	DDA,AO
4.	Agung Topo BS	DDA,AO
5.	Dahlia	DDA, AO,AK
6.	Donni Rachmadi	DDA,AK,PTTA
7.	Atila	IAD 1
8.	Damli,SE	DDA
9.	Agus PS	DDA,AK,AO,KPA,PTTA,IAD 1,AS,PLHAE,EDP AUDIT
10.	M.Suwadi	DDA,IAD 1
11.	Sriyanto	AUDITOR AHLI,SISTEM AKUNTANSI,PERIJINAN EKSPOR IMPOR DALAM RANGKA PEMAHAMAN INSW,KEPABEANAN & CUKAI,TEKNIS PEMERIKSAAN INFRASTRUKTUR GEDUNG & BANGUNAN,AUDIT INVESTIGASI,AUDIT INTERNAL LANJUTAN 1 Expert Auditor, Accounting System, Export Import Permits to Understand INSW, Customs, Building & Construction Infrastructure Audit Method, Investigation Audit, Advance Internal Audit 1
12.	Deni Hendayana	AUDIT UPON PROCEDURES
13.	Timbul Herman Tonik	-
14.	Fahri Dirhamzah L	DDA,AK,AO,KPA
15.	Yusman Sugeng	IAD 1
16.	Sudjito	IAD 1
17.	Nunung Nuraeni	DDA
18.	Bastian Ronald Ephraim G	-
19.	Ivan Eka Aditya	IAD 1
20.	Rohanah	DDA

Catatan/Notes:

- DDA = Dasar Dasar Audit/Basic Audits

- AO = Audit Operasional/Operational Audit

- KPA = Komunikasi dan Psikologi Audit/ Audit Communication and Psychology

- AK = Audit Kecurangan/Fraud Audit

- PTTA = Pengelolaan Tugas Tugas Audit/Audit Duties Management

- IAD 1 = Internal Audit Tingkat Dasar 1/Basic Internal Audit 1

- PLHAE = Penulisan Laporan Hasil Audit Yang Efektif/Effective Audit

Report Preparation

- AS = Audit Sampling

- EDP = Electronic Data Procesing

- INSW = Indonesia National Single Windows

**Realisasi Pengawasan Internal Tahun 2016**

Realisasi Pklat Tahun 2016

Posisi: Per 31 Desember 2016

**Realization of Internal Control Year 2016**

Realization Pklat Year 2016

Position: As of December 31, 2016

No.	Obyek Object	Jumlah Total	Tw I/Q1				Tw II/Q2				
			P	R	% Tw 1/ Q1	% Sd Tw 1 as of Q1	P	R	% Tw 2 % Q2	% Sd Tw 2 as of Q2	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Cabang/ Branch	22	4	3	75%	14%	7	10	143%	59%	
2.	Kapal/ Ship	23	7	2	29%	9%	5	7	140%	39%	
3.	SBU	2	1	1	100%	50%	1		0%	50%	
4.	Kantor Pusat/ Head Office	5	1	1	100%	20%		1		40%	
<b>TOTAL</b>		<b>52</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>54%</b>	<b>13%</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>138%</b>	<b>48%</b>	

Keterangan/Remarks:

P = Perencanaan/Planning

R = Realisasi/Realization

Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Bpk RI Tahun Buku 2007 S.d. 2015 Posisi : 31 Desember 2016

BPK RI Audit Finding Follow-Up Monitoring Fiscal Year 2007 up to 2015 position: December 31, 2016

Tahun Buku Fiscal Year	Tujuan Audit Audit Target	Jumlah Total		Hasil Review Bpk Ri (01-08-16) BPK RI Review Report (01-08-16)			
				Selesai Finished		% Penyeles. % Settlement	
		Temuan Findings	Rek Rek	Temuan Findings	Rek Rek	Rekomd. Recommendation	
1	2	3	4	5	6	7 = 6:4	
2007	GA	18	32	15	29	90.6%	
	PSO	0	0	0	0	0%	
2008	GA	8	19	8	19	100.0%	
	PSO	6	6	6	6	100.0%	
2009	PSO	2	3	1	2	66.7%	
2009 SD. SM I 2010	SPI	7	20	5	18	90.0%	
2010	PSO	9	26	3	16	61.5%	
2011	PSO	11	17	6	11	64.7%	
2012	PSO	7	12	2	5	41.7%	
2013	PSO	6	17	1	8	47.1%	
2014	PSO	10	21	2	6	28.6%	
2015	PSO	9	20	0	0	0.0%	
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>93</b>	<b>193</b>	<b>49</b>	<b>120</b>	<b>62.2%</b>	



	Tw III/ Q3				Tw Iv/ Q4				Jumlah/Total			Ket
	P	R	% Tw 3 % Q3	% Sd Tw 3 as of Q3	P	R	% Tw 4 % Q4	% Sd Tw 4 as of Q4	P	R	%	
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6	6	100%	86%	5	4	80%	105%	22	23	105%	
	6	5	83%	61%	5	12	240%	113%	23	26	113%	
			50%			1		100%	2	2	100%	
	2	1	50%	60%	2	1	50%	80%	5	4	80%	
	14	12	86%	71%	12	18	150%	106%	52	55	106%	

	Sisa Setelah Review Bpk Remaining Findings After BPK Review				Diusulkan : (Ds) Proposed : (Ds)			Sisa Posisi 31 Desember 2016 Outstanding as of December 31, 2016 position			
	Temuan Flndings	Rekomendasi Recommendation		% Penyeles. % Penyeles.	Temuan Flndings	Rekomendasi Recommendation		Temuan Flndings	Rekomendasi Recommendation		% Penyeles. % Settlement.
		PT PELNI	Kementrian Ministry	Rekomd. Recommendation		PT PELNI	Kementrian Ministry		PT PELNI	Kementrian Ministry	Rekomd. Recommendation
	8=3-5	9	10	11 = 9:4	12	13	14	15	16	17	18 = 16:4
	3	3	0	9.4%	0	0	0	3	3	0	9.4%
	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%
	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%
	1	1	0	33.3%	1	1	0	0	0	0	0.0%
	2	3	0	15.0%	1	1	0	1	2	0	10.0%
	6	9	2	34.6%	3	3	2	3	6	0	23.1%
	5	4	2	23.5%	3	2	2	2	2	0	11.8%
	5	4	3	33.3%	0	3	0	5	1	3	8.3%
	5	9	0	52.9%	5	8	0	0	1	0	5.9%
	8	12	3	57.1%	2	4	3	6	8	0	38.1%
	9	20	0	100.0%	6	16	0	3	4	0	20.0%
	44	65	10	33.7%	21	38	7	23	27	3	14.0%



# Auditor Eksternal

## External Auditor

Auditor Eksternal berkewajiban memberikan pendapat tentang kewajaran dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### Audit Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2016, PT PELNI (Persero) telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra ini melaksanakan tugasnya berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan etika profesi yang berlaku.

Adapun Fee Audit 5 tahun Terakhir adalah sebagai berikut:

### Jumlah Periode Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Berikut Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan selama tahun 2012- 2016:

Tahun Buku Fiscal Year	Nama KAP Name of KAP	Biaya Audit (Rp) Audit Fee (RP)	Opini Audit Audit Opinion
2016	KAP Djoko, Sidik & Indra	Rp652,025,000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2015	KAP Bambang Mudjiono & Widiarto	Rp449.900.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2014	KAP Hendrawinata, Eddy & Siddharta	Rp579.250.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2013	KAP Hendrawinata, Eddy & Siddharta	Rp527.300.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2012	KAP Hendrawinata, Eddy & Siddharta	Rp504.500.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect

Selama tahun 2016, KAP Djoko, Sidik & Indra memberikan jasa lain selain jasa audit laporan keuangan yaitu jasa audit kepatuhan dan laporan kinerja Perseroan.

External auditor is obliged to provide opinion on fairness and compliance of the Financial Statements with accounting principle that is commonly prevailed in Indonesia.

### Financial Statements Audit

In the implementation of Financial Statements Audit in Fiscal Year 2016, PT PELNI (Persero) had appointed Public Accountant Firm (KAP) Djoko, Sidik & Indra to perform the duty based on auditing standard prevailed by Indonesia Accountant Association and applicable professional ethics.

Explanation about audit fee in 5 recent years is as follows:

### Total Period of the Public Accountant and Public Accountant Firm

List of Public Accountant Firm who audited Financial Statements in 2012 – 2016 period is as follows:

Throughout 2016, KAP Bambang Mudjiono and Widiarto provided other services than financial statements audit which was compliance audit and performance report audit.



# Manajemen Risiko

## Risk Management

### Penerapan Manajemen Risiko

PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan *framework* ISO 31000 untuk menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perseroan. Penerapan Sistem Manajemen Risiko di Perseroan terdiri dari tahapan pengelolaan risiko yang sistematis meliputi:

#### 1. Tahap Pemantauan

Pelaksanaan *meeting*, diskusi dan kajian Manajemen Risiko antara Dewan Komisaris, Komite Kebijakan Risiko bersama Unit Manajemen Risiko serta penyusunan *risk register* secara rutin setiap triwulan.

#### 2. Tahap Komunikasi & Konsultasi

Persetujuan *risk register* setiap pemilik risiko dengan Direksi sehingga Direksi dapat mengetahui dan menyetujui pengelolaan risiko di setiap Direktorat di bawah tanggung jawabnya.

#### 3. Tahap Sosialisasi

Pemaparan kepada seluruh Pemilik Risiko (*risk owner*) pada saat *meeting* dan *sharing* by email kepada seluruh Divisi/ Pemilik Risiko tentang Laporan Manajemen Risiko tiap triwulan kemudian setiap *meeting* agenda lain dilakukan pemaparan secara sekilas tentang pengelolaan risiko yang dilakukan di unit kerja masing-masing.

### Kebijakan Direksi tentang Manajemen Risiko di PT PELNI (Persero)

Kebijakan Sistem Manajemen Risiko di Perseroan telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 10.06/2/SK/HKO.01/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) mulai menerapkan ISO 31000 sebagai basis dalam pengelolaan risiko pada pertengahan tahun 2015. Hal ini dikarenakan bahwa *Risk Management Base On ISO 31000* lebih luas perspektifnya, lebih mudah dipahami, terukur secara kuantitatif dan lebih mudah diterapkan secara terkoordinasi dan terintegrasi antar unit kerja.

Dalam upaya penerapan Pemantauan dan Komunikasi & Konsultasi sesuai Kerangka Kerja (*Frame Work*) dan Proses Pengelolaan Risiko *Risk Management ISO 31000* maka dilakukan tahapan Pemantauan sebagai berikut:

### Risk Management System Implementation

PT PELNI (Persero) implements Risk Management System based on ISO 31000 framework to establish risk management practice with broader perspective, easier to be understood, measured and support cross working units coordination and integration in the Company comprising of systematic risk management phases, including:

#### 1. Monitoring Phase

Implementation of Risk Management meeting, discussion and review among Board of Commissioners, Risk Policy Committee and Risk Management Unit as well as risk register formulation periodically in every quarter.

#### 2. Communication & Consulting Phase

Risk register approval from every risk owner with the Board of Directors, therefore, the Board of Directors will acknowledge risk management in every Directorate under their responsibility.

#### 3. Socialization Phase

Presentation to all risk owner during the meeting and sharing by email to all Risk Division/Owner regarding Risk Management quarter report and in every meeting for other agenda, also included brief presentation about risk management in each working unit.

### Board of Directors Policy on Risk Management at PT PELNI (Persero)

Risk Management System policy has been updated according to Board of Directors Decree No. 10.06/2/SK/HKO.01/2016 dated October 6, 2016 regarding Stipulation of PT PELNI (Persero) Risk Management Policy.

PT PELNI (Persero) started to implement ISO 31000 as basis of risk management since mid-2015. This is due to the Risk Management Based on ISO 31000 has broader perspective, easier to be understood, measurable quantitatively and implemented under cross working units coordination and integration.

In the Monitoring and Communication & Consulting Phases process, according to ISO 31000 Risk Management Process Framework, the Monitoring process is as follows:



- a. *Meeting*, diskusi dan *review Risk Management* antara Komisaris, Komite Kebijakan Risiko bersama Unit Manajemen Risiko secara rutin tiap triwulan untuk memantau dan membahas progres pengelolaan risiko perusahaan; dan
- b. Penyusunan *risk register* tiap Pemilik Risiko secara rutin tiap triwulan dengan melakukan proses diskusi, *review* dan *brainstorming* dengan Unit Manajemen Risiko;

Unit Manajemen Risiko sebagai fasilitator dan katalisator pengelolaan risiko di perusahaan oleh karena itu harus memiliki sumber daya manusia yang ahli (*expert*) di bidang *risk management*. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, dilakukan peningkatan kompetensi SDM di unit manajemen risiko dengan mengikutsertakan *workshop* dan standardisasi sertifikat *risk management* berbasis ISO 31000 secara berkelanjutan. Tercatat sampai tahun 2016, 1 orang *expert risk management* (Staf Utama Direktur Utama), 1 orang (*manager*) memiliki sertifikasi *risk management base on ISO 31000* dan *base on ISO 31010*, 2 orang (*staf*) memiliki sertifikasi *risk management base on ISO 31000* dan *ISO 31010*.

## Profil dan Mitigasi Risiko

### A. Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang perspektif Armatek;

Masih menjadi urutan pertama dalam 15 Risiko Utama karena menyiapkan armada kapal yang laik laut (*seaworthiness*) merupakan hal yang utama dalam menjalankan operasional perusahaan pelayaran dan mengelola risiko keselamatan kapal adalah *assurance* dalam menyiapkan kapal laik laut (*seaworthiness*).

Tindakan Mitigasi:

Melakukan sistem perawatan kapal yang telah dibakukan secara konsisten baik secara harian, bulanan maupun *docking* tahunan termasuk *home doctor service*, *husbanding team* dengan menerapkan *Integrated Maintenance System* dan penerapan *Fleet Management* berbasis Teknologi Informasi.

### B. Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang perspektif Operasi;

Risiko keselamatan kapal & penumpang ditinjau dari perspektif pengoperasian kapal merupakan salah satu alat untuk mengelola risiko ini agar lebih fokus dan detail, karena memiliki peran yang penting dalam menjalankan alat produksi yang menghadapi berbagai macam tantangan ketidakpastian cuaca, kondisi dermaga dan fasilitas kepelabuhanan, alat-alat keselamatan dan pencetus risiko lainnya (*risk drivers*).

- a. Risk Management meeting, discussion and review among the Board of Commissioners, Risk Policy Committee and Risk Management Unit periodically in every quarter to supervise and discuss risk management progress; and
- b. Formulation of risk register of every Risk Owner periodically in every quarter through discussion, review and brainstorming with the Risk Management Unit;

As risk management facilitator and catalyst in the Company, the Risk Management Unit shall have Expert personnel in risk management field. In order to fulfill this requirement, personnel competency development in risk management unit had been done by participating the personnel in risk management workshop and certificate standardization based on ISO 31000 in on going basis. As of 2016, 1 risk management expert (Main Staff of the President Director), 1 Manager with risk management certification based on ISO 31000 and based on ISO 31010, 2 staffs with risk management certification based on ISO 31000 and ISO31010.

## Risk Profile and Mitigation

### A. Vessels & Passenger Safety Risk in Fleet & Technical Perspective

The risk is placed on the first rank of 15 Key Risks due to preparation of seaworthiness vessel fleet is primary aspect in running the shipping company's operations and mitigate the vessel safety risk becomes the assurance in preparing seaworthiness of the ship.

Mitigation Plan:

Consistent formal ship maintenance both daily and monthly as well as annual docking including home doctor service, husbanding team and implementation of Integrated Maintenance System and Fleet Management based on Information Technology.

### B. Vessel & Passenger Safety Risk in Operational Perspective

In operational perspective, vessel & passenger safety risk becomes one of the instruments to mitigate the risk to be more focus and detail for having important role in operating modes of production that experienced various challenges such as weather uncertainty, pier and ports facilities condition, safety equipment and other risk drivers.



#### Tindakan Mitigasi:

Di kapal-kapal yang dioperasikan PT PELNI (Persero), secara periodik dalam 1 (satu) voyage harus melakukan latihan penanggulangan keadaan darurat (*emergency*) dan latihan meninggalkan kapal (*abandon ship*) juga menyiapkan peralatan keselamatan penumpang. Disamping itu, kebijakan fundamental yang selalu diterapkan adalah tidak akan memberangkatkan kapal jika ada hal-hal yang dirasa dapat mengancam keselamatan.

#### C. Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang Perspektif Designated Persons Ashore (DPA);

Merupakan risiko yang sangat besar dampaknya maka sebuah unit kerja didirikan khusus untuk melakukan pemeriksaan (*internal safety audit*) dan pemantauan kepatuhan (*compliance*) terhadap semua peraturan dan ketentuan nasional dan internasional yang berlaku di lingkungan pelayaran.

#### Tindakan Mitigasi:

Melakukan sinergi dan koordinasi dengan pihak *eksternal safety audit* diantaranya Biro Klasifikasi Indonesia dalam pemeriksaan keselamatan kapal, kesiapan peralatan keselamatan, kecukupan alat keselamatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil temuan dari pemeriksaan keselamatan harus segera ditindaklanjuti.

**Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang (Perspektif Armatek, Operasi dan DPA)**  
Ship & Passenger Safety Risk (Fleets & Technical, Operations & DPA Perspective)

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	12,6 T (Catastrophic)	12,6 T (Extreme)	Unlikely (40%)	257 (Catastrophic)	102,8 M (High)	Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 12,4 T dan tingkat risiko ini dapat diterima dgn kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga stabilitas keselamatan kapal
Almost Certain (100%)	12,6 T (Catastrophic)	12,6 T (Extreme)	Unlikely (40%)	257 (Catastrophic)	102,8 Bio (High)	Mitigation program that successfully reduced risk level by Rp12.4 trillion and the risk may be accepted under condition that the existing control is capable to maintain stability of the vessel's safety

#### 2. Risiko Budget;

Risiko anggaran (*budgeting*) suatu risiko yang dihadapi perusahaan dalam hal pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan dengan *risk driver* komponen biaya dan pendapatan. Dilakukan *risk assesment* secara periodik triwulan maka dilakukan langkah-langkah tindaklanjut (*detail response plan*) untuk menangani risiko ini sehingga dapat dihilangkan atau dikurangi dampak finansialnya terhadap anggaran.

#### Mitigation Plan:

On the ships operated by PT PELNI (Persero), 1 (one) voyage shall perform emergency response and abandon ship training periodically as well as preparing passenger safety equipment. In addition, the fundamental policy to be implemented is not to depart the ship if there is any issue that is analyzed may threat the safety.

#### C. Vessel & Passenger Safety Risk in Designated Persons Ashore Perspective (DPA);

A risk with huge impact, therefore, a special working unit has been established to perform internal safety unit and compliance monitoring towards all of national and international regulations in shipping industry.

#### Mitigation Plan:

Synergy and coordination with external safety audit, such as Indonesia Classification Bureau to examine vessels safety, safety equipment readiness according to the prevailing Law. Result of the safety audit finding shall be followed-up immediately.

#### 2. Budget Risk;

Budgeting risk refers to a risk experienced by the Company in terms of budget management as stipulated with cost and revenue components as risk drivers. Risk assessment had been done periodically in every quarter and detail response plan had been implemented to mitigate the risk, therefore, the risk is possible to be eliminated or reduced in terms of its financial impact on the budget.



## Tindakan Mitigasi:

Melakukan kebijakan disiplin anggaran dengan mengingatkan kepada pengguna anggaran atau tiap-tiap unit kerja untuk memenuhi RKAP yang telah ditetapkan.

## Mitigation Plan:

Implementation of tight budget policy by warning the budget user or every working unit to comply with stipulated Budget Plan (RKAP).

## Risiko Budget/Budget Risk

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Biaya/Cost						
Almost Certain (100%)	3,2 T (Catastrophic)	3,2 T (Extreme)	Almost Certain (100%)	Biaya di bawah anggaran Expenses below the budget	Nil	Mitigasi yang dijalankan berhasil menurunkan risiko ini, disiplin anggaran merupakan salah satu mitigasinya The Mitigation has successfully reduced the risk, budget discipline was one of the mitigation
Pendapatan/ Revenue						
Almost Certain (100%)	4,2 T (Catastrophic)	4,2 T (Extreme)	Almost Certain (100%)	Pendapatan Tercapai Revenue target achievement	Nil	Mitigasi yang dijalankan berhasil menurunkan risiko ini, disiplin anggaran merupakan salah satu mitigasinya The Mitigation has successfully reduced the risk, budget discipline was one of the mitigation

## 3. Risiko Public Service Obligation (PSO);

Dana Public Service Obligation (PSO) masuk dalam struktur pendapatan perusahaan sehingga merupakan suatu risiko cukup besar bagi financial perusahaan apabila tidak tertangani dengan baik pengelolaannya. Pada tahun 2016, risiko PSO ini masuk dalam *risk tolerance* karena serapan Dana PSO terpenuhi.

## 3. Public Service Obligation (PSO) Risk;

Public Service Obligation (PSO) proceeds is included in the Company's revenue structure, therefore, this becomes a major risk for the Company's financial if not properly managed. In 2016, PSO risk is classified as risk tolerance due to the PSO proceeds absorption is fulfilled.

## Tindakan Mitigasi:

Menjaga pemenuhan *voyage* seluruh kapal merupakan *risk response plan* yang tepat disamping tahap-tahap teknis lainnya.

## Mitigation Plan:

To maintain voyage fulfillment in all vessels as correct risk response plan besides other technical initiatives.

## Risiko Public Service Obligation (PSO)/Public Service Obligation (PSO) Risk

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko ini dan menjadi <i>risk tolerance</i> karena pendapatan PSO tercapai The mitigation program has successfully reduced this risk level and became risk tolerance after achieving PSO revenue target.						
Almost Certain (100%)	1,8 T (Catastrophic)	1,8 T (Extreme)	Almost Certain (100%)	0 M 0Bio	Nil	



#### 4. Risiko Kelangsungan Usaha Perusahaan;

Tingkat *Competitiveness Level* yang rendah pada segmen pasar penumpang *long distance* dan tren penurunan jumlah penumpang merupakan suatu risiko kelangsungan usaha bagi perusahaan.

Tindakan Mitigasi:

Diperlukan kajian perubahan pola trayek *medium distance*.

#### 4. Business Continuity Risk;

Low competitiveness level in long distance passenger segment and decreasing trend of passenger number brought business continuity risk for the Company.

Mitigation Plan:

Review the medium distance route scheme.

Risiko Kelangsungan Usaha/Business continuity risk

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	1,8 T (Catastrophic)	1,8 T (Extreme)	Almost Certain (100%)	340 M (Catastrophic)	340 M (Extreme)	Response Plan yang ditetapkan mampu mengelola risiko keberlangsungan usaha perusahaan dengan tingkat <i>residu risk</i> sebesar 340 M dari 1,8 T gross risk.
Almost Certain (100%)	1,8 T (Catastrophic)	1,8 T (Extreme)	Almost Certain (100%)	340 Bio (Catastrophic)	340 Bio (Extreme)	Stipulated response plan is capable to mitigate business continuity risk with risk residual level at 340 M from gross risk of 1.8 trillion

#### 5. Risiko Pax Factor Kapal Penumpang;

Tingkat *pax factor* penumpang yang rendah serta terdapat tren penurunan jumlah penumpang kapal-kapal PELNI maka menjadi suatu risiko yang harus ditangani segera.

Tindakan Mitigasi:

Promosi *preonboard, onboard* dan *post onboard* melalui event-event dan MICE serta kemudahan penjualan tiket kapal bagi calon penumpang.

#### 5. Passenger Ship Pax Factor Risk;

Low passenger pax factor level and decreasing trend of PELNI ships passenger number brought a risk that shall be mitigated immediately.

Mitigation Plan:

Pre-onboard, onboard and post onboard promotion via events and MICE and easy passenger ship ticket sales.

Risiko Pax Factor/Pax Risk Factor

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	1,4T (Catastrophic)	1,4 T (Extreme)	Almost Certain (100%)	353 M (Catastrophic)	353 M (Extreme)	Pengelolaan risiko ini dengan menetapkan <i>response plan program marketing mix</i> dapat menurunkan gross risk yang ada.
Almost Certain (100%)	1,4T (Catastrophic)	1,4 T (Extreme)	Almost Certain (100%)	353 Bio (Catastrophic)	353 Bio (Extreme)	The management of this risk by setting the response plan program marketing mix can reduce the gross risk.

#### 6. Risiko Kelayakan dan Keamanan Gedung;

Kelayakan dan keamanan gedung merupakan suatu risiko bagi penggunanya, terlebih ada beberapa gedung yang disewakan ke pihak ketiga, maka risiko ini harus ditangani dengan baik.

#### 6. Building Feasibility and Security Risk;

Building feasibility and security is a risk for the user, further, some buildings are rented to third parties, the risk shall be mitigated properly.



## Tindakan Mitigasi:

Penyusunan SOP Penggunaan dan Pemeliharaan Gedung menjadi *risk response plan* risiko ini.

## Mitigation Plan:

Formulation of Building Use and Maintenance as this risk response plan.

Risiko Kelayakan dan Keamanan Gedung/Building feasibility and security risk

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	1,2 T (Catastrophic)	1,2 T (Extreme)	Rare (40%)	12,1 M (Major)	12,1 M (High)	KRI Target tercapai dan <i>Response Plan</i> dilaksanakan sehingga dapat menurunkan <i>gross risk</i> .
Almost Certain (100%)	1,2 T (Catastrophic)	1,2 T (Extreme)	Rare (40%)	12,1 Bio (Major)	12,1 Bio (High)	KRI target is achieved and Response Plan is done to reduce gros risk

## 7. Risiko Pemakaian BBM dan Pelumas;

Biaya BBM dan pelumas merupakan biaya variable terbesar bagi PT PELNI (Persero) dalam mengoperasikan armada kapal.

## 7. Oil Fuel and Lubricants Consumption Risk;

Oil fuel and lubricants costs are the highest variable cost for PT PELNI (Persero) in operating its vessel fleets.

## Tindakan Mitigasi:

Pembentukan Biro Pengelolaan Bahan Bakar yang bertugas *monitoring* pemakaian BBM dan pelumas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (*Standard Fuel Oil Consumption*) akan berdampak pada efisiensi pemakaian BBM & Pelumas.

## Mitigation Plan:

Establishment of Oil Fuel Management Bureau who is in charge to monitor Oil Fuel and Lubricants use based on stipulated standard (*Standard Fuel Oil Consumption*) that will influence Oil Fuel & Lubricants use efficiency.

Risiko Kenaikan Harga BBM &amp; Pelumas/Oil Fuel &amp; Lubricants Price Increase Risk

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	1,05 T (Catastrophic)	1,2 T (Extreme)	Moderate (60%)	17,5 M (Major)	10,5 M (High)	Pengelolaan risiko ini dengan baik (SFOC) mampu menurunkan <i>gross risk</i> sebesar 1,05 T menjadi <i>residual risk</i> sebesar 10,5 M.
Almost Certain (100%)	1,05 T (Catastrophic)	1,2 T (Extreme)	Moderate (60%)	17,5 Bio (Major)	10,5 Bio (High)	This sufficient risk management (SFOC) is capable to decrease gross risk by Rp1.05 trilliob to residual risk at 10.5 billion.

## 8. Risiko Pemasaran Kapal Barang, Ternak &amp; Perintis;

Penyerapan subsidi pada Kapal Barang Tol Laut, Perintis dan Ternak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko ini.

## 8. Cargo, Cattle &amp; Pioneer Ships Marketing Risk;

Subsidy absorption in cargo ship, Tol Laut Shop, Pioneer Ship and Cattle Ship becomes key of this risk management success.

## Tindakan Mitigasi:

Pemenuhan *voyage* Kapal Barang Tol Laut, Perintis dan Ternak menjadi hal yang utama dalam mitigasinya.

## Mitigation Plan:

Fulfillment of Tol Laut, Pioneer and Cattle ships voyage is primary mitigation plan.



**Risiko Kapal Barang, Ternak & Perintis/Risk on Cargo, Cattle and Pioneer Ships**

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	753 M (Catastrophic)	753 M (Extreme)	Almost Certain (100%)	97,8 M (Major)	97,8 M (High)	Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 656 M dan tingkat risiko ini dapat diterima dengan kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga pemenuhan voyage kapal.
Almost Certain (100%)	753 Bio (Catastrophic)	753 Bio (Extreme)	Almost Certain (100%)	97,8 Bio (Major)	97,8 Bio (High)	The mitigation program has successfully reduced risk level by 656 billion and the risk measurement is acceptable due to the existing control in maintaining ship vogages requirement.

**9. Risiko Pengadaan Barang & Jasa;**

Menjadi risiko bagi perusahaan apabila terjadi suatu case proses pengadaan barang & jasa tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2016 Case: Nil, maka termasuk dalam *risk tolerance*.

Tindakan Mitigasi:

Menjaga *existing controls* yang telah ditetapkan agar risiko ini tidak terjadi.

9. Procurement Risk;

Risk for the Company if dealing with ac procurement process that is not complied with prevailing law and regulation, In 2016 the case was nil, and classified as risk tolerance.

Mitigation Plan:

Maintain existing controls that has been implemented to prevent this risk occurrence.

**Risiko Pengadaan Barang & Jasa/Procurement Risk**

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	650 M (Catastrophic)	650 M (Extreme)	Moderate (60%)	17,5 M (Major)	8,2 M (High)	Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 641,8 M dan tingkat risiko ini dapat diterima dengan kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga <i>compliance</i> terhadap peraturan yang berlaku
Almost Certain (100%)	650 Bio (Catastrophic)	650 Bio (Extreme)	Moderate (60%)	17,5 Bio (Major)	8,2 Bio (High)	The mitigation program that as successfully reduced risk level of Rp641.8 billion and the risk level is acceptable under condition existing control to maintain compliance with prevailing Law.

**10. Risiko Pengadaan & Modifikasi Kapal;**

Risiko penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, penyimpangan atas standar operasi dan prosedur, kesalahan spesifikasi dapat terjadi dan memberikan dampak yang tidak diinginkan.

Tindakan Mitigasi:

Memastikan semua peraturan perundang-undangan dan standar operasi & prosedur ditaati oleh Divisi yang melakukan fungsi pengadaan kapal.

10. Ship Procurement & Modification Risk;

Risk of incompliance with the Law, violation of operational standard and procedure, specification mistake may be occurred and cause unexpected impact.

Mitigation Plan:

Ensure every law and regulation and operational standard & procedure have been complied by the Division that performs ship procurement function.



## Risiko Pengadaan &amp; Modifikasi Kapal/Ship Management &amp; Modification

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	500 M (Catastrophic)	650 M (Extreme)	Moderate (60%)	80 M (Major)	48 (High)	Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 602 M dan tingkat risiko ini dapat diterima dengan kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga <i>compliance</i> terhadap peraturan yang berlaku The mitigation program has successfully decreased A risk level of Rp603 billion and this level of risk can be accepted with the condition that the controls exist Can keep compliance to the rules applicable
Almost Certain (100%)	500 Bio (Catastrophic)	650 Bio (Extreme)	Moderate (60%)	80 Bio (Major)	48 (High)	

## 11. Risiko Audit;

Merupakan suatu risiko bagi perusahaan apabila temuan dan rekomendasi tindaklanjut hasil audit baik dari internal maupun eksternal auditor tidak dilaksanakan.

## Tindakan Mitigasi:

Monitoring tindaklanjut *auditee* atas rekomendasi temuan disamping melaksanakan tindaklanjut rekomendasi dari eksternal auditor.

## 11. Audit Risk;

A risk for the Company if audit finding and recommendation follow-up from internal and external auditors is not implemented.

## Mitigation Plan:

Monitoring follow-up of auditee on the finding recommendation besides follow-up of recommendation from the external auditor.

## Risiko Audit/Audit Risk

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	239 M (Catastrophic)	650 M (Extreme)	Moderate (60%)	80 M (Major)	48 (High)	Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 602 M dan tingkat risiko ini dapat diterima dengan kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga <i>compliance</i> terhadap peraturan yang berlaku The mitigation has successfully reduced the risk level by Rp602 billion and the risk level is acceptable under condition that existing control will maintain compliance with prevailing Law.
Almost Certain (100%)	239 Bio (Catastrophic)	650 Bio (Extreme)	Moderate (60%)	80 Bio (Major)	48 (High)	

## 12. Risiko Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertata baik berdampak positif terhadap performa perusahaan serta pencapaian tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, PT PELNI (Persero) menempatkan risiko ini termasuk dalam 15 Risiko Utama Perusahaan sehingga memperoleh perhatian yang lebih untuk ditangani dan dikelola dengan baik.

## 12. Human Resources Development Risk;

An effective Human Resources development will contribute positively to performance of the Company as well as achievement of the Company's objectives. Therefore, PT PELNI (Persero) classifies this risk as 15 Key Risks of the Company that is exposed by greater concern to be managed and mitigated properly.



**Tindakan Mitigasi:**

Penanganan risiko secara komprehensif dengan fokus pada pengembangan kompetensi pegawai dan *performance appraisal*.

**Mitigation Plan:**

Comprehensive risk mitigation by focusing on employee competency development and performance appraisal.

Risiko Sumber Daya Manusia/Human Resources Risk

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	60 M (Catastrophic)	60 M (Extreme)	Moderate (60%)	16 M (Catastrophic)	9,6 (High)	Pengelolaan risiko ini dengan menetapkan <i>response plan program people develop, performance plan</i> dapat menurunkan <i>gross risk</i> yang ada. The management of this risk by setting the response program people develop plan, performance can decrease gross risk.
Almost Certain (100%)	60 Bio (Catastrophic)	60 Bio (Extreme)	Moderate (60%)	16 Bio (Catastrophic)	9,6 (High)	

**13. Risiko Teknologi Informasi;**

Menjadi risiko yang besar bagi perusahaan apabila teknologi informasi yang diterapkan perusahaan tidak dikelola dengan baik. Penentuan *risk drivers* dan KRI Target menjadi hal yang penting dalam menangani risiko ini.

**Tindakan Mitigasi:**

Menjaga kontrol yang telah ditetapkan dan disiplin menerapkan seluruh prosedur yang berlaku di lingkungan Teknologi Informasi.

**13. Information Technology Risk;**

A major risk of the Company if the information technology is not well managed. Stipulation of risk drivers and target KRI become important aspect in this risk mitigation.

**Mitigation Plan:**

Maintain the stipulated control and discipline implementation of all procedures prevailed in Information Technology aspect.

Risiko Teknologi Informasi/Informasi Technology risk

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	17 M (Major)	17 M (High)	Unlikely (40%)	16 M (Major)	6,4 M (Significant)	Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 13 M dan tingkat risiko dengan menjaga kontrol yang ada.
Almost Certain (100%)	17 Bio (Major)	17 Bio (High)	Unlikely (40%)	16 Bio (Major)	6,4 Bio (Significant)	The mitigation process that successfully brought lower inflation at 13 bio and risk level by maintaining existing control.

**14. Risiko Assets Idle;**

Risiko atas ruang kantor dan ruang kapal yang tidak tersewa merupakan kehilangan mendapatkan pendapatan dan oleh sebab itu perlu dimonitor dengan seksama.

**14. Idle Assets Risk;**

Risk of office space and ships room that are vacant that will cause loss of income, therefore, the risk shall be monitored thoroughly.

**Tindakan Mitigasi:**

Melakukan pemasaran ruang perkantoran dan ruang di kapal serta menetapkan *Key Performance Indicator* atas keberhasilan pemasaran. Selain itu dilakukan juga renovasi atas ruang kantor dan ruang kapal agar lebih mudah dipasarkan.

**Mitigation Plan:**

Marketing plan for office rental and ship room as well as stipulation of Key Performance Indicators on the marketing succeed. In addition, the plan also includes office space and ship room renovation to support the marketing process.

**Risiko Aset Idle/Idle Assets Risk**

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	16,9 M (Major)	16,9 M (High)	Likely (80%)	16 M (Major)	9,1 M (Significant)	Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 7 M dan tingkat risiko dengan menjaga kontrol yang ada.
Almost Certain (100%)	16,9 Bio (Major)	16,9 Bio (High)	Likely (80%)	16 Bio (Major)	9,1 Bio (Significant)	Mitigation program has successfully decreased risk level by 7 bio and the risk level is acceptable by controlling existing risk.

**15. Risiko Reputasi (Humas):**

Menjadi risiko yang cukup besar dampaknya bagi nama baik perusahaan apabila terjadi suatu peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama perusahaan (*core business*) terutama kejadian keselamatan pelayaran. Pemuliharaan nama baik secara tepat dan cepat menjadi tugas utama bidang Humas untuk menjaga kepercayaan (*trust*) dari *stakeholders*.

**Tindakan Mitigasi:**

Pemuliharaan nama baik perusahaan dengan target waktu maksimal 3 hari melalui jaringan media nasional.

**15. Reputation (PR) Risk;**

A risk with major impact under particular event that is related with the company's core business, primarily shipping safety case. Fast and effective reputation recovery is main duty of Public Relation Unit to maintain trust of the Stakeholders.

**Mitigation Plan:**

Recovery of the Company's reputation with maximum target within 3 days via national media network.

**Risiko Humas/Public Relation Risk**

Risiko Kotor/Gross Risk			Risiko Sisa/Risk Outstanding			Keterangan Description
Probabilitas Probability	Dampak (Miliar) Impact (billion)	Tingkat Level	Probabilitas (%) Probability (%)	Dampak (Miliar) Impact (Billion)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%)	10 M (Moderate)	10 M (High)	Unlikely (40%)	100 Jt (Insignificant)	40 Jt (Low) 40 Million (Low)	Program mitigasi telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 9,4 M dan tingkat risiko ini dapat diterima dengan kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga pemuliharaan nama baik perusahaan.
Almost Certain (100%)	10 Bio (Moderate)	10 Bio (High)	Unlikely (40%)	100 Million (Insignificant)		The mitigation program has successfully decreased risk level by 9.4 bio and the risk level is acceptable under condition that existing control is capable to maintain the Company's reputation recovery.



Pada Tahun 2016, dengan difasilitasi oleh Unit Manajemen Risiko maka melalui pengelolaan seluruh risiko yang ada, *gross risk* perusahaan sebesar Rp29.469 triliun dapat diturunkan atau berhasil dihilangkan risiko sebesar Rp28,2 triliun, sehingga *residual risk* perusahaan atau risiko perusahaan menjadi sebesar Rp1,2 triliun

## Evaluasi dan Review Terhadap Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas penerapan manajemen risiko dilaksanakan selama triwulan I s/d III, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit kerja. Evaluasi dilaksanakan melalui metode diskusi dan *review* antara unit manajemen risiko dengan setiap PIC manajemen risiko dan manager terkait pada tanggal 8 Desember 2016.

Evaluasi dilakukan atas 4 hal utama yaitu:

1. Proses penyusunan *risk register* pemilik risiko;
2. Isi *risk register* tiap pemilik risiko;
3. *Gross risk* dan risiko utama;
4. Tindaklanjut atas *response plan*.

In 2016, facilitated by Risk Management Unit through management of existing risk, gross risk of the Company achieved Rp29,469 trillion that successfully reduced or eliminated risk of Rp28.2 trillion that the Company's residual risk or corporate risk was Rp1.2 trillion.

## Evaluation and Review on Risk Management System

Evaluation on risk management implementation is implemented throughout 1st until 3rd quarter, therefore, the evaluation result will improve weakness and issues occurred in the risk management implementation in the working unit. The evaluation is implemented by discussion and review methods between risk management unit and every related risk management PIC and manager on December 8, 2016.

The evaluation is done on 4 main aspects, as follows:

1. Risk-owner risk register formulation process;
2. Contents of risk register of every risk-owner;
3. Gross risk and main risk;
4. Follow-up and response plan.





# Etika Bisnis

## Business Ethics

### Pedoman Perilaku

Perseroan menyusun Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan. Pedoman Perilaku berlaku bagi seluruh Insan PELNI di seluruh tingkat organisasi. Pedoman Perilaku PT PELNI (Persero) telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 12.29/01/SK.HKO.01/2016 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan PT PELNI (Persero).

### Isi Pedoman Perilaku

Perseroan dengan konsisten mengaitkan *Code of Conduct* dengan nilai-nilai utama Perusahaan, yaitu sebagai berikut:

#### I. Pendahuluan

#### II. Pedoman Etika

- A. Standar Hubungan dengan *Stakeholders*
  1. Hubungan dengan Pemegang Saham
  2. Hubungan dengan Pegawai
  3. Hubungan dengan Pelanggan
  4. Hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa
  5. Hubungan dengan Mitra Kerja
  6. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan
  7. Hubungan dengan Kreditor
  8. Hubungan dengan Pemerintah
  9. Hubungan dengan *Principal Kapal Keagenan*
  10. Hubungan dengan Media Massa
  11. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan-Undangan
  12. Persaingan Usaha
- B. Standar Etika Pengelolaan Perusahaan
  1. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan
  2. Penggunaan Aset Perusahaan
  3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan
  4. Pengelolaan Anak Perusahaan

#### III. Pedoman Kerja:

- A. Nilai-Nilai Luhur Perusahaan
- B. Menjaga Citra Perusahaan
- C. Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan
  1. Integritas
  2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

### Code of Conducts

The Company formulates Code of Conducts as reference of conduct for the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees. The Code of Conducts prevails for all PELNI People at all organization level. PT PELNI (Persero) Code of Conducts has been updated and validated under Board of Directors Decree No. 12.29/01/SK.HKO.01/2016 regarding Code of Conducts in PT PELNI (Persero) circumstances.

### Contents of Code of Conducts

The Company consistently linked the Code of Conducts with core values, as follows:

#### I. Introduction

#### II. Code of Conducts

- A. Standard of Relationship with Stakeholders
  1. Relationship with the Shareholders
  2. Relationship with the Employees
  3. Relationship with the Customers
  4. Relationship with the Suppliers and Vendors
  5. Relationship with the Business Partners
  6. Relationship with the Society and Environment
  7. Relationship with the Creditors
  8. Relationship with the Government
  9. Relationship with the Agency Ship Principal
  10. Relationship with the Mass Media
  11. Compliance with the Law
  12. Business Competition
- B. Ethical Standard in Company Management
  1. Accounting and Finance Policy
  2. Corporate Assets Use
  3. Occupational Health, Safety and Environment
  4. Subsidiary Management

#### III. Work Guideline:

- A. Noble Values
- B. Maintain Corporate Image
- C. Responsibility to the Company
  1. Integrity
  2. Compliance with the Law



- 3. Kerahasiaan Informasi
  - 4. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi
  - 5. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan
  - 6. Penggunaan Komunikasi Elektronik
  - 7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Masyarakat
  - 8. Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Alkohol.
  - 9. Keterlibatan dalam Aktivitas Politik.
- D. Benturan Kepentingan
- 1. Menghindari Benturan Kepentingan
  - 2. Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Pegawai
  - 3. Kegiatan di Luar Perusahaan
  - 4. Perlakuan Terhadap Keluarga dan teman
  - 5. Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan Bisnis/Hiburan dan lainnya.
- E. Hubungan Kerja.
- 1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman dan Kekerasan
  - 2. Kerjasama Atasan dan Bawahan.
- F. Hubungan Dengan Konsumen
- 1. Pelayanan Kepada Konsumen
  - 2. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif
- G. Perlakuan Terhadap Mitra Bisnis
- H. Perlakuan Terhadap Pesaing
- I. Hubungan Dengan Pemerintah
- 1. Kepatuhan Terhadap Ketentuan/Peraturan Terkait
  - 2. Pola Hubungan dan Komunikasi
- J. Hubungan Dengan Masyarakat
- 1. Pelayanan Masyarakat
  - 2. Pemberian Donasi
  - 3. Kesadaran akan Lingkungan Alam
- IV. Penerapan Pedoman Perilaku, mencakup:
- A. Sosialisasi Pedoman Perilaku.
  - B. Pernyataan Kepatuhan INSAN PELNI
  - C. Saluran Pengaduan Masalah.
  - D. Sanksi Pelanggaran Pedoman Perilaku.
- 3. Information Confidentiality
  - 4. Data Recording, Report and Documentation
  - 5. Corporate Assets Protection and Use
  - 6. Electronic Communication Use
  - 7. Occupational Health, Safety, Environment and Society
  - 8. Abuse of Drugs and Liquor
  - 9. Involvement in Political Activity
- D. Conflict of Interest
- 1. Avoiding Conflict of Interest
  - 2. Employee Personal Investment and Shares Ownership
  - 3. External Activity
  - 4. Treatment to Family and Friend
  - 5. Gratification, Reward, Business Reception/Entertainment and Others.
- E. Working Relation.
- 1. Working Environment that is Free from Discrimination, Abuse, Dishonor Attitude and Abuse
  - 2. Coordination Between Superiors and Subordinates
- F. Relationship with Customers
- 1. Customer Service
  - 2. Fair and Non-Discriminative
- G. Treatment to Business Partner
- H. Treatment to Competitors
- I. Relationship with The Government
- 1. Legal Compliance
  - 2. Communication Scheme
- J. Relationship with The Society
- 1. Community Service
  - 2. Donation
  - 3. Environmental Care
- IV. Code of Conducts Implementation, including:
- a. Code of Conducts Socialization
  - b. INSAN PELNI Integrity Pact
  - c. Complaint Channel
  - d. Punishment to Code of Conducts Violation.



## Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku

Implementasi *Code of Conduct* dilaksanakan oleh seluruh Insan PELNI. Untuk itu, Perseroan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi untuk memastikan *Code of Conduct* diketahui dan dijalankan oleh seluruh Insan Perusahaan. Pedoman GCG dan *Code of Conduct* telah di-upload pada website PELNI www.pelni.co.id dan dapat diunduh secara langsung. Seluruh Insan PELNI diharuskan untuk membaca dan memahami dengan baik Pedoman Perilaku Perusahaan serta wajib secara berkala setiap tahunnya untuk menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku sebagai wujud komitmen atas kepatuhan tersebut.

Bagi setiap Insan Perseroan yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar *Code of Conduct* harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan buktibukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi. Perusahaan akan melindungi kerahasiaan setiap Insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan untuk menegakkan *Code of Conduct* Perusahaan. Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah.

## Sosialisasi *Code of Conduct*

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku Perusahaan, karena sosialisasi merupakan tahapan penting dalam terciptanya insan PELNI yang berprilaku sesuai dengan Budaya Perusahaan. Pedoman Perilaku dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai yaitu antara lain melalui penandatanganan Pakta Integritas yang memuat komitmen pelaksanaan Pedoman Perilaku.

Dalam ketentuan Bab IV mengenai sosialisasi *Code of Conduct*, disebutkan bahwa seluruh Insan PELNI harus membaca dan memahami dengan baik isi Buku Pedoman dan bertanggungjawab untuk menaatinya. Direktorat SDM dan Umum berkewajiban untuk mensosialisasikan Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan PELNI dengan menyampaikan daftar baca. Setiap Insan PELNI dapat meminta penjelasan dari atasan langsung apabila kurang memahami kebijakan Pedoman Perilaku.

## Application and Enforcement of the Code of Conduct

Implementation of *Code of Conduct* implemented by all PELNI People. Therefore, the Company conducts socialization and internalization to ensure that the *Code of Conduct* is acknowledged and implemented by all Company People. The Code of GCG and *Code of Conduct* have been uploaded on the PELNI website www.pelni.co.id and can be downloaded directly. All PELNI People are required to read and understand the *Code of Conduct* properly and to annually sign the Compliance Statement of Compliance as manifestation of their compliance.

For any Company People who acknowledge a situation that is believed to have the potential to violate the *Code of Conduct* must immediately report to the superior or higher leadership in writing by including the identity of the reporter on the basis of full and accountable evidences and does not contain libel and personal interests. The Company will protect the confidentiality of any PELNI Insan who has reported the violation and will follow up immediately unless the report is incorrect and the complainant may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

Sanctions administration on the violations against the *Code of Conduct* is aimed to enforce the *Code of Conduct*. Any Company People who is proven to have violated the *Code of Conduct* shall be punished. Sanctions shall be governed by a separate regulation established in accordance with government regulations.

## Socialization of the *Code of Conduct*

The Company always disseminates the *Code of Conduct* considering the socialization as an important step in developing PELNI People who adapt the Corporate Culture in their attitude. The *Code of Conduct* is communicated and disseminated to the Board of Commissioners and its supporting structures, the Board of Directors and the one-level executives under the Board of Directors and all employees, among others through the signing of the Integrity Pact which contains the commitment of the implementation of *Code of Conducts*.

In the provisions of Chapter IV on the socialization of the *Code of Conduct*, the provisions mentioned that all Insan PELNI must read and understand well the contents of the Manual and be responsible for obeying it. The Directorate of Human Resources and General Affairs is obliged to socialize the *Code of Conduct* to all PELNI People by submitting the reading list. Each PELNI People may request an explanation from the immediate supervisor if he/she is not familiar with the *Code of Conduct* policy.



## Kebijakan Penegakkan Disiplin dan Penanganan Pelanggaran

Seluruh insan PELNI wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku sebagai wujud komitmen untuk memenuhi Pedoman Perilaku. Pedoman Penandatanganan Surat Kepatuhan Pedoman perilaku dilakukan secara berkala setiap tahun. Direktorat SDM dan Umum mendokumentasikan Surat Pernyataan Kepatuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Perilaku Perseroan.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dijabarkan dalam Bab IV, yaitu dilakukan untuk menegakkan Pedoman Perilaku Perseroan. Setiap Insan PELNI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai Peraturan Perseroan.

Setiap insan PELNI yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar Pedoman Perilaku harus segera melaporkan kepada atasan langsung atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi. Pelaporan pelanggaran juga dapat dilakukan melalui mekanisme *whistleblowing system* (WBS) dan email: [upg@pelni.co.id](mailto:upg@pelni.co.id).

Perseroan akan melindungi kerahasiaan setiap insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya, kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku.

## Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Etika Perusahaan

Evaluasi terhadap penerapan Pedoman Perilaku dilakukan secara berkala kepada Insan PELNI. Berdasarkan Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan rasa kepemilikan dari setiap Insan PELNI serta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan karyawan secara konsisten. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Perilaku akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan.

## Discipline Enforcement and Violation Policy

All of PELNI People are required to sign the Statement of Compliance as a form of commitment to meet the Code of Conduct. Guidance on Signing of Compliance Guidelines Behavioral guidelines are conducted periodically every year. The Directorate of Human Resources and the General documents the Compliance Statement as an integral part of the Company's Code of Conduct.

Punishment for any violations against the Code of Conduct are outlined in Chapter IV, which is to enforce the Company's Code of Conduct. Any PELNI People who are proven violating the Code of Conduct will be punished. The granting of sanctions shall be governed by a separate regulation stipulated by the Company's Regulations.

Every PELNI People who acknowledge any situation that is believed to have the potential of violation against the Code of Conduct shall promptly report to a superior superior or a higher lead in writing by including the identity of the complainant on the basis of complete and accountable evidence and not containing any slander and personal interests. Reporting violations can also be done through whistleblowing system (WBS) and email: upg@pelni.co.id.

The Company will protect the confidentiality of any PELNI People who has reported the violation and will follow-up immediately, unless the report is incorrect and the complainant may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

Throughout 2016 there is no violation of the Code of Conduct.

## Evaluate on Effectiveness of Code of Conducts Implementation

Evaluation of the implementation of the Code of Conduct is done periodically to the PELNI People. Based on this evaluation is expected to encourage and increase the sense of ownership of every Pelni Insan and is expected to improve the competence and ability of employees consistently. As a dynamic guideline, the Code of Conducts is reviewed periodically and continuously.



## Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Perusahaan

### Litigation Involving the Company

#### Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Perusahaan, Entitas Anak, Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Yang Masih Menjabat

Per 31 Desember 2016, Perseroan mencatat beberapa perkara penting yang melibatkan Perseroan, antara lain:

#### Litigation Involving the Company, Subsidiary And Current Board of Commissioners and Board of Directors

As of December 31, 2016, the Company recorded some cases involving the Company, as follows:

No.	Jenis Perkara Case Type	Nomor Perkara Case Number	Garis Besar Perkara Brief Explanation of the Case	Posisi Terakhir Perkara Case Status	Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company
1.	Perkara Perdata Upaya Perlawanan "Derden Verzet" Menteri BUMN kepada Hasan Ismail, PT. PELNI (Persero) Civil Proceedings of "Derden Verzet" Resistance against Minister of SOEs to Hasan Ismail, PT. PELNI (Persero)	Perkara Nomor : 110/Pdt.Plw/2015/ PN.Jkt.Pst Case Number : 110/Pdt.Plw/2015/ PN.Jkt.Pst	Menteri BUMN selaku RUPS PT. PELNI (Persero) mengajukan perlawanan (Derden Verzet) terhadap penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor : 77/2012.Eks jo Nomor 168/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst jo 537/Pdt/2009/PT.DKI jo 76K/Pdt/2011 jo 496 PK/Pdt/2013 Minister of SOEs as the AGM of PT. PELNI (Persero) filed a resistance (Derden Verzet) against the determination of Chairman of Central Jakarta District Court Number: 77 / 2012.Ex jo Number 168 / Pdt.G / 2008 / PN.Jkt.Pst jo 537 / Pdt / 2009 / PT.DKI jo 76K / Pdt / 2011 jo 496 PK / Pdt / 2013	Banding di Pengadilan Tinggi DKI Appeal at the High Court of DKI Jakarta	Tidak berdampak material terhadap kinerja Perseroan No material impact on the Company's performance
2.	Perkara Perdata "Gugatan Pengosongan" Oleh Sdr. Daeng Abdul Karim yang mengklaim sebagai ahli waris atas Tanah Kantor Cabang PT. PELNI (Persero) Makassar yang terletak di Jl. Sudirman 14/14A The Civil Lawsuit "Lifting Law" By Br. Daeng Abdul Karim who claimed to be the heir of the Land Branch Office of PT. PELNI (Persero) Makassar which is located on Jl. Sudirman 14 / 14A	Perkara Nomor : 324/Pdt.G/2013/ PN.Mks Case Number: 324/Pdt.G/2013/ PN.Mks	Sdr. Daeng Abdul Karim mengklaim sebagai ahli waris tanah milik PT. PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Sudirman No. 14/14A sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 259/ Mangkura Makassar Sulawesi Selatan Mr. Daeng Abdul Karim claims to be the heir of land owned by PT. PELNI (Persero) located on Jl. Sudirman No. 14 / 14A as Building Rights Certificate Number: 259 / Mangkura Makassar South Sulawesi	Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Appeal in the High Court of South Sulawesi	Tidak berdampak material terhadap kinerja Perseroan No material impact on the Company's performance



## Laporan Tahunan 2016 Annual Report

PT PELNI (Persero)

No.	Jenis Perkara Case Type	Nomor Perkara Case Number	Garis Besar Perkara Brief Explanation of the Case	Posisi Terakhir Perkara Case Status	Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company
3.	Perkara Perdata "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" oleh PT. Semarang Baru Indah Sejahtera kepada PT. PELNI (Persero) Civil Lawsuit "Lawsuit of Action Against the Law" by PT. Semarang Baru Indah Sejahtera to PT. PELNI (Persero)	Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 207/Pdt.G/2015/ PN.Smg Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No : 120/Pdt/2016/ PT.Smg a. Semarang State Court Verdict No. : 207/Pdt.G/2015/ PN.Smg b. Central Java High Court Verdict No. : 120/ Pdt/2016/PT.Smg	PT. Semarang Baru Indah Sejahtera mengajukan Gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" kepada PT. PELNI (Persero) atas Aset tanah dan bangunan sesuai alas Hak SHGB No 475/1983 a.n PT PELNI (Persero) PT. Semarang Baru Indah Sejahtera filed a lawsuit "Action Against the Law" to PT. PELNI (Persero) on Land and building assets in accordance with the rights of SHGB No 475/1983 a.n PT PELNI (Persero)	PT. Semarang Baru Indah Sejahtera mengajukan Kasasi atas Putusan PN Semarang dan PT Jawa Tengah Kasasi di Mahkamah Agung 1. PT. Semarang Baru Indah Sejahtera filed an appeal on the verdict of PN Semarang and PT Jawa Tengah 2. Cassation in the Supreme Court	Tidak berdampak material terhadap kinerja Perseroan 2. No material impact on the Company's performance
4.	Perkara Perdata "Perbuatan Melawan Hukum" Oleh Agustine Ria Dewi (ahli waris penghuni) terhadap PT.PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Jambi No. 61 Surabaya Civil Law "Action Against the Law" By Agustine Ria Dewi (heir of the inhabitants) against PT.PELNI (Persero) located on Jl. Jambi No. 61 Surabaya	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 229/Pdt.G/2014/ PN.Sby Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 272/Pdt/2015/ PT.sby Surabaya State Court Verdict : 229/Pdt.G/2014/ PN.Sby Surabaya High Court Verdict: 272/Pdt/2015/ PT.sby	Agustine Ria Dewi selaku Ahli Waris Penghuni melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. PELNI (Persero) atas Aset milik PT. PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Jambi No. 61 Surabaya Agustine Ria Dewi as the Heir of the Inhabitant to Commit a Action against the Law to PT. PELNI (Persero) on assets owned by PT. PELNI (Persero) located on Jl. Jambi No. 61 Surabaya	Agustine Ria Dewi mengajukan Kasasi atas Putusan PN Surabaya dan PT Jawa Timur Kasasi di Mahkamah Agung 1. Agustine Ria Dewi filed an appeal on the Decision of PN Surabaya and PT East Java 2. Cassation in the Supreme Court	Tidak berdampak material terhadap kinerja Perseroan No material impact on the Company's performance
5.	Perkara Pidana "Dugaan Tindak Pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dan atau pemalsuan surat atau akta otentik" Criminal Case "Alleged Crime ordered put false information and or falsification of letters or authentic acts"	Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/436/ II/2015/PMJ/Dit. Reskrimum Report Registry No.: TBL/436/ II/2015/PMJ/Dit. Reskrimum	PT. PELNI (Persero) melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP dan atau 263 KUHP dan atau 264 KUHP PT. PELNI (Persero) reported the alleged criminal act as regulated in Article 266 of the Criminal Code and or 263 of the Criminal Code and or 264 of the Criminal Code	Proses penyidikan Investigation Process	Tidak berdampak material terhadap kinerja Perseroan No material impact on the Company's performance



No.	Jenis Perkara Case Type	Nomor Perkara Case Number	Garis Besar Perkara Brief Explanation of the Case	Posisi Terakhir Perkara Case Status	Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company
6.	PKPU PT Rolika Caterindo PKPU PT Rolika Caterindo	Putusan PN Niaga Nomor : 17/Pdt. Sus/PKPU/2016/ PN Niaga Jkt Pst Commercial State Court Verdict No: 17/Pdt.Sus/ PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst	PT Rolika Caterindo merupakan mitra PT.PELNI (Persero) yang memiliki utang macet, dan dalam perkembangannya digugat oleh BNI Syariah selaku Kreditor; PT Rolika Caterindo is a partner of PT.PELNI (Persero) which has bad debts, and in its development sued by BNI Syariah as Creditor;	Putusan Pengadilan Negeri Jak-Pus Nomor : 17/Pdt.Sus- PKPU/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst. Central Jakarta State Court Verdict No.: 17/ Pdt.Sus-PKPU/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst.	Tidak berdampak material terhadap kinerja Perseroan No material impact on the Company's performance
7.	Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di PELNI Cabang Ambon Freelance Daily Worker Termination at PELNI Cabang Ambon	Perkara Hubungan Industrial di PN Nomor 10/Pdt. SUS-PHI/2016/ PN.Amb Industrial Dispute Case at PN No 10/Pdt.SUS- PHI/2016/PN.Amb	Tenaga Harian Lepas di berhentikan oleh Kepala Cabang, dan dalam perkembangannya melakukan upaya gugatan di PN Ambon. The freelance daily worker was terminated by the Branch Head and in the progress of the case was reported claimed at PN Ambon.	Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 10/Pdt-sus.PHI/2016/ PN.Ambon Amboin State Court Verdict Nos: 10/ Pdt-sus.PHI/2016/ PN.Ambon	Tidak berdampak material terhadap kinerja Perseroan No material impact on the Company's performance
8.	Perkara Aset Tanah milik PT PELNI Cab. Bitung cq Tahun Land Assets Dispute of PT PELNI Cab. Bitung cq Tahun	Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Nomor :57/PDT.G/2-16/ PN.THN Civil Case at State Court No. :57/PDT.G/2-16/ PN.THN	PELNI memiliki Aset dengan alas hak SHGB No : SHGB) No7/Lirung, Sangihe Talaud, Saat ini digugat oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris. PELNI owns Assets with SHGB No: 7 / Lirung, Sangihe Talaud, Currently sued by claiming party as the heir.	Putusan Pengadilan Negeri Tuhuna Nomor :57/PDT.G/2-16/ PN.THN. Tuhuna State Court Verdict No 57/ PDT.G/2-16/PN.THN.	Tidak berdampak material terhadap kinerja Perseroan No material impact on the Company's performance
9.	Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Star Power Bussines Pte ltd Action Against the Law Case by Star Power Bussines Pte ltd	Perkara di PN Nomor : 378/ Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst Case at PN No. : 378/Pdt.G/2016/ PN.Jkt Pst	PELNI melakukan pengadaan barang spare part kapal melalui proses lelang, dimana salah satu peserta melakukan gugatan. PELNI conducted he procurement of spare parts of vessels through auction process, in which one of the participants filed suit.	Menunggu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Awaiting Verdict of Central Jakarta District Court.	Tidak berdampak material terhadap kinerja Perseroan No material impact on the Company's performance

## Perkara Hukum yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2016

Selama periode tahun 2016, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana

## Sanksi Administrasi Tahun 2016

Selama periode tahun 2016, Perseroan tidak menerima sanksi administrasi baik yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi baik oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, Bursa Efek Indonesia maupun otoritas lainnya yang terkait dengan Perseroan.

## Law Case Involving the Board of Commissioners and Board of Directors in 2016

Throughout 2016, there was no serving member of Board of Directors and Board of Commissioners who were involved in law case either civil or criminal cases.

## Administrative Sanction 2016

Throughout 2016 period, the Company did not charge by any administrative sanction either to the Company, Board of Commissioners or Board of Directors members by Ministry of SOE as Shareholder, Indonesia Stock Exchange or other authorities related with the Company.



## Akses Informasi Dan Data Perusahaan

### Corporate Data And Information Access

Dalam rangka mendukung komitmen penerapan keterbukaan informasi, Perseroan menyediakan berbagai akses informasi dan data Perusahaan bagi seluruh pemegang saham, pemangku kepentingan dan publik melalui berbagai saluran sebagai berikut:

In order to support information disclosure commitment, the Company provides corporate data and information access to all Shareholders, Stakeholders and public via channels, as follows:

Media Media	Keterangan Description
Email: <a href="mailto:info.corporate@pelni.co.id">info.corporate@pelni.co.id</a> <a href="mailto:infopelni162@pelni.co.id">infopelni162@pelni.co.id</a>	<i>Email info.corporate@pelni.co.id dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi seputar kebijakan (contoh Surat Keputusan Direksi) kepada seluruh pegawai. Email infopelni162@pelni.co.id dimanfaatkan untuk penyampaian keluhan pelanggan.</i> <i>Email info.corporate@pelni.co.id be used to disseminate information about the policy (eg Decree of the Board) to all employees. Email infopelni162@pelni.co.id be used for the delivery of customer comp</i>
Website: <a href="http://www.pelni.co.id">www.pelni.co.id</a>	Biro Teknologi dan Informasi bertindak sebagai admin, dengan menyuplai konten dari tiap divisi yang berkepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk konten Berita & Informasi. <i>Technology and Information Bureau acts as admin, with suppliers of content from each division concerned. The Corporate Secretary is responsible for the content of News &amp; Information.</i>
Portal BUMN	<i>Website yang dikelola Kementerian BUMN yang menyediakan laman untuk tiap-tiap BUMN. Diperbarui setiap kali Perusahaan memiliki informasi yang layak diketahui oleh publik.</i> <i>Website is managed by the Ministry of SOEs that provides a page for each SOE. Updated whenever the Company has adequate information known to the public.</i>
Majalah Camar	Majalah Camar dengan 62 halaman diterbitkan secara berkala. Memuat informasi tentang peristiwa Perusahaan yang disebarluaskan ke kantor pusat, cabang dan kapal. <i>Camar magazine with 62 pages is published periodically. Contains information about events which are propagated to the company's head office, branches and boats.</i>

PELNI juga menyediakan akses informasi lain bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi relevan mengenai berita dan kinerja Perseroan, melalui media, sebagai berikut:

Facebook	: Pelayaran Nasional Indoneisa
Twitter	: @Pelni162
e-Mail	: infopelni162@pelni.co.id
Website	: <a href="http://www.pelni.co.id">www.pelni.co.id</a>
SMS Masking	: Pelni162
Instagram	: Pelniline

PELNI also provides other information access for the Shareholders and Stakeholders to gain relevant information about the Company's news and performance through media, as follows:

Facebook	: Pelayaran Nasional Indoneisa
Twitter	: @Pelni162
e-Mail	: infopelni162@pelni.co.id
Website	: <a href="http://www.pelni.co.id">www.pelni.co.id</a>
SMS Masking	: Pelni162
Instagram	: Pelniline



# Sistem Pelaporan Pelanggaran

## Whistleblowing System

*Whistleblowing System (WBS)* merupakan sistem untuk mengelola pengaduan tentang perilaku melawan hukum, atau perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (*independen*), yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta seluruh insan Perseroan dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Setiap pihak baik insan Perseroan maupun pihak eksternal memiliki kesempatan yang sama dalam melaporkan dugaan tindak pelanggaran di Perusahaan.

Landasan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran di PT PELNI (Persero) merujuk pada SK Pedoman WBS No 12.29/04/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) PT PELNI (Persero). Merujuk pada pedoman tersebut, implementasi WBS di PT PELNI (Persero) bertujuan untuk membangun, menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) agar berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan standar etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terdeteksi secara dini (*early warning system*) dan dapat mengurangi/meminimalisir risiko yang dihadapi oleh Perseroan akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi yang berdampak pada pengurangan biaya (*cost reduction*) dalam mengelola akibat dari terjadinya suatu pelanggaran.

### a. Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- Melalui e-mail perusahaan: [wbs@pelni.co.id](mailto:wbs@pelni.co.id)
- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantara langsung atau melalui pos ke alamat:

Direksi PT PELNI (Persero)  
u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran  
Jl. Gajahmada No. 14  
Jakarta 10130

Untuk pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Penunjang Direksi dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- Melalui e-mail perusahaan: [wbs@pelni.co.id](mailto:wbs@pelni.co.id)
- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantara langsung atau melalui pos ke alamat:

Whistleblowing System (WBS) is a system to manage complaints about action against the law, or unethical, anonymous and independent behavior, which is used to optimize the participation of all the Company and its partners in disclosing the violations occurring in The Company's environment. Each party of both the Company and the external party has equal opportunity in reporting alleged offenses in the Company.

Whistle Blowing System Policy Framework at PT PELNI (Persero) refers to Decree of WBS Guideline No 12.29/04/SK/HKO.01/2016 concerning PT PELNI (Persero) Whistle Blowing System Guideline. Referring to these guidelines, WBS implementation at PT PELNI (Persero) aims to build, implement and manage a Reporting System of Violations (WBS) so that various issues within the Company that are not in accordance with prevailing ethical standards and laws and regulations can be detected early ( Early warning system and can reduce/minimize risks faced by the Company due to financial, operational, legal, safety and reputation violations that result in cost reduction in managing the consequences of a violation.

### a. Submission Violation Report

Complaints of violation indication report by employees are made in writing with the following mechanism:

- Through company e-mail: [wbs@pelni.co.id](mailto:wbs@pelni.co.id)
- Delivering an official letter addressed to the Board of Directors by direct or by post to:

Direksi PT PELNI (Persero)  
u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran  
Jl. Gajahmada No. 14  
Jakarta 10130

For report of violation committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners and Head of Work Unit of the Board of Directors Supporting Organ shall be done in writing with the following mechanism:

- Through company e-mail: [wbs@pelni.co.id](mailto:wbs@pelni.co.id)
- Delivering an official letter addressed to the Board of Directors by direct or by send mailing letter to:

PT PELNI (Persero) *Board of Commissioners*

u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran  
Jl. Gajahmada No. 14  
Jakarta 10130

Beberapa ketentuan terkait penyampaian laporan pengaduan pelanggaran, sebagai berikut:

1. Pengaduan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi oleh fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang disampaikan.
2. Pengaduan pelanggaran tanpa identitas sebaiknya dilengkapi oleh bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang disampaikan.
3. Perseroan wajib memberikan tanda terima jika pengaduan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
4. Apabila pengaduan pelanggaran diajukan oleh perwakilan Stakeholders maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu fotokopi identitas Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders, surat kuasa.
5. Perseroan wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan pelanggaran kepada Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders yang mengajukan pengaduan.

**b. Perlindungan Bagi Whistleblower**

Kebijakan Perlindungan Pelapor mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Melindungi Pelapor
2. Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
3. Perlindungan pelapor meliputi:
  - Jaminan fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, e-mail) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia.
  - Jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.

## PT PELNI (Persero) Board of Commissioners

u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran  
Jl. Gajahmada No. 14  
Jakarta 10130

Several provisions related to the submission of complaint violation report are as follows:

1. Complaints submitted via written violations should attach a photocopy of identity and supporting evidence such as documents relating to transactions conducted and/or allegations of report submitted.
  2. Complaints of an unlawful report should attach by supporting evidence such as documents relating to the transactions conducted and/or allegations of report submitted.
  3. The Company shall provide a receipt if the violation report is filed in writing of identity.
  4. If a violation report is filed by a Stakeholders representative, other than the above documents shall also be submitted another document that is a photocopy of the Stakeholders identity and/or Stakeholders representative, a power of attorney.
  5. The seller shall be required to submit the receipt of the complaint to the Stakeholders and/or Stakeholders representatives who lodged the complaint.
- 
- B. Whistleblower Protection**
- The Whistleblower Protection Policy covers the following aspects:
1. Protecting the Whistleblower
  2. The protection of the Whistleblower is intended to encourage the courage to report the offense.
  3. Protection of the Whistleblower includes:
    - Guaranteed reporting facility facilities (telephone, mail, e-mail) or an independent, free and confidential Ombudsman.
    - Security of confidentiality of the identity of the Whistleblower and the contents of the report. This protection is provided when the Whistleblower provides an identity and information that can be used to contact the Whistleblower.



- Jaminan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik dan perlakukan merugikan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor.
  - Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.
4. Perlindungan di atas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah.

Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroan dapat diselamatkan dimana penghargaan akan diberikan melalui kebijakan Direksi.

Di sisi lain, Perseroan juga menerapkan sanksi bagi pelapor yang menyampaikan laporan palsu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Guarantees protection against retaliation from the reporter or organization. Protection from pressure, from postponement of promotion, dismissal, lawsuit, property, to physical acts and other harmful treatment. This protection is not only for Whistleblower but can also be extended to family members of the reporting party.
  - Guarantee of confidentiality of communication/information channels with the Whistleblower. Information on follow-up implementation, in the form of when and how and to the institution where the follow-up is submitted. This information is conveyed confidentially to the complete complainant.
4. The above protection is not granted to the Whistleblower who is proven to report false and / or slander.

The Company may reward Whistleblower for provable violations so that the assets / finances of the Company can be saved where the award will be granted through the Directors' policies.

On the other hand, the Company also applies sanctions to reporters who submit false reports in accordance with applicable laws and the applicable legislation.



### c. Penanganan pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan di PT PELNI (Persero), sebagai berikut:

### c. Report Process

Report handling mechanism at PT PELNI (Persero) is as follows:





**Skema Proses Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Direksi**  
**Whistle Blowing System Process Scheme Indicated Committed by Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Structure of the Board of Commissioners and Board of Directors**





**Skema Proses Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran  
Diduga dilakukan oleh Karyawan PT PELNI (Persero)**  
*Whistle Blowing System Process Scheme  
Indicated Committed by Employees PT PELNI (Persero)*





**d. Pihak yang mengelola pengaduan;**

Untuk menangani laporan dugaan pelanggaran, Direksi telah membentuk:

1. Pengelola Whistle Blowing System

Pengelola Whistle Blowing System adalah Unit yang melekat pada Struktural Sekretaris Perusahaan.

Tugas meliputi: Menerima hasil dari laporan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (KP3), menyiapkan laporan berkala dan sosialisasi WBS.

2. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, maka Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (KP3) dan ditetapkan oleh Direksi meliputi unsur yang mewakili Direksi, SPI, Divisi SDM dan Divisi Hukum dengan susunan Tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Direktur dan Direktur yang ditunjuk

Pengawas : Head of Internal Audit

Ketua Tim : SPI

Anggota : Divisi SDM dan Divisi Hukum

3. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Direksi, dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris meliputi unsur Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dengan susunan Tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Komisaris Utama

Pengawas : Ketua Komite Audit

Ketua Tim : Anggota Komite Audit

Anggota : Komite Manajemen Risiko

**d. The party managing the complaint;**

To handle the violation report, the Board of Directors has established:

1. Whistle Blowing System Manager

Whistle Blowing System Manager is a Unit attached to Structural Corporate Secretary.

Duty: Receiving results from reports of the Grievance Complaints Management Team (KP3), preparing WBS periodic reports and dissemination.

2. For alleged violations committed by employees, the Board of Directors shall establish a Complaints Grievance Management Team (KP3) and set by the Board of Directors covering elements representing the Board of Directors, SPI, Human Resources Division and Legal Division with the following Team Structure:

Person in Charge: Designated Director and Director

Supervisor : Head of Internal Audit

Team Leader : Internal Audit Unit

Members : Human Resources Division and Legal Division

3. For alleged violations committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Directors, established and determined by the Board of Commissioners comprising the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management Committee with Team Composition as follows:

Person in Charge: President Commissioner

Supervisor : Chairman of the Audit Committee

Team Leader : Member of Audit Committee

Members : Risk Management Committee

**e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir**

Per 31 Desember 2016, tidak ada laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggan Perseroan.

**f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.**

Per 31 Desember 2016, tidak ada laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggan Perseroan sehingga tidak terdapat sanksi/tindak lanjut atas pengaduan atau laporan yang diterima melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

**e. Total Report Received and Processed in Recent Fiscal Year**

As of December 31, 2016, there was no report or complaint submitted via Whistle Blowing System

**f. Punishment/Follow-Up of Completed Report in the Fiscal Year**

As of December 31, 2016, there was no report or complaint submitted through Whistle Blowing System, therefore, there was no punishment/follow-up on the accepted report received via the Whistle Blowing System.





# Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

## Corporate Social Responsibility

.....

“ Per 31 Desember 2016, PT PELNI (Persero) telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.868.055.656 untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial kepada pelanggan melalui pelayanan *contact center 162*.

As of December 31, 2016, PT PELNI (Persero) had allocated budget of Rp1,868,055,656 for the implementation of social responsibility activity to the customers through contact center 162 service.





*"Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial berlandaskan pada komitmen dan tanggung jawab sebagai BUMN untuk membantu Pemerintah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.*

*"Implementation of Social Responsibility Activity refers to commitment and responsibility as a SOE to help the Government in developing the economy and public welfare as well as to contribute in preserving the environment."*





## Kebijakan CSR

Kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) di PT PELNI (Persero) merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tanggal 03 Juli 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Merujuk pada landasan kebijakan tersebut, PT PELNI (Persero) melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan PKBL tersebut juga melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah usaha PT PELNI (Persero).

Pelaksanaan CSR PT PELNI (Persero) terbagi menjadi 4 (empat) bidang, yaitu:

- Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup
- Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
- Tanggung Jawab Sosial Bidang Perlindungan Pelanggan

## CSR Policy

The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) policy at PT PELNI (Persero) refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise (BUMN) No. PER-09/MBU/07/2016 dated July 3, 2016 regarding Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises and the latest amendment in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise. PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 concerning Amendment to Regulation of the Minister of SOEs no. PER-09/MBU/07/2016 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.

Referring to the foundation of the policy, PT PELNI (Persero) implemented the Partnership and Community Development Program (PKBL) with the aim of assisting the Government in implementing more equitable development and improving the welfare of the community. PKBL's activities also involve the stakeholders, especially the community that is located around the business area of PT PELNI (Persero).

CSR implementation PT PELNI (Persero) is divided into 4 (four) areas, namely:

- Environmental Responsibility for the Environment
- Social Responsibility in Employment, Occupational Safety and Health
- Social Responsibility in Social and Social Development
- Social Responsibility for Customer Protection



# Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup

## Social Responsibility In Environment

PT PELNI (Persero) menempatkan lingkungan hidup sebagai salah satu elemen utama dalam keberlanjutan Perseroan. Berlandaskan pada komitmen tersebut, PT PELNI (Persero) senantiasa berupaya untuk meminimalisir dampak kegiatan bisnis dan operasional terhadap lingkungan hidup, baik di wilayah sekitar Kantor Pusat maupun rute pelayaran kapal PELNI. Selama tahun 2016, PT PELNI (Persero) mewujudkan tanggung jawab bidang lingkungan hidup melalui implementasi program *Green Office* dan pelaksanaan sertifikasi kapal dalam bidang lingkungan hidup.

### Program Green Office

Pelaksanaan Program *Green Office* merujuk pada dokumen kedinasan di lingkungan PT PELNI (Persero) No: 01/HK.02.01/Dir.SDM dan Umum /VII/2013. Selain itu PT PELNI (Persero) juga memiliki Surat Edaran No: 07/SE/Dir. SDM dan UM /VI.2013 tentang penghematan Listrik dan Air. Melalui Program *Green Office*, PT PELNI (Persero) bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus sebagai bagian dari program efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan.

Program *Green Office* dilaksanakan melalui beberapa aktivitas, sebagai berikut:

1. Menerapkan hemat kertas dan tinta dengan cara mengurangi penggunaan kertas, penyimpanan dokumen dalam bentuk *soft copy*, pemanfaatan *email* sebagai pemanfaatan kertas bekas dalam mencetak dokumen yang belum final dan menggunakan *economode version* ketika melakukan pencetakan pada alat *printer*.
2. Menerapkan hemat listrik dengan cara mematikan komputer dan peralatan elektronik lainnya jika akan ditinggal atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, mengatur suhu ruangan agar tidak terlalu dingin, serta menghindari penggunaan *lift* dan menggunakan tangga jika hanya ingin pindah ke 1 atau 2 tingkat lantai yang berbeda.
3. Menerapkan hemat air dengan cara menggunakan air sesuai kebutuhan dan menutup kran air apabila tidak diperlukan.
4. Mengurangi polusi udara dengan cara pegawai dilarang untuk merokok di seluruh area dalam gedung, area merokok hanya diperbolehkan di tempat yang telah disediakan.
5. Melakukan pengelolaan limbah kertas, tinta *printer*, dan alat tulis melalui jasa pengelolaan sampah.

PT PELNI (Persero) places the environment as one of the key elements of the Company's sustainability. Based on this commitment, PT PELNI (Persero) strives to minimize the impact of business activities and operations on the environment, both in the area around the Head Office and PELNI ship cruises. During 2016, PT PELNI (Persero) embodies environmental responsibility through the implementation of the Green Office program and the implementation of ship certification in the environmental field.

### Green Office Program

Implementation of Green Office Program refers to the official document environment PT PELNI (Persero) No: 01 / HK.02.01 / Dir.SDM and General / VII / 2013. In addition PT PELNI (Persero) also has Circular Letter No: 07 / SE / Dir. HR and UM / VI.2013 on Electricity and Water savings. Through the Green Office Program, PT PELNI (Persero) aims to create an environmentally friendly work environment in order to preserve the environment as well as part of the resource efficiency program that has been implemented in a sustainable manner.

Green Office Program implemented through several activities, as follows:

1. Apply paper and ink-saving by reducing paper usage, storing documents in soft copy, utilizing e-mail as the use of waste paper in printing unfinished documents and using eco mode version when printing on printer tools.
2. Applying power saving by turning off the computer and other electronic equipment if it will be left or not used for a long time, set the room temperature not too cold, and avoid the use of elevators and use the stairs if you just want to move to 1 or 2 levels of floor different.
3. Applying water-saving by using water as needed and closing the water faucet if not needed.
4. Reducing air pollution by means of employees are prohibited to smoke in all areas of the building, smoking area is only allowed in places that have been provided.
5. To manage waste paper, printer ink, and stationery through waste management services.



### Sertifikasi Lingkungan Hidup 2016

Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dalam Bidang Lingkungan Hidup, PT PELNI (Persero) juga telah melakukan sertifikasi lingkungan hidup untuk armada kapal penumpang melalui perolehan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal yang diterbitkan sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 untuk memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim untuk Kapal Motor (KM) Bukit Raya. Sertifikat tersebut diperoleh pada tanggal 14 Desember 2016 dan berlaku hingga 21 September 2017.

### Realisasi Anggaran Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan

PT PELNI (Persero) tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan program tanggung jawab sosial bidang lingkungan tahun 2016 karena telah terintegrasi dalam program kerja dan operasional.

### Environment Certification 2016

As part of Environmental Responsibility to the Environment, PT PELNI (Persero) has also conducted environmental certification for the fleet of passenger ships through the acquisition of the National Certificate of Pollution Prevention from Ships issued pursuant to the Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2008 to comply with Regulation of the Minister of Transportation No. 29 of 2014 on the Prevention of Maritime Environmental Pollution for Motor Vessel (KM) Bukit Raya. The certificate was obtained on December 14, 2016 and is valid until 21 September 2017.

### Realization of Social Responsibility in Environment Aspect

PT PELNI (Persero) did not allocate particular budget for social responsibility program in environment aspect in 2016 due to had been integrated with working and operational programs.



## Tanggung Jawab Sosial Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

### Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspect

Pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) salah satunya merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 09.08/1/SK/HKO.O1/2015 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok & Fungsi PT PELNI (Persero) tanggal 8 September 2015. Melalui SK tersebut, PT PELNI (Persero) menunjuk DPA (*Designated Person Ashore*) untuk melakukan koordinasi dengan membawahi 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Keselamatan & Operasi, Bidang Keteknikan Kapal dan Bidang SMK3&LH.

Unit Kerja DPA-ISM Code memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pengelolaan kegiatan pengawasan keselamatan operasi jasa angkutan laut dan penyiapan saran-saran ahli kemaritiman dalam rangka penerapan ketentuan *International Maritime Organization* (IMO) tentang ISM-Code dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), agar pengoperasian usaha jasa angkutan laut Perusahaan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dicapai kinerja keselamatan serta keamanan di lingkup kerja perusahaan yang optimal.

Komitmen PT PELNI (Persero) terhadap bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) juga diperkuat melalui Pernyataan Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan yang ditandatangani oleh Direksi pada tahun 2015 dan telah disebarluaskan kepada seluruh awak kapal dan karyawan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.



Menunjuk Disposisi Direktur Utama No. 812 atas Nota Dinas Head Of DPA-ISM Code No.11.17/01/ND240/2015 dan perihal Jadwal Rencana Pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit

Implementation of social responsibility in occupational health and safety (HSE) aspect refers to Board of Directors Decree Number 09.08/1/SK/HKO.01/2015 regarding Organization Structure, Main Duty and Function of PT PELNI (Persero) dated September 8, 2015. Through this Decree, PT PELNI (Persero) has appointed DPA (Designated Person Ashore) to coordinate and supervise 3 (three) units, among others, Safety & Operations Unit, Ship Technical Units and SMK3&LH Unit.

The DPA-ISM Code Working Unit has functions in relation with marine transportation service operation safety monitoring activity and to submit recommendation from marine experts with regards to implementation of International Maritime Organization (IMO) regulation on ISM-Code and Occupational Health and Safety Management System (OHSE), therefore, the maritime transportation service operated by the Company will always comply with prevailing Law and achieve optimum safety standard under the Company's circumstances.

Commitment of PT PELNI (Persero) on Occupational Health and Safety (HSE) aspect is also enforced through Statements of Shipping Safety and Environment Protection as signed by the Board of Directors in 2015 and disseminated to all ship crew and employees at Head Office and Branch Office.

Pursuant to President Director Disposition No. 812 on Head of DPA-ISM Code Official Memo No. 11.17/01/ND240/2015 and regarding Internal Audit and External Audit DOC Internal Audit



DOC Kantor Pusat, ISM-Code dan SMK3 serta Jadwal Rencana Check on The Spot ke kapal Tahun 2016.

Pada unit kerja DPA-ISM Code terdapat dua jenis program kerja, yaitu:

- a) ISM-Code yang didasari oleh regulasi IMO (*International Maritime Organization*) yang juga dikonsolidasikan pada SOLAS (*Safety of Life at Sea*) 1974 CHAPTER IX.
- b) SMK3 yang didasari oleh konvensi ILO (*International Labour Organization*) beserta turunannya seperti UU No.1 Th. 1970 tentang Kesehatan Kerja dan Peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3).

Program kerja lain dalam bidang SMK3 selama tahun 2016, sebagai berikut:

1. Kalibrasi peralatan K3 (*Lux Meter, Sound Level Meter, Indoor Air Quality*, dan *Thermometer Ruang*)  
Kalibrasi peralatan K3 belum dapat terealisasi dikarenakan peralatan K3 yang dimiliki PT PELNI (Persero) sudah *out of date* sehingga dialihkan dengan pembelian peralatan pengetesan radiasi, pH Meter, clamp meter (mengukur arus), dan laser photo tachometer.
2. Pengadaan *Safety Sign* (Rambu K3) di Gedung PELNI Pusat  
Pengadaan *Safety Sign* (Rambu K3) di Gedung PELNI Pusat berupa jalur evakuasi, tangga darurat, cara pemakaian hydran, tanda exit, larangan merokok, lambang APAR, tanda tegangan tinggi untuk di kantor pusat.
3. Distribusi Manual SMK3 & Inspeksi dan Sosialisasi SMK

Manual SMK3 Versi 01 telah disahkan sesuai dengan SK Direksi No. 03.15/1/SK/HKO.01/2016 tanggal 15 Maret 2016 dan telah didistribusikan ke Unit Kerja Kantor Pusat, PT PELNI (Persero) Cabang Cipayung, Makassar, Bitung dan Surabaya.

Kegiatan Inspeksi & Sosialisasi SMK3&LH selama tahun 2016 telah dilaksanakan ke Kantor Cabang antara lain Cipayung, Makassar, Bitung dan Surabaya pada saat penyerahan Buku Pedoman SMK3&LH.

4. Pengesahan Tim P2K3 oleh Disnaker  
Pengesahan Tim P2K3 PT PELNI (Persero) telah disahkan oleh Disnaker sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 1246 Tahun 2016 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan.
5. Pelaksanaan study banding SMK3  
Pelaksanaan study banding SMK3 belum dapat terealisasi.

Implementation Plan at Head Office, ISM-Code and SMK3 as well as Ship On the Spot Check Schedule in 2016.

In the DPA-ISM Code working unit, there are two main working programs, as follows:

- a. ISM-Code that is referring to IMO (*International Maritime Organization*) regulation that is also consolidated to SOLAS (*Safety of Life at Sea*) 1974 Chapter IX.
- b. SMK3 that is referring to ILO (*International Labour Organization*) convention and its subsidiary regulations such as Law Number 1 of 1970 on Occupational Health and Government Regulation Number 50 of 2012 on Occupational Health and Safety Management System (SMK3).

Other working programs in SMK3 aspect in 2016 are as follows: HSE Tools Calibration (Lux Meter, Sound Level Meter, Indoor Air

1. Quality and Room Thermometer)  
HSE tools calibration was failed to be executed due to the HSE owned by PT PELNI (Persero) were out of date that were transferred by purchasing radiation test, pH Meter, clamp meter (calculating stream) and laser photo tachometer.

2. Safety Sign (HSE Signage) at PELNI Head Office  
Procurement of Safety Sign (HSE Sign) at PELNI Head Office as evacuation route, emergency stairs, hydrant use SOP, exit sign, no smoking sign, APAR sign, high voltage sign at Head Office.
3. Distribution of SMK3 Manual & SMK Inspection and Socialization  
The SMK Manual Version 01 has been validated under Board of Directors Decree Number 03.15/1/SK/HKO.01/2016 dated March 15, 2016 and had been distributed to Working Units at Head Office, PT PELNI (Persero) Cipayung, Makassar, Bitung and Surabaya Branch Offices.

The SMK3&LH Inspection & Socialization in 2016 had been done to Branch Offices such as Cipayung, Makassar, Bitung and Surabaya during the hand over of SMK3&LH Manual Book.

4. Validation of P2K3 Team by Disnaker  
Validation by P2K3 Team PT PELNI (Persero) had been validated by Disnaker according to Decree of Head Of Man Power and Transmigration Agency DKI Jakarta No. 1246 regarding Validation of Occupational Health and Safety Steering Committee (P2K3) in the Company.
5. Implementation of SMK3 Benchmark  
Implementation of SMK3 Benchmark had not been executed.



## Praktik Kesetaraan Gender

PT PELNI (Persero) menjamin kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh karyawan mulai dari tahap perekrutan, pengembangan karir hingga evaluasi kinerja. PT PELNI (Persero) tidak mengakui adanya diskriminasi berdasarkan gender maupun karakter lain seperti agama maupun etnis di mana kebijakan dan keputusan dalam aspek ketenagakerjaan sepenuhnya mempertimbangkan kinerja pegawai yang bersangkutan. Praktik kesetaraan gender di PT PELNI (Persero) juga tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 09.30/5/SK/HKO.01/2015 tentang Pola Pengembangan Karir Jabatan Pegawai PT PELNI (Persero).

## Tingkat Turnover Karyawan 2016

Berdasarkan data demografi karyawan tahun 2016, per 31 Desember 2016, jumlah pegawai Perseroan adalah 4.563 orang. Jika dibandingkan dengan total 4.714 pegawai pada tahun 2015, tercatat penurunan sebanyak 151 pegawai yang disebabkan oleh pegawai pensiun dan keluar. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis, PT PELNI (Persero) telah melakukan perekrutan 10 pegawai darat dan 973 pegawai laut, atau total 983 pegawai.

Dengan demikian, rasio Turnover karyawan pada tahun 2016 adalah sebesar 3,3%. Rasio tersebut dinilai cukup minim dan menjadi tolok ukur lingkungan kerja PT PELNI (Persero) yang kondusif bagi seluruh karyawan.

## Tingkat Kecelakaan Kapal 2016

Untuk periode tahun 2016, Perseroan membuat 3 (tiga) kategori laporan keadaan darurat, yaitu laporan berita acara keadaan darurat yang dikirimkan ke unit DPA, laporan keadaan darurat yang dirapatkan dalam MRT (*Management Response Team*), dan laporan keadaan darurat yang dilaporkan ke Mahkamah Pelayaran. Tidak semua laporan keadaan darurat yang dikirimkan ke DPA kemudian dirapatkan ke dalam rapat MRT, hal ini dikarenakan hanya kasus-kasus yang membutuhkan tindakan penanggulangan lebih lanjut dengan koordinasi dari tim dan unit kerja terkait.

Laporan mengenai keadaan darurat yang terjadi pada kapal-kapal PELNI Tahun 2016, sebagai berikut:

## Gender Equality Practice

PT PELNI (Persero) guaranteed fair career equality and opportunity to all employees since recruitment, career development until performance assessment phases. PT PELNI (Persero) does not recognize any discrimination based on gender or other characters such as religion and ethnicity where the employment policy and decree are fully considered performance of the concerned employees. The gender equality practice at PT PELNI (Persero) is also stipulated in Board of Directors Decree Number 09.30/5/SK/HKO.01/2015 regarding PT PELNI (Persero) Employee Career Development Scheme.

## Employee Turnover 2016

According to employee demography data in 2016, as of December 31, 2016, total employees of the Company was 4,563 employees. If compared with total employees of 4,714 in 2015, there was a decrease of 151 employees due to retired and resigned employees. On the other hand, to fulfill operational and business development needs, PT PELNI (Persero) recruited 10 ground employees and 983 offshore employees or total of 983 employees.

Therefore, Employee Turnover Ratio in 2016 stood at 3.3%, the ratio was evaluated to be minimum and became indicator of conducive working place at PT PELNI (Persero) for all employees.

## Ship Accident Rate 2016

For 2016 period, the Company classified 3 (three) emergency report category that are emergency report to be sent to DPA Unit, emergency report to be discussed with MRT (Management Response Team) and emergency report to be reported to Shipping Court. Not all of the emergency reports sent to DPA will be discuss in the MRT meeting due to only cases that required further mitigation process under coordination of the team and related units.

Emergency report of PELNI ships in 2016 is as follows:



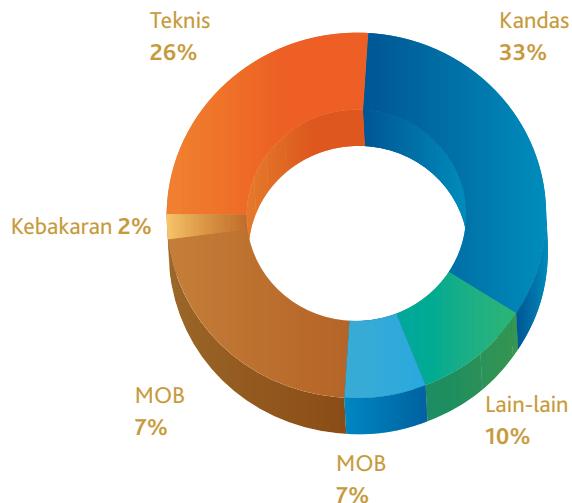
No.	Kategori Keadaan Darurat Emergency Case Category	Tahun Year					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Tubrukan/Crash	6	2	8	2	3	9
2.	Kebakaran/Fire	-	2	-	1	1	1
3.	Teknikal error/Error Technical	4	4	3	3	10	11
4.	Orang jatuh ke laut/People fell into the sea	2	3	1	-	6	3
5.	faktor alam/Natural Disaster	2	1	-	-	-	0
6.	kandas/ larat/Grounding	-	5	1	2	4	14
7.	lain-lain/Others	6	1	1	2	8	4
Total Kejadian/Total Case		20	18	14	10	32	42

Pada tahun 2016 terdapat beberapa kejadian keadaan darurat maupun *near misses* yang dikirimkan ke Unit Kerja DPA-ISM Code diantaranya 9 (Sembilan) kejadian tubrukan, 1 (satu) kejadian kebakaran, 11 kerusakan teknis, 3 (tiga) orang jatuh ke laut, 14 kejadian kandas, 4 (kejadian) lain-lain yang meliputi kehilangan jangkar, trafo BT terbakar.

Gambaran keadaan kasus darurat Kapal PELNI tahun 2016 sesuai klasifikasi kasus darurat, dijelaskan dalam diagram berikut:

In 2016, emergency and near misses cases that were reported to DPA – ISM Code Working Unit included 9 (nine) crash cases, 1 (one) fire case, 11 technical disruptions, 3 (three) people fell into the sea, 14 grounding cases, 4 (four) other cases including lost of anchor, burned BT Travo.

Illustration of PELNI ship emergency case in 2016 based on classification of the emergency case is explained in chart below:



Sebagai langkah antisipasi dan penanganan terhadap keadaan kasus darurat tersebut, Perseroan akan melakukan pengembangan *control system database*, dalam rangka untuk memudahkan dalam memonitor masa berlaku sertifikat COP dan COC serta membuat program *control document* terkait kelancaran operasional penerbitan DOC, SMC, dan ISSC. Perseroan juga akan melaksanakan *safety drill* rutin tahunan yang melibatkan pihak kapal, kantor darat, dan instansi terkait di luar perusahaan yang terkoordinir dengan baik sehingga tercipta kesiapan dan kerja sama yang baik antar semua pihak dalam menangani kondisi darurat keselamatan.

As anticipatory step and mitigation on those emergency cases, the Company will develop control system database, in order to ease monitoring validity of COP and COC certificates as well as developing control document program related with DOC, SMS and ISSC issuance operational support. The Company will also perform regular safety drill involving the ship crews, ground office and other related institutions as external of the Company that are well-coordinated to establish readiness and harmonious cooperation among all parties in handling safety emergency condition.



## Tanggung Jawab Sosial Bidang Kemasyarakatan

### Social Responsibility in Community Sector

Selama tahun 2016, kegiatan tanggung jawab sosial di bidang kemasyarakatan dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah dimulai sejak tahun 1990 dengan mitra binaan tersebar di seluruh Indonesia.

#### a. Program Kemitraan

Jumlah mitra binaan PT PELNI (Persero) sejak awal melakukan pembinaan sampai dengan akhir tahun 2016 mencapai 1.240 mitra binaan dengan kelompok mitra binaan terdiri dari 198 koperasi dan 1.042 usaha kecil di sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, jasa dan sektor lain.

Pada tahun 2016 untuk penyalurannya terdapat penambahan mitra binaan sebanyak 47 unit usaha kecil, dengan total dana pinjaman mitra binaan yang telah disalurkan sebesar Rp2.065.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.100.000.000. Dengan demikian rincian jumlah mitra binaan PT PELNI (Persero) sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Mitra Binaan Partners	Jumlah Penyaluran Total Disbursement	Jumlah Mitra Binaan Total Partners
1.	Usaha Kecil/Small Enterprise	Rp32.214.478.814	1.042
2.	Koperasi/Cooperatives	Rp3.518.412.007	198
Total/Total		Rp35.732.890.821	1.240

Penyaluran dana Kemitraan dilaksanakan di beberapa provinsi yaitu: DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jambi dan Lampung dengan jumlah dana yang telah disalurkan sebesar Rp2.065.000.000 atau 98% dari anggaran 2016. Penyaluran lebih dititikberatkan di wilayah Indonesia bagian Barat, hal ini disebabkan agar lebih memudahkan melakukan *monitoring* dan efektifnya penyaluran. Sedangkan penyaluran untuk hibah tidak terealisir mengingat kondisi ketersediaan dana yang masih terbatas.

#### b. Program Bina Lingkungan

Perseroan memberikan bantuan melalui Program Bina Lingkungan meliputi bantuan bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan masyarakat, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan pembangunan sarana rumah ibadah, bantuan pelestarian alam serta bantuan sosial kemasyarakatan.

Throughout 2016, social responsibility activity in community aspect was done through partnership and Community Development (PKBL) Program that has been started since 1990 with partners spread across Indonesia.

#### a. Partnership Program

Total partners of PT PELNI (Persero) since the beginning of development program until the end of 2016 reached 1,240 partners with partner groups consisting of 198 cooperatives and 1,042 small enterprise in industry, trading, agriculture, plantations, livestock, fisheries, service and other sectors.

In 2016, the disbursement recorded additional 47 units of small enterprise with total partnership loans for partners disbursement achieved Rp2,065,000,000 from the budget of Rp2,100,000,000. Therefore, total partners of PT PELNI (Persero) as of December 31, 2016 is as follows:

Partnership program disbursement was done in several provinces such as DKI, West Java, Central Java, East Java, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jambi and Lampung with total disbursed funds achieved Rp2,065,000,000 or 98% from the budget in 2016. The disbursement was focused on Western Indonesia area considering easier monitoring and effective disbursement. However, grants disbursement was failed to be executed due to funds availability limitation.

#### b. Community Development Program

The Company donated through Community Development Program included natural disaster relief, education and training, health improvement, public facilities and infrastructures development, religious place construction, natural conservation and social community donations.



Sumber dana Bina Lingkungan berasal dari saldo akhir tahun 2015, jasa giro, serta alokasi laba dengan total keseluruhan Rp669.798.194,90 dan untuk penyaluran dana Bina Lingkungan tahun 2016 telah direalisasikan sebesar Rp285.000.000 dalam bentuk pemberian sumbangan/bantuan korban bencana alam, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Rekapitulasi penyaluran per bentuk bantuan per wilayah, sebagai berikut:

No.	Penerima Bantuan Beneficiaries	Provinsi Province	Jumlah Penyaluran Total Disbursement
1.	TPA Nurul Ummi	Banten	Rp10.000.000
2.	Masyarakat Kurang Mampu	Kalimantan Barat	Rp150.000.000
3.	Yayasan Wasilah	DKI Jakarta	Rp5.000.000
4.	Yayasan Al-Mukhlisin	DKI Jakarta	Rp5.000.000
5.	Yayasan Arrahman	DKI Jakarta	Rp5.000.000
6.	Yayasan Alhidayah	DKI Jakarta	Rp5.000.000
7.	Yayasan Zakat	Jawa Barat East Java	Rp5.000.000
8.	Ponpes Asy Syafiah	DKI Jakarta	Rp50.000.000
9.	Korban Bencana Alam	Aceh	Rp50.000.000
Total			Rp285.000.000

Selain kegiatan PKBL tersebut, PT PELNI (Persero) juga melaksanakan kegiatan CSR bidang kemasyarakatan lain selama tahun 2016, sebagai berikut:

### Kegiatan BUMN Untuk Negeri

PT PELNI (Persero) turut berperan serta dalam mensukseskan kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri tahun 2016 bersama-sama dengan Pegadaian, Semen Padang dan HIN di wilayah Sumatera Barat yang dikoordinir oleh Kementerian BUMN. Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri tahun 2016 telah selesai dilaksanakan di Sumatera Barat, melalui kegiatan sebagai berikut:

Source of Community Development budget was allocated from final balance in 2015, current accounts fee as well as profit allocation with total of Rp669,798,194.90 and for the Community Development funds disbursement in 2016, the amount achieved Rp285,000,000 as natural disaster victim donation/relief, education and social community programs.

Recapitulation of disbursement by donation type per region is as follows:

Besides the PKBL activity, PT PELNI (Persero) also implemented other CSR activities in social community aspect, as follows:

### SOE For the Country Program

PT PELNI (Persero) contributes in supporting SOE For The Country Program in 2016 in collaboration with Pegadaian, Semen Padang and HIN in West Sumatera area that was coordinated by Ministry of SOE. The SOE For The Country activity in 2016 had been completed for West Sumatera through activities as follows:



1. Peringatan HUT RI Ke-71
  - a. Upacara
  - b. Jalan Sehat 5 Km
  - c. Pasar Murah
  - d. Kegiatan Lomba-lomba
  - e. Pemutaran Film
  - f. Pembinaan Narapidana
  - g. Penyediaan Sarana Air Bersih
  - h. Pembangunan Tempat Penitipan Anak di Pasar
  - i. Pembinaan Mantan Atlet Nasional
  - j. Pembinaan Desa Terpencil, Perbatasan, dan Rawan Konflik
2. Siswa Mengenal Nusantara
3. Bedah Rumah Veteran
4. BUMN Mengajar

### Bantuan di Bidang Pendidikan

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Pada tahun 2016, PT PELNI (Persero) memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada anak pegawai PT PELNI (Persero) yang diberikan selama 1 (satu) semester untuk setiap anak. Total bantuan beasiswa yang diberikan pada tahun 2016 mencapai Rp59.250.000.

### Realisasi Anggaran Tanggung Jawab Sosial Kemasayarakatan 2016

Pelimpahan dana dari BUMN Pembina PT PELNI (Persero) untuk PKBL tahun 2016 sebesar Rp986.431.572.

1. RI 71<sup>st</sup> Anniversary
  - a. Independence Day Ceremony
  - b. 5 KM Fun Walk
  - c. Bazaar
  - d. Competitions
  - e. Movie Screening
  - f. Inmates Development
  - g. Clean Water Facilities Provision
  - h. Day Care Construction at the Market
  - i. Ex-National Athlete Development.
  - j. Remote, Border and Conflict Zone Village Development.
2. Students Meet The Country
3. Veterans House Renovation
4. SOE Teaching

### Donation in Education Sector

Social donation for society live in the Company's operational area aims to achieve social welfare and maintain harmony between the Company and surrounding community.

In 2016, PT PELNI (Persero) donated educational support as scholarship for children of PT PELNI (Persero) employees where each child receive allowance for 1 (one) semester. Total scholarship donation in 2016 amounted to Rp59,250,000.

### Realization of Responsibility on Social Community Aspect Budget 2016

Budget transfer from PT PELNI (Persero) Steering SOE for PKBL in 2016 amounted to Rp986,431,572.



## Tanggung Jawab Sosial Kepada Pelanggan Social Responsibility to Customers

### Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kepada Pelanggan Tahun 2016

PT PELNI (Persero) telah menyusun rencana kerja untuk aktivitas Tanggung Jawab Sosial Kepada Konsumen serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun 2016 melalui koordinasi lintas direktorat, *Monday Briefing*, Rapat Pimpinan, dan Rapat Terbatas Direktorat/Divisi.

Sasaran atau target rencana kegiatan/program kerja pada tahun 2016, antara lain:

- 1) Terpenuhinya Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut dalam aspek kenyamanan mencakup mutu dan cita rasa makanan, kebersihan, *hospitality*, dan hiburan di atas kapal.
- 2) Tertib administrasi.
- 3) Efisiensi dalam penggunaan peralatan dapur.
- 4) Peningkatan *control* terhadap pelaksanaan kegiatan layanan penumpang dan awak kapal.
- 5) Tersedianya informasi produk perusahaan (Jadwal, Tarif, Reservasi, *customer care* dan informasi lainnya).

Untuk mencapai target program kerja tersebut, Perseroan telah mengimplementasikan kebijakan pelayanan jasa tahun 2016, yaitu:

- 1) Perubahan sistem pengelolaan permakanan dari pemberian modal kerja ke kapal menjadi *supply* bahan makanan untuk meningkatkan akuntabilitas administrasi.
- 2) Peningkatan layanan makanan siap saji (*frozen food* uji coba di KM. Kelud dan KM. Sinabung)
- 3) Peningkatan mutu masakan melalui pelatihan juru masak di atas kapal dan modernisasi alat masak (*combi oven*)
- 4) Penetapan standar pelayanan penumpang di atas kapal.
- 5) Peningkatan *customer retention* melalui SMS Masking PELNI162
- 6) Peningkatan layanan informasi dan penjualan tiket dengan rekrutmen Petugas loket/PELNI Point Cabang
- 7) Peningkatan kompetensi petugas *contact center* melalui *training service excellent*.

### Social Responsibility to Customers Activity Plan 2016

PT PELNI (Persero) has prepared working plan for Social Responsibility to Customers activity as well as evaluated the implementation of working program 2016 through cross directorate coordination, Monday Briefing, Executive Meeting and Directorate/Division Limited Meeting.

Objectives or target of activity/working program plan in 2016 are as follows:

- 1) Fulfillment of Marine Transportation Passenger Service Standard in convenience aspect including quality and taste of the foods, cleanliness, hospitality and onboard entertainment.
- 2) Administration order.
- 3) Efficiency of cooking utensils use.
- 4) Improving control on implementation of passenger and crew service activities.
- 5) Availability of product information (schedule, tariff, reservation, customer care and other information).

To achieve target of those working programs, the Company had implemented service policy in 2016, as follows:

- 1) Change in meal management system starting from working capital provision to cooking material supply to improve administration accountability.
- 2) Increase number of fast food service (*frozen food* trial at KM Kelud and KM Sinabung).
- 3) Improve quality of the cooking through onboard chef training and cooking utensils modernization (*combi oven*).
- 4) Stipulation of onboard passenger service standard.
- 5) Intensify customer retention via SMS Masking PELNI 162.
- 6) Add ticket information and sales service through Locket/PELNI Point Branch Officer recruitment.
- 7) Develop competency of contact center officer through service excellent training.



## Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Kepada Pelanggan

Kegiatan tanggung jawab sosial kepada pelanggan selama tahun 2016 dilaksanakan di bawah koordinasi Divisi Pelayanan Jasa meliputi 4 (empat) bidang, yaitu:

- 1). Bidang *Service Quality Assurance*
  - a) Penyusunan SOP Pelayanan Penumpang dan Awak Kapal di atas kapal
  - b) Pengadaan Inventaris Pelayanan Jasa
  - c) *Check on the spot* ke atas kapal
  - d) Pengadaan Sarana Informasi (Sticker & Akrilik)
- 2) Bidang *Food & Beverages*
  - a) Investasi Combi Oven (KM. Kelud & KM. Sinabung)
  - b) Penerapan Layanan Makan Sistem *Raming*
- 3). Bidang *Hospitality*
  - a) Pengadaan Cover + Kasur kelas ekonomi (dilakukan secara bertahap)
  - b) Pengadaan Cover + Kasur eks. Kelas (*single class*)
  - c) Pengadaan Fasilitas TV Media
- 4). Bidang Layanan Pelanggan
  - a) Pengadaan Aplikasi SMS Blast
  - b) *Rewarding Quiz Social Media*
  - c) Pelatihan Bid. *Customer Care*

Selain melalui divisi-divisi tersebut, guna mendukung pelayanan kepada pelanggan, PT PELNI (Persero) juga menyediakan layanan *Contact center* sebagai berikut:

- 1) *Voice Call* : 021-162 atau 162
- 2) Facebook : Pelni Point (Fan Page : Pelayaran Nasional Indonesia)
- 3) Twitter : @Pelni162
- 4) Instagram : Pelniline
- 5) Sms Masking : Pelni162
- 6) Email : infopelni162@pelni.co.id

## Realisasi Anggaran Aktivitas Tanggung Jawab Sosial Kepada Pelanggan

Per 31 Desember 2016, PT PELNI (Persero) telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.868.055.656 untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial kepada pelanggan melalui pelayanan *contact center* 162.

## Social Responsibility Activity to Customers

Social responsibility activity to the customers in 2016 was done under coordination of Service Division covering 4 (four) area, as follows:

- 1) Quality Assurance Service
  - a. Formulation of Onboard Passenger and Crew Service SOP
  - b. Service Inventory Procurement
  - c. On the spot check on the ship
  - d. Information channel procurement (sticker & acrylic)
- 2) Food & Beverages
  - a. Combi Oven Investment (KM Kelud & KM Sinabung)
  - b. Implementation of Raming Meal System Service
- 3) Hospitality
  - a. Cover + Bed Procurement for economy class (in stages)
  - b. Cover + Bed Procurement for eks. class (single class)
  - c. TV Media Facility Procurement
- 4) Customer Service
  - a. SMS Blast Application PRocurement
  - b. Social Media Quiz Rewarding
  - c. Customer Care Training

Other than through these divisions, to support service to the customers, PT PELNI (Persero) also provides Contact Center services, as follows:

- 1) *Voice Call* : 021-162 atau 162
- 2) Facebook : Pelni Point (Fan Page : Pelayaran Nasional Indonesia)
- 3) Twitter : @Pelni162
- 4) Instagram : Pelniline
- 5) Sms Masking : Pelni162
- 6) Email : infopelni162@pelni.co.id

## Realization of Social Responsibility Activity for Customers

As of December 31, 2016, PT PELNI (Persero) had allocated budget of Rp1,868,055,656 for the implementation of social responsibility activity to the customers through contact center 162 service.



## Penyampaian dan Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan 2016

Proses penyampaian dan tindak lanjut keluhan pelanggan merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 04.28/03/SK/HKO.01/2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Contact Center Info PELNI yang mengatur standar pelayanan pelanggan melalui "Info PELNI 162."

Untuk mendukung pelayanan terhadap pelanggan, pada tahun 2016, PT PELNI (Persero) didukung oleh 63 (enam puluh tiga) petugas loket yang bertugas untuk menjual dan mencetak tiket, menerima dan memproses masukan, saran maupun keluhan pelanggan yang disampaikan melalui loket pelayanan PT PELNI (Persero).

Per 31 Desember 2016, PT PELNI (Persero) mencatat 67 (enam puluh tujuh) keluhan pelanggan yang disampaikan melalui berbagai media, dengan rincian jenis keluhan pelanggan sebagai berikut:

### Jumlah Keluhan Melalui Call Center Tahun 2016

Jenis Komplain Type of Complaint	Jumlah Total
Sewa Kabin/kasur/Cabin/Bed Rental	9
Pencurian /Robbery	4
Fasilitas di kapal/Ship Facilities	11
Toilet/Toilet	1
seat tidak sesuai tiket/Seat Complaint	2
Penjualan tiket/Ticket Sales	3
Harga tiket tdk sesuai/Unmatch Price	8
Fasilitas film/Fil Facility	1
Sampah/Garbage	3
Delay/Delay	6
Merokok/Smoking	1
tarif muatan/Cargo Tariff	4
Tiket online/Online Ticket	3
Barang tertinggal/Lost Item	2
Pedagang/Merchants	2
Travel Agen/Travel Agent	1
Calo/Brokers	2
Keramahan petugas loket/Locket Staff Hospitality	3
Penipuan di kapal/Onboard Fraudulence	1
<b>Total/Total</b>	<b>67</b>

## Customer Complaint Reporting and Follow-Up 2016

Customer complaint report submission and follow-up refers to Board of Directors Deceee Number 04.28/03/SK/HKO.01/2016 regarding Stipulation of Info PELNI Contact Center Standard Operating Procedure (SOP) that regulates customer service standard via "Info PELNI 162."

In order to support service to the customers, in 2016, PT PELNI (Persero) was supported by 63 (sixty three) locket staffs who are in charge to sell and print tickets, receive and process every inquiry, suggestion and complaint from the customers submitted PT PELNI (Persero) service locket.

As of December 31, 2016, PT PELNI (Persero) recorded 67 (sixty seven) customer complaints submitted via various media, with type of customer complaints, as follows:

### Total Complaint Received By Call Center 2016

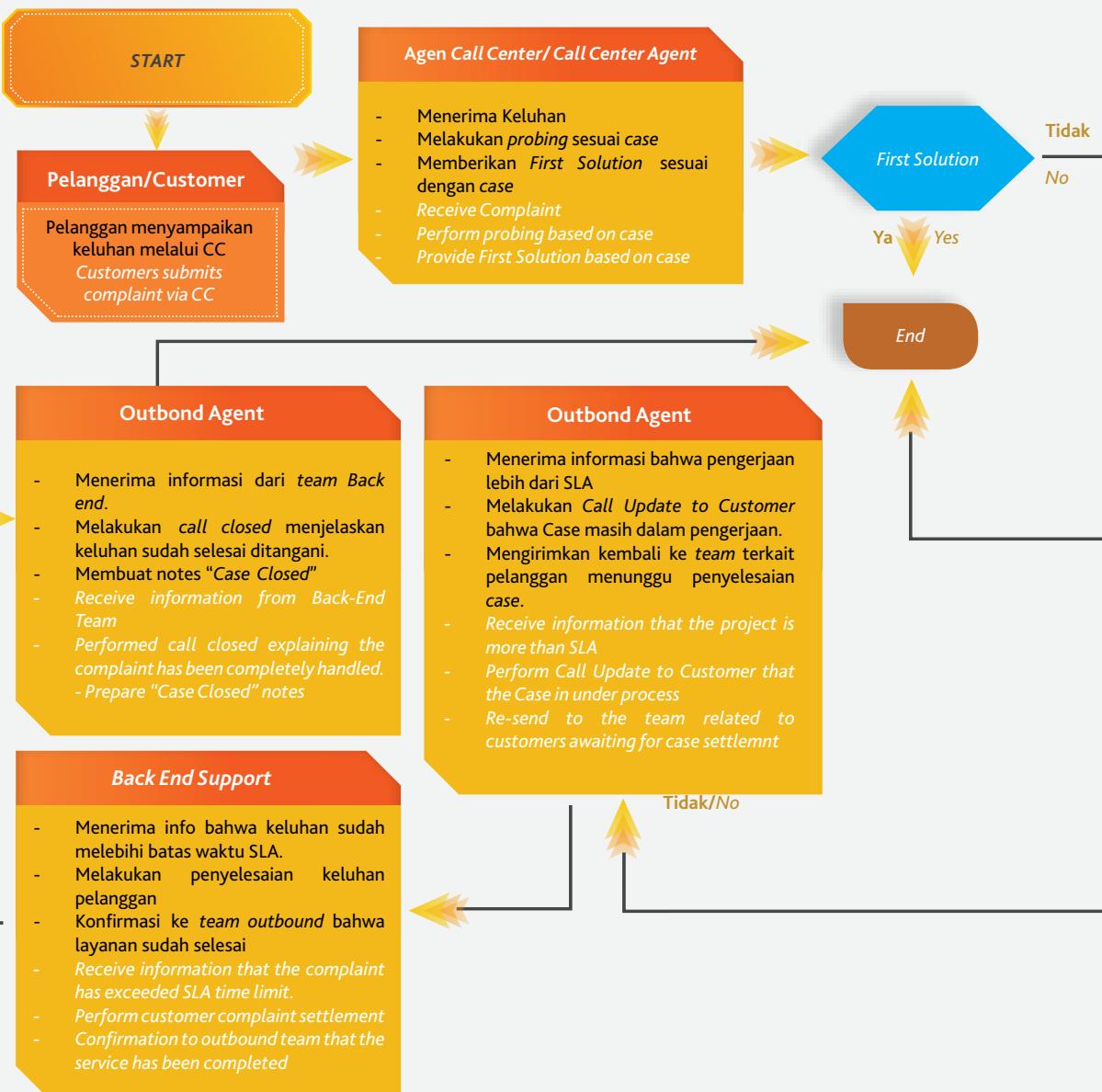


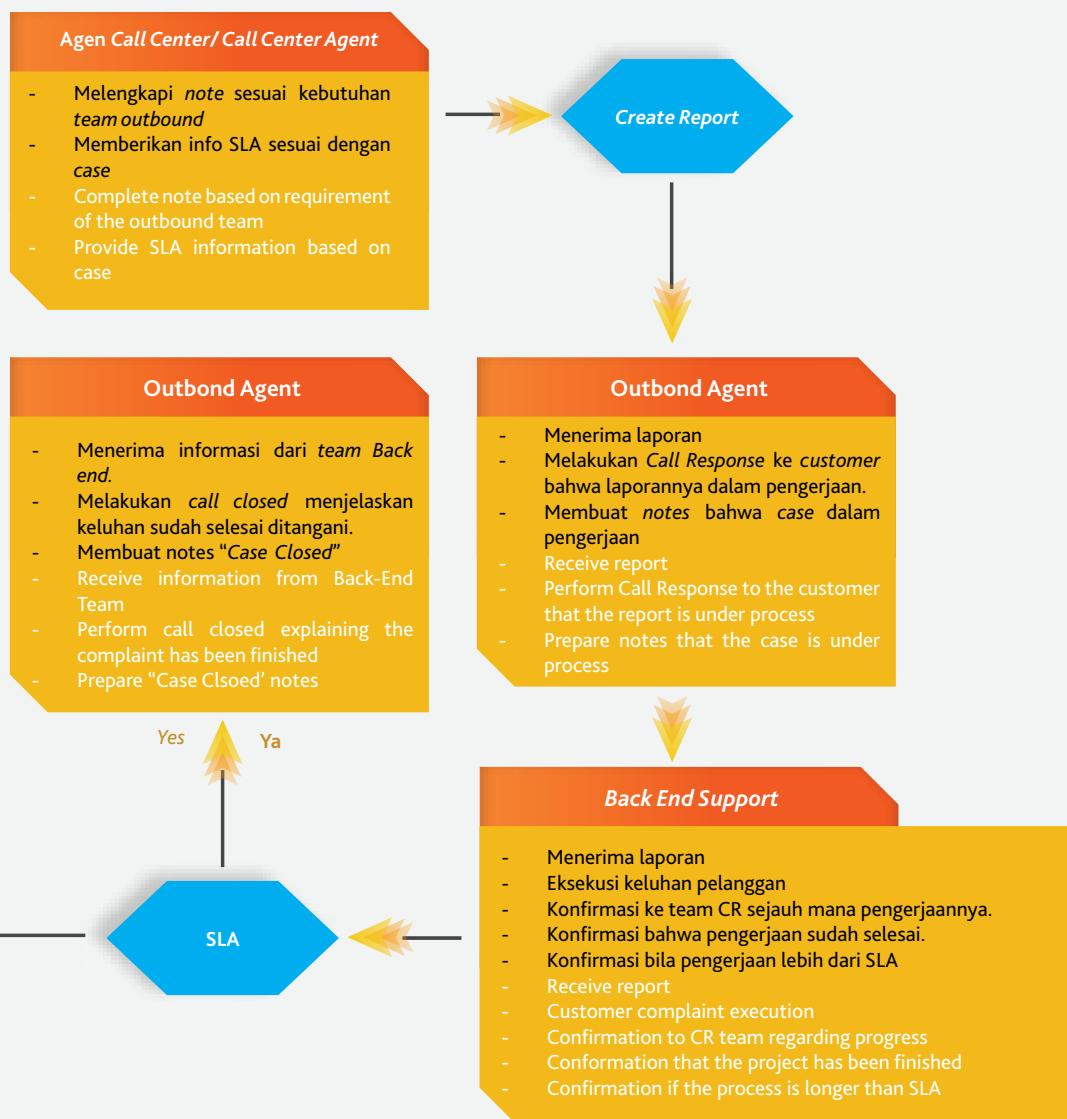
Seluruh keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan masalah yang dikeluhkan, melalui mekanisme sebagai berikut:

All of the customer complaint has been followed-up through coordination with related working unit based on the complained issues in the following mechanism:

## Call Flow General Complaint

### Call Flow General Complaint









# Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Report

.....



**halaman ini sengaja dikosongkan**  
this page is intentionally left blank



**DJOKO, SIDIK & INDRA**

*Audit, Tax, and Business Consultants  
Registered Public Accountant*

International member of:



**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA / ITS SUBSIDIARIES  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*  
DAN / AND  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /  
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016

*For the Years Ended December 31, 2016*

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2015)

*(With Comparative Balance for the Year Ended December 31, 2015)*

Nomor / Number : DSI.IS/HO/023.PELNI-LAI/17  
Tanggal / Date : 27 Februari / February, 2017

**HEAD OFFICE:**

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia

Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081

Website: kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com

NIUKAP: 959/KM.1/2014

## DAFTAR ISI

## TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Pages	
<b>SURAT PERNYATAAN DIREKSI</b>		<b>MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER</b>
<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	i - iii	<b>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA</b>		<b>CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES</b>
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.	1 - 2	<i>Consolidated Statements of Financial Position (Balance Sheets) as of December 31, 2016, 2015 and 2014.</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	3	<i>Consolidated Statements of Income and Other Comprehensive Income for The Years Ended December 31, 2016 and 2015</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	4	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity for The Years Ended December 31, 2016 and 2015</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	5	<i>Consolidated Statements of Cash Flows for The Years Ended December 31, 2016 and 2015</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	6 - 112	<i>Notes to Consolidated Financial Statements for The Years Ended December 31, 2016 and 2015</i>
<b>Informasi Tambahan:</b>		<b>Additional Information:</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN POKOK PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Informasi Keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri)</b> Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015		<b>FINANCIAL STATEMENTS OF PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Financial Information - Parent Entity Only, As a Separate Financial Statements)</b> <i>For the Years Ended December 31, 2016 and 2015</i>
• Laporan Posisi Keuangan (Neraca) - Tersendiri Entitas Induk	1 - 2	• <i>Statements of Financial Position (Balance Sheets) - Parent Entity Only</i>
• Laporan Laba Rugi Komprehensif - Tersendiri Entitas Induk	3	• <i>Statements of Comprehensive Income - Parent Entity Only</i>
• Laporan Perubahan Ekuitas - Tersendiri Entitas Induk	4	• <i>Statements of Changes in Equity - Parent Entity Only</i>
• Laporan Arus Kas - Tersendiri Entitas Induk	5	• <i>Statement of Cash Flows - Parent Entity Only</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN/  
*MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER***



## PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (Persero)

### SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG

#### TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2016 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Elfien Goentoro  
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta 10130  
Alamat Domisili sesuai KTP : Taman Sari Persada Raya 13/17 RT 003 RW 001, Jatibening Baru, Pondok Gede  
Jabatan : Direktur Utama
  
2. Nama : Wibisono  
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta 10130  
Alamat Domisili sesuai KTP : Kav. DKI Blok GIII/2 RT 003 RW 011, Pondok Kelapa, Duren Sawit  
Jabatan : Direktur Keuangan
  
3. Nama : Muhamad Tukul Harsono  
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta 10130  
Alamat Domisili sesuai KTP : Soka RT.001/RW.011 Brambang, Karang Awen Demak  
Jabatan : Direktur Operasi
  
4. Nama : Insan Purwarisya L Tobing  
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta 10130  
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Albezia VII C RT.005/RW.012 Cipinang, Pulo Gadung Jakarta Timur  
Jabatan : Direktur SDM & Umum
  
5. Nama : Olih Masolich Sodikin  
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta 10130  
Alamat Domisili sesuai KTP : Taman Kencana Blok C2 No. 5 RT 004 RW 012, Cengkareng Barat, Cengkareng  
Jabatan : Direktur Teknik
  
6. Nama : Harry Boediarto  
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta 10130  
Alamat Domisili sesuai KTP : Tebet Barat VII/19 RT 004 RW 004, Tebet Barat, Tebet  
Jabatan : Direktur Komersial

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Februari 2017



Elfien Goentoro  
Direktur Utama

Wibisono  
Direktur Keuangan

Muhamad Tukul Harsono  
Direktur Operasi

Insan Purwarisya L Tobing  
Direktur SDM & Umum

Olih Masolich Sodikin  
Direktur Teknik

Harry Boediarto  
Direktur Komersial

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/  
*INDEPENDENT ACCOUNTANT'S REPORT***



Nomor :

DSI.IS/HO/023.PELNI-LAI/17

: Number

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**Pemegang Saham,  
Dewan Komisaris dan Direksi  
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)**

**The Shareholders,  
Boards of Commissioners and Directors  
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Manajemen juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indcnesia dan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh kevakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian terlampir.

We have audited the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries attached, consisting of statement of financial position (balance sheet) the consolidated dated December 31, 2016, as well as the income statement and earnings other comprehensive consolidated statement of changes in consolidated shareholders' equity, and flows consolidated cash for the year ended on that date, and an overview of the significant accounting policies and other explanatory information. We also conduct tests of adherence to laws and regulations and internal control direct and material effect on the consolidated financial statements.

**Management's responsibility for the financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error. Management is responsible to other legal and regulatory requirements and internal control that have direct affect and material effect to fairly presentation of these consolidated financial statements.

**Auditors' responsibility**

Our responsibilities are to express an opinion on such consolidated financial statements, and compliance to other legal and regulatory requirements and internal control that have direct affect and material effect on the financial statements presentation based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and examination standards established by The Financial Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement, and compliance to other legal and regulatory requirements and internal control that have direct affect and material effect on the present fairly to the accompanying consolidated financial statements enclosed.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya. Suatu audit juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Selain itu, juga mencakup pengujian atas kepatuhan entitas terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Laporan keuangan tersendiri (induk saja) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan sebagai informasi tambahan dari laporan keuangan konsolidasi terlampir, yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves the implementation of procedures to obtain audit evidence about the numbers and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement in the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In assessing such risks, the auditor considers internal control relevant to the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements of the entity to design audit procedures that are appropriate condition. An audit also includes evaluating the accuracy of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as the evaluation of the consolidated financial statements as a whole. Moreover, it also includes testing for compliance entity to the contract, the terms of the help and specific provisions of the legislation, and compliance with internal control.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

#### Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements attached present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries December 31, 2016, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards.

#### Others

Our audit the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries December 31, 2016 and for the year ended on that date attached conducted to formulate an opinion on the consolidated financial statements as a whole. Separate financial statements (parent only) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) attached, which consists of a statement of financial position (balance sheet) dated December 31, 2016, as well as the income statement and earnings other comprehensive, statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, is presented as additional information of the consolidated financial statements, which are presented for purposes of additional analysis of the accompanying consolidated financial statements are required under financial Accounting Standard in Indonesia.



Informasi keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan - Entitas Induk saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri telah menjadi obyek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan - Entitas Induk saja sebagai laporan Keuangan Tersendiri disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dalam rangka laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

A parent entity's financial statements as a Separate Financial Statement is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. A parent entity's financial statements as a Separate Financial Statements has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statement based on Auditing Standard established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, A parent entity's financial statements as a Separate Financial Statements present fairly, in all material respects, in the framework of the accompanying consolidated financial statements as a whole.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
DJOKO, SIDIK & INDRA

**DJOKO, SIDIK & INDRA**  
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS



Indra Soesetiawan, Ak., CPA., CA.  
NRAP / Public Accountant License AP.0139

27 Februari / February, 2017

**NOTICE TO READERS**

The above auditor's report and the accompanying financial statements are English translations of the Indonesian auditor's report and financial statements enclosed prepared for and used in Indonesia. The accompanying financial statements were prepared using accounting principles, procedures and reporting practices generally accepted in Indonesia and are not intended to present the financial positions, financial performances and their cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such financial statements are conformity with Financial Accounting Standards in Indonesia.

# **LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT***

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir tanggal 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)**  
As of December 31, 2016  
(With Comparative Balance for the Year Ended  
December 31 2015, and January 1, 2015/December 31 2014)  
(In Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/Notes	31 Desember 2016/December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015*)	1 Jan 2015)/ 31 Des. 2014/ Dec. 31, 2014*)	
<b>ASET</b>				
<b>Current Assets</b>				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	3f; 3g; 3i; 4	885.614.536.587	732.418.276.306	364.826.207.757
Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	3i; 5	710.983.723.622	101.672.900.006	5.688.500.000
Penempatan Jangka Pendek	3i; 6	5.000.000.000	5.000.000.000	159.700.000
Piutang Usaha	3h; 3i; 3j; 7	272.795.406.111	185.894.832.123	114.125.023.425
(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp9.282.853.975, Rp7.075.367.277 dan Rp4.920.110.119)				(Net of provision for impairment at December 31, 2016, 2015 and January 1st 2015/December, 31 2014 respectively Rp9.282.853.975, Rp7.075.367.277 and Rp4.920.110.119)
Piutang Lain-Lain	3i; 8	7.889.986.555	12.086.058.871	29.591.353.825
(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp222.551.921, Rp202.093.926 dan Rp1.950.341.262)				(Net of provision for impairment at December 31, 2016, 2015 and January 1st 2015/December, 31 2014 respectively Rp222.551.921, Rp202.093.926 and Rp1.950.341.262)
Persediaan	3k; 9	462.927.981.398	575.712.421.792	445.748.137.725
Biaya Dibayar Dimuka	3i; 3l; 10	17.619.757.767	19.664.884.645	16.801.785.939
Uang Muka	3i; 3l; 11	25.443.019.319	62.398.904.074	52.543.289.499
Pendapatan Masih Harus Diterima	3i; 12	132.144.918.028	356.709.485.667	308.819.890.035
Pajak Dibayar Dimuka	3w; 13a	22.151.702.943	8.971.850.403	1.177.048.193
<b>Total Aset Lancar</b>		<b>2.542.571.032.329</b>	<b>2.060.529.613.887</b>	<b>1.339.480.936.398</b>
<b>Total Current Assets</b>				
<b>Non - Current Assets</b>				
Aset Tidak Lancar				
Properti Investasi	3o; 3s; 14	22.981.274.640	23.963.122.175	23.969.132.469
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 1 Januari 2015/Desember, 31 2014 masing-masing sebesar: Rp20.960.976.697, Rp19.794.417.172 dan Rp18.153.769.622)	V			(Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2016, 2015 and January 1st 2015/December, 31 2014 respectively for: Rp20.960.976.697, Rp19.794.417.172 and Rp18.153.769.622)
Aset Tetap	3p; 3q; 3s; 15	3.467.049.375.117	3.630.293.207.290	3.766.394.830.860
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014 masing-masing sebesar: Rp4.814.023.048.832, Rp4.569.369.403.489 dan Rp4.132.660.342.615)				(Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2016, 2015 and January 1st 2015/ December, 31 2014 respectively: Rp4.814.023.048.832, Rp4.569.369.403.489 and Rp4.132.660.342.615)
Aset Tidak Berwujud	3r; 3s; 16	4.535.792.088	3.270.750.754	3.536.199.196
Aset Lain-lain	3r; 3s; 17	128.407.590.030	138.088.067.012	176.490.432.422
Aset Pajak Tangguhan	3w; 3y; 13d	45.545.884.702	36.750.911.947	25.996.480.213
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>		<b>3.668.519.916.576</b>	<b>3.832.366.059.178</b>	<b>3.996.387.075.160</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>6.211.090.948.905</b>	<b>5.892.895.673.065</b>	<b>5.335.868.011.558</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>				

\*) Disajikan kembali lihat catatan 38

\*) As Restate see note 38

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir tanggal 2015 dan 1 Januari 2015/31 Desember 2014)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)**  
As of December 31, 2016  
(With Comparative Balance for the Year Ended  
December 31 2015, and January 1, 2015/December 31 2014)  
(In Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/Notes	31 Desember 2016/December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015*)	1 Jan 2015)/ 31 Des. 2014/ Dec. 31, 2014*)	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang Usaha	3i; 3j; 18	157.386.238.502	172.010.297.808	187.095.806.421
Biaya yang Masih Harus Dibayar	3i; 19	219.932.451.249	141.017.668.917	81.864.667.597
Pinjaman Jangka Pendek	3i; 3j; 20	-	-	90.000.000.000
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	3i; 3j; 20	40.085.652.287	235.632.112.034	234.475.339.325
Utang Bunga	3i; 3y; 21	-	57.892.540.153	58.136.831.115
Uang muka diterima	3i; 22	15.551.958.765	23.580.326.534	24.902.412.059
Pendapatan diterima dimuka	3i; 23	18.540.675.865	29.493.047.584	17.816.957.212
Utang pajak	3i; 3w; 13b	51.724.160.922	42.579.331.334	21.722.300.568
Utang lain-lain	3i; 24	87.105.016.372	100.467.861.471	146.419.997.371
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>590.326.153.962</b>	<b>802.673.185.835</b>	<b>862.434.311.668</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	3i; 3u; 3y; 25	76.369.343.246	33.030.927.267	37.906.685.801
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo lebih dari satu tahun	3i; 3j; 20	79.069.847.504	369.537.490.712	348.662.020.087
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>155.439.190.750</b>	<b>402.568.417.979</b>	<b>386.568.705.888</b>
<b>Total Liabilitas</b>		<b>745.765.344.712</b>	<b>1.205.241.603.814</b>	<b>1.249.003.017.556</b>
<b>Ekuitas</b>				
Modal Saham	1.1.3; 27	7.065.092.000.000	7.065.092.000.000	6.565.092.000.000
(Modal dasar sebanyak 13.000.000 saham, diempatkan dan disetor penuh 7.065.092 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham)				(As much as 13,000,000 shares Authorized, issued and fully paid shares 7.065.092 with a nominal value of Rp 1.000.000 per share)
Cadangan Umum	1.1.3; 28	164.190.404.981	66.533.679.319	55.530.479.000
Penyertaan Modal Pemerintah	1.1.3; 29	564.951.174.642	143.585.642	143.585.642
Saldo Laba (Rugi)		(2.277.574.901.722)	(2.427.334.648.926)	(2.514.750.050.734)
Komponen Ekuitas Lainnya	3y;	(52.734.751.182)	(17.812.331.538)	(19.891.576.001)
		5.463.923.926.720	4.686.622.284.497	4.086.124.437.907
Kepentingan Non Pengendali	3d; 3m; 26	1.401.677.473	1.031.784.754	740.556.095
<b>Total Ekuitas</b>		<b>5.465.325.604.193</b>	<b>4.687.654.069.251</b>	<b>4.086.864.994.002</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>6.211.090.948.905</b>	<b>5.892.895.673.065</b>	<b>5.335.868.011.558</b>
<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>				
<b>Short-term Liabilities</b>				
Accounts Payable				
Accrued Expenses				
Short Term Loans				
Current Maturities of Long-Term Loans				
Interest Payables				
Advances Received				
Unearned Revenues				
Tax Debt				
Other Payables				
<b>Total Short Term Liabilities</b>				
<b>Long-Term Liabilities</b>				
Employment Benefits Obligation				
Non Current Maturities of Long-Term Loans				
<b>Total Long-Term Liabilities</b>				
<b>Total Liabilities</b>				
<b>Equity</b>				
Capital Stock				
(As much as 13,000,000 shares Authorized, issued and fully paid shares 7.065.092 with a nominal value of Rp 1.000.000 per share)				
Reserves				
Government Equity				
Retained Earnings				
<b>Non-Controlling Interest</b>				
<b>Total Equity</b>				
<b>TOTAL EQUITY AND LIABILITIES</b>				

\*) Disajikan kembali lihat catatan 38

\*) As Restate see note 38

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan  
keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial  
statements form an integral part of these consolidated  
financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

DAN ENTITAS ANAKNYA

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016

(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun

yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)

(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

AND ITS SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

For The Years Ended December 31, 2016

(With Comparative Balance for The Year

Ended December 31, 2015)

(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

	2016	Catatan/ Notes	2015*	
Pendapatan Usaha	4.212.399.771.240	3j; 3v; 30	3.868.892.816.324	Operating Revenues
Reduksi Pendapatan Usaha	(10.648.231.000)	3v;c30; 30	(15.264.875.883)	Reduction in Operating Revenues
<b>Pendapatan Usaha Bersih</b>	<b>4.201.751.540.240</b>		<b>3.853.627.940.441</b>	<b>Gross Profit</b>
Beban Usaha	(3.454.325.138.259)	3v; 31	(3.293.407.555.065)	Operating Expenses
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>	<b>747.426.401.981</b>		<b>560.220.385.376</b>	<b>Profit (Loss) Gross</b>
Beban Administrasi dan Umum	(507.146.350.654)	3p; 3v; 34	(446.065.523.766)	General and Administrative Expenses
Beban Pemasaran	(5.969.675.894)	3v; 35	(6.567.097.008)	Marketing Expenses
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>234.310.375.433</b>		<b>107.587.764.602</b>	<b>Profit (Loss) Business</b>
Pendapatan (Beban Non Usaha)				Financial Expenses
Pendapatan Bunga	36.168.188.453	3v; 32	8.401.021.671	Interest Income
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	29.291.945.720	3v; 33	31.018.270.935	Income (Expenses) Other Net
Beban Bunga Pinjaman	(25.338.234.081)	3t; 3v; 36	(27.309.581.980)	Interest Expense Loan
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>274.432.275.526</b>		<b>119.697.475.228</b>	<b>Income (Loss) Before Tax</b>
<b>Penghasilan (Beban) Pajak</b>				<b>Benefit (Expense) Income Tax</b>
Kini	(34.452.830.066)	3w; 13c	(31.521.033.602)	Current Tax
Tangguhan	8.793.062.255	3w; 13d	10.754.431.735	Deferred Tax
	<b>(25.659.767.811)</b>		<b>(20.766.601.867)</b>	
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>248.772.507.715</b>		<b>98.930.873.361</b>	<b>Profit Current Year</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>				<b>Other Comprehensive Income</b>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss
- Pengukuran kembali atas Program imbalan pasti	(33.419.554.864)	3u	2.079.244.463	Remeasurement, On Defined Benefit - Plan
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-		-	Items That Will Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(33.419.554.864)		2.079.244.463	Other Comprehensive Income For The Year After Tax
<b>Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>215.352.952.851</b>		<b>101.010.117.824</b>	<b>Total Comprehensive Income Current Year</b>
<b>Laba yang dapat diatribusikan kepada:</b>				<b>Profit attributable to:</b>
Pemilik entitas induk	248.402.904.439	3c; 3d	98.643.157.232	Owner of Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	369.603.276	3c; 3d; 3m	287.716.129	Non-Controlling Interest
	<b>248.772.507.715</b>		<b>98.930.873.361</b>	
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>				<b>Total Comprehensive Income attributable to:</b>
Pemilik entitas induk	214.983.349.575	3c; 3d	100.722.401.695	Owner of Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	369.603.276	3c; 3d; 3m	287.716.129	Non-Controlling Interest
	<b>215.352.952.851</b>		<b>101.010.117.824</b>	
<b>Laba Bersih Per Saham Dasar</b>	<b>30.481</b>	27; 30	<b>14.297</b>	<b>Basic Earnings Per Share</b>

\*) Disajikan kembali lihat catatan 38

\*) As Restate see note 38

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Perluh/ Additional Paid In Capital</b>	<b>Cadangan Umum / Reserve</b>	<b>Penyertaan Modal Pemerintah / Government Capital</b>	<b>Bantuan yang Belum Ditetapkan Statusnya / Unappropriated</b>	<b>Akumulasi Laba (Rugi) / Profit (Loss) Accumulated</b>	<b>Jumlah Ekuitas Sebelum Non- Pengendali / Non Controlling Before Equity</b>	<b>Beban (Manfaat) Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income (Cost)</b>	<b>Jumlah Ekuitas / Kepentingan Non- Pengendali / Non Controlling Interest</b>	<b>Jumlah Ekuitas / Total Equity</b>
<b>Saldo per 1 Januari 2015</b>								
<b>Balance on January 1, 2015</b>								
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Net	-	-	-	98.643.157.235	98.643.157.235	-	-	98.643.157.235
<i>Income Current Year</i>								
Cadangan Umum / General Reserves	11.003.200.319	-	-	(11.003.200.319)	-	-	-	-
(Sesuai Surat Kementerian BUMN / Letters correspond Ministry of SOEs No. S-05/D-MBU/07/2015)	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah / Government Capital (Sesuai Surat Kementerian BUMN /Letters correspond Ministry of SOEs No. S-27/MBU/01/2016)	500.000.000.000	-	-	-	500.000.000.000	-	-	500.000.000.000
<i>Penyaluran Program PKBL / PKBL Program Distribution</i>								
Akumulasi Laba (Rugi) Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income Profit (Loss) Accumulated	-	-	-	(224.555.108)	(224.555.108)	(17.812.331.538)	-	(224.555.108)
Kepentingan Non-Pengendali / Non Controlling Interest	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>								
<b>Balance at December 31, 2015</b>								
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Net	-	-	-	248.402.904.439	248.402.904.439	-	-	248.402.904.439
<i>Income Current Year</i>								
Cadangan Umum / General Reserves (Sesuai RUPS) In accordance AGM PT PELNI	98.643.157.235	-	-	(98.643.157.235)	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah / Government Capital (Sesuai Peraturan Pemerintah/As the Government Regulation No. 87 Tahun 2016)	-	-	-	-	564.807.589.000	-	-	564.807.589.000
<i>Penyaluran Program PKBL / PKBL Program Distribution</i>								
Akumulasi Laba (Rugi) Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income Profit (Loss) Accumulated	(986.431.573)	-	-	-	(986.431.573)	(34.922.419.643)	-	(986.431.573)
Kepentingan Non-Pengendali / Non Controlling Interest	-	-	-	-	-	-	-	(34.922.419.643)
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>								
<b>Balance at December 31, 2016</b>								
164.190.404.981	164.190.404.981	564.851.174.642	-	(2.277.574.901.721)	5.516.658.677.902	(52.734.751.181)	1.401.677.473	5.465.325.604.194

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

	<b>2 0 1 6</b>	<b>2 0 1 5</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			<b>Cash Flows from Operating Activities</b>
Penerimaan Kas Dari Pelanggan Dan Pihak Terkait	3.424.307.968.034	2.478.523.457.271	Receipt from Customer
Penerimaan Public Service Obligation	2.363.973.650.652	1.696.099.188.978	Receipt from Public Service Obligation
Pembayaran Kepada Pemasok	(3.037.676.163.180)	(2.982.751.008.979)	Payment to Suppliers
Penerimaan Kas Lain-Lain	20.510.115.867	37.751.735.316	Cash Receipt Others
Pembayaran Biaya Operasional	(612.060.661.650)	(731.672.812.444)	Payment of Operating Expenses
Pembayaran Biaya Overhead	(148.878.315.240)	(216.798.398.012)	Payment of Overhead Expense
Pengeluaran Kas Biaya Lain-Lain	(4.706.364.267)	(9.088.264.399)	Receipt from Other Revenues
Penempatan Jangka Pendek	(1.237.337.994.500)	(7.668.581.995)	Short Term Placement
Penerimaan Uang Jaminan Dari Pelanggan	145.636.450.150	11.554.390.500	Receipt of Cash Collateral from Customer
Pencairan Uang Jaminan	(1.611.483.524)	(1.097.050.307)	Liquefaction of Cash Collateral
Pencairan Uang Jaminan Bank	-	-	Liquefaction of Cash Collateral Bank
Pembelian Persediaan	(107.472.275)	(1.530.099.051)	Purchase of Supplies
Penerimaan Bunga	33.862.313.284	7.226.149.508	Interest Receipt
Pembayaran Bunga Pinjaman	(26.842.172.033)	(28.350.586.075)	Payment of Interest Loan
Pembayaran Pajak	(130.257.373.802)	(130.569.054.540)	Tax Payment
	<b>788.812.497.516</b>	<b>121.629.065.771</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			<b>Cash Flows from Operating Activities</b>
Hasil Penjualan Aset Tetap	2.336.589.063	1.248.761.901	Sale of Fixed Assets
Pembelian Aset Tetap	(54.279.499.287)	(88.044.724.800)	Purchase of Fixed Assets
Perolehan Aset Dalam Penyelesaian	(12.235.000)	(36.962.680)	Construction in Progress
Pembelian Aset Lain-Lain	(2.110.421.994)	(3.976.162.248)	Purchase of Other Assets
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(54.065.567.218)</b>	<b>(90.809.087.827)</b>	<b>Net Cash Flows from Investment Activities</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			<b>Cash Flows from Financing Activities</b>
Penerimaan Pemerintah	-	500.000.000.000	Receipt from Government
Penerimaan Pinjaman Bank / Pihak Ketiga	35.557.498.850	32.200.000.000	Receipt from Bank Loan / Third Parties
Penerimaan (Pengeluaran) Deviden	-	(46.705.519)	Receipt (Issuance) Deviden
Pembayaran Utang Bank	(7.797.345.252)	(94.396.803.870)	Payment of Bank Loan
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>27.760.153.598</b>	<b>437.756.490.611</b>	<b>Net Cash Flows from Financing Activities</b>
<b>PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>762.507.083.897</b>	<b>468.576.468.555</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	839.091.176.312	370.514.707.757	<b>BEGINNING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>1.601.598.260.209</b>	<b>839.091.176.312</b>	<b>ENDING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/  
*NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS***

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

## **1. UMUM**

### **1.1. Pendirian Perusahaan**

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Entitas) didirikan pada tanggal 28 April 1952, dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.: M.2/1/2 tanggal 28 April 1952 dan No.: A 2/1/1 tanggal 19 April 1952 serta dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 10 Juni 1952.

Bentuk badan hukum sebagai Entitas Perseroan (Persero) sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 1969 ditetapkan melalui Anggaran Dasar Entitas yang dituangkan dalam Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH No. 31 tanggal 30 Oktober 1975 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.: Y.A.5/281/1 tanggal 17 Mei 1976.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Entitas dituangkan dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., SpN. No. 01, tanggal 16 Januari 2014 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-02312.AH.01.02 tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

- a. Pengadaan armada dan kelengkapannya untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran berjadwal dan pelayaran yang melayani potensi pasar.
- b. Menjalankan kegiatan keagenan usaha pelayaran.
- c. Melakukan kegiatan operasi terminal, perdagangan, rute dan ekspedisi/forwarding.
- d. Melakukan kegiatan usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dock/reparasi kapal.
- e. Melakukan kegiatan charter dan broker kapal.
- f. Kegiatan jasa konsultasi, pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pelayaran dan pelayanan kesehatan.

## **1. GENERAL**

### **1.1. Company Establishment**

*PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Entities) was established on April, 28 1952, the Minister of Communications Decree No.: M.2 / 1/2 dated April, 28 1952 and No.: A 2/1/1 dated April, 19 1952 and set forth in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5 dated June 10, 1952.*

*Legal form as an entity of the Company (Persero) in accordance with Act No. 9 of 1969 established by the Articles of Association of Entities set forth in Notary Deed Soeleman Ardjasasmita, SH No. 31 dated October 30, 1975 and ratified by the Decree of the Minister of Justice No.: Y.A.5 / 281/1 dated May 17, 1976.*

*Last Modified Entity Statutes pourde Deed Fauz Nanda Iwan, SH., M.Kn., SpN. No. 01, dated January 16, 2014 which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.: AHU-02312.AH.01.02 2014 dated January 23, 2014.*

### **1.2. Purposes and Objectives**

*Purposes and objectives of the Company are:*

- a. *Fleet procurement and apparatus for organizing the transport of passengers and goods by scheduled and cruise shipping networks that serve the market potential.*
- b. *Cater a business shipping agency activities.*
- c. *Conducting terminal operation, trade, service and expedition / forwarding.*
- d. *Perform maintenance services business activities and ship dock business/repair ships.*
- e. *Do charter activities and ship broker*
- f. *Event consulting services, education and training related to the shipping business and health care.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**1.3. Modal**

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 100% penyertaan Pemerintah sesuai dengan Akta Notaris Raden Mas Soediarto, S.H.,SpN. No. 2 tanggal 11 September 2009 yang telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-23622.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009. Penambahan modal dasar tersebut bersumber dari pengalihan Barang Milik Negara yang bersumber dari BPYBDS berdasarkan PP No. 63 Tahun 2012 serta kapitalisasi sebagian cadangan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sampai dengan tahun buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Soejatna Mulyana & Rekan sebagaimana suratnya No. 020/SMR/LAJ-PELNI/IV/2012 tanggal 16 April 2012.

**1.4. Tempat dan Kedudukan**

Entitas berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 14, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 11.01/I/SK/HKO.01/2014, tanggal 05 November 2014, Entitas memiliki 34 Cabang operasional, 32 sub cabang operasional, 1 cabang khusus di Singapura dan 2 Strategic Business Unit (Galangan Surya Surabaya dan Hotel Bahtera Cipayung).

**1.5. Dewan Komisaris dan Direksi**

**Dewan Komisaris**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.: SK-232/MBU/11/2015 tanggal 17 November 2015 dan No.: SK-218/MBU/10/2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Entitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komisaris adalah sebagai berikut:

**1. GENERAL (continued)**

**1.3. Capital**

*Share Capital paid to the entity is a 100% goverment participation in accordance with the Notarial Deed Raden Mas Soediarto Soenarto SH, SpN. No. 2 dated September, 11 2009 which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-23622.AH.01.02 Year 2009 dated May 28, 2009. The addition of authorized capital was sourced from Transfer of State Assets sourced from BYPBDS under PP 63 in 2012 and part of capitalized reserves PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) until the year 2011 audited by KAP Soejatna Mulyana & Partners as its letter No. 020/SMR/LAJ-PELNI/IV/2012 dated April 16, 2012.*

**1.4. Place and Domicile**

*The entities domiciled in Gajah Mada No. 14, Central Jakarta.*

*By virtue of Decree No. 11:01 / I / SK / HKO.01 / 2014, dated November 5, 2014, the Entity has 34 operational branches, 32 sub-branches operating, 1 special branch in Singapore and two Strategic Business Units (Galangan Surya Surabaya and Hotel Bahtera Cipayung).*

**1.5. Board of Commissioners and the Board of Directors**

**Board of Commissioners**

*Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises No.: SK-232/MBU/11/2015 on 17 November 2015 and No.: SK-218/MBU/10/2015 on 17 October 2015 about the dismissal and appointment of the members of the Board of Commissioners entity PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the order of the Commissioner is as follows:*

	<b>31 Des/Dec 2015</b>	<b>31 Des/Dec 2016</b>	
Komisaris Utama Anggota Komisaris	Leon Muhamad Omo Dahlan Sudarto Satya Bakti Parikesit Wolter B. Hasegem Raldi Hendro T. Koestoer	Leon Muhamad Omo Dahlan Sudarto Satya Bakti Parikesit Wolter Hasegem Raldi Hendro Koestoer	Chief Commissioner Commissioner

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)**

**Direksi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-99/MBU/06/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia maka susunan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia per tanggal 22 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

**1. GENERAL (continued)**

**1.5. Board of Commissioners and the Board of Directors (continued)**

**Board of Directors**

Based on the Decree of the Minister of State Enterprises Number: SK-99 / MBU / 06/2015 On Termination and Transfer of Duties Members of the Board of Directors of the Company PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Board of Directors of the Company PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) as of June 22, 2015 are as follows:

**31 Des/Dec 2015**

Direktur Utama	Elfien Goentoro	President Director
Direktur Armada dan Teknik	O.M Sodikin	Fleet and Technical Director
Direktur Keuangan	Wibisono	Finance Director
Direktur Personalia dan Umum	Datep Purwa Saputra	Personnel and General Director
Direktur Komersial	Elfien Goentoro	Commercial Director
Direktur Operasi	Daniel E. Bangunan	Operation Director

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-263 /LIBU/12/2016 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tanggal 1 Desember 2016, maka Susunan Direksi PT Pelayaran Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of State Enterprises Number: SK-263 /LIBU/ 12/2016 Termination and Appointment of Members of Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) on December, 1st 2016, the composition of the Board of Directors of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) is as following:

**31 Des/Dec 2016**

Direktur Utama	Elfien Goentoro	President Director
Direktur Usaha Angkutan Penumpang	O. M. Sodikin	Passenger Transport Business Director
Direktur Keuangan	Wibisono	Finance Director
Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut	Harry Boediarto	Business Ocean Freight and Toll Director
Direktur SDM & Umum	Insan Purwariya L Tobing	Personnel and General Director
Direktur Armada	M Tukul Harsono	Fleet Director

**1.6. Kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah karyawan tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebagai berikut:

**1.6. Strength of Human Resources (HR).**

The number of permanent employees on December 31, 2016 dan 2015 respectively as follows:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Perusahaan	4.498	4.719	Company
<b>Jumlah</b>	<b>4.498</b>	<b>4.719</b>	<b>Total</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

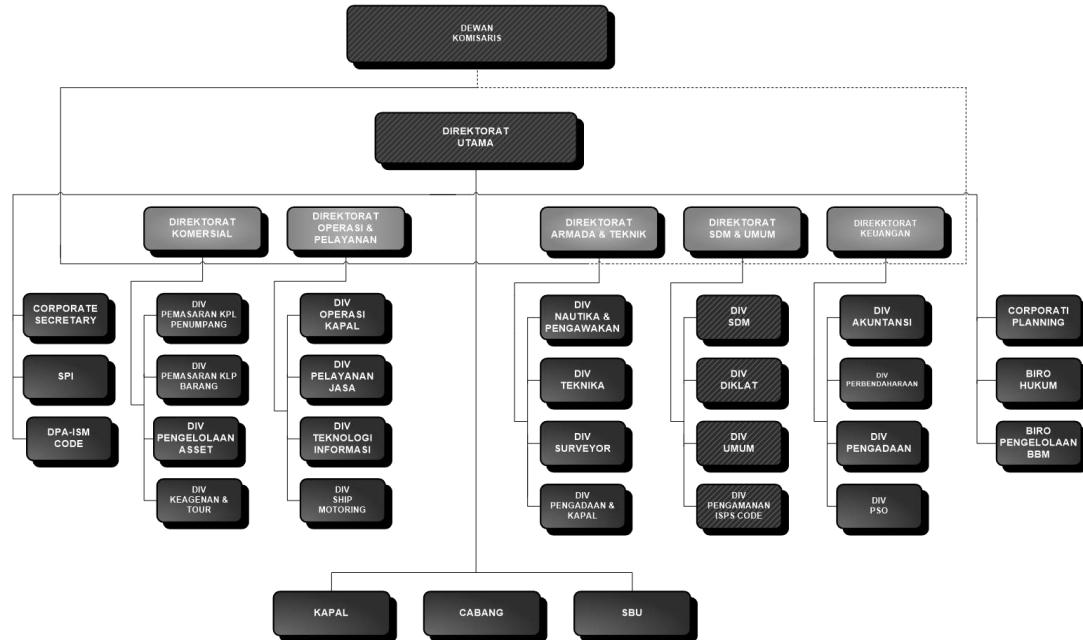
**1.7. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Nomor:04.12/3/SK/HKO.01/2016 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 09.08/1/SK/HKO/01/2015 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, tanggal 12 April 2016, dengan lampiran sebagai berikut:

**1. GENERAL (continued)**

**1.7. Organizational Structure**

Organizational Structure of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) amended several times, the last by the Board of Directors Decree Number: 04.12 / 3 / SK / HKO.01 / 2016 on the Amendment to the Decree of the Board of Directors Number: 09.08 / 1 / SK / HKO / 01 / 2015 on the Organization Structure, Duties and Functions Principal Owned PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dated 12 April 2016, with the following attachments:



**1.8. Entitas Anak**

**1.8.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)**

PT Sarana Bandar Nasional didirikan berdasarkan Akte Notaris Soelaiman Arjasasmita di Jakarta No. 59 tanggal 31 Maret 1986 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan Nomor 02-1932 HT 01.01 tahun 1987 tanggal 5 Maret 1987. Anggaran Dasar Entitas diperbaharui dengan Akte Notaris Ny. Imah Fatimah, SH No. 17 tanggal 12 Agustus 1998. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp15.000.000.000.

**1.8. Subsidiary**

**1.8.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)**

PT Sarana Bandar Nasional was established based on the Notary Deed Soelaiman Arjasasmita in Jakarta No. 59 March, 31 1986 and has received approval by the Minister of Law and legislation with the Decree HT 01.01 02-1932 Number 1987 on 5 March 1987. The basic budget entity updated with the Notary Deed Mrs. Imah Fatimah, SH No. 17 12 August 1998. The capital placed and paid in full is Rp15.000.000.000.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**1.8. Entitas Anak (lanjutan)**

**1.8.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)  
(lanjutan)**

Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Notaris Saifullah, SH No. 9 tahun 2008 pada tanggal 12 Agustus 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-5912.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 4 September 2008.

**Modal Saham**

Berdasarkan Akta Pendirian PT Sarana Bandar Nasional Nomor 59 tanggal 31 Maret 1986, Notaris Soeelman Ardjasasmita, SH dan Akta perbaikan anggaran dasar terakhir Nomor: 17 tanggal 12 Agustus 1998, Notaris Imas Fatimah, SH modal dasar perseroan berjumlah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap lembar saham. (lihat poin (2) Perubahan Kepemilikan Modal).

**1. GENERAL (continued)**

**1.8. Subsidiary (continued)**

**1.8.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)  
(continued)**

*The last basic budget changes based on the Deed Notary Saifullah, SH No. 9 Year 2008 on August, 12 2008 and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-5912.AH.01.02 dated September, 4 2008.*

**Capital Stock**

*Based on Deed of Establishment of PT Sarana Bandar National No. 59 dated March 31, 1986, Notary Soeelman Ardjasasmita, SH and Deed perbaikan Last statutes No. 17 dated August 12, 1998, Notary Imas Fatimah, SH authorized capital amounted to Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah) divided into 15,000 (fifteen thousand) shares with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share. (See point (2) Changes in Capital Ownership).*

<b>Uraian / Commentary</b>	<b>Saham / Stock</b>	<b>% Kepemilikan / Ownership</b>	<b>Modal Saham / Ditempatkan &amp; Disetor</b>
PT Pelayaran Nasional Indonesia Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	14.920 80	99,47% 0,53%	14.920.000.000 80.000.000
<b>Jumlah / Total</b>	<b>15.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000.000</b>

**Dewan Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) tanggal 12 Nopember 2013, dan, Surat Keputusan Direktur Utama PT PELNI (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor: 01/DIR/SBN/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Sarana Bandar Nasional, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarana Bandar Nasional adalah sebagai berikut:

**Board of Commissioners and Directors**

*Based on the Minutes of the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) of PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) on dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) dated November 12, 2013, and, the Decree of the President Director of PT Pelni (Persero) as the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) Number: 01 / DIR / SBN / X / 2014 dated October 16, 2014, on Termination and Appointment of Directors of PT Sarana Bandar Nasional, the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT Sarana Bandar National is as follows:*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**1.8. Entitas Anak (lanjutan)**

**1.8.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)  
(lanjutan)**

**Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)**

**1. GENERAL (continued)**

**1.8. Subsidiary (continued)**

**1.8.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)  
(continued)**

**Board of Commissioners and Directors  
(continued)**

**31 Des/Dec 2016**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama  
Komisaris

Capt. Daniel E.  
August Harris, SH

**Board Of Commissioners**

Chief Commissioner  
Commissioner

**Direksi**

Direktur Utama  
Direktur Operasional  
Direktur Keuangan

Suharyanto  
Murdiyoto  
Nofiyetti Edizar

**Director**

President Director  
Director Operational  
Finance Director

**Tempat dan Kedudukan**

**Place and Position**

Dalam menjalankan usahanya PT Sarana Bandar Nasional berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Tengah II Blok B 13-14 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510.

Currently, PT Sarana Bandar National is located in Jl. Cempaka Putih, Central II Block B 13-14 Cempaka Putih 10510.

**Area yang Diusahakan**

**Cultivated area**

Pada awal berdirinya PT SBN bisnis utamanya adalah menyediaan jasa bongkar muat barang dari dan ke kaal mili induk perusahaan maupun kapal-kapal lainnya, namun dalam perkembangannya saat ini perusahaan telah tumbuh lebih besar dengan berbagai aktifitas usaha yang mendukung kinerja perusahaan induk dan memberikan layanan logistik di berbagai wilayah Indonesia.

At its inception PT SBN main business is menyediaan services of loading and unloading of goods from and to Kaal mili parent company as well as other ships, but dalam development at this time the company has grown bigger with a variety of business activities that support the performance and provide logistic services in various Indonesian territory.

**Kekuatan Sumber Daya Manusia**

**Strength of Human Resources**

Jumlah karyawan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebanyak 202 dan 217 karyawan.

The number of employees of the company on December 31, 2016 and 2015 are 202 and 217 employees.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**1.8. Entitas Anak (lanjutan)**

**1.8.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC)**

PT Pelita Indonesia Djaya Corporation, Jakarta didirikan berdasarkan Akte Notaris Djojo Mulyadi, SH di Jakarta No. 3 tanggal 29 September 1969 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 1969. Anggaran Dasar Entitas diperbarui dengan Akte Notaris SP. Henny Singgih, SH No. 21 tanggal 10 April 2001. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp2.010.000.000.

**Modal Saham**

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 99,5% penyertaan PT Pelayaran Nasional Indonesia dan 0,5% penyertaan Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni sesuai dengan Akta Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, SH No. 7 tanggal 10 Juni 2009 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.AHU-43800.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 4 september 2009.

<b>Uraian / Commentary</b>	<b>Saham / Stock</b>	<b>% Kepemilikan / Ownership</b>	<b>Modal Saham / Ditempatkan &amp; Disetor</b>
PT Pelayaran Nasional Indonesia Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	2.000 10	99,50% 0,50%	2.000.000.000 10.000.000
<b>Jumlah / Total</b>	<b>2.010</b>	<b>100%</b>	<b>2.010.000.000</b>

**Dewan Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pelita Indonesia Djaya Nomor :AHU-10.AH.02.02- Tahun 2009 Tanggal 24 April 2009 Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelita Indonesia Djaya maka susunan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia per tanggal 27 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

**1. GENERAL (continued)**

**1.8. Subsidiary (continued)**

**1.8.2. PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC)**

PT Pelita Indonesia Djaya Corporation, Jakarta was established based on the Notary Act Djojo Mulyadi, SH in Jakarta No. 3 dated September 29, 1969 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on December 9, 1969. Entities Statutes updated with Notary SP. Henny Singgih, SH No. 21 dated April 10, 2001. Capital subscribed and fully paid amounted Rp2.010.000.000.

**Capital Stock**

Capital Stock paid to the entity is 99.5% ownership of PT Pelayaran Nasional Indonesia and 0.5% ownership in accordance Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni Deed Raden Mas Soediarto Soenarto, SH No. 7 dated June 10, 2009 were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-43800.AH.01.02 in 2009 on September 4, 2009.

**Board of Commissioners and Directors**

Based on the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) of PT Pelita Indonesia Djaya Number: AHU-10.AH.02.02- Year 2009 Date 24 April 2009 Decree of the Head of the National Defence Decree No. 104 / KEP-17.3 / III / 2011 Date March 21, 2011 On Termination and Transfer of Duties Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelita Indonesia Djaya membership of the Board of Directors the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia as of May 27, 2016 is as follows:

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**1.8. Entitas Anak (lanjutan)**

**1.8.2. PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) (lanjutan)**

**1. GENERAL (continued)**

**1.8. Subsidiary (continued)**

**1.8.2. PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) (continued)**

**31 Des/Dec 2016**

**Dewan Komisaris**  
Komisaris Utama

Olih Masolich Sodikin

**Board Of Commissioners**  
Chief Commissioner

**Direksi**  
Direktur Utama  
Direktur Operasi

Muhamad Tukul Harsono  
Asiano Yames Iryanto Lontoh

**Director**  
President Director  
Operation Director

**Tempat dan Kedudukan**

Entitas berkedudukan di Jalan Palmas No 2  
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

**Place and Position**

Entities domiciled in Palmas No 2, Tanjung  
Priok Port in North Jakarta.

**Area yang Diusahakan**

Berdagang dalam arti kata seluas-luasnya,  
menjalankan perdagangan impor dan ekspor,  
antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya  
bertindak sebagai perwakilan dari badan-badan  
dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari  
dalam maupun dari luar negeri.

**Cultivated area**

Trading in the broadest sense of the word,  
run the import and export trade, inter-island /  
regions as well as local, then acting as  
representatives of the agencies and other  
companies, both from within and from abroad.

**Kekuatan Sumber Daya Manusia**

Pada tanggal 31 Desember 2016 Entitas  
memiliki karyawan 932 orang berdasarkan  
status kepegawaian, tingkat pendidikan dan  
unit kerja.

**Strength of Human Resources**

On December 31, 2016 the Entity has 932  
employees based on employment status,  
education level and work units.

**1.8.3. PT Rumah Sakit PELNI**

PT Rumah Sakit PELNI, didirikan berdasarkan  
Akta Notaris Yulkhaizar, SH No. 7 tanggal 9  
November 2007 di Jakarta. PT Rumah Sakit  
PELNI merupakan salah satu usaha  
sampingan dari Entitas yang sejak tanggal 1  
Juli 2007 dipisah menjadi Entitas Anak. Modal  
yang ditempatkan dan disetor penuh adalah  
sebesar Rp59.480.000.000.

**Modal Saham**

Berdasarkan akta notaris Yulkhaizar Panuh,  
SH. tanggal 9 November 2008, No. 7 pada  
pasal 4 mengenai modal, disebutkan bahwa  
modal dasar perseroan berjumlah Rp  
237.920.000.000 terbagi atas 237.920 lembar  
saham, masing-masing saham bernilai nominal  
sebesar Rp 1.000.000 dari modal dasar  
tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh  
sebesar 25% atau Rp 59.480.000.000 yang  
terdiri dari 59.480 lembar saham dengan nilai  
nominal sebesar Rp1.000.000.

**1.8.2. PT Rumah Sakit PELNI**

PT Rumah Sakit PELNI, was established  
based on the Deed Notary Yulkhaizar, SH  
No. 7 date of November 9, 2007 in Jakarta.  
PT Rumah Sakit PELNI is one of the side  
business of entity that since July 1, 2007 are  
separated into subsidiary. The capital  
placed and paid in full is Rp59.480.000.000.

**Capital Stock**

Based on notarial deed Yulkhaizar Panuh,  
SH. November 9, 2008, No. 7 to Article 4 of  
the capital, stated that the authorized capital  
stock amounting to Rp237.920.000.000  
divided into 237.920 shares, each share  
having a nominal value of Rp 1,000,000 from  
authorized capital has been issued and fully  
paid by 25% or Rp59.480.000.000 which  
consists of 59.480 shares with a nominal  
value of Rp1.000.000.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**1.8. Entitas Anak (lanjutan)**

**1.8.3. PT Rumah Sakit PELNI (lanjutan)**

**Modal Saham (lanjutan)**

<b>Uraian / Commentary</b>	<b>Saham / Stock</b>	<b>% Kepemilikan / Ownership</b>	<b>Modal Saham / Ditempatkan &amp; Disetor</b>
PT Pelayaran Nasional Indonesia Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni (YKPP)	59.455 25	99,96% 0,04%	237.920.000.000 125.000.000
<b>Jumlah / Total</b>	<b>59.480</b>	<b>1,00</b>	<b>75.000.000.000</b>

**Dewan Komisaris dan Direksi**

Sesuai dengan SK Direksi PT PELNI No: 128/HKO.01/DIR/XII2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Rumah Sakit PELNI dan SK Direktur Utama PT PELNI No: 08/HKO.01/DIRI-2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT Rumah Sakit PELNI dan Surat Keputusan RUPS Nomor: 09.16/1/SK/HKO.01/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pengangkatan dan Pengalihan Dewan Komisaris PT Rumah Sakit PELNI , dengan susunan sebagai berikut:

**Board of Commissioners and Directors**

In accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Pelni No: 128 / HKO.01 / DIR / XII2013 dated December 18, 2013 on the Dismissal and Appointment of Directors PT RS PELNI and SK President Director of PT Pelni No: 08 / HKO.01 / SELF-2014 January 16 2014 on Termination and Appointment of Commissioners of T RS PELNI and Decree No. GMS: 09:16 / 1 / SK / HKO.01 / 2015 dated October 16, 2015 on the Appointment and Transfer of Board of Commissioners of T RS PELNI , with the following composition:

**31 Des/Dec 2016**

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama  
Komisaris  
Komisaris

Elfien Guntoro  
Laksda TNI (PURN) dr. H Darmansyah  
Wibisono, SE., MM

**Board Of Commissioners**

Chief Commissioner  
Commissioner  
Commissioner

**Direksi**

Direktur Utama  
Direktur  
Direktur

dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B.BTKV (K)  
Mohamad Kartobi  
dr. Rooshardianty Suryandari, MBA

**Director**

President Director  
Director  
Director

**Tempat dan Kedudukan**

Saat ini, PT RS Pelni beralamat di Jl. Aipda K.S Tubun No.92-94 Jakarta Barat 11410

**Place and Position**

Currently, PT RS Pelni Located In Aipda K. S Tubun No.92-94 West Jakarta 11410

**Area yang Diusahakan**

Pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan

**Cultivated area**

Management of Hospitals, Clinics, Polyclinics and Health Center

**Kekuatan Sumber Daya Manusia**

Pada tanggal 31 Desember 2016 Entitas memiliki karyawan 1.225 orang berdasarkan status kepegawaian, tingkat pendidikan dan unit Kerja.

**Strength of Human Resources**

The number of employees of the company on December 31, 2016 are 1.255 employees.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
(PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI**

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang relevan dengan aktivitas operasi dan wajib diterapkan pada tanggal tersebut. Kebijakan akuntansi tertentu Perseroan dan Entitas Anak telah diubah seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

**a. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk periode pada atau setelah 1 Januari 2015.**

- PSAK 1 (Revisi 2013), Penyajian Laporan Keuangan

Perubahan signifikan antara lain:

- 1) Perubahan Judul  
Perubahan Judul Laporan Pendapatan Komprehensif Lain menjadi "Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain".
- 2) Penyajian Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif  
Mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua bagian yaitu; Laba Rugi dan Pos Penghasilan Komprehensif Lain.
- 3) Penyajian Pos Penghasilan Komprehensif Lain  
Mensyaratkan entitas untuk menyajikan pos penghasilan komprehensif lain (OCI) yang akan direklasifikasi ke laporan laba rugi pada periode berikutnya setelah penghentian pengakuan terpisah atas pos dari OCI yang tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi.
- 4) Pajak Penghasilan  
Mensyaratkan pajak penghasilan atas pos yang disajikan dalam OCI harus dialokasikan antara pos yang mungkin akan direklasifikasi ke laporan laba rugi dan yang tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi, jika pos dalam OCI disajikan sebelum pajak.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF  
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")  
AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")**

*The Company and Subsidiaries adopted Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and the Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") relevant new and revised by operating activities and shall be applied on that date. Certain accounting policies of the Company and its Subsidiaries have been changed as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.*

**a. Standards and interpretations effective for periods on or after January 1, 2015.**

- PSAK 1 (Revised 2013), Presentation of Financial Statements

*Significant changes include:*

- 1) *Change of title*  
*Changes in Other Comprehensive Income Statements title became "Statement of Income and Other Comprehensive Income".*
- 2) *Statements of Income and Comprehensive Income*  
*Requires an entity to present a statement of income and other comprehensive income in two parts, namely; Income and Other Comprehensive Income Pos.*
- 3) *Presentation of Other Comprehensive Income*  
*Requires an entity to present other comprehensive income post (OCI) to be reclassified to profit or loss in the period following the termination of separate recognition on the post of OCI that will not be reclassified to profit or loss.*
- 4) *Income Tax*  
*Requires income tax on postal presented in OCI should be allocated between the posts that may be reclassified to the income statement and are not to be reclassified to profit or loss, if the post in OCI are presented before tax.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
(PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI (lanjutan)**

**a. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk  
periode pada atau setelah 1 Januari 2015. (lanjutan)**

- PSAK 4 (Revisi 2013), Laporan Keuangan Tersendiri

PSAK 4 (Revisi 2013): Laporan Keuangan Tersendiri menggantikan PSAK 4 (2009): Laporan Keuangan konsolidasianan dan Laporan Keuangan Tersendiri.

Mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.

- PSAK 15 (Revisi 2013), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Mengatur perlakuan akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan mengatur penerapan metode ekuitas pada akuntansi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.

- PSAK 24 (Revisi 2013), Imbalan Kerja

Perubahan signifikan antara lain:

1) Kapan mengakui, dan bagaimana mengukur, liabilitas terkait dengan penyelesaian program imbalan pasti multipemberi kerja, atau keluarnya entitas dari program.

2) Entitas harus mengakui liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laporan posisi keuangan.

3) Penangguhan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuaria tidak diizinkan. Keuntungan dan kerugian aktuarial langsung diakui dalam OCI.

- PSAK 65 (Revisi 2013), Laporan Keuangan Konsolidasian

Menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasianan ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.

- PSAK 66 (Revisi 2013), Pengaturan Bersama

PSAK 66: Pengaturan Bersama menggantikan PSAK 12 (2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama dan ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas – Kontribusi Aset Non Moneter oleh Venturer.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF  
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")  
AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")  
(continued)**

**a. Standards and interpretations effective for  
periods on or after 1 January 2015. (continued)**

- PSAK 4 (Revised 2013), Separate Financial Statements

PSAK 4 (Revised 2013): Separate Financial Statements replaces PSAK 4 (2009): Financial Statements konsolidasianan and Separate Financial Statements.

Set the accounting requirements for investments in subsidiaries, joint ventures and associates when an entity parent present separate financial statements as additional information.

- PSAK 15 (Revised 2013), Investments in Associates and Joint Ventures

Prescribes the accounting treatment of investment in associates and organize the implementation of the equity method in accounting for investments in associates and joint ventures.

- PSAK 24 (Revised 2013), Employee Benefits

Significant changes include:

1) When to recognize, and how to measure, liabilities associated with defined benefit plans multipemberi completion of work, or discharge from the program entities.

2) The entity should recognize a liability (asset) in the net defined benefit statement of financial position.

3) Suspension recognition of actuarial gains and losses are not allowed. Gains and losses are recognized directly in OCI.

- PSAK 65 (Revised 2013), Consolidated Financial Statements

Establishes the principle of the preparation and presentation of financial statements when an entity controls konsolidasianan one or more other entities

- PSAK 66 (Revised 2013), Shared settings

PSAK 66: Joint arrangements replaces PSAK 12 (2009): Interests in Joint Ventures and ISAK 12: Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers assets.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
(PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI** (lanjutan)

a. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk periode pada atau setelah 1 Januari 2015. (lanjutan)

- PSAK 66 (Revisi 2013), Pengaturan Bersama (lanjutan)

Menetapkan prinsip-prinsip pelaporan keuangan entitas yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama (yaitu pengaturan bersama).

- PSAK 67 (Revisi 2013), Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain.

PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain menggantikan pengaturan pengungkapan dalam PSAK 4 (2009): Laporan Keuangan konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri, PSAK 12 (2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama, dan PSAK 15 (2009): Investasi pada Entitas Asosiasi.

Mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi:

- 1) Sifat dan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas lain; dan
- 2) Dampak dari kepentingan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.

- PSAK 68 (Revised 2013), Pengukuran Nilai Wajar

PSAK 68 menetapkan hirarki nilai wajar yang mengkategorikan input dalam tiga level. Hirarki nilai wajar memberikan prioritas tertinggi kepada harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (input Level 1) dan prioritas terendah untuk input yang tidak dapat diobservasi (input Level 3).

- PSAK No. 46 (Revisi 2014), Pajak Penghasilan

Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi.

Mengatur aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.

Tidak mengatur tentang pajak final dan hal khusus mengenai Surat Ketetapan Pajak.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF  
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")  
AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")**  
(continued)

a. Standards and interpretations effective for periods on or after 1 January 2015. (continued)

- PSAK 66 (Revised 2013), Shared settings (continued)

Establishes the principles of financial reporting entity has an interest in a jointly controlled setting (is joint arrangements).

- PSAK 67 (Revised 2013), Disclosure of Interests in Other Entities.

PSAK 67: Disclosure of Interests in Other Entities override disclosures under PSAK 4 (2009): Report of Consolidated Financial and Separate Financial Statements, PSAK 12 (2009): Interests in Joint Ventures, and PSAK 15 (2009): Investments in Associates.

Requires an entity to disclose information that enables users of financial statements to evaluate:

- 1) The nature and risks associated with its interests in other entities; and
- 2) The impact of the interest on its financial position, financial performance, and cash flows of the entity.

- PSAK 68, Measurement of Fair Value

PSAK 68 set a fair value hierarchy that categorizes the inputs into three levels. Fair value hierarchy gives the highest priority to price kuotasi (without adjustment) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1 inputs) and the lowest priority to unobservable inputs (Level 3 inputs).

- PSAK No. 46 (Revised 2014), Tax Income

Set the deferred tax assets and liabilities from assets that are not depreciated is measured using the revaluation model.

Set the deferred tax assets and liabilities from investment property measured using the fair value model.

Does not regulate the final tax and particulars concerning tax assessment letter.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
(PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI** (lanjutan)

a. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk periode pada atau setelah 1 Januari 2015. (lanjutan)

- PSAK No. 48 (Revisi 2014), Penurunan Nilai Aset

Pengaturan investasi pada entitas anak dan ventura bersama dalam laporan keuangan tersendiri mengacu pada PSAK 4 (2013): Laporan Keuangan Tersendiri. PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.

Pengukuran nilai wajar dikurangi biaya pelepasan mengacu pada hirarki nilai wajar dalam PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.

Memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode:

- 1) Jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) dan apakah jumlah terpulihkan aset (unit penghasil kas) merupakan nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya.
  - 2) Jika jumlah terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, entitas
    - Tingkat hirarki nilai wajar sesuai dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar;
    - Teknik penilaian (level 2 dan 3); dan
    - Setiap asumsi utama yang mendasari manajemen untuk menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (level 2 dan 3).
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Penyajian

PSAK No. 50 (revisi 2014) – Instrumen Keuangan: Penyajian, kecuali Paragraf 07, 26, PA41 berlaku Prospektif. PSAK ini menggantikan PSAK No.50 (revisi 2010) – Instrumen Keuangan: Penyajian.

Liabilitas keuangan pada penyelesaian instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, pada saat pengakuan awal diakui sebesar nilai kini dari jumlah penebusan, dan direklasifikasi dari ekuitas.

Pengaturan mengenai pajak penghasilan yang terkait dengan distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas dan biaya transaksi dihapus dan dicatat sesuai dengan PSAK 46: Pajak Penghasilan.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF  
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")  
AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")**

a. *Standards and interpretations effective for periods on or after 1 January 2015. (continued)*

- *PSAK No. 48 (Revised 2014), Impairment of Assets*

*Setting investments in subsidiaries and joint ventures in the separate financial statements referred to in PSAK 4 (2013): Separate Financial Statements. PSAK 4: Financial Statements Consolidated and Separate Financial Statements.*

*Measurement of fair value less costs of disposal refers to the fair value hierarchy in PSAK 68: Measurement of Fair Value.*

*Provide additional disclosure requirements for each individual asset or cash-generating unit which impairment losses have been recognized or reversed during the period:*

- 1) *The recoverable amount of the asset (cash-generating units) and whether the recoverable amount of the asset (cash -generating unit) is its fair value less costs to sell or its value in use.*

2) *If the recoverable amount is fair value less costs of disposal, the entity shall disclose:*

- *Level fair value hierarchy in accordance with PSAK 68: Measurement of Fair Value;*
- *Assessment techniques (level 2 and 3); and*
- *The main assumptions underlying any management to determine fair value less costs of disposal (level 2 and 3).*

- *PSAK No. 50 (Revised 2014), Financial Instruments: Presentation*

*PSAK No. 50 (revised 2014) - Financial Instruments: Presentation, except paragraphs 07, 26, PA41 apply Prospective. PSAK No 50 supersedes PSAK 50 (revised 2010) - Financial Instruments: Presentation.*

*Financial liabilities at the completion of equity instruments issued entity, upon initial recognition are recognized at the present value of the redemption amount, and reclassified from equity.*

*Arrangements regarding income tax relating to distributions to holders of equity instruments and transaction costs deleted and recorded in accordance with PSAK 46: Income Taxes.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
(PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI** (lanjutan)

a. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk periode pada atau setelah 1 Januari 2015. (lanjutan)

- PSAK No. 55 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

PSAK No. 55 (revisi 2014) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, kecuali Paragraf 09, 13, 28, 43A, 47, 88, PP46, PP52, PP64, PP76, PP76A, PP80, PP81, PP96 berlaku Prospektif. Paragraf 02 (g), 97, dan 100 berlaku prospektif untuk seluruh kontrak yang belum berakhir pada periode tahun buku yang dimulai atau setelah 1 Januari 2015. PSAK ini menggantikan PSAK No.55 (revisi 2011) – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Mengatur pencatatan instrumen keuangan saat nilai wajar pada saat pengakuan berbeda dengan harga transaksinya.

Mengatur pengungkapan atas pengukuran atas nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Mengatur penghentian instrumen lindung nilai. Instrumen lindung nilai tidak dapat dianggap telah kedaluwarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan jika:

- Sebagai konsekuensi hukum atau regulasi atau pengenalan hukum atau regulasi.
- Perubahan lain, jika ada, untuk instrumen lindung nilai yang terbatas pada perubahan lain yang diperlukan untuk efek pengganti atas pihak lawan.

Mengatur tanggal pencatatan instrumen keuangan saat nilai wajar pada saat pengakuan berbeda dengan harga transaksi.

- PSAK No. 60 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengungkapan

PSAK No. 60 (revisi 2014) – Instrumen Keuangan: Pengungkapan, kecuali Paragraf 03, 28, 30, 31, 32, dan Lampiran A berlaku Prospektif. PSAK ini menggantikan PSAK No.60 (revisi 2010) – Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF  
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")  
AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")**  
(continued)

a. Standards and interpretations effective for periods on or after 1 January 2015. (continued)

- PSAK No. 55 (Revised 2014), Financial Instruments: Recognition and Measurement.

PSAK No. 55 (revised 2014) - Financial Instruments: Recognition and Measurement, except for paragraphs 09, 13, 28, 43A, 47, 88, PP46, PP52, PP64, PP76, PP76A, PP80, PP81, PP96 apply Prospective. Paragraph 02 (g), 97, and 100 applies prospectively to all contracts that have not expired during the period of the financial year beginning on or after January 1, 2015. PSAK supersedes ISAK 55 (revised 2011) - Financial Instruments: Recognition and Measurement.

Set the recording of the current financial instruments fair value at the time of recognition differs from the transaction price.

Set the disclosures of fair value measurement of financial assets or financial liabilities.

Set the termination of the hedging instrument. Hedging instruments can not be deemed to have expired or sold, terminated or carried out if:

- As a consequence of the introduction of laws or regulations or laws or regulations.
- Other changes, if any, on the hedging instrument that is limited to the other changes necessary to effect a replacement on the opposing side.

Set the recording date when the fair value of financial instruments at the time of recognition differs from the transaction price.

- PSAK No. 60 (Revised 2014), Financial Instruments: Disclosures

PSAK No. 60 (revised 2014) - Financial Instruments: Disclosures, except for paragraphs 03, 28, 30, 31, 32, and Attachment A Prospective applicable. PSAK upersedes PSAK 60 (revised 2010) - Financial Instruments: Disclosures.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
(PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI** (lanjutan)

a. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk periode pada atau setelah 1 Januari 2015. (lanjutan)

- PSAK No. 60 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengungkapan (lanjutan)

Pengaturan pengungkapan dan hierarki nilai wajar mengacu pada PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.

Ketika entitas tidak mengakui laba rugi pada pengakuan awal aset keuangan dan liabilitas keuangan karena nilai wajar tidak dapat dibuktikan oleh harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penialian, entitas mengungkapkan:

- Kebijakan akuntansi untuk mengakui perbedaan nilai wajar pada pengakuan awal dan harga transaksi.
- Agregat perbedaan yang belum diakui dalam laba rugi.
- Alasan entitas menyimpulkan harga transaksi bukan merupakan bukti terbaik dari nilai wajar.

Memberikan persyaratan pengungkapan yang berbeda untuk entitas yang mengalihkan aset keuangan yang tidak dihentikan pengakumannya secara keseluruhan dan pengungkapan aset keuangan yang dihentikan secara keseluruhan.

- ISAK No. 26 (Revisi 2014), Penilaian Kembali Derivatif Melekat
- Pencabutan PSAK 12 (Revisi 2009) "Bagian Partisipasi Ventura Bersama"
- Pencabutan ISAK 12 "Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Non Moneter Oleh Venturer"
- Pencabutan ISAK 7 "Konsolidasian Entitas Bertujuan Khusus"

Penerapan lebih dini terhadap revisi dan standar baru tidak diperkenankan.

Manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya terhadap

- ISAK No. 26 (Revisi 2014), Penilaian Kembali Derivatif Melekat

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF  
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")  
AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")**  
(continued)

a. Standards and interpretations effective for periods on or after 1 January 2015. (continued)

- PSAK No. 60 (Revised 2014), Financial Instruments: Disclosures (continued)

Setting disclosure and fair value hierarchy refers to PSAK 68: Measurement of Fair Value.

When an entity does not recognize gain or loss on initial recognition of financial assets and financial liabilities as fair value can not be proven by kuotasi prices in active markets for identical assets or liabilities or based on a valuation technique, the entity shall disclose:

- Accounting policy to recognize the difference in the fair value at initial recognition and the transaction price.
- Aggregate differences not recognized in profit or loss.
- Reason entities conclude the transaction price is not the best evidence of fair value.

Provide different disclosure requirements for entities that transfer financial assets that are not derecognised as a whole and disclosure of financial assets are terminated as a whole.

- ISAK No. 26 (Revisi 2014), Revaluation of Embedded Derivatives
- Revocation of PSAK 12 (Revised 2009) "Interests Joint Ventures"
- Revocation of ISAK 12 "Jointly Controlled Entities Non- Monetary Contributions by Venturers "
- Revocation of ISAK 7 " Consolidated Special Purpose Entities"

Early application of the revised and new standards are not allowed.

Management is still evaluating the possible impact of the adoption of these new and revised standards and its influence on financial statement

- ISAK No. 26 (Revisi 2014), Revaluation of Embedded Derivatives

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
(PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI** (lanjutan)

**a. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk  
periode pada atau setelah 1 Januari 2015.** (lanjutan)

- Pencabutan PSAK 12 (Revisi 2009) "Bagian Partisipasi Ventura Bersama"
- Pencabutan ISAK 12 "Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Non Moneter Oleh Venturer"
- Pencabutan ISAK 7 "Konsolidasian Entitas Bertujuan Khusus"

Penerapan lebih dini terhadap revisi dan standar baru tidak diperkenankan.

Manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan.

**• ISAK 27, Pengalihan Aset dari Pelanggan**

Intepretasi ini ditetapkan untuk akuntansi pengalihan aset tetap oleh entitas yang menerima pengalihan tersebut dari pelanggannya.

Intepretasi ini digunakan untuk membahas masalah pengakuan, pengukuran dan pencatatan pengalihan aset dari pelanggan.

**• ISAK 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan  
Instrumen Ekuitas**

Mengatur mengenai pertukaran utang dengan ekuitas (*debt for equity swap*). Instrumen ekuitas yang diterbitkan kepada kreditur untuk mengakhiri seluruh atau sebagian dari utang dinilai sebesar nilai wajar instrumen ekuitas yang diterbitkan, kecuali nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, maka entitas mengukur instrumen ekuitas tersebut sebesar nilai wajar liabilitas yang diakhiri.

**b. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk  
periode pada atau setelah 1 Januari 2014**

Jika hanya sebagian liabilitas keuangan yang diakhiri maka entitas memperhitungkan apakah sebagian dari imbalan yang dibayarkan terkait dengan modifikasi liabilitas yang tersisa, maka entitas mengalokasi imbalan yang dibayarkan antara bagian liabilitas yang diakhiri dan bagian dari liabilitas yang tersisa.

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF  
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")  
AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")**  
(continued)

**a. Standards and interpretations effective for  
periods on or after 1 January 2015.** (continued)

- Revocation of PSAK 12 (Revised 2009) "Interests Joint Ventures"
- Revocation of ISAK 12 "Jointly Controlled Entities Non- Monetary Contributions by Venturers"
- Revocation of ISAK 7 " Consolidated Special Purpose Entities"

*Early application of the revised and new standards are not allowed.*

*Management is still evaluating the possible impact of the adoption of these new and revised standards and its influence on financial statement presentation.*

**• ISAK 27, Transfer of Assets from Customers**

*Such is set for the transfer of fixed assets accounting by entities that receive such transferred of customers.*

*This interpretation is used to discuss the problem of recognition, measurement and recording of the transfer of assets from customers.*

**• ISAK 28, Termination of Financial Liabilities with  
Equity Instruments**

*Regulates the exchange of debt for equity (debt for equity swap). Equity instruments issued to a creditor to terminate all or part of the debt is valued at wjar value of equity instruments issued, unless the fair value can not be measured reliably, then the entity's equity instruments are measured at fair value liabilities are terminated.*

**b. Standards and interpretations effective for  
periods on or after January 1, 2014**

*If only a portion of the financial liabilities that ends it shall take into account whether a portion of the compensation paid related to the modification of the remaining liability, the entity shall allocate the consideration paid between the liabilitas were terminated and the remaining portion of the liability.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
(PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI** (lanjutan)

**b. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif untuk  
periode pada atau setelah 1 Januari 2014** (lanjutan)

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang diakhiri dengan imbalan yang dibayarkan diakui sebagai pos terpisah dalam laba rugi sesuai PSAK 55 atau dalam catatan atas laporan keuangan.

- ISAK 29, Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka
- PSAK 12, Pencabutan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum

Penerapan standar dan interpretasi tersebut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian, dan ISAK atas 29 dan PPSAK 12 merupakan standar dan intepretasi yang tidak relevan untuk diterapkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian.

**c. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif dan  
telah diterapkan**

Berikut ini standar baru dan standar revisi serta interpretasi yang relevan namun tidak berdampak material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian.

- PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK 13 (revisi 2011), Properti Investasi
- PSAK 16 (revisi 2011), Aset Tetap
- PSAK 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja
- PSAK 26 (Revisi 2011), Biaya Pinjaman
- PSAK 28 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi
- PSAK 30 (Revisi 2011), Sewa
- PSAK 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi
- PSAK 36 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi
- PSAK 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan
- PSAK 50 (Revisi 2010), Instrumen Keuangan:
- PSAK 53 (Revisi 2010), Pembayaran Berbasis

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF  
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")  
AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")**  
(continued)

**b. Standards and interpretations effective for  
periods on or after January 1, 2014** (continued)

*The difference between the carrying amount of financial liabilities, which ended with the compensation paid is recognized as a separate heading in the profit or loss in accordance with PSAK 55 or in the notes to the financial statements.*

- ISAK 29, Stripping Costs in the Production Phase of Mines Open
- PSAK 12, Revocation of PSAK 33: Activity Stripping and Environmental Management in General Mining

*The application of these standards and interpretations did not cause significant changes in the accounting policies of the Company and does not provide a material impact on the amounts reported in the consolidated financial statements, and IFAS on 29 and PPSAK 12 standards and interpretations that are not relevant to be applied by the Company up to the date of issuance consolidation financial statements.*

**c. Standards and interpretations that will be  
effective and has been applied**

*The following new standards and revised standards and interpretations that are relevant but no material impact on the consolidated financial statements.*

- PSAK 10 (Revised 2010), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
- PSAK 13 (Revised 2011), Investment Property
- PSAK 16 (Revised 2011), Fixed Assets
- PSAK 18 (Revised 2010), Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
- PSAK 24 (Revised 2010), Employee Benefits
- PSAK 26 (Revised 2011), Borrowing Costs
- PSAK 28 (Revised 2011), Accounting for
- PSAK 30 (Revised 2011), Lease
- PSAK 34 (Revised 2010), Construction contracts
- PSAK 36 (Revised 2011), Life Insurance Contract
- PSAK 46 (Revised 2010), Income Tax
- PSAK 50 (Revised 2010), Financial Instruments: "
- PSAK 53 (Revised 2010), Share-based Payment

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
(PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (ISAK) BARU DAN REVISI (lanjutan)**

**c. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif dan  
telah diterapkan (lanjutan)**

- PSAK 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: "Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK 56 (Revisi 2011), Laba Per Saham
- PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- PSAK 62, Kontrak Asuransi
- PSAK 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- ISAK 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK 16, Perjanjian Jasa Konsesi
- ISAK 17, Laporan Keuangan Interim dan
- ISAK 20, Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
- ISAK 22, Perjanjian Konsensi Jasa Pengungkapan
- ISAK 23, Sewa Operasi - Insentif
- ISAK 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa.
- ISAK 25, Hak Atas Tanah
- ISAK 28, Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

**2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF  
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")  
AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")**  
(continued)

**c. Standards and interpretations that will be  
effective and has been applied (continued)**

- PSAK 55 (Revised 2011), Financial Instruments: "Recognition and Measurement"
- PSAK 56 (Revised 2011), Earnings Per Share
- PSAK 60, Financial Instruments: Disclosures
- PSAK 61, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
- PSAK 62, Insurance contracts
- PSAK 63, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
- ISAK 15, PSAK 24 - Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
- ISAK 16, Concession Services Agreement
- ISAK 17, Interim Financial Reporting and
- ISAK 20, Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
- ISAK 22, Disclosure Services Concession
- ISAK 23, Operating Leases - Incentives
- ISAK 24, Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of Lease.
- ISAK 25, Land Rights
- ISAK 28, Termination of Financial Liabilities with Equity Instruments

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan ini telah disajikan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi antara lain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia yang telah konvergen dengan IFRS (*International Financial Report Standard*).

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING**

**a. The Statement of Compliance**

The financial statements have been prepared referring to the Financial Accounting Standards in Indonesia which include, among others, Statement of Financial Accounting Standards (IAS) and Interpretations of Financial Accounting Standards (IFAS) issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) - Indonesian Institute of Accountants who have been converging with IFRS (International Financial Report Standard).

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 untuk diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2017.

The Company's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and has approved the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2016 to be published on February 27, 2017.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**a. Pernyataan Kepatuhan** (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank, dan investasi jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Nilai aset dan kewajiban dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontinjenji pada tanggal laporan keuangan konsolidasi,
- Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.
- Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ditranslasi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan.

**b. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**a. The Statement of Compliance** (continued)

*The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.*

*Statement of Cash Flows prepared using the direct method the cash flows into operating, investing and financing activities. For the purpose of reporting cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash at bank and short-term investments that will mature within three months or less, net of overdrafts.*

*In the preparation of consolidated financial statements in accordance with financial accounting standard in Indonesia requires estimates and assumptions that affect:*

- *Value of reported assets and liabilities, and disclosure of contingent assets and liabilities on the consolidated financial statements,*
- *Revenues and expenses during the reporting period.*
- *Although these estimates are based on management's best knowledge of the event and the current action, the results may differ resulting in the amount originally estimated.*

*The reporting currency used in preparation of the consolidation financial statements is Indonesian Rupiah (IDR). Monetary Assets and Liabilities denominated in foreign currencies are converted at the middle exchange rate of Bank Indonesia prevailing at the financial position statements date.*

**b. Changes in Accounting Policy and Disclosures**

*The accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with the accounting policies applied in the preparation of consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (dan Entitas Anak). Pengendalian dianggap ada apabila Perusahaan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional dari investee untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Pengendalian juga dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak lebih dari 50% hak suara.

Kepentingan nonpengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Efektif 1 Januari 2011, kepentingan nonpengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi.

Kepentingan nonpengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Efektif 1 Januari 2011, kepentingan nonpengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan non pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan nonpengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah pendapatan komprehensif diatribusikan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Entitas-entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memeliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas-entitas Anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**c. Principles of Consolidation**

*The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities controlled by the Company (and its subsidiaries). Control is achieved where the Company has the power to govern the financial and operating policies of the investee entity so as to obtain benefits from its activities. Control is presumed to exist when the Company owns directly or indirectly through subsidiaries, more than 50% of the voting rights.*

*Non-controlling interest in subsidiaries are identified separately and presented within equity. Effective January 1, 2011, the interest of non-controlling shareholders maybe initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on acquisition by acquisition basis.*

*Non-controlling interest in subsidiaries are identified separately and presented within equity. Effective January 1, 2011, the interest of non-controlling shareholders maybe initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on acquisition by acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus non-controlling interests' share of subsequent changes in equity. Total comprehensive income is attributed to non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.*

*Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through subsidiaries, more than a half of the voting power of an entity.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi** (lanjutan)

Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suatu entitas jika terdapat:

- a. Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
- b. Kekuasaan yang mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- c. Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut; atau
- d. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapatdireksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tersebut.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non Pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan Kepentingan Non Pengendali mempunyai saldo defisit.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, Kelompok Usaha:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap Kepentingan Non Pengendali;
- c. Menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- d. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e. Mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f. Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan
- g. Mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laporan laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

Kepentingan Non Pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**c. Principles of Consolidation** (continued)

*Control also exists when the parent owns half or less of the voting power of an entity when there is:*

- a. Power over more than half of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;
- b. Power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;
- c. Power to appoint or replace the majority of the Directors or equivalent regulatory organs and control the entity through the Board of Directors by that board or body; or
- d. Power to cast the majority of votes at meetings of the directors of equivalent regulatory organs and control the entity through the Directors or the organ.

*Losses of a non-wholly owned subsidiaries are attributed to the Non-Controlling Interest even if that Non-Controlling Interest in a deficit balance.*

*In case of loss of control over a subsidiary, the Group;*

- a. Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
- b. Derecognizes the carrying amount of any the Non Controlling Interest;
- c. Derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
- d. Recognizes the fair value of the consideration received;
- e. Recognizes the fair value of any investment retained;
- f. Recognizes any surplus or deficit in statement of income; and
- g. Reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.

*The Non-Controlling Interest represents the portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the Company, which are presented in the consolidated statements of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi** (lanjutan)

Bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset neto Entitas Anak disajikan sebagai "Kepentingan Nonpengendali" pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian. Hak minoritas atas laba (rugi) neto Entitas Anak pada Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian disajikan sebagai "Laba/Rugi Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Hasil dari anak perusahaan yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan dari tanggal efektif akuisisi atau sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasi.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan induk perusahaan.

Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi.

**d. Akuntansi Grup**

**Entitas Anak**

- Semua Entitas Anak dikonsolidasikan. Entitas Anak adalah suatu entitas (termasuk Entitas Bertujuan Khusus) dimana Grup memiliki kepemilikan sebesar lebih dari setengah hak suara atau mampu menentukan kebijakan keuangan dan operasional.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**c. Principles of Consolidation** (continued)

Part of minority shareholders in net assets of Subsidiaries are presented as "Non-controlling Interest" in the Consolidated Statement of Financial Position. Non-Controlling interest in net earnings (loss) of Subsidiaries are presented in the Consolidated Statement of Comprehensive Income as "Profit/Loss for the Period Attributable to Non-Controlling Interest".

Change in the Company and its subsidiaries interest in subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company and its subsidiaries interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to owners of the Company.

The results of subsidiaries acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statements of comprehensive income from the effective date of acquisition or up to the effective date of disposal, as appropriate.

Where necessary, adjustments are made to the financial statement of the subsidiaries to bring the accounting policies used in line with those used by the parent.

All intra-group transactions, balances, income and expenses are eliminated on consolidation.

**d. Group Accounting**

**Subsidiaries**

- All consolidated subsidiaries. Subsidiary is an entity (including Specific Aims Entity) which the Group has ownership of more than half the voting rights or be able to determine the financial and operational policies.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**d. Akuntansi Grup** (lanjutan)

**Entitas Anak** (lanjutan)

- Entitas Anak dikonsolidasikan sejak tanggal kendali atas Entitas Anak tersebut beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak tanggal kendali tidak lagi dimiliki oleh Grup. Dalam mencatat akuisisi Entitas Anak digunakan metode pembelian. Biaya akuisisi diukur sebesar nilai wajar asset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berkaitan secara langsung dengan akuisisi. Kelebihan biaya akuisisi atas nilai wajar aset bersih Entitas Anak dicatat sebagai *goodwill*.
- Transaksi antar perusahaan dalam Grup, saldo dan keuntungan yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan dalam Grup, dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi, kecuali apabila biaya perolehan tidak dapat diperoleh kembali. Jika diperlukan, kebijakan akuntansi Entitas Anak diubah agar konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup.
- Perusahaan asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak sampai mengendalikan entitas-entitas tersebut. Dalam hal ini Grup umumnya memiliki antara 20% sampai 50% hak suara. Investasi pada perusahaan asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Investasi Grup pada perusahaan asosiasi mencakup juga *goodwill* (dikurangi akumulasi penurunan nilai) yang diidentifikasi pada saat akuisisi.

**e. Perusahaan Asosiasi**

- Bagian Grup atas keuntungan atau kerugian perusahaan asosiasi yang diperoleh setelah tanggal akuisisi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif interim konsolidasian. Kumulatif keuntungan atau kerugian setelah tanggal akuisisi akan mempengaruhi nilai tercatat investasi.

Apabila bagian Grup atas kerugian dalam perusahaan asosiasi menyamai atau melebihi bagian kepemilikannya dalam perusahaan asosiasi, termasuk piutang yang tidak dijamin lainnya, Grup tidak mengakui kerugian lebih lanjut, kecuali Grup telah mengakui liabilitas atau melakukan pembayaran atas nama perusahaan asosiasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**d. Group Accounting** (continued)

**Subsidiaries** (continued)

- Subsidiaries are consolidated from the date control of the subsidiary switch to the Group and are no longer consolidated from the date control is no longer owned by the Group. In the acquisition of subsidiaries recorded use purchase method. Acquisition cost is measured at fair value of assets given, shares issued or liabilities are taken over on the date of acquisition, plus costs directly associated with the acquisition. Excess acquisition costs over fair value of net assets of subsidiaries is recorded as goodwill.
- Transactions between companies within the Group, balances and unrealized profits from transactions between companies within the Group, are eliminated. Unrealized losses are also eliminated unless acquisition cost can not be recovered. If necessary, accounting policies of subsidiaries changed to be consistent with the accounting policies applied by the Group.
- Associated companies are all entities over which the Group has significant influence, but not to control these entities. In this case the Group generally has between 20 % to 50 % of the voting rights. Investments in associates are accounted for under the equity method and are initially recorded at cost. The Group's investment in associated companies includes goodwill (net of accumulated impairment loss) identified on acquisition.

**e. Associated Company**

- Group's share of profits or losses of associated companies acquired after the date of acquisition is recognized in the statement of consolidated comprehensive income. Cumulative gains or losses after the date of the acquisition will affect the carrying value of the investment.

When the Group's share of losses in an associated company equals or exceeds its interest in an associated company part, including other unsecured receivables, the Group does not recognize further losses, unless the Group has recognized a liability or made payments on behalf of the associate.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**e. Perusahaan Asosiasi** (lanjutan)

- Keuntungan yang belum direalisasi dari transaksi antara Grup dengan perusahaan asosiasi, dieliminasi sebesar jumlah yang mencerminkan proporsi kepemilikan Grup dalam perusahaan asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Apabila diperlukan, kebijakan akuntansi perusahaan asosiasi diubah agar konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Grup.

**f. Transaksi Dalam Mata Uang Asing**

Pembukuan Entitas diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs tetap yang ditetapkan pada awal bulan transaksi berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan sebelumnya.

Pos aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**e. Associated Company** (continued)

- Unrealised gains on transactions between the Group and associated companies are eliminated at an amount that reflects the Group's proportionate share of the associates. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Where necessary, accounting policies of associates modified to be consistent with the accounting policies applied in the Group.

**f. Transactions in Foreign Currency**

Reporting Entities are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded using the fixed exchange rate set at the beginning of the transaction by Bank Indonesia middle rate at the end of the previous month.

Assets and liabilities denominated in foreign currencies into Rupiah using Bank Indonesia middle rate at the balance sheet date.

	<b>2016 Rp</b>	<b>2015 Rp</b>	
1 AUD	9.724	10.064	1 AUD
1 EURO	14.162	15.069	1 EURO
1 USD	13.436	13.795	1 USD
100 JPY	11.500	11.453	100 JPY
1 SGD	9.299	9.751	1 SGD

**g. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, uang yang ada di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya.

**h. Penyisihan Piutang Usaha**

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih yang diestimasi berdasarkan penelaahan terhadap umur piutang.

**g. Cash and Cash Equivalents**

Cash and cash equivalents consist of cash, cash in banks and time deposits maturing within three months or less from the date of placement.

**i. Impairment of Account Receivables**

Account receivables are recorded net of an allowance for doubtful accounts is estimated based on a review of the accounts receivable aging.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**h. Penyisihan Piutang Usaha** (lanjutan)

Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dihapuskan dari pembukuan. Namun demikian penghapusan tersebut tetap mengikuti prosedur sebagaimana diatur dan berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

**i. Instrumen Keuangan**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan Pengungkapan", sebagai dampak penerapan PSAK tersebut adalah tambahan pengungkapan pada kebijakan akuntansi perusahaan dan pengungkapan pada catatan 43 mengenai Instrumen Keuangan: Informasi Resiko Keuangan.

- 1) PSAK No. 50 (Revisi 2010) berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasi informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang suatu entitas yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.
- 2) PSAK No. 55 (Revisi 2011) mengatur prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item nonkeuangan PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Impairment of Account Receivables** (continued)

*Receivables are really not billable written off. However, the elimination of fixed following the procedures as set forth and apply for State-Owned Enterprises (SOE).*

**i. Financial Instruments**

*Effective January 1, 2012, the Company and Its Subsidiary applied PSAK No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments Recognition and Measurement" and PSAK No. 60, "Financial Instruments:Disclosures". The impact of this PSAK are additional disclosure in the company's accounting policies and disclosures on note 43 on Financial Instruments: Financial Risk Information.*

*1) PSAK No. 50 (Revised 2010) contains the requirements for the presentation of financial instruments and identifies the information that should be disclosed. The presentation requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interest, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset. This PSAK requires the disclosures of, among others, information about factors that affect the amount, timing and certainty of an entity's future cash flows relating to financial instruments and the accounting policies applied to those instruments.*

*2) PSAK No. 55 (Revised 2011) establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. This PSAK provides the definitions and characteristics of derivatives, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships, among others.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

2) (lanjutan)

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuananya, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.

PSAK No. 60 mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengukuran nilai wajar dan risiko likuiditas. Pengukuran nilai wajar terkait pos yang dicatat pada nilai wajar disajikan berdasarkan sumber input dengan menggunakan tiga tingkatan hirarki nilai wajar untuk setiap kelas instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar. Sebagai tambahan, PSAK ini mewajibkan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir untuk pengukuran nilai wajar tingkat 3, demikian pula pengungkapan transfer antar tingkatan dalam hirarki nilai wajar.

PSAK ini juga menjelaskan lebih lanjut persyaratan pengungkapan risiko likuiditas transaksi derivatif dan aset yang digunakan untuk pengelolaan likuiditas. Pengungkapan pengukuran nilai wajar diungkapkan pada Catatan 40. Pengungkapan risiko likuiditas tidak terpengaruh secara signifikan oleh PSAK ini.

**Pengakuan awal**

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah (dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

2) (continued)

*Financial assets within the scope of PSAK No.. 55 (Revised 2011) are grouped into 4 categories, namely (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) investments held to maturity, and (iv) asset financial available for sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition, where allowed and appropriate, re-evaluate the classification of the asset at the end of each financial period.*

*PSAK No. 60 requires additional disclosures over fair value measurement and liquidity risk. Fair value measurements related post recorded at fair value are presented based on the input source by using three levels of the fair value hierarchy for each class of financial instruments measured at fair value. In addition, PSAK requires the reconciliation between the beginning and ending balance for level 3 fair value measurements, as well as the disclosure of transfers between levels in the fair value hierarchy.*

*PSAK It also describes further the liquidity risk disclosure requirements of derivative transactions and assets used for liquidity management. Disclosure of fair value measurement is disclosed in Note 40 Liquidity risk disclosures are not significantly affected by these PSAK.*

**Initial Recognition**

*Financial assets are initially recognized at fair value plus (in the case of investments which are not measured at fair value through profit and loss) that transaction costs are directly attributable. The purchase or sale of financial assets that require delivery of assets within a period specified by regulation or custom prevailing in the market (a common trade) are recognized on trade date, the date the Company committed to buy or sell the asset.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

**Pengakuan awal** (lanjutan)

Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang antar badan hukum.

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

**1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba-rugi (*fair value through profit and loss* ["FVTPL"]).**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan dalam laporan neraca pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif yang terpisah apabila karakteristik dan risikonya tidak berkaitan erat dengan kontrak utama, dan kontrak utama tersebut tidak dinyatakan dengan nilai wajar. Derivatif melekat ini diukur dengan nilai wajar dengan laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi. Penilaian kembali hanya terjadi jika terdapat perubahan dalam ketentuan-ketentuan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang akan diperlukan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

**Initial Recognition** (continued)

The Company's financial assets include cash and cash equivalents, account receivable other receivables and receivables between legal entities.

**Measurement After Initial Recognition**

Measurement of financial assets after initial recognition depends on the classification as follows:

**1) Financial assets are measured at fair value through income statement (*fair value through profit and loss* ["FVTPL"]).**

Financial assets are measured at fair value through profit and loss, including financial assets for trading and financial assets are determined at the time of initial recognition to be measured at fair value through profit or loss. Financial assets classified as trading securities, if they are acquired for the purpose of sale or repurchase in the near future. Derivative assets are also classified as trading, unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets are measured at fair value through profit or loss is presented in consolidated balance sheet at fair value with gains or losses arising from changes in fair value recognized in statement of profits and losses.

Derivatives embedded in main contracts are recorded as separate derivatives when characteristics and risks are not closely related to main contract, and main contract is not carried at fair value. These embedded derivatives are measured at fair value with gains or losses arising from changes in fair value recognized in earnings. The revaluation occur only if there is a change in the terms of the contract that significantly alter cash flow that will be required.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal** (lanjutan)

**2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi. Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lainnya, dan piutang antar badan hukum termasuk dalam kategori ini.

Saldo kas dan setara kas yang dimiliki dan deposito berjangka dengan periode jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dalam kondisi dijadikan jaminan.

**• Piutang Usaha**

Piutang usaha adalah jumlah tagihan yang diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi untuk penurunan nilai.

Penyisihan piutang tak tertagih didasarkan kepada tingkat kolektibilitas dan kondisi debitur selama 3 - 5 tahun sebelumnya dan sampai saat ini penilaian tingkat kolektibilitas dilakukan secara individual masing-masing debitur, antara lain penilaian didasarkan atas pertimbangan, antara lain:

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

**Measurement After Initial Recognition** (continued)

**2) Loans and Receivables**

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or predetermined payment, which does not have a quotation in an active market. Financial assets are measured at amortized cost by using the effective interest rate method.*

*Gains and losses recognized in profit and loss statements as loans and receivables derecognized or impaired, as well as during the process of amortization. Cash and cash equivalents, accounts receivables, other receivables, and inter-legal entity receivables included in this category.*

*Cash and cash equivalents and time deposits held with maturities of 3 (three) months or less from the date of placement and not in a condition collateralized.*

**• Account Receivables**

*Accounts receivable is the amount of charge given in the transaction of business in general. If payment of receivables expected to be completed within one year or less (or in normal operation of the business cycle if longer), these receivables are classified as current assets. If not, receivables are presented as non-current assets.*

*Account receivables are recognized initially at fair value and subsequently remeasured at amortized cost using the effective interest rate method, less provision for impairment.*

*Allowance for doubtful account based on the collectibility and condition of the debtor during the 3-5 years before and up to date assessment of the collectibility done individually each debtor, including the assessment is based on the consideration of, among others:*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

i. **Instrumen Keuangan** (lanjutan)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

• **Piutang Usaha** (lanjutan)

- Debitur sudah tidak beroperasi;
- Langkah konfirmasi sudah dilakukan, namun tidak pernah ada jawaban, dan alamat debitur sudah tidak dapat dilacak.
- Piutang tersebut telah diajukan ke KP2LN, tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.

Penghapusbukuan piutang harus mendapat persetujuan lebih dahulu Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, berdasarkan salah satu kriteria pokok berikut ini:

- Telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan, bagi debitur yang berbentuk badan usaha.
- Piutang tersebut telah dinyatakan oleh PUPLN / Pengadilan tidak dapat ditagih.
- Dokumen pendukung tagihan kepada pelanggan hilang dan tidak diperoleh dokumen pengganti yang sah dan relevan.

Piutang yang telah dihapusbukukan, dicatat secara ekstra-komtabel dan tidak menghilangkan kewajiban penagihan. Apabila ternyata piutang tersebut dapat dibayar / dilunasi oleh debitur, dicatat dan diklasifikasikan dalam akun "pendapatan Lain-lain".

3) **Investasi dimiliki hingga jatuh tempo**

Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo ketika Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

i. **Financial Instruments** (continued)

**Measurement After Initial Recognition** (continued)

2) **Loans and Receivables**

• **Account Receivables** (continued)

- *Debtor is not in operation;*
- *Confirmation step has been done, but there was never any answer, and the address of the debtor is not traceable.*
- *Receivable has been forwarded to KP2LN, but until now there is no completion.*

*Accounts receivable write-off must be approved by the Commissioner in accordance with the Articles of Association, according to one of the following basic criteria:*

- *It has been declared bankrupt by court decisions, for the debtor the form of business.*
- *The receivable has been stated by PUPLN / Court uncollectable.*
- *The supporting documents to the customer bill is lost and not found a replacement document is legitimate and relevant.*

*Receivables previously write-off, are recorded by extracomptable and does not eliminate liability for collection. If it turns out the receivables are paid by the debtor, are recorded and classified as "Other income".*

3) **Held-to-maturity investments (HTM)**

*Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity are classified as held-to-maturity when the Company has the positive intention and ability to hold financial assets to maturity. After initial measurement, held to maturity investments are measured at amortized cost using the effective interest rate method. This method uses an effective interest rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to the net carrying amount of the financial asset. Gains and losses are recognized in the income statement when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

i. **Instrumen Keuangan** (lanjutan)

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal** (lanjutan)

3) **Investasi dimiliki hingga jatuh tempo** (lanjutan)

Aset Keuangan yang dikategorikan sebagai Investasi dimiliki hingga Jatuh Tempo adalah investasi jangka pendek / penempatan dalam bentuk deposito. Pada tanggal 31 Desember 2016 Perusahaan tidak memiliki investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

4) **Aset keuangan tersedia untuk dijual**

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuan. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklas ke laporan laba rugi komprehensif sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Jika Perusahaan memiliki investasi berikut yang diklasifikasikan sebagai AFS, maka:

- Investasi saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20%, dan investasi jangka panjang lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Penerapan nilai wajar bilamana memungkinkan menggunakan mark to model, dengan mendapatkan Rencana Jangka Panjang investee, dan diperhitungkan dengan metode tingkat rata-rata arus kas masuk bersih selama 3-5 tahun kedepan yang didiskonto dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Investasi saham ekuitas yang nilai wajarnya tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20% dan yang diklasifikasikan dalam kelompok AFS, dicatat sebesar nilai wajarnya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

i. **Financial Instruments** (continued)

**Measurement After Initial Recognition** (continued)

3) **Held-to-maturity investments (HTM)** (continued)

Financial assets classified as held to maturity investments are short-term investments / placements in the form of deposits. On December 31, 2016 the Company has no investments held to maturity.

4) **Available-for-sale financial assets (AFS)**

Available for Sales (AFS) financial assets are non-derivative financial assets designated as available for sale or not classified in the three previous categories.

After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with gains or unrealized losses recognized in equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity will be reclassified into earnings as a reclassification adjustment.

If the Company has investments are classified as AFS, then:

- Investments stock market values are not available to the Ownership of capital is less than 20%, and other long-term investments are stated at cost. Application of fair value whenever possible to use mark to model, by obtaining the Long Term Plan of the investee, and calculated with the method of the average level of net cash inflow over the next 3-5 years are discounted using the effective interest rate method.
- Investment in equity shares with a fair market value of the equity interest of less than 20% and which are classified as AFS, is recorded at fair value.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

**Penghentian pengakuan aset keuangan**

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Perusahaan mentransfer aset keuangan, maka Perusahaan mengevaluasi sejauh mana Perusahaan tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan dikelompokkan ke dalam kategori:

**1) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Komprehensif**

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2016.

**2) Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang bank, jaminan pelanggan, Dana Reboisasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

**Derecognition of Financial Assets**

*The Company to stop the recognition of financial assets, if and only if the contractual rights to cash flow from financial assets expire; or contractual right to transfer the Company to receive cash flows derived from assets and financial; or retains the contractual right to receive cash flows from of financial assets but also bear contractual liability to pay the received cash flows to one or more recipients through an agreement that meets certain requirements. When the Company transfers the financial asset, the Company evaluates the extent to which the Company retains the risks and benefits of ownership of financial assets are.*

*Financial Liabilities are grouped into categories:*

**1) Financial Liabilities Measured at Fair Value Through Statement of Comprehensive Income**

*Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities held for trading. Financial liabilities are classified as financial liabilities held for trading if acquired principally for selling or repurchasing in the near future and there is evidence of a tendency to take advantage in the short term. No financial liabilities are classified as financial liabilities that are traded on December 31, 2016.*

**2) Financial Liabilities are Measured by Amortized Cost**

*Financial liabilities that are not classified as financial liabilities measured at fair value through statement of comprehensive income and are classified in this category are measured at amortized cost. Financial liabilities measured at amortized cost, among others, accounts payable, bank debt, guarantees the customer, the reforestation Fund.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

**Pengakuan Awal**

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2011) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, pinjaman dan hutang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan hutang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi hutang usaha dan hutang lainnya, beban akrual, hutang jangka panjang dan hutang pihak berelasi, instrumen keuangan derivatif, serta liabilitas keuangan lancar dan tidak lancar lainnya.

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.
- Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Kewajiban derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Keuntungan atau kerugian atas kewajiban yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.
- **Pinjaman dan Utang**  
Setelah pengakuan awal, pinjaman dan hutang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba-rugi pada saat kewajiban tersebut dihentikan pengakuan serta melalui proses amortisasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

**Initial Recognition**

*Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2011) could be classified as financial liabilities measured at fair value through statement of comprehensive income, loans and debt, or derivatives that are designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.*

*The Company determines the classification of their financial obligations at the time of initial recognition. Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in terms of loans and debt, including transaction costs that are attributable directly. The Company's financial liabilities include trade payables and other payables, accrued expenses, long-term debt and payables to related parties, derivative financial instruments, as well as current financial liabilities and other non-current.*

**Measurement After Initial Recognition**

*Measurement of financial liabilities depending on the classification as follows:*

- *Financial liabilities measured at fair value through statement of comprehensive income, including the financial liabilities available for trade and financial liabilities which are determined at the initial recognition that to be measured at fair value through the statement of comprehensive income.*
- *Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near future. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of comprehensive income.*

**• Loans and Debt**

*After initial recognition, loans and debt subject to interest are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in the income statement when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

**Saling-Hapus dari Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling-hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

**Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal neraca adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price*) untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya. Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

**Penyesuaian Risiko Kredit**

Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

**Offsetting of Financial Instruments**

*Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the financial position statement if, and only if, the Company and its subsidiaries have a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

**Fair Value of Financial Instruments**

*The fair value of financial instruments traded in active markets at the balance sheet date are based on quoted market prices or price quotations seller / dealer (*bid price*) for long positions and ask price for short positions), without taking into account transaction costs. If the bid price and the ask price to date is not available, then the last transaction price is used to reflect the evidence of the current fair value, to the extent not been a significant change in economic circumstances since the transactions.*

*For all other financial instruments not listed in an active market, except investment in unquoted equity securities, the fair value is determined by using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include net present value techniques, comparison to similar instruments for which market observable prices exist, options pricing models, and other relevant valuation models. In the case of fair value can not be reliably determined by using valuation techniques, investments in equity instruments not quoted price is stated at cost less impairment.*

**Credit Risk Adjustment**

*Company adjust prices in a market that is more profitable to reflect the counterparty credit risk differences between instruments traded in those markets with instruments that assessed for the position of financial assets. In determining the fair value of financial liabilities position, Company credit risk associated with the instrument should be taken into account*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

**Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen**

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**Penurunan Nilai dari Aset Keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

**• Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi**

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**• Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan**

Jika terdapat bukti objektif bahwa, kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi).

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

**Amortized Cost of Financial Instruments**

Amortized cost is calculated using the effective interest method less any allowance for impairment and principal repayment or value that can not be billed. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate

**Impairment of Financial Assets**

At the end of each reporting period the Company evaluates whether there is objective evidence that financial asset or group of financial assets are impaired.

**• Financial assets are recorded at amortized cost**

For loans and receivables are recorded at amortized cost, the Company first determines whether there is objective evidence of impairment of individually significant financial assets individually, or collectively for financial assets that amount is not significant on an individual basis.

If the Company determines there is no objective evidence of impairment in value of financial assets are assessed on an individual basis, regardless of financial assets is significant or not, then they put those assets into a group of financial assets that have similar credit risk characteristics and assess the impairment of the group as a collective. A decline in asset value is assessed individually, and for that impairment losses recognized or is recognized, not included in the collective assessment of impairment.

**• Financial assets are carried at cost**

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value with the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not occurred)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

**• Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan**

Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif aset tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa.

**• Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)**

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, bukti objektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

Jika terdapat bukti bahwa, kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi - direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi, kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

**• Financial assets are carried at cost**

*The present value of estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate of the asset. If a loan and receivable has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.*

*The carrying amount of the asset is reduced through the use of the allowance account and the amount of losses recognized in the income statement. Interest income is recognized based on the carrying value of which has been reduced, based on the effective interest rate of the asset.*

*If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on an unquoted equity instrument that is not carried at fair value because its fair value cannot be reliably measured, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset.*

**• Financial assets available for sale (AFS)**

*In the case of equity investments classified as AFS financial assets, objective evidence would include a significant reduction or long-term decline in the fair value of investments below its cost.*

*If there is evidence that, impairment loss has occurred, total cumulative loss measured as the difference between cost and current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in income statement - reclassified from equity to the income statement. Impairment loss on equity investments should not be recovered through the income statement, increase in fair value after impairment are recognized in equity.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

• **Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)** (lanjutan)

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang untuk tujuan pengukuran kerugian penurunan nilai.

• **Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan**

Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "pendapatan bunga" dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif.

**Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

**Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuan, pada saat:

- Hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau
- Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

• **Financial assets available for sale (AFS)** (continue

*In the case of debt instruments classified as AFS financial assets, impairment was evaluated on the same criteria with which financial assets are recorded at amortized cost. Interest income in the future based on the carrying value of which has been reduced and is recognized based on the interest rate used for discounting the future cash flows for the purpose of measuring impairment losses.*

• **Financial assets are carried at cost**

*The accrual is recorded as part of "Interest income" in the income statement. If, in subsequent periods, the fair value of debt instruments increased and the increase is objectively linked to events occurring after the recognition of impairment losses in comprehensive income statement, then the loss decrease the amount should be recovered through statement of comprehensive income.*

**Termination of Recognition of Financial Assets and Liabilities**

**Financial Assets**

*Financial asset (or where applicable, part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:*

- *The right to receive cash flows from these assets has expired; or*
- *The Company retains the right to receive cash flows from financial assets, but also bear the contractual obligation to pay to third parties for cash flows received in full without any significant delays on the basis of an agreement; or*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

**Penghentian Pengakuan Aset dan liabilitas  
keuangan** (lanjutan)

**Aset Keuangan** (lanjutan)

- Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Perusahaan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuan pada saat kewajiban tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substancial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu kewajiban yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

**Termination of Recognition of Financial Assets  
and Liabilities** (continued)

**Financial Assets** (continued)

- The company has transferred their rights to receive cash flows from an asset or liability to pay the cash flows received in full without material delay to a third party in the agreement "pass-through", and either (a) The Company has transferred substantially all the risks and benefit from the asset, or (b) The Company does not transfer substantially or do not have all the risks and benefits of an asset, but has transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from a financial asset or has become a party to an agreement, and substantially not transfer and do not have all the risks and benefits of financial assets and still have control over these assets, the financial assets are recognized for the involvement sustainable with such financial assets. Ongoing involvement in the form of collateral for the transferred assets be measured based on the lower of the asset transferred to the maximum value of payments received which may be paid back by the Company.

**Financial Liabilities**

Derecognized financial liabilities when the liability is terminated or canceled or expires. When an existing financial liabilities is replaced by other financial obligations from the same lender with substantially different terms, or substantially modifying the terms of an obligation which currently exist, an exchange or modification is treated as a derecognition of the initial liability and the recognition of new obligations, and the difference between the carrying amount of each liabilities is recognized in the statement of comprehensive income.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

**Penghentian Pengakuan Aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

**Liabilitas Keuangan** (lanjutan)

Utang usaha adalah liabilitas untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam transaksi bisnis pada umumnya. Utang usaha dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama). Jika tidak, hutang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**Instrumen Keuangan Derivatif**

Perusahaan menandatangani kontrak swap valuta asing, swap suku bunga, dan instrumen lainnya yang diperbolehkan, jika dianggap perlu, untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga yang berasal dari hutang jangka panjang dan utang obligasi Perusahaan dalam mata uang asing. Instrumen keuangan derivatif tersebut tidak ditetapkan untuk suatu hubungan lindung nilai yang memenuhi syarat (*qualifying hedge relationship*) dan pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan kemudian diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas keuangan apabila memiliki nilai wajar negatif.

**Instrumen Keuangan Derivatif**

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif selama periode berjalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai diakui langsung pada laporan laba-rugi komprehensif. Aset dan liabilitas derivatif disajikan masing-masing sebagai aset dan liabilitas jangka pendek.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

**Termination of Recognition of Financial Assets and Liabilities** (continued)

**Financial Liabilities** (continued)

Account payables are liabilities to pay for goods or services obtained from suppliers in business transactions in general. Trade payables are classified as short term liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operation of the business cycle if longer). If not, the accounts payable was presented as long term liabilities.

Account payables are initially recognized at fair value and subsequently remeasured at amortized cost using the effective interest rate method.

**Derivative Financial Instruments**

The Company entered into foreign currency swap contracts, interest rate swaps, and other instruments are allowed, if deemed necessary, for the purpose of managing its exposure to changes in foreign currency exchange rates and interest rates are derived from long-term debt and bonds payable in foreign currencies of the Company. Derivative financial instruments are not assigned to a hedging relationships that qualify (*qualifying hedge relationship*) and are initially recognized at fair value on the date a derivative contract is signed and subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as assets when fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

**Derivative Financial Instruments**

Gains or losses arising from changes in fair value of derivatives during the period that do not qualify for hedge accounting are recognized immediately in the statement of comprehensive income. Derivative assets and liabilities are presented respectively as current assets and short-term liabilities.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

i. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Derivatif melekat disajikan bersama dengan kontrak utamanya pada laporan posisi keuangan yang mencerminkan penyajian yang tepat atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan. Perubahan bersih nilai wajar instrumen derivatif, pendapatan atau beban swap, pendapatan atau beban terminasi, serta penyelesaian dari instrumen derivatif dikreditkan (dibebankan) pada "Laba (Rugi) Perubahan Nilai Wajar Derivatif - Bersih", yang disajikan sebagai bagian "Penghasilan (Beban) Lain-lain" dalam laporan laba-rugi komprehensif.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

i. **Financial Instruments** (continued)

**Termination of Recognition of Financial Assets and Liabilities** (continued)

**Derivative Financial Instruments** (continued)

Embedded derivative is presented along with the main contract on the financial position statement that reflects the proper presentation of all future cash flows of the instrument in its entirety. Net changes in fair value of derivative instruments, swap income or expense, revenue or expense termination and settlement of derivative instruments are credited (charged) to "Gain (Loss) Change in Fair Value of Derivatives - Net", which is presented as part of "Other Income (Expenses)" in the statement of comprehensive income.

**Klasifikasi atas Instrumen Keuangan**

Kelompok usaha mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Classes of Financial Instruments**

The Group classifies of the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below.

Instrumen Keuangan/ <i>Financial Instruments</i>	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2011) / Category as defined by PSAK No. 55 (Revised 2011)	Golongan / <i>Class</i>	Sub Golongan / <i>Sub Class</i>
Aset Keuangan / <i>Financial Assets</i>	Pinjaman yang diberikan dan piutang / <i>Loans and receivables</i>	Kas dan setara kas / <i>Cash and cash equivalents</i> Piutang usaha / <i>Account receivables</i> Piutang lain-lain / <i>Other receivables</i>	<i>Piutang pegawai / Employee receivables</i> <i>Piutang TGR / TGR receivables</i> <i>Piutang koperasi / Cooperation receivables</i> <i>Piutang Klaim Asuransi / Insurance Claim Receivable</i> <i>Pendapatan yang masih harus diterima / Accrued Revenues</i> <i>Piutang lain-lain / Other receivables</i>
Liabilitas keuangan / <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi / <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Utang usaha / <i>Account payables</i> Beban akrual / <i>Accrued expenses</i>	<i>Jasa produksi / incentives</i> <i>Upah / Wages</i> <i>Tantiem / Tantiem</i> <i>Remunerasi / Remuneration</i> <i>Lain-lain / Others</i>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**i. Instrumen Keuangan** (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Klasifikasi atas Instrumen Keuangan (lanjutan)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Financial Instruments** (continued)

Termination of Recognition of Financial Assets and Liabilities (continued)

Classes of Financial Instruments (continued)

Instrumen Keuangan/ <i>Financial Instruments</i>	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2011) / Category as defined by PSAK No. 55 (Revised 2011)	Golongan / <i>Class</i>	Sub Golongan / <i>Sub Class</i>
		Dana Reboisasi / Reforestation Funds	
		Utang lain-lain / Other liabilities	Utang Jamsostek / Jamsostek payable Utang Pemborong / Jobber payable Titipan dana kematian / Deposit fund of dead Utang lain-lain / Other payable
		Uang Muka Kerja Sama Operasional / Advance of Joint Operation Kewajiban kepada Pemerintah / Governments Liabilities	
		Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun / Current maturities of long-term loans	
		Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun / Long-term loans-net of current maturities	

**j. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) adalah orang atau Entitas yang terkait dengan Entitas pelapor.

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan Entitas pelapor jika orang tersebut:
  - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor;
  - b) Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas
  - c) Personil manajemen kunci Entitas pelapor atau Entitas induk Entitas pelapor.
- 2) Suatu Entitas berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - a) Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk, Entitas anak, dan Entitas anak berikutnya terkait dengan Entitas lain).
  - b) Suatu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya).

**j. Transactions with Related Parties**

The relate parties in accordance with PSAK No. 7 (Revised 2010) is a person or entity associated with the reporting entity.

- 1) Person or immediate family member who has a relationship with the reporting entity if the person is:
  - a) Have control or joint control over the reporting entity;
  - b) Have a significant influence on the reporting
  - c) Key management personnel of the reporting entity or parent entity of the reporting entity.
- 2) An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
  - a) The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning parent entities, subsidiaries, and entities subsidiary is related to another entity)
  - b) An entity is a joint venture entity or association of another entity (or associate or joint venture entity that is a member of a group of business, other entity which is a member).

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

- j. **Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi** (lanjutan)
- 2) Suatu Entitas berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (lanjutan)
- c) Kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - d) Satu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga normal, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

k. **Persediaan**

Setiap terjadi pembelian bunker, spare part, dan general supplies dibukukan sebagai beban. Pada akhir tahun buku dilakukan penyesuaian sejumlah persediaan yang masih ada. Penilaian pemakaian dilakukan dengan metode FIFO (First In First Out), kemudian pada awal tahun berikutnya dibukukan kembali sebagai beban.

Entitas tidak menyajikan penyisihan persediaan yang usang dan lambat bergerak, namun mencatatnya pada aset lain-lain.

**I. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka**

**Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, antara lain:

- Biaya kepelabuhanan dibayar dimuka.
- Biaya bunker dibayar dimuka.
- Biaya asuransi yang dibayar dimuka;
- Biaya sewa dibayar dimuka.
- Biaya lain yang dibayar dimuka.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

- j. **Transactions with Related Parties** (continued)
- 2) An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following: (continued)
- c) The second entity is a joint venture of the same third party.
  - d) One entity is a joint venture of a third entity and another entity is the entity association of a third entity.

Entire significant transactions with related parties relate to, whether or not conducted at an interest rate or the normal prices, terms and conditions with third parties, are disclosed in the financial statements.

All transactions and balances are material to the parties relate disclosed in the note to financial statements.

k. **Inventories**

Each purchase occurred bunker, spare parts, and general supplies are recorded as an expense. At the end of the financial year carried out adjustments in inventories that are still there. Assessment is done with the use of FIFO (First In First Out), then at the beginning of next year back recorded as an expense.

Entities are not present provision for obsolete inventories and slow-moving, but the record in other assets.

**I. Prepaid Expenses and Advance Payment**

**Prepaid Expenses**

Prepaid expenses, among others, to serve the operational fund of not more than twelve months after the date of statement of financial position, among others:

- Prepaid expenses Of Port
- Prepaid expenses bunker
- Prepaid expenses insurance
- Prepaid expenses rent
- Other prepaid expense.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**I. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka** (lanjutan)

**Biaya Dibayar Dimuka** (lanjutan)

Biaya dibayar dimuka dibebankan sesuai dengan masa manfaatnya. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan.

**Uang Muka**

Uang muka merupakan pengeluaran yang akan dipertanggungjawabkan tidak lebih dari dua belas bulan atau satu siklus normal entitas terhitung mulai tanggal terjadinya transaksi.

- Uang Muka Operasional usaha perkapalan dan Keagenan;
- Uang Muka Pembelian Barang atau Jasa Kepada Pihak Ketiga;
- Uang Muka Pembelian Barang atau Jasa Kepada Pihak Ketiga;

**m. Investasi pada Perusahaan Asosiasi**

Investasi ini merupakan investasi jangka panjang dalam bentuk investasi tertentu yang nilai wajarnya tidak tersedia.

Investasi dalam bentuk saham dimana Perusahaan mempunyai kepemilikan saham minimal 20%, tetapi tidak lebih dari 50% dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, yaitu harga perolehan dari penyerahan saham ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih Perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan serta dikurangi dengan pendapatan dividen.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya akan dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka laporan keuangan perusahaan-perusahaan asosiasi tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kini.

Investasi dalam bentuk saham di mana Perusahaan mempunyai kepemilikan saham kurang dari 20% dicatat sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**I. Prepaid Expenses and Advance Payment** (continued)

**Prepaid Expenses** (continued)

*Prepaid expenses are charged according to their useful lives. At the end of the reporting period, prepaid expenses amounting to the value of goods / services / benefits or equivalent which has not been recognized in the current period.*

**Advance Payment**

*Advance payment is an expense that would be accounted for not more than twelve months, or one entity normal cycle starting from the date of transaction*

- Advance payment and shipping agency business operations
- Advance purchase of goods or services to third parties;
- Advance Preparation Production

**m. Investments in Associates**

*This investment is a long-term investment in the form of certain investments whose fair value is not available.*

*Investments in shares of stock which the Company has ownership interest of at least 20%, but not more than 50% are accounted for using the equity method, the acquisition cost of the investment is increased or decreased by the Company in the earnings or losses of the associated company since the acquisition date and reduced by dividend income.*

*If there is a permanent impairment, the carrying amount is reduced to recognize the decline specified for individual investments and losses are charged to the income statement for the year. In accordance with generally accepted accounting principles, the financial statements of associated companies are not consolidated in the financial statements present.*

*Investing in stocks in which the Company has ownership interest of less than 20% are recorded at the lower of cost and net realizable value.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**n. Investasi pada Perusahaan Lainnya**

Investasi ini merupakan investasi jangka panjang dalam bentuk investasi tertentu yang nilai wajarnya tidak tersedia.

Investasi dalam bentuk saham dimana Perusahaan mempunyai kepemilikan saham minimal 20%, tetapi tidak lebih dari 50% dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, yaitu harga perolehan dari penyertaan saham ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih Perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan serta dikurangi dengan pendapatan dividen.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya akan dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka laporan keuangan perusahaan-perusahaan asosiasi tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kini.

Investasi dalam bentuk saham di mana Perusahaan mempunyai kepemilikan saham kurang dari 20% dicatat sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi.

**o. Properti Investasi**

Entitas Induk dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 13 (Revisi 2011), "Properti Investasi".

Properti investasi terdiri dari tanah, bangunan dan prasarana, yang dikuasai untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Jumlah tercatat termasuk biaya penggantian untuk bagian tertentu dari properti investasi yang telah ada pada saat beban terjadi, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**n. Investments in Other Companies**

*This investment is a long-term investment in the form of certain investments whose fair value is not available.*

*Investments in shares of stock which the Company has ownership interest of at least 20%, but not more than 50% are accounted for using the equity method, the acquisition cost of the investment is increased or decreased by the Company in the earnings or losses of the associated company since the acquisition date and reduced by dividend income.*

*If there is a permanent impairment, the carrying amount is reduced to recognize the decline specified for individual investments and the loss will be charged to the income statement for the year. In accordance with generally accepted accounting principles, the financial statements of associated companies are not consolidated in the financial statements present*

*Investments in shares in which the Company has ownership interest of less than 20% are recorded at the lower of cost and net realizable value.*

**o. Investments Property**

*Parent Company and Subsidiaries applied PSAK No. 13 (Revised 2011), "Investment Property"*

*Investment property consists of land, buildings and infrastructure, which is controlled to produce the lease or for capital appreciation or both, and are not for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business days*

*Investment properties are measured at cost, including transaction costs, less accumulated depreciation and impairment losses. The carrying amount includes the cost of replacing part of existing investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met and excludes the costs of everyday investment property.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**o. Properti Investasi** (lanjutan)

Properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 12,5 tahun atau dengan tarif penyusutan 8% apabila diperoleh pada masa PN dan 40 tahun atau dengan tarif penyusutan 2,5% apabila gedung diperoleh setelah Entitas berbentuk PT.

Properti investasi dihentikan pengakuan (dikeluarkan dari laporan posisi keuangan) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

**p. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dulu, dimiliki untuk digunakan dalam operasi Entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha Entitas dan mempunyai umur manfaat lebih dari satu tahun atau layak dikapitalisasi.

- Awalnya suatu aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari harga perolehannya dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud Manajemen, serta estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian atau cara lain.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**o. Investments Property** (continued)

*Investment property is depreciated using the straight-line method with the useful life of 12.5 years, or by the depreciation rate of 8% was obtained at the time when the PN and 40 years of age or with a depreciation of 2.5% if the building is obtained after the form Limited Liability Entities.*

*Investment property is derecognized (removed from the statement of financial position) upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and has no future economic benefits that can be expected from its disposal.*

*Gains or losses arising from the retirement or disposal of investment property are recognized in the statement of comprehensive income in the year of retirement or disposal.*

*Transfer to investment property when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end user by the owner, the commencement of an operating lease to another party or ending of construction or development. Transfers from investment property when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner occupation or commencement of development for sale.*

**p. Fixed Assets**

*Fixed assets are tangible assets acquired in the form of ready-made or to be built first, held for use in the operating entity and is not intended to be sold in the course of business entity and have a useful life of more than one year or a decent capitalized.*

*- Initially a fixed assets are measured at cost, consisting of cost and costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for the asset is ready for use in accordance with the wishes and intentions of management, as well as the initial estimate of the costs of dismantling and removing fixed assets and restoring the site assets. Cost is a self-constructed assets is determined using the same principles as the acquisition of assets with a purchase or other means.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**p. Aset Tetap** (lanjutan)

- Biaya-biaya setelah perolehan awal seperti penggantian komponen dan inspeksi yang signifikan, diakui dalam jumlah tercatat aset tetap jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan akan mengalir ke Entitas (dan Entitas Anak) dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Sisa jumlah tercatat biaya komponen yang diganti atau biaya inspeksi terdahulu dihentikan pengakuannya. Biaya perawatan sehari-hari aset tetap diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- Aset tetap yang berasal dari bantuan Pemerintah, swasta dan pihak lain dinyatakan sebesar nilai bantuan ditambah semua pengeluaran yang dapat diidentifikasi langsung dengan aset tetap tersebut sehingga siap untuk digunakan.
- Aset Entitas yang memenuhi pengertian aset tetap namun harga perolehannya sebesar atau kurang dari Rp5.000.000 per satuan akan langsung dibukukan sebagai biaya dalam tahun buku saat aset tersebut diperoleh (ditempatkan di atas kapal) atau dimiliki Entitas.
- Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap dikapitalisasi ke aset tetap apabila meningkatkan manfaat ekonomi, termasuk peningkatan kapasitasnya berdasarkan kegunaan yang diharapkan.
- Dalam hal kondisi aset tetap sudah mengalami perubahan sehingga tidak lagi sesuai dengan fungsinya dalam operasional, maka diusulkan penghapusannya dan dicatat dalam akun aset tetap yang akan dihapus. Aset tersebut disajikan dalam aset lain-lain sebesar harga perolehan disertai dengan akumulasi penyusutan sebesar 100%.
- Perubahan kondisi aset tetap tersebut disebabkan:
  - Dinyatakan tidak digunakan; atau
  - Dinyatakan rusak/hilang dikuatkan dengan berita acara pejabat yang berwenang; atau
  - Sepenuhnya tidak dikuasai lagi kepemilikannya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**p. Fixed Assets** (continued)

- Subsequent costs of acquisition such as replacement and major inspection are added to the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits will flow to the entity (and Subsidiaries) and these costs can be measured reliably. Residual carrying amount of those parts that are replaced or the cost of the previous inspection is derecognized. Daily care costs of fixed assets are recognized as expenses when incurred.

- Fixed assets that came from the government, private sector and other parties stated at the aid plus all expenses that can be identified directly with the item so it's ready for use.

Assets Entities that meet the definition of fixed assets, but its cost amounted to or less than Rp5,000,000 per unit will be directly recorded as expense in the fiscal year when the asset is acquired (placed on the ship) or owned entity.

- Expenses after the acquisition of a fixed asset are capitalized as fixed assets when improving economic benefits, including increased capacity based on expected utility.

- In terms of the conditions of fixed assets has been changed so it no longer functions in accordance with operational, the proposed abolition and recorded in the fixed asset account to be deleted. The assets are presented in other assets at cost along with accumulated depreciation of 100%.

- Changes in fixed assets due conditions:

- Otherwise not used, or
- Otherwise damaged / lost corroborated by the minutes of the competent authorities, or
- No longer fully controlled ownership.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**p. Aset Tetap** (lanjutan)

- Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dilakukan review ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset.
  - a) Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, maka harus menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.
  - b) Apabila nilai yang dapat diperoleh kembali lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Penurunan tersebut diakui sebagai kerugian dan dicatat dalam beban di luar usaha pokok.
- Kegiatan rehabilitasi aset tetap (seperti armada dan bangunan). Apabila kegiatan rehabilitasi ini menambah manfaat ekonomis dalam bentuk umur atau kapasitas, maka biaya rehabilitasi dikapitalisasi ke aset tetap tersebut.
- Penggantian komponen aset tetap yang material dan mempunyai umur ekonomis yang berbeda dari komponen lain dari aset tetap. Komponen lama yang diganti dibebankan, kemudian komponen baru yang menggantikan dikapitalisasi ke aset tetap.
- Perolehan aset tetap melalui sewa dan perjanjian mengandung sewa dengan sistem sewa pembiayaan (financial lease) diakui sebagai aset tetap dan dicatat sebesar nilai wajar aset sewaan atau nilai kini pembayaran sewa minimum, apabila nilai wajar aset kini lebih rendah. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan terhadap aset tersebut sesuai ketentuan perhitungan penyusutan yang berlaku. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, harus dilakukan review atas metode perhitungan penyusutan, nilai sisa, dan umur manfaat.

**Biaya Perolehan Aset Tetap**

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari:

- 1) Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain;

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**p. Fixed Assets** (continued)

- At each balance sheet date to be reviewed there is any indication of impairment of assets.
  - a) If there are indications of impairment of assets, it must estimate the recoverable amount of the asset.
  - b) If the recoverable value is less than its carrying amount, the carrying amount of the assets to be downgraded to a recoverable value. The decline is recognized as a loss and recorded in the load beyond the core business.
- Rehabilitation activities of fixed assets (such as fleet and buildings). If rehabilitation is to add economic benefits in the form of the age or capacity, then the cost of rehabilitation capitalized to the assets.
- Replacement of components of fixed assets and material have different economic lives of the other components of the fixed assets. Old components are replaced are charged, then a new component that replaced capitalized to fixed assets.
- Acquisition of fixed assets through leases and rental agreements contain a financial lease is recognized as fixed assets and are recorded at fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments, if the fair value of assets is now lower. The calculation of depreciation of fixed assets made against these assets in accordance with the applicable depreciation calculation. At each balance sheet date, to do a review of the method of calculation of depreciation, residual value and useful life.

**Acquisition Cost of Fixed Assets**

The cost of fixed assets consist of:

- 1) Acquisition price, including import duties and taxes should not be credited purchases net of discounts and other pieces;

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**p. Aset Tetap** (lanjutan)

**Biaya Perolehan Aset Tetap** (lanjutan)

- 2) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen, antara lain;
- Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap;
  - Biaya persiapan pemindahan;
  - Biaya handling dan penyerahan awal;
  - Biaya perakitan dan instalasi;
  - Biaya pengujian aset baru
  - Komisi profesional, misalnya biaya arsitek.

**Penyusutan**

Aset tetap di dalam laporan keuangan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Penyusutan dihitung berdasarkan taksiran umur manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) untuk semua jenis aset, sebagai berikut:

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**p. Fixed Assets** (continued)

**Acquisition Cost of Fixed Assets** (continued)

- 2) *The costs directly attributable to bringing the asset to the desired location and condition in order assets ready for use in accordance with the wishes and intentions of management, among others;*
- *The cost of employee benefits arising directly from the construction or acquisition of fixed assets;*
  - *Preparation fees of translocation*
  - *The cost of handling and delivery of beginning;*
  - *Assembly and installation costs;*
  - *The cost of testing a new asset*
  - *Commission a professional, such as architect's fees.*

**Depreciation**

*Fixed assets in the financial statements are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation is calculated on the estimated useful lives of the assets using the straight-line method and declining method:*

Jenis Aset Tetap	Umur Manfaat/ Useful Life	Tarif Penyusutan / Depreciation Rate	Type of Assets
<b><u>Aset Tetap Non Pelayaran</u></b>			
Bangunan			<i>Building</i>
- Diperoleh masa PN	12,5 Tahun / Years	8%	<i>Retrieved period PN -</i>
- Diperoleh setelah PT	40 Tahun / Years	2,5%	<i>Obtained after PT -</i>
Kendaraan	5 Tahun / Years	20%	<i>Vehicle</i>
Inventaris			<i>Inventory</i>
- Peralatan komputer	7 Tahun / Years	15%	<i>Computer equipment -</i>
- Peralatan komunikasi	7 Tahun / Years	15%	<i>Communications equipment -</i>
- Perabotan kantor/rumah tangga	7 Tahun / Years	15%	<i>Office equipment / household -</i>
- Aset KSO	7 Tahun / Years	15%	<i>Joint Operation - assets -</i>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**p. Aset Tetap** (lanjutan)

**Penyusutan** (lanjutan)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**p. Fixed Assets** (continued)

**Depreciation** (continued)

Jenis Aset Tetap	Umur Manfaat/ Useful Life	Tarif Penyusutan / Depreciation Rate	Type of Assets
<b>Aset Tetap Pelayaran</b>			
Armada Kapal			<b>Fleet</b>
- Kapal Penumpang	30 Tahun / Years	3,3%	Passenger ship -
- Kapal Roro	30 Tahun / Years	3,3%	Roro ship -
Jet Liner	25 Tahun / Years	4%	Jetliner
Egon	25 Tahun / Years	4%	Egon
Ganda Dewata			<b>Ganda Dewata</b>
- Kapal Eks PT PANN (KM Caraka Th. 1990)	20 Tahun / Years	5%	Ex ship PT PANN - (KM Caraka years 1990)
- Kapal Sewa Guna Usaha Th. 1990	20 Tahun / Years	5%	Ship Lease years 1990 -
Galangan dan alat apung	10 Tahun / Years	10%	Shipyard and floating equipment
Kontainer	10 Tahun / Years	10%	Containers
Alat mekanik dan non mekanik	10 Tahun / Years	10%	Tools mechanical and non-mechanical
Peralatan Wisma	7 Tahun / Years	15%	Homestead equipment

- Kepemilikan tanah berdasarkan berbagai jenis hak tidak dapat disusutkan kecuali dapat diperdiksi bahwa tidak mungkin atau kecil kemungkinan bahwa perpanjangan/pembaharuan hak dapat diperoleh.
- Hak sewa pakai atas tanah yang diperoleh berdasarkan kontrak sewa tidak setara dengan kepemilikan tanah, harus diperlakukan sebagai beban dibayar dimuka.
- Beban tangguhan karena pengurusan legal hak atas tanah merupakan biaya untuk memperoleh suatu hak yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang - undangan.

- *Ownership of land is based on various types of rights can not be depreciated unless it can be predicted that it is impossible or unlikely that the extension / renewal of rights can be obtained.*
- *Use of land lease rights obtained under the lease contract is not equivalent to ownership of the land, must be treated as prepaid expenses.*
- *Deferred charges for legal processing of land is the cost to acquire a right issued by the Government by laws.*

**Aset Tetap Tanah**

- Biaya perolehan tanah antara lain meliputi:
  - a. Harga transaksi pembelian tanah termasuk bangunan dan prasarana;
  - b. Bangunan diatasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
  - c. Biaya konstruksi atau pembuatan tanah, apabila lahan tanah diciptakan;
  - d. Biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
  - e. Biaya komisi perantara jual beli tanah;

**Fixed Asset Land**

- *The cost of land includes:*
  - a. *The transaction price purchase of land including buildings and infrastructure;*
  - b. *Buildings there on to be purchased and then destroyed;*
  - c. *The cost of construction or manufacture of the land, if the land were created;*
  - d. *Compensation costs occupants, the cost of relocation;*
  - e. *The cost of buying and selling land brokerage commissions;*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**p. Aset Tetap** (lanjutan)

**Aset Tetap Tanah** (lanjutan)

- Biaya perolehan tanah antara lain meliputi: (lanjutan)
  - f. Biaya pinjaman terkапitalisasi ke dalam tanah;
  - g. Biaya pematanan tanah;
  - h. Beban tangguhan untuk pengurusan legal hak tanah sebesar biaya perolehan atau perpanjangan atau pembaruan hak demortisasi selama masa umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek;
  - i. Aset tetap tanah dicatat dengan menggunakan model biaya.

**Aset Dalam Penyelesaian**

Aset dalam pelaksanaan (penyelesaian) dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, meliputi bangunan dan prasarana lainnya, yang dinyatakan berdasarkan biaya pembangunan, biaya pegawai langsung, biaya tidak langsung dalam pembangunan tersebut dan biaya-biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan. Aset dalam penyelesaian dipindahkan ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat siap untuk digunakan atau dioperasikan. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut mulai digunakan atau dioperasikan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran yang akan menambah umur ekonomis dalam jumlah yang signifikan akan dikapitalisasi.

**q. Sewa Guna Usaha**

Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha sebagai hak opsi (capital lease) apabila memenuhi semua kriteria yang disyaratkan dalam PSAK No. 30 mengenai "Sewa". Jika salah satu kriteria tidak dipenuhi, maka transaksi sewa guna usaha diperlakukan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease). Aset sewa guna usaha dengan hak opsi disajikan sebagai bagian dari aset tetap sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**p. Fixed Assets** (continued)

**Fixed Asset Land** (continued)

- *The cost of land includes:* (continued)
  - f. *Borrowing costs capitalized into the ground;*
  - g. *The cost of land improvement;*
  - h. *Deferred charges for legal processing of land at acquisition cost or an extension or renewal rights demortisasi during the period the land rights or economic life, whichever is shorter;*
  - i. *Fixed assets are recorded at the ground using the cost model.*

**Construction in Progress**

*Assets in the implementation of the (settlement) are stated at cost and presented as part of fixed assets, including buildings and other infrastructure, which are stated at cost of construction, cost of direct employees, the indirect costs in the development and costs of loans used to finance assets during construction. Construction in progress transferred to fixed assets account in question when it is ready to be used or operated. Depreciation is charged at the time the asset is put into use or operation.*

*Maintenance and repair costs are charged to income statement as incurred, while renewals that will extend the useful lives of significant will be capitalized.*

**q. Lease**

*Lease transactions are classified as lease as an option (capital lease) if it fulfills all the criteria required under PSAK No. 30 of "Rent". If one of the criteria is not met, the lease transaction is treated as a transaction lease (operating lease). Assets under capital lease with option rights are presented as part of the fixed assets of present value of the lease payments during the lease term plus residual value (option price) to be paid at the end of the lease period*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**q. Sewa Guna Usaha** (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aset tetap yang diperoleh dari pemilikan langsung.

Liabilitas sewa guna usaha disajikan sebesar nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha yang masih harus dilakukan.

Laba atau rugi yang terjadi akibat transaksi penjualan dan penyewaan kembali (sale-and-leaseback) ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus (straight-line method) selama sisa masa manfaat aset sewa guna usaha yang bersangkutan.

**r. Aset Tak berwujud**

Pengeluaran untuk pengembangan diakui sebagai aset tak berwujud sepanjang memenuhi seluruh kriteria aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang timbul dari pengembangan diakui jika entitas dapat menunjukkan semua hal berikut ini:

1. Kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual;
2. Niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya;
3. Bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan. Antara lain manajemen mampu menunjukkan adanya pasar bagi keluaran aset tak berwujud atau pasar atas tak berwujud itu sendiri, atau, jika aset tak berwujud itu akan digunakan secara internal, manajemen mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut;
4. Tersedianya kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut;
5. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**q. Lease** (continued)

*Depreciation is computed using the straight-line method (straight-line method) based on the estimated useful lives similar to those applied to the fixed assets acquired from direct ownership.*

*Lease liabilities are presented at the present value of the lease payments were still to be done.*

*Gain or loss on sale and leaseback transaction (sale-and-leaseback) are deferred and amortized using the straight-line method (straight-line method) over the remaining useful lives of the assets leased in*

**r. Intangible Assets**

*Expenditures for the development of intangible assets recognized as long as they meet all the criteria of an intangible asset. An intangible asset arising from development is recognized if the entity can demonstrate all of the following:*

1. *Completion of the technical feasibility of an intangible asset so that the proficiency level of assets can be used or sold;*
2. *Intention to complete the intangible asset and use or sell it;*
3. *How the intangible asset will generate probably future economic benefits. Among others, management was able to demonstrate a market for the output of intangible assets or the market for an intangible asset itself or, if an intangible asset that will be used internally, management is able to demonstrate the usefulness of the intangible asset;*
4. *Availability of adequate technical resources, financial and other resources to complete development of the intangible asset and use or sell such assets;*
5. *Ability to measure reliably the expenditure related to the intangible asset during its development.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**r. Aset Tak berwujud** (lanjutan)

Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal terdiri atas seluruh biaya dibutuhkan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membuat, menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Tidak termasuk dalam komponen biaya aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal:

- Biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya overhead umum lain, kecuali jika biaya dapat secara langsung diatribusikan dalam menyiapkan aset tersebut untuk digunakan;
- Inefisiensi teridentifikasi dan kerugian operasi awal yang muncul sebelum aset memenuhi kinerja yang direncanakan; dan
- Pengeluaran untuk pelatihan karyawan yang mengoperasikan aset.

Pengeluaran yang diakui sebagai beban saat terjadinya adalah:

- Pengeluaran untuk kegiatan perintisan (biaya perintisan), kecuali jika pengeluaran ini termasuk dalam pos biaya perolehan aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 16 (Revisi 2007): Aset Tetap. Biaya perintisan dapat mencakup biaya pendirian, seperti biaya hukum dan kesekretariatan yang dikeluarkan dalam rangka mendirikan badan hukum, pengeluaran dalam rangka membuka usaha atau fasilitas baru (biaya prapembukaan) atau pengeluaran untuk memulai usaha baru atau meluncurkan produk atau proses baru (biaya pengeluaran untuk kegiatan pelatihan).
- Pengeluaran untuk kegiatan iklan dan promosi (termasuk katalog pesan antar).
- Pengeluaran dalam rangka relokasi dan reorganisasi sebagian atau seluruh entitas.

Beban pengurusan untuk memperpanjang atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud yang diamortisasi selama masa hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan.

Aset tak berwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**r. Intangible Assets** (continued)

*The cost of intangible assets that are internally generated consisting of all necessary costs that are directly attributable to create, produce and prepare the asset so that it is ready for use in accordance with the intent of management.*

*Not included in the cost components of intangible assets generated internally:*

- *Cost of sales, administrative expenses, and other general overhead costs, unless the cost can be directly attributed to preparing the asset for use;*
- *Identified inefficiencies and initial operating losses that arise before the assets meet the planned performance, and*
- *Expenses for employee training to operate the assets.*

*Expenditures are recognized as an expense when incurred are:*

- *Expenditure for pioneering activities (planting costs), unless this expenditure is included in the postal cost of fixed assets as set forth in PSAK 16 (Revised 2007): Fixed Assets. Planting costs may include the cost of establishment, such as legal and secretarial costs incurred in order to establish a legal entity, expenditure in order to open a business or a new facility (prapembukaan costs) or expenditures for starting a new business or launching a new product or process (pre-operative costs).*
- *Expenses for training activities.*
- *Expenditure on advertising and promotional activities (including inter message catalog).*
- *Expenditures in order to relocation and reorganization of some or all of the entities.*

*The expenses to extend or renew the legal rights of land are recognized as intangible assets and amortized over the period of land rights or economic life of the land, whichever is shorter. If the cost of land extension or renewal are not material, it can be recognized as the expense in the current period.*

*Intangible assets are amortized using the straight-line method (straight line method).*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**r. Aset Lain-lain** (lanjutan)

**Aset dan persediaan tidak dapat digunakan**

Aset dan persediaan tidak dapat digunakan merupakan aset yang sudah tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional Entitas, mulai tahun 2008 Entitas mencadangkan penghapusan persediaan sebesar 20% per tahun.

**Tanah dan bangunan digunakan pihak ketiga**

Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. SK/3507/U.18/Phb-76 yang menyatakan bahwa satu unit tanah dan bangunan dinilai sebesar Rp1.000.000 tanpa dihitung penyusutan.

**Aset tetap KSO**

Aset tetap KSO dikelola mitra dilakukan penyusutan sebagaimana aset tetap sendiri.

**s. Penurunan Nilai Aset**

Sesuai dengan PSAK No. 48, "penurunan nilai aset" nilai aset dikaji kembali atas kemungkinan penurunan nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatatnya tidak dapat dipulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Dilain pihak, pemulihan penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi.

Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi perusahaan tahun berjalan.

**t. Biaya Pinjaman**

PSAK No. 26 (Revisi 2011) "Biaya Pinjaman" mengatur akuntansi untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasi dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Untuk biaya pinjaman lain diakui sebagai beban. PSAK No. 26 (Revisi 2011) ini menggantikan PSAK No. 26 (Revisi 2008), "Biaya Pinjaman" dan berlaku mulai 1 Januari 2012.

Biaya pinjaman meliputi bunga kontraktual, biaya transaksi dan premi serta diskonto.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**r. Other Assets** (continued)

**Unproductive Assets**

*Asset and inventory can not be used is an asset that can not be used for operational activities of entities, beginning in 2008 Entity backing up the elimination of inventories by 20% per year.*

**Land and buildings used third party**

*Minister of Communications Decree No. SK / 3507 / U.18 / Phb-76 stating that one unit of land and buildings valued at 1,000,000 without shrinkage calculated*

**Fixed assets - Joint Operation**

*Fixed assets - Joint Operation are amortized using the straight-line method (straight line method).*

**s. Impairment of Asset Value**

*In accordance with PSAK No. 48, "Impairment Value", value of assets are reviewed for possible reduction in fair value caused by events or changes in circumstances that cause its carrying value can not be restored. The impairment loss is recognized if the carrying value of assets exceeds the recoverable value. On the other hand, the recovery of impairment loss is recognized when there is indication that the impairment is no longer the case.*

*Impairment (recovery) of asset value is recognized as an expense (revenue) in corporate income for the current year.*

**t. Borrowing Costs**

*PSAK No. 26 (Revised 2011) "Borrowing Costs" set accounting for borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction, or manufacture of qualifying assets are capitalized as part of the cost of those assets. For other borrowing costs are recognized as an expense. This PSAK No. 26 (Revised 2011) supersedes PSAK. 26 (Revised 2008), "Borrowing Costs" and applies starting to January 1, 2012.*

*Borrowing cost include contractual interest rate, transaction costs and premiums and discounts.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**t. Biaya Pinjaman** (lanjutan)

Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi set yang memenuhi syarat (aset kualifikasi) sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman selain itu diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasi adalah biaya-biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasi tidak dilakukan. Jika perusahaan meminjam dana secara langsung untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasi tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait dengan aset kualifikasi dapat diidentifikasi dengan mudah.

Apabila pinjaman secara spesifik digunakan untuk memperoleh suatu aset tertentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah seluruh biaya pinjaman yang timbul selama peminjaman dana tersebut dikurangi pendapatan bunga dari investasi sementara dana pinjaman yang belum digunakan.

Apabila pinjaman tidak secara spesifik digunakan untuk memperoleh suatu aset tertentu, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh aset tersebut. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman dibagi dengan jumlah pinjaman dari suatu periode (tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk perolehan aset tertentu). Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam periode tertentu tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi selama periode tertentu.

Kapitalisasi biaya pinjaman harus dihentikan apabila dalam suatu periode yang cukup lama perusahaan menangguhkan atau menunda aktivitas perolehan, pembangunan ataupun produksi suatu aset.

Kapitalisasi biaya pinjaman harus diakhiri apabila aktivitas untuk memperoleh, membangun atau memproduksi suatu aset sesuai dengan tujuannya secara substansial telah selesai.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**t. Borrowing Costs** (continued)

Borrowing cost are capitalized to the cost of borrowing that can be directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying set (qualifying assets) as part of the cost of the asset. cost of the loan are recognized as an expense other than that in the period incurred.

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or manufacture of qualifying assets are the costs of borrowing can be avoided if the expenditure on qualifying assets is not performed. If a company borrows funds directly for the purpose of obtaining a particular qualifying asset, the borrowing costs associated with qualifying assets can be easily identified.

If the loan is specifically used to acquire a particular asset, then the amount of borrowing costs capitalized is all borrowing costs incurred during the loan reduced interest income from temporary investment of borrowed funds that have not been used.

If the loan is not specifically used to acquire a particular asset, then the amount of capitalized borrowing costs can be determined by a capitalization rate to expenditure incurred to acquire those assets. The capitalization rate is calculated based on the weighted average of the borrowing costs of the loan amount divided by a period (not including the amount of loans that are specifically used for the acquisition of certain assets). The amount of borrowing costs capitalized during the period shall not exceed the amount of borrowing costs incurred during the given period.

Capitalization of borrowing costs should be stopped if within a period long enough to suspend or delay the company's acquisition activity, development or production of an asset.

Capitalization of borrowing costs should cease when the activities to acquire, construct or produce an asset for their intended purpose is substantially complete.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**t. Biaya Pinjaman** (lanjutan)

Apabila pembangunan atau konstruksi suatu aset dapat diselesaikan perbagian dimana bagian yang telah selesai dapat segera digunakan sementara bagian lainnya masih dalam penyelesaian, maka jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi adalah untuk bagian yang belum selesai saja.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat Perusahaan telah secara signifikan memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Pendapatan bunga diakui pada saat

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*), beban tahunan dialokasikan menjadi beban bulanan secara proporsional berdasarkan metode garis lurus atau taksiran terbaik (*best estimate*).

**u. Beban Manfaat Karyawan**

Entitas Induk dan Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya. Kontribusi didanai dan dibayar oleh Entitas, anak Entitas dan karyawan. Selain itu, Entitas Induk dan Entitas Anak juga memberikan imbalan kerja kepada karyawan yang berhak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

**Program Imbalan Pasti**

Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu, koreksi aktuaria dan dampak perubahan asumsi bagi peserta pensiun yang masih aktif diamortisasi dengan metode annuitas pasti selama estimasi sisa masa kerja rata-rata karyawan sebagaimana ditentukan oleh aktuaris.

**Program Iuran Pasti**

Iuran yang ditanggung Entitas diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**t. Borrowing Costs** (continued)

*If development or construction of an asset which can be completed partially completed part can be used while other parts are still in progress, then the amount of borrowing costs are capitalized to the unfinished part only.*

*Revenues from product sales are recognized when the Company has significantly transferred the risk and benefit of the goods/product ownership to the buyer. Interest revenue is recognized when incurred (accrual*

*Expenses are recognized when incurred (accrual basis). Annual Expenses are allocated proportionally to monthly expenses using straight line method or using the best estimate.*

**u. Employee Benefits**

*Parent Company and Subsidiaries benefit pension plans and defined contribution for all local permanent employees. Contributions are funded and paid by the Entities, Entity children and employees. In addition, the Company and Subsidiaries also provide employment benefits to eligible employees in accordance with Law No. 13 of 2003 on Manpower.*

**Defined Benefit Program**

*Current service cost is recognized as an expense in the current year. Past service cost, actuarial correction and the impact of changes in assumptions for retirement who are still active participants are amortized using the fixed annuity method over the estimated remaining working lives of the average worker as determined by the actuary.*

**Defined Contribution Program**

*The contribution charged Entities recognized as an expense in the current year.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**u. Beban Manfaat Karyawan** (lanjutan)

**Program Manfaat Karyawan Lainnya**

**- Imbalan kerja Karyawan**

Efektif tanggal 1 Januari 2015, entitas memutuskan untuk menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja" merubah metode akuntansinya yang terdahulu dalam mengakui imbalan kerja karyawan menjadi metode yang diharuskan oleh standar ini.

Liabilitas bersih entitas berkaitan dengan imbalan kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program setelah disesuaikan dengan laba atau rugi aktuarial yang tidak diakui, dan biaya jasa lalu yang tidak diakui. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode "projected unit credit".

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang di mana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu liabilitas imbalan pasca kerja terkait.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan, yaitu berdasarkan informasi harga kuotasi pasar saham. Nilai dari pensiun dibayar dimuka yang diakui dibatasi pada jumlah bersih dari akumulasi kerugian aktuarial bersih dan biaya jasa lalu yang belum diakui dan nilai kini dari manfaat ekonomi tersedia dalam bentuk pengembalian dari program atau pengurangan pada kontribusi yang akan datang pada program.

Laba atau rugi aktuarial akan saling menghapuskan dalam jangka panjang karena itu untuk imbalan pasca kerja pembebanan dilakukan secara langsung dalam metode OCI (*Other Comprehensif Income = Penghasilan Komprehensif Lain*). Pengakuan dapat pula berdasarkan metode amortisasi sistematis lainnya yang menghasilkan pengakuan keuntungan (kerugian) aktuarial yang lebih cepat, termasuk pengakuan segera pada periode berjalan asalkan metode ini dipakai secara konsisten baik untuk keuntungan maupun kerugian aktuarial dan konsisten pada tiap periode perhitungan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**u. Employee Benefits** (continued)

**Other Employee Benefits Program**

**- Employee working rewards**

*Effective January 1, 2015, the entity decided to apply IAS 24 (Revised 2013) "Employee Benefits" to change the previous accounting method to recognize employee benefits into the method required by this standard.*

*Net liability entities related to employee benefits are calculated at the present value of the estimated benefit that will be earned by the employees in the future in respect of services in the present and the past, less the fair value of plan assets as adjusted for actuarial gains or losses are not recognized, and past service cost not recognized. The calculation is performed by an independent actuary using the "projected unit credit".*

*The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated cash outflows in the future using interest rates of government bonds, denominated in the currency in which the benefits will be paid and which have a term to maturity approximating to the terms liabilities post-employment benefits related.*

*Plan assets are assets held by the pension plan. These assets are measured at fair value at the end of the reporting period, which is based on the stock market quotation price information. The value of the prepaid pension recognized is limited to the net amount of the accumulated net actuarial losses and past service costs not yet recognized and the present value of economic benefits available in the form of return of the plan or reductions in contributions that will come on the program.*

*Gains or losses will eliminate each other in the long run because it's done loading post-retirement benefits directly in OCI method (comprehensif Other Income = Other Comprehensive Income). Recognition can also be based on more systematic amortization method that results in the recognition of gains (losses) Actuarial faster, including immediate recognition in the current period as long as the method is used consistently good for profits and losses actuarial and consistent at each calculation period.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**u. Beban Manfaat Karyawan** (lanjutan)

**Program Manfaat Karyawan Lainnya** (lanjutan)

**- Imbalan kerja Karyawan** (lanjutan)

Imbalan kerja lain meliputi program santunan meninggal dan catat, Uang pisah, Tunjangan Hari Tua dan Tunjangan Masa Persiapan Pensiun yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.

**- Kesejahteraan Karyawan**

**- Tantiem**

Tantiem dicadangkan berdasarkan estimasi manajemen perusahaan untuk Direksi dan Komisaris. Jumlah tantiem untuk setiap tahun buku ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dibukukan sebagai beban tahun berjalan.

**- Jasa Produksi**

Jasa Produksi dicadangkan berdasarkan estimasi Manajemen Perusahaan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS), dibukukan sebagai beban (expense) tahun berjalan.

**- Dana Pindah Rumah Bagi Karyawan**

Perusahaan menyediakan uang pindah bagi karyawan Perusahaan yang dipindah tugaskan dan memasuki masa bebas tugas (MBT).

**- Cuti Panjang dan Cuti Tahunan**

Perusahaan memberikan kesempatan cuti tahunan (selama 12 hari per tahun) dan cuti panjang (diberikan selama 60 hari per 6 tahun).

**- Asuransi Jiwa dan Jamsostek**

Perusahaan membayai program asuransi jiwa bagi karyawan. Perusahaan bekerja sama dengan beberapa Perusahaan asuransi untuk mendukung program tersebut. Perusahaan juga mengikut sertakan karyawannya dalam program jaminan ketenagakerjaan di PT Jamsostek.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**u. Employee Benefits** (continued)

**Other Employee Benefits Program** (continued)

**- Employee working rewards** (continued)

Other employee benefits include death benefit program and record, Money separation, Annuities and Retirement Preparation Period Allowance is governed by the Cooperation Agreement.

**Employee Welfare**

**- Tantiem**

Tantiem is reserved based on management estimation for Directors and Commissioners. The value of tantiem is determined and authorized through General Shareholders Meeting (RUPS) and charged to expenses of the current year.

**- Incentives for Employee**

Production Services Management estimates are reserved by the Company and approved by the General Meeting of Shareholders (AGM), is recorded as an expense (expense) for the year.

**- Relocation Allowance for Pre-Retired Employee**

The company provides the fund for Company's employee who is going to move on his duty-free period.

**- Long service leave and annual leave**

The company provides the opportunity annual leave (for 12 days per year) and long service leave (given for 60 days per six years).

**- Life and Labor Insurance**

The Company provides life insurance program for employees. The company works with several insurance companies to support the program. Company employees also participated in the labor insurance program in PT Jamsostek.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**v. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Entitas Induk dan Entitas Anak menerapkan PSAK 23 (Revisi 2010) "Pendapatan". PSAK ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan.

- Pendapatan tambang pasasi dan muatan diakui sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang pasasi (B60A) dan daftar tambang muatan (B60).
- Pendapatan charter diakui proporsional selama periode perjanjian.
- Pendapatan bongkar muat, komisi keagenan, EMKL dan reparasi diakui pada saat jasa tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Beban diakui pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya (accrual basis).

**Beban Keuangan**

Beban pinjaman bank dan surat berharga dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun terjadinya.

**w. Pajak Penghasilan**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. SAK revisi ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan beserta bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak.

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**v. Revenue and Expense Recognition**

*Effective January 1, 2011, the Company and Subsidiaries applied SFAS 23 (Revised 2010) "Revenue". SFAS identified revenue recognition criteria are met, so that the revenue can be recognized, and the accounting treatment of revenue arising from certain transactions and events, as well as providing practical guidance in the application of criteria regarding revenue recognition.*

- Pasasi mines and cargo revenues are recognized according to the level of completion services on the basis pasasi mine money list (B60A) and the list of charges mines (B60).*
- Charter revenue is recognized proportionately over the period of the agreement.*
- Revenue stevedoring, agency commissions, and reparations EMKL recognized when services have been completed.*
- Expenses are recognized when incurred and in accordance with its useful life (accrual basis).*

**Financial Expenses**

*The burden of bank loans and securities charged to the statement of comprehensive income as incurred.*

**w. Income Tax**

*Effective January 1, 2012, the Company and its subsidiaries applied PSAK No. 46 (Revised 2010), which prescribes the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the consolidated statements of financial position; and transactions and other events of the current period that are recognized in the consolidated financial statements. The revised SAK also prescribes an entity to present the underpayment/overpayment of income tax including its interest/penalty, if any, as part of "Tax Expense - Current" in the consolidated statement of comprehensive income. The initial adoption of the revised SAK did not give any impact to the Group's consolidated financial statements.*

*Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**w. Pajak Penghasilan** (lanjutan)

**Pajak Kini**

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

**Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinan perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa depan yang diperkirakan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatatnya disesuaikan berdasarkan ketersediaan laba kena pajak di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**w. Income Tax** (continued)

**Current Tax**

*Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.*

*Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.*

**Deferred Tax**

*Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting dates between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.*

*Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, except where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

*The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at each reporting date and adjusted based on availability of future taxable income.*

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

**x. Informasi segmen**

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan untuk membuat estimasi / taksiran dan asumsi yang dilaporkan, karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil aktual yang dilaporkan pada tahun yang akan datang mungkin akan berbeda dengan jumlah estimasi tersebut.

Efektif 1 Januari 2011, PSAK 5 (Revisi 2009) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan dan entitas anak yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Sebaliknya, standar sebelumnya mengharuskan Perusahaan dan entitas anak mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian. (Lihat Catatan 37).

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan

**y. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajemen untuk menggunakan estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia pada sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**x. Segment Information**

*The financial statements prepared accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia requires management to make estimations and assumptions that are reported, due to the inherent contingency in making estimates, actual results reported in the next year could differ from those estimates.*

*Effective January 1, 2011, PSAK 5 (Revised 2009) requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Company and its subsidiaries that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances. In contrast, the predecessor standard required the Company and its subsidiaries to identify two sets of segments (business and geographical), using a risks and returns approach. (See Note 37).*

*An operating segment is a component of an entity:*

- That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses;*
- Whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assets its performance; and*
- For which discrete financial information is available.*

*Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and*

**y. Use of Estimates, considerations and assumptions Management**

*The preparation of consolidated financial statements based on generally accepted accounting principles requires management to use estimates, judgments and assumptions on the value of assets and liabilities that are not available in other sources. Estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.*

*Management believes that the following disclosures have included an outline of the estimation, significant judgment made by management, which have an impact on the amounts recognized in the consolidated financial statements.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

y. **Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen** (lanjutan)

Pertimbangan-pertimbangan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan

1. Aset Keuangan yang Tidak Memiliki Kuotasi Harga di Pasar Aktif

Entitas mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut memiliki atau tidak memiliki kuotasi harga di pasar yang aktif. Evaluasi tersebut juga mencakup apakah kuotasi harga suatu aset keuangan di pasar yang aktif, merupakan kuotasi harga yang tersedia secara reguler, dan kuotasi harga tersebut mencerminkan transaksi di pasar yang aktual dan terjadi secara reguler dalam suatu transaksi wajar.

2. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut Manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, entitas secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

y. **Use of Estimates, considerations and assumptions Management** (continued)

*The following considerations have included an outline of the estimation, significant judgment made by management, which have an impact on the amounts recognized in the consolidated financial statements.*

1. *Asset Not Have A quotation Prices in Active Markets*

*Entity classifies financial assets by evaluating, among other things, whether the asset is owned or not quoted in an active market. Included in the evaluation whether a financial asset is quoted prices in an active market, the quoted prices are readily and regularly, and whether those prices represent actual market transactions and occur regularly within an arm's length.*

2. *Impairment of Financial Assets*

*Impairment of loans and receivables are maintained at the amount that the management is adequate to cover any possible uncollectible financial assets. At each consolidated balance sheet date, the entity specifically examine whether there is objective evidence that a financial asset is impaired (doubtful).*

*Established allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtor or significant delay in payments. If there is objective evidence of impairment, the amount and timing of which can be recovered is estimated based on past loss experience. Formed allowance for impairment losses on accounts specifically identified as impaired. An evaluation of the receivables, which aims to identify the amount to the allowance, done regularly throughout the year. Therefore, the amount and timing of impairment loss recorded in each period may vary depending on the judgments and estimates that used.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

y. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen (lanjutan)

3. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Entitas.

**Estimasi dan asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Entitas mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Entitas. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

1. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

y. *Use of Estimates, considerations and assumptions Management* (continued)

3. *Impairment of Non-Financial*

*Reviewing the impairment occur if there are indications of impairment of certain assets. Determining the fair value of assets requires estimates of cash flows expected to be generated from sustainable consumption and final disposal of the asset. Significant changes in the assumptions used to determine the fair value can have a significant impact on the recoverable amount and the amount of the impairment loss that occurs may have a material effect on operating results Entities.*

**Estimation and assume**

*The key assumptions concerning the future and other major sources of uncertainty in estimating the reporting date that have a significant risk that could cause a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities in subsequent periods discussed below. Entities basing assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements are prepared. Existing conditions and assumptions about future developments may change due to changes in market circumstances that are beyond the control of the Entity. The changes are reflected in the assumptions when the situation occurs:*

1. *Fair Value of Financial Assets and Financial*

*Indonesian Financial Accounting Standards require that financial assets and certain financial liabilities at fair value, and requires the use of estimates. Components significant fair value measurement is determined based on the evidence objectively verifiable (such as exchange rates, interest rates), the timing and magnitude of changes in fair value can be different due to the use of different valuation methods.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** (lanjutan)

y. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi  
Manajemen (lanjutan)

**Estimasi dan asumsi** (lanjutan)

2. Imbalan Pasti Pasca Kerja

Nilai kini liabilitas pensiun tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas pensiun. Entitas menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode laporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Entitas mempertimbangkan tingkat bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas pensiun yang terkait. Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Entitas mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

3. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi Manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

y. *Use of Estimates, considerations and assumptions Management* (continued)

**Estimation and assume** (continued)

2. *Defined Benefit Post-Employment*

*The present value of pension liabilities depends on several factors that are determined on the basis of actuarial based on several assumptions. Assumptions used to determine net retirement costs include the discount rate and future salary increases. A change in these assumptions will affect the carrying amount of pension liabilities. The entity determines the discount rate and future salary increases are appropriate at the end of the reporting period. The discount rate is the interest rate that should be used to determine the present value of the estimated future cash flows are expected to settle the pension obligations. In determining the appropriate level of interest rates, Entities consider interest rates of government bonds denominated in the currency of the consideration will be paid and have a time period similar to the period of pension related liabilities. For future salary increase rate, Entities collecting historical data on changes in the basic salaries of workers and adapt to future business planning.*

3. *Deferred tax assets*

*Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the tax base when it is probable that taxable profit will be available for the use of temporary differences recognized. Significant management estimation is required to determine the amount of deferred tax assets which are recognized by the possibility of the realization time and the amount of taxable income in the future as well as future tax planning strategies.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**4. KAS DAN SETARA KAS**

Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

**4. CASH AND CASH EQUIVALENT**

The details of cash and cash equivalents are as follows:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Kas</b>			<b>Cash</b>
Rupiah	5.359.195.264	8.712.352.683	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	32.787.890	26.667.472	United States Dollar
<b>Jumlah</b>	<b>5.391.983.153</b>	<b>8.739.020.155</b>	<b>Total</b>
<b>Bank</b>			<b>Bank</b>
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah			Rupiah
Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT	141.024.440.414	635.481.818.569	Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT	21.631.516.105	22.881.351.231	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT	9.110.166.855	22.363.811.268	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT
Bank Syariah Mandiri, PT	4.538.020.704	708.513.591	Bank Syariah Mandiri, PT
Bank DKI	258.741.025	506.854.320	PT Bank DKI
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT	160.992.799	159.437.752	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT
BPD Papua, PT	-	81.116.763	BPD Papua, PT
<b>Sub Jumlah</b>	<b>176.723.877.903</b>	<b>682.182.903.494</b>	<b>Sub Total</b>
Dollar Amerika Serikat			US Dollar
Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT	11.228.628.985	8.012.904.519	Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT	743.190.939	1.230.575.160	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT	147.960.591	152.435.716	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT
<b>Sub Jumlah</b>	<b>12.119.780.515</b>	<b>9.395.915.395</b>	<b>Sub Total</b>
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk.	1.070.131.046	549.106.314	PT Bank Central Asia Tbk.
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Citibank N.A	1.783.140.064	1.609.130.954	Citibank N.A
<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.853.271.110</b>	<b>2.158.237.268</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah</b>	<b>191.696.929.528</b>	<b>693.737.056.157</b>	<b>Total</b>
<b>Deposito</b>			<b>Deposit</b>
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	153.925.623.906	1.342.199.994	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	11.600.000.000	20.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	523.000.000.000	8.600.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
<b>Jumlah</b>	<b>688.525.623.906</b>	<b>29.942.199.994</b>	<b>Total</b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>885.614.536.587</b>	<b>732.418.276.306</b>	<b>Total Cash &amp; Equivalents</b>

Tingkat bunga per tahun deposito Rupiah sebesar 6% - 7% dan 4,75% - 6,75% pada tahun 2016 dan 2015.

Interest rate per year rupiah deposits by 6% - 7% and 4,75% - 6,75% in 2016 and 2015.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**5. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI  
PENGGUNAANNYA**

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas setara kas yang dicadangkan untuk tujuan tertentu seperti bank garansi, jaminan pelaksanaan dan sebagainya yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya terdiri dari:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT	631.057.300.000	89.072.900.006	Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT	55.100.000.000	12.600.000.000	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bank Syariah Mandiri Tbk., PT	24.826.423.622	-	Bank Syariah Mandiri Tbk., PT
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya</b>	<b>710.983.723.622</b>	<b>101.672.900.006</b>	<b>Total Restricted Cash and Cash Equivalents</b>

*Cash and cash equivalents Restricted cash equivalents represent cash reserved for specific purposes such as bank guarantees, performance bonds and so the term of 1 year or less. Cash and cash equivalents restricted as follows:*

**6. PENEMPATAN JANGKA PENDEK**

Penempatan jangka pendek merupakan penempatan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. oleh Entitas Anak PT Sarana Bandar Nasional sebesar Rp5.000.000.000, pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Tingkat bunga per tahun deposito Rupiah sebesar 8,25% pada tahun 2016 dan 2015.

**6. TIME DEPOSITS**

*Short-term placements are placements to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. by Subsidiary PT Sarana Bandar Nasional Rp5.000.000.000, on December 31, 2016 and 2015.*

*Interest rate per year rupiah deposits by 8,25% in 2016 and 2015.*

**7. PIUTANG USAHA**

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

**7. ACCOUNTS RECEIVABLE**

*The details of trade receivables are as follows:*

*a. Based on the customer*

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related parties</b>
Yayasan Kesehatan			Yayasan Kesehatan
Pensiunan Pelni	13.344.698.076	9.635.000.442	Pensiunan Pelni
PT Sarana Gama Sejahtera	2.346.234.693	1.349.563.069	PT Sarana Gama Sejahtera
Sub Jumlah	15.690.932.769	10.984.563.511	Sub Total

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**7. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

a. Berdasarkan pelanggan (lanjutan)

**7. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)**

a. Based on the customer (continued)

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third parties</b>
Kem. Perhubungan			Kem. Perhubungan
CQ Karo Perencanaan	197.813.998.577	53.641.475.423	CQ Karo Perencanaan
JKN - BPJS	5.239.959.500	-	JKN - BPJS
PT Putra Master	4.435.293.600	4.581.744.000	PT Putra Master
PT Pupuk Kaltim, Sby	1.555.082.759	1.417.441.417	PT Pupuk Kaltim, Sby
Muklis (Wicaksono)	1.313.797.593	-	Muklis (Wicaksono)
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	1.126.554.727	-	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Carnival Uk (MV. Arcadia)	1.049.985.242	1.078.040.072	Carnival Uk (MV. Arcadia)
PT Atosim Lampung Pelayaran	1.037.791.650	1.656.701.000	PT Atosim Lampung Pelayaran
PT Jembatan Nusantara	959.144.919	-	PT Jembatan Nusantara
Limpo	913.757.497	1.348.453.392	Limpo
Silversea Cruises Ltd.	873.248.635	896.581.194	Silversea Cruises Ltd.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	860.817.498	860.817.498	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	840.169.660	568.902.000	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
PT Pewete Bahtera Kencana	830.234.300	-	PT Pewete Bahtera Kencana
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	707.622.724	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
PT LMINDO	676.495.058	-	PT LMINDO
EMKL Sejahtera	659.231.266	-	EMKL Sejahtera
PT Armada Rock Karunia (ARK)	620.519.160	-	PT Armada Rock Karunia (ARK)
Fred Olsen Cruise Line	531.682.002	-	Fred Olsen Cruise Line
Yes	514.908.604	1.232.042.306	Yes
TLIPH Nulan Raya (Maulana)	511.487.140	-	TLIPH Nulan Raya (Maulana)
AS Makening	506.701.854	-	AS Makening
PT Reksa Sarana Sagara	-	16.497.778.291	PT Reksa Sarana Sagara
Foong Sun Shipping	-	10.761.903.420	Foong Sun Shipping
Bank HSBC	-	3.115.150.654	Bank HSBC
PT Garaha Sarana Gresik	-	2.200.266.684	PT Garaha Sarana Gresik
PT Pelayaran Samudra Sejahtera Lestari	-	1.602.532.690	PT Pelayaran Samudra Sejahtera Lestari
PT Sowohi Kentiti Jaya	-	1.260.654.643	PT Sowohi Kentiti Jaya
Nanjin Union Shipping Co., Ltd	-	1.131.519.287	Nanjin Union Shipping Co., Ltd
PT Rolika Catering Indonesia	-	962.597.062	PT Rolika Catering Indonesia
Seadream Yacht Club	-	948.321.549	Seadream Yacht Club
PT Indomarco Adiprima	-	879.289.620	PT Indomarco Adiprima
PT Tri Elang	-	769.724.549	PT Tri Elang
Amas Iscindo Utama	-	680.954.933	Amas Iscindo Utama
PT Wipa Express	-	670.368.011	PT Wipa Express
Seaspace Shipping	-	652.144.554	Seaspace Shipping
Inflot World Wide Plc	-	564.306.823	Inflot World Wide Plc
CV Karya Bersama	-	551.318.500	CV Karya Bersama
PT HMZ Cargo	-	527.336.141	PT HMZ Cargo
Lainnya (dibawah Rp500.000.000)	41.725.673.749	70.927.270.176	Others (below Rp500,000,000)
Sub Jumlah	265.304.157.715	181.985.635.889	Sub Total
Provisi penurunan nilai	(8.199.684.373)	(7.075.367.277)	Provision for impairment
Sub Jumlah	257.104.473.342	174.910.268.612	Sub Total
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b>272.795.406.111</b>	<b>185.894.832.123</b>	<b>Total Account Receivable</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**7. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

b. Berdasarkan jenis usaha

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent Entity</b>
Tambang pasasi dan muatan	214.319.257.831	71.183.118.932	Ticketing and freight
Charter kapal	464.959.810	29.470.210.279	Ship Charter
Repair docking	10.280.059.227	9.850.307.199	Repair docking
Keagenan	5.051.549.672	8.518.013.982	Agency
Sewa wisma	4.791.022.047	69.349.999	Rent Homestead
	<u>234.906.848.587</u>	<u>119.091.000.391</u>	
Provisi penurunan nilai	(5.557.749.769)	(3.950.107.144)	Provision for impairment
Jumlah	<u>229.349.098.819</u>	<u>115.140.893.247</u>	Total
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiary</b>
Sarana Bandar Nasional, PT	20.543.391.143	51.585.456.928	Sarana Bandar Nasional, PT
Pelita Indonesia Djaya, PT	1.403.142.490	22.293.742.081	Pelita Indonesia Djaya, PT
Rumah Sakit PELNI, PT	24.141.708.263	73.879.199.009	Rumah Sakit PELNI, PT
Jumlah	<u>46.088.241.896</u>	<u>73.879.199.009</u>	Total
Provisi penurunan nilai	(2.641.934.604)	(3.125.260.133)	Provision for impairment
Jumlah	<u>43.446.307.292</u>	<u>70.753.938.876</u>	Total
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b><u>272.795.406.111</u></b>	<b><u>185.894.832.123</u></b>	<b>Total Account Receivable</b>

c. Berdasarkan analisa umur piutang

**7. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)**

b. Based of type business

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Kurang dari 1 tahun	205.806.137.774	131.612.661.060	Less than 1 year
1 - 2 tahun	48.960.065.233	10.693.665.499	1 - 2 Years
2 - 3 tahun	16.457.481.526	16.430.208.533	2 - 3 Years
3 - 4 tahun	2.393.006.471	8.680.465.054	3 - 4 Years
4 - 5 tahun	5.416.590.038	19.355.722.227	4 - 5 Years
Di atas 5 tahun	1.961.809.442	6.197.477.027	Di atas 5 tahun
	<u>280.995.090.484</u>	<u>192.970.199.400</u>	
Provisi penurunan nilai	(8.199.684.373)	(7.075.367.277)	Provision for impairment
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b><u>272.795.406.111</u></b>	<b><u>185.894.832.123</u></b>	<b>Total Account Receivable</b>

Piutang kepada Kem. Perhub. CQ. Karo Perencanaan merupakan piutang kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atas kekurangan kompensasi biaya Public Service Obligation (PSO) tahun 2015 dan 2016

Receivables to the Ministry of Transportation CQ. Karo Planning owed by the Directorate General of Sea Transportation Ministry in charge of compensation shortfall Public Service Obligation (PSO) of 2015 and 2016.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**7. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

Mutasi provisi penurunan nilai selama tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Saldo Awal	7.075.367.277	4.920.110.119	<i>Beginning Balance</i>
Penyisihan Selama Tahun Berjalan	1.124.317.096	2.155.257.158	<i>Allowance During the Current Year</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b>8.199.684.373</b>	<b>7.075.367.277</b>	<b><i>Ending Balance</i></b>

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

**7. ACCOUNTS RECEIVABLE (continued)**

*Movements of provision for impairment losses during 2016 and 2015 as follows:*

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Saldo Awal	7.075.367.277	4.920.110.119	<i>Beginning Balance</i>
Penyisihan Selama Tahun Berjalan	1.124.317.096	2.155.257.158	<i>Allowance During the Current Year</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b>8.199.684.373</b>	<b>7.075.367.277</b>	<b><i>Ending Balance</i></b>

*Based on a review at the end of the year, management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.*

**8. PIUTANG LAIN-LAIN**

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

**8. OTHER RECEIVABLES**

*The details of other receivables are as follows:*

a. *Based on the customer*

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
Yayasan Kesehatan Pensiun			Yayasan Kesehatan Pensiun
Pelni	1.339.152.407	1.326.402.857	Pelni
Pegawai	2.544.398.404	2.232.878.009	Employee
Jumlah	<b>3.883.550.811</b>	<b>3.559.280.866</b>	<b>Total</b>
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT Asuransi Purna Arthanugraha	697.527.913	705.898.151	PT Asuransi Purna Arthanugraha
Uang Jaminan	2.084.082.933	5.943.176.000	Deposit
Lainnya	1.447.376.819	2.079.797.780	Others
Jumlah	<b>4.228.987.665</b>	<b>8.728.871.931</b>	<b>Total</b>
Provisi penurunan nilai	<b>(222.551.921)</b>	<b>(202.093.926)</b>	<i>Provision for impairment</i>
<b>Jumlah Piutang Lain-lain</b>	<b><u>7.889.986.555</u></b>	<b><u>12.086.058.871</u></b>	<b><i>Total Other receivables</i></b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**8. PIUTANG LAIN-LAIN** (lanjutan)

b. Berdasarkan jenis usaha

**8. OTHER RECEIVABLES** (continued)

b. Based on the type of business

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent Entity</b>
Tagihan Kepada Pegawai	2.203.664.600	1.903.318.066	Claims To Employees
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	1.339.152.407	1.326.402.857	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	2.084.382.933	5.943.176.000	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Piutang Diluar Usaha	1.884.075.869	2.724.801.715	Other Receivables
	<b>7.511.275.809</b>	<b>11.897.698.638</b>	
Provisi penurunan nilai	(222.551.921)	(202.093.926)	Provision for impairment
	<b>7.288.723.888</b>	<b>11.695.604.712</b>	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiary</b>
Sarana Bandar Nasional, PT	423.236.547	248.859.684	Sarana Bandar Nasional, PT
Pelita Indonesia Djaya, PT	178.026.120	141.594.475	Pelita Indonesia Djaya, PT
	<b>601.262.667</b>	<b>390.454.159</b>	
<b>Jumlah Piutang Lain-lain</b>	<b>7.889.986.555</b>	<b>12.086.058.871</b>	<b>Total</b>

Piutang lain-lain kepada PT Asuransi Purna Arthanugraha (Aspan) merupakan klaim asuransi kapal KM. Fudi sesuai dengan Berita Acara No. 477/DIRUT/UM/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, sebesar USD 1,661,437.95 sampai dengan 31 Desember 2016.

Another explanation lay-kepada PT Asuransi Full Arthanugraha (Aspan) is an Insurance Claim Ship KM. Fudi accordance WITH Minutes No. 477 / Managing Director / UM / XII / 2011 Date of December 22, 2011, amounting to USD 1,661,437.95 As of December 31, 2016.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut:

Movements of allowance for impairment losses during 2016 and 2015 as follows:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Saldo Awal	202.093.926	1.950.341.262	Beginning Balance
Penyisihan Selama Tahun Berjalan	-	(1.748.247.336)	Allowance During the Current Year
Pemulihan Selama Tahun Berjalan	20.457.995	-	Recovery During the Current Year
<b>Saldo akhir</b>	<b>222.551.921</b>	<b>202.093.926</b>	<b>Ending Balance</b>

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Based on a review at the end of the year, management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on other receivables uncollectible.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**9. PERSEDIAAN**

Akun ini terdiri dari:

**9. INVENTORY**

*This account consists of:*

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent Entity</b>
Suku cadang	389.808.153.421	463.716.058.739	Spareparts
Pelumas	22.354.869.249	56.482.144.292	Lubricants
Bahan bakar	31.429.397.419	43.624.809.921	Fuel
Lainnya	9.753.138.717	5.491.543.110	Others
	<b>453.345.558.806</b>	<b>569.314.556.062</b>	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiary</b>
Sarana Bandar Nasional, PT	3.108.640.797	515.018.268	Sarana Bandar Nasional, PT
Rumah Sakit PELNI, PT	6.473.781.795	5.882.847.462	Rumah Sakit PELNI, PT
	<b>9.582.422.592</b>	<b>6.397.865.730</b>	
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>462.927.981.398</b>	<b>575.712.421.792</b>	<b>Total</b>

Persediaan obat-obatan pada entitas anak PT Rumah sakit Pelni sebesar Rp5.597.000.000 digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Lihat catatan 20).

*Supplies of medicines in the subsidiary PTRumah Sakit PELNI Rp5.597.000.000 used as collateral for credit facilities obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (See note 20).*

Manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai tersebut sudah memadai.

*Management believes that the impairment was already adequate.*

**10. BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

Akun ini terdiri dari:

**10. PREPAID EXPENSES**

*This account consists of:*

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent Entity</b>
Administrasi dan umum	11.807.750.474	6.263.190.363	General and Administrative
Usaha Perkapalan	574.759.927	-	Shipping
Usaha Wisma	-	-	Rent
Asuransi	8.990.659	4.185.745.085	Insurance
Bunker	-	952.606.396	Bunker
Sewa	521.204.979	812.135.261	Rent
Lainnya	198.905.106	3.466.257.185	Other
	<b>13.111.611.145</b>	<b>15.679.934.290</b>	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiary</b>
Sarana Bandar Nasional, PT	4.502.438.065	3.849.617.524	Sarana Bandar Nasional, PT
Rumah Sakit PELNI, PT	5.708.557	135.332.831	Rumah Sakit PELNI, PT
	<b>4.508.146.622</b>	<b>3.984.950.355</b>	
<b>Jumlah Biaya Dibayar Dimuka</b>	<b>17.619.757.767</b>	<b>19.664.884.645</b>	<b>Total</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**11. UANG MUKA**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent Entity</b>
Perkapalan	13.626.903.133	47.583.861.682	Shipping
Administrasi dan umum	2.648.750.370	1.012.296.193	General and Administrative
Pengadaan aset tetap	2.285.621.625	4.624.507.771	procurement fixed asset
Keagenan	2.205.283.837	4.257.363.033	Agency
Usaha Galangan	932.666.788	637.425.000	Enterprises Shipyard
Lainnya	52.807.198	53.668.090	Other
	<b>21.752.032.951</b>	<b>58.169.121.769</b>	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiary</b>
Sarana Bandar Nasional, PT	1.226.032.528	2.082.842.498	Sarana Bandar Nasional, PT
Pelita Indonesia Djaya, PT	1.377.931.153	1.479.965.042	Pelita Indonesia Djaya, PT
Rumah Sakit PELNI, PT	1.087.022.687	666.974.765	Rumah Sakit PELNI, PT
	<b>3.690.986.368</b>	<b>4.229.782.305</b>	
<b>Jumlah Uang Muka</b>	<b>25.443.019.319</b>	<b>62.398.904.074</b>	<b>Total Advance Payment</b>

**12. PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent Entity</b>
Public Service Obligation (PSO)	78.715.467.539	307.873.172.388	Public Service Obligation (PSO)
Usaha Penunjang	2.039.054.942	-	Supporting Business
Pelayanan kesehatan	49.321.942.810	37.535.056.857	Health Service
Lainnya	2.068.452.737	11.301.256.422	Other
<b>Jumlah Pendapatan Masih Harus Diterima</b>	<b>132.144.918.028</b>	<b>356.709.485.667</b>	<b>Total Accrue Revenue</b>

Pendapatan masih harus diterima Public Service Obligation (PSO) merupakan pendapatan PSO tahun berjalan yang belum terealisasi pencairan dananya sampai dengan akhir tahun berjalan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN) (BABUN-BPP) No. 999.07.1.985120/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan kekurangan pendapatan PSO sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2013 tahun 2013 (lihat catatan 30 dan 43).

Revenue Accrued Public Service Obligation (PSO) PSO is the income of the current year unrealized disbursement of funds until the end of the current year in accordance with the Budget Implementation List State General Treasurer (DIPA-BUN) (baboon-BPP) No. 999.07.1.985120/2015 dated January 5, 2015 and revenue shortfalls PSO accordance with the Minister of Finance No. 173 / PMK.02 / 2013 in 2013 (see notes 30 and 43).

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**13. PERPAJAKAN**

**a. Pajak Dibayar Dimuka**

Akun ini merupakan kelebihan angsuran pajak dengan rincian:

	<u>31 Des/Dec 2016</u>	<u>31 Des/Dec 2015</u>	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent entity</b>
Pajak Penghasilan			Income Tax
PPh 21	3.620.497.379	3.658.592.426	Article 21
Pajak Lainnya	4.705.618.682	-	Other tax
	<b><u>8.326.116.061</u></b>	<b><u>3.658.592.426</u></b>	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiary</b>
Pajak Penghasilan			Income Tax
PPh Pasal 22	807.473.456	-	Article 22
PPh Pasal 23	2.464.866.577	2.256.078.900	Article 23
Pajak Pertambahan Nilai	10.553.246.849	3.057.179.077	Value-Added Tax
	<b><u>13.825.586.882</u></b>	<b><u>5.313.257.977</u></b>	
<b>Jumlah</b>	<b><u>22.151.702.943</u></b>	<b><u>8.971.850.403</u></b>	<b>Total</b>

**b. Utang Pajak**

**13. TAXATION**

**a. Prepaid Taxes**

*This account represents the excess of the tax installments with the details:*

	<u>31 Des/Dec 2016</u>	<u>31 Des/Dec 2015</u>	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent entity</b>
Pajak Penghasilan			Income Tax
PPh 15	9.430.906.644	3.987.295.323	Article 15
PPh Pasal 21	3.225.264.156	452.589.226	Article 21
PPh Pasal 22	934.041.325	588.432.671	Article 22
PPh Pasal 23	646.975.773	579.474.487	Article 23
PPh Pasal 4 Ayat 2	121.148.496	71.730.412	Article 4 Paragraph 2
PPh Pasal 29	-	7.274.486.903	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	12.701.813.444	12.425.018.694	VAT
Pajak Bumi dan Bangunan / Lain-lain	53.403.421	26.611.407	Other Income Tax
	<b><u>27.113.553.259</u></b>	<b><u>25.405.639.123</u></b>	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiary</b>
Pajak Penghasilan			Income Tax
PPh Pasal 21	1.464.804.717	2.058.170.740	Article 21
PPh Pasal 22	-	3.112.625.149	Article 22
PPh Pasal 23	94.848.718	130.933.836	Article 23
PPh Pasal 25	16.829.246.102	-	Article 25
PPh Pasal 29	-	9.510.160.035	Article 29
PPh Pasal 4 Ayat 2	12.501.200	29.036.999	Article 4 Paragraph 2
Pajak Pertambahan Nilai	6.209.206.926	2.218.353.004	VAT
Pajak Bumi dan Bangunan / Lain-lain	-	114.412.448	Other Income Tax
	<b><u>24.610.607.663</u></b>	<b><u>17.173.692.211</u></b>	
<b>Jumlah</b>	<b><u>51.724.160.922</u></b>	<b><u>42.579.331.334</u></b>	<b>Total</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**13. PERPAJAKAN**

**c. Pajak Penghasilan**

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Induk	253.916.781.486	141.596.034.860	<i>Profit before income tax of the parent entity</i>
<b>Perbedaan temporer:</b>			<b>Temporary Differences:</b>
Penyisihan piutang usaha	38.373.465.015	29.596.857.921	Receivable Allowance
Liabilitas imbalan kerja	8.896.669.154	(6.109.063.935)	Salary Liabilities
Penyusutan leasing	-	-	Leasing Depreciation
Penyusutan aset tetap	1.659.706.906	2.065.099.214	Fixed Assets Depreciation
	48.929.841.075	25.552.893.200	
<b>Perbedaan permanen:</b>			<b>Permanent Differences:</b>
Beban marketing dan representasi	1.098.938.369	1.339.069.880	Marketing and representation expense
PPh 21 ditanggung Entitas	12.684.194.941	12.464.531.024	Income tax art 21 by entity
Pendapatan di luar usaha lainnya	(96.751.222.819)	(139.444.617.608)	Other Income
	(82.968.089.509)	(125.641.016.704)	
<b>Beban (pendapatan) terkait yang telah dikenakan:</b>			<b>Expenses (income) related that have been imposed:</b>
PPh final Usaha perkapalan Penghasilan PSO (Public Service Obligation)	(1.481.345.789.960)	(1.572.946.254.234)	Income Tax Shipping Businesses
Usaha sampingan	(2.065.598.008.644)	(1.787.716.198.653)	Public Service Obligation Income
Pendapatan deposito, jasa giro dan dividen	(30.775.056.503)	(9.699.128.983)	Other Income
Beban usaha perkapalan	(32.040.360.368)	(6.965.827.409)	Revenues deposits, demand deposits and dividends
Beban overhead	3.106.804.637.220	3.017.068.380.724	Shipping Businesses Expenses
Beban diluar usaha - PPh final atas pendapatan deposito, jasa giro, dividen dan aset tetap penjualan	284.498.027.835	299.176.357.526	Overhead Expenses
	21.669.674.059	62.647.903.299	Expenses outside the business final income tax on income on deposits, current accounts, dividends and fixed asset sales
	(196.786.876.361)	1.565.232.270	
<b>Laba fiskal</b>	<b>23.091.656.691</b>	<b>43.073.143.626</b>	<b>sub Total</b>
Taksiran penghasilan kena pajak Perseroan akhir tahun berdasarkan Tarif progresif 25%	5.772.914.173	10.768.285.907	<i>Estimated Taxable Income Tax Rate The Company end of year based Progressive 25%</i>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**13. PERPAJAKAN**

**c. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Kredit Pajak			<b>Tax Deduction:</b>
PPh 22	3.296.193.067	3.150.575.430	Income tax art 22
PPh 23	1.107.200	248.209.581	Income tax art 23
PPh 25	7.181.232.588	-	Income tax art 25
	<b>10.478.532.855</b>	<b>3.398.785.011</b>	
PPPh Badan Kurang (lebih) bayar	(4.705.618.682)	7.369.500.896	Corporate Tax - Less (More)
<b>Beban pajak penghasilan Kini</b>			<b>Current Income Tax Expense</b>
Entitas Induk	5.772.914.173	10.768.285.907	Parent Entity
Entitas Anak	-	20.752.747.695	Subsidiary
<b>Sub Jumlah</b>	<b>5.772.914.173</b>	<b>31.521.033.602</b>	<b>Sub Total</b>

**d. Pajak Tangguhan**

**13. TAXATION**

**c. Income Tax (continued)**

	<b>2015</b>	<b>Laba (rugi) Profil/loss</b>	<b>2016</b>	
<b>Entitas Induk</b>				<b>Parent Entity</b>
Penyisihan piutang	13.113.450.041	9.593.366.255	22.706.816.296	Receivable Allowance
Rugi fiskal	-	-	-	Fiscal Loss
Leasing	-	-	-	Leasing
Penyusutan aset tetap	5.833.068.226	2.224.167.289	8.057.235.514	Fixed Assets Depreciation
Liabilitas imbalan kerja	1.633.056.444	414.926.726	2.047.983.170	Salary Liabilities
	20.579.574.711	12.232.460.270	32.812.034.981	
<b>Entitas Anak</b>	<b>16.171.337.236</b>	<b>(3.437.487.515)</b>	<b>12.733.849.721</b>	<b>Subsidiary</b>
	<b>36.750.911.947</b>	<b>8.794.972.755</b>	<b>45.545.884.702</b>	
	<b>2014</b>	<b>Laba (rugi) Profil/loss</b>	<b>2015</b>	
<b>Entitas Induk</b>				<b>Parent Entity</b>
Penyisihan piutang	5.714.235.561	7.399.214.480	13.113.450.042	Receivable Allowance
Rugi fiskal	-	-	-	Fiscal Loss
Leasing	-	-	-	Leasing
Penyusutan aset tetap	1.116.781.640	516.274.804	1.633.056.444	Fixed Assets Depreciation
Liabilitas imbalan kerja	7.360.334.210	(1.527.265.984)	5.833.068.226	Salary Liabilities
	14.191.351.411	6.388.223.300	20.579.574.711	
<b>Entitas Anak</b>	<b>11.805.128.801</b>	<b>4.366.208.435</b>	<b>16.171.337.236</b>	<b>Subsidiary</b>
	<b>25.996.480.212</b>	<b>10.754.431.735</b>	<b>36.750.911.947</b>	

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**14. PROPERTI INVESTASI**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Harga Perolehan			
Tanah	3.094.049.600	3.094.049.600	Parent Entity
Gedung	40.848.201.737	40.663.489.747	Land Building
	<b>43.942.251.337</b>	<b>43.757.539.347</b>	
Akumulasi Penyusutan			
Gedung	(20.960.976.697)	(19.794.417.172)	Accumulated Depreciation Building
<b>Jumlah Properti Investasi</b>	<b>22.981.274.640</b>	<b>23.963.122.175</b>	<b>Total of Invesment Property</b>

Tanah dan gedung yang disewakan oleh Entitas terletak di Kemayoran, Medan dan Makassar. Entitas juga menyewakan sebagian gedungnya di beberapa cabang yang terletak di Kantor Pusat, Surabaya, Tanjung Priok, Bali, Ampenan, Pontianak, Bitung, Jayapura, Makassar, Manokwari, Ende, Semarang dan Sorong. Entitas juga menyewakan sebagian tanahnya yang terletak di cabang Balikpapan. Tanah dan gedung yang diakui sebagai properti investasi dihitung dengan berdasarkan perkiraan

Berdasarkan hasil evaluasi Manajemen mengenai nilai yang dapat diperoleh kembali pada tanggal 31 Desember 2016, Manajemen Entitas Induk dan Entitas Anak berpendapat bahwa tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti

**14. INVESTMENT PROPERTY**

This account consists of:

*Land and buildings leased by Entities located in Kemayoran, Medan and Makassar. Entities also rented part of the building in a few branches located in the Central Office, Surabaya, Tanjung Priok, Bali, Ampenan, Pontianak, Bitung, Jayapura, Makassar, Manokwari, Ende, Semarang and Sorong. Entities also rents some land located in Balikpapan branch. Land and buildings recognized as investment property calculated based on the estimated area of land and buildings are leased to*

*Based on the evaluation of Management regarding the recoverable value on December 31, 2015, Management of the Company and Subsidiaries believes that there are changes in circumstances indicate impairment of investment property*

**15. ASET TETAP**

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap sebagai berikut:

**15. FIXED ASSETS**

Acquisition costs, accumulated depreciation and book value of the assets as follows:

	<b>2016</b>				
	<b>Saldo Awal/ Beginning Balance</b>	<b>Penambahan/ Addition</b>	<b>Pengurangan/ Reduction</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassification</b>	<b>Saldo Akhir/ Ending Balance</b>
<b>Harga Perolehan / Acquisition Cost</b>					
Tanah/Land	21.053.460.055	2.345.432.097		(11.077.097)	23.387.815.055
Gedung/Building	244.110.624.445	20.678.423.808		(350.374.862)	264.438.673.391
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	32.202.622.524	836.885.635		(889.183.800)	32.150.324.359
Inventaris Kantor/ Equipment	130.099.136.388	4.905.572.447		(20.992.331.094)	114.012.377.740
Armada Niaga /Marine Armada Kapal/Fleet	7.117.189.479.142				7.117.189.479.142
Perlengkapan Armada/ Equipment Fleet	420.961.528.094	110.202.703.121		(65.723.105.954)	465.441.125.261
Alat Produksi Lainnya/ Other Tools	219.533.660.667	32.582.586.213		(3.333.420.522)	248.782.826.358

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**15. ASET TETAP (lanjutan)**

**15. FIXED ASSETS (continued)**

	<b>2016</b>				
	<b>Saldo Awal/ Beginning Balance</b>	<b>Penambahan/ Addition</b>	<b>Pengurangan/ Reduction</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassification</b>	<b>Saldo Akhir/ Ending Balance</b>
<b>Aset Sewa Guna Usaha / Acquisition Lease</b>					
Armada Kapal/Fleet	-	-	-	-	-
Perlengkapan armada					
Equipment Fleet	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor					
Vehicle	8.983.408.686	503.480.000	-	-	9.486.888.686
Mesin/ machine	-	-	-	-	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>8.194.133.920.001</b>	<b>172.055.083.321</b>	<b>-</b>	<b>(91.299.493.329)</b>	<b>8.274.889.509.992</b>
Aset dalam					
Penyelesaian	5.528.690.778	3.946.654.247	-	3.292.431.067	6.182.913.958
<b>Jumlah</b>	<b>8.199.662.610.779</b>				<b>8.281.072.423.950</b>
<b>Akumulasi Penyusutan/ Accumulated Depreciation</b>					
Gedung/Building	78.284.809.947	7.238.369.641	(207.803.312)	(273.585.517)	85.041.790.759
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	23.988.331.102	4.348.415.927	-	(972.925.900)	27.363.821.129
Inventaris Kantor/ Equipment	107.022.997.232	5.905.980.373	(390.787)	(20.970.314.473)	91.958.272.344
Armada Niaga /Marine					
Armada Kapal/ Fleet	4.049.179.489.972	211.549.781.931	(10.909.188.368)		4.249.820.083.535
Perlengkapan Armada/ Equipment Fleet	192.230.707.661	94.478.016.662	(65.723.105.954)		220.985.618.369
Alat Produksi Lainnya					
Other Tools	117.651.959.429	21.613.740.619		(3.228.420.522)	136.037.279.526
<b>Aset Sewa Guna Usaha/Acquisition Lease</b>					
Armada Kapal/ Fleet	-	-	-	-	-
Perlengkapan armada					
Equipment Fleet	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor					
Vehicle	1.011.108.146	1.805.075.024	-		2.816.183.170
Mesin/ machine	-	-	-	-	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>4.569.369.403.489</b>	<b>346.939.380.177</b>	<b>(76.840.488.422)</b>	<b>(25.445.246.412)</b>	<b>4.814.023.048.832</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>3.630.293.207.290</b>				<b>3.467.049.375.118</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**15. ASET TETAP (lanjutan)**

**15. FIXED ASSETS (continued)**

	<b>2015</b>				
	<b>Saldo Awal/ Beginning Balance</b>	<b>Penambahan/ Addition</b>	<b>Pengurangan/ Reduction</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassification</b>	<b>Saldo Akhir/ Ending Balance</b>
<b>Harga Perolehan / Acquisition Cost</b>					
Tanah/Land	21.053.460.055				21.053.460.055
Gedung/Building	208.290.912.228	35.850.221.497	(30.509.280)		244.110.624.445
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	35.621.679.081	1.995.104.818	(5.414.161.375)		32.202.622.524
Inventaris Kantor/ Equipment	111.318.976.726	18.780.159.662	-		130.099.136.388
Armada Niaga /Marine Armada Kapal/Fleet	7.117.189.479.142	-	-		7.117.189.479.142
Perlengkapan Armada/ Equipment Fleet	359.695.321.697	61.266.206.397	-		420.961.528.094
Alat Produksi Lainnya/ Other Tools	166.865.794.025	51.454.543.540	-	1.213.323.102	219.533.660.667
<b>Aset Sewa Guna Usaha / Acquisition Lease</b>					
Armada Kapal/Fleet	-	-	-	-	-
Perlengkapan armada Equipment Fleet	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor Vehicle	-	8.983.408.686	-	-	8.983.408.686
Mesin/ machine	-		-	-	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>8.020.035.622.954</b>	<b>178.329.644.600</b>	<b>(5.444.670.655)</b>	<b>1.213.323.102</b>	<b>8.194.133.920.001</b>
Aset dalam Penyelesaian	14.585.725.829	-	(9.057.035.051)		5.528.690.778
<b>Jumlah</b>	<b>8.034.621.348.783</b>				<b>8.199.662.610.779</b>
<b>Akumulasi Penyusutan/Accumulated Depreciation</b>					
Gedung/Building	72.585.990.747	5.282.585.241	(21.793.254)	438.027.213	78.284.809.947
Kendaraan Bermotor/ Vehicle	24.337.271.678	4.784.323.466	(5.133.264.042)		23.988.331.102
Inventaris Kantor/ Equipment	98.379.683.946	8.948.598.536	(305.285.250)		107.022.997.232
Armada Niaga /Marine Armada Kapal/ Fleet	3.836.625.319.076	212.554.170.896	-		4.049.179.489.972
Perlengkapan Armada/ Equipment Fleet	147.891.475.310	44.339.232.351	-		192.230.707.661
Alat Produksi Lainnya Other Tools	110.466.334.731	7.023.731.556		161.893.142	117.651.959.429

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**15. ASET TETAP (lanjutan)**

**15. FIXED ASSETS (continued)**

	Aset Sewa Guna Usaha/Acquisition Lease	2015				
		Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Addition	Pengurangan / Reduction	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance
Kendaraan Bermotor / Vehicle	-	1.011.108.146	-	-	1.011.108.146	
Mesin/ machine	-	-	-	-	-	
<b>Sub Jumlah</b>	<b>4.290.286.075.488</b>	<b>283.943.750.192</b>	<b>(5.460.342.546)</b>	<b>599.920.355</b>	<b>4.569.369.403.489</b>	
<b>Nilai Buku</b>	<b>3.744.335.273.295</b>				<b>3.630.293.207.290</b>	

Manajemen telah melakukan penilaian properti berupa 2 (dua) tanah dan bangunan gedung serta 8 (delapan) armada untuk memberikan pendapat yang objektif mengenai nilai wajar dan sisa umur manfaat dari aset tersebut, per tanggal 31 Desember 2016. Penilaian ini dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang digunakan untuk kepentingan pelaporan keuangan Sesuai PSAK 16 dan PSAK 68.

Aset yang dilakukan penilaian tersebut adalah:

No. /Number	No. Laporan / No. Report	Tanggal Laporan /Reporting date	Keterangan / Information	Definisi Nilai / Definition of value	Nilai / Value (Rp)
(1)	016/LP/II/2017	14 Februari 2017	KFC. Jet Liner	Nilai Wajar/Fair value	109.201.538.727
(2)	017/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Labobar	Nilai Wajar/Fair value	455.680.060.890
(3)	018/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Gunung Dempo	Nilai Wajar/Fair value	713.140.500.924
(4)	019/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Caraka Jaya Niaga III-4	Nilai Wajar/Fair value	5.897.112.276
(5)	020/LP/II/2017	14 Februari 2017	KFC. Jet Liner	Nilai Residu/ Residual value	18.210.319.343
(6)	021/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Labobar	Nilai Residu/ Residual value	50.233.464.243
(7)	022/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Gunung Dempo	Nilai Residu/ Residual value	44.775.299.002
(8)	023/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Sinabung	Nilai Residu/ Residual value	57.406.675.018
(9)	024/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Kelud	Nilai Residu/ Residual value	56.385.588.227
(10)	025/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Dorolonda	Nilai Residu/ Residual value	51.119.679.893
(11)	026/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Nggapulu	Nilai Residu/ Residual value	53.120.810.988
(12)	027/LP/II/2017	14 Februari 2017	Gedung Gajah mada	Nilai Wajar/Fair value	433.568.800.000
(13)	028/LP/II/2017	14 Februari 2017	Gedung Kemayoran	Nilai Wajar/Fair value	219.940.600.000

*Management has assessed the property in the form of two (2) land and buildings to provide an objective opinion on the fair value and remaining useful life of the assets, as of December 31, 2016. The assessment was performed by the Office of Public Appraisal Service applied for the purposes of financial reporting in accordance with IAS 16 and IAS 68.*

*Asset assessment are:*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**15. ASET TETAP (lanjutan)**

Atas hasil tersebut,tidak mengakibatkan penyajian kembali atas nilai aset tetap

**15. FIXED ASSETS (continued)**

*On these results, when compared with the book value of each asset is assessed, will be summed up as follows:*

No.	Nama Properti / Property name	Nilai Buku / Book Value	Nilai Wajar / Fair Value	Selisih / Difference
(1)	KFC. Jet Liner	107.997.913.528	109.201.538.727	-
(2)	KM. Labobar	452.928.495.667	455.680.060.890	-
(3)	KM. Gunung Dempo	712.162.029.642	713.140.500.924	-
(4)	KM. Caraka Jaya Niaga III-4	-	5.897.112.276	-
(5)	KM. Sinabung	250.175.938.573	250.175.938.573	-
(6)	KM. Kelud	231.191.409.929	231.191.409.929	-
(7)	KM. Dorolonda	296.199.154.208	296.199.154.208	-
(8)	KM. Nggapulu	341.104.694.142	341.104.694.142	-
(9)	Gedung Gajah mada	23.680.981.511	433.568.800.000	-
(10)	Gedung Kemayoran	11.724.725.246	219.940.600.000	-

Berdasarkan laporan KJPP bahwa umur ekonomis kapal diperkirakan selama 30 tahun dengan mengacu pada umur ekonomis hasil kajian dari Clarkson Research Service, dan dapat dinyatakan bahwa rata-rata nilai sisa kapal berkisar 5% dari nilai barunya atau biaya reproduksi barunya.

Atas dasar penilaian KJPP tersebut, Manajemen melakukan penyesuaian atas nilai residu per 31 Desember 2016 untuk 7 tujuh) armada kapal, dengan total nilai sebesar Rp10.909.188.368.

Tanah dan bangunan milik Entitas dengan HGB No. 1864 yang terletak di Jakarta Pusat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Selain itu, peralatan kesehatan berupa 1 unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & OEC Brivo 785 Essential C-Arm dan 1 unit Brivo MR 355 Inspire 1,5T dijaminan atas fasilitas pinjaman kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan nilai masing-masing sebesar Rp8.143.905.000 dan Rp12.439.680.000. (lihat catatan 20).

Aset tetap Entitas Induk berupa armada kapal diasuransikan pada PT Asuransi Jasindo dan Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset yang signifikan.

*Based on the report KJPP that the estimated economic life of the ship for 30 years with reference to the economic life results from Clarkson Research Service, and can be stated that the average value of the rest of the ship about 5% of the value of new or reproduction cost new.*

*On the basis of the KJPP assessment, management adjusted the residual values per December 31, 2016 for 7 seven) fleet, with a total value of Rp10.909.188.368.*

*Tanah and buildings owned entity with HGB No. 1864 is located in central Jakarta used as collateral for short-term loans to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*

*In addition, health care equipment as 1 unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & BRIVO OEC C-Arm Essential 785 and 1 355 units BRIVO MR Inspire 1,5T pledged against the loan facility obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk , with the value of each of Rp8.143.905.000 and Rp12.439.680.000. (See note 20).*

*Parent Entity of fixed assets in the form of a fleet of ships insured with PT Asuransi Jasindo and management believes that there is no indication of a significant decline in the value of assets.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**16. ASET TAKBERWUJUD**

Akun ini terdiri dari:

**16. INTANGIBLE ASSETS**

This account consists of:

	<u>31 Des/Dec 2016</u>	<u>31 Des/Dec 2015</u>	
<b>Entitas Induk</b>			
Harga Perolehan			<i>Parent entity</i>
Perangkat lunak	4.113.224.500	2.396.350.000	Acquisition Cost
Hak guna bangunan	<u>2.306.922.636</u>	<u>2.016.605.160</u>	Software Building Rights
	6.420.147.136	4.412.955.160	
Akumulasi			<i>Accumulated</i>
Perangkat lunak	(1.639.639.100)	(931.452.500)	Software
Hak guna bangunan	<u>(613.840.892)</u>	<u>(480.956.051)</u>	Building Rights
	<b>(2.253.479.992)</b>	<b>(1.412.408.551)</b>	
	<b>4.166.667.144</b>	<b>3.000.546.609</b>	
<b>Entitas Anak</b>			<i>Subsidiary</i>
Sarana Bandar Nasional, PT	29.700.331	-	Sarana Bandar Nasional, PT
Pelita Indonesia Djaya, PT	11.337.500	-	Pelita Indonesia Djaya, PT
Rumah Sakit PELNI, PT	<u>328.087.113</u>	<u>270.204.145</u>	Rumah Sakit PELNI, PT
	<b>369.124.944</b>	<b>270.204.145</b>	
<b>Jumlah</b>	<b><u>4.535.792.088</u></b>	<b><u>3.270.750.754</u></b>	<b>Total</b>

**17. ASET LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

**17. OTHER ASSETS**

This account consists of:

	<u>31 Des/Dec 2016</u>	<u>31 Des/Dec 2015</u>	
<b>Entitas Induk</b>			
Harga Perolehan			<i>Parent entity</i>
Aset KSO	116.878.610.264	134.608.188.000	Acquisition cost
Aset dan persediaan tidak dapat digunakan	26.000.100	491.006.710	KSO Asset Asset and inventory can not be used
Lainnya	<u>10.637.122.509</u>	<u>1.302.023.206</u>	Other
	127.541.732.873	136.401.217.916	
<b>Entitas Anak</b>			<i>Subsidiary</i>
Sarana Bandar Nasional, PT	865.857.157	1.686.849.096	Sarana Bandar Nasional, PT
Pelita Indonesia Djaya, PT	-	-	Pelita Indonesia Djaya, PT
Rumah Sakit PELNI, PT	-	-	Rumah Sakit PELNI, PT
	<b>865.857.157</b>	<b>1.686.849.096</b>	
<b>Jumlah</b>	<b><u>128.407.590.030</u></b>	<b><u>138.088.067.012</u></b>	<b>Total</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**17. ASET LAIN-LAIN** (lanjutan)

Aset KSO merupakan kerjasama usaha optimalisasi kapasitas ruang muat kapal penumpang oleh Entitas untuk pengembangan KM. Dobonsolo dan KM. Ciremai dengan PT Citra Bayu Adhiguna, sesuai dengan perjanjian kerjasama No.: TH.94/SS/VIII/2009 dan No. TH.07.1-3/SS/2013 tanggal 20 Agustus 2009 dan 27 Maret 2013. (Lihat catatan 24). Rincian saldo KSO adalah sebagai berikut:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Nilai perolehan	199.642.233.072	199.642.233.072	Acquisition Value
Akumulasi penyusutan	(82.763.622.808)	(65.034.045.072)	Accumulated Depreciation
<b>Jumlah</b>	<b>116.878.610.264</b>	<b>134.608.188.000</b>	<b>Total</b>

**18. UTANG USAHA**

Utang usaha merupakan utang atas pembelian pupuk, suku cadang, perlengkapan rumah sakit dan obat-obatan, peralatan kantor, bahan kimia, bahan bangunan dan barang lainnya dari rekanan. Rincian Utang Usaha sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

**17. OTHER ASSETS** (continued)

KSO assets is a partnership effort optimizing load space capacity passenger ship by Entities for the development of KM. Dobonsolo and KM. Ciremai with PT Citra Bayu Adhiguna, in accordance with the cooperation agreement No.: TH.94 / SS / VIII / 2009 and No. TH.07.1-3 / SS / 2013 dated August 20, 2009 and March 27, 2013. (See note 24). KSO balance details are as follows:

**18. ACCOUNTS PAYABLE**

Business debt is owed on the purchase of fertilizers, spare parts, hospital equipment and pharmaceuticals, office equipment, chemicals, building materials and other goods from the counterparty. Details Payable as follows:

a. Based on the customer

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Pihak Berelasi</b>			<b>Related parties</b>
<u>Bahan Makanan</u>			<u>Foodstuff</u>
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pel	-	1.697.485.704	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni
	-	<b>1.697.485.704</b>	
<b>Administrasi &amp; Umum</b>			<u>General Administration</u>
PT Sarana Gama Sejahtera	640.732.764	-	PT Sarana Gama Sejahtera
	<b>640.732.764</b>	-	
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
<u>Kepelabuhanan</u>			<u>Port</u>
Ditjen Perhubungan Laut	45.819.175.496	57.951.503.296	Ditjen Perhubungan Laut
PT Pelindo I, II, III dan IV	3.365.243.628	3.044.136.885	PT Pelindo I, II, III dan IV
Lainnya (dibawah Rp500.000.000)	9.000.000	220.300.770	Others (below Rp500,000,000 )
	49.193.419.124	61.215.940.951	
<b>Bahan Makanan</b>			<u>Foodstuff</u>
PT. Aerofood Indonesia	222.699.709	-	PT. Aerofood Indonesia
	<b>222.699.709</b>	-	

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**18. UTANG USAHA (lanjutan)**

a. Berdasarkan pelanggan (lanjutan)

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Pemeliharaan Kapal</b>			<b>Maintenance of Ship</b>
PT Cahaya Samoedra Bersaudara	4.014.629.796	8.255.988.211	PT Cahaya Samoedra Bersaudara
PT Dok Kodja Bahari Galangan II	2.034.547.175	1.177.209.231	PT Dok Kodja Bahari Galangan II
PT Dalekesa	-	5.946.525.126	PT Dalekesa
PT Sinar Kencana	659.921.422	2.235.931.520	PT Sinar Kencana
PT Sarana Bandar Logistik	-	2.045.932.105	PT Sarana Bandar Logistik
PT Harapan Abadi Niagatama	-	1.819.304.832	PT Harapan Abadi Niagatama
PT Pertalube Nusajaya	1.193.052.465	1.434.415.854	PT Pertalube Nusajaya
PT Dok Kodja Bahari Galangan I	-	1.379.374.548	PT Dok Kodja Bahari Galangan I
PT Pancuracahaya W	948.860.114	1.343.038.154	PT Pancuracahaya W
PT Industri Kapal Indonesia	-	672.316.766	PT Industri Kapal Indonesia
PT Bahtera Biru	-	501.808.432	PT Bahtera Biru
PT Pahala Artha Lestari	605.825.485	-	PT Pahala Artha Lestari
PT Sumber Mas Intinusa	814.424.930	-	PT Sumber Mas Intinusa
Lainnya (dibawah Rp500.000.000)	<u>1.600.651.925</u>	<u>1.338.050.349</u>	Others (below Rp500,000,000)
	<b><u>11.871.913.312</u></b>	<b><u>28.149.895.128</u></b>	
<b>Perkapalan Lainnya</b>			<b>Other shipping</b>
PT Telkom Enterprise	3.490.660.928	-	PT Telkom Enterprise
Sucofindo Prima Internasional Konsultan	965.250.000	-	Sucofindo Prima Internasional Konsultan
Lainnya (dibawah Rp50.000.000)	<u>1.860.806.501</u>	<u>6.137.130.293</u>	Others (below Rp500,000,000)
	<b><u>6.316.717.429</u></b>	<b><u>6.137.130.293</u></b>	
<b>Usaha Penunjang Lainnya</b>			<b>Other Supporting Business</b>
PT Pelindo I, II, III dan IV	3.556.350.565	3.556.350.565	PT Pelindo I, II, III dan IV
	<b><u>3.556.350.565</u></b>	<b><u>3.556.350.565</u></b>	
<b>Docking</b>			<b>Docking</b>
PT. PAL Indonesia	2.366.256.068	-	PT. PAL Indonesia
PT. Janata Marina Indah	2.473.180.210	837.819.400	PT. Janata Marina Indah
Dock & Perkapalan Surabaya	849.259.474	-	Dock & Perkapalan Surabaya
PT. Industri Kapal Indonesia	2.641.700.345	2.629.258.996	PT. Industri Kapal Indonesia
Lainnya (dibawah Rp500.000.000)	<u>1.010.612.640</u>	<u>5.078.805.962</u>	Others (below Rp500,000,000)
	<b><u>9.341.008.737</u></b>	<b><u>8.545.884.358</u></b>	
<b>Barang &amp; Jasa Umum</b>			<b>General Goods &amp; Services</b>
PT. Jasaraharja Putera	1.833.776.000	-	PT. Jasaraharja Putera
Lainnya (dibawah Rp500.000.000)	<u>3.424.899.219</u>	<u>8.739.215.914</u>	Others (below Rp500,000,000)
	<b><u>5.258.675.219</u></b>	<b><u>8.739.215.914</u></b>	
<b>Keagenan</b>			<b>Agency</b>
Administrasi dan Umum	4.046.055.696	956.998.073	General and Administration
Lainnya (di bawah Rp 50.000.000)	<u>13.435.425.306</u>	<u>3.168.523.359</u>	Others (below Rp500,000,000)
	<b><u>17.732.181.818</u></b>	<b><u>15.683.604.230</u></b>	
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>104.133.698.677</u></b>	<b><u>133.725.507.143</u></b>	<b>Sub Total</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**18. UTANG USAHA (lanjutan)**

**18. ACCOUNTS PAYABLE (continued)**

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiary</b>
Sarana Bandar Nasional, PT	1.500.980.114	1.434.154.201	Sarana Bandar Nasional, PT
Pelita Indonesia Djaya, PT	11.502.134.735	8.471.060.450	Pelita Indonesia Djaya, PT
Rumah Sakit PELNI, PT	40.249.424.976	28.379.576.014	Rumah Sakit PELNI, PT
	<b>53.252.539.825</b>	<b>38.284.790.665</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>157.386.238.502</b>	<b>172.010.297.808</b>	<b>Total</b>
b. Berdasarkan analisa umur utang	b. Based on the analysis of the age of the debt		
	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
1 sampai dengan 30 hari	59.858.314.576	67.401.229.516	1 to 30 days
31 sampai dengan 60 hari	19.378.508.580	19.728.640.204	31 to 60 days
61 sampai dengan 150 hari	9.720.891.744	4.186.137.639	61 to 150 days
Lebih dari 150 hari	68.428.523.602	80.694.290.449	More than 150 days
<b>Jumlah Utang Usaha</b>	<b>157.386.238.502</b>	<b>172.010.297.808</b>	<b>Total Account Payable</b>

**19. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

**19. ACCRUED EXPENSES**

Akun ini terdiri dari:	This account consists of:		
	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent entity</b>
Usaha Perkapalan	80.272.598.853	47.933.996.607	Shipping
Usaha Penunjang	3.852.500	536.218.802	Business Support
Usaha Wisma	-	31.142.214	Homestead
Usaha Galangan	-	968.581.313	Docking
Administrasi dan umum	86.406.211.011	43.478.000.269	General and administrative
Lainnya	19.996.000	75.071.700	Other
	<b>166.702.658.364</b>	<b>93.023.010.905</b>	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiary</b>
Sarana Bandar Nasional, PT	16.175.525.445	11.565.229.967	Sarana Bandar Nasional, PT
Pelita Indonesia Djaya, PT	28.741.130.961	8.296.722.410	Pelita Indonesia Djaya, PT
Rumah Sakit PELNI, PT	8.313.136.479	28.132.705.635	Rumah Sakit PELNI, PT
	<b>53.229.792.885</b>	<b>47.994.658.012</b>	
<b>Jumlah Biaya yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>219.932.451.249</b>	<b>141.017.668.917</b>	<b>Total Accrued Expenses</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG**

Akun ini terdiri dari:

**20. LONG TERM LOANS**

This account consists of:

Nama Kreditur/ Creditor	Tingkat Bunga / Interest Rate	Jatuh Tempo Tahun / Maturity Year	31 Des/Dec 2016		Bagian Jatuh Tempo dlm Setahun / Part Maturity of the Year	Bagian Jatuh Tempo lebih Setahun / Part Maturity more Year
			Saldo 31 Des 2016 / Balance Dec 31, 2016	31 Des/Dec 2016		
KFW - Spare parts						
KFW - Spare parts	1,25%	2017	-	3.480.658.330	-	
KFW - Spare parts	1,25%	2025	-	-	27.845.272.309	
KFW - KM Labobar						
KFW - KM Labobar	1,25%	2017	-	1.959.722.021	-	
KFW - KM Labobar	6,39%	2025	-	-	15.677.783.258	
PT Bank Syariah						
Mandiri (Persero) Tbk.	22,00%	2016	29.074.316.936	29.074.316.936	-	
PT Bank Syariah						
Mandiri (Persero) Tbk.	22,00%	2018	8.405.717.047		6.026.599.928	
PT Bank Syariah						
Mandiri (Persero) Tbk.	22,00%	2021	15.000.000.000		14.510.216.315	
PT Bank Syariah						
Mandiri (Persero) Tbk.	22,00%	2022	6.415.531.250		6.415.531.250	
PT Bank Negara						
Indonesia (Persero) Tbk.	14,00%	2018	11.794.444.444		8.594.444.444	
PT Bank Negara						
Indonesia (Persero) Tbk.			400.000.000	400.000.000	-	
Utang Sewa Guna Usaha / Leasing			6.667.689.000	5.170.955.000	-	
			<b>77.757.698.677</b>	<b>40.085.652.287</b>	<b>79.069.847.504</b>	
31 Des/Dec 2015						
Nama Kreditur/ Creditor	Tingkat Bunga / Interest Rate	Jatuh Tempo Tahun / Maturity Year	Saldo 31 Des 2016 / Balance Dec 31, 2016	31 Des/Dec 2015	Bagian Jatuh Tempo dlm Setahun / Part Maturity of the Year	Bagian Jatuh Tempo lebih Setahun / Part Maturity more Year
KFW - Spare parts						
Pinjaman lunak	1,25%	2040	219.347.045.361	-	219.347.045.361	
Pinjaman komersial	9,54%	2013	118.109.949.009	116.838.953.982	1.270.995.027	
KFW - KM Labobar						
Pinjaman lunak	1,25%	2042	112.567.495.664	-	112.567.495.664	
Pinjaman komersial	6,39%	2014	112.419.812.800	112.419.812.800	-	
PT Bank Rakyat						
Indonesia (Persero) Tbk.	5,00%	2016	22.378.605.930	3.522.234.136	18.856.371.794	
PT Bank Negara						
Indonesia (Persero) Tbk.	14,00%	2016 & 2019	13.679.004.982	2.851.111.116	10.827.893.866	
Utang Sewa Guna Usaha / Leasing			6.667.689.000		6.667.689.000	
			<b>605.169.602.746</b>	<b>235.632.112.034</b>	<b>369.537.490.712</b>	

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG** (lanjutan)

**KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia**

Pinjaman kepada Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW sebesar DM 44.000.000 sesuai dengan Loan Agreement 1999 66 383 tanggal 31 Juli 2000 yang diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Entitas) melalui surat Menteri Keuangan No. S-047/MK.17/2001 tanggal 15 Januari 2001 sebagai Project Executing Agency dan Sub Borrower dalam rangka pengadaan Spareparts untuk kapal penumpang yang dituangkan dalam Perjanjian SLA No.1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 antara Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan menunjuk PT Bank DKI Jakarta sebagai perantara dalam pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga, dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

- a. Bagian A sebesar DM 28,600,000 sebagai pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.
- b. Bagian B sebesar DM 15,400,000 sebagai pinjaman komersil dengan tingkat bunga sebesar 9,54% per tahun.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka menyelesaikan Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 33/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan cut-off date pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar DM 28,468,125 atau setara dengan Euro 14.555.521 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2040 dan DM 15.328.990 atau setara dengan Euro 7.837.588 untuk pinjaman komersil yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Pinjaman kepada Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW sebesar Euro 81,806,700 sesuai dengan Loan Agreement 2001 65 159 tanggal 1 Februari 2002 yang diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Entitas) melalui surat Menteri Keuangan No. S-115/MK.17/2002 tanggal 22 April 2002 sebesar Euro 16,361,340 dalam rangka pengadaan Kapal Penumpang Nomor 23 Pelni yang dituangkan dalam Perjanjian SLA No.1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 antara Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) sebagai perantara dalam pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga, dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

**20. LONG TERM LOANS** (continued)

**KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia**

Loans to the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) is the Government of Indonesia to the KFW loan amounting to DM 44 million according to the 1999 66 383 Loan Agreement dated July 31, 2000 which was forwarded to PT Indonesian National Shipping (Entity) through the Ministry of Finance letter No. S-047 / MK.17 / 2001 dated January 15, 2001 as Project Executing Agency and Sub-borrower in order to procure Spare parts for passenger ships as outlined in the Agreement SLA No.1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 between the Government of Indonesia with PT National Shipping Indonesia (Persero) and PT Bank DKI Jakarta appoint as an intermediary in the payment of principal and interest costs, with details of the loan as follows:

- a. Part A of DM 28,600,000 as soft loans with an interest rate of 1.25% per year.
- b. Part B of DM 15,400,000 as a commercial loan with an interest rate of 9.54% per year.

Based on the Minutes of Reconciliation in the Context menyelesaian sourced from the State Receivables Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Indonesian National Shipping No. 33 / PB4.1 / PT Bank DKI / 2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut-off date of March 31, 2007 with total liabilities of the National Sailing PT Indonesia (Persero) amounting to DM 28,468,125 or equivalent to Euro 14,555,521 to soft loans ended June 30, 2040 and DM 15.32899 million, equivalent to Euro 7,837,588 for commercial loans ended June 30, 2014.

Loans to the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) is the Government of Indonesia to the KFW loan amounting to Euro 81,806,700 according to the 2001 65 159 Loan Agreement dated February 1, 2002 which was forwarded to PT Indonesian National Shipping (Entity) through the Ministry of Finance letter No. S-115 / MK.17 / 2002 April 22, 2002 amounted to Euro 16,361,340 in order to procure Passenger Vessel No. 23 Pelni as outlined in the Agreement SLA No.1151 / DP3 / 2002 dated May 30, 2002 between the Government of Indonesia with PT Indonesian National Shipping (Persero) and appointed PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) as an intermediary in the payment of principal and interest costs, with details of the loan as follows:

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG** (lanjutan)

**KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia**  
(lanjutan)

- a. Bagian A sebesar Euro 8,180,670 sebagai pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.
- b. Bagian B sebesar Euro 8,180,670 sebagai pinjaman komersil dengan tingkat bunga sebesar 6,39% per tahun.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 34/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan cut-off date pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Euro 7,469,800 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2042 dan Euro 7,460,000 untuk pinjaman komersil yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-608/MK.05/2015 Perihal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pelayaran Nasional Indonesia, telah disetujui restrukturisasi pinjaman PT Pelni yang bersumber dari perjanjian Penerusan Pinjaman/Subsidiary Loan Agreement (SLA) dengan cara penyelesaian kewajiban pokok pinjaman PT Pelni dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan kewajiban non pokok diangsur secara prorata selama sepuluh (10) tahun, masih tercatat dalam klasifikasi utang mengingat belum terbitnya peraturan pemerintah yang mengatur penyelesaian pokok pinjaman PT Pelni (Persero) menjadi PMN.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan perjanjian kredit antara Entitas Anak PT Sarana Bandar Nasional dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) masing-masing sebesar Rp1.824.000.000 dan Rp3.248.000.000 per 31 Desember 2015 dan 2014 yang merupakan utang atas pembelian 1 unit Reachsteacker tahun 2011 dengan kredit jangka panjang dan utang jangka panjang pembelian 150 (seratus lima puluh) teus kontainer yang dibeli melalui pinjaman BRI.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**

Pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. merupakan perjanjian kredit antara Entitas Anak PT Rumah Sakit PELNI dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dengan rincian sebagai berikut:

**20. LONG TERM LOANS** (continued)

**KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia**  
(continued)

- a. Part A of Euro 8,180,670 as a soft loan with an interest rate of 1.25% per year.
- b. Section B of Euro 8,180,670 as a commercial loan with an interest rate of 6.39% per year.

*Based on the Minutes of Settlement Reconciliation in the Context of State Receivables sourced from Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Indonesian National Shipping No. 34 / PB4.1 / PT Bank DKI / 2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut-off date of March 31, 2007 with total liabilities of the National Sailing PT Indonesia (Persero) amounting to Euro 7,469,800 for soft loans ended December 30, June 2042 and Euro 7,460,000 for commercial loans ended June 30, 2015.*

*Corresponding letter of the Minister of Finance No. S-608 / MK.05 / 2015 regarding the Settlement Agreement at the State Receivables PT Indonesian National Shipping, has approved the restructuring of the loan PT Pelni sourced from Subsidiary Loan Agreement / Subsidiary Loan Agreement (SLA) by way of settlement of the loan principal PT Pelni used as the State Capital (PMN) and liabilities of non principal amortized on a prorated basis over the past ten (10) years, is still listed in the classification of debt considering the issuance of government regulations governing the settlement of the principal PT Pelni (Persero) into PMN.*

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

*Loans to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. a credit agreement between the Subsidiary PT Sarana Bandar National with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI), each for Rp1.824.000.000 and Rp3.248.000.000 per December 31, 2015 and 2014 which is owed on the purchase of one unit Reachsteacker in 2011 with long-term loans and long-term debt purchase of 150 (one hundred fifty) teus containers were purchased through a loan BRI.*

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**

*Loans to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. a credit agreement between the Subsidiary PT Pelni Hospital with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The details are as follows:*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.** (lanjutan)

a. Perjanjian Kredit Nomor: 2014/MRC/173

Perjanjian dibuat tanggal 14 November 2014. Jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp8.700.000.000 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 14 November 2014 sampai dengan 13 November 2019.

Fasilitas kredit berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembelian alat kesehatan berupa 1 (satu) unit brivo MR355 Inspire 1,5T dengan rincian sebagai berikut:

Taksasi	Rp 12.439.680.000	(100,00%)
Self Financing	Rp 3.739.680.000	(30,00%)
Pembayaran	Rp (3.739.680.000)	(70,00%)

b. Perjanjian Kredit Nomor: 2014/MRC/063

Perjanjian dibuat tanggal 26 Mei 2014. Jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp5.700.000.000 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 26 Mei 2014 sampai dengan 25 Mei 2019.

Fasilitas kredit berupa kredit investasi dengan tujuan pembelian berbagai macam alat kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Taksasi	Rp8.143.905.000	(100,00%)
Self Financing	Rp2.443.905.000	(30,00%)
Pembayaran	Rp5.700.000.000	(70,00%)

c. Perjanjian Kredit Nomor: 2014/MRC/0184

Perjanjian dibuat tanggal 3 Desember 2012 yang mengalami perubahan pertama berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (I) 2012/MRC/184 tanggal 27 Juni 2014 dan perubahan kedua berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (II) 2012/MRC/184 tanggal 23 Agustus 2014. Jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp1.722.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan 22 Agustus 2016. Perjanjian ini mengalami perubahan lagi pada jumlah kredit yang diberikan yang semula sebesar Rp1.722.000.000 menjadi Rp1.370.000.000 tetapi belum dilengkapi dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit yang sah.

**20. LONG TERM LOANS (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.** (continued)

a. Credit Contract Nomor: 2014/MRC/173

This contract created on November 14, 2014. The number of loans approved for Rp8.700.000.000 with a period of 60 (sixty) months, starting from November 14, 2014 until November 13, 2019.

Credit facility in the form of investment credit for the purpose of the purchase of medical equipment in the form of 1 (one) unit BRIVO MR355 Inspire 1,5T with details as follows:

Assessed	Rp 12.439.680.000	(100,00%)
Self Financing	Rp 3.739.680.000	(30,00%)
Financing	Rp (3.739.680.000)	(70,00%)

b. Credit Contract Nomor: 2014/MRC/063

This contract created on May 26, 2014. The number of loans approved for Rp5.700.000.000 with a period of 60 (sixty) months, starting from May 26, 2014 until May 25, 2019.

Credit facility in the form of investment credit for the purpose of the purchase of medical equipment with details as follows:

Assessed	Rp 8.143.905.000	(100,00%)
Self Financing	Rp 2.443.905.000	(30,00%)
Financing	Rp 5.700.000.000	(70,00%)

c. Credit Contract Nomor: 2014/MRC/0184

This contract created on December 3, 2012 which amended the first Agreement on Amendment of Credit Contract No. (I) 2012 / MRC / 184 dated June 27, 2014 and the second amendment to the Agreement on Amendment of Credit Contract Number: (II) 2012 / MRC / 184 dated August 23, 2014. the number of loans approved for Rp1.722.000.000 with a period of 36 months from the date of August 23, 2014 until August 22, 2016. this contract changes again on the amount of loans originally amounted Rp1.722.000.000 become Rp1.370.000.000 but has not been equipped with the Credit Contract Amendment Approval valid.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**20. PINJAMAN JANGKA PANJANG** (lanjutan)

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.** (lanjutan)

c. Perjanjian Kredit Nomor: 2014/MRC/0184 (lanjutan)

**20. LONG TERM LOANS (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.** (continued)

c. Credit Contract Nomor: 2014/MRC/0184 (continued)

31 Des/Dec 2016						
Nama Kreditur/ Creditor	Tingkat Bunga / Interest Rate	Jatuh Tempo Tahun / Maturity Year	Saldo 31 Des 2016 / Balance Dec 31, 2016	Bagian Jatuh Tempo dalam Setahun / Part Maturity of the Year	Bagian Jatuh Tempo lebih Setahun / Part Maturity more Year	
A 2014/MRC/173	1,25%	2040	219.347.045.361		219.347.045.361	
B 2014/MRC/173	1,25%	2040	219.347.045.361		219.347.045.361	
C 2014/MRC/173	1,25%	2040	219.347.045.361		219.347.045.361	
			<b>658.041.136.083</b>		<b>658.041.136.083</b>	

Seluruh fasilitas pinjaman kredit diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dijamin dengan:

- 1) Peralatan kesehatan berupa:
  - a) 1 (satu) unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & OEC Brivo 785 Essential C-Arm senilai Rp8.143.905.000.
  - b) 1 (satu) unit Brivo MR355 Inspire 1,5 T senilai Rp12.439.680.000.
- 2) Persediaan berbagai macam obat-obatan senilai Rp5.597.000.000.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**

a. Perjanjian No.: 17/1267/SP4/180

Perjanjian dibuat tanggal 27 Agustus 2015, dengan jumlah pokok terutang sebesar Rp8.584.468.750 dan margin yang ditetapkan Rp3.022.734.968. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama 39 bulan, terhitung sejak tanggal pencairan Pembiayaan.

b. Perjanjian No.: 17/1425/SP4/180

Perjanjian dibuat tanggal 28 Agustus 2015, dengan jumlah pokok terutang sebesar Rp5.000.000.000 dan margin yang ditetapkan Rp3.657.165.342. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama 72 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan akad pembiayaan.

c. Perjanjian No.: 17/0986-3/180

Perjanjian dibuat tanggal 11 Agustus 2015, dengan jumlah pokok terutang sebesar Rp7.500.000.000 dan margin yang ditetapkan Rp5.485.748.014. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama 72 bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pembiayaan.

The entire loan facility obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. secured by:

- 1) medical equipment:
  - a) 1 (satu) unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & OEC Brivo 785 Essential C-Arm a number of Rp8.143.905.000.
  - b) 1 (satu) unit Brivo MR355 Inspire 1,5 T a number of Rp12.439.680.000.
- 2) Supplies kinds of medicine a number of Rp5.597.000.000.

**Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT**

a. Contract No.: 17/1267/SP4/180

Agreement was made on August 27, 2015, with a principal amount outstanding of Rp8.584.468.750 and margins are set Rp3.022.734.968. Payments are made in installments over 39 months, commencing from the date of disbursement of Financing.

b. Contract No.: 17/1425/SP4/180

Agreement was made on August 28, 2015, with a principal amount outstanding of Rp5.000.000.000 and margins are set Rp3.657.165.342. Payments are made in installments over 72 months, commencing from the date of signing of the financing agreement.

c. Contract No.: 17/0986-3/180

Agreement was made on August 11, 2015, with a principal amount outstanding of Rp7.500.000.000 and margins are Rp5.485.748.014. Payments are made in installments over 72 months, commencing from the date of disbursement of financing.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**21. UTANG BUNGA**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
KFW - Spare parts	-	37.038.612.135	KFW - Spare parts
Keagenan - KM Labobar	-	20.853.928.018	Agency - KM Labobar
<b>Jumlah Utang Bunga</b>	<b>-</b>	<b>57.892.540.153</b>	<b>Total Interest Payable</b>

Utang bunga KFW Spare Parts dan KM Labobar merupakan biaya bunga atas pinjaman antara Pemerintah RI dengan Entitas dalam rangka penggunaan dana dari pinjaman Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) atas pengadaan spare parts sesuai dengan perjanjian SLA-1144/DP3/2001 dan pengadaan KM Labobar sesuai dengan perjanjian SLA-1151/DP3/2001. (Lihat catatan 20).

Berdasarkan perjanjian perubahan (amendemen) terhadap naskah perjanjian penerusan pinjaman No.SLA 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 dan No. SLA 1151/DP3/2002 antara Pemerintah RI dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor: AMA-488/SLA-1144/DSMI/2015 dan AMA-489/SLA-1144/DSMI/2015 tanggal 01 Desember 2015 dinyatakan bahwa pinjaman non pokok atas pinjaman SLA, wajib diangsur oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia dalam dua puluh (20) kali angsuran persetengah tahunan dengan rincian pembayaran:

- a. Pinjaman Non Pokok SLA No.1144/DP3/2001 dibayar setiap tanggal 30 Mei dan 30 Nopember
- b. Pinjaman Non Pokok SLA No.1151/DP3/2002 dibayar setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember

**21. INTEREST PAYABLE**

This account consists of:

Debt interest KFW Spare Parts and KM Labobar the interest costs on loans between the Government of Indonesia with the Entities in order to use the funds from the loan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) for the procurement of spare parts in accordance with the agreement SLA-1144 / DP3 / 2001 and procurement KM Labobar accordance with agreement SLA-1151 / DP3 / 2001. (See note 20).

Under the agreement changes (amendments) to the text of subsidiary loan agreement No.SLA 1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 and No. SLA 1151 / DP3 / 2002 between the Government of Indonesia and the Company (Persero) PT Indonesian National Shipping Number: AMA-488 / SLA-1144 / DSMI / 2015 and AMA-489 / SLA-1144 / DSMI / 2015 dated December 1, 2015 stated that non loan principal on the loan SLA, shall be repaid by PT Pelni within twenty (20) equal installments persetengah tahunan with details of payment:

- a. Loans Non Principal SLA No.1144 / DP3 / 2001 payable on May 30 and November 30.
- b. Loans Non Principal SLA No.1151 / DP3 / 2002 payable on June 30 and December 31

**22. UANG MUKA DITERIMA**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	<b>Parent entity</b>
<b>Entitas Induk</b>			
Tambang pasasi dan muatan	7.050.226.364	13.091.245.027	Ticket and Freight
Usaha Perkapalan	1.118.218.711	685.938.921	Shipping
Usaha Penunjang	4.488.577.503	6.921.542.106	Support Business
Usaha Sampingan	62.350.000	15.500.000	Sideline Business
Lainnya	989.107.391	1.650.142.032	Others
	<b>13.708.479.969</b>	<b>22.364.368.086</b>	

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**22. UANG MUKA DITERIMA** (lanjutan)

**22. ADVANCES RECEIVED** (continued)

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiary</b>
Sarana Bandar Nasional, PT	1.468.001.665	-	Sarana Bandar Nasional, PT
Pelita Indonesia Djaya, PT	375.477.131	1.215.958.448	Pelita Indonesia Djaya, PT
	<b>1.843.478.796</b>	<b>1.215.958.448</b>	
<b>Jumlah Uang Muka Diterima</b>	<b>15.551.958.765</b>	<b>23.580.326.534</b>	<b>Total Advance Received</b>

**23. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

**23. PREPAID INCOME**

Akun ini terdiri dari:

*This account consists of:*

**Entitas Induk**

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Tambang pasasi dan muatan	4.552.902.532	7.592.644.416	<i>Parent entity</i>
Sewa Dialokasikan	1.289.799.122	1.222.317.116	Passage and Cargo Mine
Lainnya	2.266.092.194	2.883.899.260	Rental Allocated
	8.108.793.848	11.698.860.792	Others

**Entitas Anak**

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Pelita Indonesia Djaya, PT	430.003.585	922.062.851	<i>Subsidiary</i>
Sarana Bandar Nasional, PT	5.035.713.064	7.330.123.350	Pelita Indonesia Djaya, PT
Rumah Sakit PELNI, PT	4.966.165.368	9.542.000.591	Sarana Bandar Nasional, PT
	<b>10.431.882.017</b>	<b>17.794.186.792</b>	Rumah Sakit PELNI, PT
<b>Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>18.540.675.865</b>	<b>29.493.047.584</b>	<b>Total Prepaid Income</b>

Pendapatan diterima dimuka kerja sama unit *hemodialisa* merupakan pinjam pakai peralatan hemodialis dan pengadaan *consubles hemodialysis* dengan masa kontrak 10 (sepuluh) tahun dimulai sejak mesin terakhir terpasang dan target tindakan telah tercapai yaitu 350.400 tindakan antara PT Fresenius Medical Care Indonesia dengan PT Rumah Sakit PELNI yang terletak di gedung poliklinik lantai V.

Pendapatan diterima di muka atas sewa merupakan pendapatan sewa ruangan diterima dimuka dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., perangkat Telkomsel, sewa ruangan di kapal, Food Court Rumah Sakit PELNI dan PT Sebastian Citra Indonesia. Pendapatan diterima di muka atas pasien merupakan uang muka dari pasien atas jasa rawat inap.

*Unearned income cooperation unit hemodialysis is leasing equipment hemodialis and procurement consubles hemodialysis with a contract period of 10 (ten) years starting from the last machine installed and action targets have been achieved, namely 350 400 actions between PT Fresenius Medical Care Indonesia premises PT PELNI Hospital located in the polyclinic building floor V.*

*Unearned income on rent a room rental income received in advance of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., The device Telkomsel, rent rooms in the ship, Food Court Hospital Sebastian PELNI and PT Citra Indonesia. Unearned revenues on patients represent advances of patients on the inpatient services.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**24. UTANG LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

**24. OTHER PAYABLES**

This account consists of:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
<b>Entitas Induk</b>			<b>Parent entity</b>
Utang KSO	42.535.017.328	65.161.755.998	KSO Debt
Jaminan diterima	14.547.989.218	13.946.773.546	Collateral Accepted
Asuransi	7.349.452.747	6.524.163.216	Insurance
Pas pelabuhan	6.089.518.044	3.746.253.158	Pass Port
Dana pensiun YKPP	7.662.781.423	3.013.928.694	YKPP Pension Fund
Jamsostek	864.607.560	679.739.281	Social Security
Pihak Ketiga	5.186.853.534	-	Third party
Lainnya	495.855.165	-	Others
	84.732.075.019	93.072.613.893	
<b>Entitas Anak</b>			<b>Subsidiary</b>
Pelita Indonesia Djaya, PT	163.024.570	7.395.247.578	Pelita Indonesia Djaya, PT
Sarana Bandar Nasional, PT	1.226.920.590	-	Sarana Bandar Nasional, PT
Rumah Sakit PELNI, PT	982.996.193	-	Rumah Sakit PELNI, PT
	<b>2.372.941.353</b>	<b>7.395.247.578</b>	
<b>Jumlah Utang Lain-lain</b>	<b>87.105.016.372</b>	<b>100.467.861.471</b>	<b>Total Other Payables</b>

Utang KSO merupakan utang kepada PT Citra Bayu Adhiguna atas kerjasama operasi dalam pengembangan kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Dobonsolo dan Ciremai, sesuai dengan surat perjanjian No.: TH.94/SS/VIII/2009 dan No.: TH.07.1-3/SS/2013 tanggal 20 Agustus 2009 dan 27 Maret 2013 tentang usaha optimisasi kapasitas ruang muat kapal penumpang (lihat catatan 17).

KSO debt is owed to PT Citra Bayu Adhiguna on co-operation in the development of ships PT Pelni Dobonsolo and Ciremai, according to the letter agreement No.: TH.94 / SS / VIII / 2009 and No.: TH.07.1-3 / SS / 2013 dated August 20, 2009 and March 27, 2013 on the optimization efforts load space capacity passenger ship (see note 17).

**25. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Akun ini terdiri dari:

**25. EMPLOYED BENEFITS LIABILITIES**

This account consists of:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Entitas Induk	71.947.877.294	28.073.631.066	<b>Parent entity</b>
Entitas Anak	4.421.465.952	4.957.296.201	<b>Subsidiary</b>
<b>Jumlah Liabilitas Imbalan Keja</b>	<b>76.369.343.246</b>	<b>33.030.927.267</b>	<b>Total Employed Benefit Liabilities</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Pada tanggal 20 Juni 2000, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep-150/Men/2000 mengenai Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesongan, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Entitas, yang mensyaratkan Entitas untuk membayar uang pesongan, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawannya jika terjadi pemutusan hubungan kerja apabila memenuhi kondisi sesuai dengan keputusan ini. Selanjutnya pada bulan April 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang No.13 tentang Ketenagakerjaan menggantikan No. Kep-150/Men/2000.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah masing - masing 3.472 dan 3.466 orang pada 31 Desember 2016 dan 2015.

Perhitungan imbalan kerja dihitung dengan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method* oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama pada tahun 2016 dan PT Sakura Aktualita Indonesia pada tahun 2015. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

**25. EMPLOYED BENEFITS LIABILITIES (continued)**

On June 20, 2000, the Minister of Manpower issued Decree No. Kep-150 / Men / 2000 regarding the Settlement of Work Dismissal and Determination of Severance Money, Money Gratuity and Compensation Payments Entities, which requires the entity to pay the severance, gratuity and compensation benefits to employees in the event of termination of employment if fulfill the conditions in accordance with this decision. Furthermore, in April 2003, the Government of the Republic of Indonesia issued Law No. 13 on Labour replace No. Kep-150 / Men / 2000.

The number of employees who are entitled to post-employment benefits are each - each 3,472 and 3,466 people on December 31, 2016 and 2015.

Calculation of employee benefits are calculated WITH Projected Unit Credit Actuarial Cost Method by the Independent Actuary PT Dian Artha Tama in 2016 and PT Sakura Aktualita Indonesia in year 2015. Key Assumptions Used hearts determine Actuarial Assessment is as follows:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Tingkat diskonto	8,10%	9,00%	<i>Discount Rate</i>
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	3%	5,00%	<i>The Projected rate of salary Increase</i>
Tingkat mortalita	Indonesia - III (2011)	Indonesia - III (2011)	<i>Mortality Rate</i>
Tingkat cacat tetap	0,02% per tahun	10% Mortalita	<i>Permanent disability rate</i>

Liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Rekonsiliasi perubahan liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah:

*Liabilities for employee benefits are as follows:*

*Reconciliation of changes in liabilities recognized in the statement of financial position are:*

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Cadangan (Biaya Dibayar Dimuka) awal periode	92.052.054.800	34.182.695.000	<i>Reserves (Prepaid Expenses) at beginning of period</i>
Pembayaran imbalan pada tahun berjalan	(6.272.816.000)	(1.973.061.922)	<i>Benefit payments in the current year</i>
Beban (pendapatan) imbalan pada Laba Rugi	(17.331.158.178)	(26.360.504.960)	<i>Benefit costs in the Profit and Loss Expenses on other Comprehensive Income</i>
Pendapatan (Beban) pada Penghasilan Komprehensif lain (Other Iuran Pemberi kerja	(5.291.981.814)	2.079.244.463	<i>Company's net contribution</i>
Cadangan (Biaya Dibayar Dimuka) akhir periode	(36.454.501.498)	(28.417.262.509)	<i>Reserves (Prepaid Expenses) at end of period</i>
Entitas Anak	71.947.877.294	28.073.631.066	<i>Subsidiary entity</i>
<b>Jumlah</b>	<b>76.369.343.246</b>	<b>33.030.927.267</b>	<b>Total</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Rincian beban yang diakui di laporan laba rugi komprehensif, adalah:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>	<b>31 Des/Dec 2015</b>	
Biaya jasa kini			Current service cost
Biaya jasa kini	5.907.862.228	28.524.372.598	Current service cost
Biaya Jasa lalu		-	Past service costs
Bunga atas Kewajiban (Aset)			Interest on Liabilities (Assets)
Biaya bunga	26.935.532.104	25.364.786.424	Interest Cost
Pendapatan Bunga atas Aset	(24.408.905.308)	(27.528.654.060)	Interest Income on Assets
Program Dampak Bisnis Lainnya	-	-	Other Business Impacts Programme
<b>Jumlah</b>	<b>8.434.489.024</b>	<b>26.360.504.962</b>	<b>Total</b>

**26. KEPENTINGAN NON PENGENDALI**

Akun ini terdiri dari:

**26. NON-CONTROLLING INTERESTS**

This account consists of:

	<b>31 Des/Dec 2016</b>				
<b>% Penyertaan / Participation</b>		<b>Bagian dari pemilik saham kepentingan non- pengendali (awal) / Part of the owners of shares of non-controlling interests (initial)</b>	<b>Dividen/ Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital</b>	<b>Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) Current Year</b>	<b>Bagian dari pemilik saham kepentingan non- pengendali akhir / Part of shareholders of non-controlling interests of the end</b>
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0,53% di SBN	80.000.000	749.707.754	217.544.639	1.047.252.393
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0,50% di PIDC	10.050.000	104.230.174	117.183.412	231.463.586
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0,04% di RS PELNI	23.792.000	1.485.723	13.102.779	38.380.502
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	2,00 % di PBN	5.000.000	55.169.511	19.440.556	79.610.067
Koperasi Sabanas/ Cooperative Sabanas	1,01 % di SBL	3.800.000	(1.160.965)	2.331.890	4.970.925
	<b>122.642.000</b>	<b>909.432.197</b>	<b>369.603.276</b>	<b>1.401.677.473</b>	

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**26. KEPENTINGAN NON PENGENDALI** (lanjutan)

**26. NON-CONTROLLING INTERESTS** (continued)

		<b>31 Des/Dec 2015</b>				
	<b>% Penyertaan / Participation</b>	<b>Bagian dari pemilik saham kepentingan non- pengendali (awal) / Part of the owners of shares of non-controlling interests (initial)</b>	<b>Dividen/ Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital</b>	<b>Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) Current Year</b>		<b>Bagian dari pemilik saham kepentingan non- pengendali akhir / Part of shareholders of non-controlling interests of the end</b>
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0,53% in SBN	80.000.000	561.828.890	188.178.067	830.006.957	
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0,50% in PIDC	10.050.000	36.173.348	68.056.825	114.280.173	
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	0,04% in RS PELNI	23.792.000	(8.207.403)	9.091.981	24.676.578	
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / Pensioners Health Foundation Pelni	2,00 % in PBN	5.000.000	31.631.789	23.550.222	60.182.011	
Koperasi Sabanas/ Cooperative Sabanas	1,01 % in SBL	3.800.000	-	(1.160.965)	2.639.035	
		<b>122.642.000</b>	<b>621.426.624</b>	<b>287.716.130</b>	<b>1.031.784.754</b>	

**27. MODAL SAHAM**

Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh masing-masing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

**27. CAPITAL STOCK**

*Authorized Capital, issued and fully paid respectively on December 31, 2016 and 2015 are as follows:*

<b>31 Des/Dec 2016 dan/and 2015</b>				
<b>Pemegang Saham/ Shareholders</b>	<b>Lembar Saham/ Shares</b>	<b>Nilai Nominal per Lembar Saham/ Nominal Value per Share</b>	<b>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</b>	<b>Jumlah nilai saham/ Total value of shares</b>
Pemegang Saham Modal Dasar/Authorized Capital Negara Republik Indonesia/ Republic Of Indonesia	7.065.092	1.000.000	100%	7.065.092.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>7.065.092</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>7.065.092.000.000</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**27. MODAL SAHAM** (lanjutan)

Penambahan modal saham yang disetor berasal dari APBN Tahun Anggaran 2015 yang penempatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 100% penyertaan Pemerintah sesuai dengan Akta Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H., SpN. No. 2 tanggal 11 September 2009 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-23622.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009.

Penambahan modal dasar tersebut bersumber dari Pengalihan Barang Milik Negara yang bersumber dari BPYBDS berdasarkan PP No. 63 Tahun 2012 serta kapitalisasi sebagian cadangan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sampai dengan tahun buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Soejatna Mulyana & Rekan sebagaimana suratnya No. 020/SMR/LAJ-PELNI/IV/2012 tanggal 16 April 2012.

**27. CAPITAL STOCK** (continued)

*Additional capital paid-up shares from the state budget for Fiscal Year 2015 are positioned based on Government Regulation No. 111 Year 2015 regarding the Increase Investment of the Republic of Indonesia in Capital Shares Owned Company PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).*

*Share capital paid to the entity is a 100% government participation in accordance with the Notarial Deed Raden Mas Soediarto Soenarto, SH, SpN. No. 2 dated 11 September 2009 which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-23622.AH.01.02 Year 2009 dated May 28, 2009.*

*The addition of authorized capital was sourced from Transfer of State Assets sourced from BPYBDS under PP 63 In 2012 and part of capitalized reserves PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) until the year 2011 audited by KAP Soejatna Mulyana & Partners as its letter No. 020 / SMR / LAJ-PELNI / IV / 2012 dated April 16, 2012.*

**28. CADANGAN UMUM**

Merupakan cadangan yang dibentuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dari laba setelah pajak yang belum ditentukan peruntukannya sebesar Rp164.190.404.981 dan Rp66.533.679.319 pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

**28. GENERAL RESERVES**

*A reserve established by the General Meeting of Shareholders of the profit after tax has not been determined allotment of Rp164.190.404.981 and Rp66.533.679.319 on December 31, 2016 and 2015.*

**29. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH**

**29. GOVERNMENT CAPITAL**

<b>Penyertaan Modal Pemerintah / Goverment Capital</b>	<b>(Pengalihan) / (Redirect)</b>	<b>Jumlah / Total</b>
PP. RI No. 40 Tahun 1992/ PP. No. 40 of 1992	309.143.585.642	309.000.000.000
PP. RI No. 44 Tahun 2000	2.959.162.763.359	2.959.162.763.359
PP. RI No. 12 Thun 2002	249.053.611.158	249.053.611.158
PP. RI No. 63 Tahun 2012	2.997.874.185.089	2.997.874.185.089
PP. RI No. 111 Thun 2015	500.000.000.000	500.000.000.000
PP. RI No. 87 Tahun 2016	564.807.589.000	564.807.589.000
<b>Jumlah / Total</b>	<b>7.580.041.734.248</b>	<b>7.015.090.559.606</b>
		<b>564.951.174.642</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**29. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH (lanjutan)**

Pada tahun 2016 terdapat penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Non Tunai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan nilai sebesar Rp564.807.589.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 melalui konversi Utang Soft Loan Agreement (SLA) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia kepada Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 dan Nomor 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002.

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor: S-27/MBU/01/2016 Tanggal 11 Januari 2016 Perihal Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 500.000 (lima ratus ribu) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000,- sehingga seluruhnya seharga Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dan menyetujui penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2015.

**29. GOVERNMENT CAPITAL (continued)**

*In 2016 there is the addition of the Government of Non-Cash by the Indonesian Government Regulation No. 87 Year 2016 About the Addition of Investment of the Republic of Indonesia in Capital Shares Owned Company (Persero) PT Indonesian National Shipping with a value of Rp564.807.589.000, sourced from budget of the State 2016 through the conversion of debt Soft Loan Agreement (SLA) Limited Liability Company (Persero) PT Indonesian National Shipping to the Republic of Indonesia under the Agreement Subsidiary Loan No. 1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 and No. 1151 / DP3 / 2002 dated May 30, 2002.*

*Based on the letter of the Minister for State Owned Enterprises As a general meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Indonesian National Shipping Number: S-27 / MBU / 01/2016 Date January 11, 2016 regarding Capital Increase Paid and amendments of PT Indonesian National Shipping (Persero), approved the expenditure / placement of shares in deposits (portfolio) number of 500.000 (five hundred thousand) shares, each with a nominal value of 1.000.000 so entirely for Rp500.000.000.000 (five hundred billion rupiah) which is entirely subscribed by the Republic of Indonesia and agreed to increase the capital of the Republic of Indonesia to the National Sailing capital of PT Indonesia (Persero) amounting Rp500.000.000.000.(five hundred billion rupiahs) derived from income and Expenditure Budget for Fiscal Year as stipulated in Government Regulation 111 in 2015.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**30. PENDAPATAN USAHA**

Pendapatan usaha merupakan penjualan jasa pelayaran dan lainnya yang terdiri dari:

**30. OPERATING REVENUES**

*Operating revenues represent sales and other shipping services consisting of:*

	<b>2 0 1 6</b>	<b>2 0 1 5</b>	
Pendapatan usaha bruto			Gross operating revenue
Penugasan Pemerintah	2.065.598.008.644	1.787.716.198.653	Government assignments
Tambang Pasasi	978.980.194.949	1.224.757.371.663	Ticketing
Layanan Kesehatan	402.762.710.564	316.370.338.150	Health services
Tambang Muatan	320.080.732.985	341.032.107.639	Freight
Pendapatan Kapal Perintis	203.589.671.456	-	Pioneer Ship
Bongkar muat	164.119.859.291	155.392.434.045	Loading and Unloading
Ekspedisi Muatan Kapal Laut	39.572.801.119	12.390.069.837	Sea Cargo Ship
Tambang Muatan Tol Laut	22.086.220.196	-	Charges of Toll Northwest
Repair Docking	16.867.263.237	29.985.488.183	Repair Docking
Sewa Ruangan Kapal	10.860.137.569	8.639.349.587	Rent Space ships
Sewa Ruangan Wisma	7.710.151.052	11.485.144.146	Rent homestead
Tambang Pasasi Perintis	4.846.708.100	-	Ticketting of Pioneer
Keagenan dan Angkutan Bandar	4.411.151.539	6.007.454.745	Agency
Pendapatan Kapal Ternak	3.726.601.000	-	Cattle Hhip
Tambang Muatan Perintis	1.450.412.072	-	Pioneer Freight
Rede Transport	1.133.749.850	884.821.200	Rede Transport
Pendapatan Sewa Gedung	-	9.699.128.983	Building Rental Income
Lainnya	7.466.897.415	3.105.724.512	Others
	<b>4.255.263.271.038</b>	<b>3.907.465.631.343</b>	
PPh Pasal 15	<u>(42.863.499.798)</u>	<u>(38.572.815.019)</u>	Income Tax Article 15
	<b>4.212.399.771.240</b>	<b>3.868.892.816.324</b>	
Reduksi			Reduction
Tambang pasasi	(10.551.251.000)	(14.960.049.350)	Ticketing
Sewa ruangan wisma	<u>(96.980.000)</u>	<u>(304.826.533)</u>	Rent Homestead
	<b>(10.648.231.000)</b>	<b>(15.264.875.883)</b>	
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>	<b>4.201.751.540.240</b>	<b>3.853.627.940.441</b>	<b>Total Operating Revenue</b>

Pemerintah menugaskan PT Pelayaran Nasional (Persero) sebagai badan penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation - PSO) angkutan barang di laut. Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No.106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, tanggal 1 Oktober 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM.

The Government commissioned PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) as the organizing body of Public Service Obligations (Public Service Obligation - PSO) sea freight. The assignment in Presidential Decree 106 in 2015 on the Implementation of Public Service Obligations For Transport of Goods at Sea, dated October 1, 2015 and promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia on October 2, 2015 by the Minister of Law and Human Rights.

Pada tahun 2016, PT Pelayaran Nasional Indonesia ditugaskan sebagai operator Tol Laut dan angkutan ternak yang melayani angkutan barang pada 6 (enam) trayek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui SK Dirjen Hubla No. AL.108/7/8/DJPL-15 dan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui PM No. 10 tahun 2016.

In 2016, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) assigned as a toll operator Sea and livestock transport that serves the transportation of goods in 6 (six) route that has been set by the Ministry of Transportation by SK Director General of Sea No. AL.108 / 7/8 / DJLT-15 and at the rates set by the Ministry of Transportation through PM No. 10 in 2016.

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**30. PENDAPATAN USAHA** (lanjutan)

Penghasilan dana Public Service Obligation (PSO) merupakan dana kompensasi yang diperoleh Entitas dari Pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangkamelaksanakan liabilitas pelayanan angkutan laut penumpang kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 16 tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Dalam Negeri dan tertuang dalam Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016 No: HK.107/04/12/DJPL-15 dan No: TH.12.31-02/SS/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta pada tahun 2015 No.: HK.107/1/16/DJPL-15 dan No.: 2.18-01/ss/2015 tanggal 18 Februari 2015.

Penghasilan Penugasan Pemerintah juga diperoleh dari Pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kewajiban publik untuk angkutan barang dilaut dalam rangka pelaksanaan tol laut, angkutan perintis, dan angkutan ternak tahun anggaran 2016, sesuai dengan jaringan trayek tetap dan teratur (liner) angkutan barang tahun 2016.

Jumlah nilai perjanjian penyelenggaraan liabilitas pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi tahun anggaran 2016 dan 2015 berdasarkan pasal 7 adalah sebesar Rp1.786.993.530.000 dan Rp1.607.195.150.000 yang bersumber dari dana APBN sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN) Nomor DIPA-999.07.1.985120/2016 tanggal 17 Desember 2015 dan Daftar Isian Pelaksanaan Pusat (BAPUN-BPP) No. 999.07.1.985120/2015 tanggal 5 Januari 2015.

Pada tahun 2016 Entitas juga membukukan pendapatan Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp78.715.467.539 yang merupakan kekurangan dari pendapatan PSO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Dana Penyelenggaraan KPP PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Februari 2017. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah kekurangan sebesar Rp78.715.467.539 telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2013 tahun 2013 tersebut dan dapat dicairkan.

**30. OPERATING REVENUES** (continued)

*Income funds Public Service Obligation (PSO) is a compensation fund derived entity of the Government through the Directorate General of Sea Transportation in rangkamelaksanakan liabilities service ocean freight economy class passengers to the entire country at the rates set by the Government of Indonesia in accordance with the Regulation of the Minister of Transportation No. , 16 of 2014 on Tariff Passenger Transport Sea Upper Limit of Domestic Economy Class and set out in the Agreement Implementation of Public Service Obligations Marine Transport Sector For Economy Class passengers Fiscal Year 2016 No: HK.107 / 04/12 / DGLT-15 and No: TH. 12.31-02 / SS / 2015 dated December 31, 2015 and 2015 No.: HK.107 / 1/16 / DGLT-15 and No.: 2.18-01 / ss / 2015 dated February 18, 2015.*

*Income from Assignment government also obtained from the Government through the Directorate General of Sea Transportation in order to carry out the delivery of public obligations for the transport of goods at sea in the implementation of the toll the sea, pioneer transport, and transport livestock fiscal year 2016, according to the route network and regularly (liner) transport goods in 2016.*

*Total value of the agreement the implementation of public service obligations sea transport field for economy class passengers fiscal years 2015 and 2015 pursuant to Article 7 amounted Rp1.786.993.530.000 and Rp1.607.195.150.000 sourced from the state budget funds in accordance with the Budget Implementation List State General Treasurer (DIPA-BUN) Number SP-DIPA 999.07.1.985120 / 2015 dated January 5, 2015 and Implementation List Center (baboon-BPP) No. 999.07.1.985120/2015 dated January 5, 2015.*

*In 2016 Entity also posted revenue of Public Service Obligation (PSO) of Rp78.715.467.539 which is a shortage of revenue PSO Calculation based Dossier of Examination Implementation Fund National Shipping LTO PT Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2016 dated February 27, 2017. Management believes that the amount of the shortfall amounted Rp78.715.467.539 has met the requirements of Regulation of the Minister of Finance No. 173 / PMK.02 / 2013 in 2013 and can be availed.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**31. BEBAN USAHA**

Akun ini terdiri dari:

**31. OPERATING EXPENSES**

This account consist of:

	<b>2 0 1 6</b>	<b>2 0 1 5</b>	
Beban Bunker dan Pelumas	1.421.874.304.599	1.508.299.419.372	<i>Bunker load and Lubricants</i>
Beban Gaji, Premi dan Tunjangan ABK	498.648.039.169	362.107.741.812	<i>Salaries, Premiums and Allowances Crew</i>
Beban Pemeliharaan dan Perlengkapan Kapal	435.306.292.906	490.059.068.939	<i>Maintenance and Supplies Ships</i>
Beban Penyusutan	231.487.565.599	232.700.957.881	<i>Depreciation and impairment</i>
Beban Pelayanan Kesehatan	268.605.040.488	211.017.020.810	<i>Health services</i>
Beban Perbekalan Penumpang	131.139.795.430	136.454.263.995	<i>Supplies Passengers</i>
Beban Muatan	264.494.472.733	63.761.002.865	<i>Cargo</i>
Beban Kepelabuhanan	67.811.345.458	55.367.877.551	<i>Ports</i>
Beban Pelayanan Penumpang	47.939.375.928	33.079.081.196	<i>Passangers services</i>
Beban Galangan Kapal	13.998.889.169	31.649.252.384	<i>Shipyard</i>
Beban Asuransi Kapal	55.571.474.805	45.259.534.376	<i>Ships Insurance</i>
Beban Komisi Penjualan	9.206.210.884	10.839.059.162	<i>Commission sales</i>
Beban Pelayanan Wisma	6.844.204.421	8.492.863.898	<i>Service of Homestead</i>
Beban Kapal Ternak	911.277.062	-	<i>Cattle Ship</i>
Beban Kepelabuhanan Perintis	335.871.486	-	<i>Ports of Pioneer</i>
Beban Keagenan	73.972.204	10.535.392.070	<i>Agency</i>
Beban Kepelabuhanan Tol Laut	65.431.095	-	<i>Ports of Toll Northwest</i>
Beban Kepelabuhanan Kapal Ternak	10.324.822	-	<i>Ports of Cattle Ship</i>
Lainnya	1.250.000	93.785.018.754	<i>Others</i>
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>3.454.325.138.259</b>	<b>3.293.407.555.065</b>	<b>Total Operating Expenses</b>

**32. PENDAPATAN BUNGA**

Pendapatan bunga Entitas merupakan pendapatan bunga deposito bank dan jasa giro yang terdiri dari:

**32. INTEREST INCOME**

Entities interest income is interest income on bank deposits and current accounts consist of:

	<b>2 0 1 6</b>	<b>2 0 1 5</b>	
Entitas Induk	32.040.360.368	7.047.337.799	<i>Parent entity</i>
Entitas Anak	4.127.828.085	1.353.683.872	<i>Subsidiary</i>
<b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>	<b>36.168.188.453</b>	<b>8.401.021.671</b>	<b>Total Interest Income</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**33. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2 0 1 6</b>	<b>2 0 1 5</b>	
<b>Pendapatan di luar usaha</b>			<b>Non-operating Revenues</b>
Laba selisih kurs	3.771.077.346	139.444.617.608	<i>Gain on foreign exchange</i>
Pendapatan Sewa Gedung	18.583.305.085	-	<i>Building Rental Income</i>
Jasa administrasi	7.790.672.957	10.942.948.503	<i>Administrative services</i>
Keuntungan penjualan aset tetap	2.336.589.063	1.249.308.203	<i>Gain from sales of fixed assets</i>
Denda	618.230.976	152.464.760	<i>Forfeit</i>
Lainnya	18.211.347.361	25.682.992.131	<i>Others</i>
	<b>51.311.222.788</b>	<b>177.472.331.205</b>	
<b>Beban diluar usaha</b>			<b>Expenses outside the business</b>
Rugi selisih kurs	4.008.127.932	133.551.519.167	<i>Loss on foreign exchange</i>
Rugi Penjualan/Penghentian Aset	673.192.682	-	<i>Loss on Sale of Termination</i>
Rugi luar biasa	17.337.956.454	12.776.339.053	<i>Extraordinary loss</i>
Lainnya	-	126.202.050	<i>Others</i>
	<b>22.019.277.068</b>	<b>146.454.060.270</b>	
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih</b>	<b>29.291.945.720</b>	<b>31.018.270.935</b>	<b>Total Income (Expenses) Other - Net</b>

Keuntungan penjualan aset tetap di tahun 2016 dan 2015 merupakan keuntungan pada penjualan kendaraan dinas yang telah habis masa ekonomisnya, sesuai dengan SK Direksi No. 05.11/I/SK/HKO.01/2015 tanggal 11 Mei 2015.

**33. INCOME (EXPENSES) OTHER - NET**

This account consist of:

*Gain from sales of fixed assets in 2016 and 2015 is a gain on the sale of official vehicles that had run its economic future, according to the Decree of Directors No. 5:11 / I / SK / HKO.01 / 2015 dated May 11, 2015.*

**34. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2 0 1 6</b>	<b>2 0 1 5</b>	
Beban Gaji Pegawai	297.650.257.190	280.659.726.623	<i>Salaries of employees</i>
Beban Penyisihan Piutang	38.627.968.381	32.269.009.017	<i>Expense allowance</i>
Beban Perjalanan Dinas	24.981.141.856	16.784.145.336	<i>Official Travel Expenses</i>
Beban Pemeliharaan	24.199.076.155	35.646.790.385	<i>Maintenance Expenses</i>
Beban Administrasi Kantor	20.845.678.704	11.320.807.076	<i>Office Administrative Expenses</i>
Beban Pendidikan dan Pelatihan	15.226.759.312	11.657.093.039	<i>Trainning and Education Expenses</i>
Beban Air dan listrik	13.586.834.171	9.798.465.740	<i>Electricity Expenses</i>
Beban Penyusutan	13.112.682.600	14.012.335.061	<i>Depreciation Expenses</i>
Beban Profesional dan Manajemen	10.303.228.564	8.401.215.932	<i>Professional and Management Expenses</i>
Beban (Manfaat) Imbalan Pasca Kerja	8.896.669.154	-	<i>Employee Benefit</i>
Beban Pajak dan Retribusi	4.580.422.634	5.189.632.162	<i>Taxes and Levies</i>
Beban Komunikasi	3.456.909.932	2.742.713.773	<i>Communication Expenses</i>
Beban Jamuan dan Sumbangan	2.545.292.637	1.814.484.295	<i>Expenses banquet and donations</i>
Beban Penelitian dan Pengembangan	2.392.873.630	5.890.079.034	<i>Research and development expenses</i>
Beban Asuransi	466.460.610	287.032.720	<i>Insurance Expenses</i>
Beban Lainnya	26.274.095.123	9.591.993.573	<i>Others</i>
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>	<b>507.146.350.654</b>	<b>446.065.523.766</b>	<b>Total General and Administrative Expenses</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**35. BEBAN PEMASARAN**

Beban Pemasaran sebesar Rp5.969.675.894 dan Rp6.567.097.008 pada tahun 2016 dan 2015.

**35. MARKETING EXPENSES**

Marketing Expenses amounted Rp5.969.675.894 and Rp6.567.097.008 in 2016 and 2015.

**36. BEBAN BUNGA PINJAMAN**

Beban bunga pinjaman merupakan beban bunga atas pinjaman bank sebesar Rp25.338.234.081 dan Rp27.309.581.980 pada tahun 2016 dan 2015.

**36. INTEREST EXPENSES**

Loan interest expense represents interest expense on bank loans of Rp25.338.234.081 and Rp27.309.581.980 in 2016 and 2015.

**37. INFORMASI SEGMENT USAHA**

a. Pendapatan usaha bersih menurut wilayah

	<b>2016</b>		<b>2015</b>		<b>Total</b>
	<b>Rp</b>	<b>%</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>	
Sumatera	75.516.393.681	1,79%	94.292.758.438	2,45%	Sumatera
Jawa	3.190.626.870.545	75,74%	2.706.102.712.373	70,22%	Jawa
Kalimantan	113.967.418.822	2,71%	169.321.895.281	4,39%	Kalimantan
Bali dan Nusra	114.697.529.843	2,72%	113.621.612.690	2,95%	Bali dan Nusra
Sulawesi, Maluku dan Papua	717.591.558.349	17,04%	770.288.961.659	19,99%	Sulawesi, Maluku dan Papua
<b>Jumlah</b>	<b>4.212.399.771.240</b>	<b>100%</b>	<b>3.853.627.940.441</b>	<b>100.00%</b>	

b. Hasil usaha laba (rugi)-kotor menurut wilayah

**37. SEGMENT INFORMATION**

a. Net operating income by region.

	<b>2016</b>		<b>2015</b>		<b>Total</b>
	<b>Rp</b>	<b>%</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>	
Sumatera	53.331.448.023	7,14%	83.265.265.267	15,12%	Sumatera
Jawa	245.154.265.304	32,80%	(72.351.644.615)	-13%	Jawa
Kalimantan	97.714.123.348	13,07%	148.007.827.950	4,39%	Kalimantan
Bali dan Nusra	79.294.072.464	10,61%	107.487.371.230	2,95%	Bali dan Nusra
Sulawesi, Maluku dan Papua	271.932.492.842	36,38%	284.315.612.320	19,99%	Sulawesi, Maluku dan Papua
<b>Jumlah</b>	<b>747.426.401.981</b>	<b>100%</b>	<b>550.724.432.152</b>	<b>100.00%</b>	

c. Aset menurut wilayah

b. Results of operations income (loss) dirty by region

	<b>2016</b>		<b>2015</b>		<b>Total</b>
	<b>Rp</b>	<b>%</b>	<b>Rp</b>	<b>%</b>	
Sumatera	53.237.414.745	0,86%	11.897.056.662	0,20%	Sumatera
Jawa	5.703.715.239.719	91,83%	5.737.894.998.473	70,22%	Jawa
Kalimantan	105.748.553.185	1,59%	22.554.477.301	4,39%	Kalimantan
Bali dan Nusra	80.603.081.346	1,26%	14.468.123.082	2,95%	Bali dan Nusra
Sulawesi, Maluku dan Papua	268.757.496.174	4,50%	105.743.321.036	19,99%	Sulawesi, Maluku dan Papua
Singapore	(970.836.264)	0,01%	337.696.511	19,99%	Singapore
<b>Jumlah</b>	<b>6.211.090.948.905</b>	<b>100%</b>	<b>5.892.895.673.065</b>	<b>100.00%</b>	

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**37. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)**

d. Aset Tetap menurut wilayah

	2016		2015		<i>Total</i>
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	2.703.439.494	0,08%	6.432.907.571	0,18%	Sumatera
Jawa	3.372.706.350.937	97,30%	3.518.078.603.121	70,22%	Jawa
Kalimantan	17.892.052.618	0,51%	17.829.567.227	4,39%	Kalimantan
Bali dan Nustra	6.767.545.680	0,19%	9.595.944.325	2,95%	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	66.970.174.132	2%	78.309.030.019	19,99%	Sulawesi, Maluku dan Papua
Singapore	9.812.256	0%	47.155.027	19,99%	Singapore
<b>Jumlah</b>	<b>3.467.049.375.117</b>	<b>100%</b>	<b>3.630.293.207.290</b>	<b>100.00%</b>	

e. Biaya penyusutan menurut wilayah

	2016		2015		<i>Total</i>
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	329.519.314	0,13%	481.214.729	0,20%	Sumatera
Jawa	240.463.516.572	98,31%	241.569.586.121	70,22%	Jawa
Kalimantan	835.219.752	0,34%	931.365.795	4,39%	Kalimantan
Bali dan Nustra	521.176.556	0,21%	750.030.467	2,95%	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	2.444.317.356	1,00%	2.973.898.785	19,99%	Sulawesi, Maluku dan Papua
Singapore	6.498.651	0,00%	7.197.045	19,99%	Singapore
<b>Jumlah</b>	<b>244.600.248.201</b>	<b>100%</b>	<b>246.713.292.942</b>	<b>100.00%</b>	

f. Liabilitas menurut wilayah

	2016		2015		<i>Total</i>
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	6.029.073.406	0,88%	5.953.625.107	0,49%	Sumatera
Jawa	716.349.052.038	96,14%	962.716.852.023	70,22%	Jawa
Kalimantan	3.386.494.502	0,49%	6.221.920.816	4,39%	Kalimantan
Bali dan Nustra	3.639.241.176	0,49%	197.840.711.028	2,95%	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	16.345.044.818	2,01%	32.485.156.634	19,99%	Sulawesi, Maluku dan Papua
Singapore	16.438.772	0,00%	23.338.206	19,99%	Singapore
<b>Jumlah</b>	<b>745.765.344.712</b>	<b>100%</b>	<b>1.205.241.603.814</b>	<b>100.00%</b>	

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**38. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA ATAS REKLASIFIKASI AKUN**

Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 dan 2014 di reklassifikasi menyesuaikan penyajian laporan keuangan konsolidasian tahun 2016.

Perbandingan laporan keuangan yang disajikan kembali karena reklassifikasi akun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan laporan keuangan yang dilaporkan sebelumnya, adalah sebagai berikut:

	Dilaporkan Sebelumnya / Previously Reported	Penyesuaian /Reclassification	Disajikan kembali / Restated	
Kas setara Kas	838.983.376.312	(106.565.100.006)	732.418.276.306	Cash and Cash Equivalent
Kas setara Kas yang Dibatasi	-	101.672.900.006	101.672.900.006	Restricted Cash and Cash Equivalent
Penempatan Jangka Pendek	132.800.000	4.867.200.000	5.000.000.000	Short term placement
Beban Administrasi umum	513.116.026.548	(5.969.675.894)	507.146.350.654	General Administration Expenses
Beban Pemasaran	-	6.567.097.008	6.567.097.008	Marketing Expenses

**39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

**39. RELATED PARTY TRANSACTION**

The nature of relationship and type of material transactions with parties who have a special relationship with the following details:

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ Nature <i>of relationship Related Parties</i>	Transaksi/Transactions
1.	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	Setara Kas / Cash equivalent
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	Setara Kas / Cash equivalent
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	Setara Kas / Cash equivalent
4.	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia	Setara Kas / Cash equivalent
5.	Kementerian Perhubungan c.q. Karo Perencanaan	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia	Utang Piutang / Receivable - Payable
6.	PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia	Utang Piutang / Receivable - Payable

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI** (lanjutan) **39. RELATED PARTY TRANSACTION** (continued)

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ <i>Nature of relationship Related Parties</i>	Transaksi/ <i>Transactions</i>
7.	PT ASDP Indonesia Ferry	Entitas Lelang yang Dikelola Oleh Pemerintah R.I. / <i>Auction Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia</i>	Utang Piutang / <i>Receivable - Payable</i>
8.	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / <i>Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia</i>	Utang Piutang / <i>Receivable - Payable</i>
9.	PT Pupuk Kaltim (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / <i>Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia</i>	Utang Piutang / <i>Receivable - Payable</i>
10.	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Personil Kunci / <i>Common Key Management</i>	Utang Piutang / <i>Receivable - Payable</i>
11.	PT Sarana Gama Sejahtera	Personil Kunci / <i>Common Key Management</i>	Utang Piutang / <i>Receivable - Payable</i>
12.	PT Sarana Bandar Nasional	Entitas Anak / <i>Subsidiaries</i>	Penyertaan, Hutang Piutang / <i>Interest, Receivable - payable</i>
13.	PT Pelita Indonesia Djaya	Entitas Anak / <i>Subsidiaries</i>	Penyertaan, Hutang Piutang / <i>Interest, Receivable - payable</i>
14.	PT Rumah Sakit Pelni	Entitas Anak / <i>Subsidiaries</i>	Penyertaan, Hutang Piutang / <i>Interest, Receivable - payable</i>

**40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**

Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan (neraca):

**40. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES**

Here's an overview of the carrying value and the estimated fair value of financial instruments are stated in the statement of financial position (balance sheet):

31 Desember 2016/December 31, 2016			
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Value</i>	Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>	
<b>Aset Keuangan:</b>			<b>Financial Assets:</b>
Kas dan Setara Kas	885.614.536.587	885.614.536.587	Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	710.983.723.622	710.983.723.622	Cash and Cash Equivalents The Restricted
Penempatan jangka pendek	5.000.000.000	5.000.000.000	Short-term placements
Piutang Usaha	272.795.406.111	272.795.406.111	Account Receivables
Piutang Lain-Lain	7.889.986.555	7.889.986.555	Other Receivables
Uang muka, Biaya dimuka dan Pendapatan masih harus diterima	175.207.695.114	175.207.695.114	Non-Current Financial Assets - Others
<b>Jumlah</b>	<b>2.057.491.347.988</b>	<b>2.057.491.347.988</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan:</b>			<b>Financial Liability:</b>
Utang Usaha	157.386.238.502	157.386.238.502	Account Payables
Beban Akrual	254.025.085.880	254.025.085.880	Accrued Expenses
Utang Bank Jangka Pendek	40.085.652.287	40.085.652.287	Short Term Loan
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	87.105.016.372	87.105.016.372	Short Term Liabilities - Others
<b>Jumlah</b>	<b>538.601.993.040</b>	<b>538.601.993.040</b>	<b>Total</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN**  
(lanjutan)

**40. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES** (continued)

	<b>31 Desember 2015/December 31, 2015</b>		
	<b>Nilai Tercatat/ Carrying Value</b>	<b>Nilai Wajar/ Fair Value</b>	
<b>Aset Keuangan:</b>			<b>Financial Assets:</b>
Kas dan Setara Kas	732.418.276.306	732.418.276.306	Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Per Penempatan jangka pendek	101.672.900.006 5.000.000.000	101.672.900.006 5.000.000.000	sh and Cash Equivalents The Restricted Short-term placements
Piutang Usaha	185.894.832.123	185.894.832.123	Account Receivables
Piutang Lain-Lain	12.086.058.871	12.086.058.871	Other Receivables
Uang muka, Biaya dimuka dan Pendapatan	438.773.274.386	438.773.274.386	Non-Current Financial Assets - Others
<b>Jumlah</b>	<b>1.475.845.341.692</b>	<b>1.475.845.341.692</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan:</b>			<b>Financial Liability:</b>
Utang Usaha	172.010.297.808	172.010.297.808	Account Payables
Beban Akrual	194.091.043.035	194.091.043.035	Accrued Expenses
Utang Bank Jangka Pendek	235.632.112.034	235.632.112.034	Short Term Loan
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	158.360.401.624	158.360.401.624	Short Term Liabilities - Others
<b>Jumlah</b>	<b>760.093.854.501</b>	<b>760.093.854.501</b>	<b>Total</b>

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko dan perlindungan terhadap harta benda, hak milik dan nilai perseroan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya risiko. Penjabaran dari pelaksanaan manajemen risiko di PT PELNI (Persero) ditetapkan dalam suatu Pedoman menerapan Manajemen Risiko yang memuat kebijakan, pedoman umum, prosedur, instruksi kerja, dan formulir manajemen risiko.

Penetapan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko dimaksudkan untuk memberikan arah dan batasan serta tanggung jawab yang jelas terhadap pelaksanaan manajemen risiko dengan mengacu kepada sistem dan struktur ERM COSO.

Pelaporan penerapan manajemen risiko dilakukan berdasar hasil pemantauan (on going monitoring) yang dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan arahan manajemen telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan tersebut.

Evaluasi dan kaji ulang proses manajemen risiko dilakukan oleh Biro Hukum & Manajemen Risiko dan SPI secara berkala.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

*Risk management is a system of risk management and protection of property, property rights and the value of the company on the possibility of losses due to the risk. Elaboration of the implementation of risk management at PELNI PT (Persero) determined in an menerapan Guidelines Risk Management which includes policies, general guidelines, procedures, work instructions, and forms of risk management.*

*Adoption and implementation of Risk Management System is intended to provide direction and limitations as well as a clear responsibility for the implementation of risk management with reference to the system and the structure of COSO ERM.*

*Reporting of risk management is done based on the results of monitoring (on going monitoring) is conducted to ensure that the policies and directives of management has been implemented properly and overcome obstacles in the implementation of the policy*

*Evaluation and review of the risk management process carried out by the Bureau of Legal & Risk Management and internal control regularly*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

**a. Risiko Modal**

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo hutang dan ekuitas.

Struktur modal Perusahaan terdiri dari hutang, yang mencakup pinjaman yang dijelaskan pada Catatan 20, kas dan setara kas (Catatan 4), dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 27), cadangan (Catatan 28) dan saldo laba.

**b. Risiko Mata Uang Asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional Perusahaan yang terutama disebabkan karena volatilitas atau fluktuasi nilai tukar mata uang asing tersebut. Volatilitas ini menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban yang mempengaruhi pendapatan dan beban Perusahaan.

Kebijakan Perusahaan adalah melakukan pengelolaan dengan cara penyeimbangan arus kas dari aktivitas operasi dan pendanaan dalam mata uang Rupiah.

**c. Risiko Tingkat Suku Bunga**

Risiko tingkat suku bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari satu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga

Perusahaan memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Perusahaan akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka perusahaan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan

**d. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perusahaan gagal memenuhi kewajiban kontraktual kepada Perusahaan.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)

*In its operating, investing and financing activities, the Company are exposed to following financial risks: credit risks, liquidity risk and market risk and define those risks follows:*

**a. Risk Capital**

*The Company manages the capital risk to ensure that they will be able to continue to live, in addition to maximizing the benefit of shareholders through the optimization of the debt and equity balance.*

*The Company's capital structure consists of debt, which includes loans which are described in Note 20, cash and cash equivalents (Note 4), and the equity shareholders of the parent, comprising issued capital (Note 27), reserve (Note 28) and retained earnings.*

**b. Foreign Currency Risk**

*The risk of foreign currency exchange rates arises when transactions in currencies other than the functional currency of the Company which is mainly due to volatility or fluctuations in foreign currency exchange rates are. This volatility generate revenues and incur expenses that affect the Company's revenues and expenses.*

*The Company's policy is to manage by way of balancing cash flows from operating activities and financing in local currency.*

**c. Interest Rate Risk**

*Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of as financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.*

*The Company has short-term loans and long-term floating rate. The Company will closely monitor movements in market interest rates and if interest rates rise significantly, the company will negotiate interest rates with lenders.*

**d. Credit Risk**

*Credit Risks is the risk of suffering financial loss, should any of the company's customers fail to fulfil their contractual liabilities to the Company.*

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**e. Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Pada saat ini perusahaan dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Perusahaan memiliki kas dan bank dan aset keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka panjangnya, Perusahaan berharap adanya

**f. Risiko Pasar**

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko pasar, yaitu risiko terkendalanya akibat kurang armada kapal untuk melayani kegiatan tol laut.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)

**e. Liquidity Risk**

*Liquidity risk is the risk that the Company are unable meet its obligations when they fall due.*

*At Present, the company can pay all obligations as they fall due. The Company had cash and bank and other financial assets that can be used to meet short-term financial obligations. To meet the long-term financial obligations, the Company expected a sales increase in the future.*

**f. Market Risk**

*The Company is exposed to market risk, ie the risk terkendalanya due to lack of a fleet of ships to serve the activities of sea toll.*

**42. INFORMASI ARUS KAS**

Berikut ini dijelaskan mengenai aktivitas-aktivitas arus

**42. CASH FLOW INFORMATION**

*In the following explained about cash flow activities:*

	<b>2 0 1 6</b>	<b>2 0 1 5</b>	
<b>Aktivitas Operasi</b>			
Penerimaan kas dari pelanggan dan pihak terkait	3.424.307.968.034	2.478.523.457.271	<i>Cash receipts from customers and other interested parties</i>
Penerimaan Public Service Obligation	2.363.973.650.652	1.696.099.188.978	<i>Reception Public Service Obligation</i>
Pembayaran kepada pemasok	(3.037.676.163.180)	(2.982.751.008.979)	<i>Payments to suppliers</i>
Penerimaan kas Lain-lain	20.510.115.867	37.751.735.316	<i>Cash Receipts Others</i>
Pembayaran Biaya Operasional	(612.060.661.650)	(731.672.812.444)	<i>Payment of Operating Costs</i>
Pembayaran Biaya Overhead	(148.878.315.240)	(216.798.398.012)	<i>Payment of Overhead Costs</i>
Pengeluaran kas Biaya Lain-lain	(4.706.364.267)	(9.088.264.399)	<i>Cash expenditures for Other Costs</i>
Penempatan Deposito	(1.237.337.994.500)	(7.668.581.995)	<i>Placement of deposits</i>
Pencairan Deposito	-	-	<i>Disbursement of deposits</i>
Penempatan Uang Jaminan dari pelanggan	145.636.450.150	11.554.390.500	<i>Placement Guarantee Money from Customers</i>
Pencairan uang jaminan	(1.611.483.524)	(1.097.050.307)	<i>Placement Bail</i>
Pencairan uang jaminan bank	-	-	<i>Placement of Bank bail</i>
Pembelian persediaan	(107.472.275)	(1.530.099.051)	<i>Purchase supplies</i>
Penerimaan bunga	33.862.313.284	7.226.149.508	<i>Receipt of Interest</i>
Pembayaran bunga pinjaman	(26.842.172.033)	(28.350.586.075)	<i>Interest Payment</i>
Pembayaran pajak	(130.257.373.802)	(130.569.054.540)	<i>Tax Payment</i>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk aktifitas operasi</b>	<b>788.812.497.516</b>	<b>121.629.065.771</b>	<b>Total Net Cash used for operating activities</b>
<b>Aktivitas Investasi</b>			
Hasil Penjualan Aset Tetap	2.336.589.063	1.248.761.901	<i>Sales revenue Fixed Assets</i>
Pembelian Aset Tetap	(54.279.499.287)	(88.044.724.800)	<i>Purchase of Fixed Assets</i>
Perolehan Aset Dalam Penyelesaian	(12.235.000)	(36.962.680)	<i>Of construction in progress</i>
Pembelian Aset Lain-lain	(2.110.421.994)	(3.976.162.248)	<i>Purchase of Others Assets</i>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk aktifitas investasi</b>	<b>(54.065.567.218)</b>	<b>(90.809.087.827)</b>	<b>Total Net Cash used in investing activities</b>

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)  
AND IT'S SUBSIDIARIES**  
**NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

**42. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)**

**42. CASH FLOW INFORMATION (continued)**

	<b>2 0 1 6</b>	<b>2 0 1 5</b>	
<b>Aktivitas Pendanaan</b>			<b>Financing Activities</b>
Penerimaan pemerintah	-	500.000.000.000	Proceeds from government
Penerimaan pinjaman bank/pihak ketiga	35.557.498.850	32.200.000.000	Acceptance of bank loans / third party
Penerimaan (pengeluaran) deviden	-	(46.705.519)	Acceptance (expenditure to) dividend
Pembayaran utang bank	(7.797.345.252)	(94.396.803.870)	repayment of bank debt
<b>Jumlah Arus Kas Bersih digunakan untuk aktifitas pendanaan</b>	<b>27.760.153.598</b>	<b>437.756.490.611</b>	<b>Total Net Cash used in financing activities</b>
	<b>762.507.083.897</b>	<b>468.576.468.555</b>	
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	<b>839.091.176.312</b>	<b>370.514.707.757</b>	<i>Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year</i>
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	<b>1.601.598.260.209</b>	<b>839.091.176.312</b>	<i>Cash and Cash Equivalents at End of Year</i>

**43. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI  
KEUANGAN**

- a) Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pendapatan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Penerapan Prinsip Prinsip Good Corporate Governance (GCG), maka pada tanggal 17 Januari 2017 Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia memutuskan perubahan struktur organisasi Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No: 01.17/1/SK/HKO.01/2017 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.
- b) Pada tanggal 27 Februari 2017, kami telah menerima hasil pemeriksaan atas perhitungan Public Service Obligation (PSO) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dituangkan dalam berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Dana Penyelenggaraan KPP (Kewajiban Pelayanan Publik) hasil pemeriksaan atas perhitungan Public Service Obligation (PSO) tersebut adalah Rp(78.715.467.539,47). Angka tersebut kami jadikan sebagai dasar pemeriksaan atas akun pendapatan masih harus diterima.

**44. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 untuk diterbitkan pada 27 Februari 2017.

**43. SUBSEQUENT EVENTS**

- a) In order to improve the performance and income of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and the Application of Principles of Good Corporate Governance (GCG), then on January 17, 2017 Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia decided to change the organizational structure of the Company in accordance with the Decree of the Board of Directors No: 01:17 / 1 / SK / HKO.01 / 2017 About Structure Organisasi Owned Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.
- b) On February 27, 2017, we have received the results of the calculation of Public Service Obligation (PSO) of the Supreme Audit Agency (BPK) as outlined in the news Interrogation Calculation of Funds Implementation of the LTO (Public Service Obligation) the results of the calculation of Public Service Obligation (PSO ) is Rp (78,715,467,539.47). The figure we use as the basis of examination of the accrued revenue account.

**44. RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS**

The Company's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and has approved the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2016 to be published on February 27, 2017.

**INFORMASI TAMBAHAN/  
ADDITIONAL INFORMATION**

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - INDUK SAJA**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS) -PARENT ONLY**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

	<b>31 Desember 2016/ December 31, 2016</b>	<b>31 Desember 2015/ December 31, 2015</b>
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Setara Kas	787.943.514.533	644.904.278.771
Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	-	-
Penempatan jangka pendek	681.000.000.000	88.300.000.000
Piutang Usaha	231.570.047.706	122.325.675.418
(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp5.557.749.768 dan Rp3.950.107.144)		
Piutang Lain-Lain	7.288.723.888	11.695.604.712
(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp222.551.921 dan Rp202.093.926)		
Persediaan	453.345.558.806	567.419.751.697
Biaya Dibayar Dimuka	13.111.611.145	15.679.934.289
Uang Muka	21.752.032.951	58.169.121.769
Pendapatan masih harus diterima	79.924.873.112	308.268.892.673
Pajak Dibayar Dimuka	8.326.116.061	3.658.592.426
R/K dengan Perusahaan Anak	54.308.052.767	54.385.026.594
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>2.338.570.530.969</b>	<b>1.874.806.878.349</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Investasi	337.286.700.336	239.204.819.020
Properti Investasi	22.981.274.640	23.963.122.175
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 20.960.976.697 pada tahun 2016 dan sebesar Rp 19.794.417.172 pada tahun 2015)		
Aset Tetap	3.241.040.541.340	3.429.387.832.875
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp4.670.108.033.430 pada tahun 2016 dan sebesar Rp4.451.642.633.147 pada tahun 2015)		
Aset tidak berwujud	4.166.667.144	3.000.546.609
Aset lain-lain	127.541.732.873	136.401.217.918
Aset Pajak Tangguhan	32.812.034.981	20.579.574.712
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>3.765.828.951.314</b>	<b>3.852.537.113.309</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>6.104.399.482.283</b>	<b>5.727.343.991.658</b>
<b>ASSETS</b>		
<b>Current Assets</b>		
Cash and Cash Equivalent		
Restricted Cash and Cash Equivalent		
Short Term Investment		
Accounts Receables		
(Net of provision for impairment at December 31, 2016 and 2015 respectively by Rp5.557.749.768 and Rp3.950.107.144)		
Other Receables		
(Net of provision for impairment at December 31, 2016 and 2015 respectively by Rp222.551.921 and Rp202.093.926)		
Inventories		
Prepaid Expenses		
Advances Payment		
Accrued Revenue		
Prepaid Taxes		
Transaction with Subsidiaries		
<b>Total Current Assets</b>		
<b>Non - Current Assets</b>		
Investment		
Investment Property		
(Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2016 and 2015 respectively: Rp20.960.976.697 and Rp19.794.417.172)		
Fixed Assets		
(Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2016 and 2015 respectively: Rp4.670.108.033.430 and Rp4.451.642.633.147)		
Intangible Assets		
Other Assets		
Deferred Tax Assets		
<b>Total Non Current Assets</b>		
<b>TOTAL ASSETS</b>		

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - INDUK SAJA**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS) -PARENT ONLY**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

	<b>31 Desember 2016/ December 31, 2016</b>	<b>31 Desember 2015/ December 31, 2015</b>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			<b>Short-term Liabilities</b>
Utang Usaha	125.302.981.925	134.636.958.380	Accounts Payable
Biaya yang masih harus dibayar	260.361.024.817	100.599.129.620	Accrued Expenses
Pinjaman jangka Pendek	-	-	Short Term Loans
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo dalam satu	5.440.380.353	230.529.761.809	Current Maturity of Long-Term Loans
Utang Bunga	-	57.892.540.153	Interest Payables
Uang muka diterima	13.708.479.969	22.364.368.086	Advances Received
Pendapatan diterima dimuka	8.108.793.848	11.698.860.792	Unearned Revenues
Utang pajak	27.113.553.259	25.405.639.123	Tax Debt
Utang lain-lain	85.048.904.407	97.606.277.106	Other Payables
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>525.084.118.578</b>	<b>680.733.535.069</b>	<b>Total Short Term Liabilities</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			<b>Long-Term Liabilities</b>
Liabilitas Imbalan Paska Kerja	71.947.877.294	28.073.631.066	Employment Benefits Obligation
Pinjaman jangka panjang jatuh tempo lebih dari satu tahun	43.523.055.567	331.914.541.025	Non Current Maturity of Long-Term Loans
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>115.470.932.861</b>	<b>359.988.172.091</b>	<b>Total Long-Term Liabilities</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>640.555.051.439</b>	<b>1.040.721.707.160</b>	<b>Total Liabilities</b>
<b>Ekuitas</b>			<b>Equity</b>
Modal Saham (Modal dasar sebanyak 13.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 6.565.092 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham)	7.065.092.000.000	7.065.092.000.000	Capital State (As much as 13,000,000 shares Authorized, issued and fully paid shares 6,565,092 with a nominal value of Rp 1 000 000 per share)
Cadangan Umum	164.190.404.982	66.533.679.319	Reserves
Penyertaan Modal Pemerintah	564.951.174.642	143.585.642	Government Equity
Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya			Retained Earnings
Saldo Laba (Rugi)	(2.277.574.901.722)	(2.427.334.648.925)	Other Component Equity
Komponen Ekuitas Lainnya	(52.814.247.058)	(17.812.331.538)	Retained Earnings
	5.463.844.430.844	4.686.622.284.498	Other Component Equity
Kepentingan Non Pengendali	-	-	Non-controlling Interest
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>5.463.844.430.844</b>	<b>4.686.622.284.498</b>	<b>Total Equity</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>6.104.399.482.283</b>	<b>5.727.343.991.658</b>	<b>TOTAL EQUITY AND LIABILITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF - INDUK SAJA**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**  
**STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ONLY**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	
Pendapatan Usaha	3.606.084.155.383	3.375.244.022.068	<i>Operating Revenue</i>
Reduksi Pendapatan Usaha	(10.648.231.000)	(15.264.875.883)	<i>Reduction in Operating Revenues</i>
<b>Pendapatan Usaha Bersih</b>	<b>3.595.435.924.383</b>	<b>3.359.979.146.185</b>	<b>Gross Profit</b>
Beban Usaha	#####	(3.038.298.344.759)	<i>Operating Expenses</i>
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>	<b>466.216.173.193</b>	<b>321.680.801.426</b>	<b>Profit (Loss) Gross</b>
Beban Umum dan Administrasi	(352.390.471.815)	(308.437.503.541)	<i>General and Administrative Expenses</i>
Beban Pemasaran	(22.190.000)	-	<i>Marketing Expenses</i>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>113.803.511.378</b>	<b>13.243.297.885</b>	<b>Profit (Loss) Business</b>
Pendapatan (Beban Non Usaha)			<i>Financial Expenses</i>
Pendapatan Bunga	32.040.360.368	7.047.337.799	<i>Interest Income</i>
Pendapatan (Beban) lain-lain bersih	117.107.343.083	107.297.010.514	<i>Income (Expenses) Other Net</i>
Beban Bunga Pinjaman	(21.007.856.487)	(24.564.426.356)	<i>Interest Expense Loan</i>
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>241.943.358.342</b>	<b>103.023.219.842</b>	<b>Income (Loss) Before Taxes</b>
<b>Penghasilan (Beban) Pajak</b>			<b>Benefit (Expense) Income Tax</b>
Kini	(5.772.914.173)	(10.768.285.907)	<i>Current Tax</i>
Tangguhan	12.232.460.269	6.388.223.300	<i>Benefit Deferred Tax</i>
	<b>6.459.546.096</b>	<b>(4.380.062.607)</b>	
Laba (Rugi) Sebelum Kepentingan Non Pengendali	<b>248.402.904.438</b>	<b>98.643.157.235</b>	<b>Income (Loss) Before Non-Controlling Interests</b>
Bagian Laba Kepentingan Non Pengendali	-	-	<i>Non-Controlling Interests Profit</i>
<b>Laba (Rugi) Tahun Berjalan</b>	<b>248.402.904.438</b>	<b>98.643.157.235</b>	<b>Profit (Loss) Current Year</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>			<b>Other Comprehensive Income</b>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			<i>Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss</i>
- Pengukuran kembali atas Program imbalan pasti	(35.001.915.520)	(2.079.244.463)	<i>Remeasurement, On Defined Benefit - Plan</i>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	<i>Items That Will Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(35.001.915.520)	(2.079.244.463)	<i>Other Comprehensive Income For The Year After Tax</i>
<b>Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>213.400.988.918</b>	<b>96.563.912.772</b>	<b>Total Comprehensive Income Current Year</b>
<b>Laba Bersih Per Saham Dasar</b>	<b>30.205</b>	<b>13.668</b>	<b>Basic Earnings Per Share</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - INDUK SAJA**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**  
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ONLY  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year Ended December 31, 2015)  
(in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Additional Paid In Capital</b>	<b>Cadangan Umum / Reserve</b>	<b>Penyertaan Modal Pemerintah / Government Capital</b>	<b>Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan / Statusnya / Unappropriated</b>	<b>Akumulasi Laba (Rugi) / Profit (Loss), Accumulated Before Equity</b>	<b>Jumlah Ekuitas Sebelum Non- Pengendali / Non Controlling Interest</b>	<b>Beban (Manfaat) Komprehensif Lainnya / Other Comprehensive Income (Cost)</b>	<b>Jumlah Ekuitas / Total Equity</b>
<b>Saldo per 1 Januari 2015</b>	<b>6.565.092.000.000</b>	<b>55.530.473.000</b>	<b>143.585.642</b>	<b>(2.514.750.050.733)</b>	<b>4.106.016.013.909</b>		<b>4.106.016.013.909</b>
<b>Balance of January 1, 2015</b>							
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Net Income Current Year	-	-	-	98.643.157.235	98.643.157.235	-	98.643.157.235
Cadangan Umum / General Reserves (Sesuai Surat Kementerian BUMN/ Letters correspond Ministry of SOEs No. S-05/D4/MBU/07/2015)	11.003.200.319	-	-	(11.003.200.319)	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah / Government Capital (Sesuai Surat Kementerian BUMN /Letters correspond Ministry of SOEs No. S- 27/MBU/01/2016)	500.000.000.000	-	-	-	500.000.000.000	-	500.000.000.000
Penyaluran Program PKBL / PKBL Program Distribuition	-	-	-	(224.555.108)	(224.555.108)	-	(224.555.108)
Akumulasi Laba (Rugi) Komprehensif Lain / Other Comprehesive Income Profit (Loss)	-	-	-	-	-	(17.812.331.538)	(17.812.331.538)
Kepentingan Non-Pengendali / Non Controlling Interest	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>7.065.092.000.000</b>	<b>66.533.673.319</b>	<b>143.585.642</b>	<b>(2.427.334.648.925)</b>	<b>4.704.434.616.036</b>	<b>(17.812.331.538)</b>	<b>4.686.612.284.498</b>
<b>Balance of December 31, 2015</b>							
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Net Income Current Year	-	-	-	248.402.904.438	248.402.904.438	-	248.402.904.438
Cadangan Umum / General Reserves (Sesuai RUPSI/ In accordance AGM PT PELNI No.06/03/01/RUPSI/PELNI/V/2016)	98.643.157.235	-	-	(98.643.157.235)	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah / Government Capital (Sesuai Peraturan Pemerintah/As the Government Regulation No. 87 Tahun 2016)	-	564.807.589.000	-	-	564.807.589.000	-	564.807.589.000
Penyaluran Program PKBL / PKBL Program Distribuition	-	(986.431.573)	-	-	(986.431.573)	-	(986.431.573)
Akumulasi Laba (Rugi) Komprehensif Lain / Other Comprehesive Income Profit (Loss)	-	-	-	-	(35.001.915.520)	-	(35.001.915.520)
Kepentingan Non-Pengendali / Non Controlling Interest	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>7.065.092.000.000</b>	<b>164.190.404.981</b>	<b>564.951.174.642</b>	<b>(2.277.574.901.722)</b>	<b>5.516.656.677.902</b>	<b>(52.814.247.058)</b>	<b>5.463.844.430.844</b>
<b>Balance of December 31, 2016</b>							

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**  
**LAPORAN ARUS KAS - INDUK SAJA**  
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun  
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015)  
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**  
**STATEMENT OF CASH FLOWS - PARENT ONLY**  
For The Years Ended December 31, 2016  
(With Comparative Balance for The Year  
Ended December 31, 2015)  
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

	<b>2 0 1 6</b>	<b>2 0 1 5</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			<b>Cash Flows from Operating Activities</b>
Penerimaan Kas Dari Pelanggan Dan Pihak Terkait	2.581.586.647.397	1.820.401.201.790	Receipt from Customer
Penerimaan Public Service Obligation	2.363.973.650.652	1.696.099.188.978	Receipt from Public Service Obligation
Pembayaran Kepada Pemasok	(3.362.396.889.982)	(2.853.961.368.294)	Payment to Suppliers
Penerimaan Kas Lain-Lain	10.278.495.790	25.817.226.020	Cash Receipt Others
Pembayaran Biaya Operasional	(268.031.292.291)	(454.144.669.473)	Payment of Operating Expenses
Pembayaran Biaya Overhead	(87.417.788.774)	(166.253.868.931)	Payment of Overhead Expense
Pengeluaran Kas Biaya Lain-Lain	(4.352.728.940)	(8.413.409.477)	Receipt from Other Revenues
Penempatan Jangka Pendek	(1.237.205.194.500)	(7.801.381.995)	Short Term Placement
Penerimaan Uang Jaminan Dari Pelanggan	145.636.450.150	11.554.390.500	Receipt of Cash Collateral from Customer
Pencairan Uang Jaminan	(1.611.483.524)	(847.050.307)	Liquefaction of Cash Collateral
Pembelian Persediaan	(107.472.275)	(138.305.337)	Purchase of Supplies
Penerimaan Bunga	32.573.114.156	7.047.391.539	Interest Receipt
Pembayaran Bunga Pinjaman	(22.453.160.764)	(24.891.223.741)	Payment of Interest Loan
Pembayaran Pajak	(96.386.516.111)	(106.255.958.102)	Tax Payment
	<b>54.085.830.984</b>	<b>(61.787.836.830)</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			<b>Cash Flows from Operating Activities</b>
Hasil Penjualan Aset Tetap	2.336.589.063	1.181.761.901	Sale of Fixed Assets
Pembelian Aset Tetap	(1.670.949.285)	(731.402.188)	Purchase of Fixed Assets
Perolehan Aset Dalam Penyelesaian	(12.235.000)	(36.962.680)	Construction in Progress
Pembelian Aset Lain-Lain	-	-	Purchase of Other Assets
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>653.404.778</b>	<b>413.397.033</b>	<b>Net Cash Flows from Investment Activities</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>			<b>Cash Flows from Financing Activities</b>
Penerimaan Pemerintah	-	500.000.000.000	Receipt from Government
Penerimaan Pinjaman Bank / Pihak Ketiga	-	-	Receipt from Bank Loan / Third Parties
Penerimaan (Pengeluaran) Deviden	-	-	Receipt (Issuance) Dividends
Pembayaran Utang Bank	-	(90.000.000.000)	Payment of Bank Loan
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>410.000.000.000</b>	<b>Net Cash Flows from Financing Activities</b>
<b>PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>54.739.235.762</b>	<b>348.625.560.203</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	733.204.278.771	296.278.718.568	<b>BEGINNING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>787.943.514.533</b>	<b>644.904.278.771</b>	<b>ENDING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole





PT PELNI (Persero)

Jl. Gajah Mada No. 14, Jakarta Pusat, 10130

Telp: (021) 6334342

Fax: (021) 63854130

[infopelni162@pelni.co.id](mailto:infopelni162@pelni.co.id)

[www.pelni.co.id](http://www.pelni.co.id)